



PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Pamekasan Tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Pamekasan



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
5. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Dasar kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik baik yang bersumber dari APBD maupun alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 62



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya Sekretaris Daerah, Bapperida dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 memiliki tujuan:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Pamekasan, 24 Juli 2025

Daftar Isi

Sampul Depan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	xiv

BAB I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3	Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I-11
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.5	Sistematika Penyusunan RKPD	I-13

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1	Geografi.....	II-1
2.1.2	Aspek Demografi	II-27
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-32
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-48
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-61
2.3.3	Urusan Pemerintah Pilihan	II-88
2.3.4	Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-102
2.3.5	Capaian SPM Kabupaten Pamekasan	II-108

2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-124
2.4.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-124
2.4.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-126
2.4.3	Daya Saing Iklim Investasi	II-129
2.5	Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	II-130
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-131
2.6.1	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-131
2.6.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-139
BAB III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2	Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	III-5
3.1.3	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2026	III-8
3.1.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-8
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-16
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-21
3.2.3.1	Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	III-21
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-28
4.2.1	Telaah terhadap Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2026	IV-28
4.2.2	Telaah terhadap Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026	IV-33
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026	IV-42

4.3	Intervensi SPM	IV-135
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
Bab VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-1
Bab VII	Penutup	VII-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Nama Ibukota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024	II-3
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-4
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-6
Tabel 2.5	Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-7
Tabel 2.6	Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-10
Tabel 2.7	Nama, Panjang, dan Menara Sungai Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-11
Tabel 2.8	Nama-Nama Dam/Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.9	Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2018–2022	II-21
Tabel 2.10	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2021	II-21
Tabel 2.11	Data Lokasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pamekasan	II-22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2020–2024	II-28
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	II-29

Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2.15	Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Pamekasan Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.18	Indikator Kemiskinan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-45
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-48
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020-2024	II-55
Tabel 2.23	Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.24	Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.25	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Kabupaten Pamekasan 2020-2024	II-58
Tabel 2.26	Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.27	Penanganan Kebencanaan Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.28	Cakupan Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pamekasan.....	II-60

Tabel 2.29	Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel 2.31	Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.32	Capaian Urusan Pertanahan Kabupaten Pamekasan 2020-2024.....	II-65
Tabel 2.33	Penanganan Sampah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-71
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020-2024	II-72
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-73
Tabel 2.36	Tabel TFR.....	II-75
Tabel 2.37	Tabel Kontrasepsi Modern	II-75
Tabel 2.38	Tabel Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	II-76
Tabel 2.39	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.40	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.41	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.42	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.43	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	

	dan Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.44	Indeks SPBE Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.45	Koperasi Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.46	Kondisi Investasi Berskala Nasional Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan Tahun 2020- 2024	II-82
Tabel 2.48	Indikator Statistik Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-86
Tabel 2.53	Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.54	Indikator Pariwisata Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.55	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata dan Asal Pengunjung di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.....	II-90
Tabel 2.56	Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.57	Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pamekasan	II-94
Tabel 2.58	Jumlah Produksi Tanaman Buah (kw) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.....	II-95
Tabel 2.59	Produksi Menurut Jenis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Tanaman Di	

	Kabupaten Pamekasan (kwintal) tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.60	Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2023.....	II-96
Tabel 2.61	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.62	Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel 2.63	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pamekasan 2020-2024	II-99
Tabel 2.64	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan 2020-2024	II-100
Tabel 2.65	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.66	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.67	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2024.....	II-102
Tabel 2.68	Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2024.....	II-103
Tabel 2.69	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.70	Rasio PAD 2020-2024	II-104
Tabel 2.71	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2020-2024.....	II-105

Tabel 2.72	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2020-2024	II-105
Tabel 2.73	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 2020-2024	II-105
Tabel 2.74	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.75	Capaian Kinerja SPM Kabupaten Pamekasan 2020 s.d 2024	II-108
Tabel 2.76	Indeks Daya Saing Daerah	II-124
Tabel 2.77	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kuantil Pengeluaran Tahun 2024	II-125
Tabel 2.78	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.79	Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.80	Evaluasi RKPD Kabupaten Pamekasan 2024 sampai dengan Triwulan IV.....	II-130
Tabel 2.81	Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan.....	II-139
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2027.....	III-14
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2027.....	III-18
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2027	III-22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	IV-21
Tabel 4.2	Langkah Strategis Arah Kebijakan Jawa Timur Tahun 2026	IV-34
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Utama Jawa Timur Tahun 2026	IV-38
Tabel 4.4	Target Indikator Makro Kabupaten Pamekasan Tahun 2026	IV-41

Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-42
Tabel 4.6	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-76
Tabel 4.7	Penyelarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur.....	IV-126
Tabel 4.8	Pemetaan Program Prioritas RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026.....	IV-128
Tabel 5.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pamekasan Tahun 2026.....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-2

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026	I-2
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen	I-12
Gambar 2.1	Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	II-2
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Pamekasan	II-16
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Pamekasan	II-17
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Pamekasan.....	II-18
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pamekasan	II-19
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Abrasi di Kabupaten Pamekasan	II-20
Gambar 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024	II-27
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024	II-29
Gambar 2.9	Perbandingan IPM Pamekasan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024.....	II-33
Gambar 2.10	Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024	II-36
Gambar 2.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024	II-37
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024	II-39

Gambar 2.13	Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024	II-40
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024	II-46
Gambar 2.15	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024	II-46
Gambar 2.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024	II-67
Gambar 2.17	Indeks Kualitas Air Tahun 2020–2024	II-68
Gambar 2.18	Indeks Kualitas Udara Tahun 2020–2024	II-69
Gambar 2.19	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020– 2024	II-70
Gambar 2.20	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019	II-126
Gambar 2.21	Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2021 – 2024	II-127
Gambar 3.1	Capaian Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024	III-6
Gambar 3.2	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024	III-8
Gambar 4.1	Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan 2025-2029	IV-4
Gambar 4.2	Tujuan dan Sasaran Misi I Kabupaten Pamekasan 2025-2029.....	IV-7
Gambar 4.3	Tujuan dan Sasaran Misi 2 Kabupaten Pamekasan 2025-2029.....	IV-14
Gambar 4.4	Tujuan dan Sasaran Misi 3 Kabupaten Pamekasan 2025-2029.....	IV-16

Gambar 4.5	Tujuan dan Sasaran Misi 4 Kabupaten Pamekasan 2025-2029.....	IV-19
Gambar 4.6	Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Pamekasan 2025-2029.....	IV-20
Gambar 4.7	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	IV-28
Gambar 4.8	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	IV-31
Gambar 4.9	Sistem Wilayah Fungsional Jawa Timur.....	IV-32
Gambar 4.10	<i>Mindmap</i> Penyusunan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026.....	IV-121
Gambar 4.11	Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan.....	IV-123
Gambar 5.1	Milestone Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	V-2
Gambar 5.2	Tahapan Pembangunan Lima tahunan RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045.....	V-3

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Dokumen rencana pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta kapasitas keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah suatu usaha yang terencana dan sistematis dari setiap komponen daerah untuk mengubah kondisi yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Proses penyusunan perencanaan ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan tersebut dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran. Penyusunan RKPD bertujuan untuk memastikan adanya hubungan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang melibatkan baik pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. RKPD juga merupakan rincian dari RPJMD dan merujuk pada RPJPD.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2026



RKPD disusun dengan pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik, serta berorientasi Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sebagai dokumen tahunan dari RPJMD, RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, isu global, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Timur 2026, RPJPD Kabupaten Pamekasan dan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029 serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

RKPD Pamekasan tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029, dimana arah kebijakan pembangunannya adalah **“Memperkuat Landasan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi”**. Kebijakan pembangunan pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat segala

aspek yang mendukung pembangunan sosial ekonomi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

13. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

24. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 509 Seri D);

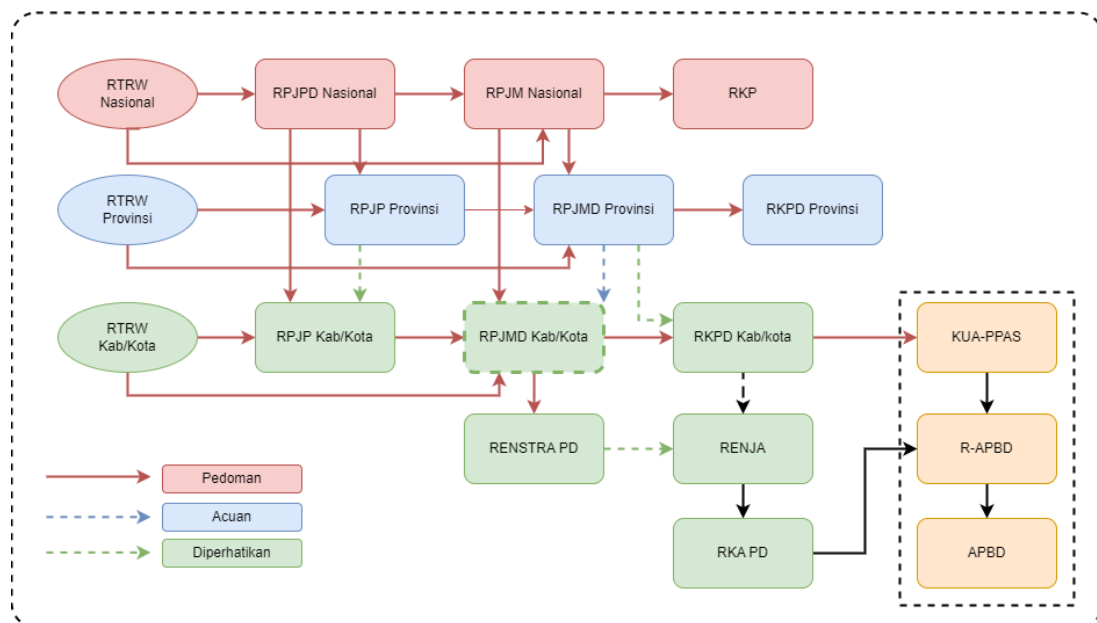
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen



Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencegahan Stunting, Pangan dan Gizi, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Pengurangan Risiko Bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Adapun Dokumen RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 sebagaimana dimaksudkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2024; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

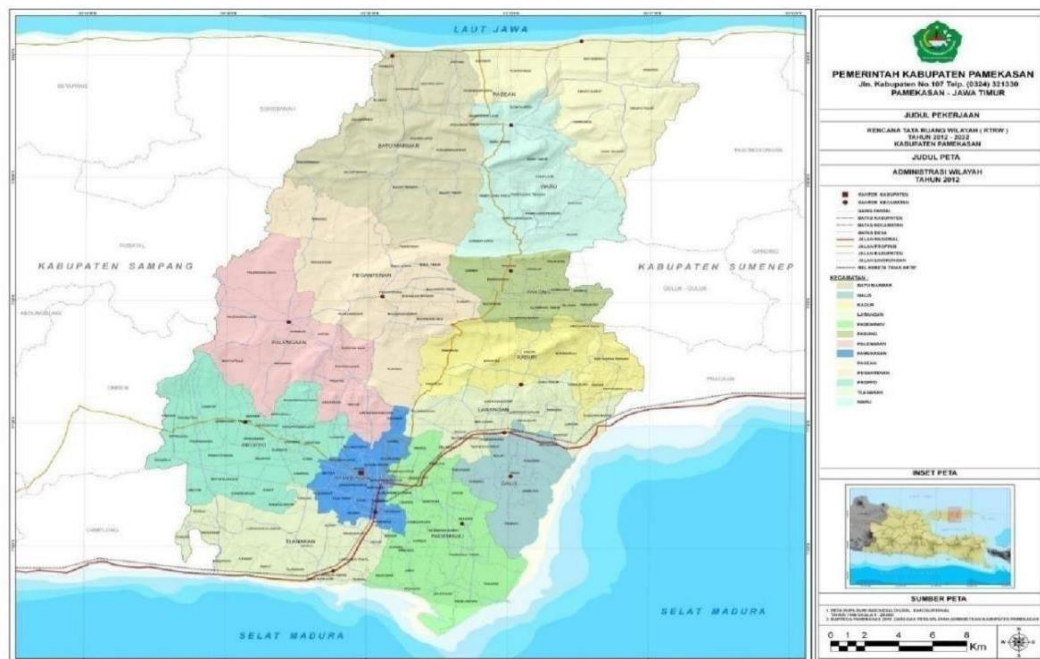
Aspek Geografi dan aspek Demografi merupakan salah satu gambaran karakter suatu daerah sehingga sangat penting aspek ini sebagai dasar untuk melaksanakan analisis sehingga di harapkan menjadi sebuah objektivitas penilaian untuk mengembangkan wilayah, dan juga bisa mengantisipasi ketika wilayah tersebut berada dalam wilayah rawan bencana.

2.1.1 Geografi

A. Letak, Luas, Dan Batas Wilayah

Madura merupakan suatu kepulauan yang berada di wilayah territorial administrasi Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang bernama Pamekasan memiliki potensi jangka Panjang dalam rencana pembangunan yang Panjang, karena memiliki luas wilayah yang besar, sebesar 79.230 ha secara astronomis berda pada 6051'-7031' Lintang selatan dan 113019' – 113058' bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara: Laut Jawa, sebelah timur: Kabupaten Sumenep, sebelah selatan: Selat Madura, sebelah barat: Kabupaten Sampang.

Gambar 2. 1
Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan



Sumber: RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032

Tercatat secara administrasi yang memasuki wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri sejumlah tiga belas kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Ditinjau dari luas wilayah kecamatan, yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 26.47 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan sedangkan yang paling besar ada di Kecamatan Batumarmar seluas 97.05 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan Berikut luas daerah:

Tabel 2. 1
Luas Daerah dan Nama Ibukota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km2)
Tlanakan	Branta Tinggi	48.10
Pademawu	Bunder	71.90
Galis	Galis	31.86
Larangan	Larangan Luar	40.86
Pamekasan	Patemon	26.47

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km ²)
Proppo	Proppo	71.49
Palengan	Palengan Laok	88.4
Pegantenan	Pegantenan	86.04
Kadur	Kadur	52.43
Pakong	Pakong	30.71
Waru	Waru Barat	70.03
Batumarmar	Tamberu	97.05
Pasean	Tlontoraja	76,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Adapun rincian jumlah Desa/Kelurahan pada kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024

KECAMATAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tlanakan	17	17	17	17	17
Pademawu	22	22	22	22	22
Galis	10	10	10	10	10
Larangan	14	14	14	14	14
Pamekasan	18	18	18	18	18
Proppo	27	27	27	27	27
Palengaan	12	12	12	12	12
Pegantenan	13	13	13	13	13
Kadur	10	10	10	10	10
Pakong	12	12	12	12	12
Waru	12	12	12	12	12
Batumarmar	13	13	13	13	13
Pasean	9	9	9	9	9

KECAMATAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pamekasan	189	189	189	189	189

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Informasi tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang menunjukkan angka yang sama dari tahun 2019 – 2023, tidak ada jumlah Desa/Kelurahan yang berkurang maupun yang bertambah jumlahnya. Dengan jumlah Desa/Kelurahan yang paling banyak pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan desa/Kecamatan yang paling banyak pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Proppo yaitu 27 Desa/Kecamatan. Sedangkan yang paling sedikit Pasean yaitu 9 Desa/Kelurahan.

Tabel 2. 3
Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024

KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK DARI IBUKOTA KAB	PERSENTASE TERHADAP LUAS KAB/KOTA
		(km)	
Tlanakan	22	7	6.1
Pademawu	7	9	9.1
Galis	6	9.1	4.0
Larangan	36	12.5	5.2
Pamekasan	15	2	3.3
Proppo	47	10	9.0
Palengaan	77	15.5	11.2
Pegantenan	312	15.6	10.9
Kadur	140	15.5	6.6
Pakong	250	24	3.9

KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK DARI IBUKOTA KAB	PERSENTASE TERHADAP LUAS KAB/KOTA
		(km)	
Waru	159	34	8.8
Batumarmar	16	47	12.2
Pasean	50	40.3	9.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Jika dilihat dari gambaran tabel di atas masing-masing tinggi wilayah kecamatan, Kecamatan yang menunjukkan angka yang paling rendah adalah Kecamatan Gelis dengan tinggi wilayah 6 m, sementara Kecamatan Pegantenan menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu 312 m. Sedangkan jarak wilayah Kecamatan terjauh dari Pusat kota Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Batumarmar, yakni 47.0 km sementara jarak kecamatan yang paling dekat dengan ibukota Kabupaten Pamekasan. Letak Kabupaten Pamekasan juga berada pada 6°57'-7°31' lintang selatan dan 113°19' - 113°58' bujur timur. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 79.230 ha².

B. Kondisi Topografi

Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah yang tersebar pada berbagai kelas lereng, Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722.ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Distribusi Kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEMIRINGAN LAHAN (ha)				JUMLAH
		0-15°	15-25°	25-40°	>40°	
1	Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2	Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3	Galis	3.186	-	-	-	3.186
4	Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5	Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6	Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7	Palengaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8	Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
9	Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10	Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11	Waru	4.774	1.509	-	720	7.003
12	Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13	Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
JUMLAH		59.964	14.291	2.253	2.722	79.230

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Jika di ukur secara kuantitatif luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 0-15% mendominasi kondisi lahan di Pamekasan, yaitu 59,96 ha sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola dengan baik karena menempatkan wilayah Pamekasan sebagai daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor.

Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, 9 kecamatan wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 mdpl atau pada kelompok

dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian gambaran umum kondisi geografis Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari luas wilayah.

Tabel 2. 5
Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE (%)	TINGGI DARI PERMUKAAN
				LAUT (m)
1	Tlanakan	4.810,00	6,10%	22
2	Pademawu	7.189,00	9,10%	7
3	Galis	3.186,00	4,00%	6
4	Larangan	4.086,00	5,20%	36
5	Pamekasan	2.647,00	3,30%	15
6	Proppo	7.149,00	9,00%	47
7	Palengaan	8.848,00	11,20%	77
8	Pegantenan	8.604,00	10,90%	312
9	Kadur	5.242,00	6,60%	140
10	Pakong	3.071,00	3,90%	250
11	Waru	7.003,00	8,80%	159
12	Batumarmar	9.707,00	12,30%	16
13	Pasean	7.688,00	9,70%	50
JUMLAH/TOTAL		79.230,00	100,00%	1.137

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, 2024

Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, 9 kecamatan wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 mdpl atau pada kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut:

1. Ketinggian 0-50 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9



- ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.
2. Ketinggian 50-100 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50 -100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan seluas 48,10 km², Kecamatan Pademawu seluas 71,90 km², Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha;
 3. Ketinggian 100 – 150 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha;
 4. Ketinggian 150-200 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150 - 200 m yaitu seluas 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha;
 5. Ketinggian 200-250 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200 - 250 m yaitu seluas 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas



- 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Baturem seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha;
6. Ketinggian 250-300 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha;
 7. Ketinggian 300 – 350 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300 - 350 m yaitu seluas 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha;
 8. Ketinggian 350 – 396 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.

C. Kondisi Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan tekstur dan jenis tanah. Menurut tekstur tanahnya, Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam tiga wilayah. Wilayah yang termasuk tekstur sedang seluas 90,5 persen, wilayah dengan tekstur halus sekitar 8,3 persen, dan 1,2 persen sisanya tergolong wilayah yang tanahnya bertekstur kasar. di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kelompok jenis tanah yaitu Kompleks Mediteran Merah, Kompleks Brown Forest, Kompleks Mediteran, Litosol, Aluvial Kelabu Kekuningan, Grumosol Kelabu, Kompleks Grumosol Kelabu, Asosiasi Hidromorf Kelabu, Asosiasi Litosol, dan Aluvial Hidromorf. Jenis tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan ini yaitu jenis tanah regosol sebesar 36. 063 ha.

Tabel 2. 6
Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

KECAMATAN	KEDALAMAN TANAH EFEKTIF				JUMLAH
	30 cm	30-60 cm	60-90 cm	> 90 cm	
Tlanakan	-	-	60.67	5,231.46	5,292.13
Pademawu	-	5.11	-	6,632.73	6,637.84
Galis	-	351.86	-	3,061.74	3,413.60
Larangan	208.37	2,303.67	1,019.91	549.98	4,081.93
Pamekasan	-	95.90	-	2,590.82	2,686.72
Propo	273.86	14.40	-	7,147.66	7,435.92
Palengan	969.54	678.50	556.72	5,586.42	7,791.18
Pegantenan	1,028.77	1,714.23	4,247.02	2,088.97	9,078.99
Kadur	2,457.61	133.56	2,889.70	-	5,480.87
Pakong	665.78	2,140.80	493.37	-	3,299.95
Waru	2,116.59	697.37	4,265.76	-	7,079.72
Batumarmar	5,027.08	823.47	4,002.62	10.26	9,863.43
Pasean	2,422.33	771.72	4,443.44	-	7,637.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Kabupaten Pamekasan secara geologi memiliki potensi kekayaan mineral bukan logam serta batuan, dengan jumlah terbatas yaitu sekitar 2.773,72 Ha. Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Pengelolaan yang baik dapat berkontribusi dalam upaya penunjang pelaksanaan pembangunan agar tercipta pencapaian tujuan pembangunan. Namun, selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal.

D. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pamekasan terdapat sungai sebanyak 13 yang melintasi beberapa wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Nama, Panjang, dan Menara Sungai Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

No	Nama Sungai	Wilayah Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Muara
1	Kloang	Kadur/Pamekasan	6	Selat Madura
2	Lembun Bunter	Palengaan/Proppo/Pamekasan	11	Selat Madura
3	Sbr. Payung	Proppo/Pamekasan	10	Selat Madura
4	Semajid	Pamekasan/Pademawu	16	Selat Madura
5	Jombang	Pamekasan	4	Selat Madura
10	Lesong	Batumarmar	6	Laut Jawa
11	Tamberu	Batumarmar	5	Laut Jawa
12	Angsokah	Pasean	6	Laut Jawa
13	Pasean	Pasean	8	Laut Jawa

Sumber: Dinas Pengairan UPTD Pamekasan, 2024

Berikut dibawah ini jumlah sumber mata air dan bendungan yang merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari:

Tabel 2. 8
Nama-Nama Dam/Bendungan di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024

No	Dam /Bendungan	Areal (Ha)	DEBIT L/det.		Lokasi
			Penghujan (Max)	Kemarau (Min)	
1	Dam Samiran	2.462	2.200	700	Ds.Kodik Kec. Proppo
2	Dam Klampar	189	147	38	Ds. Klampar – Proppo
3	Dam Toronan	53	40	19	Ds. Toronan – Pamekasan
4	Dam Blumbungan	121	137	37	Ds. Kowel – Pamekasan
5	Dam Grujugan	98	58	22	Ds. Grujugan – Larangan
6	Dam Bulay	238	185	23	Ds. Bulay – Galis
7	Dam Polagan	321	220	30	Ds. Polagan – Galis
8	Dam Duko I	98	60	5	Ds. Duko – Larangan
10	Dam Duko II	33	24	5	Ds. Duko – Larangan
11	Dam Lancar	138	69	3	Ds. Lancar – Larangan
12	Dam Taman Pakong	30	52	6	Ds. Seddur – Pakong
13	Dam Cenlece	51	43	8	Ds. Cenlece – Pakong
14	Dam Batu Kerbuy	190	136	25	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
15	Dam Angsoka	3	3	1	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
16	Dam Batu Bintang	100	136	25	Ds. Bt. Bintang- Batumarmar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagaimana hasil kajian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan pada bagian deskripsi



karakteristik wilayah, pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Pamekasan tahun 2022 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari:

- 1) Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah permukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).
- 2) Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean.
- 3) Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.
- 4) Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan

- Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.
- 5) Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.
 - 6) Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.
 - 7) Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.
 - 8) Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya

F. Wilayah Rawan Bencana

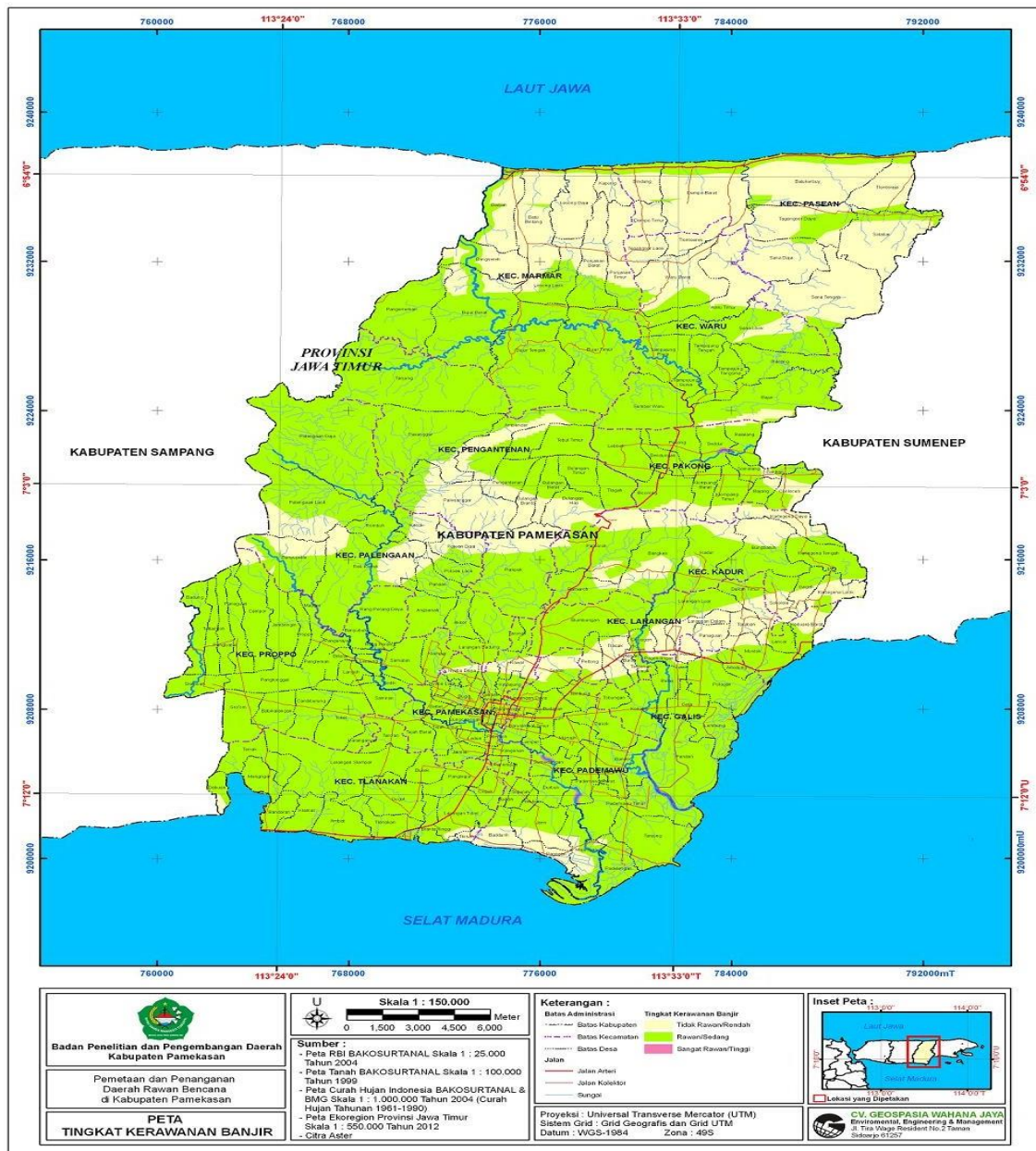
Setiap daerah itu memiliki potensi bencana yang berbeda, termasuk Kabupaten Pamekasan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu wilayah tengah, Selatan dan daerah perkotaan, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut harus waspada. Wilayah tengah itu diantaranya Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong dan Kecamatan Kadur. Sementara wilayah selatan adalah Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan sebagian Kecamatan Proppo. wilayah tengah yang dipetakan tersebut cenderung berpotensi rawan longsor, dan wilayah selatan berpotensi puting beliung. Sementara wilayah



perkotaan adalah rawan banjir saat musim hujan terutama di wilayah aliran sungai Kali Jombang dan Kali Semajid.

Delapan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan, masuk kategori rawan bencana alam. Delapan kecamatan tersebut selalu mengalami kejadian bencana setiap tahun. Delapan kecamatan tersebut adalah, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Larangan, Kadur, Galis dan Kecamatan Pakong. Jenis bencana yang terjadi di wilayah tersebut kebanyakan berupa angin puting beliung, tanah longsong dan kebakaran. Sementara kecamatan yang masuk kategori aman dari peristiwa bencana alam ialah kecamatan Kota Pamekasan. Berikut merupakan peta rawan bencana di Kabupaten Pamekasan.

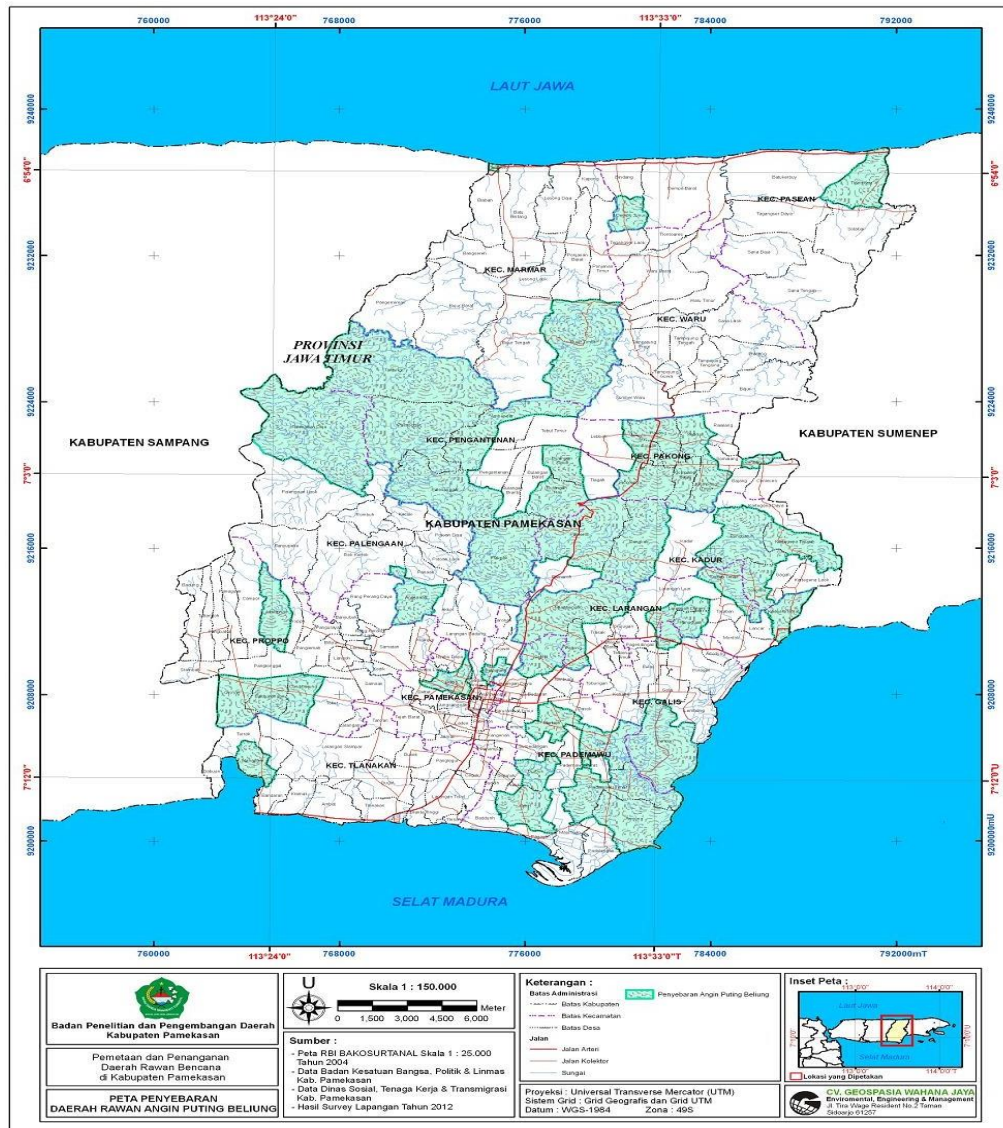
Gambar 2. 2
Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Pamekasan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan, 2023

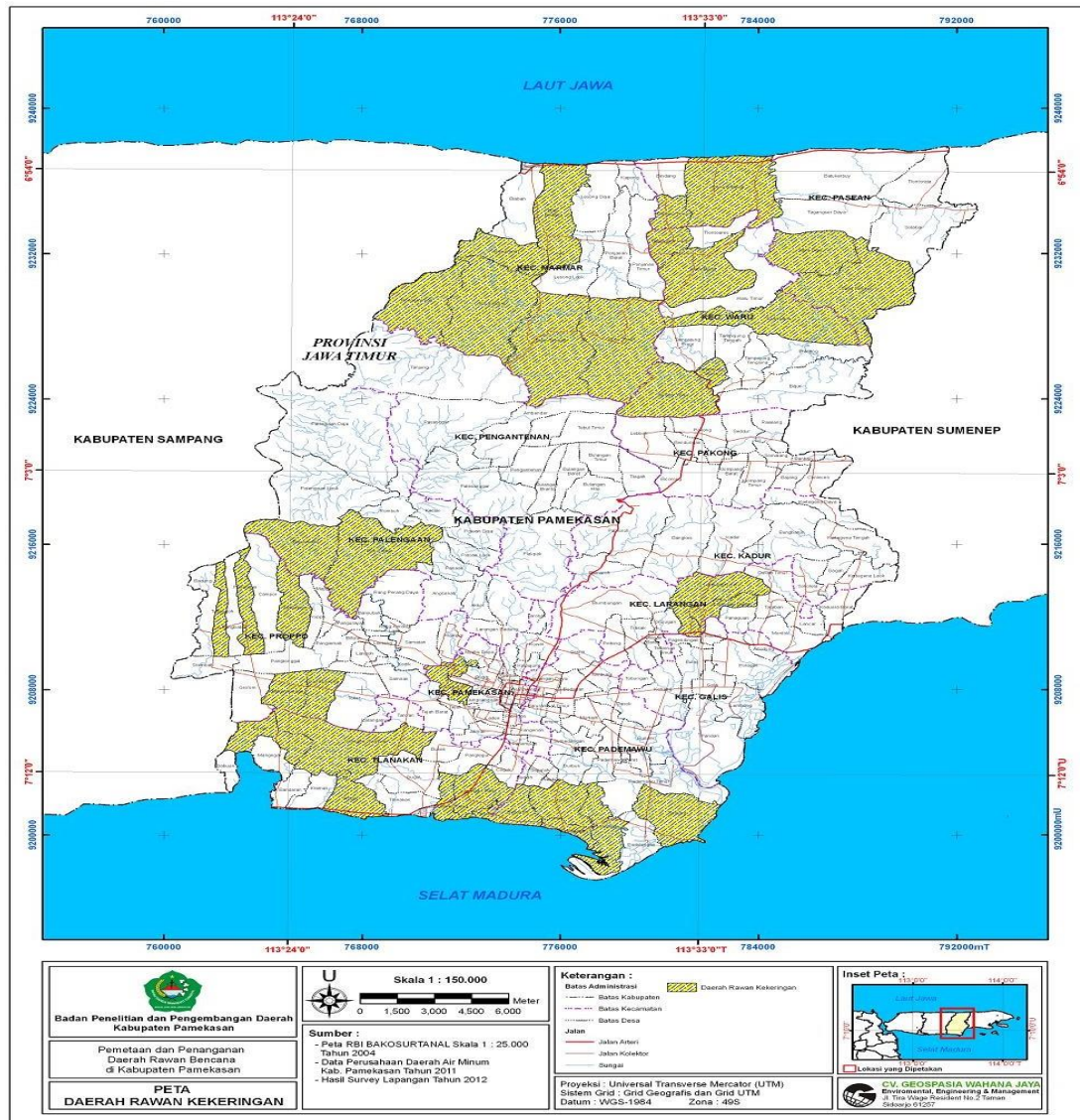
Kabupaten Pamekasan hampir sebagian besar merupakan wilayah rawan banjir namun dengan tingkat kerawanan sedang kecuali Kecamatan Waru, Pasean, dan Marmar yang memang daerahnya cenderung tinggi.

Gambar 2. 3
Peta Rawan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Pamekasan



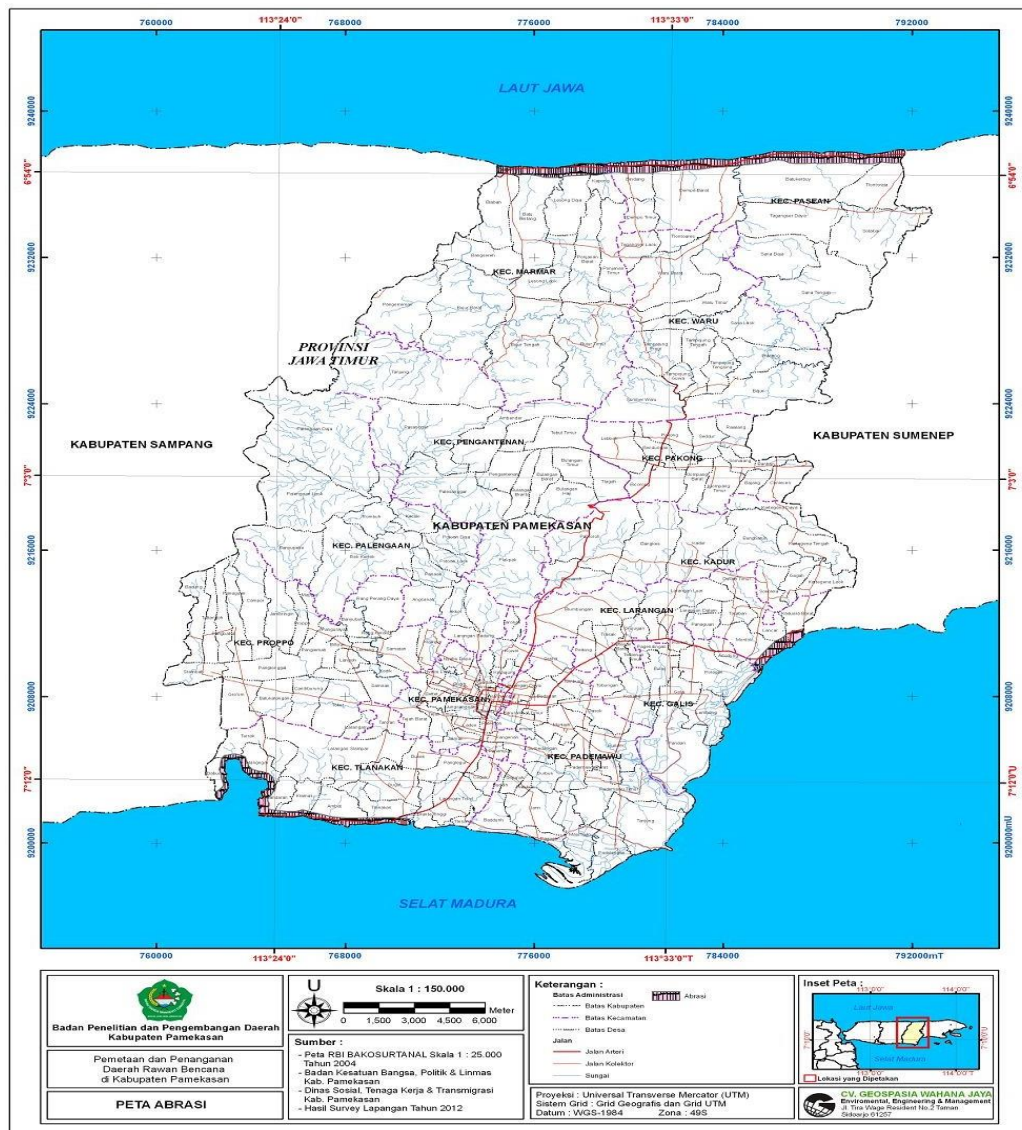
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan, 2023

Gambar 2. 5
Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pamekasan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan, 2023

Gambar 2. 6
Peta Rawan Bencana Abrasi di Kabupaten Pamekasan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan, 2023

Tabel 2. 9
Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam
Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Data kejadian bencana alam (kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dsb)	343	396	407	293	615
Angka korban bencana alam (jiwa)	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Data kejadian bencana alam mulai dari kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang, gempa bumi, kekeringan dsb yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dari data kejadian bencana di tahun 2018 terdapat 343 kejadian, sedangkan pada tahun 2019 mengalami 396 kejadian bencana, dan pada tahun 2020 mencapai 407 kejadian, namun 2021 menurun sebesar 293 kejadian, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2022 sebesar 615 kejadian.

Tabel 2. 10
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam (Desa/Kelurahan)	65	68	70	43

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tahun 2021 sejumlah 43, angka ini lebih kecil dari tahun sebelumnya di tahun 2020 yakni sebesar 70 Hal ini karena

meningkatnya kesadaran Masyarakat/Lembaga dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2. 11
Data Lokasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pamekasan

NO	KECAMATAN	DESA/	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUDUK
		KELURAHAN	Tanah Longsor	Banjir	Keker- ngan	Abrasi	Angin Puting Beliung	
1	Pademawu	1. Pademawu Timur	—	—	Mangunan Malangan	—	Mong-ging	6.697
		2. Sumedangan	—	Utara	—	—	—	3.235
		3. Lemper	—	Selatan	—	—	—	2.395
		4. Tanjung	—	—	Celeng	—	Roba-san	6.789
		5. Padelengan	—	—	Daya Tambak	—	Asam Bator	3.158
		6. Majungan	—	—	Morlaok	—	Parte-lon	2.01
		7. Jarin	—	—	Morsosok	—	Kota-lon	4.151
		8. Pagagan	—	—	Nung Gunung	—	Bong	2.122
		9. Baddurih	—	—	Pengajian	—	Koalas	1.907
2	Pameka-san	1. Kel. Gladak Anyar	—	V	—	—	—	11.325
		2. Kel.Parteker	—	V	—	—	—	3.881
		3. Kel.Patemon	—	V	—	—	—	4.163
		4. Kel.Jungcangan g	—	V	—	—	—	5.911
		5. Kel.Barkot	—	V	—	—	—	7.033
		6. Kel.Bugih	—	V	—	—	—	10.733
		7. Kel.Kangenan	—	V	—	—	—	4.66
		8. Desa Laden	—	V	—	—	—	5.665
3	Proppo	1. Candi Burung	—	—	V	—	V	3.794
		2. Batu Kalanagn	—	—	V	—	V	4.212
		3. Gro'om	—	—	V	—	V	2.859
		4. Campor	—	—	V	—	V	8.786
		5. Panaguan	—	—	V	—	V	5.803
		6. Jambringin	—	—	V	—	V	6.216
		7. Tattangoh	—	—	V	—	V	2.841
		8. Samiran	—	—	—	—	—	2.403
4	Galis	1. Galis	—	V	—	—	V	3.062
		2. Pandan	—	—	V	V	—	1.118
		3. Lembung	—	—	V	V	V	1.271
		4. Polagan	—	—	V	V	—	5.39

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	KECAMATAN	DESA/	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUD UK
		KELURAHAN	Tanah Longsor	Banjir	Kekeri-ngan	Abrasi	Angin Puting Beliung	
		5. Artodung	—	—	—	—	—	1.206
		6. Ponteh	—	—	—	—	—	2.891
		7. Pagendingan	—	—	—	—	—	2.689
		8. Bulay	—	—	—	—	—	3.05
		9. Konang	—	v	—	—	—	5.588
		10. Bulay	—	—	—	—	—	3.049
5	Pakong	1. Bicorong	—	—	—	—	V	4.248
		2. Klompang Barat	—	—	—	—	V	2.753
		3. Klompang Timur	—	—	—	—	V	3.046
		4. Cenleceng	—	—	—	—	V	3.4
		5. Bajang	—	—	—	—	V	1.751
		6. Banban	—	—	—	—	V	770
		7. Somalang	—	—	—	—	V	1.246
		8. Palalang	—	—	—	—	V	1.49
		9. Seddur	—	—	—	—	V	4.944
		10. Pakong	—	—	—	—	V	5.95
		11. Bandungan	—	—	—	—	V	2.516
		12. Lebbek	—	—	—	—	V	3.914
6	Pagante-nan	1. Plakpak	—	—	—	—	2	15.316
		2. Palesanggar	1	—	—	—	1	8.787
		3. Pagentenan	—	—	—	—	—	3.34
		4. Bulangan Branta	1	—	—	—	1	928
		5. Bulangan Barat	1	—	—	—	1	3.33
		6. Bulangan Haji	1	—	—	—	1	4.663
		7. Tlagah	1	—	—	—	—	2.698
		8. Bulangan Timur	—	—	—	—	1	2.174
		9. Tebul Timur	—	—	—	—	—	3.646
		10. Tebul Barat	—	—	—	—	—	1.66
		11. Ambender	2	—	—	—	4	5.817
		12. Pasanggar	2	—	—	—	3	12.271
		13. Tanjung	2	—	—	—	2	10.562
7	Larangan	1. Peltong	V	—	—	—	—	1.64
		2. Blumbungan	V	—	V	—	V	18.609
		3. Grujugan	V	—	—	—	—	2.378
		4. Larangan Luar	V	—	V	—	V	7.752

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	KECAMATAN	DESA/	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUD UK
		KELURAHAN	Tanah Longsor	Banjir	Kekeri-ngan	Abrasi	Angin Puting Beliung	
		5. Larangan Dalam	V	–	V	–	–	4.227
		6. Montok	–	V	–	V	–	3.27
		7. Taraban	–	–	–	–	–	1.419
		8. Duko Timur	–	–	V	–	–	2.669
		9. Lancar	–	–	–	–	V	1.782
		10. Kaduara Barat	–	–	V	V	–	4.578
8	Pasean	1. Tlonto Raja	V	V	–	V	V	12.874
		2. Sotabar	V	–	–	V	V	4.904
		3. Tagangser Daja	V	–	V	–	V	4.27
		4. BatuKerbuy	V	V	–	–	v	8.375
		5. Bindang	V	–	–	V	–	3.834
		6. Dempo Timur	V	–	V	–	V	4.8
		7. Dempo Barat	V	–	–	–	V	6.248
		8. Sana Tengah	V	–	–	–	V	6.294
		9. Sana Daja	V	–	–	–	–	6.269
9	Batumar-mar	1. Bujur Barat	3	–	10	–	–	7.823
		2. Pangereman	–	–	7	–	–	5.16
		3. Bangsereh	–	–	6	–	–	4.048
		4. Lesong Laok	2	–	4	–	–	2.277
		5. Ponjanan Barat	3	–	6	–	–	3.287
		6. Ponjanan Timur	3	–	7	–	2	6.237
		7. Kapong	2	–	4	–	1	2.619
		8. Lesong Daja	4	–	4	2	1	1.522
		9. Batu Bintang	4	–	12	1	2	8.934
		10. Blaban	–	–	12	1	1	5.592
		11. Tamberu	–	–	2	2	1	2.014
		12. Bujur Tengah	3	–	8	–	–	11.12
		13. Bujur Timur	4	–	8	–	1	11.406
10	WARU	1. Bajur	V	–	V	–	V	5.611
		2. Sumber Waru	V	–	V	–	V	5.999
		3. Tampojung Pregi	V	–	V	–	–	4.643
		4. Tampojung Guwa	V	–	V	–	–	1.327
		5. Tampojung Tengginah	V	–	V	–	–	2.77
		6. Ragang	V	–	V	–	–	3.145

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	KECAMATAN	DESA/	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUD UK
		KELURAHAN	Tanah Longsor	Banjir	Kekerangan	Abrasi	Angin Puting Beliung	
		7. Sana Laok	V	—	V	—	—	9.989
		8. Waru Timur	V	—	V	—	—	10.653
		9. Waru Barat	V	—	V	—	v	13.672
		10. Tlonto Ares	V	—	V	—	—	1.452
		11. Tagangser Laok	V	—	V	—	—	4.272
		12. Tampojung Tengah	V	—	V	—	—	2.512
11	PALENGA-AN	1. BanyuPelle	- Crokcok	Wak Duwak	- Pangongan -Buktana	—	—	6195
		2. Palengaan Laok	- Teklampok - Glugur II - Sek Gersek	—	—	—	—	4.35
		3. Palengaan Dajah	- Lon Dalem -Angsokah Tmr - Taretah II	—	—	—	—	4.1
		4. Rombuh	- Galisan -Klompang	—	—	—	—	750
		5. Kacok	- Lot Polot	—	—	—	—	950
		6. Poto'an Dajah	- Bungur - Poto'an	—	—	—	—	11.687
		7. Angsanah	—	—	-Nyato -Nong Kenik -Dubaja	—	—	1.228
		8. Rek Kerrek	—	—	-Rek Kerrek Laok I -Rek Kerrek Laok II -Gunung Tangis -Sardung -Slateh -Sumber Sari -Moroloh -Mangkon -Da'ajuh Laok	—	—	12.447

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	KECAMATAN	DESA/	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUDUK
		KELURAHAN	Tanah Longsor	Banjir	Keker- ngan	Abrasi	Angin Putting Beliung	
					-Pakes -Da'ajuh Dajah			
		9. Akkor	Bungtaleh	—	—	—	—	3.663
		10. Poto'an Laok	—	—	—	—	—	2.497
		11. Panaan	—	—	—	—	—	3.942
		12. Larangan Badung						10.159
12	KADUR	1. Kadur	V	—	V	—	—	7.665
		2. Pamoroh	—	—	V	—	V	4.961
		3. Pamaroh	V	—	V	—	V	7.686
		4. Bangkes	V	—	V	—	V	9.45
		5. Kertagenah Laok	—	—	V	—	V	3.152
		6. Bungbaruh	V	—	V	—	V	5.248
		7. Sokolelah	V	—	V	—	—	2.183
		8. Gagah	V	—	V	—	—	1.044
		9. Kertagenah tengah	V	—	V	—	—	4.124
		10. Kertagenah dajah	V	—	V	—	—	3.044
13	TLANA-KAN	1. DABUAN	—	—	V	—	V	2,486
		2. TERRAK	V	—	V	—	V	4,217
		3. MANGAR	—	—	V	—	V	2,902
		4. BANDARAN	—	—	V	V	V	6,614
		5. KRAMAT	V	V	V	V	V	4,066
		6. AMBAT	—	V	V	V	V	5,381
		7. BRANTA PESISIR	—	—	V	V	V	5,538
		8. TLANAKAN	—	V	V	V	V	3,273
		9. BRANTA TINGGI	—	—	V	V	V	2,297
		10. TLESAH	—	—	V	V	V	1,295
		11. LAR. TOKOL	—	—	V	—	V	8,067
		12. CEGUK	—	—	V	—	V	2,134
		13. PANGLEGUR	—	—	V	—	V	4,977
		14. BUKEK	—	V	V	—	V	1,645
		15. GUGUL	—	V	V	—	V	3,776
		16. LAR. SLAMPAR	—	—	V	—	V	4,964
		17. TARO'AN	—	—	V	—	V	2,42

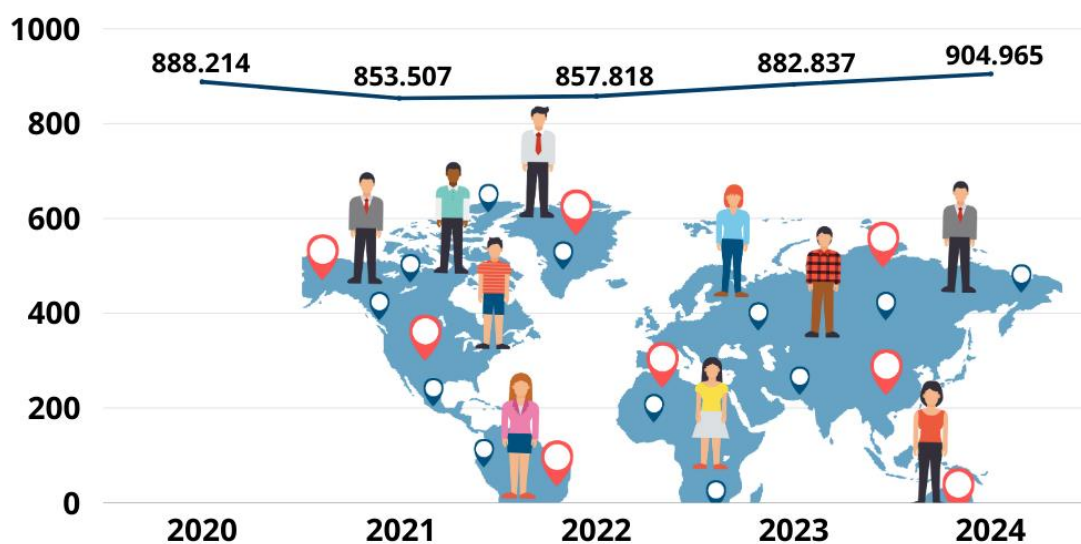
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

2.1.2 Aspek Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2. 7
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik

penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Pamekasan tahun 2024 sebanyak 904.965 jiwa. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 sebanyak 882.837 jiwa.

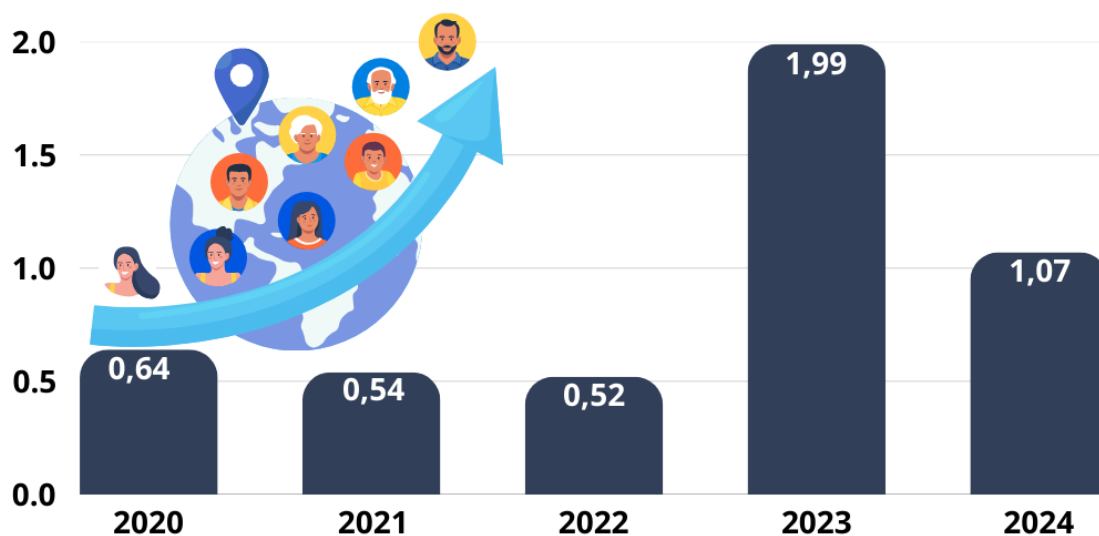
Tabel 2. 12
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk	Jiwa	888.214	853.507	857.818	882.837	904.965
Laki-laki	Jiwa	416.961	418.577	420.612	431.891	442.986
Perempuan	Jiwa	433.096	434.930	437.206	450.946	461.979
Rasio Jenis Kelamin	%	94,62	96,24	96	95,77	95,89

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk jika didasarkan ada kategori gender, maka perempuan memiliki jumlah lebih besar dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2024 hanya berjumlah 442.986 orang sedangkan perempuan berjumlah 461.979 orang. Perkembangan jumlah rasio jenis kelamin bergerak naik secara perlahan. Pada tahun 2024 adalah 95,89 yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 95-96 laki-laki.

Gambar 2. 8
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020–2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2025

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga berada di 0,52% pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat tajam menjadi 1,99%. Namun turun kembali pada tahun 2024 menjadi 1,07%.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	36.509	34.565	71.074
2	05-09	39.788	37.978	77.766
3	10-14	35.766	33.704	69.470
4	15-19	27.305	25.484	52.789
5	20-24	34.202	33.665	67.867
6	25-29	37.025	36.244	73.269
7	30-34	32.030	32.134	64.164

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
8	35-39	31.642	33.898	65.540
9	40-44	32.308	36.433	68.741
10	45-49	31.664	35.164	66.828
11	50-54	28.266	29.665	57.931
12	55-59	23.009	26.462	49.471
13	60-64	19.376	22.717	42.093
14	65-69	13.308	15.597	28.905
15	70-74	10.019	11.287	21.306
16	75+	10.769	16.982	27.751
Jumlah Total		442.986	461.979	904.965

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan terbanyak tahun 2024 adalah penduduk dengan rentang usia 5-9 tahun dengan jumlah 77.766 jiwa, selanjutnya penduduk dengan rentang usia 25-29 tahun dengan jumlah 73.269 jiwa. Banyaknya penduduk di usia produktif ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2. 14
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)
1	Tlanakan	68.231
2	Pademawu	88.780
3	Galis	31.510
4	Larangan	59.970
5	Pamekasan	92.623
6	Proppo	93.345
7	Palengaan	88.656
8	Pegantenan	79.562
9	Kadur	51.396
10	Pakong	39.021
11	Waru	69.942
12	Batumarmar	81.681
13	Pasean	60.248



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

**Kabupaten
Pamekasan**

904.965

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | II - 30 pembangunan manusianya semakin baik.

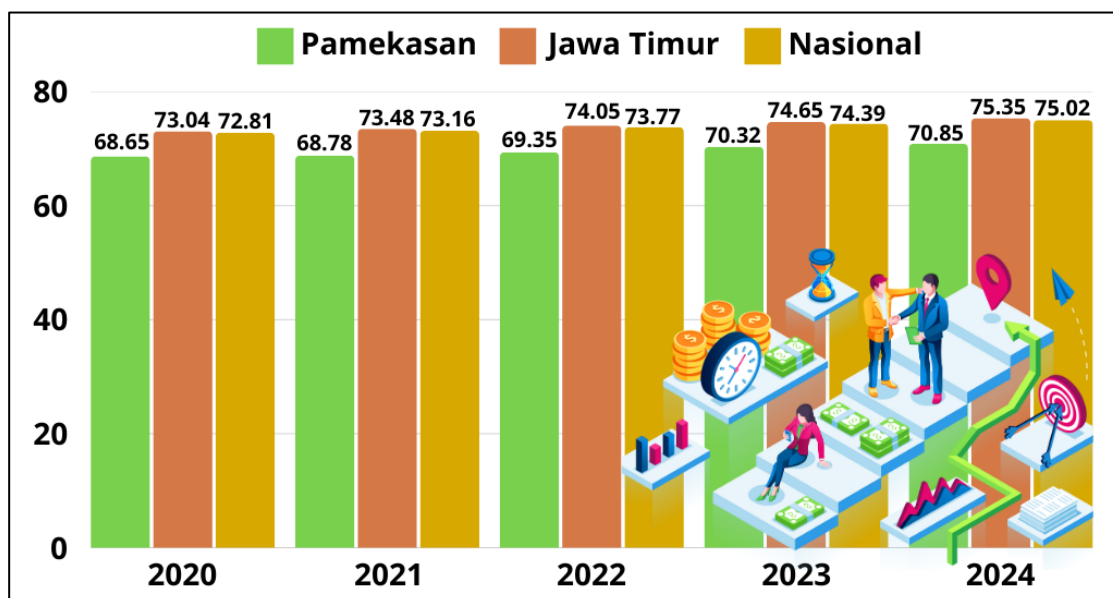
UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

IPM juga dapat menjadi tolak ukur pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota termasuk Kabupaten pamekasan. Hal-hal yang mendorong pentingnya peningkatan IPM, diantaranya:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam lima tahun terakhir pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Pamekasan meningkat dari 68,65 pada tahun 2020 menjadi 70,85 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Pamekasan rata-rata tumbuh sebesar 0,79 persen per tahun. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya berada pada level “sedang” berubah menjadi level “tinggi”, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 9
Perbandingan IPM Pamekasan, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Pada tahun 2024, tiga dimensi penyusun IPM mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Pengeluaran Riil per Kapita naik sebesar 391 ribu rupiah dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dari 7,15 tahun menjadi 7,17 tahun pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,01 tahun. Sementara Umur Harapan Hidup juga meningkat dari 73,51 tahun menjadi 73,66 tahun. Hanya penurunan angka pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 IDG Kabupaten

Pamekasan sebesar 55,85 turun pada tahun 2024 menjadi 51,80, hal ini dikarenakan diskriminasi gender masih terlihat dalam beberapa aspek kehidupan seperti dalam keanggotaan DPRD terlihat masih 1 orang yang menduduki jabatan tersebut, masih terdapat norma budaya patriaki yang masih kuat seperti perempuan hanya boleh mengurus rumah tangga dan tidak diizinkan bekerja oleh pasangannya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 15
Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten
Pamekasan Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,93	73,00	73,28	73,51	73,66
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,64	13,65	13,67	13,68	13,69
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,69	6,7	6,88	7,15	7,17
Pengeluaran Perkapita/Thn Disesuaikan	(Ribu Rp)	8.739	8.804	8.967	9.420	9.811
Indeks Kesehatan	Indeks	0,73	0,73	0,74	0,82	0,83
Indeks Pendidikan	Indeks	0,6	0,6	0,61	0,62	0,62
Indeks Daya Beli (PPP)	Indeks	0,66	0,66	0,67	0,68	0,70
Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Indeks	68,65	68,78	69,35	70,32	70,85
Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,28	86,6	86,99	87,28	87,6
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,01	52,44	55,54	55,85	51,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

B. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menjadi salah satu ukuran proporsi penduduk dengan range usia dari 15 tahun ke atas yang dianggap mampu dan memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis huruf latin dan lainnya.

Tabel 2. 16
Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf	88,09	89,24	87,5	87,24	92,06

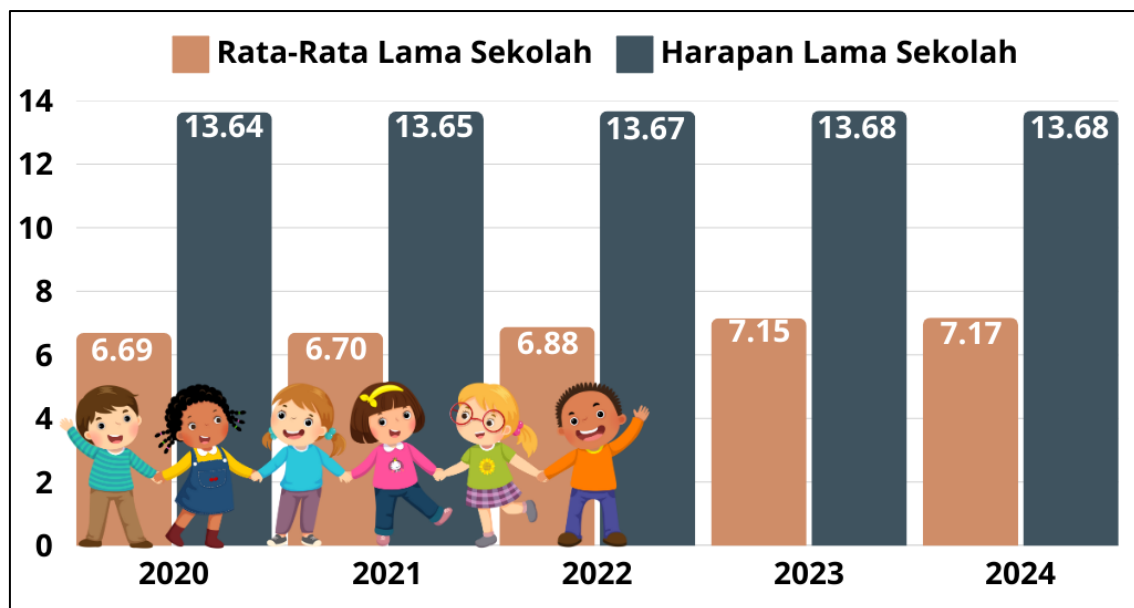
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Angka melek huruf Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 88,09. Namun angka tersebut naik di tahun 2021 menjadi 89,24. Sedangkan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 87,5. Kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 87,24. Pada tahun 2024 angka melek huruf Kabupaten Pamekasan naik menjadi 92,06.

C. Rata–Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 10
Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Pamekasan rata - rata meningkat 0,09 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,76 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun (0,28 persen) dibandingkan tahun 2023.

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2024, HLS Kabupaten Pamekasan mencapai 13,69 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga D1. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 7,17 tahun yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pamekasan usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas VII atau kelas VIII.

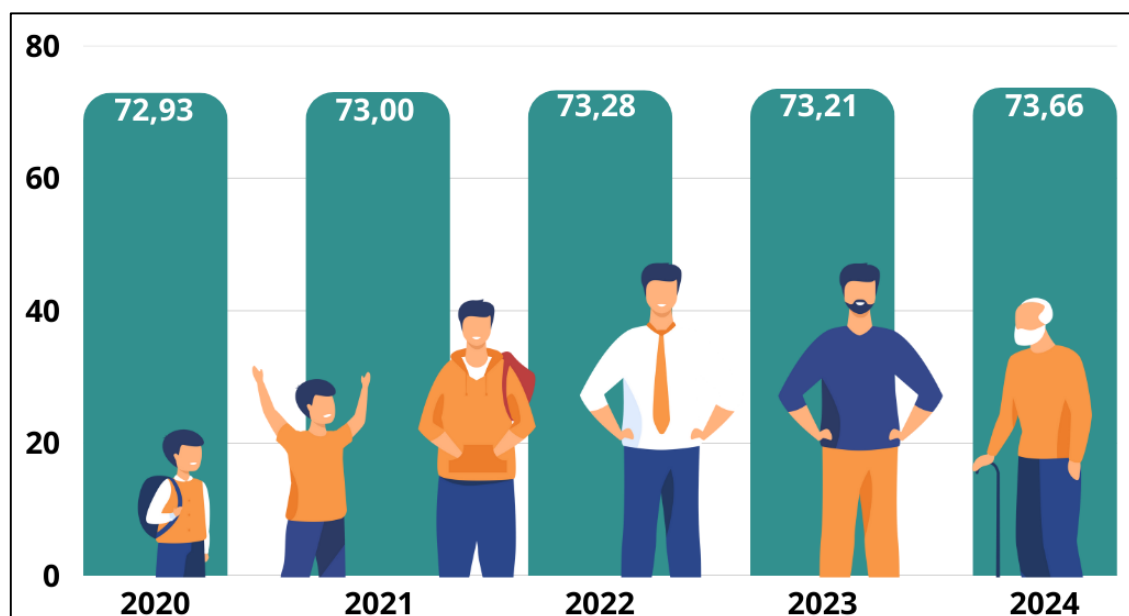
D. Usia Harapan hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan social ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 2. 11
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

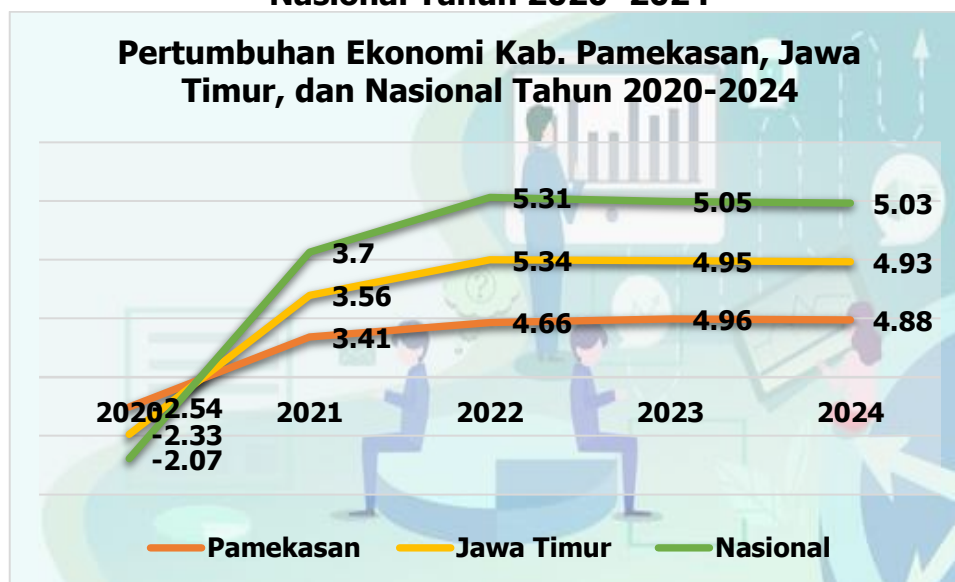


Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Kabupaten Pamekasan telah meningkat sebesar 0,73 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Pamekasan adalah 72,93 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,66 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 73 sampai 74 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,15 tahun (0,20 persen) dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Pamekasan.

E. Pertumbuhan Ekonomi

Hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Gambar 2. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, & Nasional Tahun 2020–2024



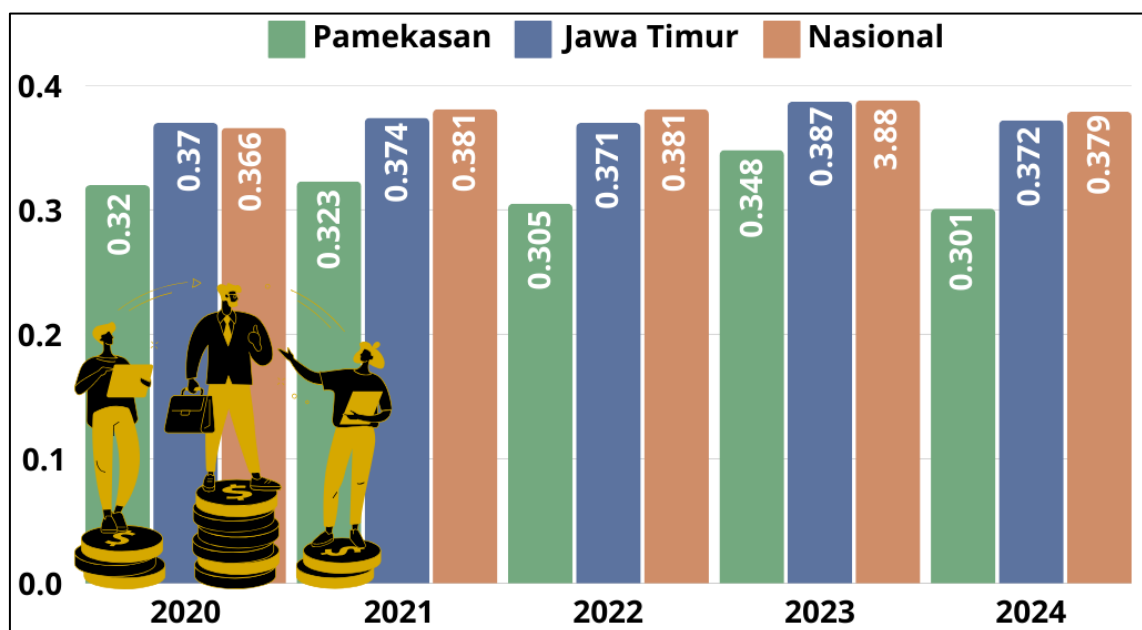
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pertumbuhan ini turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2024 masih di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

F. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah masalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan dalam hal ini Kabupaten Pamekasan.

Gambar 2. 13
Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori



ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa indeks gini di Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,32-0,36). Pada tahun 2019 sebesar 0,32, kemudian pada tahun 2021 sebesar 0,323. Tahun 2022 indeks gini Kabupaten Pamekasan sebesar 0,305. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,348. Pada tahun 2024 kembali turun menjadi 0,301.

Apabila peningkatan gini rasio terus dibiarkan tentunya bisa berdampak kurang baik. Ketimpangan pendapatan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah perlu menjadi perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2024 selalu lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Keadaan ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan, namun dengan peningkatan masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan kelompok ekonomi menengah ke atas.

G. Presentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Tabel 2. 17
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Pamekasan Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	%	10,19	9,71	9,57	9,36	8.57
Provinsi Jawa Timur	%	11,09	11,40	10,38	10,35	9.79
Kabupaten Pamekasan	%	14,6	15,3	13,93	13,85	13.41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 adalah 13,41 persen, turun 0,44 poin dari 13,85 persen pada tahun 2023. Secara keseluruhan, selama periode 2010- 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan menurun sebesar 9,03 poin, dari 22,44 persen pada tahun 2010 menjadi 13,41 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.18
Indikator Kemiskinan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita	357.074	368.259	392.345	431.127	467.493
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	129,41	137,12	126,02	126,43	123,46
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,89	1,90	2,05	1,48	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,37	0,40	0,41	0,24	0,14

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Pamekasan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp467.493,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis



Kemiskinan bertambah sebesar Rp36.366,00 per kapita per bulan yaitu Rp431.127,00 per kapita sebulan atau meningkat sebesar 8,43 persen.

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk sejumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Karena jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin adalah 5,17 orang, maka secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 2.416.939,00- per rumah tangga per bulan. Garis kemiskinan per rumah tangga ini meningkat sebesar Rp. 261.304,00 per rumah tangga pada Maret 2023 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 2.155.635,00 per rumah tangga per bulan. Peningkatan ini selain karena meningkatnya Garis Kemiskinan per kapita juga meningkatnya rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dari 5,00 jiwa pada tahun 2023 menjadi 5,17 jiwa di tahun 2024.

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Semakin kecil kedua indikator tersebut, semakin fokus dan efisien pengambilan kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan.

Selama periode 2010-2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pamekasan memiliki kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2010-2024 untuk Kabupaten Pamekasan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, tidak terlalu bervariasi.



Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2010 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1) dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan relatif homogen dibandingkan kondisi tahun 2010 (berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan/P2).

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten Pamekasan periode Maret 2024 antara lain adalah:

1. Pada saat pendataan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi pengeluaran-pengeluaran ekstrim pada kelompok masyarakat desil 1. Pengeluaran yang ekstrim ini bukan pengeluaran rutin yang pada umumnya dikonsumsi seperti Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri merupakan pengeluaran tahunan yang secara umum jarang dikeluarkan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan tersier masyarakat. Namun hal ini justru terjadi pada kelompok pengeluaran bawah (desil 1).
2. Pengeluaran untuk makanan jadi yang meningkat cukup tinggi di desil 1 menunjukkan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya cenderung untuk membeli bahan makanan/ memasak sendiri menjadi lebih banyak porsi untuk mengonsumsi makanan dan minuman jadi.

Program-program peningkatan kesejahteraan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terbukti cukup berhasil dalam menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan. Beberapa program pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah dilakukan untuk upaya pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim diantaranya adalah : Mengadakan program pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pekerja berdasarkan klaster kompetensi, Melaksanakan kegiatan Gebyar Bazar UMKM, dan membantu produk UMKM lebih banyak lagi agar bisa masuk Pasar Modern (Indomaret)



H. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2. 19
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,28	86,6	86,99	87,28	87,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

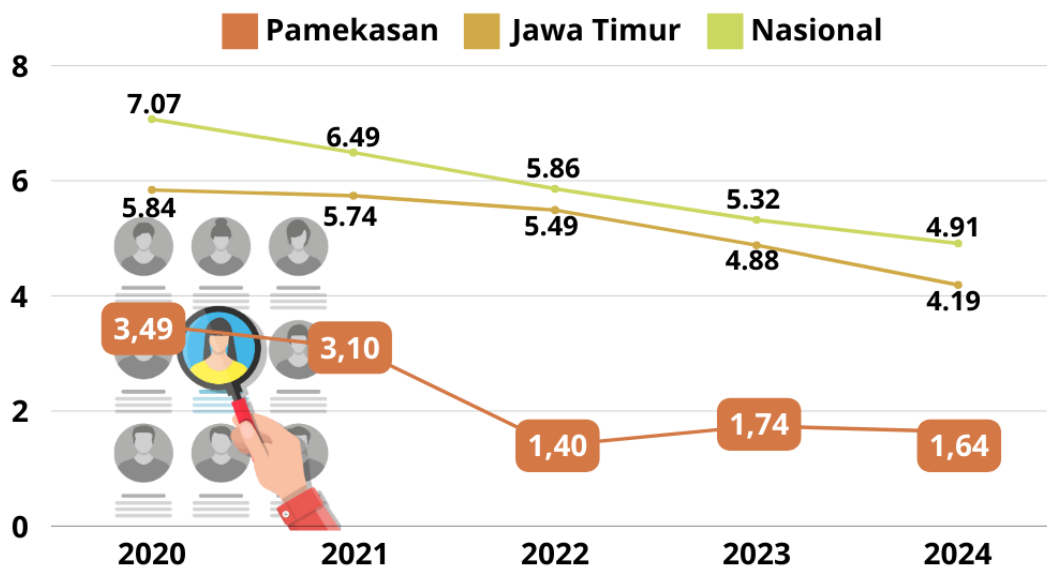
Terlihat bahwa indeks pembangunan gender Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan signifikan. Dari sebesar 86,28 di tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan hingga di angka 87,60 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia semakin setara antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan IPG ini mengartikan bahwa kesehatan para perempuan di Kabupaten Pamekasan semakin membaik. Selain itu juga didukung dengan meratanya akses perempuan terhadap pendidikan, serta kondisi perempuan yang semakin mampu secara ekonomi. Sehingga hal ini menunjukkan capaian yang positif, yang perlu dipertahankan dengan strategi-strategi dan program yang tepat untuk kembali meningkatkan kondisi kesetaraan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pamekasan.

I. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar 2. 14

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024



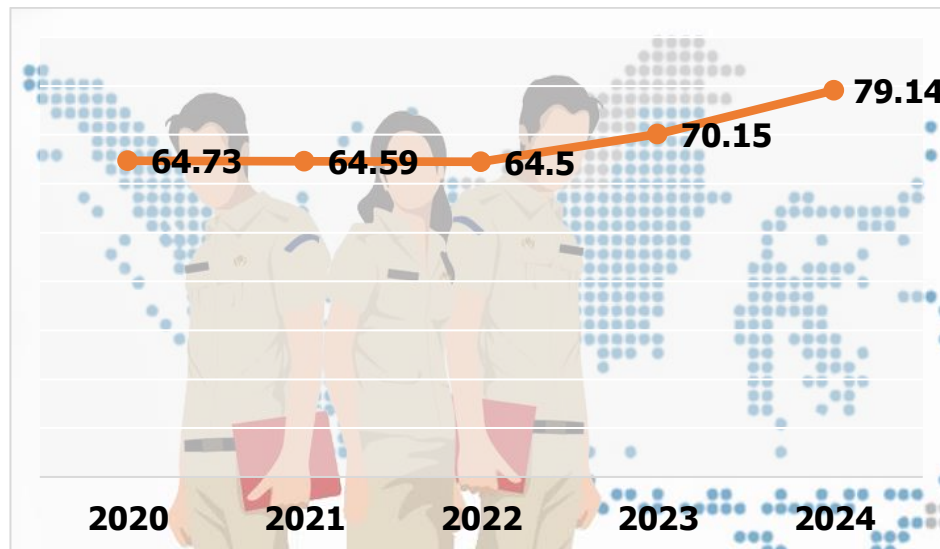
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan nilai TPT Kabupaten Pamekasan sebesar 1,64 persen, terendah kedua TPT di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti dari setiap 100 orang Angkatan kerja, terdapat sekitar 1 atau 2 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai, atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

Gambar 2. 15
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024



Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Pamekasan, 2025

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pamekasan dalam dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Nilai indeks pada tahun 2020 sebesar 64,7 . Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,14 poin dari capaian tahun 2020 menjadi 64,59. Pada tahun 2022 penurunan kembali terjadi sehingga menjadi 64,5. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 70,15 kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 79,14. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mencerminkan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Faktor internal meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan prosedur, pengurangan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan komitmen dan kepemimpinan. Faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta penerapan teknologi informasi. Peningkatan ini tentunya hasil dari kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka melayani Masyarakat.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang berkondisi baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase kualifikasi Guru berpendidikan minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62
Angka Partisipasi Kasar					
SD/MI	108,76	107,74	106,87	104,04	103,54
SMP/MTs	87,38	92,52	88,03	94,65	88,31
SMA/SMK	80,27	80,84	88,99	89,05	78,84
Angka Partisipasi Murni					
SD/MI	97,66	97,27	97,4	97,26	98,11
SMP/MTs	76,07	78,14	78,05	80,33	76,43
SMA/SMK	60,88	62,52	62,05	50,72	56,76
Angka Partisipasi Sekolah					

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	97,3	70,13	95,86	98,82	99,31
SMP/MTs	94,85	54,4	99,08	97,08	97,8
SMA/SMK	69,81	n.a.	n.a	75,13	65,92
Kondisi Bangunan Sekolah dalam Keadaan Baik					
SD/MI	3188	3322	3400	3471	-
SMP/MTs	889	978	1033	1078	-
Rasio Guru terhadap Murid menurut Jenjang Pendidikan					
Sekolah Dasar (SD)	10,39	11,05	12,39	12,18	
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7,62	6,9	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama	9,75	10,4	11,71	11,10	
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	7,55	7,2	-	-	-
Sekolah Menengah Atas	12,16	12,36	-	-	-
Angka Melek Huruf	88,09	89,24	87,50	87,24	92,06
Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
a) Literasi Membaca	-	-	52.00	46.41	47.04
b) Numerasi	-	-	51.33	32.60	48.47

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 2025

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah salah satu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pendidikan dalam suatu negara, daerah, atau komunitas. Indeks ini biasanya mencakup beberapa faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti tingkat aksesibilitas, kesetaraan gender, kualitas pengajaran, infrastruktur pendidikan, tingkat melek huruf, dan lain sebagainya.

Tujuan dari indeks pendidikan adalah untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik atau seberapa buruk sistem pendidikan suatu tempat berdasarkan beberapa parameter yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait dapat menggunakan data dari indeks ini untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebesar 0,60. Kemudian mengalami stagnan pada tahun 2020 dan 2021 yakni sebesar 0,60, lalu meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,61 dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,01% menjadi 0,62 dan stagnan pada tahun 2024.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (*Gross Enrollment Ratio*) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur proporsi total populasi yang berada di dalam kelompok usia yang seharusnya berada di tingkat pendidikan tertentu, terlepas dari tingkat pendidikan mereka sebenarnya. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar menghitung jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan (misalnya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi) sebagai persentase dari total populasi dalam kelompok usia yang sesuai.

Angka partisipasi kasar pada jenjang Pendidikan SD mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2024, pada tahun 2024 sejumlah 103,54%. Pada jenjang SLTP cukup fluktuatif yang mana pada tahun 2024 sebesar 88,31%. Sedangkan untuk jenjang SLTA tercatat pada tahun 2024 sebesar 78,84%.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni SD menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 sejumlah 97,66%, kemudian terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 mencapai 98,11%. Pada jenjang SLTP menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 sebesar 76,07% dan terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 mencapai 76,43%. Hal yang sama juga



terjadi pada jenjang SLTA, pada tahun 2020 sebesar 60,88%, hingga pada tahun 2024 menjadi 56,76%.

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD mengalami kenaikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mencapai 99,37%. Kenaikan juga terjadi pada jenjang SLTP pada tahun 2018 hingga tahun 2021, mencapai 98,73%. Sedangkan pada jenjang SLTA mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Di tahun 2021 dan 2022 data tidak diketahui.

5. Kondisi Bangunan Sekolah

Kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI mengalami kenaikan sejak tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 sejumlah 3400. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sejumlah 880, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 867. Namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2020-2022 masing-masing sebesar 889, 978, dan 1033 sekolah.

6. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid pada jenjang SD mengalami fluktuasi, di tahun 2021 sebesar 11,05. Pada jenjang MI juga mengalami fluktuatif, di tahun 2021 sebesar 6,9. Pada jenjang SMP mengalami turut mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,2, kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi 10,4. Pada jenjang MTs, di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 11,9 kemudian menurun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 7,2. Sedangkan untuk jenjang SMA mengalami kenaikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, berada pada angka 12,36.

7. Angka Melek Huruf

Jika melihat grafik diatas, Angka Melek Huruf mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan sebesar 88,09%. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 89,24. Namun angka tersebut menurun di tahun 2022 menjadi

87,50. Sementara pada tahun 2023 indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,26 sehingga menjadi 87,24. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 92,06.

8. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 angka Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat nasional untuk literasi membaca dan Numerasi masih tergolong rendah

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, AHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan Angka Kematian Bayi atau infant mortality rate (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0-11 bulan).

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83
Angka Harapan Hidup	66,26	67,67	68,03	73,51	73,66
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	-	220,40	220	97	82

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita (%)	-	11,57	6,44	3,64	2,18
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	-	64,20	53,76	61,48	55,00
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	-	87,80	85,96	85	89
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	85,71	87,50	96,55	100
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,07	91,82	98,04	100	90,12
Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	98,73	100	89,65
Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	83,99	82,74	82,06	98,90	98,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2025

1. Indeks Kesehatan

Berdasarkan gambar diatas Indeks Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 0,81%, kemudian mengalami stagnan di tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,82%. Sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan stagnan sebesar 0,83%.

2. Angka Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 sebesar 66.26 tahun, begitupun pada tahun 2021 meningkat menjadi 67.67 tahun, dan tahun 2022 meningkat sebesar 68,03 tahun. Sementara pada tahun 2023 Angka Harapan hidup Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 73,51 tahun, kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 73,66 tahun. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Pamekasan



mengindikasikan bahwa derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan semakin membaik.

3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (AKI)

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) adalah indikator yang mengukur jumlah kematian ibu akibat komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini penting dalam mengevaluasi keberhasilan sistem perawatan kesehatan dalam memberikan layanan yang aman bagi ibu hamil dan melahirkan.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten Pamekasan, didapatkan angka kematian ibu di tahun 2021 sebesar 220,40 dan stagnan di 2022 sebesar 220. Semantara pada tahun 2023 turun drastis menjadi 97 kasus kematian ibu, kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 82. Hal ini menandakan adanya kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kesadaran para ibu hamil dalam memperhatikan kondisi kehamilan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus kematian ibu.

4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita (%)

Tren Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus menunjukkan penurunan. Tantangan yang dihadapi Pemerintah adalah masih rendahnya pemeriksaan catin, pemberian PMT Penyuluhan di kelurahan yang belum optimal, sarpras posyandu di desa belum sepenuhnya terpenuhi dan lima pilar STMB belum sepenuhnya ditegakkan serta cakupan IDL yang masih sangat rendah.

5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)

Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Pamekasan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 masih sebesar 55% hal dikarenakan masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor terkait

guna peningkatan penjangkauan kasus TBC, tingkat pengetahuan masyarakat terkait TB masih rendah, dan ketersediaan alat pemeriksaan TCM yang masih kurang di beberapa puskesmas.

6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis pada tahun 2024 masih berada di angka 89 persen dengan kategori sedang, hal ini disebabkan karena beberapa pasien masih dalam proses pengobatan (minimal 6 bulan), adanya beberapa pasien yang LTFU (lost to follow up, meninggal sebelum pengobatan atau berhenti berobat sebelum selesai pengobatan) sehingga dibutuhkan adanya peningkatan kegiatan kunjungan rumah penderita TBC untuk memberikan penyuluhan serta peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

7. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan cenderung konstan selama 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 0.08 dengan kategori sedang. Permasalahan krusial yang di hadapi Rumah Sakit terkait yaitu sumber daya manusia yang kurang, seperti perlu adanya pemerataan dokter spesialis, sarana prasarana yang memadai, dan akses rumah sakit yang kurang merata (masih banyak terpusat di kota).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	23.41	23.41	24.00	35.26	4.96
Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi	%	18.56	18.56	18.55	18.55	18.56

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab.Kota						
Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani jaringan	%	11.14	52.04	53.81	55.20	20.69
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	%	-	87.11	86.70	88.71	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	94.00	95.00	95.34	95.79
Rasio Kepathuan IMB Kab/Kota	%	0.31	0.45	0.53	0.61	0.673
Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	%	76.82	77.26	79.00	64.75	58.35
Rasio Tenaga Operator/Tekhnisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	88.24	71.85	76.28	66.67
Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2025

Dilihat dari tabel di atas, masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh dinas PUPR diantaranya masih rendahnya perlindungan kawasan rawan banjir oleh infrastruktur pengendalian banjir, rendahnya kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten, masih rendahnya lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi teknis, masih terdapat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, serta panjang jalan kabupaten yang mengalami kerusakan cukup tinggi.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2. 23
Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	100	33	94.59	100

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase ketersediaan rumah layak huni mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 sampai 2021 ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana sebesar 100 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33 persen, hingga pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 100 persen.

2. Persentase Kawasan Kumuh

Tabel 2. 24
Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0.00	20.39	4.19	0	0
Jumlah Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh <10 Ha	125.25	127.25	101.31	97.07	97.07
Jumlah luasan (ha)	0	25.94	4.24	0	0

penanganan
infrastruktur
kawasan kumuh
(Ha)

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase kawasan permukiman kumuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, hanya pada tahun 2021 kawasan kumuh yang tertangani sebesar 20.39 persen kemudian pada tahun 2022 sebesar 4.19 persen. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena masih belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di Kabupaten Pamekasan.

E. Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Perlindungan Masyarakat dan Pamong Praja

Tabel 2. 25
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
Kabupaten Pamekasan 2020-2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	52	49	58	49	51

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan Kabupaten Pamekasan masih rendah, pada tahun 2024 hanya mencapai 51% gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, hal ini dikarenakan masih tingginya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti PKL masih banyak di area Arek Lancor, maupun di Jalan Kabupaten, terdapat beberapa alasan PKL masih sulit untuk ditertibkan, diantaranya pkl

tersebut enggan untuk pindah karena alasan sepi pengunjung, arek lancor menjadi tempat favorit untuk melakukan kegiatan baik pemerintah dan umum. Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus lebih berupaya lagi menertibkan pedagang kaki lima.

2. Persentase Penegakan PERDA

Tabel 2. 26
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	72.22	100	100

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata mencapai 100 persen tiap tahunnya. Hanya pada tahun 2022 persentase penegakan perda dan perkada tersebut mengalami penurunan menjadi 72,22 persen. Penegakan perda di Kabupaten Pamekasan masih sebatas sanksi administrasi karena pelanggaran perda yang bersifat kompleks, seperti masalah PKL, masih terbatasnya sosialisasi dan penertiban.

3. Penanganan Kebencanaan

Tabel 2. 27
Penanganan Kebencanaan Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0.54	8000 orang	92.32	99.40	93.61
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana(%)	0.74	11018 orang	6144	14.30	51.40

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana(%)	39.25	306 orang	19.70	86.75	87.48

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan masih rendahnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana persentase masih dibawah angka 50 persen. Sedangkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) sudah berada di atas 80 persen dalam kurun 2 tahun terakhir.

F. Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28

Cakupan Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pamekasan

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal	Persen	-	2.74	2.74	2.74	-
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	8.90	90.58	95.23	96.43	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Pada Pesentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal masih sangat rendah, hal ini dikarenakan Dinas Sosial masih mengalami kesulitan dalam memilah data disabilitas yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pada indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti masih belum mencapai 100 persen hal ini disebabkan karena penyediaan sandang belum optimal, dan pemerintah masih terus melakukan upaya dengan penyediaan kebutuhan makan diutamakan untuk lansia serta disabilitas berat.

2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	687.887	695.933	703.829	675.641	682.738
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,82	65,88	73,59	75,81	79,13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,49	3,1	1,4	1,74	1,64
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,51	96,9	98,56	98,26	
Upah Minimum Kabupaten	(Ribu Rp)	1.913	1.938	2.133	2.135	2.221

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025



Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Pamekasan pada Agustus 2024 sebesar 682.738 orang, mengalami peningkatan 7.097 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 540.225 orang (79,13 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 142.513 orang (20,87). Angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada Agustus 2024 tersebut terdiri dari 531.362 orang bekerja dan 8.863 orang pengangguran.

Dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 19.020 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 19.213 orang dan penduduk dengan kategori pengangguran berkurang sebanyak 193 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, Jumlah penduduk bekerja cenderung bertambah dan pengangguran cenderung berkurang seiring kenaikan Jumlah Angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen poin dibanding Agustus 2023. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah penduduk bekerja.

TPAK Kabupaten Pamekasan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 79,13 persen. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,27 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 71,42 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami kenaikan, TPAK laki-laki naik 0,56 persen poin, sedangkan TPAK perempuan naik 3,32 persen poin

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya.

Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi

berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Urusan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0.01	0.01	100.00	100.00	100.00
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TTPO (per 100.000 penduduk perempuan)	orang	4.475,32	6.49	92,266.00	9.3138	8,142.00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	53.77	65.15	68.10	68.10

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2025

1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024, seluruh anak korban kekerasan di Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan layanan dari instansi terkait, dengan persentase penanganan mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam merespons dan



menangani kasus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh, baik melalui pendampingan hukum, psikologis, medis, maupun perlindungan sosial. Meski hasil ini sangat positif, penting juga untuk memastikan bahwa data yang tercatat mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan bahwa penanganan yang diberikan benar-benar berkualitas dan berkelanjutan.

2. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TTPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Tabel tersebut menunjukkan rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengalami fluktuasi tajam dan tampak tidak konsisten. Pada tahun 2020 hingga 2021, rasio kekerasan tercatat cukup rendah, yaitu 4,47 dan 6,49, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi 92.266, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan metode pencatatan, atau lonjakan pelaporan kasus secara besar-besaran. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,31, namun di tahun 2024, mengalami penurunan yang sangat tidak stabil menjadi 8.142, hal ini kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan atau skala pengukuran.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 65,15 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 68,10 persen, namun pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak mengalami peningkatan masih sebesar 65,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan masih harus terus diupayakan untuk dapat terus aktif ikut serta dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kesetaraan gender.

C. Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	105.41	164.55	3.39	16.21	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Persentase ketersediaan pangan mengalami fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 persentase ketersediaan pangan sebesar 105.41 persen, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 16.21 persen. Hal ini disebabkan karena minimnya cadangan pangan pemerintah, belum efektifnya pemanfaatan lumbung pangan, belum tersedia kebijakan terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah serta belum tersedia anggaran penyusunan peta rawan pangan.

D. Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 32
Capaian Urusan Pertanian Kabupaten Pamekasan 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin Lokasi dibandingkan	99.17	26	0	0	-

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
dengan luas izin Lokasi yang diterbitkan (%)					
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	ada	100	-

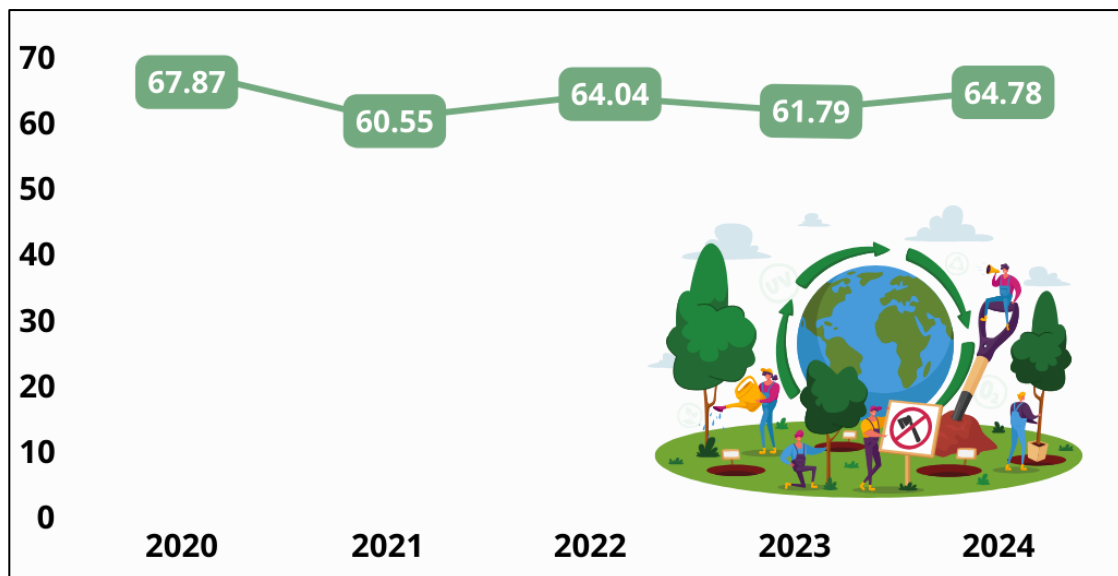
Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan pada capaian kinerja bidang pertanahan, hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pembagian atau penanganan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

E. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun masih termasuk dalam kategori Sedang. Hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang juga mengalami fluktuasi, sehingga membaiknya kondisi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 lebih disebabkan oleh semakin membaiknya kualitas air dan udara. Namun pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Pamekasan justru turun sebesar 2,25 menjadi 61,79. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan kualitas pada salah satu atau beberapa komponen lingkungan. Meskipun begitu, situasi tersebut mulai membaik pada tahun 2024, dengan nilai IKLH kembali naik menjadi 64,78. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan lingkungan terus dilakukan, meski tantangan terhadap stabilitas kualitas lingkungan masih perlu diantisipasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Gambar 2. 16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024



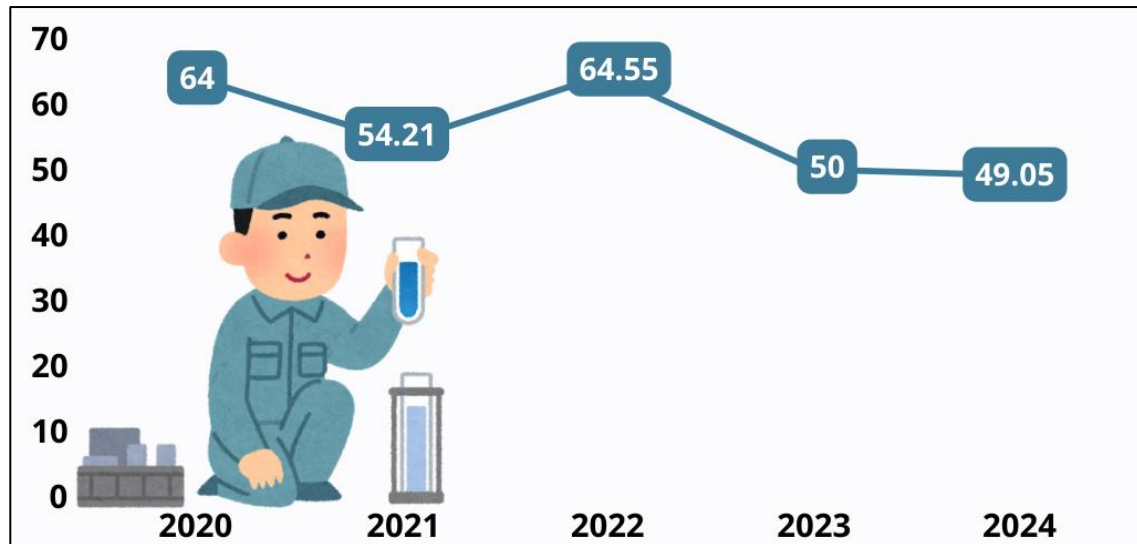
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2025

Adapun penjabaran mengenai kondisi dan capaian indeks pembentuk IKLH Kabupaten Pamekasan dijelaskan sebagai berikut.

1. Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran. Hal tersebut sama dengan data yang ada di Kabupaten Pamekasan, tetapi data indeks kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan telah diolah dan menggunakan formula dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan indikator indeks kualitas air pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Oleh karena itu, satuan pada indikator ini disesuaikan dengan data yang ada.

Gambar 2. 17
Indeks Kualitas Air Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2025

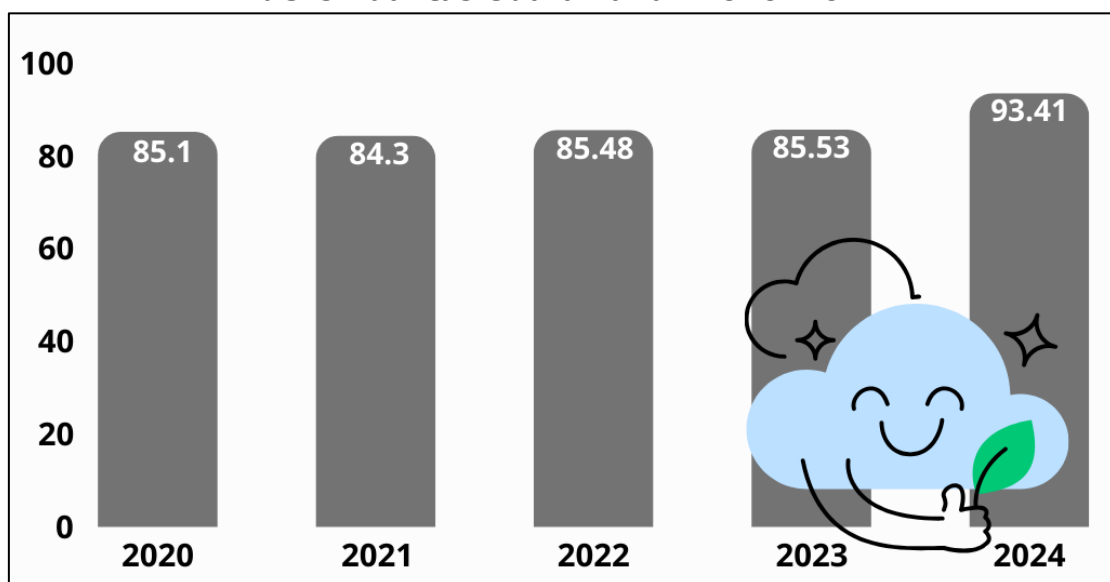
Capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun terakhir mengalami tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Pamekasan sebesar 49,05 berada pada kategori Kurang. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas air di wilayah tersebut belum optimal, salah satu penyebab utamanya adalah masih tingginya tingkat pencemaran di sungai-sungai. Pencemaran ini sebagian besar berasal dari kegiatan UMKM yang belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan data, terdapat setidaknya tujuh titik lokasi pencemaran lingkungan di Kabupaten Pamekasan. Sebagai langkah penanganan, diperlukan pembentukan komunitas peduli sungai yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal guna mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perairan.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara disuatu daerah. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat pencemaran udara berdasarkan sejumlah parameter seperti konsentrasi polutan udara seperti Particulate Matter

(PM10 dan PM2.5), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), dan ozon (O₃). Melalui pengukuran IKU, dapat diketahui apakah kualitas udara tersebut memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Jika IKU menunjukkan nilai yang tinggi, hal ini dapat mengindikasikan adanya pencemaran udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Gambar 2. 18
Indeks Kualitas Udara Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2025

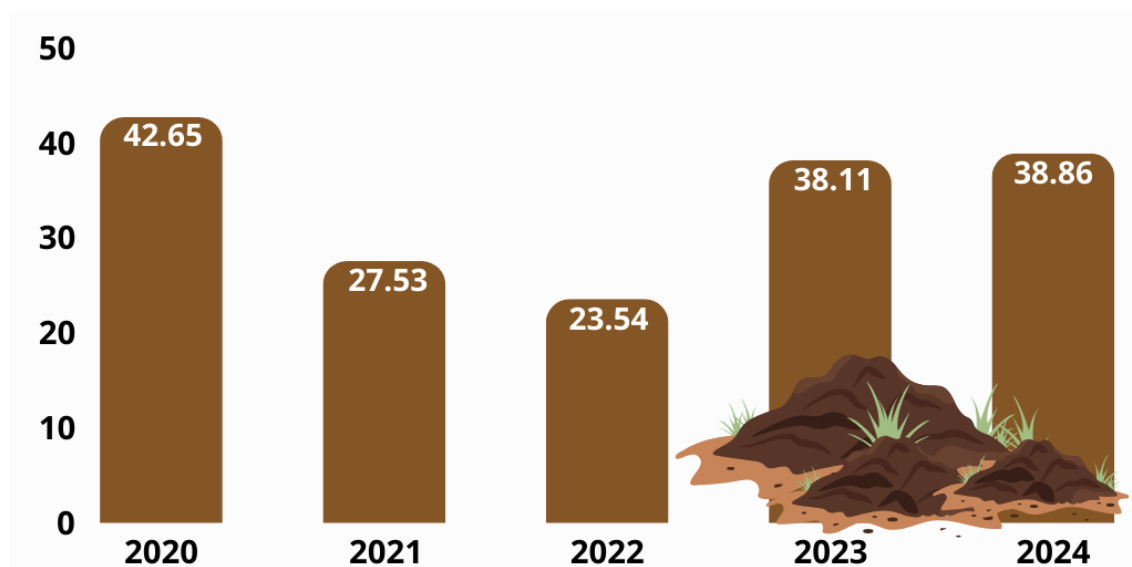
Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan sebesar 93,41 masuk kategori Sangat Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Pamekasan berada dalam kondisi sangat baik. Upaya untuk menjaga kualitas udara yang baik di Kabupaten Pamekasan meliputi pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengelolaan limbah industri, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kualitas udara di Kabupaten Pamekasan dapat

terus meningkat dan memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan dan lingkungan.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Penggunaan IKTL sangat penting dalam perencanaan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengetahui kualitas lahan, pengambil kebijakan dapat merencanakan penggunaan lahan yang tepat sesuai dengan potensinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan penggunaan lahan tersebut.

Gambar 2. 19
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020–2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2025

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Pamekan selama periode 5 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 38,86 masuk kategori Kurang. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh menurunnya luas tutupan lahan yang berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya seperti memperketat pengawasan terhadap alih fungsi

lahan, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ruang terbuka hijau, serta menerapkan kebijakan yang berpihak pada konservasi lingkungan dan perlindungan kawasan hijau.

4. Persampahan

Tabel 2. 33
Penanganan Sampah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase	33.03	50.00	57.00	60.90	61.50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota di Kabupaten Pamekasan masih rendah. Hal ini dikarenakan area pelayanan masih terbatas karena terbatasnya biaya operasional, fasilitas pengelolaan sampah masih belum merata di 13 kecamatan, minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah, dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan proses pengelolaan informasi mengenai penduduk, yang mencakup kegiatan pencatatan, pengumpulan, serta pemeliharaan data terkait status kependudukan suatu negara. Proses ini melibatkan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan perubahan alamat. Tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah untuk menyediakan data penduduk yang akurat dan terbaru untuk mendukung perencanaan pembangunan, peningkatan layanan publik, serta menjamin perlindungan atas hak-hak sipil masyarakat.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP Elektronik	Persentase	98.5	98.28	99.04	98.96	100
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase	16.57	13.39	15	17.95	17.86
Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	Persentase	86	90.13	92	91.71	95.54
Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persentase	100	100	2	2.32	2

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, 2025

Capaian kinerja persentase perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten. Pada tahun 2020, capaian sebesar 98,5% dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam pelayanan perekaman KTP Elektronik. Hal ini juga menunjukkan efektivitas program jemput bola, peningkatan aksesibilitas layanan, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya dokumen identitas. Capaian pada 2024 menjadi indikator bahwa seluruh penduduk yang wajib KTP telah terlayani, sekaligus mencerminkan kinerja optimal dari sektor pelayanan administrasi kependudukan.

Jumlah kepemilikan KIA mengalami fluktuatif dan tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan masyarakat masih kurang antusias memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) karena kurangnya kebermanfaatan kartu tersebut.

Pada indikator persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunya akte kelahiran belum sepenuhnya mencapai angka 100%, namun sudah dapat dikategorikan sedang. Disdukcapil akan melakukan kerja sama bersama dinkes untuk membuat inovasi PUSLINKU SIGAPKU (pelayanan dokumen KK dan akte kelahiran).

Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama masih sangat rendah disebabkan prosesnya membutuhkan waktu yang lama, serta pemanfaatan data kependudukan hak aksesnya terbatas.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	2,05	12,70	61,65	17,71	21,51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025



Tabel di atas menunjukkan persentase pengentasan desa tertinggal dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada desa tertinggal yang berhasil dientaskan (0,00%). Namun, mulai tahun 2022, seluruh desa tertinggal berhasil dientaskan (100,00%), dan angka ini tetap bertahan hingga tahun 2024. Artinya, sejak 2022, semua desa yang sebelumnya dikategorikan sebagai desa tertinggal telah berhasil diangkat statusnya, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal pada tahun-tahun berikutnya. Upaya pengentasan desa tertinggal menunjukkan hasil yang signifikan mulai tahun 2022, di mana seluruh desa tertinggal berhasil dientaskan dan kondisi tersebut bertahan hingga 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang diterapkan dalam mengurangi jumlah desa tertinggal, sehingga sejak 2022 tidak ada lagi desa yang masuk dalam kategori tersebut.

Pada persentase peningkatan status desa mandiri dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, peningkatan status desa mandiri masih rendah, hanya 2,05%. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,70%, lalu melonjak drastis pada tahun 2022 hingga mencapai 61,65%. Setelah itu, pada tahun 2023 persentase ini turun signifikan menjadi 17,71% dan kembali naik sedikit pada tahun 2024 menjadi 21,51%. Puncak peningkatan status desa mandiri terjadi pada tahun 2022, tetapi setelah itu pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Kesimpulannya minimnya desa dengan status mandiri.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga terus berupaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa yang inklusif dengan membangun sistem drainase yang baik, memberikan pelatihan keterampilan sesuai potensi masyarakat desa Kabupaten Pamekasan, dan terus melakukan perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas tempat ibadah yang layak, dan kemudahan dalam mengakses informasi tentang program-program pemerintah, kebijakan desa dll, serta saat ini telah banyak organisasi-organisasi yang dibentuk perangkat desa hingga tingkat RT RW.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Tabel 2. 36

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
TFR		1,85	1,83	-	2,14	2,14

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Angka kelahiran total di Kabupaten Pamekasan di tahun 2020 sebesar 1,85, turun menjadi 1,83, di tahun 2022 berada di angka 0. Pada tahun 2023 angka kelahiran total mengalami peningkatan sebesar 2,14 dan stagnan di tahun 2024.

2. Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Tabel 2. 37

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76,47	77,85	77,00	71,96	60,80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Tabel tersebut menunjukkan persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian pemakaian kontrasepsi Modern(*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) belum mencapai 100% namun sudah dikategorikan baik sudah mencapai 70%. Hal ini dikarenakan masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif modern.

3. Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Tabel 2.38

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,94	6,43	7,00	7,08	4,69

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Pada tahun 2020 berada di angka 6,94 persen, di tahun 2021 turun menjadi sebesar 6,43, dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 7,00, di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 7,08, dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,69. Unmet need di bawah 10% berkategori bagus. Permasalahan di Kabupaten Pamekasan adalah masih terdapat Pasangan Usia Subur yang tidak ingin punya anak lagi tapi ikut KB.

I. Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan arah kebijakan urusan perhubungan meliputi terwujudnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan pelayanan

transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem perhubungan intermoda dan intramoda, dan terselenggaranya pelayanan jasa penghubung yang aman dan nyaman. Perkembangan pembangunan perhubungan di Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

1. Tingkat Konektivitas Kabupaten/Kota

Tabel 2. 39
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	89,09	0,85	100,00

Tabel di atas menunjukkan Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2020-2024, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 89,09 dan 0,85 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti infrastruktur, kebijakan atau perubahan sistem pengukuran. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan belum optimalnya konektivitas antar modal transportasi.

2. Tingkat Rasio di Jalan Kabupaten/Kota Tahun

Tabel 2.40
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Persen	1,098	0,29	0,22	0,22	0,22

V/V Ratio di jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2020 V/C Rating sangat tinggi dengan angka 1,098 yang menunjukkan bahwa volume kendaraan jauh melebihi kapasitas jalan, sehingga kemungkinan besar terjadinya kemacetan parah. pada tahun 2021, nilai V/C Ratio turun drastis menjadi 0,29, yang

berarti kondisi lalu lintas jauh lebih lancar. Pada tahun 2022 hingga 2024, V/C Ratio tetap stabil di angka 0,22, menunjukkan bahwa jalan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung lalu lintas. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan belum optimalnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

J. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tabel 2.41

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan di Tahun 2020 tingkat persentase nya sebesar 88,89 persen, dan di Tahun 2021, 2022, 2023, 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 100 persen, Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Dinas Kominfo dalam meningkatkan dan stabilitas dalam koneksi internet dalam menyediakan layanan internet bagi OPD.

2. Pelayanan Publik

Tabel 2.42
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	47,37	57,89	60,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 47,37 persen, di Tahun 2021 meningkat sebesar 57,89 persen, di Tahun 2022 sebesar 60 persen dan di Tahun 2023 dan Tahun 2024 meningkat sebesar 100 persen. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat digitalisasi di Kabupaten Pamekasan sudah optimal, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti keamanan data dan kesenjangan digital tetap perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan sistem ini.

3. Informasi Publik

Tabel 2.43
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	Persen	100,00	92,00	63,00	100,00	100,00

Mengetahui
Kebijakan Dan
Program Prioritas
Pemerintah Dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Komunikasi dan Infomatika, 2025

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 berada diangka 100 persen dan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 92 persen. Pada tahun 2022 mengalami tingkat penurunan sebesar 63 persen dan mengalami peningkatan yang sama ditahun 2023 dan 2024 sebesar 100 persen. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tingkat perbaikan dalam strategi komunikasi pemerintah daerah.

4. Indeks SPBE

Tabel 2.44
Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Indeks	0	2,12	2,10	2,89	3,92

Sumber : Dinas Komunikasi dan Infomatika, 2025

Indeks SPBE di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2020 tingkat indeksnya sebesar 0, di Tahun 2021 meningkat sebesar 2,12, di Tahun 2022 menurun sebesar 2,10, di Tahun 2023 meningkat sebesar 2,89, dan di Tahun 2024 kembali meningkat sebesar 3,92. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat indeks SPBE di Kabupaten Pamekasan masih rendah yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kematangan dalam penerapan SPBE. Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat indeks SPBE Kabupaten Pamekasan sangat baik.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45
Koperasi Tahun 2020–2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	59.74	19.22	30.00	45.69	37.00
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Koperasi	0.86	100.00	36.00	52.13	53.49

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase tingkat koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 59,74 persen, dan menurun di Tahun 2021 sebesar 19,22 persen, pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 30 persen, di Tahun 2023 terus meningkat sebesar 45,69 persen, namun pada Tahun 2024 menurun sebesar 37 persen. Dari data ini, diketahui masih sangat minimnya koperasi berkualitas di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Tingkat persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2020 sebesar 0,86 dan meningkat secara tajam pada tahun 2021 sebesar 100 persen, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 36 persen, hingga di Tahun 2024 menjadi 53,49 persen. Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha mikro untuk melaporkan omsetnya, sehingga perlu optimalisasi pengawasan pelaku usaha yang memiliki NIB.

L. Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.46
Kondisi Investasi Berskala Nasional Tahun 2020–2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota/Kota	Persen	39,67	666,45	80,09	20,58	108,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan secara flukuatif. Pada tahun 2020 tingkat investasi di Kabupaten Pamekasan berada di angka 39,67 persen, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang besar berada diangka 666,45 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 80,09 persen dan di Tahun 2023 kembali menurun diangka 20,58 persen dan mengalami peningkatan secara besar menjadi 108,16 persen. Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi di Kabupaten Pamekasan belum optimal.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan Tahun 2020–2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,75	1,52	0,77	0,86	0,89
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	persen	94,69	53,16	50,57	50,89	0,19

organisasi sosial
kemasyarakatan

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Tabel menunjukkan tren partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dari tahun 2020-2024, 2020: 0,75, 2021: 1,52 (peningkatan signifikan), 2022: 0,77 (penurunan), 2023: 0,86 (peningkatan kecil), 2024 ;0,89 Ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih fluktuatif dan perlu dorongan lebih lanjut untuk mencapai stabilitas serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Jumlah rata-rata adalah 0,975. Kesimpulan yang diperoleh Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Sedangkan tren partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dari tahun 2020 hingga 2024, 2020: 94,86, 2021: 53,16 (penurunan tajam), 2022: 50,37, 2023: 50,58 hingga menurun sangat drastis pada tahun 2024 menjadi 0,19, Terjadi tren penurunan yang signifikan, yang bisa menjadi indikasi bahwa pemuda kurang tertarik atau kurang memiliki akses terhadap organisasi kepemudaan. Kesimpulan yang didapat adalah Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

N. Statistik

Perkembangan indikator Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48
Indikator statistik Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Indeks Pembangunan Statistik		-	-	-	2,14	2,72

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a) Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Persen	-	-	-	83,53	83,53
b) Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)	Persen	-	-	-	50,39	50,39

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan mengalami stagnan artinya pada tahun 2020-2024 tidak terjadi perubahan yaitu 100,00%. Sedangkan indeks pembangunan statistik di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 yaitu 2,14 dan ditahun 2024 meningkat menjadi 2,72. Berdasarkan table telepon seluler (HP)/Nirkabel atau komputer (PC/Dekstop, laptop/ notebook, tablet) di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023-2024 yaitu 83,53 persen. Tingkat Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll) tahun 2020-2024 sebesar 50,39 persen.

O. Persandian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	0	0	-	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2025

Keamanan informasi masih belum dinyatakan aman sebab tingkat kemanan informasi pemerintah dan jumlah nilai per area 0. Dimana hal ini menunjukkan bahwa Rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah.

P. Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarinya Cagar Budaya	Persentase	60,71	60,71	100	43,75	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan Tabel diatas Terlestarikannya Cagar Budaya di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2021 persentase Terlestarinya Cagar Budaya sebesar 60,71% dan ditahun 2022 meningkat menjadi 100,00% akan tetapi ditahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,75% dan ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali mejadi 100,00%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih Rendahnya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pamekasan.

Q. Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	0	63,00	60,40	58,50	62,20
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	14.37	19,67	75,02	56,14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 2020 ke 2021 meningkat dari angka 0 menjadi 63,00, di tahun

2022 sedikit menurun menjadi 60,40 dan menurun kembali menjadi 58,50 pada tahun 2023. dan kembali meningkat menjadi 62,20. rata rata yang diperoleh adalah 48,82. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kegemaran membaca Masyarakat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2020 ke 2021 meningkat menjadi 14,37. Sedikit meningkat menjadi 19,67 pada tahun 2022. mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 75,02 dan kembali menurun menjadi 56,14 pada tahun 2024. rata rata yang diperoleh 33,04. Dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

R. Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Persentase)	59,00	70,31	75,00	75,00	75,26
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan (Persentase)	30,00	36,85	70,24	87,81	60,23

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, di tahun 2020 mencapai 59% dan mengalami peningkatan sebanyak 20.31% di tahun 2021 menjadi 70.31%, di tahun 2022 dan 2023 meningkat kembali menjadi 75%, dan meningkat sebanyak 0.26% di tahun 2024 menjadi 75.26%. disini, dapat disimpulkan



bahwa belum optimalnya tata Kelola daerah. Sedangkan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan mengalami fluktuatif pada tahun 2020 berada di persentase 30% meningkat sebanyak 0.85% di tahun 2021 menjadi 36.85%, meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 70.24%, kembali mengalami peningkatan menjadi 87.81% di tahun 2023 namun mengalami penurunan menjadi 60.25% di tahun 2024. Kesimpulan yang didapat adalah Belum terlaksananya kegiatan pemusnahan dan penyelamatan arsip, dikarenakan tidak tersedianya arsip yang tidak bernilai guna dan sudah habis masa retensinya serta telah dilakukan pemusnahan arsip dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 dan tidak ada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun Kecamatan/Kelurahan yang digabungkan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah di Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Tahun 2024.

2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 53
Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	23.513,90	21.199,39	101,18	108,85	22.571,77

sumber data: one data KKP

Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota pada tahun 2020 berada di angka 23.513,90 kemudian mengalami penurunan menjadi 21.199,39. Semakin menurun menjadi 101,18 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 108,85, dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan menjadi 22.571,77. Jadi total jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 67.495,09 ton. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan berpotensi untuk dikembangkan agar mencapai tingkat produksi yang lebih optimal.

B. Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Indikator Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-86,49	-100,00	0	561,76	-18,21
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-68,57	378,09	-18,35	-23,34	21,23
Tingkat Hunian Akomodasi	14,06	97,00	20,00	26,79	97,39
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	152,409	22,00	36,00	0,04	0,05
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,12	2,00	3,00	2,89	3,4966
Jumlah kunjungan wisata	-	242.665,00	188.409,00	151.875,00	151.875,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada tahun 2020 berada di angka -86,49 persen, kemudian pada tahun 2021 mencapai angka -100 persen. Pada tahun 2022 berada di angka 0,00, dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 561,76 persen namun pada tahun 2024 kembali turun sangat signifikan menjadi -18,2099. Rata rata yang di peroleh -32,43. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih Rendahnya kunjungan wisata.

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota pada tahun 2020 berada diangka -68,57 persen, meningkat menjadi 378,09 persen pada tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -18,35 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 menjadi -23,34 persen. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 21,2253 persen.

Persentase tingkat hunian akomodasi di tahun 2020 berada di angka 14,06 persen. kemudian meningkat signifikan menjadi 97,00 persen pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 20,00 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 26,79 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 97,3962 persen.

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2020 berada di angka yang cukup tinggi yaitu Rp 152,409 persen. kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai angka 22,00 persen pada tahun 2021. sedikit meningkat menjadi 36,00 persen pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,04 persen pada tahun 2023 dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 0.05 persen.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 mencapai angka 1,12 persen. meningkat menjadi 2,00 persen pada tahun 2021. Kemudian meningkat menjadi 3,00 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,89 persen dan kembali meningkat menjadi 3,49 persen di tahun 2024.

Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 berada di angka 242.665,00 kemudian mengalami penurunan menjadi 188.409,00 pada tahun 2022. pada tahun 2024 menjadi 151.875,00. Jadi jumlah keseluruhan pada tahun 2021 hingga 2023 adalah 413.380.

Tabel 2.55
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata dan Asal Pengunjung di Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Obyek Wisata	WNI	WNA	Total
Pantai Jumiang	11.980	-	11.980

Obyek Wisata	WNI	WNA	Total
Pantai Talang Siring	17.092	-	17.092
Eko Wisata Mangrove Lembung	2.325	-	2.325
Puncak Ratu	31.092	-	31.092
Kampung Durian	16.969	-	16.969
Bukit Kehi	28.100	-	28.100
Museum Mandhilaras	5.002	-	5.002
Api Tak Kunjung Padam	25.432	-	25.432
Pantai The Legend	43.868	-	43.868
Wisata Tepadu Bhurunan Murtajih	570	-	570
Jumlah/Total	182.430	-	182.430

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Pada tahun 2024 Obyek wisata yang masih ramai dan menjadi favorit masyarakat Kabupaten Pamekasan peringkat pertama Pantai the Legend dengan jumlah pengunjung sebesar 43.868 orang, peringkat kedua Puncak Ratu dengan jumlah pengunjung sebesar 31.092 orang, serta peringkat ketiga Api Tak Kunjung Padam dengan jumlah pengunjung 25.432 orang.

C. Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3.659	3.621	4.633	4.688	-
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	5,00	5,00	5,00	-20,39

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	265.405	319.718	430.673	417.916	297.466,55
Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10.534	10.337	8.854	8.933	8.575
Jumlah Populasi Ternak	194.286	194.292	195.898	193.830	1.344.423
Indeks Ketahanan Pangan	-	76,18	74,41	74,55	74,55
Persentase kinerja realisasi pupuk	0,03	100,00	39,85	90,22	-

Produktivitas pertanian per hektar per tahun di tahun 2020 mencapai 3.659 ton/hektar menurun sekitar 38 ton/hektar menjadi 3.621 ton/hektar di tahun 2021 meningkat di tahun 2022 menjadi 4.633 ton/hektar dan meningkat sebanyak 55 ton/hektar sehingga mencapai 4.688 ton/hektar di tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pamekasan.

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular berada dalam kategori sedang dengan persentase 5% di tahun 2021-2023. Sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan sangat drastis menjadi -20,39. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kejadian terkait penyakit hewan masih bisa dikendalikan, untuk keberlanjutan perlunya dukungan anggaran dan sarana yg cukup untuk mengantisipasi berbagai macam penyakit hewan.

Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di tahun 2020 mencapai angka 265.405 meningkat menjadi 319.718 di tahun 2021 , pada tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 110.955 sehingga menjadi 430.673 Namun menurun dengan selisih 12.757 di tahun 2023 menjadi 417.916. Pada



tahun 2024 meningkat drastis menjadi 297.446,55. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Anomali iklim dan Sumber Daya Manusia petani yang belum optimal.

Jumlah Produksi Hasil Peternakan pada tahun 2020 berada di angka 10.534 ton menurun menjadi 10.337 ton di tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 8.854 ton, dan kembali meningkat sebanyak 8.933 ton pada tahun 2023. Kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 8.575 ton. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya sektor ternak terutama unggas.

Jumlah Populasi Ternak di tahun 2020 mencapai 194.286 ekor meningkat menjadi 194.292 ekor di tahun 2021, terjadi peningkatan kembali dengan selisih 1.606 di tahun 2022 menjadi 195.898 ekor namun kembali menurun sebanyak 2.068 menjadi 193.830 ekor di tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 1.344.423 ekor. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perherakan lalulintas ternak berpengaruh terhadap populasi.

Indeks Ketahanan Pangan di tahun 2021 mencapai 76.18 indeks, menurun di tahun 2022 menjadi 74.41 indeks dan mengalami peningkatan sebanyak 0.04 indeks di tahun 2023 menjadi indeks 74.55, pada tahun 2024 stagnan di angka 74,55. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya keragaman dalam penyediaan dan konsumsi pangan untuk mencegah rawan pangan.

Persentase kinerja realisasi pupuk mengalami perkembangan yg fluktuatif, berada di persentase 0.03% pada tahun 2020 meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 100% namun terjadi penurunan hingga 39.85% di tahun 2022, meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 90.22%. berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 2. 57
Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura
di Kabupaten Pamekasan

Golongan	Komoditi
Padi dan Palawija	Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Kedelai
Buah -buahan	Jeruk, Mangga, Jambu, Rambutan, Pisang, Alpukat, Durian, Pepaya, Sawo, Nanas dan Salak
Sayur - sayuran	Bawang Merah, Bawang Daun, Kacang Panjang, Lombok, Tomat, Buncis, Terong, Ketimun, Kangkung, dan Bayam
Perkebunan semusim	Tembakau, Tebu, Cabe Jamu
Perkebunan (Tanaman Keras)	Kelapa, Jambu Mete, Kapuk Randu

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pamekasan mempunyai beragam potensi komoditi yang bisa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional bahkan internasional diantaranya golongan padi dan palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, perkebunan musiman, dan perkebunan tanaman keras.

Tabel 2.58
Jumlah Produksi Tanaman Buah (kw) di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024

Jenis Tanaman	Hasil Produksi
Alpukat	55.227,75
Belimbing	812
Durian	9.484
Jambu Air	6.473
Jambu Biji	4.940,79
Jeruk Siam/Kepron	16.604
Mangga	192.253
Melinjo/Gnetum	65,70
Nangka/Cempedak	23.490,70
Pepaya	13.717,81
Petai	3.825,99
Pisang	76.357,90
Rambutan	16.568,63
Salak	30,42
Sawo	3.661,35
Sirsak	988,30
Sukun	1.207,30
Lengkeng	241

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Jumlah produksi tanaman buah tahun 2024 tertinggi diraih oleh Buah Pisang yaitu sebanyak 76.357,90 kwintal sedangkan terendah yakni Buah Lengkeng yaitu sebanyak 241 kwintal.

Tabel 2.59
Produksi Menurut Jenis tanaman Sayuran dan Buah-buahan
Semusim tanaman di Kabupaten Pamekasan (kwintal)
Tahun 2020 – 2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	1147	1.657	1.469	1724	1398,20
Bawang Merah	197.910,00	191.866	185.671	177.696,1	171.336
Bawang Putih	-	-	-	-	-

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bayam	1.641,00	1 771	2 302	2455	2196
Buncis	600	930	1 044	36	120
Cabai Besar	14.507,00	7 252	16 810	28482.1	31.338,60
Cabai Rawit	130.004,00	65 437	82 119	78395	81.984,90
Kacang Panjang	2.800,00	2 848	2 915	755	892
Kangkung	3.035,00	2 953	3 300	4224	2.310,60
Kembang Kol	-	-	70	100	75
Kentang	-	-	-	-	-
Ketimun	2.679,00	8 615	5 789	4646	3958
Kubis	205	-	210	200	-
Labu	115	126	110	288	250
Melon	1.045,00	340	370	220	500
Paprika	-	-	-	-	-
Petsai	909	2 220	3 040	2085	1960
Semangka	9.732,00	9 135	6 152	4426	4495
Stoberi	-	-	-	-	-
Terung	2.693,00	2 946	857	1045	683
Tomat	5.158,00	2 544	1 854	2414.7	1.647,10
Wortel	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Jumlah produksi tanaman sayuran dan buah semusim tahun 2024 tertinggi diraih oleh Bawang Merah yaitu sebanyak 171.336 kwintal. Kemudian Cabai Rawit sebanyak 81.984,9 kwintal. Sedangkan jumlah produksi terendah yakni Kembang Kol yaitu sebanyak 75 kwintal.

Tabel 2.60
Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023

Kecamatan	Bawang Merah				Cabai Rawit			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tlanakan	2	2	-	2	327	340	340	330
Pandemawu	10	22	32	23,9	1	2	3	9,5
Galis	15	21	24	12	2	-	1	-

Kecamatan	Bawang Merah				Cabai Rawit			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Larangan	2	4	3	7	58	70	70	65
Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Propo	9	9	4	11	21	62	24	112
Palengan	10	10	-	1	257	203	193	294
Pegantenan	4	4	11	-	354	312	280	65
Kadur	9	16	16	9	242	242	254	437
Pakong	2	3	2	2	5	2	2	2
Waru	320	302	260	256	358	175	455	455
Batumarmar	2.025	1.911	1.879	1.935	618	169	412	358
Pasean	318	383	350	179	350	475	456	430
Kabupaten Pamekasan	2.726	2.736	2.581	2.446,9	2.887	2.051	2.490	2.557,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pamekasan 2023

D. Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26,67	3,00	1,60	0,30	0,99
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	63,50	10,20	44,21	92,01	79,52

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

tera sah yang berlaku

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) mengalami perkembangan yang fluktuatif di tahun 2020 mencapai 26.67%, menurun signifikan di tahun 2021 menjadi 3% dengan selisih 23.67% dari tahun sebelumnya. kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan persentase 1.60% dan 0.30%. Pada tahun 2024 sedikit meningkat namun tidak signifikan menjadi 0,9993%. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kepemilikan izin usaha terkait perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2020 sebanyak 63.50% menurun di tahun 2021 mejadi 10.20% dan mengalami peningkatan menjadi 44.21% di tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 47.8% sehingga menjadi 92.01% di tahun 2024, namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 79.52%.

E. Perindustrian

Pembangunan industri berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.62
Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertambahan jumlah industri kecil dan	%	13,06	9,75	103,42	160,82	10,0415

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

menengah di Kabupaten Pamekasan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan, 2025

Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pamekasan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 13,06 terjadi penurunan pada tahun 2021 yang dimana pada tahun 2021 persentase penambahan jumlah industri kecil sebesar 9,75. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat drastis yang dibandingkan dengan tahun 2021 yang dimana pada tahun 2022 persentasenya sebesar 103,42 dan terjadi lagi peningkatan pada tahun 2023 diangka 160,82. Pada tahun 2024 terjadi penurunan yang dimana Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diangka 10,04 hal ini menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Tabel 2.63

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pamekasan 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pamekasan

%

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan, 2025

Pada tahun 2020 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebesar 20 akan tetapi pada tahun 2021-2024 persentasenya sebesar 0.

Tabel 2.64

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pamekasan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan, 2025

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah pada tahun 2020 sebesar 0 dan pada tahun 2021-2024 persentasenya sebesar 100. Sedangkan pada jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah persentase pada tahun 2020-2024 sebesar 0 dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020-2024 sebesar 0.

Tabel 2.65
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75,00	70,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan, 2025

Persentase Tersedianya informasi terkait industri di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 75 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 70 akan tetapi pada tahun 2022-2024 Persentase Tersedianya informasi terkait industri di Kabupaten Pamekasan sebesar 100.

2.3.4 Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Tabel 2.66
Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	70,02	70,02	72,62	73,10	72,11

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2020-2023 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2020 nilainya mencapai 70,02 kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 73,10, namun pada tahun 2024 Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan justru turun menjadi 72,11.

Tabel 2.67
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,78 (C)	3,61 (C)	3,86 (B)	3,94 (B)

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2025

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 mendapatkan indeks mencapai 2,78 dengan kategori Cukup. Pada tahun 2022 Indeks Pelayanan Publik mendapat nilai 3,61 meningkat dari tahun sebelumnya namun masih dalam kategori yang sama yakni cukup. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik terus terjadi hingga pada tahun 2024 indeks pelayanan publik Kabupaten Pamekasan mencapai 3,94 poin atau predikat "B". Berdasarkan hasil Indeks Pelayanan Publik yang didapatkan tersebut, diharapkan adanya peningkatan di tahun berikutnya.

Tabel 2.68
Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	35,41	n.a	30,12	47,74

Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 2025

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan secara sederhana, efektif, dan mudah untuk digunakan oleh pemerintah daerah. Hasil pengukuran kualitas kebijakan bermanfaat untuk mengetahui kualitas kebijakan di instansi pemerintah, profil kualitas kebijakan publik nasional, meningkatkan kualitas kebijakan, acuan program peningkatan kualitas kebijakan instansi pemerintah, menilai sasaran reformasi birokrasi terkait perbaikan kualitas kebijakan, acuan pembinaan analis kebijakan, meningkatkan kualitas pembinaan analis kebijakan, menilai kualitas kebijakan dengan mudah dan cepat, serta efisiensi sumber daya. Pemerintahan Kabupaten Pamekasan perlu menghasilkan kebijakan yang berbasis pada riset dan bukti sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Melalui Kebijakan yang berkualitas, pemerintah dapat menyelesaikan masalah dan mensejahterakan masyarakat. Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan baru diadakan pada tahun 2021 mencapai 35,41. Capaian tersebut mengalami penurunan sehingga mencapai 30,12 pada tahun 2023. Satu tahun setelahnya, IKK Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan capaian 47,74, tetapi perolehan tersebut masih berada pada kategori kurang.

B. Perencanaan Keuangan

Tabel 2.69
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7.85	6.88	8.58	9.35	9.95

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan di tahun 2020 yaitu 7,85 persen dan menurun di tahun 2021 menjadi 6,88 persen. Pada tahun 2022-2023 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 yaitu 8,58 dan di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 9,35. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 9.95 Kesimpulannya adalah Belanja pegawai masih tergolong tinggi.

Tabel 2.70
Rasio PAD 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Rasio PAD	1.43	1.17	12.12	14.94	14.87

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Rasio PAD ditahun 2020 yaitu 1,43 persen dan di tahun 2021 menurun menjadi 1,17 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 12,12 dan di tahun 2023 semakin meningkat hingga mencapai angka 14,94 persen. Namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 14.87. Kesimpulannya adalah Minimnya Pendapatan Asli Daerah (Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi).

Tabel 2. 71
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.083	3.045	3.415	3.247	3.565

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dimana pada tahun 2020 mencapai angka 3,083, tahun 2021 mencapai angka 3,045, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,415, tahun 2023 mengalami penurunan Kembali sebesar 3,247, Pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 3,562.

Tabel 2.72
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00	3.00	3.06	3.00	3.06

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di tahun 2020 dan 2021 stabil di angka 3,00, di tahun 2022 meningkat menjadi 3,06. pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,00 dan di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 3,06. Kesimpulannya adalah 1. Belum memadainya Kualitas dan Kuantitas SDM APIP 2. belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Tabel 2.73
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57.10	63.36	64.41	66.64	69.19

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2025

Rasio belanja urusan pemerintah umum dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dimana tahun 2020 mencapai angka 57,10, tahun 2021 mencapai 63,36, tahun 2022 naik menjadi 64,41, tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 66,6355 sdangkan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 69.19.

C. Kepegawaian

Tabel 2.74
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan
Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020– 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,50	11,06	26,72	28,59	27,96
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	59,79	84,00	33,46	23,16	22,93

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2025

Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Grafik ini menunjukkan peningkatan jumlah pegawai fungsional dari tahun 2020 hingga 2024, Pada tahun 2020, persentase pegawai fungsional sebesar 9,50%, kemudian meningkat menjadi 11,06% pada 2021, ahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 26,72%, diikuti oleh peningkatan menjadi 28,59% pada 2023, Tahun 2024 sedikit menurun menjadi 27,96%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,Tren ini mencerminkan upaya peningkatan jumlah pegawai fungsional dalam sistem kepegawaian pemerintah. Jumlah rata-rata dari Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 103.83. kesimpulannya adalah Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal). Sedangkan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Grafik ini menunjukkan fluktuasi dalam persentase pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi. Pada tahun 2020, angka berada di 59,79%, kemudian



meningkat drastis menjadi 84,00% pada 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 33,46%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada 2023 menjadi 23,16% dan 22,93% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah pegawai bersertifikat kompetensi. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya peningkatan jumlah pegawai fungsional, tetapi juga menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan kembali jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi. Jumlah rata-rata dari Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 223.34. kesimpulannya adalah Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan aw

2.3.5 Capaian SPM Kabupaten Pamekasan

Berikut adalah capaian SPM Kabupaetn Pamekasan :

Tabel 2.75
Capaian Kinerja SPM Kabupaten Pamekasan 2022 s.d 2024

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	SPM Pendidikan	32,17%	97,65%	99,17%	97,50%	82,43%	95,32%	87,76%	93,09%	27,83%	52,51%	76,02%	100%
01	Pendidikan Dasar Usia Dini	11,46%	100%	100%	100%	84,44%	86,67%	78,05%	89,12%	26,60%	51,08%	75,50%	100%
02	Pendidikan Dasar	90,00%	92,96%	100%	95%	81,41%	99,29%	96,41%	87,03%	26,12%	51,43%	75,69%	100%
03	Pendidikan Kesetaraan	2,50%	100%	100%	97,50%	81,43%	100%	88,84%	93,12%	30,77%	53,84%	76,89%	100%
2	SPM Kesehatan	57,21%	8,22%	99,38%	90,78%	92,41%	89,20%	75,04%	93,68%	30,50%	47,86%	74,55%	94,15%
01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34,36%	19,45%	99,40%	94,87%	85,79%	87,51	97,37%	97,30%	25,09%	50,8%	65,07	90,12%
02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25,07%	8,14%	97,95%	98,98%	93,42%	100%	100%	100%	29,46%	51,67%	69,33%	89,64%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32,33%	12,19%	99,48%	93,54%	92,36%	100%	100%	100%	27,95%	51,16%	68,15%	89,94%
04	Pelayanan Kesehatan Balita	25,57%	8,63%	99,62%	93,71%	90,24%	89,27%	87,80%	95,05%	21,77%	47,39%	52,62%	74,93%
05	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	23,14%	4,12	99,75%	78,14%	98,36%	32,17%	46,64%	70,24%	27,40%	47,26%	68,66%	95,20%
06	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	85,58%	5,58%	99,98%	88,31%	89,11%	100%	60,50%	92,28%	35,53%	49,53%	79,58%	99,03%
07	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	23,78%	3,78%	99,95%	91,20%	97,46%	100%	100%	92,38%	34,45%	37,24%	73,28%	93,81%
08	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82,85%	2,85%	99,91%	78,99%	93,90%	98,81%	53,29%	83,80%	43,57%	58,87%	90,82%	99,98%
09	Pelayanan Kesehatan	87,02%	7,02%	98,83%	100%	84,14%	97,73%	74,07%	95,67%	45,36%	61,69%	96,94%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Penderita Diabetes Melitus												
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	88,45%	8,45%	99,48%	99,81%	92,49%	100%	42,73%	100%	20,73%	49,93%	82,31%	97,14%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	93,99%	13,99%	99,33%	87,93%	92,48%	66,87%	86,73%	100%	25,38%	48,97%	78,80%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	84,40%	4,40%	98,92%	83,84%	97,36%	98,00%	52,03%	97,47%	27,84%	30,75%	69,07%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Immunodeficiency Virus)												
3	SPM Sosial	0	78,87%	47,45%	86,72%	84,73%	87,63%	33,57%	97,57%	80,55%	84,24%	84,24%	99,40%
01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	0%	88,00%	15,61%	85,56%	84,62%	86,15%	11,10%	96,94%	95,51%	95,73%	95,73%	99,00%
02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	0%	84,00%	85,33%	90,67%	81,67%	81,67%	31,00%	98,33%	94,38%	100%	100%	98,27%
03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	0%	51,67%	53,42%	85,87%	87,69%	92,31%	49,27%	98,40%	95,90%	100%	100%	99,74%
04	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial	0%	82,67%	2,60%	83,51%	81,67%	90,00%	68,48%	94,17%	94,17%	98,33%	98,33%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti												
05	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0%	88,00%	80,26%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	100%	22,82%	27,16%	27,16%	100%
4	SPM Pekerjaan Umum	0%	76,90%	44,69%	91,84%	71,17%	33,20%	73,75%	99,26%	25,00%	50,35%	71,42%	100%
01	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	0%	90,00%	24,95%	86,70%	55,14%	66,40%	59,72%	88,71%	42,96%	53,00%	77,50%	100%
02	Penyediaan Pelayanan	0%	63,79%	64,43%	96,98%	87,19%	0,0%	87,77%	95,81%	7,04%	47,70%	65,53%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Pengolahan Air Limbah Domestik												
5	SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	42,50%	8,85%	12,44%	12,07%	38,66%	14,05%	97,29%	90,00%	75,00%	82,50%	100%
01	Penyediaan & Reahabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,0%	85,00%	17,71%	24,88%	24,13%	38,04%	28,11%	94,57%	90,00%	100%	82,50%	100%
02	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	39,29%	0,00%	100%	90,00%	50,00%	10,00%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
6	SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum	35,51%	16,67%	39,71%	95,08%	39,66%	57,32%	96,22%	96,00%	24,29%	42,78%	73,33%	100%
01	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	35,51%	16,67%	39,71%	95,08%	39,66%	57,32%	96,22%	96,00%	24,29%	42,78%	73,33%	100%
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan	0%	0%	35,54%	90,89%	88,99%	90,04%	86,03%	99,73%	67,00%	46,67%	99,50%	100%
01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	0%	0%	87,56%	100%	95,00%	95,00%	79,12%	100%	72,40%	20,00%	98,50%	100%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	0%	0%	11,03%	80,67%	82,14%	85,27%	100%	100%	45,28%	100%	100%	100%
03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	0%	0%	8,04%	92,00%	89,83%	89,84%	78,98%	99,20%	83,33%	20,00%	100%	100%
	Kategori Indeks Pencapaian SPM DAMKAR	17,62%	26,77%	58,15%	49,77%	19,98%	46,98%	97,98%	97,45%	22,93%	52,41%	64,78%	100%
01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	17,62%	26,77%	58,15%	49,77%	19,98%	46,98%	97,98%	97,45%	22,93%	52,41%	64,78%	100%
	Rata-rata	17,78%	50,50%	57,17%	76,50%	29,19%	53,08%	54,64%	72,99%	43,36%	58,39%	77,01%	98,93%

No	SPM	2022				2023				2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan, 2025

Dari tabel di atas, dapat diketahui terdapat beberapa bidang urusan yang masih belum mencapai target SPM (Standart Pelayanan Minimal) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, berikut beberapa permasalahan setiap bidang urusan pada capaian SPM tahun 2024:

a) SPM Urusan Pendidikan

Permasalahan :

1. Teknik penginputan data target kinerja indikator SPM setiap triwulan belum lengkap dan jelas di pedoman dan disosialisasikan oleh pemerintah pusat
2. Fasilitas pendidikan yang tersedia masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran.
3. Banyak tenaga pendidik belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam mengajar.
4. Kurangnya pendampingan dan bimbingan dalam penerapan kurikulum baru menyebabkan ketidaksesuaian antara konsep yang dirancang dengan praktik di lapangan.



5. Keterbatasan dana dan kebijakan yang belum maksimal menghambat pengembangan pendidikan, baik dalam aspek fasilitas, tenaga pendidik, maupun metode pembelajaran.
6. Tidak adanya sistem evaluasi yang ketat dan berkelanjutan menyebabkan berbagai permasalahan dalam pendidikan sulit teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat

Solusi yang diambil :

1. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta alat praktik dan teknologi pendukung pembelajaran.;
2. Pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai standar yang ditetapkan;
3. Pendampingan dan supervisi berkala dalam penerapan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia Pendidikan
4. Peningkatan akreditasi lembaga pendidikan, optimalisasi pendidikan kesetaraan, serta jaminan bantuan operasional agar akses pendidikan lebih merata.
5. Sistem evaluasi yang ketat dan sistematis untuk memastikan efektivitas kebijakan serta perbaikan cepat terhadap permasalahan pendidikan.

b) SPM Urusan Kesehatan

Permasalahan :

1. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas, serta pemeriksaan triple eliminasi belum dilakukan secara terpadu.
2. Persalinan oleh dukun masih terjadi, yang berdampak pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk kasus kematian bayi.



3. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada balita masih belum optimal, dan beberapa anak di luar sekolah belum mendapatkan layanan kesehatan
4. Skrining kesehatan untuk usia produktif dan lanjut belum mencakup seluruh desa, serta implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) masih dalam proses penyesuaian.
5. Penderita hipertensi dan diabetes mellitus menghadapi keterbatasan dalam cakupan skrining dan penggunaan RME.
6. Kurangnya dukungan keluarga dan pemantauan pasca pengobatan menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan bagi ODGJ berat.
7. Beberapa pasien tuberkulosis (TBC) tidak kembali untuk pemeriksaan lanjutan, sementara stigma masyarakat membuat banyak orang enggan menjalani pemeriksaan.
8. Kurangnya koordinasi lintas sektor menghambat pencegahan TBC, terutama di lingkungan pondok pesantren.
9. HIV terkendala oleh keterbatasan jumlah kader serta masih adanya rasa malu masyarakat untuk melakukan pemeriksaan

Solusi yang diambil :

- 1) Mengoptimalkan komunikasi dan edukasi (KIE) kepada ibu hamil serta memperkuat peran bidan desa dalam pemantauan kehamilan.
- 2) Edukasi kepada ibu bersalin dan keluarganya tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan serta peningkatan peran bidan desa dalam pemantauan ibu nifas
- 3) Optimalisasi edukasi kepada ibu bersalin mengenai pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir dan imunisasi serta meningkatkan supervisi tenaga Kesehatan
- 4) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan anak di luar sekolah dan memperluas akses informasi kesehatan melalui berbagai media.

- 5) Menambah jadwal posbindu di setiap desa, memastikan pemeriksaan sesuai standar, dan memperkuat koordinasi lintas program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2023 Tahun Anggaran 2024 - 106
- 6) Memastikan pemeriksaan PTM sesuai SOP, meningkatkan edukasi masyarakat melalui posbindu, dan menjamin ketersediaan obat yang cukup
- 7) Melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kepatuhan minum obat serta memberikan edukasi kepada keluarga pasien
- 8) Meningkatkan investigasi kontak, mengoptimalkan skrining TB di pondok pesantren, serta mengadvokasi fasilitas kesehatan agar lebih proaktif dalam penanganan kasus.
- 9) Mengoptimalkan skrining HIV bagi ibu hamil dan santri di pondok pesantren, serta melibatkan KUA dalam edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya pemeriksaan HIV.

c) SPM Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan :

1. Terbatasnya anggaran, sedikitnya sumber air baku terutama di daerah non CAT, serta kondisi alam berbatu dan jarak jauh dari sumber air menyebabkan kesulitan akses air layak. Selain itu, kualitas air di beberapa daerah bermasalah, seperti tingginya kadar besi dan air payau di pesisir pantai. B
2. Tidak adanya Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT) menyebabkan air limbah domestik tidak pernah dikuras. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pengolahan limbah yang baik-baik.

Solusi yang diambil :

- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih agar lebih banyak rumah tangga mendapatkan akses air minum layak.



- 2) Meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah sistem off-site di kawasan permukiman untuk mengatasi minimnya fasilitas pengolahan air limbah domestik.

d) SPM Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi dan Koordinasi
2. Kurangnya data yang diperlukan di form aplikasi e-SPM karena masih harus berkoordinasi dengan pihak/lembaga/OPD lain
3. Belum ada Rencana aksi daerah yang mencantumkan Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Solusi yang diambil :

- 1) Koordinasi dengan Kepala Desa setempat, masyarakat yang terkena Bencana
- 2) Penanganan Kebencanaan dengan cara melakukan koordinasi dengan BPBD terkait Wilayah dan kondisi rumah korban Bencana Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2023 Tahun Anggaran 2024 – 126
- 3) Percepatan penanganan Pembangunan / rehab rumah bagi korban bencana sesuai kondisi di lapangan dan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah

e) SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan :

1. Keterbatasan anggaran menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan trantibum, penegakan perda dan pemadaman serta penyelamatan korban kebakaran
2. Keterbatasan sarana prasarana minimal menyebabkan program tidak optimal.
3. Program berjalan tetapi perlu optimalisasi, meskipun tidak ada warga yang mengalami dampak penegakan perda Laporan SPM

Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2023 Tahun Anggaran 2024 – 147.

4. Kurangnya kapasitas SDM menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal dan membutuhkan peningkatan kompetensi.
5. Minimnya terobosan dalam implementasi SPM sub urusan bencana, sehingga perlu pendekatan pentahelix untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak.
6. Tingginya kadar besi pada air di beberapa daerah berdampak pada kualitas air minum dan kesehatan masyarakat.
7. Program berjalan tetapi perlu optimalisasi, meskipun tidak ada warga yang mengalami kerugian langsung.

Solusi yang diambil :

- 1) Meningkatkan pemetaan dan penyusunan dokumen Kajian rawan gangguan trantibum dan rawan kebakaran untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- 2) Menyediakan sarana prasarana seperti kendaraan patroli dan kendaraan pemadam kebakran untuk respons yang lebih cepat.
- 3) Meningkatkan pemetaan dan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- 4) Menggunakan pendekatan pentahelix dalam sosialisasi dan edukasi rawan bencana melalui berbagai media serta pemasangan rambu evakuasi.
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM dan menyediakan sarana prasarana seperti tenda komando, mobil rescue, dan dapur umum untuk respons yang lebih cepat.
- 6) Penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah rawan bencana untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kualitas air yang buruk.



- 7) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan respon cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB) agar mitigasi bencana lebih efektif.

f) SPM Urusan Sosial

Permasalahan :

1. Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Ketersediaan tempat yang menjadi tujuan rujukan (rumah sakit) pasien disabilitas mental/ODGJ terbatas sehingga tidak dapat langsung dilakukan rujukan dan harus menunggu.
5. Keluarga disabilitas mental/ODGJ belum mau menerima ketika akan dilakukan reunifikasi keluarga (dengan alasan lingkungan dan kemampuan untuk merawat pasca dilakukan rehabilitasi) .

Solusi yang diambil :

- 1) Penyediaan layanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, dan pengemis melalui program permakanan, sandang, alat bantu, serta peningkatan SDM untuk mendukung implementasi program tersebut.
- 2) Peningkatan layanan kedaruratan, layanan data dan pengaduan, serta layanan rujukan guna memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak telantar, dan lansia telantar.
- 3) Pemberian layanan rujukan dan penelusuran keluarga guna mempercepat proses rehabilitasi serta memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat di fasilitas kesehatan atau sosial yang tersedia.
- 4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga yang didukung dengan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar keluarga lebih



siap dalam menerima kembali anggota keluarga mereka setelah rehabilitasi.

- 5) Pelayanan dukungan psikososial serta sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya penerimaan dan perawatan bagi penyandang disabilitas mental/ODGJ guna mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah terhadap persaingan ekonomi pasar global yang dimana barang, jasa, penduduk, keahlian, dan ide bergerak bebas melintasi perbatasan geografi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing provinsi dan kabupaten/kota dengan melihat tingkat produktivitas daerah tersebut. Komponen yang diukur oleh IDSD terdiri dari lingkungan pendukung, pasar, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Berikut merupakan capaian IDSD Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.76
Indeks Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,39	2,86	3,20	3,46

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian IDSD Kabupaten Pamekasan dari tahun 2021 sampai 2024. Secara keseluruhan, IDSD Kabupaten mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Pamekasan adalah 2,39. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 3,46 pada tahun 2024. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas Kabupaten Pamekasan dalam mengoptimalkan potensi ekonominya mengalami peningkatan. Capaian tersebut dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Pamekasan.

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dapat diperoleh pengeluaran rata-rata perkapita sebulan suatu wilayah baik pengeluaran untuk makanan maupun non makanan. Sebagai gambaran, berikut tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.77
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kuantil
Pengeluaran Tahun 2024

Kuantil	Satuan	Tahun
		2024
Kuantil 1	Rupiah	416.169
Kuantil 2	Rupiah	529.419
Kuantil 3	Rupiah	668.633
Kuantil 4	Rupiah	893.031
Kuantil 5	Rupiah	1.772.914

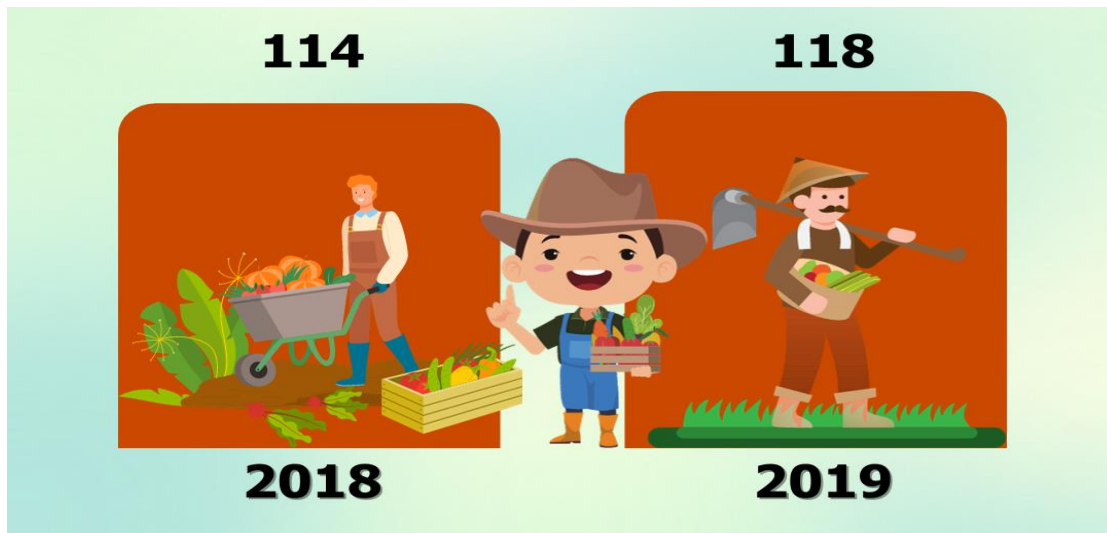
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2025

Pengeluaran rata-rata perkapita per bulan di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 pada kelompok kuantil 1 sebesar Rp. 416.169, kuantil 2 sebesar Rp. 529.419, kuantil 3 sebesar Rp. 668.633, kuantil 4 sebesar Rp. 893.031, dan kuantil 5 sebesar Rp. 1.772.914. Sedangkan rata-rata pengeluaran per Kapita keseluruhan sebesar Rp 856.543.

B. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani atau (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani di Kabupaten Pamekasan.

Gambar 2.20
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

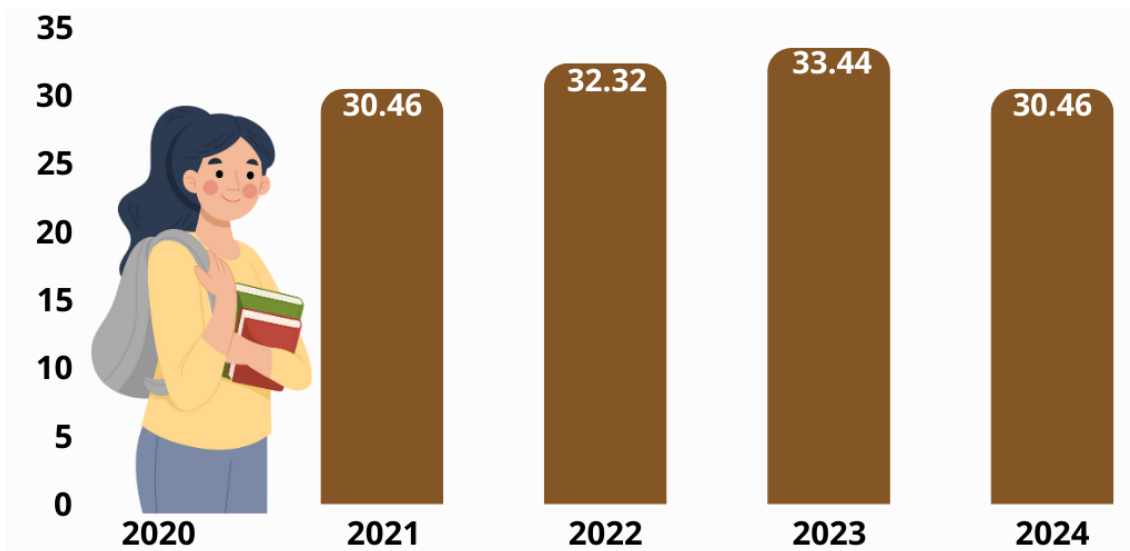
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik berikut ini dapat diketahui komposisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah.

Gambar 2. 21

Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2021 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik capaian kinerja, terlihat bahwa persentase penduduk Kabupaten Pamekasan usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 30,46%, mengalami peningkatan menjadi 32,32% pada 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 33,44% pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali ke angka 30,46%, sama dengan capaian pada tahun 2021. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan capaian pendidikan, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan tren positif secara konsisten. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian ini, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kebijakan daerah, dan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan untuk merumuskan intervensi yang lebih efektif ke depannya.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang

produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi >64 tahun). Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.78
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	195,982	194,792	194,008	213.874	218.310
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	59,778	46,358	65,979	74.349	77.962
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	255,76	241,15	259,987	288.223	296.272
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	493,589	595,914	597,831	594.614	608.693
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	51,82	40,47	43,49	48,47	48,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika melihat data tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan yang semula 51,82 pada tahun 2020 menjadi 40,47 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 43,49. Namun kembali naik menjadi 48,47 pada tahun 2023 dan 48,67 pada tahun 2024. Di dalam tabel angka tersebut menunjukkan bahwa ada beban tinggi dan harus ditanggung penduduk yang produktif di Kabupaten Pamekasan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif bahkan tidak produktif lagi.

2.4.3 Daya Saing Iklim Investasi

A. Nilai Investasi

Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah nilai investasi yang berfluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2020 persentase peningkatan investasi di Kab/Kota sebesar 36,67% dengan nilai investasi sebesar Rp. 18.631.329.775, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 108,16% dengan nilai investasi sebesar Rp. 425.129.380.211.

Tabel 2.79
Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota (%)	39,67	666,45	80,09	-20,58	108,16
Nilai Investasi (Rp)	18.631.329.775	142.799.228.246	257.169.190.437	204.234.294.312	425.129.380.211

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pamekasan, 2025

Faktor-faktor pendukung peningkatan nilai investasi di Kabupaten Pamekasan adalah semakin banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pamekasan. Selain itu Pamekasan kini menjadi kawasan yang strategis dan lebih berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik diantara tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura.

2.5 Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

Tabel 2.80
Evaluasi RKPD Kabupaten Pamekasan 2024 sampai dengan
Triwulan IV

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Pamekasan
Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan 4**

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12+ 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%							
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp		k	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,4	3,21	3,3		30,87																		
				Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	6,6	6,34	6,4		21,46																		
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	7,8	7,53	7,6		7,74																		
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Skala	87	63.696.032.985	86	0	87	19.157.079.940	0	3.827.331.330	0	9.527.590.149	50	2.845.987.695	37	2.935.805.987	37	19.136.715.161	42.53%	99.89%	123	19.136.715.161	141.38%	30.04%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		Dokumen	4	519.000.000	4	0	5	55.000.000	0	0	0	0	3	0	2	48.675.392	2	48.675.392	40%	88.5%	6	48.675.392	150%	9.38%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		Dokumen	2	375.000.000	4	0	2	55.000.000	0	0	0	0	0	2	48.675.392	2	48.675.392	100%	88.5%	6	48.675.392	300%	12.98%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik		Dokumen	7	51.379.532.985	7	0	7	17.222.832.270	0	3.556.081.405	0	8.983.594.891	4	2.341.577.987	3	2.341.577.987	3	17.222.832.270	42.86%	100%	10	17.222.832.270	142.86%	33.52%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Orang/bulan	200	51.330.673.985	190	0	192	17.222.832.270	50	3.556.081.405	50	8.983.594.891	50	2.341.577.987	42	2.341.577.987	42	17.222.832.270	21.88%	100%	232	17.222.832.270	116%	33.55%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi pendapatan perangkat daerah		Dokumen	1	45.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi		Orang	0	840.000.000	19	0	192	45.000.000	0	0	0	0	100	0	92	30.984.000	92	30.984.000	47.92%	68.85%	111	30.984.000	0%	3.69%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		orang	35	770.000.000	25	0	30	45.000.000	0	0	0	0	0	30	30.984.000	30	30.984.000	100%	68.85%	55	30.984.000	157.14%	4.02%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi		Dokumen	6	1.440.000.000	2	0	6	90.000.000	0	0	0	26.000.000	3	34.032.500	3	29.967.500	3	90.000.000	50%	100%	5	90.000.000	83.33%	6.25%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	1	150.000.000	3	0	1	15.000.000	0	0	0	1.000.000	0	9.032.500	1	4.967.500	1	15.000.000	100%	100%	4	15.000.000	400%	10%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Laporan	25	450.000.000	25	0	25	75.000.000	0	0	10	25.000.000	10	25.000.000	5	25.000.000	5	75.000.000	20%	100%	30	75.000.000	120%	16.67%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana/prasarana yang diadakan		Dokumen	3	2.700.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100%	0%	3	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		d	4	5.422.500.000	4	0	4	1.659.999.600	0	271.249.925	0	494.661.925	2	447.043.875	2	447.043.875	2	1.659.999.600	50%	100%	6	1.659.999.600	150%	30.61%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan		Laporan	1	600.000.000	3	0	1	164.999.700	1	41.249.925	0	41.249.925	0	41.249.925	0	41.249.925	0	164.999.700	0%	100%	3	164.999.700	300%	27.5%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan"		Laporan	6	4.725.000.000	6	0	6	1.494.999.900	0	230.000.000	0	453.412.000	3	405.793.950	3	405.793.950	3	1.494.999.900	50%	100%	9	1.494.999.900	150%	31.64%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah		Dokumen	2	1.350.000.000	2	0	2	84.248.070	0	0	0	23.333.333	0	23.333.333	2	37.557.233	2	84.223.899	100%	99.97%	4	84.223.899	200%	6.24%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	5	300.000.000	0	0	5	70.000.000	0	0	0	0	23.333.333	3	23.333.333	2	23.333.333	2	69.999.999	40%	100%	2	69.999.999	40%	23.33%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	150.000.000	0	0	5	14.248.070	0	0	0	0	0	0	5	14.223.900	5	14.223.900	100%	99.83%	5	14.223.900	100%	9.48%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	88	12.882.854.431	82	3.792.430.492	86,78	4.388.428.489	0	829.457.193	0	1.250.277.393	0	961.542.664	81	1.201.824.962	81	4.243.102.212	93.34%	96.69%	163	8.035.532.704	185.23%	62.37%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	24	195.000.000	6	0	8	30.510.000	3	1.713.500	2	6.512.250	1	8.128.000	2	11.943.750	8	28.297.500	100%	92.75%	14	28.297.500	58.33%	14.51%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12	82.500.000	4	15.163.500	4	23.130.000	2	1.713.500	1	5.120.000	1	4.315.000	0	11.236.000	4	22.384.500	100%	96.78%	8	37.548.000	66.67%	45.51%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	6	45.000.000	2	11.163.000	2	7.380.000	1	0	1	1.392.250	0	3.813.000	0	707,75	2	5.913.000	100%	80.12%	4	17.076.000	66.67%	37.95%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	12	10.506.789.996	4	0	4	3.614.142.489	1	731.541.527	1	1.117.838.554	1	734.982.813	1	919.601.218	4	3.503.964.112	100%	96.95%	8	3.503.964.112	66.67%	33.35%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	90	10.514.854.431	31	3.187.361.070	30	3.614.142.489	30	731.541.527	30	1.117.838.554	30	734.982.813	30	919.601.218	30	3.503.964.112	100%	96.95%	61	6.691.325.182	67.78%	63.64%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	5	60.000.000	4	0	4	24.000.000	0	0	2	0	1	24.000.000	4	24.000.000	100%	100%	8	24.000.000	160%	40%	DINAS PERIKANAN			
		3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	52.500.000	0	0	6	24.000.000	0	0	2	0	2	24.000.000	6	24.000.000	100%	100%	6	24.000.000	33.33%	45.71%	DINAS PERIKANAN			
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan	15	313.500.000	5	0	5	80.784.000	2	5.979.900	1	20.176.726	1	21.349.000	1	14.445.000	5	61.950.626	100%	76.69%	10	61.950.626	66.67%	19.76%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	9.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	2.059.000	1	0	0	0	0	1	2.059.000	100%	82.36%	2	4.559.000	66.67%	50.66%	DINAS PERIKANAN		
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	24.000.000	2	6.671.000	2	7.000.000	0	2.160.900	1	1.625.000	1	950	0	2.033.000	2	6.768.900	100%	96.7%	4	13.439.900	66.67%	56%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6	24.000.000	2	7.460.000	2	7.000.000	0	1.760.000	1	0	0	0	1	5.240.000	2	7.000.000	100%	100%	4	14.460.000	66.67%	60.25%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan, penggandaan yang disediakan	Paket	6	24.000.000	2	7.330.000	2	7.000.000	0	0	1	3.812.500	1	1.509.000	0	522	2	5.843.500	100%	83.48%	4	13.173.500	66.67%	54.89%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi	Laporan	105	210.000.000	30	53.744.000	30	57.284.000	0	0	18	14.739.226	10	18.890.000	2	6.650.000	30	40.279.226	100%	70.31%	60	94.023.226	57.14%	44.77%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	6	1.117.500.000	2	0	2	353.000.000	2	79.239.266	2	90.599.363	2	83.031.582	2	93.679.425	2	346.549.636	100%	98.17%	4	346.549.636	66.67%	31.01%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	Laporan	15	262.500.000	3	74.360.222	5	85.000.000	1	20.139.266	1	16.999.363	1	21.931.582	2	19.779.425	5	78.849.636	100%	92.76%	8	153.209.858	53.33%	58.37%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	54	811.000.000	18	266.700.000	18	268.000.000	18	59.100.000	18	73.600.000	18	61.100.000	18	73.900.000	18	267.700.000	100%	99.89%	36	534.400.000	66.67%	65.89%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	Sarpras	27	344.500.000	9	0	9	285.992.000	2	10.983.000	3	15.150.500	2	114.051.269	2	138.155.569	9	278.340.338	100%	97.32%	18	278.340.338	66.67%	80.8%	DINAS PERIKANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	6	119.000.000	2	51.067.600	2	36.500.000	1	6.933.000	0	6.475.000	1	11.217.500	0	11.656.000	2	36.281.500	100%	99.4%	4	87.349.100	66.67%	73.4%	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	Unit	9	82.500.000	3	20.891.100	3	33.500.000	1	2.550.000	0	2.590.000	1	6.270.550	1	21.794.300	3	33.204.850	100%	99.12%	6	54.095.950	66.67%	65.57%	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Unit	6	19.500.000	3	3.550.000	2	4.492.000	1	1.500.000	0	0	0	0	1	2.900.000	2	4.400.000	100%	97.95%	5	7.950.000	83.33%	40.77%	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	6	420.000.000	2	21.469.000	2	211.500.000	0	0	1	6.085.500	1	96.563.219	0	101.805.269	2	204.453.988	100%	96.67%	4	225.922.988	66.67%	53.79%	DINAS PERIKANAN
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100	27.641.684.071	99	0	100	7.677.679.856	0	1.121.226.758	25	2.483.313.310	55	2.100.984.240	20	1.824.061.970	20	7.529.586.278	20%	98.07%	119	7.529.586.278	119%	27.24%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	480.000.000	97	0	100	101.900.000	0	7.960.000	25	16.730.000	50	30.075.000	25	46.775.638	100	101.540.638	100%	99.65%	197	101.540.638	197%	21.15%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	300.000.000	2	0	2	65.845.000	0	7.960.000	1	16.730.000	1	26.600.000	0	14.434.221	2	65.724.221	100%	99.82%	4	65.724.221	200%	21.91%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	43	15.000.000	43	0	15	2.000.000	0	0	15	0	0	0	0	2.000.000	15	2.000.000	100%	100%	58	2.000.000	134.88%	13.33%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	43	15.000.000	43	0	15	2.000.000	0	0	0	0	15	0	0	2.000.000	15	2.000.000	100%	100%	58	2.000.000	134.88%	13.33%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	43	30.000.000	43	0	15	2.000.000	0	0	15	0	0	0	0	2.000.000	15	2.000.000	100%	100%	58	2.000.000	134.88%	6.67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	43	30.000.000	43	0	15	2.000.000	0	0	0	0	15	0	0	2.000.000	15	2.000.000	100%	100%	58	2.000.000	134.88%	6.67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	45.000.000	1	0	1	18.055.000	0	0	0	0	1	3.475.000	0	14.341.417	1	17.816.417	100%	98.68%	2	17.816.417	200%	39.59%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	45.000.000	4	0	4	10.000.000	0	0	2	0	0	0	2	10.000.000	4	10.000.000	100%	100%	8	10.000.000	200%	22.22%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	%	100	16.041.600.996	100	0	100	5.270.509.568	64	694.975.444	64	1.930.613.909	64	1.107.265.523	64	1.440.574.860	64	5.173.429.736	64%	98.16%	164	5.173.429.736	164%	32.25%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	64	16.041.600.996	64	0	64	5.270.509.568	64	694.975.444	64	1.930.613.909	64	1.107.265.523	64	1.440.574.860	64	5.173.429.736	100%	98.16%	128	5.173.429.736	200%	32.25%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	100	912.000.000	94	0	100	176.655.000	0	0	30	49.184.054	40	37.633.700	30	89.748.700	100	176.566.454	100%	99.95%	194	176.566.454	194%	19.36%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	60.000.000	12	0	12	10.000.000	0	0	6	1.562.000	3	2.954.000	3	5.484.000	12	10.000.000	100%	100%	24	10.000.000	200%	16.67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	150.000.000	12	0	12	32.155.000	0	0	6	9.199.100	3	12.609.700	3	10.345.700	12	32.154.500	100%	100%	24	32.154.500	200%	21.44%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab							
											I		II		III		IV														
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	300.000.000	12		0	12	55.000.000	0		0	6	9.338.900	3		0	3	45.576.100	12	54.915.000	100%	99.85%	24	54.915.000	200%	18.31%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	60.000.000	12		0	12	19.500.000	0		0	6	5.899.000	3		0	3	13.599.000	12	19.498.000	100%	99.99%	24	19.498.000	200%	32.5%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	320.000.000	12		0	12	60.000.000	0		0	6	23.185.054	3	22.070.000	3	14.743.900	12	59.998.954	100%	100%	24	59.998.954	200%	18.75%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana yang terpenuhi	unit	4	1.610.000.000	1		0	12		0	0		0	0		0	0		0	0	0%	0%	1		0	25%	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan	%	100	7.088.083.075	95		0	100	2.008.156.288	0	418.291.314	50	463.309.213	25	907.873.017	25	168.793.706	100	1.958.267.250	100%	97.52%	195	1.958.267.250	195%	27.63%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	42.928.215	2		0	12	9.020.000	0		0	6	3.005.000	3	2.670.000	3	3.320.000	12	8.995.000	100%	99.72%	14	8.995.000	700%	20.95%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	300.000.000	12		0	12	167.750.000	3	4.291.314	3	17.734.213	3	30.533.017	3	112.383.706	12	164.942.250	100%	98.33%	24	164.942.250	200%	54.98%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6.678.144.000	12		0	12	1.831.386.288	3	414.000.000	3	442.570.000	3	874.670.000	3	53.090.000	12	1.784.330.000	100%	97.43%	24	1.784.330.000	200%	26.72%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	1.060.000.000	99		0	100	108.859.000	0		0	50	23.476.134	25	18.137.000	25	66.569.066	100	108.182.200	100%	99.38%	199	108.182.200	199%	10.21%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	210.000.000	12		0	2	46.759.000	0		0	1	14.860.134	0	15.937.000	1	15.961.666	2	46.758.800	100%	100%	14	46.758.800	700%	22.27%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	210.000.000	12		0	4	48.000.000	0		0	2	7.166.000	1		0	1	40.313.900	4	47.479.900	100%	98.92%	16	47.479.900	266.67%	22.61%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	40.000.000	12		0	15	9.100.000	0		0	5	1.450.000	5	2.200.000	5	5.450.000	15	9.100.000	100%	100%	27	9.100.000	225%	22.75%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	0		0	2	5.000.000	0		0	0		0	0	0	1	4.843.500	1	4.843.500	50%	96.87%	1	4.843.500	50%	2.42%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	%	100	150.000.000	0		0	100	11.600.000	0		0	0		0	0	0	100	11.600.000	100	11.600.000	100%	100%	100	11.600.000	100%	7.73%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	4	150.000.000	0		0	4	11.600.000	0		0	0		0	0	0	3	11.600.000	3	11.600.000	75%	100%	3	11.600.000	75%	7.73%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	64839	1.055.500.000	22809	137.136.300	21116	300.328.000	6434,8	4.471.000	6284,6	232.081.300	5692,8	52.983.900	6542,2	1.344.800	24954	290.881.000	118.18%	96.85%	47763	428.017.300	73.66%	40.55%	DINAS PERIKANAN			
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan bina kelompok nelayan	%	7	163.000.000	5	92.763.800	5	8.328.000	0	1.384.500	9,5	1.810.000	0	4.424.000	5		0	5	7.618.500	100%	91.48%	10	100.382.300	142.86%	61.58%	DINAS PERIKANAN		
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	3	33.000.000	1	4.956.600	1	8.328.000	0	1.384.500	0	1.810.000	0	4.424.000	1		0	1	7.618.500	100%	91.48%	2	12.575.100	66.67%	38.11%	DINAS PERIKANAN		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang naik kelas	Kelompok	8	869.000.000	3	39.372.500	2	285.000.000	0	3.086.500	4	229.085.100	0	44.090.900	0		0	4	276.262.500	200%	96.93%	7	315.635.000	87.5%	36.32%	DINAS PERIKANAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Nelayan	175	757.500.000	25	25.452.000	60	250.000.000	0	1.321.750	35	209.492.100	90	32.461.650	0		0	125	243.275.500	208.33%	97.31%	150	268.727.500	85.71%	35.48%	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	46	33.000.000	30	5.000.000	10	10.000.000	1	482	4	8.593.000	3	154	5		0	13	9.229.000	130%	92.29%	43	14.229.000	93.48%	43.12%	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	Unit usaha	600	78.000.000	100	8.920.500	200	25.000.000	0	1.282.750	110	11.000.000	120	11.475.250	81		0	311	23.758.000	155.5%	95.03%	411	32.678.500	68.5%	41.9%	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha perikanan bidang perikanan tangkap yang usahanya dalah (satu) keb/kota yang diterbitkan	Izin Usaha	105	24.000.000	30	5.000.000	30	7.000.000	5		0	10	1.186.200	10	4.469.000	5	1.344.800	30	7.000.000	100%	100%	60	12.000.000	57.14%	50%	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	Rekomendasi	225	24.000.000	50	5.000.000	50	7.000.000	10		0	15	1.186.200	0	4.469.000	25	1.344.800	50	7.000.000	100%	100%	100	12.000.000	44.44%	50%	DINAS PERIKANAN
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	3531	2.809.500.000	1114	302.363.250	1123,9	844.846.500	251,27	92.048.000	294,06	63.091.250	283,09	173.406.914	323,78	494.049.125	1152,2	822.595.289	102.52%	97.37%	2266,2	1.124.958.539	64.18%	40.04%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang naik kelas	Kelompok	4	2.255.000.000	2	62.595.500	1	779.250.000	0	92.048.000	0	35.996.150	0	166.801.814	1	465.178.525	1	760.024.489	100%	97.53%	3	822.619.989	75%	36.48%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	21	1.657.500.000	10	57.722.500	7	750.000.000	3	92.048.000	2	15.500.400	2	159.454.814	0	465.178.525	7	732.181.739	100%	97.62%	17	789.904.239	80.95%	47.66%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	17	33.000.000	8	4.873.000	5	9.250.000	0	0	0	4.021.000	5	4.847.000	0		0	5	8.868.000	100%	95.87%	13	13.741.000	76.47%	41.64%	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	24	64.500.000.000	0	0	6	20.000.000	0	0	6	16.474.750	0	2.500.000	0		0	6	18.974.750	100%	94.87%	6	18.974.750	25%	0.03%	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) kab/kota yang diterbitkan	Izin Usaha	91	24.000.000	24	5.000.000	24	7.000.000	5		0	5	1.724.100	10	3.325.100	4	1.950.600	24	6.999.800	100%	100%	48	11.999.800	52.75%	50%	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten	Rekomendasi	25	24.000.000	15	5.000.000	25	7.000.000	5		0	5	1.724.100	10	3.325.100	5	1.950.600	25	6.999.800	100%	100%	40	11.999.800	160%	50%	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	6	330.500.000	5	234.767.750	4	58.596.500	0	0	0	25.371.000	0	3.280.000	8,47	26.920.000	8,47	55.571.000	211.75%	94.84%	13,47	290.338.750	224.5%	87.85%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	3	24.000.000	1	5.000.000	1	9.500.000	0	0	0	3.791.000	0	3.280.000	1	1.792.500	1	8.863.500	100%	93.3%	2	13.863.500	66.67%	57.76%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Dokumen	3	157.500.000	1	35.049.250	1	49.096.500	0	0	0	21.580.000	0		0	1	25.127.500	1	46.707.500	100%	95.13%	2	81.756.750	66.67%	51.91%	DINAS PERIKANAN
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Persentase	100	210.000.000	75	12.000.000	77	65.753.200	0	0	0	20	3.959.350	35	21.835.500	22	39.575.950	77	65.370.800	100%	99.42%	152	77.370.800	152%	36.84%	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Wilayah	35	210.000.000	10	12.000.000	10	65.753.200	0		0	3	3.959.350	4	21.835.500	3	39.575.950	10	65.370.800	100%	99.42%	20	77.370.800	57.14%	36.84%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	68	138.000.000	44	50.163.700	65,25	218.200.000	0		0	0	35.981.600	0	133.129.300	68,32	45.807.700	68,32	214.918.600	104.7%	98.5%	112,32	265.082.300	165.18%	192.09%	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah produksi ikan olahan	Ton	16831		7842		5522,4		0		0		0		7247		7247		131.23%		15089		89.65%				
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang naik kelas	Kelompok	2	33.000.000	1	4.845.000	1	7.300.000	0		0	0	2.688.500	0	2.350.000	1	1.904.000	1	6.942.500	100%	95.1%	2	11.787.500	100%	35.72%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan kemanan hasilnya	Kelompok	18	67.000.000	5	12.987.000	5	20.000.000	0		0	5	8.034.600	0	9.020.400	7	2.945.000	12	20.000.000	240%	100%	17	32.987.000	94.44%	49.23%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yan tersedia/disalurkan	Bahan	6	588.000.000	2	32.331.700	2	190.900.000	0		0	0	25.258.500	0	121.758.900	2	40.958.700	2	187.976.100	100%	98.47%	4	220.307.800	66.67%	37.47%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Ton	308	138.500.000	60	32.331.700	88	43.000.000	22		0	22	21.073.500	25	10.013.800	19	11.062.000	19	42.149.300	21.59%	98.02%	79	74.481.000	25.65%	53.78%	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	150	450.000.000	0		0	50	147.900.000	0		0	0	4.185.000	30	111.745.100	120	29.896.700	150	145.826.800	300%	98.6%	150	145.826.800	100%	32.41%	DINAS PERIKANAN
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas sektor pertanian (ton/ha)	Persen	6	49.470.000.000	6		0	6	7.298.044.782	0		0	4,17	17.482.000	4,17	385.546.396	4,17	6.633.365.846	4,17	7.036.394.242	69.5%	96.41%	10,17	7.036.394.242	169.5%	14.22%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Peningkatan populasi ternak, produksi ternak (%)	Persen	1		1		1		0		0		0		0		1	1	100%		2		200%				
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	Poktan	2	41.325.000.000	2		0	2	5.722.045.240	0		0	0	1	99.733.625	1	5.483.613.125	1	5.583.346.750	50%	97.58%	3	5.583.346.750	150%	13.51%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	19.800.000.000	1		0	1	5.162.020.000	0		0	0	0	0	1	5.069.772.500	1	5.069.772.500	100%	98.21%	2	5.069.772.500	200%	25.6%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	21.300.000.000	1		0	1	560.025.240	0		0	0	0	99.733.625	0	413.840.625	0	513.574.250	0%	91.71%	1	513.574.250	100%	2.41%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengelolaan SDG yang disediakan	Unit	3	900.000.000	1		0	3	62.000.000	0		0	0	0	53.884.000	3	8.116.000	3	62.000.000	100%	100%	4	62.000.000	133.33%	6.89%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	300.000.000	0		0	1	62.000.000	0		0	0	0	53.884.000	1	8.116.000	1	62.000.000	100%	100%	1	62.000.000	100%	20.67%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan mutu bibit ternak	Laporan	1	300.000.000	1		0	1	0	0		0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	2	0	200%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan poltryshop yang mendapat pembinaan dan pengawasan obat hewan	Laporan	26	0	15		0	16	34.740.000	0		0	0	13.342.000	6	10.699.000	10	10.699.000	10	34.740.000	62.5%	100%	25	34.740.000	96.15%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang dilaksanakan	tempat	20	35.000.000	5	59.352.000	6	34.740.000	0		0	1	13.342.000	2	10.699.000	3	10.699.000	3	34.740.000	50%	100%	8	94.092.000	40%	268.83%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab						
									I				II				III									IV					
									7		8		9		10		11		12							13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%	
1	2	3	4	5	6	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	18			
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten	Laporan	23	6.945.000.000	19		0	20	1.479.259.542	0		0	0	4.140.000	10	221.229.771	10	1.130.937.721	10	1.356.307.492	50%	91.69%	29	1.356.307.492	126.09%	19.53%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.05 .0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Laporan	30	3.050.000.000	0		0	30	250.000.000	0		0	10	0	10	47.250.000	10	159.000.000	10	206.250.000	33.33%	82.5%	10	206.250.000	33.33%	6.76%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.05 .0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	0	3.100.000.000	1		0	1	935.000.000	0		0	0	4.140.000	0	26.850.000	1	824.807.950	1	855.797.950	100%	91.53%	2	855.797.950	0%	27.61%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.02.2.05 .0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah akseptor inseminasi buatan, S/C angka kelahiran hasil inseminasi buatan	Laporan	1		0	1		0	1	294.259.542	0		0	0	0	147.129.771	1	147.129.771	1	294.259.542	100%	100%	2	294.259.542	200%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Persen	31500	4.800.000.000	0		0	100	206.304.807	0		0	30	4.243.750	30	81.249.937	40	120.811.120	40	206.304.807	40%	100%	40	206.304.807	0.13%	4.3%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Ekor	0	600.000.000	0		0	4000	74.999.870	0		0	0	4.243.750	1000	28.225.250	3000	42.530.870	3000	74.999.870	75%	100%	3000	74.999.870	0%	12.5%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.01 .0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1		0	1		0	1	74.999.870	0		0	0	4.243.750	0	28.225.250	1	42.530.870	1	74.999.870	100%	100%	2	74.999.870	200%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan lalulintas hewan	Laporan	2	525.000.000	250		0	1	74.953.043	0		0	0	0	0	17.902.793	1	57.050.250	1	74.953.043	100%	100%	251	74.953.043	12550%	14.28%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.02 .0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	1		0	1		0	1	74.953.043	0		0	0	0	17.902.793	1	57.050.250	1	74.953.043	100%	100%	2	74.953.043	200%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Laboratorium dan jasa Medik Veteriner yang dikelola	Laporan	5	2.400.000.000	15000		0	5		0	0	0	0	0	0	5		0	5	0	100%	0%	15005	0	300100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memiliki surat izin berusaha (SIB)	Laporan	50	975.000.000	25		0	50	56.351.894	0		0	0	0	30	35.121.894	20	21.230.000	20	56.351.894	40%	100%	45	56.351.894	90%	5.78%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.04.2.04 .0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit usaha	3		0	3		0	3	56.351.894	0		0	0	0	1	35.121.894	2	21.230.000	2	56.351.894	66.67%	100%	5	56.351.894	166.67%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	JUMLAH UNIT USAHA HEWAN YANG MENDAPAT PENDAMPINGAN	Laporan	500	300.000.000	0		0	500	0	0	0	0	0	0	300	0	200	0	200	0	40%	0%	200	0	40%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase terkendalinya bencana pertanian	Persentase	3	6.300.000.000	3		0	3	25.000.000	0		0	1	0	1	0	1	15.339.200	1	15.339.200	33.33%	61.36%	4	15.339.200	133.33%	0.24%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan lahan pertanian dampak bencana yang tertangani	Laporan	600	6.300.000.000	0		0	600	25.000.000	0		0	0	0	300	0	300	0	300	15.339.200	50%	61.36%	300	15.339.200	50%	0.24%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.05.2.01 .0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Laporan	300	300.000.000	0		0	300	25.000.000	0		0	0	0	0	300	0	300	15.339.200	100%	61.36%	300	15.339.200	100%	5.11%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang sesuai standar pelayanan	Persentase	100	900.000.000	100	0	100	5.000.000	0		30		30	1.190.000	40	3.810.000	40	5.000.000	40%	100%	140	5.000.000	140%	0.56%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rekomendasi izin usaha pertanian yg diterbitkan	Laporan	1	675.000.000	1	0	1	5.000.000	0		0	0	0	1.190.000	1	3.810.000	1	5.000.000	100%	100%	2	5.000.000	200%	0.74%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.06.2.01 .0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1	0	1	0	1	5.000.000	0		0	0	0	1.190.000	0	3.810.000	0	5.000.000	0%	100%	1	5.000.000	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Sungai	Fasilitasi penerbitan izin usaha peternakan	Laporan	15	225.000.000	10	0	15	0	0		0	0	10	0	5	0	5	0	33.33%	0%	15	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas	Persentase	100	3.000.000.000	100	0	100	299.999.950	0		30	14.882.200	30	124.373.150	40	160.744.600	40	299.999.950	40%	100%	140	299.999.950	140%	10%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	Unit	1034	3.000.000.000	1024	0	1034	299.999.950	0		0	0	0	14.882.200	0	124.373.150	1034	299.999.950	100%	100%	2058	299.999.950	199.03%	10%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.07.2.01 .0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	13	600.000.000	13	0	13	49.999.950	0		0	0	3	12.920.000	3	14.270.950	10	49.999.950	76.92%	100%	23	49.999.950	176.92%	8.33%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		3.27.07.2.01 .0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	1.200.000.000	0	0	3	250.000.000	0		0	1	1.962.200	1	110.102.200	1	137.935.600	1	250.000.000	33.33%	100%	1	250.000.000	33.33%	20.83%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persentase	100	8.438.161.782	36	0	100	188.230.500	0	18.119.976	25	73.918.430	65	26.644.065	10	50.862.430	10	169.544.901	10%	90.07%	46	169.544.901	46%	2.01%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola oleh pemerintah daerah	pasar/pert okoan	15	7.718.161.782	15	0	15	100.000.000	0	2.800.000	5	30.691.150	5	24.744.065	5	24.312.430	5	82.547.645	33.33%	82.55%	20	82.547.645	133.33%	1.07%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01 .0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	5	4.586.195.342	9	0	1	50.000.000	0		0	0	6.890.000	0	21.327.000	1	5.775.600	1	33.992.600	100%	67.99%	10	33.992.600	200%	0.74%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.03.2.01 .0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	5	3.060.000.000	3	0	4	50.000.000	0	2.800.000	2	23.801.150	1	3.417.065	1	18.536.830	4	48.555.045	100%	97.11%	7	48.555.045	140%	1.59%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan diberdayakan	%	100	720.000.000	82	0	100	88.230.500	0	15.319.976	30	43.227.280	40	1.900.000	30	26.550.000	30	86.997.256	30%	98.6%	112	86.997.256	112%	12.08%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.02 .0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	1	600.000.000	15	0	1	78.230.500	0	15.319.976	0	43.227.280	1	0	0	18.600.000	0	77.147.256	0%	98.62%	15	77.147.256	1500%	12.86%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.02 .0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	12	110.000.000	15	0	12	10.000.000	0		6	0	0	1.900.000	6	7.950.000	6	9.850.000	50%	98.5%	21	9.850.000	175%	8.95%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisiensi harga antar waktu	Persentase	42	725.000.000	43	0	42	182.825.000	0		0	0	0	14.750.000	4,45	107.883.181	4,45	181.276.781	10.6%	99.15%	47,45	181.276.781	112.98%	25%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stoknya stabil	%	100	70.000.000	73	0	100	0	0		30	0	40	0	30	0	100	0	100%	0%	173	0	173%	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4	500.000.000	1	0	2	165.325.000	0		0	1	0	57.027.800	0	1	0	1	106.763.929	2	163.791.729	75%	32.76%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
				Persentase kinerja realisasi barang	%	100		39	0	100		0		30		40	0	30		100		100%		139		139%			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
												I		II		III		IV														
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	4	150.000.000	15		0	4	43.525.000	0		0	2	11.749.600	1		0	1	31.090.100	4	42.839.700	100%	98.43%	19	42.839.700	475%	28.56%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	48	210.000.000	20		0	48	74.000.000	0		0	2	10.561.400	20		0	26	62.641.999	48	73.203.399	100%	98.92%	68	73.203.399	141.67%	34.86%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	6	120.000.000	2		0	2	47.800.000	0		0	1	34.716.800	0		0	1	13.031.830	2	47.748.630	100%	99.89%	4	47.748.630	66.67%	39.79%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	poin	60000	155.000.000	61728		0	48000	17.500.000	0		0	24000	1.615.800	3500	14.750.000	20500	1.119.252	20500	17.485.052	42.71%	99.91%	82228	17.485.052	137.05%	11.28%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	12	90.000.000	12		0	48	17.500.000	0		0	24	1.615.800	10	14.750.000	14	1.119.252	48	17.485.052	100%	99.91%	60	17.485.052	500%	19.43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase	100	1.300.000.000	100		0	100	73.685.000	0		0	30	9.110.000	60	61.932.500	10	2.619.000	10	73.661.500	10%	99.97%	110	73.661.500	110%	5.67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor yang difasilitasi ekspor	%	100	1.300.000.000	99		0	100	73.685.000	0		0	30	9.110.000	40	61.932.500	30	2.619.000	100	73.661.500	100%	99.97%	199	73.661.500	199%	5.67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	4	700.000.000	0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	100%	100%	1	50.000.000	25%	7.14%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	4	300.000.000	6		0	1	23.685.000	0		0	0	9.110.000	0	11.932.500	1	2.619.000	1	23.661.500	100%	99.9%	7	23.661.500	175%	7.89%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	45	1.160.000.000	44		0	45	133.350.100	0		0	20	11.689.100	15	4.690.000	10	116.932.600	10	133.311.700	22.22%	99.97%	54	133.311.700	120%	11.49%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	45	1.160.000.000	44		0	45	133.350.100	0		0	20	11.689.100	15	4.690.000	10	116.932.600	45	133.311.700	100%	99.97%	89	133.311.700	197.78%	11.49%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	1400	170.000.000	1400		0	1500	33.350.100	0		0	300	5.041.200	600	4.690.000	100	23.580.500	1000	33.311.700	66.67%	99.88%	2400	33.311.700	171.43%	19.6%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	7	950.000.000	7		0	30	100.000.000	0		0	10	6.647.900	5	0	15	93.352.100	30	100.000.000	100%	100%	37	100.000.000	528.57%	10.53%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	30	35.496.561.027	100	0	30	3.632.482.254	0	8.913.975	10	44.644.983	20	158.804.271	0	2.023.245.461	0	2.235.608.690	0%	61.54%	100	2.235.608.690	333.33%	6.3%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persentase	100		0		100		0		30		50		10		10		10%		10		10%		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	100	35.496.561.027	0	0	50	3.632.482.254	0	8.913.975	10	44.644.983	0	158.804.271	30	2.023.245.461	40	2.235.608.690	80%	61.54%	40	2.235.608.690	40%	6.3%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	300.000.000	0	0	1	388.200.000	0	0	0	2.585.900	1	48.636.700	0	14.914.775	1	66.137.375	100%	17.04%	1	66.137.375	100%	22.05%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	11.138.400.000	1	0	1	100.000.000	0	8.913.975	0	11.826.945	0	30.549.080	1	34.381.920	1	85.671.920	100%	85.67%	2	85.671.920	200%	0.77%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	400.000.000	1	0	1	3.144.282.254	0	0	0	30.232.138	0	79.618.491	1	1.973.948.766	1	2.083.799.395	100%	66.27%	2	2.083.799.395	200%	520.95%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	100	475.000.000	100	0	100	25.000.000	0	0	30	14.287.400	50	0	20	9.890.850	20	24.178.250	20%	96.71%	120	24.178.250	120%	5.09%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan	%	4	475.000.000	1	0	2	25.000.000	0	0	1	14.287.400	0	0	1	9.890.850	2	24.178.250	100%	96.71%	3	24.178.250	75%	5.09%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	200.000.000	10	0	1	25.000.000	0	0	0	14.287.400	0	0	1	9.890.850	1	24.178.250	100%	96.71%	11	24.178.250	1100%	12.09%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					91.47%	94.74%						
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																					53.25%	94%						
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																					Rendah	Sangat						
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah			Nilai Realisasi Investasi	Millar Ruliah	291,792		241,856		251,627		4,25129E+11																
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Poin	82	15.449.280.779	78	0	80	4.888.077.972	80,6	663.734.037	80,6	1.359.762.748	80,6	1.268.701.879	80,6	1.371.245.989	80,6	4.663.444.653	100.75%	95.4%	158,6	4.663.444.653	193.41%	30.19%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	7	334.737.731	7	0	7	163.505.900	7	28.662.000	7	4.840.000	7	39.641.400	7	51.268.000	7	124.411.400	100%	76.09%	14	124.411.400	200%	37.17%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	155.000.000	1	0	2	76.300.000	2	23.742.000	2	0	2	1.300.000	2	33.200.000	2	58.242.000	100%	76.33%	3	58.242.000	150%	37.58%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	70.243.196	1	0	1	48.505.900	1	0	1	3.600.000	1	27.841.400	1	6.918.000	1	38.359.400	100%	79.08%	2	38.359.400	200%	54.61%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	2	100.000.000	2	0	2	38.700.000	2	4.920.000	2	1.240.000	2	10.500.000	2	11.150.000	2	27.810.000	100%	71.86%	4	27.810.000	200%	27.81%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	OPD	1	9.658.543.048	1	0	1	2.769.448.572	1	388.982.187	1	1.044.024.421	1	573.357.311	1	701.683.494	1	2.708.047.413	100%	97.78%	2	2.708.047.413	200%	28.04%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	9.549.771.524	31	0	26	2.731.448.572	26	385.982.187	27	1.041.024.421	27	569.657.311	26	698.158.494	26	2.694.822.413	100%	98.66%	57	2.694.822.413	219.23%	28.22%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	114.000.000	12	0	12	38.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.700.000	3	3.525.000	12	13.225.000	100%	34.8%	24	13.225.000	200%	11.6%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan untuk Pegawai	Orang	10	131.000.000	16	0	7	36.000.000	0	0	5	14.700.000	2	8.800.000	0	0	7	23.500.000	100%	65.28%	23	23.500.000	230%	17.94%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	123.000.000	16	0	7	36.000.000	0	0	5	14.700.000	2	8.800.000	0	0	7	23.500.000	100%	65.28%	23	23.500.000	230%	19.11%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	4	1.245.000.000	4	0	4	272.350.000	4	30.921.000	4	73.307.600	4	34.345.400	4	93.499.900	4	232.073.900	100%	85.21%	8	232.073.900	200%	18.64%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	210.000.000	39	0	9	50.000.000	0	0	3	15.663.000	6	16.818.000	0	3.725.000	9	36.206.000	100%	72.41%	48	36.206.000	480%	17.24%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	475.000.000	12	0	4	27.000.000	0	0	0	0	0	3	16.056.200	3	16.056.200	75%	59.47%	15	16.056.200	300%	3.38%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	100.000.000	9	0	3	32.858.000	0	0	1	10.512.000	1	1.000.000	1	13.358.000	3	24.870.000	100%	75.69%	12	24.870.000	150%	24.87%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	26	340.000.000	41	0	40	162.492.000	5	30.921.000	4	47.132.600	26	16.527.400	4	60.360.700	39	154.941.700	97.5%	95.35%	80	154.941.700	307.69%	45.57%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	273.000.000	1	0	25	230.000.000	0	0	0	0	0	25	227.900.000	25	227.900.000	100%	99.09%	26	227.900.000	260%	83.48%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	246.000.000	1	0	25	230.000.000	0	0	0	0	0	25	227.900.000	25	227.900.000	100%	99.09%	26	227.900.000	260%	92.64%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	2	2.732.000.000	2	0	2	796.773.500	2	194.877.850	2	182.791.727	2	187.105.768	2	193.436.795	2	758.212.140	100%	95.16%	4	758.212.140	200%	27.75%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	900.000.000	4	0	12	274.323.500	3	62.127.850	3	55.291.727	3	59.605.768	3	65.336.795	12	242.362.140	100%	88.35%	16	242.362.140	133.33%	26.93%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.822.000.000	12	0	12	522.450.000	3	132.750.000	3	127.500.000	3	127.500.000	3	128.100.000	12	515.850.000	100%	98.74%	24	515.850.000	200%	28.31%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan	3	1.075.000.000	3	0	3	620.000.000	3	20.291.000	3	40.099.000	3	425.452.000	3	103.457.800	3	589.299.800	100%	95.05%	6	589.299.800	200%	54.82%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	300.000.000	6	0	3	100.000.000	3	20.291.000	3	10.469.000	3	19.370.000	3	24.804.800	3	74.934.800	100%	74.93%	9	74.934.800	300%	24.98%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	70.000.000	5		0	18	20.000.000	0		0	3	2.980.000	9	12.745.000	2	3.300.000	14	19.025.000	77.78%	95.13%	19	19.025.000	105.56%	27.18%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	700.000.000	5		0	1	500.000.000	0		0	1	26.650.000	1	393.337.000	1	75.353.000	1	495.340.000	100%	99.07%	6	495.340.000	600%	70.76%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH KEBIJAKAN DAERAH (PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN KDH) TERKAIT KEMUDAHAN	Kebijakan	4	610.000.000	1		0	1	231.000.000	0		0	0	6.878.900	0	1.100.000	1	207.304.350	1	215.283.250	100%	93.2%	2	215.283.250	50%	35.29%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	360.000.000	0		0	1	51.000.000	0		0	0	3.475.600	0		0	1	37.163.400	1	40.639.000	100%	79.68%	1	40.639.000	50%	11.29%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) Dengan UMKM Di Daerah	Dokumen	1	150.000.000	0		0	1	51.000.000	0		0	0	3.475.600	0		0	1	37.163.400	1	40.639.000	100%	79.68%	1	40.639.000	100%	27.09%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha	Dokumen	1	250.000.000	1		0	2	180.000.000	0		0	0	3.403.300	1	1.100.000	1	170.140.950	2	174.644.250	100%	97.02%	3	174.644.250	300%	69.86%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersedianya perda yang mengatur strategi promosi penanaman modal	Dokumen	1	300.000.000	1		0	1	97.284.200	1		0	1	4.378.500	1	75.360.000	1	16.759.200	1	96.497.700	100%	99.19%	2	96.497.700	200%	32.17%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				Persentase potensi dan peluang usaha yang dipromosikan	%	50		0		50		50		50		50		50		50		100%		50		100%					
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah strategi promosi yang dilaksanakan	Dokumen	2	300.000.000	1		0	1	97.284.200	0		0	0	4.378.500	0	75.360.000	1	16.759.200	1	96.497.700	100%	99.19%	2	96.497.700	100%	32.17%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang dilaksanakan melalui OSS	Persentase	100	450.000.000	100		0	100	150.000.000	100	8.859.750	100	15.713.500	100	24.532.250	100	79.787.250	100	128.892.750	100%	85.93%	200	128.892.750	200%	28.64%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
				Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu	%	90		0		90		100		100		100		100		100		111.11%		100		111.11%					
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	Layanan	5	450.000.000	80		0	5	150.000.000	5	8.859.750	5	15.713.500	5	24.532.250	5	79.787.250	5	128.892.750	100%	85.93%	85	128.892.750	1700%	28.64%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaku usaha	Persentase	2	1.177.000.000	95		0	65,39	595.938.000	0		0	0	86.035.450	0	225.885.600	75,77	168.394.300	75,77	480.315.350	115.87%	80.6%	170,77	480.315.350	8538.5%	40.81%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dikendalikan pelaksanaan penanaman modalnya	Pelaku Usaha	251	1.177.000.000	290		0	379	595.938.000	22		0	38	86.035.450	227	225.885.600	163	168.394.300	450	480.315.350	118.73%	80.6%	740	480.315.350	294.82%	40.81%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					97.08%	80.23%									
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					Sangat Tinggi	Tinggi									
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																					103.96%	90.86%									
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
3	Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan Desa Mandiri		Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	10	28,99		10		12,89																					
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	32	17		22		21,51																					
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	88	14.581.495.033	84		0	86	3.851.095.708	0	457.748.994	25	1.317.663.237	25	949.359.274	36	883.528.187	86	3.608.299.692	100%	93.7%	170	3.608.299.692	193.18%	24.75%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%		k		Rp	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp					k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang di susun dalam waktu	Dokumen	40	486.000.000	0	0	40	146.600.000	0	0	4	37.422.600	17	54.086.000	19	33.682.500	19	125.191.100	47.5%	85.4%	19	125.191.100	47.5%	25.76%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	280.000.000	2	0	4	80.000.000	0	0	2	35.501.000	2	37.175.000	0	1.563.000	4	74.239.000	100%	92.8%	6	74.239.000	150%	26.51%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	9.000.000	3	0	3	3.000.000	0	0	1	960,8	2	2.000.000	0	0	3	2.960.800	100%	98.69%	6	2.960.800	200%	32.9%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahann RKA-SKPD	Dokumen	3	9.000.000	3	0	3	3.000.000	0	0	0	0	0	3	2.873.000	3	2.873.000	100%	95.77%	6	2.873.000	200%	31.92%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		2.13.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	9.000.000	3	0	3	3.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000	2	1.873.000	3	2.873.000	100%	95.77%	6	2.873.000	200%	31.92%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	9.000.000	3	0	3	3.000.000	0	0	1	960,8	0	0	2	2.000.000	3	2.960.800	100%	98.69%	6	2.960.800	200%	32.9%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	24	170.000.000	14	0	24	54.600.000	0	0	0	0	12	13.911.000	12	25.373.500	24	39.284.500	100%	71.95%	38	39.284.500	158.33%	23.11%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemen Pengantraan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	31	10.135.495.033	0	0	27	2.958.014.312	22	457.748.994	22	1.112.290.057	22	616.171.082	22	670.464.239	22	2.856.674.372	81.48%	96.57%	22	2.856.674.372	70.97%	28.18%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	31	9.937.446.504	25	0	27	2.958.014.312	22	457.748.994	22	1.112.290.057	22	616.171.082	22	670.464.239	22	2.856.674.372	81.48%	96.57%	47	2.856.674.372	151.61%	28.75%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi	ASN	31	750.000.000	0	0	27	8.000.000	0	0	0	0	0	27	7.920.000	27	7.920.000	100%	99%	27	7.920.000	87.1%	1.06%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		2.13.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang/ASN	31	730.000.000	10	0	27	8.000.000	0	0	0	0	0	3	7.920.000	3	7.920.000	11.11%	99%	13	7.920.000	41.94%	1.08%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana yang Layak Fungsi	paket	84	270.000.000	0	0	84	142.581.396	0	0	23	20.812.800	33	50.000.064	28	38.072.450	28	108.885.314	33.33%	76.37%	28	108.885.314	33.33%	40.33%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	30.000.000	0	0	5	7.500.000	0	0	3	2.681.800	2	2.400.000	0	0	5	5.081.800	100%	67.76%	5	5.081.800	100%	16.94%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	15	90.000.000	0	0	15	25.000.000	0	0	0	0	10	13.315.000	5	11.643.000	15	24.958.000	100%	99.83%	15	24.958.000	100%	27.73%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	90.000.000	0	0	2	15.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	1	9.250.000	2	14.250.000	100%	95%	2	14.250.000	100%	15.83%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	60.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	1	4.900.000	0	2.250.000	1	2.845.500	2	9.995.500	100%	99.96%	2	9.995.500	100%	16.66%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikeluarkan	Laporan	60	150.000.000	60	0	60	85.081.396	0	0	20	13.231.000	20	27.035.064	20	14.333.950	60	54.600.014	100%	64.17%	120	54.600.014	200%	36.4%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Prasarana yang layak fungsi	unit	12	1.050.000.000	0	0	11	150.000.000	0	0	0	0	4.500.000	11	138.640.000	0	0	0	143.140.000	0%	95.43%	0	143.140.000	0%	13.63%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
		2.13.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	1	49.190.000	0	0	1	49.190.000	100%	98.38%	1	49.190.000	100%	19.68%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		2.13.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	200.000.000	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	4.500.000	10	89.450.000	0	0	10	93.950.000	100%	93.95%	10	93.950.000	100%	46.98%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan	jasa	17	1.200.000.000	0	0	17	280.900.000	12	0	13	116.918.580	13	69.634.128	13	65.202.348	13	251.755.056	76.47%	89.62%	13	251.755.056	76.47%	20.98%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kemonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	150.000.000	3		0	3	23.500.000	0		0	1	5.218.580	1	4.384.128	1	7.352.348	3	16.955.056	100%	72.15%	6	16.955.056	200%	11.3%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	14	1.000.000.000	14		0	14	257.400.000	12		0	12	111.700.000	12	65.250.000	12	57.850.000	12	234.800.000	85.71%	91.22%	26	234.800.000	185.71%	23.48%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang Milik Daerah	unit	17	690.000.000	0		0	16	165.000.000	0		0	3	25.719.200	3	20.828.000	10	68.186.650	10	114.733.850	62.5%	69.54%	10	114.733.850	58.82%	16.63%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	300.000.000	3		0	3	125.000.000	0		0	1	19.222.500	1	17.478.000	1	49.649.650	3	86.350.150	100%	69.08%	6	86.350.150	200%	28.78%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12	150.000.000	12		0	12	25.000.000	0		0	2	4.000.000	2	3.350.000	8	6.250.000	12	13.600.000	100%	54.4%	24	13.600.000	200%	9.07%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	150.000.000	1		0	1	15.000.000	0		0	0	2.496.700	0		0	1	12.287.000	1	14.783.700	100%	98.56%	2	14.783.700	200%	9.86%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	100	14.904.878.675	79		0	82	4.491.591.809	20	452.603.458	20	1.319.347.626	20	943.303.099	82	1.356.972.558	82	4.072.226.741	100%	90.66%	161	4.072.226.741	161%	27.32%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	480.000.000	12		0	12	75.000.000	3		0	3	11.131.300	3	27.800.000	3	21.905.800	12	60.837.100	100%	81.12%	24	60.837.100	200%	12.67%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	255.000.000	4		0	4	45.000.000	1		0	1	7.141.300	1	24.900.000	1	3.932.200	4	35.973.500	100%	79.94%	8	35.973.500	200%	14.11%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	225.000.000	8		0	8	30.000.000	2		0	2	3.990.000	2	2.900.000	2	17.973.600	8	24.863.600	100%	82.88%	16	24.863.600	200%	11.05%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14	8.278.291.503	14		0	14	2.557.084.109	3	279.185.221	4	988.716.754	4	551.671.541	3	706.055.649	14	2.525.629.165	100%	98.77%	28	2.525.629.165	200%	30.51%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	8.278.291.503	30		0	30	2.557.084.109	30	279.185.221	30	988.716.754	30	551.671.541	30	706.055.649	30	2.525.629.165	100%	98.77%	60	2.525.629.165	200%	30.51%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Unit	40	1.107.900.000	40		0	40	300.715.700	10		0	10	45.310.751	10	57.177.130	10	166.910.961	40	269.398.842	100%	89.59%	80	269.398.842	200%	24.32%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	24.000.000	4		0	4	7.500.000	0		0	0	3	2.791.700	1	4.524.600	4	7.316.300	100%	97.55%	8	7.316.300	200%	30.48%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	156.900.000	6		0	6	52.300.000	0		0	2	15.613.100	2	11.277.100	2	20.091.800	6	46.982.000	100%	89.83%	12	46.982.000	200%	29.94%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	75.000.000	4		0	4	19.693.700	0		0	1	2.945.800	0		0	3	14.352.000	4	17.297.800	100%	87.83%	8	17.297.800	200%	23.06%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	80	45.000.000	80		0	80	10.000.000	10		0	21	693	22	2.147.000	27	7.094.500	80	9.934.500	100%	99.35%	160	9.934.500	200%	22.08%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	507.000.000	100		0	100	141.222.000	0		0	25	26.058.851	25	40.961.330	50	59.272.061	100	126.292.242	100%	89.43%	200	126.292.242	200%	24.91%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV											
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	70.000.000	0		4	70.000.000	0		0		0		4	61.576.000	4	61.576.000	100%	87.97%	4	61.576.000	100%	87.97%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.859.000.000	100		100	886.991.000	25	173.418.237	25	197.866.521	25	189.098.928	25	228.457.448	100	788.841.134	100%	88.93%	200	788.841.134	200%	27.59%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	750.000.000	12		12	248.500.000	3	19.968.237	3	47.816.521	3	51.098.928	3	62.707.448	12	181.591.134	100%	73.07%	24	181.591.134	200%	24.21%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.100.000.000	12		12	638.491.000	3	153.450.000	3	150.050.000	3	138.000.000	3	165.750.000	12	607.250.000	100%	95.11%	24	607.250.000	200%	28.92%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	19	995.000.000	19		19	647.801.000	2		0	4	76.322.300	8	117.555.500	5	216.722.700	19	410.600.500	100%	63.38%	38	410.600.500	200%	41.27%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	450.000.000	4		4	190.000.000	0		0	4	72.822.300	4	29.372.500	4	58.462.200	4	160.657.000	100%	84.56%	8	160.657.000	200%	35.7%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	75.000.000	14		14	25.000.000	0		0	1	3.500.000	9	12.228.000	4	8.923.000	14	24.651.000	100%	98.6%	28	24.651.000	200%	32.87%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	432.801.000	0		0	0	0	75.955.000	0	149.337.500	0	225.292.500	0%	52.05%	1	375.292.500	100%	250.2%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	5	30.000.000	4		4	24.000.000	0		0	0	0	0	4	16.920.000	4	16.920.000	100%	70.5%	8	16.920.000	160%	56.4%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	30.000.000	4		4	24.000.000	0		0	0	0	0	4	16.920.000	4	16.920.000	100%	70.5%	8	16.920.000	160%	56.4%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100	15.398.049.837	100		100	4.794.051.543	25	696.244.168	25	1.425.453.059	25	1.180.381.394	25	1.362.220.882	100	4.664.299.503	100%	97.29%	200	4.664.299.503	200%	30.29%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggarann dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	6	300.000.000	7		6	72.000.000	2	13.587.850	0	9.886.500	0	30.938.900	4	17.209.750	6	71.623.000	100%	99.48%	13	71.623.000	216.67%	23.87%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	210.000.000	2		2	44.000.000	1	6.565.250	0	5.340.000	1	26.249.000	0	5.825.750	2	43.980.000	100%	99.95%	4	43.980.000	200%	20.94%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	60.000.000	4		4	28.000.000	1	7.022.600	1	4.546.500	1	4.689.900	1	11.384.000	4	27.643.000	100%	98.73%	8	27.643.000	200%	46.07%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	OPD	1	8.396.049.837	1		1	2.516.551.543	1	314.455.904	0	979.037.587	0	511.768.436	0	652.331.465	1	2.457.593.392	100%	97.66%	2	2.457.593.392	200%	29.27%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	8.396.049.837	37		39	2.516.551.543	30	314.455.904	0	979.037.587	0	511.768.436	9	652.331.465	39	2.457.593.392	100%	97.66%	76	2.457.593.392	194.87%	29.27%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas administrasi kepegawaian	orang	15	90.000.000	5		5	42.000.000	0		0	2	4.730.000	1	16.000.000	2	21.270.000	5	42.000.000	100%	100%	10	42.000.000	66.67%	46.67%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	90.000.000	5		5	42.000.000	0		0	2	4.730.000	1	16.000.000	2	21.270.000	5	42.000.000	100%	100%	10	42.000.000	66.67%	46.67%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	gedung	1	690.000.000	1		0	1	246.000.000	0	13.145.600	0	65.363.072	0	70.458.800	1	96.242.815	1	245.210.287	100%	99.68%	2	245.210.287	200%	35.54%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	40.000.000	5		0	5	10.000.000	0	1.378.000	2	2.235.900	2	4.002.500	1	2.265.600	5	9.882.000	100%	98.82%	10	9.882.000	100%	24.71%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	550	130.000.000	941		0	500	35.000.000	120	5.397.400	140	8.238.200	130	9.076.400	110	12.276.900	500	34.988.900	100%	99.97%	1441	34.988.900	262%	26.91%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	650	100.000.000	552		0	550	35.000.000	140	4.911.200	170	9.835.600	110	5.965.400	130	14.247.400	550	34.959.600	100%	99.88%	1102	34.959.600	169.54%	34.96%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	60.000.000	4		0	4	20.000.000	1	1.459.000	2	5.940.000	1	8.404.500	0	4.186.200	4	19.989.700	100%	99.95%	8	19.989.700	133.33%	33.32%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	340.000.000	41		0	12	121.000.000	0	0	6	39.113.372	3	43.010.000	3	38.766.715	12	120.890.087	100%	99.91%	53	120.890.087	265%	35.56%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPDJumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	0	0		0	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	2	24.500.000	2	24.500.000	100%	98%	2	24.500.000	50%	0%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	unit	18	600.000.000	9		0	14	164.500.000	0	0	0	0	14	162.087.358	0	0	14	162.087.358	100%	98.53%	23	162.087.358	127.78%	27.01%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	4	150.000.000	0		0	1	20.000.000	0	0	1	0	0	20.000.000	0	0	1	20.000.000	100%	100%	1	20.000.000	25%	13.33%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	300.000.000	9		0	4	144.500.000	0	0	0	0	4	142.087.358	0	0	4	142.087.358	100%	98.33%	13	142.087.358	216.67%	47.36%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	7	4.617.000.000	7		0	7	1.395.500.000	2	326.460.114	1	327.709.139	2	343.563.600	2	335.376.252	7	1.333.109.105	100%	95.53%	14	1.333.109.105	200%	28.87%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	14	450.000.000	5		0	12	137.500.000	2	15.510.114	3	21.759.139	4	36.613.600	3	25.426.252	12	99.309.105	100%	72.22%	17	99.309.105	121.43%	22.07%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	4.017.000.000	58		0	15	1.258.000.000	5	310.950.000	4	305.950.000	3	306.950.000	3	309.950.000	15	1.233.800.000	100%	98.08%	73	1.233.800.000	429.41%	30.71%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	1	705.000.000	1		0	1	357.500.000	0	28.594.700	0	38.726.761	0	45.564.300	1	239.790.600	1	352.676.361	100%	98.65%	2	352.676.361	200%	50.03%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	315.000.000	3		0	3	90.000.000	1	15.566.800	1	16.869.261	0	27.109.100	0	27.433.200	2	86.978.361	66.67%	96.64%	5	86.978.361	166.67%	27.61%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	90.000.000	25		0	25	30.000.000	3	6.558.000	8	11.112.000	7	6.532.000	7	5.652.500	25	29.854.500	100%	99.52%	50	29.854.500	142.86%	33.17%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1	300.000.000	1		0	1	237.500.000	1	6.469.900	0	10.745.500	0	11.923.200	0	206.704.900	1	235.843.500	100%	99.3%	2	235.843.500	200%	78.61%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA YANG TERJALIN	Persentase	100	1.500.000.000	100		0	100	293.000.000	0	0	0	151.645.200	0	37.490.000	100	81.072.060	100	270.207.260	100%	92.22%	200	270.207.260	200%	18.01%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	100%	100	1.500.000.000	100		0	100	293.000.000	0	0	0	151.645.200	0	37.490.000	100	81.072.060	100	270.207.260	100%	92.22%	200	270.207.260	200%	18.01%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	3	500.000.000	3		0	3	80.000.000	0	0	1	18.255.500	1	18.022.000	1	27.430.500	3	63.708.000	100%	79.64%	6	63.708.000	200%	12.74%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
											I		II		III		IV															
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										k	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	500.000.000	0		0	2	168.000.000	0		0	2	126.981.700	0		0	2	163.319.700	100%	97.21%	2	163.319.700	100%	32.66%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	2	500.000.000	0		0	2	45.000.000	0		0	0	6.408.000	1		1	14.468.000	1	22.303.560	2	43.179.560	100%	95.95%	2	43.179.560	100%	8.64%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA YANG AKUNTABEL	Persentase	100	3.232.000.000	100		0	100	4.174.318.604	0		0	0	1.028.702.520	0		0	823.231.712	100	2.225.310.762	100	4.077.244.994	100%	97.67%	200	4.077.244.994	200%	126.15%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	100	3.232.000.000	100		0	100	4.174.318.604	0		0	0	1.028.702.520	0		0	823.231.712	100	2.225.310.762	100	4.077.244.994	100%	97.67%	200	4.077.244.994	200%	126.15%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Dokumen	1	180.000.000	0		0	1	25.000.000	0		0	0	8.307.000	1		1	15.772.780	0	79	1	24.158.780	100%	96.64%	1	24.158.780	100%	13.42%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Dokumen	4	300.000.000	0		0	4	75.000.000	0		0	0	3.500.000	2		2	9.210.000	2	50.964.000	4	63.674.000	100%	84.9%	4	63.674.000	100%	21.22%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	4	3.000.000	0		0	4	3.929.318.604	0		0	1	1.010.745.520	1		1	790.458.932	2	2.078.634.062	4	3.879.838.514	100%	98.74%	4	3.879.838.514	100%	129327.95 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Dokumen	2	260.000.000	0		0	2	50.000.000	0		0	1	6.150.000	0		1	2.990.000	1	25.702.950	2	34.842.950	100%	69.69%	2	34.842.950	100%	13.4%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	3	1.000.000.000	0		0	3	55.000.000	0		0	0	0	0		0	3	38.451.250	3	38.451.250	100%	69.91%	3	38.451.250	100%	3.85%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen profil desa	Dokumen	1	300.000.000	0		0	1	30.000.000	0		0	0	4.800.000	1		1	21.479.500	1	26.279.500	100%	87.6%	1	26.279.500	100%	8.76%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen	2	300.000.000	0		0	2	10.000.000	0		0	0	0	0		2	10.000.000	2	10.000.000	100%	100%	2	10.000.000	100%	3.33%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN KEMASYARAKATAN	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	Persentase	100	3.330.000.000	100		0	100	637.137.400	0		0	0	37.474.000	0		0	110.220.086	100	449.837.555	100	597.531.641	100%	93.78%	200	597.531.641	200%	17.94%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	100%	100	3.330.000.000	100		0	100	637.137.400	0		0	0	37.474.000	0		0	110.220.086	100	449.837.555	100	597.531.641	100%	93.78%	200	597.531.641	200%	17.94%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna), Lembaga adat Desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Dokumen	3	300.000.000	0		0	3	77.000.000	0		0	1	23.600.000	1		1	8.470.000	1	40.731.000	3	72.801.000	100%	94.55%	3	72.801.000	100%	24.27%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga (203 PKK dan 984 Posyandu)	2	650.000.000	2		2	150.000.000	0		0	0	2.960.000	1	58.140.000	1	82.838.465	2	143.938.465	100%	95.96%	4	143.938.465	200%	22.14%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	laporan	1	300.000.000	0		1	8.500.000	0		0	0	2.670.000	1	5.115.500	1	7.785.500	1	7.785.500	100%	91.59%	1	7.785.500	100%	2.6%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	laporan	1	300.000.000	0		1	51.637.400	0		0	0	6.268.000	0		1	40.117.500	1	46.385.500	100%	89.83%	1	46.385.500	100%	15.46%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	850.000.000	0		1	350.000.000	0		0	0	4.646.000	0	40.940.086	1	281.035.090	1	326.621.176	100%	93.32%	1	326.621.176	100%	38.43%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi simpan pinjam	Unit	75	300.000.000	13		25	100.000.000	0		0	5	49.265.200	10	49.215.300	10		0	25	98.480.500	100%	98.48%	38	98.480.500	50.67%	32.83%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
				Jumlah Anggota koperasi simpan pinjam	Orang	900		230		300		0		112		134		54		300		100%		530		58.89%				
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan	Persen	40	300.000.000	10		40	100.000.000	0		0	10	49.265.200	15	49.215.300	15		0	40	98.480.500	100%	98.48%	50	98.480.500	125%	32.83%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	300.000.000	42		50	100.000.000	0		0	25	49.265.200	25	49.215.300	0		0	50	98.480.500	100%	98.48%	92	98.480.500	184%	32.83%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa	Persentase	90	750.000.000	72		90	126.930.000	15		0	20	0	25	64.540.000	25	57.645.100	85	122.185.100	94.44%	96.26%	157	122.185.100	174.44%	16.29%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi	Persen	90	750.000.000	72		90	126.930.000	15		0	20	0	25	64.540.000	25	57.645.100	85	122.185.100	94.44%	96.26%	157	122.185.100	174.44%	16.29%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	350	700.000.000	60	123.612.200	350	126.930.000	0		0	0	175	64.540.000	175	57.645.100	350	122.185.100	100%	96.26%	410	245.797.300	117.14%	35.11%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	50	360.000.000	50		50	124.832.421	0		0	20	16.943.800	15	72.291.200	15	33.190.000	50	122.425.000	100%	98.07%	100	122.425.000	200%	34.01%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Yang Dinilai Status Kesehatannya	Unit Usaha	45	360.000.000	5		15	124.832.421	0		0	5	16.943.800	5	72.291.200	5	33.190.000	15	122.425.000	100%	98.07%	20	122.425.000	44.44%	34.01%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	45	360.000.000	5		15	124.832.421	0		0	0	16.943.800	10	72.291.200	5	33.190.000	15	122.425.000	100%	98.07%	20	122.425.000	44.44%	34.01%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi jasa, produsen, dan serbausaha yang dibina pengembangan usahanya	Persentase	100	1.373.309.550	100		0	100	50.000.000	0		0	0	11.744.900	50	10.830.000	50		24.670.000	100	47.244.900	100%	94.49%	200	47.244.900	200%	3.44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat kapasitasnya	Unit Usaha	300	1.373.309.550	230		0	50	50.000.000	0		0	10	11.744.900	40	10.830.000	0		24.670.000	50	47.244.900	100%	94.49%	280	47.244.900	93.33%	3.44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	350	1.373.309.550	230		0	50	50.000.000	0		0	0	11.744.900	10	10.830.000	40		24.670.000	50	47.244.900	100%	94.49%	280	47.244.900	80%	3.44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.06	PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Anggota Koperasi	orang/usa ha	80	3.000.000.000	80		0	80	7.025.000.000	0		0	0	0	35	5.700.000.000	45		0	80	5.700.000.000	100%	81.14%	160	5.700.000.000	200%	190%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	Unit Usaha	30	3.000.000.000	6		0	9	7.025.000.000	0		0	0	0	8	5.700.000.000	0		0	8	5.700.000.000	88.89%	81.14%	14	5.700.000.000	46.67%	190%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	30	10.000.000	6		0	9	7.025.000.000	0		0	0	0	8	5.700.000.000	0		0	8	5.700.000.000	88.89%	81.14%	14	5.700.000.000	46.67%	57000%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.07	PROGRAM PERBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	Persentase	100	3.780.000.000	90		0	100	1.044.994.300	0		9.000.000	40	259.019.400	45	339.871.950	10		345.616.196	95	953.507.546	95%	91.25%	185	953.507.546	185%	25.23%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang Diberdayakan	Unit Usaha	2700	3.780.000.000	900		0	900	1.044.994.300	210		9.000.000	210	259.019.400	210	339.871.950	210		345.616.196	840	953.507.546	93.33%	91.25%	1740	953.507.546	64.44%	25.23%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	450	360.000.000	200		0	150	125.000.000	0		0	50	43.945.700	65	56.385.100	35		22.056.100	150	122.386.900	100%	97.91%	350	122.386.900	77.78%	34%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	240	1.020.000.000	80		0	80	919.994.300	80		9.000.000	80	215.073.700	80	283.486.850	80		323.560.096	80	831.120.646	100%	90.34%	160	831.120.646	66.67%	81.48%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	unit usaha	50	15.000.000.000	31		0	50	987.389.414	0		0	15	105.000.000	20	460.035.000	10		217.268.600	45	782.303.600	90%	79.23%	76	782.303.600	152%	5.22%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
				Jumlah usaha mikro baru	unit usaha	50		5		0	50		0		15		20		15		50		100%	55		110%					
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	Unit Usaha	255	15.000.000.000	31		0	85	987.389.414	0		0	20	105.000.000	50	460.035.000	10		217.268.600	80	782.303.600	94.12%	79.23%	111	782.303.600	43.53%	5.22%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	500	15.000.000.000	31		0	200	987.389.414	0		0	50	105.000.000	100	460.035.000	50		217.268.600	200	782.303.600	100%	79.23%	231	782.303.600	46.2%	5.22%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab													
							I					II				III									IV												
							k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp	k	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18									
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	1	1.030.907.353	2		0	0,87		400.000.000	0		0	0	0	86.904.000	0		106.599.500	0,1		149.746.500	0,1		343.250.000	11.49%	85.81%	2,1		343.250.000	210%		33.3%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kekeloporan pemuda	orang	715	955.907.353	93		0	525		350.000.000	0		0	0	0	86.904.000	0		71.599.500	365		149.746.500	365		308.250.000	69.52%	88.07%	458		308.250.000	64.06%		32.25%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	persen	53	75.000.000	51		0	51		50.000.000	0		0	0	0	0	35.000.000	50,89		0	50,89		35.000.000	99.78%	70%	101,89		35.000.000	192.25%		46.67%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	15	1.376.048.589	0		0	15		140.000.000	0		0	6,93		39.733.000	0		37.890.000	8,07		7.540.000	15		85.163.000	100%	60.83%	15		85.163.000	100%		6.19%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang dikelola	100%	100	654.304.894	100		0	100		140.000.000	0		0	46,17		39.733.000	42,1		37.890.000	5,39		7.540.000	93,66		85.163.000	93.66%	60.83%	193,66		85.163.000	193.66%		13.02%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	"Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan"	objek	50	341.763.750	50		0	5		50.000.000	0		0	0	0	0	4		37.890.000	1		7.540.000	5		45.430.000	100%	90.86%	55		45.430.000	110%		13.29%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	306.000.000	50		0	50		90.000.000	0		0	23		39.733.000	0		0	0		0	23		39.733.000	46%	44.15%	73		39.733.000	73%		12.98%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	65%	65	474.471.695	65		0	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65		0	65		0	100%	0%	130		0	200%	0%		0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	100%	100	247.272.000	100		0	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0%	100		0	100%	0%		0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	100	556.362.000	100		0	100		496.000.000	0		0	15,65		77.600.000	7,62		37.800.000	73,33		363.717.364	96,6		479.117.364	96.6%	96.6%	196,6		479.117.364	196.6%		86.12%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	100%	100	556.362.000	100		0	100		496.000.000	0		0	15,65		77.600.000	7,62		37.800.000	73,33		363.717.364	96,6		479.117.364	96.6%	96.6%	196,6		479.117.364	196.6%		86.12%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	15	550.800.000	17		0	15		496.000.000	0		0	2		77.600.000	2		37.800.000	11		363.717.364	15		479.117.364	100%	96.6%	32		479.117.364	213.33%		86.99%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata	Persentase	13	990.000.000	12		0	13		75.000.000	0		0	3		0	4		0	5		66.660.000	12		66.660.000	92.31%	88.88%	24		66.660.000	184.62%		6.73%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Lokasi	2	360.000.000	2		0	2		75.000.000	0		0	0		0	0		0	2		66.660.000	2		66.660.000	100%	88.88%	4		66.660.000	200%		18.52%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	80	75.000.000	0		0	57		75.000.000	0		0	15		0	0		0	0		66.660.000	15		66.660.000	26.32%	88.88%	15		66.660.000	18.75%		88.88%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata	Persentase	80	1.570.000.000	67		0	72		600.000.000	0		0	0		195.000.500	32		261.963.691	40		142.630.728	72		599.594.919	100%	99.93%	139		599.594.919	173.75%		38.19%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana	Event	9	1.570.000.000	6		0	7		600.000.000	0		0	2		195.000.500	3		261.963.691	2		142.630.728	7		599.594.919	100%	99.93%	13		599.594.919	144.44%		38.19%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab							
							I			II		III		IV		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%						
							k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8	1.450.000.000	0		0	7	575.000.000	0		0	1	195.000.500	1	261.963.691	2	117.630.728	4	574.594.919	57.14%	99.93%	4	574.594.919	50%	39.63%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1000	60.000.000	0		0	500	25.000.000	0		0	0	0	0	500	25.000.000	500	25.000.000	100%	100%	500	25.000.000	50%	41.67%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase	30	315.000.000	14		0	24	75.000.000	0		0	0	24	74.999.950	0	0	24	74.999.950	100%	100%	38	74.999.950	126.67%	23.81%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM peserta pembekalan sektor pariwisata atau ekonomi kreatif	Persen	13	0	10		0	11	75.000.000	0		0	0	0	11	74.999.950	0	0	11	74.999.950	100%	100%	21	74.999.950	161.54%	0%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	50	0	0		0	50	75.000.000	0		0	0	0	50	74.999.950	0	0	50	74.999.950	100%	100%	50	74.999.950	100%	0%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase	100	15.000.000	100		0	100	2.306.800	0		0	20	0	50	2.262.800	30	0	30	2.262.800	30%	98.09%	130	2.262.800	130%	15.09%	KELURAHAN KOWEL	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100		100		0	100		0		20		50		30		30		30%		130		130%				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	15.000.000	90		0	100	2.306.800	0		0	0	0	60	2.262.800	40	0	40	2.262.800	40%	98.09%	130	2.262.800	130%	15.09%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Layanan	21	15.000.000	21		0	21	2.306.800	0		0	0	0	21	2.262.800	0	0	0	2.262.800	0%	98.09%	21	2.262.800	100%	15.09%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase	100	15.000.000	100		0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100		100		0	100		0		0		0		0		0		0%		100		100%				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	15.000.000	90		0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100	15.000.000	100		0	100	5.000.000	0		0	100	5.000.000	0	0	0	0	0	100	5.000.000	100%	100%	200	5.000.000	200%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100		100		0	100		0		100		0		0		100		100%		200		200%				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	15.000.000	90		0	100	5.000.000	0		0	100	5.000.000	0	0	0	0	0	100	5.000.000	100%	100%	190	5.000.000	190%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan	21	15.000.000	21		0	21	5.000.000	0		0	21	5.000.000	0	0	0	0	0	21	5.000.000	100%	100%	42	5.000.000	200%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100	15.000.000	100	0	100	1.581.782	100	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0%	88.51%	100	1.400.000	100%	9.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
					Persentase	100		100		100		0		100		0		0		0		0%		100		100%		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	15.000.000	90	0	100	1.581.782	0	0	0	50	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0%	88.51%	90	1.400.000	90%	9.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan	21	15.000.000	21	0	21	1.581.782	0	0	0	0	0	20	1.400.000	20	1.400.000	95.24%	88.51%	41	1.400.000	195.24%	9.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100	15.000.000	100	0	100	2.000.000	0	0	0	75	1.973.000	100	0	100	1.973.000	100%	98.65%	200	1.973.000	200%	13.15%	KELURAHAN KANGENAN	
					%	100		100		100		0		0		75		100		100		100%		200		200%		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	15.000.000	90	0	100	2.000.000	0	0	0	75	1.973.000	100	0	100	1.973.000	100%	98.65%	190	1.973.000	190%	13.15%	KELURAHAN KANGENAN	
		7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan	21	15.000.000	21	0	21	2.000.000	0	0	0	21	1.973.000	0	0	1.973.000	0	1.973.000	0%	98.65%	21	1.973.000	100%	13.15%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100	15.000.000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	KELURAHAN PATEMON	
					%	100		100		100		0		0		0		100		100		100%		200		200%		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase	100	90.000.000	91	0	100	16.760.000	25	0	25	8.240.000	25	5.460.000	25	0	100	13.700.000	100%	81.74%	191	13.700.000	191%	15.22%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase	100	90.000.000	91	0	100	16.760.000	25	0	25	8.240.000	25	5.460.000	25	0	100	13.700.000	100%	81.74%	191	13.700.000	191%	15.22%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyara katan	12	45.000.000	12	0	12	8.260.000	0	6	4.120.000	4	4.120.000	0	0	10	8.240.000	83.33%	99.76%	22	8.240.000	183.33%	18.31%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	Kegiatan	15	45.000.000	20	0	15	8.500.000	0	10	4.120.000	3	1.340.000	0	0	13	5.460.000	86.67%	64.24%	33	5.460.000	220%	12.13%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100	364.200.000	94	0	100	205.006.000	0	25	59.182.000	75	100.375.000	0	43.965.622	0	203.522.622	0%	99.28%	94	203.522.622	94%	55.88%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	364.200.000	94	0	100	205.006.000	0	25	59.182.000	75	100.375.000	0	43.965.622	0	203.522.622	0%	99.28%	94	203.522.622	94%	55.88%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	12	349.200.000	4	0	4	200.756.000	0	1	54.932.000	2	100.375.000	1	43.965.622	4	199.272.622	100%	99.26%	8	199.272.622	66.67%	57.07%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.03.2.02 .0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	3	15.000.000	1	0	1	4.250.000	0	1	4.250.000	0	0	0	0	1	4.250.000	100%	100%	2	4.250.000	66.67%	28.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab					
							I				II			III			IV											
							k	Rp			k	Rp		k	Rp		k	Rp										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif desa/kelurahan aktif	Persentase	100	30.000.000	94	0	95	38.584.000	15	4.999.800	20	700	30	5.600.000	30	27.219.000	95	38.518.800	100%	99.83%	189	38.518.800	189%	128.4%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase	100	30.000.000	94	0	95	38.584.000	5	4.999.800	30	700	40	5.600.000	20	27.219.000	20	38.518.800	21.05%	99.83%	114	38.518.800	114%	128.4%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	Kegiatan	1	15.000.000	1	0	1	5.000.000	1	4.999.800	0	0	0	0	0	1	4.999.800	100%	100%	2	4.999.800	200%	33.33%	KECAMATAN PAKONG	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	Kegiatan	12	15.000.000	8	0	12	33.584.000	3	0	3	700	3	5.600.000	3	27.219.000	12	33.519.000	100%	99.81%	20	33.519.000	166.67%	223.46%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif desa/kelurahan aktif	%	100	233.500.000	95	0	100	208.000.000	20	7.999.700	40	50.500.200	20	65.674.800	20	82.910.508	100	207.085.208	100%	99.56%	195	207.085.208	195%	88.69%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	233.500.000	100	0	100	208.000.000	20	7.999.700	40	50.500.200	20	65.674.800	20	82.910.508	100	207.085.208	100%	99.56%	200	207.085.208	200%	88.69%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	1	30.000.000	1	0	1	8.000.000	1	7.999.700	0	0	0	0	0	1	7.999.700	100%	100%	2	7.999.700	200%	26.67%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	203.500.000	9	0	4	200.000.000	0	0	2	50.500.200	1	65.674.800	1	82.910.508	4	199.085.508	100%	99.54%	13	199.085.508	325%	97.83%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif desa/kelurahan aktif	Persentase	100	215.000.000	95	0	100	42.942.000	9,38	5.271.000	71,88	24.186.000	9,36	4.730.000	9,38	8.648.200	100	42.835.200	100%	99.75%	195	42.835.200	195%	19.92%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase	100	215.000.000	100	0	100	42.942.000	9,38	5.271.000	71,88	24.186.000	9,36	4.730.000	9,38	8.648.200	100	42.835.200	100%	99.75%	200	42.835.200	200%	19.92%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	20	70.000.000	20	0	20	18.200.000	0	0	20	18.200.000	0	0	0	0	20	18.200.000	100%	100%	40	18.200.000	200%	26%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	140.000.000	30	0	12	24.742.000	3	5.271.000	3	5.986.000	3	4.730.000	3	8.648.200	12	24.635.200	100%	99.57%	42	24.635.200	350%	17.6%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100	524.400.000	94	0	100	205.550.000	0	0	45	35.410.000	5	4.800.000	45	131.817.280	95	172.027.280	95%	83.69%	189	172.027.280	189%	32.8%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	524.400.000	94	0	100	205.550.000	0	0	30	35.410.000	20	4.800.000	50	131.817.280	100	172.027.280	100%	83.69%	194	172.027.280	194%	32.8%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Or mas	12	509.400.000	4	0	4	201.440.000	0	0	1,3	31.300.000	1,2	4.800.000	1,5	131.817.280	4	167.917.280	100%	83.36%	8	167.917.280	66.67%	32.96%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	15.000.000	1	0	1	4.110.000	0	0	1	4.110.000	0	0	0	0	1	4.110.000	100%	100%	2	4.110.000	66.67%	27.4%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	99	63.000.000	97	0	97	23.424.900	8	1.556.500	71	16.632.000	9	2.040.000	9	3.056.400	97	23.284.900	100%	99.4%	194	23.284.900	195.96%	36.96%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	63.000.000	100	0	98	23.424.900	9	1.556.500	71	16.632.000	9	2.040.000	9	3.056.400	98	23.284.900	100%	99.4%	198	23.284.900	198%	36.96%	KECAMATAN PASEAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	45	31.000.000	14	0	20	12.500.000	0	0	20	12.500.000	0	0	0	0	20	12.500.000	100%	100%	34	12.500.000	75.56%	40.32%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	31.000.000	12	0	12	10.924.900	3	1.556.500	3	4.132.000	3	2.040.000	3	3.056.400	12	10.784.900	100%	98.72%	24	10.784.900	200%	34.79%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	100	53.714.000	95	0	100	57.000.000	100	19.297.800	100	14.256.100	100	7.256.700	100	15.944.400	100	56.755.000	100%	99.57%	195	56.755.000	195%	105.66%	KECAMATAN GALIS
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	53.714.000	100	0	100	57.000.000	100	19.297.800	100	14.256.100	100	7.256.700	100	15.944.400	100	56.755.000	100%	99.57%	200	56.755.000	200%	105.66%	KECAMATAN GALIS
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	5	13.714.000	15	0	5	12.000.000	5	11.800.000	0	0	0	0	0	5	11.800.000	100%	98.33%	20	11.800.000	400%	86.04%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	40.000.000	2	0	5	45.000.000	1	7.497.800	2	14.256.100	1	7.256.700	1	15.944.400	5	44.955.000	100%	99.9%	7	44.955.000	140%	112.39%	KECAMATAN GALIS
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat kelurahan aktif	%	100	585.600.000	94	0	100	204.728.000	0	0	50	79.761.400	70	77.970.000	100	45.427.136	100	203.158.536	100%	99.23%	194	203.158.536	194%	34.69%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	585.600.000	94	0	100	204.728.000	0	0	50	79.761.400	75	77.970.000	100	45.427.136	100	203.158.536	100%	99.23%	194	203.158.536	194%	34.69%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	12	570.600.000	4	0	4	201.728.000	0	0	2	79.761.400	1	74.970.000	1	45.427.136	4	200.158.536	100%	99.22%	8	200.158.536	66.67%	35.08%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	3	15.000.000	1	0	1	3.000.000	0	0	0	0	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	100%	100%	2	3.000.000	66.67%	20%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat desa aktif	%	99	156.500.000	100	0	97	37.500.000	20	0	30	19.836.000	30	9.795.000	17	7.410.000	97	37.041.000	100%	98.78%	197	37.041.000	198.99%	23.67%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	156.500.000	100	0	98	37.500.000	20	0	30	19.836.000	30	9.795.000	18	7.410.000	98	37.041.000	100%	98.78%	198	37.041.000	198%	23.67%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ Desa	39	31.000.000	17	0	13	7.500.000	0	0	13	7.474.000	0	0	0	13	7.474.000	100%	99.65%	30	7.474.000	76.92%	24.11%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	39	120.000.000	13	0	13	30.000.000	0	0	6	12.362.000	4	9.795.000	3	7.410.000	13	29.567.000	100%	98.56%	26	29.567.000	66.67%	24.64%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat kelurahan aktif	Persentase	100	367.800.000	94	0	100	204.606.000	0	0	54	67.340.000	10	37.650.000	7	40.125.000	7	145.115.000	7%	70.92%	101	145.115.000	101%	39.45%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	367.800.000	94	0	100	204.606.000	0	0	31,75	67.340.000	31,75	37.650.000	8	40.125.000	8	145.115.000	8%	70.92%	102	145.115.000	102%	39.45%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah	12	352.800.000	4	0	4	200.756.000	0	0	1	63.490.000	1	37.650.000	1	40.125.000	3	141.265.000	75%	70.37%	7	141.265.000	58.33%	40.04%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah	3	15.000.000	1	0	1	3.850.000	0	0	1	3.850.000	0	0	0	1	3.850.000	100%	100%	2	3.850.000	66.67%	25.67%	KELURAHAN JUNGCHANGCANG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
									I		II		III		IV													
									1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			12		13
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100	102.000.000	100	0	100	45.959.500	40	15.808.250	20	5.220.250	20	3.174.000	20	16.719.500	100	40.922.000	100%	89.04%	200	40.922.000	200%	40.12%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase	100	102.000.000	100	0	100	45.959.500	40	15.808.250	20	5.220.250	80	3.174.000	100	16.719.500	100	40.922.000	100%	89.04%	200	40.922.000	200%	40.12%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga	27	51.000.000	27	0	27	10.000.000	27	9.643.000	0	0	0	0	0	27	9.643.000	100%	96.43%	54	9.643.000	200%	18.91%	KECAMATAN PROPPPO	
		7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	51.000.000	3	0	3	35.959.500	3	6.165.250	0	5.220.250	0	3.174.000	0	16.719.500	3	31.279.000	100%	86.98%	6	31.279.000	200%	61.33%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100	348.000.000	94	0	100	200.648.000	0	0	50	44.600.000	20	51.150.000	30	104.638.479	30	200.388.479	30%	99.87%	124	200.388.479	124%	57.58%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	348.000.000	94	0	100	200.648.000	0	0	50	44.600.000	20	51.150.000	30	104.638.479	30	200.388.479	30%	99.87%	124	200.388.479	124%	57.58%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12	333.000.000	4	0	4	200.648.000	0	0	2	44.600.000	1	51.150.000	1	104.638.479	4	200.388.479	100%	99.87%	8	200.388.479	66.67%	60.18%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	95,45	100	261.600.000	100	0	100	207.999.700	20	7.999.700	20	35.895.000	20	41.679.900	40	116.939.347	100	202.513.947	100%	97.36%	200	202.513.947	200%	77.41%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	261.600.000	100	0	100	207.999.700	20	7.999.700	20	35.895.000	20	41.679.900	40	116.939.347	100	202.513.947	100%	97.36%	200	202.513.947	200%	77.41%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	lembaga	1	30.000.000	1	0	1	7.999.700	1	7.999.700	0	0	0	0	0	1	7.999.700	100%	100%	2	7.999.700	200%	26.67%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA	
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	4	231.600.000	9	0	4	200.000.000	0	0	1	35.895.000	1	41.679.900	2	116.939.347	4	194.514.247	100%	97.26%	13	194.514.247	325%	83.99%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100	42.406.174	95	0	100	28.214.000	25	6.026.100	25	10.188.000	25	0	25	11.814.900	25	28.029.000	25%	99.34%	120	28.029.000	120%	66.1%	KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	42.406.174	100	0	100	28.214.000	25	6.026.100	25	10.188.000	25	0	25	11.814.900	100	28.029.000	100%	99.34%	200	28.029.000	200%	66.1%	KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga	13	32.376.333	13	0	13	16.214.100	3	6.026.100	10	10.188.000	0	0	0	13	16.214.100	100%	100%	26	16.214.100	200%	50.08%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	9.608.241	13	0	13	11.999.900	3	0	4	0	3	0	3	11.814.900	13	11.814.900	100%	98.46%	26	11.814.900	200%	122.97%	KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100	371.400.000	94	0	100	205.756.000	0	0	50	75.706.500	25	85.363.000	25	43.085.628	100	204.155.128	100%	99.22%	194	204.155.128	194%	54.97%	KELURAHAN PARTEKER

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	371.400.000	94		0	100	205.756.000	0		0	40	75.706.500	30	85.363.000	30	43.085.628	100	204.155.128	100%	99.22%	194	204.155.128	194%	54.97%	KELURAHAN PARTEKER
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	%	100		94		100		0		100		0		0		100		100%		194		194%				
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Or mas	12	356.400.000	4	0	4	200.756.000	0		0	2	70.706.500	1	85.363.000	1	43.085.628	4	199.155.128	100%	99.2%	8	199.155.128	66.67%	55.88%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.03.2.02 .0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	15.000.000	1	0	1	5.000.000	0		0	1	5.000.000	0		0	0	1	5.000.000	100%	100%	2	5.000.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100	387.600.000	94	0	100	205.864.000	0		0	40	98.600.000	40	53.933.000	20	52.425.000	20	204.958.000	20%	99.56%	114	204.958.000	114%	52.88%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	387.600.000	94	0	100	205.864.000	0		0	40	98.600.000	40	53.933.000	20	52.425.000	20	204.958.000	20%	99.56%	114	204.958.000	114%	52.88%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Or mas	12	372.600.000	4	0	4	200.864.000	0		0	2	93.600.000	0	53.933.000	2	52.425.000	4	199.958.000	100%	99.55%	8	199.958.000	66.67%	53.67%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.03.2.02 .0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	15.000.000	1	0	1	5.000.000	0		0	1	5.000.000	0		0	0	1	5.000.000	100%	100%	2	5.000.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100	307.500.000	94	0	100	79.854.800	0		0	50	34.579.700	25	33.310.300	25	6.100.000	25	73.990.000	25%	92.66%	119	73.990.000	119%	24.06%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	220.200.000	89	0	100	59.484.800	0		0	50	24.084.700	25	23.440.300	25	6.100.000	25	53.625.000	25%	90.15%	114	53.625.000	114%	24.35%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	27	45.000.000	9	0	9	10.500.000	0		0	9	10.495.000	0		0	0	9	10.495.000	100%	99.95%	18	10.495.000	66.67%	23.32%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	36	175.200.000	30	0	12	48.984.800	0		0	5	13.589.700	5	23.440.300	2	6.100.000	12	43.130.000	100%	88.05%	42	43.130.000	116.67%	24.62%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen	100	87.300.000	94	0	100	20.370.000	0		0	50	10.495.000	50	9.870.000	0	0	0	0	20.365.000	0%	99.98%	94	20.365.000	94%	23.33%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	27	45.000.000	9	0	9	10.500.000	0		0	9	10.495.000	0		0	0	9	10.495.000	100%	99.95%	18	10.495.000	66.67%	23.32%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Or mas	12	42.300.000	4	0	4	9.870.000	0		0	0	4	9.870.000	0		0	4	9.870.000	100%	100%	8	9.870.000	66.67%	23.33%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	100	69.000.000	100	0	100	33.000.000	0		0	50	24.499.950	0		0	50	8.500.000	100	32.999.950	100%	100%	200	32.999.950	200%	47.83%	KECAMATAN KADUR
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	69.000.000	92	0	94	33.000.000	0		0	50	24.499.950	0		0	44	8.500.000	94	32.999.950	100%	100%	186	32.999.950	186%	47.83%	KECAMATAN KADUR
		7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	27	39.000.000	10	0	10	18.000.000	0		0	10	18.000.000	0		0	0	10	18.000.000	100%	100%	20	18.000.000	74.07%	46.15%	KECAMATAN KADUR	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV																
									1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	30	30.000.000	10	0	10	15.000.000	0	0	4	6.499.950	0	0	6	8.500.000	10	14.999.950	100%	100%	20	14.999.950	66.67%	50%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	94	75.000.000	85	0	88	28.720.300	22	0	22	18.547.500	22	3.600.000	22	5.450.000	88	27.597.500	100%	96.09%	173	27.597.500	184.04%	36.8%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	35.000.000	100	0	100	17.300.000	25	0	25	14.133.200	25	1.900.000	25	1.250.000	100	17.283.200	100%	99.9%	200	17.283.200	200%	49.38%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Kelompok Masyarakat desa dalam forum musrenbangdes	Orang	70	30.000.000	70	0	70	12.300.000	70	0	70	12.283.200	70	0	70	12.283.200	100%	99.86%	140	12.283.200	200%	40.94%					KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kerlompok Masyarakat Desa yang meningkat efektifitasnya	Kali	2	0	2	0	2	5.000.000	2	0	2	1.850.000	2	1.900.000	2	1.250.000	2	5.000.000	100%	100%	4	5.000.000	200%	0%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Lembaga	3	40.000.000	3	0	3	11.420.300	3	0	3	4.414.300	3	1.700.000	3	4.200.000	3	10.314.300	100%	90.32%	6	10.314.300	200%	25.79%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	lembaga	2	15.000.000	2	0	2	3.170.300	2	0	2	2.914.300	2	0	2	0	2	2.914.300	100%	91.93%	4	2.914.300	200%	19.43%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga	3	0	3	0	3	5.750.000	3	0	3	1.500.000	3	1.700.000	3	1.700.000	3	4.900.000	100%	85.22%	6	4.900.000	200%	0%			KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat yang difasilitasi	Kali	2	0	2	0	2	2.500.000	0	0	0	0	0	2	0	2	2.500.000	2	2.500.000	100%	100%	4	2.500.000	200%	0%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	100	83.250.000	94	0	100	38.000.000	25	3.111.300	25	13.777.900	25	4.479.200	25	15.447.500	25	36.815.900	25%	96.88%	119	36.815.900	119%	44.22%			KECAMATAN WARU	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	persen	100	83.250.000	90	0	100	38.000.000	25	3.111.300	25	13.777.900	25	4.479.200	25	15.447.500	25	36.815.900	25%	96.88%	115	36.815.900	115%	44.22%			KECAMATAN WARU	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan	12	38.250.000	12	0	12	13.000.000	12	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0%	100%	12	13.000.000	100%	33.99%			KECAMATAN WARU	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	45.000.000	12	0	12	25.000.000	2	3.111.300	2	777,9	4	4.479.200	4	15.447.500	4	23.815.900	33.33%	95.26%	16	23.815.900	133.33%	52.92%			KECAMATAN WARU	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100	578.400.000	94	0	100	204.156.000	0	0	50	81.620.000	35	80.328.788	15	41.450.187	15	203.398.975	15%	99.63%	109	203.398.975	109%	35.17%			KELURAHAN BUGIH	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	persen	100	578.400.000	94	0	100	204.156.000	0	0	50	81.620.000	40	80.328.788	10	41.450.187	10	203.398.975	10%	99.63%	104	203.398.975	104%	35.17%			KELURAHAN BUGIH	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	12	563.400.000	4	0	4	201.656.000	0	0	1	79.120.000	2	80.328.788	1	41.450.187	4	200.898.975	100%	99.62%	8	200.898.975	66.67%	35.66%			KELURAHAN BUGIH	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	3	15.000.000	1	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000	100%	100%	2	2.500.000	66.67%	16.67%			KELURAHAN BUGIH	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100	28.000.000	100	0	100	27.500.000	0	0	45	9.205.000	45	9.950.600	10	8.200.000	100	27.355.600	100%	99.47%	200	27.355.600	200%	97.7%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	28.000.000	100	0	100	27.500.000	0	0	45	9.205.000	45	9.950.600	10	8.200.000	100	27.355.600	100%	99.47%	200	27.355.600	200%	97.7%			KECAMATAN TLANAKAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	17	6.000.000	17	0	17	4.000.000	0	0	17	3.986.800	0	0	0	0	17	3.986.800	100%	99.67%	34	3.986.800	200%	66.45%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	15.000.000	3	0	3	23.500.000	0	0	1	5.218.200	1	9.950.600	1	8.200.000	3	23.368.800	100%	99.44%	6	23.368.800	66.67%	155.79%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100	465.000.000	94	0	100	217.506.110	0	0	50	73.000.000	30	84.850.000	20	58.165.023	20	216.015.023	20%	99.31%	114	216.015.023	114%	46.45%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	%	100	465.000.000	94	0	100	217.506.110	0	0	50	73.000.000	30	84.850.000	20	58.165.023	20	216.015.023	20%	99.31%	114	216.015.023	114%	46.45%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12	450.000.000	4	0	4	212.506.110	0	0	2	68.000.000	1	84.850.000	1	58.165.023	4	211.015.023	100%	99.3%	8	211.015.023	66.67%	46.89%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	3	15.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	100%	100%	2	5.000.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai baik	Persentase	100	100.000.000	90	0	100	20.000.000	0	0	50	6.315.650	16,67	5.000.000	33	8.675.150	99,67	19.990.800	99.67%	99.95%	189,67	19.990.800	189.67%	19.99%	KECAMATAN KADUR
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai baik	Persen	100	100.000.000	90	0	92	20.000.000	0	0	50	6.315.650	20	5.000.000	22	8.675.150	92	19.990.800	100%	99.95%	182	19.990.800	182%	19.99%	KECAMATAN KADUR
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	30	30.000.000	10	0	10	10.000.000	0	0	2,5	1.970.050	2,5	2.500.000	5	5.520.950	10	9.991.000	100%	99.91%	20	9.991.000	66.67%	33.3%	KECAMATAN KADUR
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	30	30.000.000	10	0	10	10.000.000	0	0	3	4.345.600	2,5	2.500.000	4,5	3.154.200	10	9.999.800	100%	100%	20	9.999.800	66.67%	33.33%	KECAMATAN KADUR
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai baik	Persentase	94	36.500.000	85	0	88	7.004.500	22	0	22	2.430.000	22	60	22	4.505.000	88	6.995.000	100%	99.86%	173	6.995.000	184.04%	19.16%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai baik	Persen	100	36.500.000	100	0	100	7.004.500	25	0	25	2.430.000	25	60	25	4.505.000	100	6.995.000	100%	99.86%	200	6.995.000	200%	19.16%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	jumlah desa	14	15.000.000	14	0	14	2.172.500	0	0	14	2.103.000	14	60	14	0	14	2.163.000	100%	99.56%	28	2.163.000	200%	14.42%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Desa	14	0	14	0	14	4.832.000	14	0	14	327	14	0	14	4.505.000	14	4.832.000	100%	100%	28	4.832.000	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desa	%	100	152.175.000	90	0	100	35.500.000	10	4.189.800	25	7.646.200	35	15.945.800	40	6.730.000	40	34.511.800	40%	97.22%	130	34.511.800	130%	22.68%	KECAMATAN WARU
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100		90		95		20		20		30		25		25		26.32%	115		115%			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	persen	100	152.175.000	90	0	100	35.500.000	25	4.189.800	25	7.646.200	25	15.945.800	25	6.730.000	25	34.511.800	25%	97.22%	115	34.511.800	115%	22.68%	KECAMATAN WARU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	60.750.000	12	0	12	10.000.000	3	1.734.600	3	2.703.500	3	3.633.700	3	1.490.000	3	9.561.800	25%	95.62%	15	9.561.800	125%	15.74%	KECAMATAN WARU
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	45.675.000	12	0	12	10.000.000	2	320,2	2	1.121.500	2	6.208.300	6	1.800.000	6	9.450.000	50%	94.5%	18	9.450.000	150%	20.69%	KECAMATAN WARU
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	12	45.750.000	12	0	12	10.000.000	2	1.662.700	2	2.686.900	2	3.760.400	6	1.890.000	6	10.000.000	50%	100%	18	10.000.000	150%	21.86%	KECAMATAN WARU
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	12	0	12	0	12	5.500.000	2	472,3	2	1.134.300	2	2.343.400	6	1.550.000	6	5.500.000	50%	100%	18	5.500.000	150%	0%	KECAMATAN WARU
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan ~~penyelenggaraan pemerintahan desa yang~~	Persentase	100	28.000.000	100	0	100	30.000.000	25	5.019.000	25	9.555.000	35	10.395.000	15	4.799.000	100	29.768.000	100%	99.23%	200	29.768.000	200%	106.31%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai ~~penyelenggaraan pemerintahan desa yang~~	%	100	28.000.000	100	0	100	30.000.000	25	5.019.000	25	9.555.000	35	10.395.000	15	4.799.000	100	29.768.000	100%	99.23%	200	29.768.000	200%	106.31%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	51	8.500.000	17	0	17	10.000.000	12	5.019.000	0	0	0	0	5	4.799.000	17	9.818.000	100%	98.18%	34	9.818.000	66.67%	115.51%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	51	6.500.000	17	0	17	20.000.000	0	0	9	9.555.000	8	10.395.000	0	0	17	19.950.000	100%	99.75%	34	19.950.000	66.67%	306.92%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang perencanaan dan laporan kinerjanya memiliki ~~kuantitas baik~~	Persentase	100	105.000.000	91	0	100	7.940.000	25	0	25	810	25	1.300.000	25	5.830.000	100	7.940.000	100%	100%	191	7.940.000	191%	7.56%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai ~~penyelenggaraan pemerintahan desa yang~~	Persentase	100	105.000.000	91	0	100	7.940.000	25	0	25	810	25	1.300.000	25	5.830.000	100	7.940.000	100%	100%	191	7.940.000	191%	7.56%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	45.000.000	12	0	12	7.940.000	0	0	3	810	3	1.300.000	6	5.830.000	12	7.940.000	100%	100%	24	7.940.000	200%	17.64%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan ~~penyelenggaraan pemerintahan desa yang~~	%	100	69.000.000	95	0	95	40.451.200	10	0	20	0	30	0	35	40.451.200	35	40.451.200	36.84%	100%	130	40.451.200	130%	58.62%	KECAMATAN PAKONG
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100		95		95		15		20		30		30	30		31.58%		125		125%			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai ~~penyelenggaraan pemerintahan desa yang~~	Persentase	100	69.000.000	95	0	95	40.451.200	10	0	20	0	30	0	35	40.451.200	35	40.451.200	36.84%	100%	130	40.451.200	130%	58.62%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	Kegiatan	1	15.000.000	1	0	1	40.451.200	0	0	0	0	0	0	1	40.451.200	1	40.451.200	100%	100%	2	40.451.200	200%	269.67%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa ~~dengan baik~~	Persentase	100	120.000.000	91	0	95	21.169.300	0	0	75	12.787.700	12,5	5.052.600	12,5	3.329.000	100	21.169.300	105.26%	100%	191	21.169.300	191%	17.64%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggraan pemerintahan desa	Persentase	100	120.000.000	90	0	95	21.169.300	0	0	75	12.787.700	12,5	5.052.600	12,5	3.329.000	100	21.169.300	105.26%	100%	190	21.169.300	190%	17.64%	KECAMATAN PADEMAWU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	60.000.000	20		0	20	16.476.400	0		0	10	8.094.800	5	5.052.600	5	3.329.000	20	16.476.400	100%	100%	40	16.476.400	200%	27.46%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	20	30.000.000	20		0	20	4.692.900	0		0	10	4.692.900	10	0	0	0	20	4.692.900	100%	100%	40	4.692.900	200%	15.64%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa	Persentase	100	144.500.000	98		0	98	47.716.000	7	3.720.000	21	10.412.800	41	19.322.900	29	14.228.300	98	47.684.000	100%	99.93%	196	47.684.000	196%	33%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	144.500.000	100		0	98	47.716.000	7	3.720.000	21	10.412.800	41	19.322.900	29	14.228.300	98	47.684.000	100%	99.93%	198	47.684.000	198%	33%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	27	17.500.000	0		0	9	12.000.000	2	1.445.000	0	0	4	5.324.800	3	5.230.200	9	12.000.000	100%	100%	9	12.000.000	33.33%	68.57%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	27	37.000.000	0		0	9	14.000.000	2	2.275.000	3	5.225.000	2	2.805.000	2	3.695.000	9	14.000.000	100%	100%	9	14.000.000	33.33%	37.84%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	30	37.000.000	10		0	10	9.716.000	0	0	2	2.115.000	6	6.301.000	2	1.300.000	10	9.716.000	100%	100%	20	9.716.000	66.67%	26.26%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	81	37.000.000	27		0	27	12.000.000	0	0	7	3.072.800	11	4.892.100	9	4.003.100	27	11.968.000	100%	99.73%	54	11.968.000	66.67%	32.35%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Dibina dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Persentase	100	30.000.000	90		0	95	35.000.000	95	8.920.100	95	10.877.400	95	2.874.600	95	12.327.900	95	35.000.000	100%	100%	185	35.000.000	185%	116.67%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	30.000.000	90		0	95	35.000.000	95	8.920.100	95	10.877.400	95	2.874.600	95	12.327.900	95	35.000.000	100%	100%	185	35.000.000	185%	116.67%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	15.000.000	10		0	10	20.000.000	10	6.140.700	10	5.037.600	10	2.874.600	10	5.947.100	10	20.000.000	100%	100%	20	20.000.000	200%	133.33%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	10	15.000.000	10		0	10	15.000.000	10	2.779.400	10	5.839.800	0	0	10	6.380.800	10	15.000.000	100%	100%	20	15.000.000	200%	100%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desa	%	100	210.500.000	100		0	98	29.720.739	15	0	30	17.358.000	30	0	19	10.890.000	94	28.248.000	95.92%	95.04%	194	28.248.000	194%	13.42%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	210.500.000	100		0	98	29.720.739	15	0	30	17.358.000	30	0	19	10.890.000	94	28.248.000	95.92%	95.04%	194	28.248.000	194%	13.42%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	39	37.000.000	13		0	13	9.000.000	0	0	4	4.760.000	5	0	4	3.670.000	13	8.430.000	100%	93.67%	26	8.430.000	66.67%	22.78%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	39	37.000.000	13		0	13	10.720.739	3	0	4	5.048.000	4	0	2	5.277.000	13	10.325.000	100%	96.31%	26	10.325.000	66.67%	27.91%	KECAMATAN BATUMARMAR	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	39	37.000.000	13	0	13	10.000.000	3	0	5	7.550.000	2	0	3	1.943.000	13	9.493.000	100%	94.93%	26	9.493.000	66.67%	25.66%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan ~~pengelolaan keuangan desa~~ Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100	60.000.000	99	0	100	91.771.500	25	7.848.000	25	4.213.000	25	2.410.500	25	73.981.000	100	88.452.500	100%	96.38%	199	88.452.500	199%	147.42%	KECAMATAN PROPO		
					%	100		0		90		24		25		25		10		84		93.33%		84		84%				
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase	100	60.000.000	99	0	100	91.771.500	25	7.848.000	25	4.213.000	25	2.410.500	25	73.981.000	100	88.452.500	100%	96.38%	199	88.452.500	199%	147.42%	KECAMATAN PROPO		
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	27	30.000.000	27	0	27	19.922.500	10	5.999.000	10	4.213.000	7	2.410.500	0	5.295.000	27	17.917.500	100%	89.94%	54	17.917.500	200%	59.73%	KECAMATAN PROPO		
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	27	30.000.000	27	0	27	71.849.000	10	1.849.000	0	0	0	0	17	68.686.000	27	70.535.000	100%	98.17%	54	70.535.000	200%	235.12%	KECAMATAN PROPO		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan ~~pengelolaan keuangan desa~~	Persentase	95	33.503.119	91	0	91	9.678.100	25	0	25	4.678.100	25	0	16	5.000.000	91	9.678.100	100%	100%	182	9.678.100	191.58%	28.89%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan ~~pengelolaan keuangan desa~~	Persen	95	33.503.119	91	0	93	9.678.100	25	0	25	4.678.100	25	0	17	5.000.000	92	9.678.100	98.92%	100%	183	9.678.100	192.63%	28.89%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	11.923.816	13	0	13	4.678.100	3	0	4	4.678.100	3	0	0	0	10	4.678.100	76.92%	100%	23	4.678.100	176.92%	39.23%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	13	11.346.615	13	0	13	5.000.000	3	0	4	0	3	0	3	5.000.000	13	5.000.000	100%	100%	26	5.000.000	200%	44.07%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan ~~pengelolaan keuangan desa~~	Persentase	100	130.485.000	90	0	95	30.422.900	0	0	45	7.699.700	25	8.905.000	25	7.115.000	95	23.719.700	100%	77.97%	185	23.719.700	185%	18.18%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan ~~pengelolaan keuangan desa~~	Persentase	100	130.485.000	90	0	95	30.422.900	0	0	45	7.699.700	25	8.905.000	25	7.115.000	25	23.719.700	26.32%	77.97%	115	23.719.700	115%	18.18%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	27	57.000.000	9	0	9	13.278.500	0	0	2	2.733.500	4	5.745.000	3	2.000.000	9	10.478.500	100%	78.91%	18	10.478.500	66.67%	18.38%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	27	30.735.000	9	0	9	7.170.100	0	0	3	2.221.900	3	1.365.000	3	1.920.000	9	5.506.900	100%	76.8%	18	5.506.900	66.67%	17.92%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	27	42.750.000	9	0	9	9.974.300	0	0	2	2.744.300	2	1.795.000	5	3.195.000	9	7.734.300	100%	77.54%	18	7.734.300	66.67%	18.09%	KECAMATAN PAMEKASAN		
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					93.39%	93.6%								
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																					77.44%	91.73%								
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																					Tinggi	Sangat Tinggi								
4	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	78		73,59		75																				
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana ~~tenaga kerja~~	Persentase	60	300.000.000	52	0	60	65.946.000	0	0	15	0	20	0	20	53.630.000	55	53.630.000	91.67%	81.32%	107	53.630.000	178.33%	17.88%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
										I		II		III		IV														
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000	0		0	1	65.946.000	0		0	0		0	1	53.630.000	1	53.630.000	100%	81.32%	1	53.630.000	100%	17.88%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.02.2.01 .0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	300.000.000	0		0	1	65.946.000	0		0	0		0	1	53.630.000	1	53.630.000	100%	81.32%	1	53.630.000	100%	17.88%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	40	6.191.333.826	33		0	40	350.000.000	0		0	20	36.807.300	20	118.555.248	0	160.266.800	40	315.629.348	100%	90.18%	73	315.629.348	182.5%	5.1%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Orang	336	6.191.333.826	350		0	112	350.000.000	0		0	32	36.807.300	48	118.555.248	32	160.266.800	112	315.629.348	100%	90.18%	462	315.629.348	137.5%	5.1%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.03.2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	336	6.191.333.826	187		0	112	350.000.000	0		0	22	36.807.300	44	118.555.248	46	160.266.800	112	315.629.348	100%	90.18%	299	315.629.348	88.99%	5.1%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase	80	1.245.000.000	70		0	80	174.889.750	0		0	27	950	30	86.460.000	20	53.397.125	77	140.807.125	96.25%	80.51%	147	140.807.125	183.75%	11.31%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terinventarisasi kesempatan kerjanya	Perusahaan	60	60.000.000	20		0	20	20.003.000	0		0	5	950	8	3.270.000	7	5.220.000	20	9.440.000	100%	47.19%	40	9.440.000	66.67%	15.73%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.04.2.01 .0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	300	60.000.000	100		0	100	20.003.000	0		0	25	950	30	3.270.000	45	5.220.000	100	9.440.000	100%	47.19%	200	9.440.000	66.67%	15.73%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dipublikasikan	Informasi	600	600.000.000	180		0	200	89.482.750	0		0	0	146	80.460.000	50	1.920.000	196	82.380.000	98%	92.06%	376	82.380.000	62.67%	13.73%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.03 .0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	150	540.000.000	50		0	50	89.482.750	0		0	0	50	80.460.000	0	1.920.000	50	82.380.000	100%	92.06%	100	82.380.000	66.67%	15.26%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja migran yang dilindungi	Orang	660	585.000.000	200		0	220	65.404.000	0		0	0	0	2.730.000	200	46.257.125	200	48.987.125	90.91%	74.9%	400	48.987.125	60.61%	8.37%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.04 .0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	300	240.000.000	100		0	100	27.594.000	0		0	0	25	2.730.000	75	12.457.125	100	15.187.125	100%	55.04%	200	15.187.125	66.67%	6.33%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.04 .0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	360	345.000.000	120		0	120	37.810.000	0		0	0	0	0	120	33.800.000	120	33.800.000	100%	89.39%	240	33.800.000	66.67%	9.8%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	Persentase	70	501.000.000	55		0	70	199.750.000	0		0	10	2.528.000	28	19.760.000	30	124.799.552	68	147.087.552	97.14%	73.64%	123	147.087.552	175.71%	29.36%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pembuatan sarana hubungan Industrial berupa peraturan perusahaan (PP) dan mendaftarkan PP atau PKB nya	Perusahaan	60	261.000.000	20		0	20	174.750.000	0		0	5	1.232.000	10	15.090.000	5	118.035.552	20	134.357.552	100%	76.89%	40	134.357.552	66.67%	51.48%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.05.2.01 .0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	60	111.000.000	20		0	20	35.000.000	0		0	5	592	0	0	15	28.401.000	20	28.993.000	100%	82.84%	40	28.993.000	66.67%	26.12%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	60	150.000.000	56	0	60	139.750.000	0	0	5	640	15	15.090.000	40	89.634.552	60	105.364.552	100%	75.4%	116	105.364.552	193.33%	70.24%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang berhasil diselesaikan	Perkara	10	240.000.000	10	0	10	25.000.000	0	0	0	1.296.000	0	4.670.000	2	6.764.000	2	12.730.000	20%	50.92%	12	12.730.000	120%	5.3%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	10	240.000.000	10	0	10	25.000.000	0	0	0	1.296.000	0	4.670.000	2	6.764.000	2	12.730.000	20%	50.92%	12	12.730.000	120%	5.3%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	80	450.000.000	50	0	80	100.000.200	0	0	0	0	3.080.000	70	60.033.200	70	63.113.200	87.5%	63.11%	120	63.113.200	150%	14.03%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	KK	24	450.000.000	6	0	3	100.000.200	0	0	0	0	3.080.000	2	60.033.200	2	63.113.200	66.67%	63.11%	8	63.113.200	33.33%	14.03%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	150.000.000	1	0	1	50.000.000	0	0	0	0	2.170.000	1	28.316.200	1	30.486.200	100%	60.97%	2	30.486.200	66.67%	20.32%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	18	150.000.000	6	0	6	30.000.000	0	0	0	0	910	6	21.160.000	6	22.070.000	100%	73.57%	12	22.070.000	66.67%	14.71%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
		3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Lokasi	3	150.000.000	1	0	1	20.000.200	0	0	0	0	0	1	10.557.000	1	10.557.000	100%	52.78%	2	10.557.000	66.67%	7.04%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Subkegiatan																		93.33%	70.97%									
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																		Sangat Tinggi	Sedang									
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																		94.51%	77.75%									
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																		Sangat Tinggi	Tinggi									
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			Persentase PPKS yang mandiri	Persen	0,84		0,21		0,42																		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE SAKIP OPD	Skala	82	13.049.962.287	0	0	81	3.305.360.002	81	459.618.893	81	1.211.277.065	81	756.280.327	81	814.958.062	81	3.242.134.347	100%	98.09%	81	3.242.134.347	98.78%	24.84%	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun berdasarkan lokasi	Dokumen	5	315.000.000	5	0	5	60.000.000	0	3.385.000	2	36.740.000	1	12.332.200	2	6.563.100	5	59.020.300	100%	98.37%	10	59.020.300	200%	18.74%	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	220.000.000	6	0	3	49.000.000	0	0	1	36.040.000	1	12.332.200	1	437	3	48.809.200	100%	99.61%	9	48.809.200	300%	22.19%	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	85.000.000	2	0	2	11.000.000	0	3.385.000	1	700	0	0	6.126.100	2	10.211.100	100%	92.83%	4	10.211.100	200%	12.01%	DINAS SOSIAL	
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit Kerja	1	8.344.462.287	1	0	1	2.299.510.002	1	292.517.703	1	893.782.147	1	498.396.703	1	578.007.177	1	2.262.703.730	100%	98.4%	2	2.262.703.730	200%	27.12%	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	30	8.344.462.287	34		0	28	2.299.510.002	28	292.517.703	28	893.782.147	26	498.396.703	26	578.007.177	26	2.262.703.730	92.86%	98.4%	60	2.262.703.730	200%	27.12%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	26	135.000.000	0		0	3	21.000.000	0	0	0	0	3		0	0	20.600.000	3	20.600.000	100%	98.1%	3	20.600.000	11.54%	15.26%	DINAS SOSIAL	
		1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000	0		0	3	21.000.000	0	0	0	0	0	3		0	20.600.000	3	20.600.000	100%	98.1%	3	20.600.000	60%	41.2%	DINAS SOSIAL	
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Barang/Paket	6740	465.000.000	6740		0	12	104.500.000	3	7.576.700	3	41.179.700	3	36.631.050	3	18.440.700	12	103.828.150	100%	99.36%	6752	103.828.150	100.18%	22.33%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	55.000.000	24		0	4	13.000.000	1	723,2	1	4.338.750	1	2.424.000	1	5.286.550	4	12.772.500	100%	98.25%	28	12.772.500	93.33%	23.22%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	350	55.000.000	330		0	4	9.500.000	1	1.600.000	1	3.150.000	1	2.290.000	1	2.460.000	4	9.500.000	100%	100%	334	9.500.000	95.43%	17.27%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	45.000.000	18860		0	4	8.500.000	1		0	1	3.776.150	1	521,25	1	3.844.450	4	8.141.850	100%	95.79%	18864	8.141.850	471600%	18.09%	DINAS SOSIAL	
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	295.000.000	40		0	50	73.500.000	7	5.253.500	16	29.914.800	18	31.395.800	9	6.849.700	50	73.413.800	100%	99.88%	90	73.413.800	163.64%	24.89%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Barang	19	1.159.500.000	19		0	8	73.000.000	0		0	6	68.100.000	0		0	2	1.950.000	8	70.050.000	100%	95.96%	27	70.050.000	142.11%	6.04%	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	500.000.000	8		0	8	73.000.000	0		0	8	68.100.000	0		0	8	1.950.000	8	70.050.000	100%	95.96%	16	70.050.000	100%	14.01%	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	8	2.116.000.000	6		0	6	604.000.000	6	145.879.835	6	145.142.618	6	141.953.174	6	158.827.085	6	591.802.712	100%	97.98%	12	591.802.712	150%	27.97%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	230.000.000	3		0	12	67.000.000	3	12.379.835	3	15.392.618	3	12.203.174	3	21.377.085	12	61.352.712	100%	91.57%	15	61.352.712	300%	26.68%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1.874.000.000	3		0	12	537.000.000	3	133.500.000	3	129.750.000	3	129.750.000	3	137.450.000	12	530.450.000	100%	98.78%	15	530.450.000	500%	28.31%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Unit/Gedung/Item	23	515.000.000	20		0	20	143.350.000	20	10.259.655	20	26.332.600	20	66.967.200	20	30.570.000	20	134.129.455	100%	93.57%	40	134.129.455	173.91%	26.04%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	280.000.000	3		0	3	65.350.000	3	9.525.000	3	21.132.600	3	14.504.200	3	17.744.000	3	62.905.800	100%	96.26%	6	62.905.800	120%	22.47%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	6	135.000.000	4		0	4	55.000.000	0		0	0	4	49.800.000	4	4.850.000	4	54.650.000	100%	99.36%	8	54.650.000	133.33%	40.48%	DINAS SOSIAL		
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Item	15	100.000.000	13		0	13	23.000.000	13	734,655	13	5.200.000	13	2.663.000	13	7.976.000	13	16.573.655	100%	72.06%	26	16.573.655	173.33%	16.57%	DINAS SOSIAL		
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS aktif dalam kegiatan sosial	%	100	464.000.000	100		0	100	38.000.000	100	523,2	100	14.499.500	100	5.220.000	100	17.757.300	100	38.000.000	100%	100%	200	38.000.000	200%	8.19%	DINAS SOSIAL		
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	16	400.000.000	13		0	13	38.000.000	13	523,2	13	14.499.500	13	5.220.000	13	17.757.300	13	38.000.000	100%	100%	26	38.000.000	162.5%	9.5%	DINAS SOSIAL		
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	145.000.000	0		0	20	8.000.000	0		0	0	1.730.000	20	2.620.000	0	3.650.000	20	8.000.000	100%	100%	20	8.000.000	66.67%	5.52%	DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.06.02.2.03 .0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	145.000.000	13	0	13	30.000.000	13	523,2	13	12.769.500	13	2.600.000	13	14.107.300	13	30.000.000	100%	100%	26	30.000.000	173.33%	20.69%	DINAS SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	99	19.217.500.000	60	0	98,96	6.623.500.000	98,96	1.034.766.100	98,96	1.678.551.150	98,96	1.570.398.500	98,96	2.189.809.661	98,96	6.473.525.411	100%	97.74%	158,96	6.473.525.411	160.57%	33.69%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti sosial yang dijangkau	Orang	600	18.962.500.000	432	0	432	6.611.000.000	432	1.033.536.100	432	1.671.801.150	432	1.568.733.500	432	2.187.589.661	432	6.461.660.411	100%	97.74%	864	6.461.660.411	144%	34.08%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01 .0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	410	18.235.000.000	400	0	421	6.500.000.000	421	1.030.428.100	421	1.595.737.650	421	1.550.210.500	421	2.174.845.661	421	6.351.221.911	100%	97.71%	821	6.351.221.911	200.24%	34.83%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01 .0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	130.000.000	100	0	14	3.000.000	0	0	0	0	0	14	2.744.000	14	2.744.000	100%	91.47%	114	2.744.000	76%	2.11%	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.2.01 .0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	95.000.000	15	0	15	21.000.000	7	610	1	3.251.500	5	11.798.000	5	5.120.000	18	20.779.500	120%	98.95%	33	20.779.500	183.33%	21.87%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01 .0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	300.000.000	300	0	520	70.000.000	0	2.498.000	520	64.650.000	0	0	0	2.850.000	520	69.998.000	100%	100%	820	69.998.000	234.29%	23.33%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01 .0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	75.000.000	10	0	30	17.000.000	5	0	3	8.162.000	18	6.725.000	45	2.030.000	71	16.917.000	236.67%	99.51%	81	16.917.000	405%	22.56%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dijangkau	Orang	220000	255.000.000	112036	0	112036	12.500.000	0	1.230.000	0	6.750.000	0	1.665.000	112036	2.220.000	112036	11.865.000	100%	94.92%	224072	11.865.000	101.85%	4.65%	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02 .0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	120.000.000	11	0	20	12.500.000	5	1.230.000	0	6.750.000	13	1.665.000	4	2.220.000	22	11.865.000	110%	94.92%	33	11.865.000	220%	9.89%	DINAS SOSIAL
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan Sosial	Persentase	100	70.061.363.100	52	0	100	16.248.788.000	60	18.356.800	75	191.933.494	80	624.513.691	100	15.349.531.651	100	16.184.335.636	100%	99.6%	152	16.184.335.636	152%	23.1%	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah PPKS yang menerima bantuan	PPKS	530000	70.061.363.100	529000	0	529000	16.248.788.000	529000	18.356.800	529000	191.933.494	529000	624.513.691	529000	15.349.531.651	529000	16.184.335.636	100%	99.6%	1E+06	16.184.335.636	199.62%	23.1%	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02 .0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	230000	1.000.000.000	214015	0	211439	114.690.000	211439	5.619.400	211439	15.974.494	211439	76.073.741	211439	11.730.800	211439	109.398.435	100%	95.39%	425454	109.398.435	184.98%	10.94%	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02 .0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	KPM	47000	550.000.000	45000	0	47046	112.810.000	47046	776,4	47046	19.570.000	47046	31.058.450	47046	13.757.551	47046	65.162.401	100%	57.76%	92046	65.162.401	195.84%	11.85%	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	24015	67.248.863.100	24015	0	23875	15.916.288.000	0	11.961.000	0	156.389.000	0	516.453.800	23780	15.219.973.000	23780	15.904.776.800	99.6%	99.93%	47795	15.904.776.800	199.02%	23.65%			DINAS SOSIAL	
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	1.062.500.000	88	0	20	105.000.000	0	0	0	0	927,7	20	104.070.300	20	104.998.000	100%	100%	108	104.998.000	108%	9.88%			DINAS SOSIAL		
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase	100	715.000.000	100	0	100	54.500.000	100	2.878.100	100	16.690.650	100	19.363.100	100	13.751.800	100	52.683.650	100%	96.67%	200	52.683.650	200%	7.37%			DINAS SOSIAL	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	115	460.000.000	71	0	111	15.000.000	5	110	5	4.901.000	15	9.185.000	86	500	111	14.696.000	100%	97.97%	182	14.696.000	158.26%	3.19%			DINAS SOSIAL	
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	130.000.000	100	0	36	10.000.000	0	110	0	251	10	9.075.000	18	433,25	28	9.869.250	77.78%	98.69%	128	9.869.250	98.46%	7.59%			DINAS SOSIAL	
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	40.000.000	40	0	20	5.000.000	5	0	5	4.650.000	5	110	5	66,75	20	4.826.750	100%	96.54%	60	4.826.750	300%	12.07%			DINAS SOSIAL	
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	Orang	50	255.000.000	43	0	43	39.500.000	43	2.768.100	43	11.789.650	43	10.178.100	43	13.251.800	43	37.987.650	100%	96.17%	86	37.987.650	172%	14.9%			DINAS SOSIAL	
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	170.000.000	43	0	58	39.500.000	58	2.768.100	58	11.789.650	58	10.178.100	58	13.251.800	58	37.987.650	100%	96.17%	101	37.987.650	174.14%	22.35%			DINAS SOSIAL	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Persentase	100	403.000.000	100	0	100	55.000.000	100	0	100	2.780.200	100	6.217.900	100	45.998.600	100	54.996.700	100%	99.99%	200	54.996.700	200%	13.65%			DINAS SOSIAL	
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	TMP	1	403.000.000	1	0	1	55.000.000	1	0	1	2.780.200	1	6.217.900	1	45.998.600	1	54.996.700	100%	99.99%	2	54.996.700	200%	13.65%			DINAS SOSIAL	
		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	268.000.000	1	0	1	500	0	0	0	1	499,7	0	0	1	499,7	100%	99.94%	2	499,7	200%	0.19%			DINAS SOSIAL		
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	113	70.000.000	113	0	113	9.500.000	113	0	113	2.780.200	113	5.718.200	113	998,6	113	9.497.000	100%	99.97%	226	9.497.000	200%	13.57%			DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	145.000.000	12	0	12	45.000.000	3	0	3	0	3	0	3	45.000.000	12	45.000.000	100%	100%	24	45.000.000	200%	31.03%	DINAS SOSIAL
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																						104.28%	95.74%					
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																						100%	98.68%					
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat.			Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,72	0,74	0,62	0,83																	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85	9.148.231.065	78	0	80	4.115.546.367	0	648.101.478	0	1.098.991.167	0	858.819.185	80	1.402.249.503	80	4.008.161.333	100%	97.39%	158	4.008.161.333	185.88%	43.81%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	9.148.231.065	1	0	1	4.115.546.367	1	648.101.478	0	1.098.991.167	0	858.819.185	0	1.402.249.503	1	4.008.161.333	100%	97.39%	2	4.008.161.333	200%	43.81%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	3.796.834.559	1	0	1	4.115.546.367	1	648.101.478	0	1.098.991.167	0	858.819.185	0	1.402.249.503	1	4.008.161.333	100%	97.39%	2	4.008.161.333	200%	105.57%	PUSKESMAS PASEAN
		2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE Sakip	Skala	90	10.777.265.511	0	0	85	3.509.289.873	0	477.693.693	0	1.365.970.268	0	757.238.959	80,7	753.593.212	80,7	3.354.496.132	94.94%	95.59%	80,7	3.354.496.132	89.67%	31.13%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	%	85	209.500.000	81	0	85	26.500.000	0	2.970.000	0	1.910.000	0	19.150.000	82,6	2.313.000	82,6	26.343.000	97.18%	99.41%	163,6	26.343.000	192.47%	12.57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	141.000.000	2	30.273.154	2	26.500.000	0	2.970.000	0	1.910.000	1	19.150.000	1	2.313.000	2	26.343.000	100%	99.41%	4	56.616.154	200%	40.15%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	9.012.785.535	100	0	100	3.006.989.873	100	417.088.790	100	1.256.413.753	100	624.646.478	100	605.300.519	100	2.903.449.540	100%	96.56%	200	2.903.449.540	200%	32.21%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	9.012.785.535	24	2.698.572.697	24	3.006.989.873	24	417.088.790	24	1.256.413.753	24	624.646.478	24	605.300.519	24	2.903.449.540	100%	96.56%	48	5.602.022.237	192%	62.16%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang difasilitasi	%	100	35.000.000	100	0	100	19.000.000	100	0	100	0	100	0	17.800.000	100	17.800.000	100%	93.68%	200	17.800.000	200%	50.86%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	7	10.000.000	1	0	2	19.000.000	0	0	1	0	1	0	17.800.000	2	17.800.000	100%	93.68%	3	17.800.000	42.86%	178%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	%	85	306.021.345	80	0	85	76.080.000	85	0	85	17.306.000	85	18.137.900	85	36.253.834	85	71.697.734	100%	94.24%	165	71.697.734	194.12%	23.43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	26.000.000	12	5.915.200	12	8.000.000	0	0	0	6	3.219.800	6	3.325.900	6	6.545.700	50%	81.82%	18	12.460.900	150%	47.93%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	24.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	0		0	0	0		0	4	4.854.100	4	4.854.100	100%	97.08%	8	8.854.100	200%	36.89%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	22.500.000	2	1.996.000	2	5.000.000	0		0	0	0	1	2.465.000	1		0	1	2.465.000	50%	49.3%	3	4.461.000	150%	19.83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	46.200.000	20	36.970.748	20	58.080.000	5		0	5	17.306.000	5	12.453.100	5	28.073.834	20	57.832.934	100%	99.57%	40	94.803.682	200%	205.2%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	%	85	35.920.000	80		85	5.000.000	0		0	85		0	85	4.020.000	85	4.020.000	100%	80.4%	165	4.020.000	194.12%	11.19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	30.920.000	10	1.999.000	10	5.000.000	0		0	0	0		0	10	4.020.000	10	4.020.000	100%	80.4%	20	6.019.000	133.33%	19.47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terbayarkan	%	100	837.738.631	100		0	100	285.820.000	0	57.634.903	0	65.428.615	0	82.444.331	95,16	55.653.116	95,16	261.160.965	95.16%	91.37%	195,16	261.160.965	195.16%	31.17%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	175.560.000	12		0	12	68.520.000	3	16.154.903	3	13.228.615	3	13.544.331	3	13.653.116	12	56.580.965	100%	82.58%	24	56.580.965	200%	32.23%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	643.700.000	12		0	12	217.300.000	3	41.480.000	3	52.200.000	3	68.900.000	3	42.000.000	12	204.580.000	100%	94.15%	24	204.580.000	200%	31.78%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	13	340.300.000	12		0	11	89.900.000	0		0	2	24.911.900	5	12.860.250	4	32.252.743	11	70.024.893	100%	77.89%	23	70.024.893	176.92%	20.58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	133.000.000	2		0	2	50.300.000	0		0	1	11.980.950	0	8.708.000	1	19.529.143	2	40.218.093	100%	79.96%	4	40.218.093	200%	30.24%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	78.000.000	5		0	5	35.600.000	1		0	2	11.980.950	1	4.152.250	1	9.803.600	5	25.936.800	100%	72.86%	10	25.936.800	200%	33.25%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	22.000.000	1		0	1	4.000.000	0		0	1	950	0	0	0	2.920.000	1	3.870.000	100%	96.75%	2	3.870.000	200%	17.59%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TALANG	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85	3.502.829.242	80		0	82	1.947.834.975	20	450.448.031	20	450.448.031	21	450.448.031	20	450.448.031	81	1.801.792.124	98.78%	92.5%	161	1.801.792.124	189.41%	51.44%	PUSKESMAS TALANG	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan	12	3.502.829.242	12		0	12	1.947.834.975	3	450.448.031	3	450.448.031	3	450.448.031	3	450.448.031	12	1.801.792.124	100%	92.5%	24	1.801.792.124	200%	51.44%	PUSKESMAS TALANG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan	12	3.467.811.149	12	0	12	1.947.834.975	3	450.448.031	3	450.448.031	3	450.448.031	3	450.448.031	12	1.801.792.124	100%	92.5%	24	1.801.792.124	200%	51.96%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	95	4.667.209.915	85	0	95	3.007.577.029	0	411.220.771	88,85	545.296.371	0	407.963.800	97,68	1.166.419.708	186,53	2.530.900.650	196.35%	84.15%	271,53	2.530.900.650	285.82%	54.23%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	4.667.209.915	1	0	1	3.007.577.029	1	411.220.771	1	545.296.371	1	407.963.800	1	1.166.419.708	1	2.530.900.650	100%	84.15%	2	2.530.900.650	200%	54.23%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	4.620.551.406	1	0	1	3.007.577.029	1	411.220.771	1	545.296.371	1	407.963.800	1	1.166.419.708	1	2.530.900.650	100%	84.15%	2	2.530.900.650	200%	54.77%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90	19.329.306.390	81	0	87	6.386.669.254	0	1.188.708.546	0	1.586.991.235	0	1.411.385.255	87	1.521.585.214	87	5.708.670.250	100%	89.38%	168	5.708.670.250	186.67%	29.53%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	19.329.306.390	1	0	1	6.386.669.254	1	1.188.708.546	1	1.586.991.235	1	1.411.385.255	1	1.521.585.214	1	5.708.670.250	100%	89.38%	2	5.708.670.250	200%	29.53%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	1	19.135.744.284	1	0	1	6.386.669.254	1	1.188.708.546	1	1.586.991.235	1	1.411.385.255	1	1.521.585.214	1	5.708.670.250	100%	89.38%	2	5.708.670.250	200%	29.83%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100	6.577.503.957	88	0	100	3.496.657.465	0	570.104.730	0	728.031.563	100	701.170.592	0	1.422.505.961	0	3.421.812.846	0%	97.86%	88	3.421.812.846	88%	52.02%	PUSKESMAS LARANGAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	6.577.503.957	1	0	1	3.496.657.465	0	570.104.730	0	728.031.563	0	701.170.592	1	1.422.505.961	1	3.421.812.846	100%	97.86%	2	3.421.812.846	200%	52.02%	PUSKESMAS LARANGAN
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	6.511.748.069	1	0	1	3.496.657.465	0	570.104.730	0	728.031.563	1	701.170.592	0	1.422.505.961	1	3.421.812.846	100%	97.86%	2	3.421.812.846	200%	52.55%	PUSKESMAS LARANGAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	98	4.584.182.470	94	0	86	1.990.130.731	0	213.642.183	93,43	391.506.242	0	493.248.704	93,57	806.349.348	93,57	1.904.746.477	108.8%	95.71%	187,57	1.904.746.477	191.4%	41.55%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	4.584.182.470	1	0	1	1.990.130.731	1	213.642.183	1	391.506.242	1	493.248.704	1	806.349.348	1	1.904.746.477	100%	95.71%	2	1.904.746.477	200%	41.55%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Angka	1	4.538.353.994	1	0	1	1.990.130.731	1	213.642.183	1	391.506.242	1	493.248.704	1	806.349.348	4	1.904.746.477	400%	95.71%	5	1.904.746.477	500%	41.97%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	83	9.257.270.670	82	0	82	2.768.162.357	0	510.368.797	0	836.853.062	0	574.118.319	80,95	759.373.882	80,95	2.680.714.060	98.72%	96.84%	162,95	2.680.714.060	196.33%	28.96%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang Disusun	%	100	115.000.000	85	0	100	30.000.000	25	151	50	0	75	4.450.000	100	24.150.000	100	28.751.000	100%	95.84%	185	28.751.000	185%	25%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	70.000.000	7	0	6	30.000.000	2	151	0	0	3	4.450.000	1	24.150.000	6	28.751.000	100%	95.84%	13	28.751.000	216.67%	41.07%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	%	100	6.791.270.670	100	0	100	2.247.262.357	25	416.656.162	50	711.682.819	75	486.160.593	100	595.924.587	100	2.210.424.161	100%	98.36%	200	2.210.424.161	200%	32.55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	6.771.270.670	30	0	30	2.247.262.357	30	416.656.162	27	711.682.819	27	486.160.593	30	595.924.587	30	2.210.424.161	100%	98.36%	60	2.210.424.161	200%	32.64%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	64	105.000.000	100	0	17	12.900.000	0	0	8	1.220.000	8	8.300.000	1	2.280.000	17	11.800.000	100%	91.47%	117	11.800.000	182.81%	11.24%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	pegawai	18	100.000.000	0	0	2	12.900.000	0	0	0	1.220.000	1	8.300.000	1	2.280.000	2	11.800.000	100%	91.47%	2	11.800.000	11.11%	11.8%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Disediakan	%	100	536.000.000	100	0	90	67.000.000	20	7.837.000	45	7.544.350	75	16.063.000	90	30.261.380	90	61.705.730	100%	92.1%	190	61.705.730	190%	11.51%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	105.000.000	12	0	12	15.000.000	2	945,5	4	307,35	4	1.756.300	2	8.458.900	2	11.468.050	16.67%	76.45%	14	11.468.050	116.67%	10.92%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	60.000.000	0	0	12	9.000.000	3	980	0	0	6	1.020.000	3	7.000.000	12	9.000.000	100%	100%	12	9.000.000	100%	15%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	35	300.000.000	15	0	35	43.000.000	9	5.911.500	15	7.237.000	9	13.286.700	2	14.802.480	35	41.237.680	100%	95.9%	50	41.237.680	142.86%	13.75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi	%	100	1.205.000.000	100	0	100	338.500.000	25	80.473.635	50	102.227.493	75	48.546.426	100	74.757.015	100	306.004.569	100%	90.4%	200	306.004.569	200%	25.39%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	450.000.000	12	0	12	104.000.000	3	19.423.635	6	21.616.993	2	14.046.426	1	21.056.515	12	76.143.569	100%	73.21%	24	76.143.569	50%	16.92%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	755.000.000	12	0	12	234.500.000	2	61.050.000	3	80.610.500	2	34.500.000	5	53.700.500	12	229.861.000	100%	98.02%	24	229.861.000	200%	30.45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	%	95	285.000.000	0	0	85	72.500.000	20	5.251.000	40	14.178.400	75	10.598.300	85	32.000.900	85	62.028.600	100%	85.56%	85	62.028.600	89.47%	21.76%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2	160.000.000	2	0	2	49.000.000	0,06	3.251.000	1	11.680.000	0,06	10.177.800	0,88	15.979.400	2	41.088.200	100%	83.85%	4	41.088.200	200%	25.68%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	60.000.000	0	0	10	14.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	0	0	6	8.695.000	10	12.695.000	100%	90.68%	10	12.695.000	100%	21.16%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	unit	2	0	2	0	2	9.500.000	0	0	0,5	498,4	1	420,5	0,5	7.326.500	2	8.245.400	100%	86.79%	4	8.245.400	200%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100	5.878.106.044	100	1.961.957.618	100	2.226.671.014	0	374.135.969	88,21	498.933.786	0	537.799.274	88,21	746.481.530	88,21	2.157.350.559	88.21%	96.89%	188,21	4.119.308.177	188.21%	70.08%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	6.697.605.111	1	0	1	2.226.671.014	1	374.135.969	1	498.933.786	1	537.799.274	1	746.481.530	1	2.157.350.559	100%	96.89%	2	2.157.350.559	200%	32.21%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	satuan kerja	1	6.697.605.111	1	1.894.557.194	1	2.226.671.014	1	374.135.969	1	498.933.786	1	537.799.274	1	746.481.530	1	2.157.350.559	100%	96.89%	2	4.051.907.753	200%	60.5%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	100	479.891.989.635	100	0	100	221.263.042.673	76	31.965.648.570	81	43.431.838.100	81	50.194.478.628	90	67.783.056.575	90	193.375.021.873	90%	87.4%	190	193.375.021.873	190%	40.3%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRIDJO
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Nilai	95	90.176.249.497	81	0	90	30.466.592.562	429	6.247.087.030	429	10.896.880.373	429	6.430.095.838	429	6.558.724.667	429	30.132.787.908	100%	98.9%	858	30.132.787.908	200%	33.42%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRIDJO
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	429	30.951.497.328	429	27.605.643.072	429	30.466.592.562	429	6.247.087.030	429	10.896.880.373	429	6.430.095.838	429	6.558.724.667	429	30.132.787.908	100%	98.9%	858	57.738.430.980	200%	186.54%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRIDJO
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase ketersediaan BLUD menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Prosentase	100	388.402.494.000	100	0	100	190.796.450.111	17	25.718.561.540	43	32.534.957.727	25	43.764.382.790	15	61.224.331.908	100	163.242.233.965	100%	85.56%	200	163.242.233.965	200%	42.03%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRIDJO
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jenis Layanan	21	133.312.694.000	19	147.227.469.561	21	190.796.450.111	16	25.718.561.540	1	32.534.957.727	0	43.764.382.790	2	61.224.331.908	19	163.242.233.965	90.48%	85.56%	38	310.469.703.526	180.95%	232.89%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRIDJO
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85	10.397.077.348	80	0	83	4.090.917.576	0	760.251.283	79,9	1.093.829.639	0	1.346.551.244	83	653.542.544	83	3.854.174.710	100%	94.21%	163	3.854.174.710	191.76%	37.07%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Pasien)	unit kerja	1	10.397.077.348	1	0	1	4.090.917.576	0	760.251.283	1	1.093.829.639	0	1.346.551.244	1	653.542.544	1	3.854.174.710	100%	94.21%	2	3.854.174.710	200%	37.07%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	10.293.136.848	1	0	1	4.090.917.576	1	760.251.283	1	1.093.829.639	1	1.346.551.244	1	653.542.544	1	3.854.174.710	100%	94.21%	2	3.854.174.710	200%	37.44%	PUSKESMAS PEGANTENAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	96	6.016.332.470	92		0	94	2.399.463.494	94	330.598.376	94	666.674.363	94	476.341.178	94	895.892.402	94	2.369.506.319	100%	98.75%	186	2.369.506.319	193.75%	39.38%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Persentase	96	6.016.332.470	92		0	94	2.399.463.494	94	330.598.376	94	666.674.363	94	476.341.178	94	895.892.402	94	2.369.506.319	100%	98.75%	186	2.369.506.319	193.75%	39.38%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	5.956.186.664	1		0	1	2.399.463.494	1	330.598.376	1	666.674.363	1	476.341.178	1	895.892.402	1	2.369.506.319	100%	98.75%	2	2.369.506.319	200%	39.78%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Persentase	99	15.694.535.516	99		0	99	3.969.146.992	0	383.312.098	88	1.180.688.265	88	326.064.120	88	1.377.453.414	88	3.267.517.897	88.89%	82.32%	187	3.267.517.897	188.89%	20.82%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	15.694.535.516	1		0	1	3.969.146.992	1	383.312.098	1	1.180.688.265	1	326.064.120	1	1.377.453.414	1	3.267.517.897	100%	82.32%	2	3.267.517.897	200%	20.82%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	15.537.635.860	1		0	1	3.969.146.992	1	383.312.098	0	1.180.688.265	0	326.064.120	0	1.377.453.414	1	3.267.517.897	100%	82.32%	2	3.267.517.897	200%	21.03%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100	8.628.080.000	80		0	100	3.822.597.423	85	830.914.689	15	1.354.439.844	0	801.048.250	0	994.593.678	100	3.980.996.461	100%	104.14%	180	3.980.996.461	180%	46.14%	PUSKESMAS PAKONG		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	unit kerja	1	8.628.080.000	1		0	1	3.822.597.423	1	830.914.689	1	1.354.439.844	1	801.048.250	1	994.593.678	1	3.980.996.461	100%	104.14%	2	3.980.996.461	200%	46.14%	PUSKESMAS PAKONG		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	8.608.080.000	1		0	1	3.822.597.423	1	830.914.689	1	1.354.439.844	1	801.048.250	1	994.593.678	1	3.980.996.461	100%	104.14%	2	3.980.996.461	200%	46.25%	PUSKESMAS PAKONG		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	97	10.086.007.280	93		0	97	3.239.856.080	0		0	65	0	32	0	2.980.677.882	97	2.980.677.882	100%	92%	190	2.980.677.882	195.88%	29.55%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	10.086.007.280	1		0	1	3.239.856.080	0		0	1	0	0	0	2.980.677.882	1	2.980.677.882	100%	92%	2	2.980.677.882	200%	29.55%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	3.239.856.080	1		0	1	3.239.856.080	0		0	0	0	0	1	2.980.677.882	1	2.980.677.882	100%	92%	2	2.980.677.882	200%	92%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	100	166.958.411.147	100		0	100	63.359.419.921	100	11.832.852.455	100	22.733.855.789	100	14.036.328.172	100	14.113.035.025	100	62.716.071.441	100%	98.98%	200	62.716.071.441	200%	37.56%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	90		85		87		87		0		0		87		87		100%		172		191.11%					
		1.02.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	378.000.000	1		0	2	88.284.800	2	14.293.750	2	11.506.250	2	25.102.000	2	30.605.000	2	81.507.000	100%	92.32%	3	81.507.000	150%	21.56%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	153.000.000	1	28.463.000	1	42.880.800	1	6.250.000	1	8.300.000	1	10.352.000	1	16.615.000	1	41.517.000	100%	96.82%	2	69.980.000	200%	45.74%	DINAS KESEHATAN			
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	1	153.000.000	1	48.294.614	1	45.404.000	1	8.043.750	1	3.206.250	1	14.750.000	1	13.990.000	1	39.990.000	100%	88.08%	2	88.284.614	200%	57.7%	DINAS KESEHATAN			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	157.164.682.797	14		0	14	60.733.970.502	3	11.216.369.767	5	22.109.985.567	3	13.317.531.956	3	13.562.741.524	14	60.206.628.814	100%	99.13%	28	60.206.628.814	200%	38.31%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	155.593.493.597	14	49.509.783.752	14	60.733.970.502	3	11.216.369.767	5	22.109.985.567	3	13.317.531.956	3	13.562.741.524	3	60.206.628.814	21.43%	99.13%	17	109.716.412.566	121.43%	70.51%	DINAS KESEHATAN			
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan formal	Diklat	3	110.088.000	60		0	6	10.000.000	0		0	0	1	8.900.000	1	0	2	8.900.000	33.33%	89%	62	8.900.000	2066.67%	8.08%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Diklat	6	90.576.000	6		0	6	10.000.000	0		0	0	1	8.900.000	1	0	2	8.900.000	33.33%	89%	8	8.900.000	133.33%	9.83%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah	paket	52	958.087.350	52		0	52	237.034.878	8	49.084.550	10	103.019.632	14	38.755.484	19	35.454.850	51	226.314.516	98.08%	95.48%	103	226.314.516	198.08%	23.62%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi	Paket	16	58.500.000	9		0	10	5.547.220	10		0	10	1.813.350	10	3.358.350	10	178,75	10	5.350.450	100%	96.45%	19	5.350.450	118.75%	9.15%	DINAS KESEHATAN	
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	Paket	35	153.000.000	21		0	10	21.140.960	10		0	10	1.352.000	10	3.378.700	10	15.071.000	10	19.801.700	100%	93.67%	31	19.801.700	88.57%	12.94%	DINAS KESEHATAN	
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4200	350.000.000	34		0	10	114.299.698	10	11.157.500	10	64.409.000	10	13.484.000	10	16.911.700	10	105.962.200	100%	92.71%	44	105.962.200	1.05%	30.27%	DINAS KESEHATAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	107.559.000	5	0	10	16.011.000	2	6.370.000	3	7.570.500	2	1.645.400	1	423,4	8	16.009.300	80%	99.99%	13	16.009.300	185.71%	14.88%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sk	Laporan	115	229.790.700	40	0	12	80.036.000	4	31.557.050	3	27.874.782	3	16.889.034	2	2.870.000	12	79.190.866	100%	98.94%	52	79.190.866	45.22%	34.46%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Unit	5	278.181.000	5	0	5	105.008.600	0	0	0	0	1	73.250.000	4	20.825.000	5	94.075.000	100%	89.59%	10	94.075.000	200%	33.82%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	70	153.000.000	80	0	1	73.860.200	0	0	0	0	1	73.250.000	0	0	1	73.250.000	100%	99.17%	81	73.250.000	115.71%	47.88%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	122.400.000	7	0	3	24.000.000	0	0	0	0	0	0	2	13.850.000	2	13.850.000	66.67%	57.71%	9	13.850.000	60%	11.32%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	7.148.400	0	0	0	0	0	0	1	6.975.000	1	6.975.000	100%	97.57%	1	6.975.000	0%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Unit	7	7.109.000.000	7	0	7	1.989.552.873	0	521.694.318	0	492.442.040	4	472.366.982	2	438.670.811	6	1.925.174.151	85.71%	96.76%	13	1.925.174.151	185.71%	27.08%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	6.600.000.000	12	0	12	1.839.994.872	3	481.015.000	3	454.915.000	3	432.105.000	3	412.140.000	12	1.780.175.000	100%	96.75%	24	1.780.175.000	200%	26.97%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	458.000.000	12	0	12	149.558.001	3	40.679.318	3	37.527.040	3	40.261.982	3	26.530.811	12	144.999.151	100%	96.95%	24	144.999.151	200%	31.66%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	11	873.100.000	11	0	11	178.418.268	1	31.410.070	1	16.902.300	3	100.421.750	5	12.737.840	10	161.471.960	90.91%	90.5%	21	161.471.960	190.91%	18.49%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	107.100.000	1	0	12	19.217.720	1	2.450.000	3	2.633.800	4	11.582.000	2	1.245.000	10	17.910.800	83.33%	93.2%	11	17.910.800	91.67%	16.72%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	122.400.000	7	0	12	29.060.628	1	10.608.070	3	5.656.500	4	7.949.950	2	3.549.840	10	27.764.360	83.33%	95.54%	17	27.764.360	141.67%	22.68%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	275.400.000	1	0	1	83.119.120	1	2.582.000	1	0	1	76.874.800	1	3.043.000	1	82.499.800	100%	99.25%	2	82.499.800	100%	29.96%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	1	0	1	20.671.000	1	7.070.000	1	5.250.000	1	1.360.000	1	0	1	13.680.000	100%	66.18%	2	13.680.000	200%	7.6%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	107.100.000	1	0	1	26.349.800	1	8.700.000	1	3.362.000	1	2.655.000	1	4.900.000	1	19.617.000	100%	74.45%	2	19.617.000	200%	18.32%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata	Puskesmas	21	87.272.000	21	0	21	17.150.000	21	0	21	0	21	0	21	12.000.000	21	12.000.000	100%	69.97%	42	12.000.000	200%	13.75%	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	21	78.794.000	21	0	1	17.150.000	0	0	0	0	1	0	1	12.000.000	1	12.000.000	100%	69.97%	22	12.000.000	104.76%	15.23%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%							
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	95	8.028.638.495	87	0	90	2.873.617.315	0	167.497.967	90	836.985.948	90	551.086.896	90	791.953.587	90	2.347.524.398	100%	81.69%	177	2.347.524.398	186.32%	29.24%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit Kerja	1	8.028.638.495	1	0	1	2.873.617.315	1	167.497.967	1	836.985.948	1	551.086.896	1	791.953.587	1	2.347.524.398	100%	81.69%	2	2.347.524.398	200%	29.24%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persen	100	7.948.375.487	100	0	100	2.873.617.315	6,3	167.497.967	31,88	836.985.948	20,93	551.086.896	22,58	791.953.587	81,69	2.347.524.398	81.69%	81.69%	181,69	2.347.524.398	181.69%	29.53%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	76	8.391.384.861	100	0	76	4.281.642.153	15	487.408.514	15	1.498.421.171	25		0	21	1.985.829.685	21	3.971.659.370	27.63%	92.76%	121	3.971.659.370	159.21%	47.33%	PUSKESMAS PANAGUAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	8.391.384.861	1	0	1	4.281.642.153	1	487.408.514	1	1.498.421.171	1		0	1	1.985.829.685	1	3.971.659.370	100%	92.76%	2	3.971.659.370	200%	47.33%	PUSKESMAS PANAGUAN		
		1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	8.307.495.447	1	0	1	4.281.642.153	1	487.408.514	0	1.498.421.171	0		0	0	1.985.829.685	1	3.971.659.370	100%	92.76%	2	3.971.659.370	200%	47.81%	PUSKESMAS PANAGUAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	95	11.907.204.182	88	0	95	4.077.199.675	89,03	513.595.399	89,03	1.009.068.551	89,03	981.309.871	89,26	1.483.954.259	89,26	3.987.928.080	93.96%	97.81%	177,26	3.987.928.080	186.59%	33.49%	PUSKESMAS KADUR			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	11.907.204.182	1	0	1	4.077.199.675	1	513.595.399	1	1.009.068.551	1	981.309.871	1	1.483.954.259	1	3.987.928.080	100%	97.81%	2	3.987.928.080	200%	33.49%	PUSKESMAS KADUR			
		1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	11.788.166.811	1	3.757.657.933	1	4.077.199.675	1	513.595.399	1	1.009.068.551	1	981.309.871	1	1.483.954.259	1	3.987.928.080	100%	97.81%	2	7.745.586.013	200%	65.71%	PUSKESMAS KADUR			
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Skala	82	1.444.379.062.285	82	0	82,01	455.922.745.806	0,24	94.917.387.681	0,26	126.921.825.713	0,27	101.006.781.406	79,62	124.046.463.146	80,39	446.892.457.946	98.02%	98.02%	162,39	446.892.457.946	198.04%	30.94%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%	100	494.544.000	100	0	100	92.275.000	5,38	4.840.000	20,79	18.710.000	48,2	43.381.950	25,28	23.329.350	99,65	90.261.300	99.65%	97.82%	199,65	90.261.300	199.65%	18.25%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	198.900.000	12	0	2	55.000.000	0		0	0	12.000.000	1	33.370.000	1	9.063.900	2	54.433.900	100%	98.97%	14	54.433.900	700%	27.37%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	108	30.600.000	100	0	108	5.000.000	0		0	0	0	0	108		4.941.250	108	4.941.250	100%	98.83%	208	4.941.250	192.59%	16.15%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	23	30.600.000	100	0	23	5.000.000	0		0	0	0	23	4.886.000	0		0	23	4.886.000	100%	97.72%	123	4.886.000	534.78%	15.97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	229.500.000	12	0	3	27.275.000	0	4.840.000	1	6.710.000	1	5.125.950	1	9.324.200	3	26.000.150	100%	95.33%	15	26.000.150	500%	11.33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman	100%	100	1.432.201.867.785	100	0	100	454.070.792.930	20,1	94.616.398.802	27,22	126.631.763.402	21,61	100.536.611.667	29,12	123.436.182.665	98,05	445.220.956.536	98.05%	98.05%	198,05	445.220.956.536	198.05%	31.09%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	8375	1.417.884.019.350	7824	0	5576	454.070.792.930	1162	94.616.398.802	1556	126.631.763.402	1300	100.536.611.667	1516	123.436.182.665	5534	445.220.956.536	99.25%	98.05%	13358	445.220.956.536	159.5%	31.4%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibukukan sesuai pedoman	100%	100	154.545.000	100	0	100	2.000.000	0		0	0	72,5	1.450.000	0		0	72,5	1.450.000	72.5%	72.5%	172,5	1.450.000	172.5%	0.94%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.01.2.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Laporan	13	153.000.000	0	0	13	2.000.000	0		0	0	0	13	1.450.000	0		0	13	1.450.000	100%	72.5%	13	1.450.000	100%	0.95%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100	2.287.266.000	100	0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	100%	100	1.916.358.000	100	0	100	433.725.000	11,03	43.336.000	11,26	44.266.200	30,11	118.321.730	44,13	191.408.570	96,53	397.332.500	96.53%	91.61%	196,53	397.332.500	196.53%	20.73%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Paket	15	1.071.000.000	4	0	15	100.000.000	0	0	2	15.632.900	2	27.050.000	11	53.715.000	15	96.397.900	100%	96.4%	19	96.397.900	126.67%	9%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Paket	12	306.000.000	0	0	12	100.000.000	0	43.336.000	6	18.464.500	2	18.854.200	4	17.965.500	12	98.620.200	100%	98.62%	12	98.620.200	100%	32.23%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.600.000	12	0	12	10.000.000	0	0	0	0	2	1.100.000	3	2.250.000	5	3.350.000	41.67%	33.5%	17	3.350.000	141.67%	10.95%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Laporan	12	61.200.000	12	0	12	96.000.000	0	0	0	0	6	43.697.130	6	52.302.870	12	96.000.000	100%	100%	24	96.000.000	200%	156.86%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	Dokumen	2700	306.000.000	12	0	2822	100.000.000	0	0	200	10.168.800	0	0	2300	65.175.200	2500	75.344.000	88.59%	75.34%	2512	75.344.000	93.04%	24.62%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	Dokumen	18	122.400.000	12	0	18	27.725.000	0	0	0	0	18	27.620.400	0	0	18	27.620.400	100%	99.62%	30	27.620.400	166.67%	22.57%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100	4.249.987.500	100	0	100	1.168.952.876	16,16	252.812.879	19,51	227.086.111	23,05	268.286.059	41,28	335.726.161	100	1.083.911.210	100%	92.72%	200	1.083.911.210	200%	25.5%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	765.000.000	12	0	12	240.000.000	2	39.962.879	2	37.336.111	3	48.381.059	5	50.804.285	12	176.484.334	100%	73.54%	24	176.484.334	200%	23.07%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Laporan	13	3.442.500.000	12	0	12	928.952.876	3	212.850.000	3	189.750.000	3	219.905.000	3	284.921.876	12	907.426.876	100%	97.68%	24	907.426.876	184.62%	26.36%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100	1.219.954.000	100	0	100	155.000.000	0	0	0	0	24,99	38.730.000	38,59	59.816.400	63,58	98.546.400	63.58%	63.58%	163,58	98.546.400	163.58%	8.08%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	367.200.000	3	0	3	75.000.000	0	0	0	0	1	30.655.000	2	38.321.400	3	68.976.400	100%	91.97%	6	68.976.400	150%	18.78%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit	12	166.300.000	12	0	12	30.000.000	0	0	0	0	3	8.075.000	9	21.495.000	12	29.570.000	100%	98.57%	24	29.570.000	200%	17.78%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	2	673.200.000	12	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	12	0	600%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase organisasi yang ditata	100%	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100	1.854.540.000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90	6.739.707.450	87	0	90	2.442.361.234	90	386.704.175	90	500.366.036	90	668.066.041	90	763.371.951	90	2.318.508.203	100%	94.93%	177	2.318.508.203	196.67%	34.4%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	6.739.707.450	1	0	1	2.442.361.234	1	386.704.175	1	500.366.036	1	668.066.041	1	763.371.951	1	2.318.508.203	100%	94.93%	2	2.318.508.203	200%	34.4%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2.679.200.000	1	2.318.508.203	1	2.442.361.234	0	386.704.175	0	500.366.036	0	668.066.041	1	763.371.951	1	2.318.508.203	100%	94.93%	2	4.637.016.406	200%	173.07%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100	11.948.581.142	86	0	100	3.967.909.162	0	176.103.851	88,8	1.236.666.981	0	613.516.693	96,6	1.504.056.764	96,6	3.530.344.289	96.6%	88.97%	182,6	3.530.344.289	182.6%	29.55%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	11.948.581.142	1	0	1	3.967.909.162	1	176.103.851	1	1.236.666.981	1	613.516.693	1	1.504.056.764	1	3.530.344.289	100%	88.97%	2	3.530.344.289	200%	29.55%	PUSKESMAS PADEMAWU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	18
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	11.829.130.122	1	0	1	3.967.909.162	1	176.103.851	1	1.236.666.981	1	613.516.693	1	1.504.056.764	1	3.530.344.289	100%	88.97%	2	3.530.344.289	200%	29.84%	PUSKESMAS PADEMAWU		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90	8.518.500.000	80	0	87	4.679.695.687	0	577.829.171	0	1.001.784.449	0	974.622.566	79,74	1.754.176.112	79,74	4.308.412.298	91.66%	92.07%	159,74	4.308.412.298	177.49%	50.58%	PUSKESMAS PALENGAAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	8.518.500.000	1	0	1	4.679.695.687	0	577.829.171	0	1.001.784.449	0	974.622.566	1	1.754.176.112	1	4.308.412.298	100%	92.07%	2	4.308.412.298	200%	50.58%	PUSKESMAS PALENGAAN		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	12.145.800.000	1	0	1	4.679.695.687	0	577.829.171	0	1.001.784.449	0	974.622.566	1	1.754.176.112	1	4.308.412.298	100%	92.07%	2	4.308.412.298	200%	35.47%	PUSKESMAS PALENGAAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90	12.067.556.844	88	0	89,5	4.126.226.012	0	551.452.667	0	810.658.463	0	1.001.611.681	89,5	1.597.862.827	89,5	3.961.585.638	100%	96.01%	177,5	3.961.585.638	197.22%	32.83%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	12.067.556.844	1	0	1	4.126.226.012	1	551.452.667	1	810.658.463	1	1.001.611.681	1	1.597.862.827	1	3.961.585.638	100%	96.01%	2	3.961.585.638	200%	32.83%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	11.946.916.414	1	0	1	4.126.226.012	1	551.452.667	1	810.658.463	1	1.001.611.681	1	1.597.862.827	1	3.961.585.638	100%	96.01%	2	3.961.585.638	200%	33.16%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	98	6.872.209.005	91	0	93	2.514.483.935	25	594.649.794	25	594.649.794	25	594.649.794	18	594.649.796	93	2.378.599.178	100%	94.6%	184	2.378.599.178	187.76%	34.61%	PUSKESMAS GALIS		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	6.872.209.005	1	0	1	2.514.483.935	1	594.649.794	1	594.649.794	1	594.649.794	1	594.649.796	1	2.378.599.178	100%	94.6%	2	2.378.599.178	200%	34.61%	PUSKESMAS GALIS		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	2.855.500.000	1	2.157.921.432	1	2.514.483.935	1	594.649.794	1	594.649.794	1	594.649.794	1	594.649.796	1	2.378.599.178	100%	94.6%	2	4.536.520.610	200%	158.87%	PUSKESMAS GALIS		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100	8.694.566.879	85	0	89	4.361.404.777	1	593.136.783	40	815.835.594	20	808.745.460	28	1.760.563.903	89	3.978.281.740	100%	91.22%	174	3.978.281.740	174%	45.76%	PUSKESMAS WARU		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	8.694.566.879	1	0	1	4.361.404.777	1	593.136.783	0	815.835.594	0	808.745.460	0	1.760.563.903	1	3.978.281.740	100%	91.22%	2	3.978.281.740	200%	45.76%	PUSKESMAS WARU		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja	1	8.665.585.946	1	0	1	4.361.404.777	1	593.136.783	0	815.835.594	0	808.745.460	0	1.760.563.903	1	3.978.281.740	100%	91.22%	2	3.978.281.740	200%	45.91%	PUSKESMAS WARU		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	90	37.162.850.423	0	0	80	26.379.747.656	60	3.890.092.039	65	6.555.989.218	80	7.429.506.702	80	6.093.250.036	80	23.968.837.995	100%	90.86%	80	23.968.837.995	88.89%	64.5%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	orang	90	15.247.850.423	90	0	105	6.503.987.656	105	1.317.374.835	105	2.296.933.542	105	1.379.632.170	105	1.385.663.628	105	6.379.604.175	100%	98.09%	195	6.379.604.175	216.67%	41.84%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	15.197.025.932	90	0	105	6.503.987.656	105	1.317.374.835	105	2.296.933.542	105	1.379.632.170	105	1.385.663.628	105	6.379.604.175	100%	98.09%	195	6.379.604.175	216.67%	41.98%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	unit	2	3.600.000.000	6	0	2	925.760.000	2	161.121.017	2	247.372.534	2	208.363.824	2	243.926.482	2	860.783.857	100%	92.98%	8	860.783.857	400%	23.91%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	1.350.000.000	0	0	12	352.560.000	3	74.721.017	6	77.472.534	9	76.063.824	12	94.126.482	12	322.383.857	100%	91.44%	12	322.383.857	100%	23.88%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	2.250.000.000	0	0	12	573.200.000	3	86.400.000	6	169.900.000	9	132.300.000	12	149.800.000	12	538.400.000	100%	93.93%	12	538.400.000	100%	23.93%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang di tingkatkan pelayanannya	unit	1	18.000.000.000	0	0	1	18.950.000.000	0	2.411.596.187	0	4.011.683.142	1	5.841.510.708	1	4.463.659.926	1	16.728.449.963	100%	88.28%	1	16.728.449.963	100%	92.94%	RSUD WARU		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	1	17.000.000.000	0	0	1	18.950.000.000	0	2.411.596.187	1	4.011.683.142	1	5.841.510.708	1	4.463.659.926	1	16.728.449.963	100%	88.28%	1	16.728.449.963	100%	98.4%	RSUD WARU		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	108	552.986.619.569	108		0	108	231.334.703.081	14,69	299.729.820	14,73	61.535.101.624	21,38	61.708.794.917	57,2	88.431.876.817	108	211.975.503.178	100%	91.63%	216	211.975.503.178	200%	38.33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	98		98		98		13,33		13,36		11,55		59,76	98		100%		196		200%				
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98		98		98		13,33		13,36		21,38		49,93	98		100%		196		200%				
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	168		168		168		22,85		22,91		21,38		32,86	100		59.52%		268		159.52%				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100%	100	334.020.286.417	100		0	100	137.040.068.881	0,23	299.729.820	27,98	37.549.559.160	27,73	37.195.784.950	44,06	50.021.770.404	100	125.066.844.334	100%	91.26%	200	125.066.844.334	200%	37.44%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.02.2.01 .0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	6	3.672.000.000	60		0	49	10.813.720.946	0	0	0	5	687.284.530	36	7.872.416.848	41	8.559.701.378	83.67%	79.16%	101	8.559.701.378	1683.33%	233.11%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun"	"Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun"	Ruang	6	2.754.000.000	4		0	1	221.426.500	0	0	0	0	57.606.625	1	162.319.875	1	219.926.500	100%	99.32%	5	219.926.500	83.33%	7.99%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	"Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun"	Ruang	12	5.253.276.420	12		0	7	1.074.318.000	0	0	0	2	243.711.000	5	677.115.000	7	920.826.000	100%	85.71%	19	920.826.000	158.33%	17.53%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun"	"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun"	Ruang	11	5.039.513.388	1		0	4	856.341.600	0	0	0	2	186.676.400	2	597.309.651	4	783.986.051	100%	91.55%	5	783.986.051	45.45%	15.56%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"	Unit	20	6.120.000.000	11		0	105	17.130.599.631	0	0	0	4	819.250.950	88	14.503.199.858	92	15.322.450.808	87.62%	89.44%	103	15.322.450.808	515%	250.37%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat"	Ruang	30	14.099.297.530	15		0	59	11.665.484.000	0	0	0	6	1.238.574.850	44	8.791.684.592	50	10.030.259.442	84.75%	85.98%	65	10.030.259.442	216.67%	71.14%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	"Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"	Ruang	5	1.912.500.000	8		0	1	161.879.000	0	0	0	0	43.094.750	1	72.470.550	1	115.565.300	100%	71.39%	9	115.565.300	180%	6.04%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"	Ruang	6	1.836.000.000	15		0	4	767.019.408	0	0	0	1	151.691.139	2	423.573.417	3	575.264.556	75%	75%	18	575.264.556	300%	31.33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi"	Unit	10	4.437.000.000	7		0	9	1.207.427.000	0	0	0	1	28.856.750	6	910.645.754	7	939.502.504	77.78%	77.81%	14	939.502.504	140%	21.17%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	10	2.295.000.000	1		0	5	450.000.000	0	0	0	0	5	438.420.000	5	438.420.000	100%	97.43%	6	438.420.000	60%	19.1%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.01 .0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	476	1.836.000.000	476		0	477	825.000.000	0	0	0	199	344.289.298	278	471.284.321	477	815.573.619	100%	98.86%	953	815.573.619	200.21%	44.42%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01 .0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	14000	1.836.000.000	103684		0	15000	460.000.000	0	0	119	54.850.000	429	197.778.000	14452	204.936.038	15000	457.564.038	100%	99.47%	118684	457.564.038	847.74%	24.92%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.02.2.01 .0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	9651	48.815.112.826	9401		0	9651	15.952.651.250	182	299.729.820	6000	7.846.664.760	1981	3.275.751.920	1488	2.682.221.670	9651	14.104.368.170	100%	88.41%	19052	14.104.368.170	197.41%	28.89%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi"	Orang	460	459.000.000	400		650	655.000.000	0		0	320	132.350.000	145	143.400.000	160	160.139.750	625	435.889.750	96.15%	66.55%	1025	435.889.750	222.83%	94.97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	"Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah"	Satuan Pendidikan	1911	28.764.000.000	464		0	1911	9.625.000.000	0		0	15	41.214.400	21	71.066.000	1875	9.322.178.000	1911	9.434.458.400	100%	98.02%	2375	9.434.458.400	124.28%	32.8%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	"Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS"	Satuan Pendidikan	476	187.891.956.000	416		0	476	61.327.670.000	0		0	238	29.474.480.000	238	29.289.347.584	0		0	476	58.763.827.584	100%	95.82%	892	58.763.827.584	187.39%	31.28%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	"Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun"	Ruang	5	2.295.000.000	0		0	8	2.131.335.280	0		0	0	2	417.405.154	5	1.279.214.448	7	1.696.619.602	87.5%	79.6%	7	1.696.619.602	140%	73.93%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	22		0		0	22	915.196.266	0		0	0	0	0	20	677.876.632	20	677.876.632	90.91%	74.07%	20	677.876.632	90.91%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100%	100	140.448.819.577	100		0	100	54.004.187.200	0		0	25,63	13.766.192.464	3,14	14.861.651.692	71,23	21.609.331.488	100	50.237.175.644	100%	93.02%	200	50.237.175.644	200%	35.77%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	"Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun"	Ruang	1	841.500.000	0		0	1	263.260.000	0		0	0	0	65.815.000	1	197.445.000	1	263.260.000	100%	100%	1	263.260.000	100%	31.28%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	"Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun"	Ruang	4	2.772.360.000	0		0	1	130.469.000	0		0	0	0	0	1	130.469.000	1	130.469.000	100%	100%	1	130.469.000	25%	4.71%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	"Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun"	Ruang	6	7.787.700.000	0		0	6	1.552.255.000	0		0	0	1	342.063.750	5	1.151.031.250	6	1.493.095.000	100%	96.19%	6	1.493.095.000	100%	19.17%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"	Unit	6	2.203.200.000	5		0	18	2.973.440.000	0		0	0	1	249.461.650	15	2.533.889.025	16	2.783.350.675	88.89%	93.61%	21	2.783.350.675	350%	126.33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	"Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"	Ruang	46	25.274.259.720	69		0	23	3.386.682.000	0		0	0	3	374.933.600	19	2.711.658.050	22	3.086.591.650	95.65%	91.14%	91	3.086.591.650	197.83%	12.21%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	11	3.090.600.000	17		0	3	428.000.000	0		0	0	0	0	3	364.911.825	3	364.911.825	100%	85.26%	20	364.911.825	181.82%	11.81%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1000	1.147.500.000	34		0	1	107.000.000	0		0	0	0	0	1	101.944.000	1	101.944.000	100%	95.27%	35	101.944.000	3.5%	8.88%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	"Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian"	Satuan Pendidikan	21237	1.071.000.000	183		0	21237	379.850.000	0		0	534	9.550.000	8714	155.855.000	11989	109.414.920	21237	274.819.920	100%	72.35%	21420	274.819.920	100.86%	25.66%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2715	1.147.500.000	200		0	2715	405.982.500	0		0	303	45.307.464	384	57.383.500	1343	200.751.018	2030	303.441.982	74.77%	74.74%	2230	303.441.982	82.14%	26.44%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi"	Orang	1983	459.000.000	68		0	1983	215.000.000	0		0	0	6		557,5	1700	160.284.000	1706	160.841.500	86.03%	74.81%	1774	160.841.500	89.46%	35.04%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	"Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan"	Satuan Pendidikan	181	382.500.000	34		0	181	167.650.000	0		0	15	13.300.000	45	41.584.000	121	77.675.000	181	132.559.000	100%	79.07%	215	132.559.000	118.78%	34.66%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS"	Satuan Pendidikan	181	85.680.000.000	183		0	181	28.618.890.000	0		0	87	13.690.155.000	94	13.174.601.892	0		0	181	26.864.756.892	100%	93.87%	364	26.864.756.892	201.1%	31.35%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik"	Peserta Didik	1000	1.530.000.000	34		0	1000	11.387.784.700	0		0	2	7.880.000	1	257,5	975	10.604.525.000	978	10.612.662.500	97.8%	93.19%	1012	10.612.662.500	101.2%	693.64%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	3		0	3		0	16	2.954.000.000	0		0	0	2	399.138.300	13	2.265.335.900	15	2.664.474.200	93.75%	90.2%	18	2.664.474.200	600%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
											I				II							III				IV				
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7		0	0	7	292.374.000	0		0	0		0	0	7	290.007.500	7	290.007.500	100%	99.19%	7	290.007.500	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase PAUD yang dikelola Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100%	100	73.093.911.345	100	0	100	37.416.407.000	0		0	24,34	8.826.530.000	26,6	9.644.208.775	41,04	15.522.729.925	91,98	33.993.468.700	91.98%	90.85%	191,98	33.993.468.700	191.98%	46.51%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi"	Unit	10	4.590.000.000	10	0	65	11.770.416.000	0		0	0	0	7	1.164.104.775	48	9.021.560.225	55	10.185.665.000	84.62%	86.54%	65	10.185.665.000	650%	221.91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	"Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen"	Satuan Pendidikan	100	765.000.000	115	0	250	500.000.000	0		0	12	22.805.000	10	19.750.000	228	385.187.700	250	427.742.700	100%	85.55%	365	427.742.700	365%	55.91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	989	53.406.180.000	989	0	989	17.441.610.000	0		0	495	8.788.875.000	448	7.887.385.800	46	317.060.100	989	16.993.320.900	100%	97.43%	1978	16.993.320.900	200%	31.82%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	250	612.000.000	0	0	450	160.000.000	0		0	42	14.850.000	50	17.580.000	350	97.365.000	442	129.795.000	98.22%	81.12%	442	129.795.000	176.8%	21.21%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.03.0027	Pengadaan Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	0		0	0	193.822.000	2	13.480.000	0		0	0	0	0	2	13.480.000	2	13.480.000	100%	100%	2	207.302.000	0%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.04.0006	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100%	100	5.423.602.230	100	0	100	2.874.040.000	0		0	48,46	1.392.820.000	0,25	7.149.500	51,29	1.278.045.000	100	2.678.014.500	100%	93.18%	200	2.678.014.500	200%	49.38%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.04.0015	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Orang	20	306.000.000	20	0	45	100.000.000	0		0	0	0	0	0	29	62.360.000	29	62.360.000	64.44%	62.36%	49	62.360.000	245%	20.38%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.04.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	10	306.000.000	30	0	100	60.000.000	0		0	0	0	0	0	88	52.320.000	88	52.320.000	88%	87.2%	118	52.320.000	1180%	17.1%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	40	612.000.000	5	0	50	139.000.000	0		0	0	4	750	46	116.675.000	50	117.425.000	100%	84.48%	55	117.425.000	137.5%	19.19%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	23	3.074.382.000	23	0	23	2.095.640.000	0		0	15,29	1.392.820.000	0	6,35	578.250.000	21,64	1.971.070.000	94.09%	94.06%	44,64	1.971.070.000	194.09%	64.11%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang	50	153.000.000	0	0	50	25.000.000	0		0	0	12,8	6.399.500	28,1	14.040.000	40,9	20.439.500	81.8%	81.76%	40,9	20.439.500	81.8%	13.36%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	100	100.000.000	20	196.985.000	200	454.400.000	0		0	0	0	0	200	454.400.000	200	454.400.000	100%	100%	220	651.385.000	220%	651.39%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Persen	100	463.635.000	100	0	100	0	0		0	0	0	0	100	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase SD yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100	463.635.000	100	0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
						7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang <i>Pendidikan SMP</i>	Guru/Muri d	11	4.300.678.260	11		0	11	675.600.000	0		0	0	78.000.000	11	549.600.000	11	627.600.000	100%	92.9%	22	627.600.000	200%	14.59%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang <i>Pendidikan SD</i>		Guru/Muri d	12		12		0		0		11,55	0,45	12		100%	24		200%									
		Persentase Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Persen	429		399		409		0		200	209	409		100%	808		188.34%									
		Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Persen	1904		1868		1880		0		0	1880	1880		100%	3748		196.85%									
		Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan		Persen	880		835		850		0		11,55	838,45	850		100%	1685		191.48%									
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	95%	97	4.300.678.260	95		0	97	675.600.000	0		0	0	63,65	78.000.000	33,35	549.600.000	97	627.600.000	100%	92.9%	192	627.600.000	197.94%	14.59%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Dokumen	242	585.684.000	242		0	242	675.600.000	0		0	0	28	78.000.000	197	549.600.000	225	627.600.000	92.98%	92.9%	467	627.600.000	192.98%	107.16%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Sekolah/or ang	72	834.543.000	70		0	70	50.000.000	0		0	0	0	70	47.365.000	70	47.365.000	100%	94.73%	140	47.365.000	194.44%	5.68%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang diberikan rekomendasi perizinan	100%	100	61.818.000	100		0	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100	772.725.000	100		0	100	50.000.000	0		0	0	0	100	47.365.000	100	47.365.000	100%	94.73%	200	47.365.000	200%	6.13%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	200	765.000.000	40		0	200	50.000.000	0		0	0	0	190	47.365.000	190	47.365.000	95%	94.73%	230	47.365.000	115%	6.19%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	90	231.817.500	88		0	88		0	0	0	0	0	88	0	88	0	100%	0%	176	0	195.56%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra 2. Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan perlindungan bahasa dan sastra	100%	100	231.817.500	100		0	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persen	100	2.873.004.251	79	0	100	482.149.800	2,6	0	56	79.343.250	66	216.974.350	92,91	149.746.613	92,91	446.064.213	92,91%	92,52%	171,91	446.064.213	171,91%	15,53%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Orang	388	23.840.856	391	0	462	0	106	0	217	0	313,99	0	460	0	460	0	99,57%	0%	851	0	219,33%	0%	PUSKESMAS BANDARAN
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	orang	24		24		24		0		6		3,99		14,01		24		100%		48		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	item	432		372		396		0		183		236,99		396		396		100%		768		177,78%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	24		24		24		0		12		14		24		24		100%		48		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	item	390		335		369		0		160		54		155		369		100%		704		180,51%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	orang	24		24		24		0		11		14		24		24		100%		48		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	item	1646		1431		1517		0		770		302,98		444,02		1517		100%		2948		179,1%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	24		24		24		0		11		17		24		24		100%		48		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	item	4099		3999		4039		0		2100		1514		425,01		4039		100%		8038		196,1%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang	52		52		52		0		10		40		52		52		100%		104		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	item	1737		1577		1599		0		827		372		400		1599		100%		3176		182,84%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	52		52		52		0		26		39		52		52		100%		104		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	item	5414		4704		4988		0		2543		1793		652		4988		100%		9692		179,02%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	orang	55		55		55		0		25		22		8		55		100%		110		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	item	4954		4304		4564		0		2132		1549		883		4564		100%		8868		179,01%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	orang	55		55		55		0		11		20		24		55		100%		110		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	item	315		287		312		0		152		267,99		312		312		100%		599		190.16%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	orang	55		55		55		0		27		13		14,97		54,97		99.95%		109,97		199.95%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	item	28		23		24		0		19		20		24		24		100%		47		167.86%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	orang	5		5		5		2		3		3		5		5		100%		10		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	item	86		71		77		0		15		52		10		77		100%		148		172.09%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	orang	8		8		8		0		2		2		8		8		100%		16		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	item	522		452		480		113		234		316		480		480		100%		932		178.54%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	7		7		7		2		3		4,49		6,99		6,99		99.86%		13,99		199.86%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Orang	397	2.849.163.395	383	0	388	468.649.575	0	0	219	79.343.250	263	211.974.350	388	145.746.613	388	437.064.213	100%	93.26%	771	437.064.213	194.21%	15.34%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Orang	388	130.843.051	391	0	462	43.200.000	0	0	96	10.800.000	72	8.100.000	0	0	168	18.900.000	36.36%	43.75%	559	18.900.000	144.07%	14.44%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Orang	3986	67.407.632	3435	0	3632	21.639.600	0	0	1886	11.239.500	889	5.300.000	857	5.100.000	3632	21.639.500	100%	100%	7067	21.639.500	177.3%	32.1%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	"Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	Orang	61	29.537.761	55	0	57	4.050.000	0	0	15	1.050.000	21	1.500.000	21	1.500.000	57	4.050.000	100%	100%	112	4.050.000	183.61%	13.71%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	Orang	424	63.690.798	433	0	551	1.500.000	0	0	43	150	168	900	340	450	551	1.500.000	100%	100%	984	1.500.000	232.08%	2.36%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	11	1.301.504.542	11	0	11	180.800.375	0	0	1	2.550.000	9	140.499.350	1	36.731.550	11	179.780.900	100%	99.44%	22	179.780.900	200%	13.81%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	5	11.230.503	5	0	5	3.550.000	0	0	1	500	2	1.800.000	2	1.250.000	5	3.550.000	100%	100%	10	3.550.000	200%	31.61%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	32	195.564.594	32	0	32	66.828.800	0	0	10,6	22.278.750	10,99	24.800.000	10,41	18.950.000	32	66.028.750	100%	98.8%	64	66.028.750	200%	33.76%	PUSKESMAS BANDARAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	dokumen	12	622.194.485	12	0	12	65.190.800	0	0	0,48	2.650.000	10	4.150.000	1,52	55.790.063	12	62.590.063	100%	96.01%	24	62.590.063	200%	10.06%	PUSKESMAS BANDARAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab												
									I		II		III		IV																		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"	item	4	7.692.124	4		0	4	6.300.000	0		0	0,5	800	1	1.600.000	2,5	3.900.000	4	6.300.000	100%	100%	8	6.300.000	200%	81.9%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	372	9.000.000	336		0	461	12.700.000	0		0	322	11.000.000	3	200	0	0	325	11.200.000	70.5%	88.19%	661	11.200.000	177.69%	124.44%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	450	0	0		0	433	3.000.000	0		0	11	600	37	2.025.000	385	375	433	3.000.000	100%	100%	433	3.000.000	96.22%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu dan Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Orang	388	0	391		0	383	38.225.000	0		0	103	10.225.000	159	15.950.000	113	11.300.000	375	37.475.000	97.91%	98.04%	766	37.475.000	197.42%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	8	0	0		0	8	16.275.000	0		0	2,4	4.900.000	1,99	4.450.000	3,29	6.325.000	7,68	15.675.000	96%	96.31%	7,68	15.675.000	96%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	3692	0	3173		0	3346	5.390.000	0		0	368	600	439	700	2529	4.075.000	3336	5.375.000	99.7%	99.72%	6509	5.375.000	176.3%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.03.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.	%	100	0	0		0	100	13.500.225	0		0	0	0	37	5.000.000	63	4.000.000	100	9.000.000	100%	66.67%	100	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	%	100	0	0		0	100	13.500.225	0		0	0	0	37	5.000.000	30	4.000.000	67	9.000.000	67%	66.67%	67	9.000.000	67%	0%	PUSKESMAS BANDARAN			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	3.008.727.916	100		0	100	571.353.800	20	18.800.000	25	36.172.500	30	146.812.700	25	369.568.600	25	571.353.800	25%	100%	125	571.353.800	125%	18.99%	PUSKESMAS PANAGUAN				
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Unit	4	24.154.756	4		0	4		0	1		0	1		0	1		0	4		0	100%	0%	8		0	200%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayan kesehatan ibu hamil sesuai standart	orang	38		39			38		8		10		10		10		10		38		100%		77		202.63%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Unit	4		4			4		0		2		2		0		0		4		100%		8		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	38		39			38		10		10		8		10		10		38		100%		77		202.63%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Unit	4		4			4		0		1		1		2		2		4		100%		8		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	38		39			38		10		10		8		10		10		38		100%		77		202.63%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Unit	4		4			4		2		0		1		1		1		4		100%		8		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	38		39			38		10		10		8		10		10		38		100%		77		202.63%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Unit	4		4			4		2		0		1		1		1		4		100%		8		200%				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7 Rp		8 Rp		9 Rp		10 Rp		11 Rp		12 Rp		13 Rp			14 = 10 + 11 + 12 + 13 Rp	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	66		67		66		15		18		15		18		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Unit	4		4		4		2		0		1		1		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	66		67		66		18		15		15		18		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Unit	4		4		4		2		0		1		1		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	66		67		66		18		12		15		21		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Unit	4		4		4		2		1		1		0		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	66		67		66		19		15		17		15		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	Unit	4		4		4		2		1		1		0		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	Orang	66		67		66		19		15		15		17		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Unit	4		4		4		2		0		1		1		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Orang	66		67		66		18		0		20		28		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Unit	4		4		4		2		0		1		1		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	66		67		66		16		10		15		25		66		100%		133		201.52%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Unit	4		4		4		2		0		1		1		4		100%		8		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	67	66		66		66		17		12		15		22		66		100%		132		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	Orang	0	2.984.573.160	1	0	1	559.353.800	0	18.800.000	0	35.172.500	1	144.812.700	0	360.568.600	0	559.353.800	0%	100%	1	559.353.800	0%	18.74%	PUSKESMAS PANAGUAN
				Jumlah Kematian Bayi	Orang	6		6		6		2		0		2		0		4		66.67%		10		166.67%		
				Jumlah Kasus Stunting	Orang	307		307		307		50		60		100		45		255		83.06%		562		183.06%		
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	Rumah	1323		1323		1323		200		250		300		573		1323		100%		2646		200%		
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Dokumen	5		5		5		1		1		1		2		5		100%		10		200%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	774	141.073.579	4	0	723	39.100.000	142	6.400.000	0	0	142	19.550.000	439	13.150.000	723	39.100.000	100%	100%	727	39.100.000	93.93%	27.72%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	964	64.921.537	843	0	870	20.525.000	80	500	120	5.500.000	130	4.125.000	540	10.400.000	870	20.525.000	100%	100%	1713	20.525.000	177.7%	31.62%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	60	16.076.541	34	0	42	5.075.000	5	350	7	750	8	1.425.000	22	2.550.000	42	5.075.000	100%	100%	76	5.075.000	126.67%	31.57%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	44.922.012	5	0	5	6.350.000	0	0	2	1.300.000	1	4.300.000	2	750	2	6.350.000	40%	100%	7	6.350.000	140%	14.14%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	5	1.309.962.803	5	0	5	137.885.325	0	0	1	300	2	11.737.700	2	125.847.625	5	137.885.325	100%	100%	10	137.885.325	200%	10.53%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Dokumen	5	20.230.289	5	0	5	12.100.000	1	450	0	0	2	2.825.000	2	8.825.000	5	12.100.000	100%	100%	10	12.100.000	200%	59.81%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	600.108.855	5	0	5	74.445.975	0	0	1	400	2	5.000.000	2	69.045.975	5	74.445.975	100%	100%	10	74.445.975	200%	12.41%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	8	501.523.498	8	0	8	168.647.500	0	0	1	23.622.500	2	50.375.000	5	94.650.000	8	168.647.500	100%	100%	16	168.647.500	200%	33.63%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	Orang	800	0	0	0	800	300	200	0	200	150	200	150	0	0	0	300	0%	100%	0	300	0%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian IkutanPasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4	0	4	0	4	2.500.000	0	0	1	400	2	2.100.000	1	0	4	2.500.000	100%	100%	8	2.500.000	200%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	669	0	742	0	669	9.075.000	200	8.800.000	0	0	200	0	269	275	269	9.075.000	40.21%	100%	1011	9.075.000	151.12%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	Orang	539	0	448	0	539	4.800.000	50	650	60	800	80	1.200.000	349	2.150.000	349	4.800.000	64.75%	100%	797	4.800.000	147.87%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	0	0	0	12	12.000.000	3	0	0	1.000.000	6	2.000.000	3	9.000.000	12	12.000.000	100%	100%	12	12.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	0	0	0	12	12.000.000	3	0	1	1.000.000	2	2.000.000	6	9.000.000	12	12.000.000	100%	100%	12	12.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PANAGUAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	99	3.309.798.363	98	0	98	513.830.700	29	0	47	59.315.400	83	229.045.118	89	216.963.470	89	505.323.988	90.82%	98.34%	187	505.323.988	188.89%	15.27%	PUSKESMAS KADUR

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
											I		II		III		IV											
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Item	872	27.411.856	699	0	872	0	124	0	281	0	476	0	872	0	872	0	100%	0%	1571	0	180.16%	0%	PUSKESMAS KADUR
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Orang	51		44		51		51		51		51		51		51		100%		95		186.27%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Item	871		666		871		150		294		460		871		871		100%		1537		176.46%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	51		45		51		51		51		51		51		51		100%		96		188.24%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Item	825		636		825		122		274		465		825		825		100%		1461		177.09%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	52		45		52		52		52		52		52		52		100%		97		186.54%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Item	3285		2558		3285		584		1156		2116		3285		3285		100%		5843		177.87%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	65		57		65		65		65		65		65		65		100%		122		187.69%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Item	6557		6182		6557		4491		4491		4491		6557		6557		100%		12739		194.28%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	55		51		55		55		55		55		55		55		100%		106		192.73%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Item	32549		22650		32549		8486		16971		24258		32549		32549		100%		55199		169.59%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	64		57		64		64		64		64		64		64		100%		121		189.06%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Item	6213		5873		6213		2360		4729		4797		6213		6213		100%		12086		194.53%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	64		57		64		64		64		64		64		64		100%		121		189.06%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Item	13760		8635		13760		3652		7249		10322		13760		13760		100%		22395		162.75%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	62		62		62		62		62		62		62		62		100%		124		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Item	554	510	554	145	293	417	554	554	100%	1064	192.06%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	64	64	64	64	64	64	64	64	100%	128	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Item	96	54	96	13	39	83	96	96	100%	150	156.25%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Orang	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	6	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Item	809	464	809	63	480	675	809	809	100%	1273	157.35%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	35	32	35	35	35	35	35	35	100%	67	191.43%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Item	942	794	942	200	424	710	942	942	100%	1736	184.29%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	63	57	63	63	63	63	63	63	100%	120	190.48%												
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	Orang	1	3.282.386.507	1	0	1	501.328.700	0	0	59.315.400	1	225.045.118	0	211.963.470	1	496.323.988	100%	99%	2	496.323.988	200%	15.12%	PUSKESMAS KADUR	
				Jumlah Kematian Bayi	Orang	1	4	1	2	2	2	0	1	5	300%	9	900%											
				Jumlah Kasus Stunting	Orang	381	105	381	251	335	217	99	902	36.75%	1007	264.3%												
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	Rumah	1906	1505	1906	68	194	194	872	872	45.75%	2377	124.71%												
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Orang	16161	10187	16161	4073	8485	12307	16161	16161	100%	26348	163.03%												
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	872	377.683.355	553	0	872	62.529.400	137	0	281	9.854.400	476	24.500.000	621	28.175.000	621	62.529.400	71.22%	100%	1174	62.529.400	134.63%	16.56%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6557	54.767.931	6182	0	6557	18.675.000	0	0	4491	2.100.000	4491	7.225.000	4491	8.800.000	4491	18.125.000	68.49%	97.05%	10673	18.125.000	162.77%	33.09%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	809	4.999.880	464	0	809	3.725.000	63	0	480	1.175.000	675	1.400.000	809	1.150.000	809	3.725.000	100%	100%	1273	3.725.000	157.35%	74.5%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	942	9.230.549	794	0	942	900	200	0	424	300	717	600	942	0	942	900	100%	100%	1736	900	184.29%	9.75%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	1.474.605.055	5	0	7	139.356.600	1	0	5	150	7	100.110.000	7	38.730.150	7	138.990.150	100%	99.74%	12	138.990.150	171.43%	9.43%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	17.999.571	4	0	4	2.900.000	1	0	3	500	4	850	4	1.550.000	4	2.900.000	100%	100%	8	2.900.000	200%	16.11%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	10	50.152.657	6	0	10	17.175.000	4	0	8	4.600.000	8	2.800.000	10	8.150.000	10	15.550.000	100%	90.54%	16	15.550.000	160%	31.01%	PUSKESMAS KADUR

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	21	119.304.864	18	0	21	93.543.300	5	0	16	25.761.000	19	22.350.000	21	44.108.025	21	92.219.025	100%	98.58%	39	92.219.025	185.71%	77.3%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	679.731.584	5	0	5	68.174.400	2	0	3	4.500.000	5	26.735.118	5	35.900.295	5	67.135.413	100%	98.48%	10	67.135.413	200%	9.88%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	18.461.099	2	0	2	700	1	0	1	150	2	150	2	400	2	700	100%	100%	4	700	200%	3.79%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	3	2.174.845	0	0	3	2.050.000	1	0	3	575	3	750	3	725	3	2.050.000	100%	100%	3	2.050.000	100%	94.26%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	871	11.510.765	578	0	871	10.850.000	150	0	294	1.250.000	460	3.350.000	595	6.250.000	595	10.850.000	68.31%	100%	1173	10.850.000	134.67%	94.26%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	9	82.750.200	0	0	9	78.000.000	3	0	6	7.350.000	9	33.325.000	9	37.225.000	9	77.900.000	100%	99.87%	9	77.900.000	100%	94.14%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	150	2.811.385	43	0	150	2.650.000	13	0	26	950	39	900	54	800	54	2.650.000	36%	100%	97	2.650.000	64.67%	94.26%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	106,09	4	0	3	100	1	0	3	100	3	0	3	0	3	100	100%	100%	7	100	700%	94.26%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.502.000	0	0	1	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	9.000.000	100%	71.99%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.502.000	0	0	1	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	9.000.000	100%	71.99%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS KADUR
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	4.227.490.314	95	0	100	1.006.371.900	0	0	30	99.450.000	80	521.160.093	100	366.049.302	100	986.659.395	100%	98.04%	195	986.659.395	195%	23.34%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	UNIT	14	21.400.428	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	100%	0%	28	0	200%	0%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus stunting Jumlah rumah tangga sehat Jumlah Indikator SPM Komponen Penyakit Menular Dan tidak Menular	orang RT Dokumen	20 700 5	4.206.089.886 666 5	37 666 5	0 678 5	35 678 5	993.964.900 0 1	0 0 2	0 250 4	0 500 5	519.160.093 678 4	0 678 5	363.049.302 678 5	0 678 5	978.659.395 678 5	200% 100% 100%	98.46% 100% 100%	37 1344 10	978.659.395 185% 192% 200%	23.27% 192% 200%		PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	397	159.132.048	394	62.300.000	395	62.300.000	0	0	150	15.575.000	300	15.575.000	395	31.150.000	395	62.300.000	100%	100%	789	124.600.000	198.74%	78.3%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4010	104.920.590	3769	32.750.000	3869	32.800.000	0	0	1500	12.200.000	3000	14.950.000	3869	5.600.000	3869	32.750.000	100%	99.85%	7638	65.500.000	190.47%	62.43%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	5	1.113.527.458	5	332.035.900	5	332.980.600	0	0	5	2.100.000	5	238.405.900	5	91.530.000	5	332.035.900	100%	99.72%	10	664.071.800	200%	59.64%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	27.999.335	3	12.600.000	3	12.600.000	0	0	3	0	3	8.400.000	3	4.200.000	3	12.600.000	100%	100%	6	25.200.000	200%	90%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	4.461.432	2	35.325.000	2	37.500.000	0	0	1	1.575.000	1	20.225.000	2	13.525.000	2	35.325.000	100%	94.2%	4	70.650.000	200%	1583.57%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	130.458.445	4	143.200.000	4	147.575.000	0	0	4	28.800.000	4	65.625.000	4	48.775.000	4	143.200.000	100%	97.04%	8	286.400.000	200%	219.53%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	3	530.470.504	3	171.698.495	3	172.458.500	0	0	3	2.625.000	3	57.454.193	3	111.619.302	3	171.698.495	100%	99.56%	6	343.396.990	200%	64.73%	PUSKESMAS TAMPOJOUNG PREGI

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV																
									1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	27.691.651	2	6.000.000	2	6.000.000	0		0	0	0	0	2.200.000	2	3.800.000	2	6.000.000	100%	100%	4	12.000.000	200%	43.33%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	330	17.230.360	300	18.900.000	310	18.900.000	0		0	0	0	0	12.600.000	310	6.300.000	310	18.900.000	100%	100%	610	37.800.000	184.85%	219.38%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu bersalin	425	0	400	38.450.000	395	43.350.000	0		0	200	9.625.000	390	10.450.000	395	18.375.000	395	38.450.000	100%	88.7%	795	76.900.000	187.06%	0%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Sesuai Standar	Persen	100	80.000.000	100	73.500.000	100	73.500.000	0		0	50	2.100.000	75	51.625.000	100	19.775.000	100	73.500.000	100%	100%	200	147.000.000	200%	183.75%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Tercapai Sesuai Standart	Persen	100	35.000.000	100	29.700.000	100	29.700.000	0		0	73,57	21.850.000	100	7.850.000	100	0	100	29.700.000	100%	100%	200	59.400.000	200%	169.71%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100	24.000.000	100	18.900.000	100	18.900.000	0		0	40	0	100	12.600.000	100	6.300.000	100	18.900.000	100%	100%	200	37.800.000	200%	157.5%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pela yanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Sesuai Standar	Persen	100	6.000.000	100	3.300.000	100	5.400.800	0		0	40	0	30	1.200.000	100	2.100.000	100	3.300.000	100%	61.1%	200	6.600.000	200%	110%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	0	100	0	100	12.407.000	0		0	12,8	3.000.000	41,6	2.000.000	64,48	3.000.000	64,48	8.000.000	64.48%	64.48%	164,48	8.000.000	164.48%	0%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kebutuhan Internet Terpenuhi Agar tercapai Pelayanan Optimal Sesuai Standar	bulan	12	12.000.000	12	8.000.000	12	12.407.000	0		0	0	3.000.000	0	2.000.000	8	3.000.000	8	8.000.000	66.67%	64.48%	20	16.000.000	166.67%	133.33%		PUSKESMAS TAMPOIJUNG PREGI	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	5.198.206.354	82		0	100	620.482.200	25		0	50	173.610.100	75	198.032.900	95,27	235.303.500	95,27	606.946.500	95.27%	97.82%	177,27	606.946.500	177.27%	11.68%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu,	Orang	0	5.157.963.829	1		0	1	607.905.750	1		0	1	170.610.100	1	197.032.900	0	230.303.500	0	597.946.500	0%	98.36%	1	597.946.500	0%	11.59%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Orang	731	318.580.940	731		0	731	33.000.000	0		0	182	8.250.000	182	8.250.000	367	16.500.000	367	33.000.000	50.21%	100%	1098	33.000.000	150.21%	10.36%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Orang	9663	206.153.549	6696		0	9663	76.125.000	0		0	3453	27.200.000	2306	18.150.000	3904	30.775.000	3904	76.125.000	40.4%	100%	10600	76.125.000	109.7%	36.93%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	"Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	Orang	766	15.401.010	371		0	766	3.000.000	0		0	319	1.250.000	96	375	351	1.375.000	351	3.000.000	45.82%	100%	722	3.000.000	94.26%	19.48%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat"	Dokumen	12	2.413.519.044	12		0	12	214.494.250	0		0	4	72.185.100	6	124.832.900	1	17.132.000	11	214.150.000	91.67%	99.84%	23	214.150.000	191.67%	8.87%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	Dokumen	5	47.633.130	5		0	5	6.875.000	0		0	2	2.450.000	1	1.900.000	2	2.525.000	5	6.875.000	100%	100%	10	6.875.000	200%	14.43%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	Dokumen	11	17.711.164	11		0	11	22.950.000	0		0	4	6.621.250	4	3.415.500	2	11.238.250	10	21.275.000	90.91%	92.7%	21	21.275.000	190.91%	120.12%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	"Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	Dokumen	22	486.451.973	22		0	22	89.891.750	0		0	6	18.928.750	4	17.384.500	11	50.563.500	21	86.876.750	95.45%	96.65%	43	86.876.750	195.45%	17.86%		PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"	Laporan	2	7.040.460	2		0	2	250	0		0	0	0	0	2	250	2	250	100%	100%	4	250	200%	3.55%		PUSKESMAS PADEMAWU	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k			Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	698	0	717	0	698	24.625.000	0	0	260	9.300.000	175	6.150.000	211	7.425.000	211	22.875.000	30.23%	92.89%	928	22.875.000	132.95%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokumen	8	0	8	0	8	2.500.000	0	0	4	1.250.000	0	0	4	1.250.000	8	2.500.000	100%	100%	16	2.500.000	200%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	6	0	2	0	6	600	0	0	3	300	0	0	3	300	3	600	50%	100%	5	600	83.33%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dokumen	2	0	2	0	2	1.650.000	0	0	2	1.650.000	0	0	0	0	2	1.650.000	100%	100%	4	1.650.000	200%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	20	0	20	0	20	57.642.000	0	0	6	16.025.000	6	13.075.000	7	26.267.000	19	55.367.000	95%	96.05%	39	55.367.000	195%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	dokumen	6	345.190.867	6	0	6	74.302.750	0	0	1	5.200.000	1	3.500.000	3	64.702.750	5	73.402.750	83.33%	98.79%	11	73.402.750	183.33%	21.26%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	%	100	40.242.525	100	0	100	0	25	0	50	0	75	0	95,27	0	95,27	0	95.27%	0%	195,27	0	195.27%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	9	0	0	0	9	12.576.450	0	0	2	3.000.000	0	1.000.000	4	5.000.000	6	9.000.000	66.67%	71.56%	6	9.000.000	66.67%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	9	0	0	0	9	12.576.450	0	0	3	3.000.000	1	1.000.000	4	5.000.000	8	9.000.000	88.89%	71.56%	8	9.000.000	88.89%	0%	PUSKESMAS PADEMAWU
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	92	1.468.250.223	82	0	88	498.329.800	22	0	22	189.167.079	22	75.375.000	22	223.643.271	88	488.185.350	100%	97.96%	170	488.185.350	184.78%	33.25%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	angka	1071	20.211.864	984	0	1013	0	239	0	234	0	203	0	225	0	901	0	88.94%	0%	1885	0	176%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	angka	25		22		25		0		0		0		25		25		100%		47		188%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	angka	1016		940		968		227		267		203		225		922		95.25%		1862		183.27%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	angka	25		22		25		6		6		6		7		25		100%		47		188%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	angka	887		815		839		226		255		209		149		839		100%		1654		186.47%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	angka	25		22		25		6		6		6		7		25		100%		47		188%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	angka	4212		4140		4164		1116		1086		882		1080		4164		100%		8304		197.15%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	angka	25		22		25		6		6		6		7		25		100%		47		188%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	angka	96		96		96		21		21		21		28		91		94.79%		187		194.79%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	angka	14		13		14		2		2		4		6		14		100%		27		192.86%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	angka	35560		44480		35560		8173		8435		8917		8889		34414		96.78%		78894		221.86%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	angka	5		5		5		0		0		0		5		5		100%		10		200%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Stunting	angka	45	1.448.038.359	42	0	43	486.329.800	0	0	0	186.167.079	0	73.375.000	27	219.643.271	27	479.185.350	62.79%	98.53%	69	479.185.350	153.33%	33.09%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	orang	908	207.935.574	985	0	908	36.000.000	239	0	234	22.500.000	185	13.500.000	225	0	883	36.000.000	97.25%	100%	1868	36.000.000	205.73%	17.31%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	7819	89.977.779	8611	0	7819	29.630.500	2390	0	854	9.950.000	0	8.400.000	705	11.280.500	3949	29.630.500	50.51%	100%	12560	29.630.500	160.63%	32.93%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	848	6.232.611	778	0	848	2.250.000	197	0	186	1.300.000	236	500	229	450	848	2.250.000	100%	100%	1626	2.250.000	191.75%	36.1%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	980	17.139.687	1116	0	980	3.000.000	283	0	213	1.350.000	234	600	243	1.050.000	973	3.000.000	99.29%	100%	2089	3.000.000	213.16%	17.5%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	1.087.226.487	5	0	5	167.985.500	1	0	1	100.063.500	1	1.000.000	2	66.722.100	5	167.785.600	100%	99.88%	10	167.785.600	200%	15.43%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	orang	907	0	926	0	907	7.875.000	227	0	267	7.875.000	203	0	172	0	869	7.875.000	95.81%	100%	1795	7.875.000	197.91%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	5	0	0	0	5	65.400.000	1	0	1	9.900.000	1	19.050.000	2	36.450.000	5	65.400.000	100%	100%	5	65.400.000	100%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	0	5	0	5	91.056.750	1	0	1	14.025.000	1	26.550.000	2	46.906.750	5	87.481.750	100%	96.07%	10	87.481.750	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	5	0	5	0	5	1.500.000	0	0	0	0	0	0	5	1.500.000	5	1.500.000	100%	100%	10	1.500.000	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	0	5	0	5	3.050.000	1	0	1	1.300.000	1	600	2	1.150.000	5	3.050.000	100%	100%	10	3.050.000	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	0	5	0	5	65.682.050	1	0	1	12.703.579	1	0	2	50.208.921	5	62.912.500	100%	95.78%	10	62.912.500	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	0	5	0	5	8.400.000	1	0	1	2.350.000	1	2.225.000	2	3.225.000	5	7.800.000	100%	92.86%	10	7.800.000	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	5	0	5	0	5	2.300.000	1	0	1	1.250.000	1	500	2	550	5	2.300.000	100%	100%	10	2.300.000	200%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	Orang	848	0	554	0	848	2.200.000	197	0	186	1.600.000	236	450	210	150	829	2.200.000	97.76%	100%	1383	2.200.000	163.09%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PALENGAAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
						I	II	III	IV	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	0	1	0	1	12.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS PALENGGAAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	2.721.555.000	98	0	100	663.892.600	25	0	25	82.275.000	25	184.436.900	25	377.423.836	100	644.135.736	100%	97.02%	198	644.135.736	198%	23.67%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi,	orang	0	1.470.667.963	0	0	0	651.892.600	0	0	0	82.275.000	0	180.436.900	0	372.423.836	0	635.135.736	0%	97.43%	0	635.135.736	0%	43.19%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	2100	342.782.531	525	0	525	51.200.000	0	0	197	12.800.000	197	38.400.000	93	0	487	51.200.000	92.76%	100%	1012	51.200.000	48.19%	14.94%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	20224	115.727.605	5056	0	5056	29.000.000	256	0	1600	4.950.000	1600	14.950.000	1600	9.100.000	5056	29.000.000	100%	100%	10112	29.000.000	50%	25.06%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	"Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	orang	64	4.400.289	14	0	14	1.900.000	2	0	4	0	4	650	4	1.250.000	14	1.900.000	100%	100%	28	1.900.000	43.75%	43.18%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat"	dokumen	28	176.754.200	7	0	7	175.803.900	0	0	2	0	2	8.703.900	3	167.100.000	7	175.803.900	100%	100%	14	175.803.900	50%	99.46%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	dokumen	8	42.242.774	2	0	2	3.600.000	0	0	0	600	1	2.600.000	1	400	2	3.600.000	100%	100%	4	3.600.000	50%	8.52%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	dokumen	12	16.831.105	3	0	3	9.555.700	0	0	1	2.450.000	1	3.425.000	1	3.680.700	3	9.555.700	100%	100%	6	9.555.700	50%	56.77%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	"Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	dokumen	40	571.487.564	10	0	10	57.325.600	2	0	2	13.300.000	3	20.525.600	3	23.500.000	10	57.325.600	100%	100%	20	57.325.600	50%	10.03%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	dokumen	16	86.860.600	4	0	4	160.757.400	1	0	1	6.900.000	1	16.557.400	1	120.543.136	4	144.000.536	100%	89.58%	8	144.000.536	50%	165.78%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Orang	10	0	0	0	10	1.000.000	2	0	2	0	3	500	3	500	10	1.000.000	100%	100%	10	1.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	0	0	0	1	250	0	0	0	0	1	250	0	0	1	250	100%	100%	1	250	100%	0%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	dokumen	1	0	0	0	1	19.200.000	0	0	0	0	0	18.400.000	1	800	1	19.200.000	100%	100%	1	19.200.000	100%	0%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1E+07	0	0	0	2	12.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000	1	5.000.000	2	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	0%	0%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	2	0	0	0	2	12.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000	1	5.000.000	2	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PROPPPO
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	91	2.986.566.173	87	0	89	347.828.500	22	76.717.893	22	80.717.893	22	78.220.218	23	77.572.273	89	313.228.277	100%	90.05%	176	313.228.277	193.41%	10.49%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	orang	5	23.840.856	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	100%	0%	10	0	200%	0%	PUSKESMAS GALIS
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	orang	5		5			5		5		5		5		5		100%		10		200%			
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	8		8			8		8		8		8		8		100%		16		200%			
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	8		8			8		8		8		8		8		100%		16		200%			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	orang	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	10	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	orang	5	5	5	5	5	5	5	100%	10	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang	30	30	30	30	30	30	30	100%	60	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	orang	10	10	10	10	10	10	10	100%	20	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	8	8	8	8	8	8	8	100%	16	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	8	8	8	8	8	8	8	100%	16	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	orang	5	5	5	5	5	5	5	100%	10	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	orang	5	5	5	5	5	5	5	100%	10	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	orang	7	7	7	7	7	7	7	100%	14	200%						
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	orang	6	6	6	6	6	6	6	100%	12	200%						

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	orang	6		6		6		6		6		6		6		100%		12		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	orang	5173		160		5173		5173		5173		5173		5173		100%		5333		103.09%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	orang	7		7		7		7		7		7		7		100%		14		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang	30		30		30		30		30		30		30		100%		60		200%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	orang	10		10		10		10		10		10		10		100%		20		200%				
				Jumlah pelayanan penderita hipertensi	orang	5173		160		5173		148		967		3880		178		5173		100%		5333		103.09%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	8	2.962.725.317	2	0	8	335.296.000	1	74.601.018	2	78.601.018	2	76.103.343	0	75.455.398	0	304.760.777	0%	90.89%	2	304.760.777	25%	10.29%	PUSKESMAS GALIS
				Jumlah Kasus Stunting	Balita	53		61		59		16		15		14		14		14		23.73%		75		141.51%		
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	KK	1508		1281		1391		188		538		1043		370		370		26.6%		1651		109.48%		
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	orang	8694		9054		8964		2240		4484		6723		8964		8964		100%		18018		207.25%		
				Jumlah pelayanan reproduksi	dokumen	186		186		186		43		47		47		49		186		100%		372		200%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	397	23.000.000	383	0	388	16.000.000	97	4.000.000	97	4.000.000	97	4.000.000	97	4.000.000	388	16.000.000	100%	100%	771	16.000.000	194.21%	69.57%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4270	20.250.000	4263	0	4265	15.203.100	1067	3.800.000	166	3.800.000	166	3.802.325	166	3.700.775	1565	15.103.100	36.69%	99.34%	5828	15.103.100	136.49%	74.58%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	349	2.500.000	339	0	342	1.000.000	86	250	85	250	86	250	85	250	342	1.000.000	100%	100%	681	1.000.000	195.13%	40%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	527	2.500.000	512	0	517	1.000.000	130	250	129	250	129	250	129	250	517	1.000.000	100%	100%	1029	1.000.000	195.26%	40%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	8	180.000.000	8	0	8	128.383.500	2	32.095.875	2	32.095.875	2	32.095.875	2	30.299.480	8	126.587.105	100%	98.6%	16	126.587.105	200%	70.33%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	5	5.000.000	5	0	5	3.050.000	2	763	1	763	1	763	1	761	5	3.050.000	100%	100%	10	3.050.000	200%	61%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12	40.000.000	12	0	12	38.750.000	3	7.112.500	3	7.112.500	3	7.112.500	3	7.112.500	12	28.450.000	100%	73.42%	24	28.450.000	200%	71.13%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	12	70.000.000	12	0	12	64.628.000	3	12.323.893	3	12.323.893	3	12.323.893	3	12.323.893	12	49.295.572	100%	76.28%	24	49.295.572	200%	70.42%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	5.000.000	1	0	1	2.506.400	1	500	1	500	1	500	1	500	1	2.000.000	100%	79.8%	2	2.000.000	200%	40%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	445	10.250.000	441	0	441	6.250.000	110	1.062.500	110	1.062.500	110	1.062.500	111	1.062.500	441	4.250.000	100%	68%	882	4.250.000	198.2%	41.46%	PUSKESMAS GALIS

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	19078	3.000.000	19078	0	19078	1.650.000	4770	412	4470	412	4470	412	4470	414	18180	1.650.000	95.29%	100%	37258	1.650.000	195.29%	55%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu bersalin,ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	orang	441	44.000.000	100	0	441	40.750.000	110	8.000.000	110	12.000.000	110	9.500.000	111	10.750.000	441	40.250.000	100%	98.77%	541	40.250.000	122.68%	91.48%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	61	2.500.000	40	0	61	1.000.000	16	250	27	250	16	250	2	250	61	1.000.000	100%	100%	101	1.000.000	165.57%	40%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orangterduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	517	2.500.000	100	0	517	1.000.000	103	250	216	250	100	250	98	250	517	1.000.000	100%	100%	617	1.000.000	119.34%	40%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasilpengelolaan surveilans kesehatan	dokumen	42	20.000.000	52	0	42	14.125.000	11	3.531.250	11	3.531.250	10	3.531.250	10	3.531.250	42	14.125.000	100%	100%	94	14.125.000	223.81%	70.63%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	12	0	12	0	12	12.532.500	3	2.116.875	3	2.116.875	3	2.116.875	3	2.116.875	12	8.467.500	100%	67.56%	24	8.467.500	200%	0%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	12	15.000.000	12	0	12	12.532.500	3	2.116.875	6	2.116.875	3	2.116.875	0	2.116.875	12	8.467.500	100%	67.56%	24	8.467.500	200%	56.45%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	99	4.693.977.601	96	0	98	715.740.300	5	0	56	162.475.000	20	171.948.400	17	344.933.921	98	679.357.321	100%	94.92%	194	679.357.321	195.96%	14.47%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kowenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan	Dokumen	1	34.336.304	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	0	100%	0%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kasus Stunting Jumlah Rumah Tangga Sehat Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	orang Orang Orang Orang Indikator	0 0 40 1500 4	4.659.641.297	1 1 88 1285 4	0 0 0 1300 4	0 1 1 10 1	703.740.300	0 0 0 30 50 1	0 0 0 15 20 1	159.475.000	0 0 0 20 1	168.948.400	0 0 0 25 1220 1	341.933.921	0 0 0 70 1300 4	670.357.321	0% 0% 100% 100% 100%	95.26%	1 1 158 2585 8	670.357.321	0% 0% 395% 172.33% 200%	14.39%	PUSKESMAS WARU	
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	660	459.450.652	647	0	652	28.800.000	120	0	25	7.200.000	250	7.200.000	257	14.400.000	652	28.800.000	100%	100%	1299	28.800.000	196.82%	6.27%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	6055	173.097.436	6045	0	6050	47.077.400	950	0	3500	17.225.000	1245	11.375.000	355	18.125.000	6050	46.725.000	100%	99.25%	12095	46.725.000	199.75%	26.99%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	"Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	orang	495	9.307.471	481	0	486	4.125.000	126	0	126	1.425.000	126	825	108	1.875.000	486	4.125.000	100%	100%	967	4.125.000	195.35%	44.32%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	orang	720	42.768.218	711	0	715	3.825.000	197	0	197	1.650.000	286	1.050.000	35	1.125.000	715	3.825.000	100%	100%	1426	3.825.000	198.06%	8.94%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat"	Dokumen	9	2.112.928.393	8	0	9	207.507.300	2	0	2	3.775.000	3	73.203.400	2	103.297.300	9	180.275.700	100%	86.88%	17	180.275.700	188.89%	8.53%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	Dokumen	7	50.614.185	7	0	7	13.100.000	2	0	2	9.900.000	2	1.250.000	1	1.950.000	7	13.100.000	100%	100%	14	13.100.000	200%	25.88%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	Dokumen	5	79.382.734	5	0	5	76.185.000	1	0	2	27.100.000	1	24.945.000	1	23.165.000	5	75.210.000	100%	98.72%	10	75.210.000	200%	94.74%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	"Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	Dokumen	9	247.763.360	9	0	9	92.057.900	2	0	2	24.925.000	2	18.250.000	3	46.350.000	9	89.525.000	100%	97.25%	18	89.525.000	200%	36.13%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	Dokumen	5	857.342.835	5	0	5	96.712.700	1	0	1	6.925.000	2	7.550.000	1	80.646.621	5	95.121.621	100%	98.35%	10	95.121.621	200%	11.09%	PUSKESMAS WARU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"	Laporan	2	17.999.574	2		2	500	0		0		0		0		0		0%	0%	2		100%	0%	PUSKESMAS WARU	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	156		0	156	0	156	5	25.150.000	0	83	21.000.000	20	1.200.000	48	2.800.000	48	25.000.000	30.77%	99.4%	204	25.000.000	130.77%	0%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	42	12.000.000	42		0	42	10	12.000.000	0	10	3.600.000	15	2.400.000	7	6.000.000	42	12.000.000	100%	100%	84	12.000.000	200%	100%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV(ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5	250	5		0	5	1	250	0	2	200	1	0	0	0	200	0%	80%	5	200	100%	80%	PUSKESMAS WARU	
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	3	12.650.000	3		0	3	1	12.650.000	0	1	5.100.000	1	2.500.000	0	5.050.000	0	12.650.000	0%	100%	3	12.650.000	100%	100%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12		0	0	0	12	3	83.800.000	0	3	29.450.000	3	17.200.000	3	37.150.000	12	83.800.000	100%	100%	12	83.800.000	100%	0%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.03.0001	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	12		0	0	0	12	3	12.000.000	0	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	12	9.000.000	100%	75%	12	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	12		0	0	0	12	3	12.000.000	0	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	12	9.000.000	100%	75%	12	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS WARU
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100	11.004.382.345	68		0	100	20	1.560.953.000	0	30	75	1.406.989.282	80	29.390.000	80	1.436.379.282	80%	92.02%	148	1.436.379.282	148%	13.05%	RSUD WARU	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	unit	32	10.874.382.345	0		0	31	0	1.560.953.000	0	0	0	1.406.989.282	13	29.390.000	13	1.436.379.282	41.94%	92.02%	13	1.436.379.282	40.63%	13.21%	RSUD WARU	
				Jumlah pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	paket	600		0		15	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	66.67%		10	1.67%					
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit	2	350.000.000	0		0	1	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	RSUD WARU	
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit	2	1.000.000.000	0		0	1	0	35.953.000	0	0	0	6.169.000	0	29.390.000	1	35.559.000	100%	98.9%	1	35.559.000	50%	3.56%	RSUD WARU	
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	27	450.000.000	0		0	1	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	RSUD WARU	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	20	6.552.713.000	48	6.825.443.589	13	1.500.000.000	0	0	0	13	1.400.820.282	0	0	13	1.400.820.282	100%	93.39%	61	8.226.263.871	305%	125.54%	RSUD WARU		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	200	0	379	0	15	10.000.000	0	0	0	0	0	10	0	10	0	66.67%	0%	389	0	194.5%	0%	RSUD WARU	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1	342.124.946.225	1	0	0,8	130.549.614.838	0,8	6.324.267.767	0,8	34.054.770.086	0,8	14.363.713.745	0,8	29.238.774.504	0,8	83.981.526.102	100%	64.33%	1,8	83.981.526.102	180%	24.55%	DINAS KESEHATAN
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100		88		100		25		25		25		100		100%		188		188%				
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100		98		100		25		25		25		91		91%		189		189%				
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100		98		100		25		25		25		90		90%		188		188%				
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100		92		100		23,86		21,86		19,72		90		90%		182		182%				
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100		91		100		24,66		17,59		11		75		75%		166		166%				
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		92		100		17,86		30,38		16,7		98		98%		190		190%				
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		92		100		22,88		18,62		25,99		103		103%		195		195%				
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100		15,07		14,76		42,58		94		94%		194		194%				
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		90		100		21,31		22,27		24,89		112		112%		202		202%				
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100		29,66		24,37		32,89		118		118%		218		218%				
				Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100		100		100		12,84		30,23		27,25		94,97		94.97%		194,97		194.97%				
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100		95		100		15,79		27,08		37,38		105		105%		200		200%				
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100		92		100		16,68		4,21		44,56		102		102%		194		194%				
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Faskes	23	82.073.597.728	23	0	23	23.632.095.390	23	0	23	67.335.600	23	2.544.528.735	23	10.337.837.454	23	12.949.701.789	100%	54.8%	46	12.949.701.789	200%	15.78%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	unit	4	42.286.680.000	1	0	2	13.964.203.000	0	0	0	0	1	2.230.828.099	0	1.966.246.050	1	4.197.074.149	50%	30.06%	2	4.197.074.149	50%	9.93%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	unit	2	8.350.000.000	21	0	1	425.408.000	0	0	0	0	1	229.241.300	1	172.846.800	1	402.088.100	100%	94.52%	22	402.088.100	1100%	4.82%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
						I	II	III	IV	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	412	662.091.128	21	0	400	269.153.538	0	0	34	2.300.000	0	0	0	255.365.000	34	257.665.000	8.5%	95.73%	55	257.665.000	13.35%	38.92%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	Unit	21	0	21	0	21	46.467.000	21	0	21	0	21	29.193.836	21	0	21	29.193.836	100%	62.83%	42	29.193.836	200%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	56	427.381.900	84	2.728.625.400	56	2.266.636.028	0	0	0	0	31	0	25	1.764.186.780	56	1.764.186.780	100%	77.83%	140	4.492.812.180	250%	1051.24%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai dan Vaksin yang Disediakan	Puskesmas	21	0	21	0	21	4.644.454.984	21	0	21	0	21	0	21	4.457.575.824	21	4.457.575.824	100%	95.98%	42	4.457.575.824	200%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan peningkatan sarana dan prasarana	Unit	9	0	20	0	9	1.816.152.840	0	0	0	0	2	0	0	1.651.982.000	2	1.651.982.000	22.22%	90.96%	22	1.651.982.000	244.44%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Item, unit dan org	15269	257.176.212.937	12888	0	15269	105.837.854.448	3073	6.324.267.767	7173	33.812.714.486	9538	11.474.500.010	3986	18.452.412.024	3986	70.063.894.287	26.11%	66.2%	16874	70.063.894.287	110.51%	27.24%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Orang	3256		1261		1511		1511		1511		1511		1511		1511		100%		2772		85.14%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Item, unit dan org	15241		12888		15241		3145		3452		3407		3462		13466		88.35%		26354		172.92%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	3256		1261		1511		1511		1511		1511		1511		1511		100%		2772		85.14%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ibu Hamil	13564	537.946.000	13532	0	15269	487.892.000	3073	0	4100	11.680.000	2365	292.184.000	3986	21.873.500	13524	325.737.500	88.57%	66.76%	27056	325.737.500	199.47%	60.55%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	ibu bersalin	12984	439.007.500	12917	0	15241	174.546.000	3145	0	3452	12.314.800	3407	7.610.000	3462	89.780.685	13466	109.705.485	88.35%	62.85%	26383	109.705.485	203.2%	24.99%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bayi	12665	301.000.000	12305	0	14518	763.526.824	2941	0	3696	2.530.000	2863	225.093.500	3543	232.009.500	13043	459.633.000	89.84%	60.2%	25348	459.633.000	200.14%	152.7%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Balita	50953	301.000.000	50586	0	72654	113.230.000	12511	0	18188	2.530.000	7992	7.890.000	15034	49.015.000	53725	59.435.000	73.95%	52.49%	104311	59.435.000	204.72%	19.75%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Usia pendidikan dasar	134383	97.524.000	130901	0	115284	360.903.600	23423	0	32189	18.600.000	19255	255.713.800	34198	40.360.900	109065	314.674.700	94.61%	87.19%	239966	314.674.700	178.57%	322.66%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	649352	1.058.760.000	594259	0	572210	98.050.000	135490	0	101973	0	201142	35.100.000	138590	15.500.000	577195	50.600.000	100.87%	51.61%	1E+06	50.600.000	180.4%	4.78%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Lansia	175556	858.785.000	115761	0	109265	495.271.000	25040	0	7553	198.990.000	46527	185.717.600	28765	65.300.100	107885	450.007.700	98.74%	90.86%	223646	450.007.700	127.39%	52.4%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	252054	240.800.000	276245	0	203135	221.000.770	59847	0	28684	19.250.000	91298	26.700.000	54543	102.406.700	234372	148.356.700	115.38%	67.13%	510617	148.356.700	202.58%	61.61%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9500	210.700.000	10343	0	8183	1.195.090.000	2809	0	1612	2.660.000	3614	1.098.055.000	1986	30.460.000	10021	1.131.175.000	122.46%	94.65%	20364	1.131.175.000	214.36%	536.87%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1065	210.700.000	1062	0	1681	98.870.500	225	0	499	6.800.000	613	6.980.000	284	5.610.000	1621	19.390.000	96.43%	19.61%	2683	19.390.000	251.92%	9.2%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9350	2.747.800.000	2863	0	14783	1.223.862.400	2247	0	4091	0	5082	136.975.000	4217	1.013.014.250	15637	1.149.989.250	105.78%	93.96%	18500	1.149.989.250	197.86%	41.85%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	14859	689.400.000	15416	0	15269	397.350.000	2748	0	442	23.500.000	8458	315.825.000	4114	12.045.000	15762	351.370.000	103.23%	88.43%	31178	351.370.000	209.83%	50.97%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	630.041.800	1	0	1	148.920.600	1	0	1	84.060.000	1	13.925.000	1	34.070.000	1	132.055.000	100%	88.67%	2	132.055.000	200%	20.96%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	642.900.000	1	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0,5	20.000.000	0,5	20.670.000	1	40.670.000	100%	81.34%	2	40.670.000	200%	6.33%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1.071.000.000	1	0	1	260.439.000	1	0	1	11.483.800	1	136.993.794	1	43.326.600	1	191.804.194	100%	73.65%	2	191.804.194	200%	17.91%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	705.845.000	1	0	1	206.500.000	1	21.000.000	1	54.141.500	1	103.598.193	1	19.753.500	1	198.493.193	100%	96.12%	2	198.493.193	200%	28.12%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1.033.360.000	1	0	1	1.266.657.000	1	0	1	235.975.000	1	204.546.000	1	802.165.000	1	1.242.686.000	100%	98.11%	2	1.242.686.000	200%	120.26%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	178.838.900	1	0	1	246.149.500	1	0	1	0	1	145.341.350	1	55.020.000	1	200.361.350	100%	81.4%	2	200.361.350	200%	112.03%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	538.310.000	1	0	1	150.000.000	1	0	1	38.607.100	1	106.397.180	1	1.980.000	1	146.984.280	100%	97.99%	2	146.984.280	200%	27.3%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1.347.160.720	1	0	1	462.962.000	1	0	1	69.889.000	1	86.765.332	1	205.005.000	1	361.659.332	100%	78.12%	2	361.659.332	200%	26.85%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keluhan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	101859	100.473.800	148562	0	101859	25.000.000	26221	0	26221	0	26221	25.000.000	104884	25.000.000	102.97%	100%	253446	25.000.000	248.82%	24.88%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	128	90.300.000	128	0	128	86.116.000	40	0	41	0	41	73.525.000	163	73.525.000	127.34%	85.38%	291	73.525.000	227.34%	81.42%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	1.203.978.000	4	0	4	1.205.397.884	0	0	1	322.335.700	1	72.287.670	2	641.641.416	4	1.036.264.786	100%	85.97%	8	1.036.264.786	200%	86.07%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	229.746.335.256	1	0	1	93.085.635.403	1	6.295.681.800	1	32.233.597.700	1	7.228.763.700	1	13.811.288.650	1	59.569.331.850	100%	63.99%	2	59.569.331.850	200%	25.93%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	948.150.000	1	0	1	274.400.000	1	0	1	93.661.000	1	76.582.667	1	97.154.000	1	267.397.667	100%	97.45%	2	267.397.667	200%	28.2%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2	1.377.000.000	2	0	2	1.420.478.395	2	7.585.967	2	66.265.486	2	314.655.850	2	488.537.493	2	877.044.796	100%	61.74%	4	877.044.796	200%	63.69%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Puskesmas	21	120.000.000	20	0	21	44.957.700	21	0	21	17.941.200	21	17.070.000	21	2.715.000	21	37.726.200	100%	83.91%	41	37.726.200	195.24%	31.44%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	841.500.000	1	0	1	250.000.000	1	0	1	76.449.000	1	125.241.000	1	21.788.000	1	223.478.000	100%	89.39%	2	223.478.000	200%	26.56%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	2.631.000.000	1	0	1	700.000.000	1	0	1	209.453.200	1	228.488.374	1	232.733.600	1	670.675.174	100%	95.81%	2	670.675.174	200%	25.49%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan malaria	puskesmas	21	0	21	0	21	38.427.502	21	0	21	0	21	0	21	37.023.130	21	37.023.130	100%	96.35%	42	37.023.130	200%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	21	0	21	0	21	17.312.000	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	100%	0%	42	0	200%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	Paket	210	0	210	0	64	92.950.000	23	0	23	0	23	0	22	13.140.000	91	13.140.000	142.19%	14.14%	301	13.140.000	143.33%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	15	767.500.000	15	0	15	376.000.000	15	0	15	112.045.000	15	113.760.000	15	126.138.200	15	351.943.200	100%	93.6%	30	351.943.200	200%	45.86%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	0	0	0	0	3	376.000.000	0	0	1	112.045.000	1	113.760.000	1	126.138.200	3	351.943.200	100%	93.6%	3	351.943.200	0%	0%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Penerbitan izin	Puskesmas	21	2.107.635.560	21	0	21	703.665.000	21	0	21	62.675.000	21	230.925.000	21	322.386.826	21	615.986.826	100%	87.54%	42	615.986.826	200%	29.23%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Puskesmas	21	1.158.733.120	21	0	21	623.665.000	21	0	21	50.500.000	21	202.250.000	21	287.461.826	21	540.211.826	100%	86.62%	42	540.211.826	200%	46.62%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	240.800.000	1	0	1	80.000.000	1	0	1	12.175.000	1	28.675.000	1	34.925.000	1	75.775.000	100%	94.72%	2	75.775.000	200%	31.47%	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	97	3.161.743.131	96	0	96	650.056.800	25	0	25	310.061.900	20	294.906.737	96	604.968.637	100%	93.06%	192	604.968.637	197.94%	19.13%	PUSKESMAS PASEAN		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Angka	78269	39.974.063	71627	0	73776	0	18444	0	18441	0	36891	0	0	0	73776	0	100%	0%	145403	0	185.77%	0%	PUSKESMAS PASEAN
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	Orang	27		25		26	26		0		0		0		26		100%		51		188.89%			
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Angka	643		588		606	151	150		305		0		606		100%		1194		185.69%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	27		25		26	26	0		0		0		26		100%		51		188.89%				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12+ 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Angka	1458															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	27															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Angka	20003															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	31															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Angka	5126															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	15															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Angka	3508															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	9															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Angka	11															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	2															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Angka	11															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	9															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Angka	681															
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	5															
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Angka	85															
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Orang	1															

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Angka	1711		1566		1613		403		403		807		0		1613		100%		3179		185.8%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	7		6		6		1		5		0		0		6		100%		12		171.43%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Angka	564		516		531		133		132		266		0		531		100%		1047		185.64%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	5		5		5		1		2		2		0		5		100%		10		200%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	Orang	0	3.121.769.068	1	0	1	638.056.800	0	0	0	0	0	305.061.900	0	290.906.737	0	595.968.637	200%	93.4%	1	595.968.637	0%	19.09%	PUSKESMAS PASEAN
				Jumlah Kematian Bayi	Bayi	0		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200%		2	0%				
				Jumlah Kasus Stunting	Persen	10		18	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	0	192.86%		19	190%					
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Indikator	4		4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100%			8	200%					
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	Rumah Tangga	17775	17591	17591	0	5863	11728	0	17591	0	17591	100%	35182	197.93%										
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	778	159.165.900	772	0	772	62.100.000	167	0	199	0	347	46.575.000	59	15.525.000	772	62.100.000	100%	100%	1544	62.100.000	198.46%	39.02%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	780	57.914.326	750	0	760	18.375.000	250	0	267	0	0	144	18.375.000	661	18.375.000	86.97%	100%	1411	18.375.000	180.9%	31.73%	PUSKESMAS PASEAN	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	770	14.655.870	580	0	638	8.250.000	0	0	0	0	638	5.850.000	0	2.400.000	638	8.250.000	100%	100%	1218	8.250.000	158.18%	56.29%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	20	1.525.209.600	5	0	5	116.863.050	0	0	1	0	3	44.979.500	1	69.195.100	5	114.174.600	100%	97.7%	10	114.174.600	50%	7.49%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	8	28.051.020	2	0	2	4.650.000	0	0	0	0	2	3.400.000	0	1.250.000	2	4.650.000	100%	100%	4	4.650.000	50%	16.58%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	8	7.249.140	2	0	2	28.281.750	0	0	0	0	2	15.585.000	0	9.615.000	2	25.200.000	100%	89.1%	4	25.200.000	50%	347.63%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	13	226.772.010	13	0	13	182.412.000	0	0	5	0	7	106.222.400	1	67.742.300	13	173.964.700	100%	95.37%	26	173.964.700	200%	76.71%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	20	660.730.681	5	0	5	78.000.000	2	0	0	0	2	11.950.000	1	39.079.337	5	51.029.337	100%	65.42%	10	51.029.337	50%	7.72%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	4	2.921.718	1	0	1	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	0	25%	0%	PUSKESMAS PASEAN	
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	101	14.608.594	101	0	101	8.250.000	25	0	25	0	7	5.850.000	44	2.400.000	101	8.250.000	100%	100%	202	8.250.000	200%	56.47%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	Orang	737	0	0	0	737	4.900.000	161	0	198	0	283	2.450.000	95	2.450.000	95	4.900.000	12.89%	100%	95	4.900.000	12.89%	0%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	0	0	0	1	17.550.000	0	0	0	0	1	17.550.000	0	0	1	17.550.000	100%	100%	1	17.550.000	100%	0%	PUSKESMAS PASEAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	3	0	0	0	3	107.525.000	0	0	2	0	0	44.650.000	1	62.875.000	3	107.525.000	100%	100%	3	107.525.000	100%	0%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	1	0	0	0	0	5.000.000	0	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	1	0	0	0	0	5.000.000	0	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	92	2.380.215.214	86	0	88	532.294.600	22	0	22	73.750.000	19	265.801.000	25	179.815.670	88	519.366.670	100%	97.57%	174	519.366.670	189.13%	21.82%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	orang	303	18.594.684	303	0	303	0	30	0	45	0	143	0	76	0	294	0	97.03%	0%	597	0	197.03%	0%	PUSKESMAS TALANG
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	orang	119		19		19		4		5		10		0		19		100%		38		31.93%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	303		303		303		30		100		103		70		303		100%		606		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	19		19		19		4		5		10		0		19		100%		38		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Orang	277		277		277		30		39		164		44		277		100%		554		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	19		19		19		4		5		10		0		19		100%		38		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1141		1141		1141		255		285		351		250		1141		100%		2282		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	19		19		19		4		5		10		0		19		100%		38		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	2943		2943		2943		725		735		685		0		2145		72.88%		5088		172.88%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	12		12		12		3		3		6		0		12		100%		24		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	13483		13483		13483		3350		3352		3951		2771		13424		99.56%		26907		199.56%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	12		12		12		3		3		6		0		12		100%		24		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Orang	3619		3619		3619		900		600		677		398		2575		71.15%		6194		171.15%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	12	12	12	3	3	6	0	12	100%	24	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	7366	7366	7366	1850	1841	950	1040	5681	77.12%	13047	177.12%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	12	12	12	3	3	6	0	12	100%	24	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	230	230	230	57	60	77	35	229	99.57%	459	199.57%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	12	12	12	3	3	6	0	12	100%	24	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Orang	31	31	31	7	8	15	0	30	96.77%	61	196.77%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Orang	11	11	11	3	2	4	0	9	81.82%	20	181.82%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	41	41	41	10	10	10	10	40	97.56%	81	197.56%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	12	12	12	3	3	6	0	12	100%	24	200%												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	357	357	357	85	85	62	99	331	92.72%	688	192.72%												
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Orang	12	12	12	3	3	4	2	12	100%	24	200%												
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	orang	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	2	100%		PUSKESMAS TALANG										
				Jumlah kematian bayi	Orang	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	2	100%												
				jumlah kasus stunting	orang	19	18	19	4	4	7	4	19	100%	37	194.74%												
				jumlah rumah tangga sehat	KK	1364	1364	1364	0	0	491	400	891	65.32%	2255	165.32%												
				jumlah indikator SPM komponen penyakit menular dan tidak menular yang terobati	dokumen	5	5	5	1	3	1	0	5	100%	10	200%												
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	680	181.152.000	315	0	370	42.000.000	0	0	134	10.500.000	156	21.000.000	80	10.500.000	370	42.000.000	100%	100%	685	42.000.000	100.74%	23.18%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5339	27.814.342	2129	0	3078	9.000.000	0	0	2145	4.125.000	430	4.875.000	0	0	2575	9.000.000	83.66%	100%	4704	9.000.000	88.11%	32.36%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	400	11.016.000	126	0	323	1.200.000	10	0	18	100	284	950	11	150	323	1.200.000	100%	100%	449	1.200.000	112.25%	10.89%	PUSKESMAS TALANG

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	739	14.382.000	291	0	395	800	0	0	296	600	99	200	0	0	395	800	100%	100%	686	800	92.83%	5.56%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	82	765.599.760	82	0	82	138.249.200	0	0	15	400	65	108.587.000	2	29.262.000	82	138.249.000	100%	100%	164	138.249.000	200%	18.06%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	40	9.702.678	40	0	40	3.050.000	0	0	10	500	24	1.800.000	6	750	40	3.050.000	100%	100%	80	3.050.000	200%	31.43%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	261	159.043.500	261	0	261	104.229.000	65	0	65	32.150.000	84	33.454.000	35	31.725.000	249	97.329.000	95.4%	93.38%	510	97.329.000	195.4%	61.2%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	28	368.840.160	28	0	28	85.206.400	4	0	4	2.800.000	5	4.700.000	14	74.528.670	27	82.028.670	96.43%	96.27%	55	82.028.670	196.43%	22.24%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	orang	366	56.775.000	316	0	366	10.710.000	30	0	145	0	169	9.835.000	22	875	366	10.710.000	100%	100%	682	10.710.000	186.34%	18.86%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	laporan	2	2.754.000	2	0	2	1.200.000	0	0	1	400	1	650	0	150	2	1.200.000	100%	100%	4	1.200.000	200%	43.57%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	323	11.016.000	126	0	323	3.600.000	0	0	81	900	97	1.100.000	145	1.600.000	323	3.600.000	100%	100%	449	3.600.000	139.01%	32.68%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Kasus HIV yang tertangani	bulan	12	-2.400.000	12	0	12	800	0	0	2	100	0	0	4	150	6	250	50%	31.25%	18	250	150%	-10.42%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelayanan kegiatan surveilans sesuai standar	kegiatan	5	118.500.000	0	0	5	39.500.000	0	0	1	3.850.000	3	20.550.000	1	12.800.000	5	37.200.000	100%	94.18%	5	37.200.000	100%	31.39%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelayanan reproduksi sesuai standart	kegiatan	2	4.200.000	0	0	2	1.400.000	0	0	0	0	2	1.400.000	0	0	2	1.400.000	100%	100%	2	1.400.000	100%	33.33%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	kegiatan	3	274.050.000	0	0	3	91.350.000	0	0	1	17.325.000	2	56.700.000	0	17.325.000	3	91.350.000	100%	100%	3	91.350.000	100%	33.33%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90	3.016.741.261	68	0	80	663.924.600	25	0	22	67.373.100	25	343.888.651	21	222.865.107	93	634.126.858	116.25%	95.51%	161	634.126.858	178.89%	21.02%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Item	711	24.469.356	651	0	564	0	13	0	218	0	142	0	191	0	564	0	100%	0%	1215	0	170.89%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Orang	15		13		15		15		15		15		15		15		100%		28		186.67%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Item	678		621		564		151		173		132		108		564		100%		1185		174.78%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Item	909		834		558		152		162		124		120		120		21.51%		954		104.95%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	15		13		15		15		15		15		15		15		100%		28		186.67%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Item	3420		3138		2163		511		500		360		593		593		27.42%		3731		109.09%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	28	186.67%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Item	6883	6299	4315	0	4315	0	1216	1216	28.18%	7515	109.18%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	33	25	33	33	33	33	33	33	100%	58	175.76%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	19	12	19	19	19	19	19	19	100%	31	163.16%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Item	23563	31105	21421	0	11807	632	4619	17058	79.63%	48163	204.4%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	33	25	33	33	33	33	33	33	100%	58	175.76%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Item	7605	7384	4079	0	0	232	0	232	5.69%	7616	100.14%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	33	25	33	33	33	33	33	33	100%	58	175.76%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Item	11048	11042	9949	0	1804	1331	2024	5159	51.85%	16201	146.64%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	31	23	31	31	31	31	31	31	100%	54	174.19%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Item	513	498	401	0	195	107	100	402	100.25%	900	175.44%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	33	25	33	33	33	33	33	33	100%	58	175.76%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Item	71	71	63	16	9	10	23	58	92.06%	129	181.69%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	10	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Item	567	489	532	0	500	0	32	532	100%	1021	180.07%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	12	200%					

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp	k	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18												
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	item	813		744		611		0		280		0		325		605		99.02%		1349		165.93%			
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Orang	6		6		6		6		6		6		6		6		100%		12		200%			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kematian Ibu	Orang	0	2.992.271.905	0	1	651.924.600	0	1	67.373.100	0	339.888.651	0	217.865.107	0	625.126.858	200%	95.89%	0	625.126.858	0%	20.89%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG			
				Jumlah kematian bayi	Orang	0		7	3		1	1		1		0		0		200%		7		0%					
				Jumlah Kasus Stunting	Orang	22		49	40		3	7		3		3		3		192.5%		52		236.36%					
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	Orang	1517		632	859		2	284		564		679		679		79.05%		1311		86.42%					
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang tercapai	Orang	43878		11754	25510		7056	8002		6760		7062		7062		27.68%		18816		42.88%					
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	691	221.886.720	652	0	564	31.200.000	142	0	185	0	142	23.400.000	139	7.800.000	608	31.200.000	107.8%	100%	1260	31.200.000	182.34%	14.06%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6610	65.715.030	6229	0	4315	42.194.700	1834	0	0	10.869.700	3220	5.875.000	1216	25.450.000	6270	42.194.700	145.31%	100%	12499	42.194.700	189.09%	64.21%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	578	3.309.390	545	0	532	1.800.000	109	0	159	225	132	1.275.000	132	150	132	1.650.000	24.81%	91.67%	677	1.650.000	117.13%	49.86%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	2	1.494.296.746	2	0	2	178.393.000	2	0	2	275	2	145.380.800	2	25.490.500	2	171.146.300	100%	95.94%	4	171.146.300	200%	11.45%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	7	16.074.180	7	0	7	6.700.000	7	0	7	4.300.000	7	2.400.000	7	0	7	6.700.000	100%	100%	14	6.700.000	200%	41.68%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	2	60.356.970	2	0	2	31.575.000	2	0	2	10.000.000	2	8.825.000	2	10.375.000	2	29.200.000	100%	92.48%	4	29.200.000	200%	48.38%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	11	218.971.304	11	0	11	103.129.800	11	0	11	22.753.400	11	14.616.600	11	52.306.600	11	89.676.600	100%	86.96%	22	89.676.600	200%	40.95%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	3	608.574.758	3	0	3	69.057.100	3	0	3	3.100.000	3	38.391.251	3	27.493.007	3	68.984.258	100%	99.89%	6	68.984.258	200%	11.34%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	11.819.250	1	0	1	2.500.000	1	0	1	300	1	900	1	850	1	2.050.000	100%	82%	2	2.050.000	200%	17.34%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin	Orang	652		0	596	0	564	14.125.000	151	0	173	0	121		13.125.000	578	13.125.000	102.48%	92.92%	1174	13.125.000	180.06%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG	
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan kesehatan orang dengan Tuberculosis	Orang	532		0	272	0	532	9.000.000	109	0	159	2.175.000	132	3.450.000	132	1.500.000	532	7.125.000	100%	79.17%	804	7.125.000	151.13%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	dokumen	2		0	2	0	2	2.250.000	2	0	2	275	2	1.600.000	2	375	2	2.250.000	100%	100%	4	2.250.000	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	dokumen	1		0	1	0	1	500	1	0	1	0	1	75	1	250	1	325	100%	65%	2	325	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah pengelolaan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak	dokumen	10		0	10	0	10	159.500.000	10	0	10	13.100.000	10	93.700.000	10	52.700.000	10	159.500.000	100%	100%	20	159.500.000	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan sistem informasi	bulan	12		0	12	0	12	12.000.000	3	0	3	0	3	4.000.000	3	5.000.000	12	9.000.000	100%	75%	24	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	1		0	1	0	1	12.000.000	1	0	1	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV					14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%			
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90	4.266.823.623	80	0	88	1.017.262.200	88	67.750.000	88	172.185.349	88	404.019.976	88	366.701.775	88	1.010.657.100	100%	99.35%	168	1.010.657.100	186.67%	23.69%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Item	1609	31.489.447	1474	0	1518	0	100	0	100	0	200	0	1518	0	1518	0	100%	0%	2992	0	185.95%	0%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	orang	31		28		29		29		29		29		29		29		29		100%		57			183.87%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	item	1362		1248		1285		100		200		400		585		1285		100%		2533		185.98%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	31		28		29		0		29		29		29		29		29		100%		57			183.87%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	item	1657		1474		1518		50		200		500		768		768		50.59%		2242		135.3%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	item	3795		3474		3578		200		500		1500		3578		3578		100%		7052		185.82%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	38		35		36		36		36		36		36		36		100%		71		186.84%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	item	8265		7566		7792		500		1500		5000		7792		7792		100%		15358		185.82%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	37		34		35		0		0		0		35		35		100%		69		186.49%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	item	21		18		19		0		0		0		19		19		100%		37		176.19%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	10796		9783		10177		0		100		100		100		100		0.98%		9883		91.54%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	35		32		33		0		33		33		33		33		100%		65		185.71%				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	item	10689		9783		10076		0		0		7500		10076		10076		100%		19859		185.79%				
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang / Hari	35		32		33		0		0		0		33		33		100%		65		185.71%				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV					14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
						k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp	k Rp				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	item	19		16		17		0		5		10		2		2		11.76%		18		94.74%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	34		30		32		0		22		22		10		10		31.25%		40		117.65%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	item	6		3		4		1		1		1		1		1		25%		4		66.67%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	35		32		33		0		22		22		10		10		30.3%		42		120%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	item	311		284		293		10		10		125		100		100		34.13%		384		123.47%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Orang	6		3		4		1		1		1		1		1		25%		4		66.67%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	item	2417		2219		2285		0		100		800		1300		1300		56.89%		3519		145.59%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	11		8		9		0		0		0		9		9		100%		17		154.55%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	item	654		600		618		100		100		300		100		100		16.18%		700		107.03%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	31		28		29		0		0		0		29		29		100%		57		183.87%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	orang	1	4.235.334.176	2	0	1	1.005.262.200	0	67.750.000	0	172.185.349	0	399.019.976	0	362.701.775	0	1.001.657.100	200%	99.64%	2	1.001.657.100	200%	23.65%	PUSKESMAS BATUMARMAR
				Jumlah Kematian Bayi	Orang	1		2		1		0		0		0		0		0		200%		2		200%		
				Jumlah Kasus Stunting	orang	60		109		89		0		0		0		0		0		200%		109		181.67%		
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	KK	4990		2230		4972		0		0		0		2760		2760		55.51%		4990		100%		
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	orang	33030		30228		31134		0		0		25000		1500		1500		4.82%		31728		96.06%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1490	472.681.105	1470	0	1480	67.600.000	339	0	360	16.900.000	499	33.800.000	1480	16.900.000	1480	67.600.000	100%	100%	2950	67.600.000	197.99%	14.3%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15500	32.691.531	6200	0	15300	118.810.000	200	15.050.000	400	29.075.000	2687	20.425.000	6345	53.250.000	9632	117.800.000	62.95%	99.15%	15832	117.800.000	102.14%	360.34%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	5	235.000.000	5	0	5	223.957.100	5	325	5	325	5	117.555.675	5	105.751.425	5	223.957.100	100%	100%	10	223.957.100	200%	95.3%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1750	47.998.860	1671	0	1680	2.400.000	0	600	0	325	0	875	743	600	743	2.400.000	44.23%	100%	2414	2.400.000	137.94%	5%	PUSKESMAS BATUMARMAR

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10			11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1065	9.785.792	1032	0	1050	5.625.000	100	1.425.000	200	1.750.000	400	1.775.000	350	675	1050	5.625.000	100%	100%	2082	5.625.000	195,49%	57,48%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	13	16.153.461	13	0	13	6.450.000	13	600	13	1.950.000	13	2.200.000	13	1.700.000	13	6.450.000	100%	100%	26	6.450.000	200%	39,93%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	13	13.538.139	13	0	13	93.950.000	13	14.475.000	13	24.850.000	13	29.600.000	13	24.525.000	13	93.450.000	100%	99,47%	26	93.450.000	200%	690,27%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	13	176.457.356	13	0	13	126.687.500	13	13.000.000	13	21.075.000	13	68.093.500	13	23.306.500	13	125.475.000	100%	99,04%	26	125.475.000	200%	71,11%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	5	778.963.077	5	0	5	203.157.600	5	0	5	31.510.349	5	80.245.801	5	90.518.850	5	202.275.000	100%	99,57%	10	202.275.000	200%	25,97%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"	laporan	1	11.999.713	1	0	1	1.300.000	1	325	1	325	1	325	1	325	1	1.300.000	100%	100%	2	1.300.000	200%	10,83%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1485	0	1447	0	1480	122.850.000	110	20.150.000	200	41.275.000	520	20.150.000	650	41.275.000	1480	122.850.000	100%	100%	2927	122.850.000	197,1%	0%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
				Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1485		1477		1480		110		200		520		650		1480	100%		2957		199,12%					
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	1	4.900.000	1	0	1	4.875.000	0	0	1	1.125.000	1	2.925.000	1	825	1	4.875.000	100%	100%	2	4.875.000	200%	99,49%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	1		1		1		1		1		1		1		1	100%		2		200%					
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	orang	210	2.000.000	84	2.275.000	208	1.950.000	13	0	40	325	20	975	6	650	79	1.950.000	37,98%	100%	163	4.225.000	77,62%	211,25%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	1	27.000.000	1	0	1	25.650.000	1	1.800.000	1	1.375.000	1	20.075.000	1	2.400.000	1	25.650.000	100%	100%	2	25.650.000	200%	95%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.03.0001	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	1	0	1	0	1	5.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	0	1	0	1	12.000.000	1	0	1	0	1	5.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS BATUMARMAR		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	5.267.647.555	93	0	100	1.442.074.900	30	372.626.930	30	280.454.295	30	300.351.460	10	453.722.644	100	1.407.155.329	100%	97,58%	193	1.407.155.329	193%	26,71%	PUSKESMAS LARANGAN		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	unit	1	41.988.002	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	0%	2	0	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	dokumen	1	5.225.659.553	1	0	1	1.430.074.900	0	372.626.930	0	277.454.295	1	299.351.460	0	449.722.644	0	1.399.155.329	0%	97,84%	1	1.399.155.329	100%	26,77%	PUSKESMAS LARANGAN		
				Jumlah Kematian Bayi	dokumen	1		1		1		1		0		0		0		0	0%		1		100%					
				Jumlah kasus stunting	dokumen	1		1		1		0		0		1		0		0	0%		1		100%					
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	dokumen	1		1		1		1		0		0		0		1	100%		2		200%					
				Jumlah Indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Terpenuhi	dokumen	1		1		1		1		0		0		0		1	100%		2		200%					
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	557	165.457.617	556	39.600.000	559	39.600.000	0	0	400	19.800.000	155	3.000.000	4	16.800.000	4	39.600.000	0,72%	100%	560	79.200.000	100,54%	47,87%	PUSKESMAS LARANGAN		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4937	239.917.392	4913	0	4925	160.450.000	2300	45.500.000	1000	42.500.000	1600	41.525.000	25	30.925.000	25	160.450.000	0,51%	100%	4938	160.450.000	100,02%	66,88%	PUSKESMAS LARANGAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	430	6.153.701	422	0	427	13.000.000	150	2.800.000	200	7.700.000	70	600	7	1.900.000	7	13.000.000	1.64%	100%	429	13.000.000	99.77%	211.25%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	2.074.455.458	1	0	1	157.766.200	1	7.750.000	0	3.000.000	0	0	0	142.396.000	1	153.146.000	100%	97.07%	2	153.146.000	200%	7.38%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	45.921.988	1	0	1	3.050.000	1	2.600.000	0	450	0	0	0	1	3.050.000	100%	100%	2	3.050.000	200%	6.64%	PUSKESMAS LARANGAN		
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	167.072.964	1	0	1	126.609.000	1	57.000.000	0	35.150.000	0	6.125.000	0	24.325.000	1	122.600.000	100%	96.83%	2	122.600.000	200%	73.38%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	448.066.305	1	0	1	319.500.000	1	109.450.000	0	55.525.000	0	65.700.000	0	78.325.000	1	309.000.000	100%	96.71%	2	309.000.000	200%	68.96%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	3	1.038.910.766	3	0	3	373.448.900	1	91.826.930	1	39.479.295	1	101.876.460	0	133.076.644	3	366.259.329	100%	98.07%	6	366.259.329	200%	35.25%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	60	1.538.425	50	0	53	9.000.000	20	1.500.000	23	4.500.000	10	3.000.000	0	0	0	9.000.000	0%	100%	50	9.000.000	83.33%	585.01%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	bulan	12	0	12	0	12	24.000.800	3	9.600.000	3	6.500.000	6	4.000.000	0	500	12	20.600.000	100%	85.83%	24	20.600.000	200%	0%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan	Laporan	1	0	0	0	1	27.000.000	1	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0	27.000.000	0%	100%	0	27.000.000	0%	0%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2	0	0	0	2	1.200.000	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	100%	0%	2	0	100%	0%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	100%	66.67%	1	8.000.000	100%	0%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	1	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0%	66.67%	0	8.000.000	0%	0%	PUSKESMAS LARANGAN	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	3.252.283.798	84	0	100	574.045.000	23,31	0	27,65	85.600.000	30,38	204.836.100	97,6	176.419.049	97,6	466.855.149	97.6%	81.33%	181,6	466.855.149	181.6%	14.35%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Unit	4	30.204.212	4	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	100%	0%	8	0	200%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	Orang	4		4		4		4		4		4		4		4		100%		8		200%			
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Unit	4		4		4		1		1		1		1		4		100%		8		200%			
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	4		4		4		4		4		4		4		4		100%		8		200%			
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	Unit	4		4		4		1		1		1		1		4		100%		8		200%			
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	4		4		4		4		4		4		4		4		100%		8		200%			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18				
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Unit	4	4	4	1	1	1	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	8	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Unit	4	4	4	1	1	1	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	6	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Unit	4	4	4	1	1	1	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	2	2	2	0	2	2	2	2	100%	4	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Unit	4	4	4	0	1	2	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	Orang	3	3	3	0	3	3	3	3	100%	6	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Unit	4	4	4	0	2	1	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	Orang	2	2	2	0	2	2	2	2	100%	4	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Unit	4	4	4	0	2	1	1	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Orang	2	2	2	0	2	2	2	2	100%	4	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Unit	4	4	4	0	1	1	2	4	100%	8	200%					
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Orang	2	2	2	0	2	2	2	2	100%	4	200%					
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Unit	4	4	4	1	1	1	1	4	100%	8	200%					

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV									
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	Orang	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Unit	4		4		4		0		2		1		1		4		100%		8		200%	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	Angka	0	3.222.079.586	0	183	555.049.900	0	0	0	85.600.000	0	199.836.100	0	173.419.049	0	458.855.149	0%	82.67%	0	458.855.149	0%	14.24%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
			Jumlah Kematian Bayi	Angka	0		2	15		1		1		2		0		0		0%		2		0%			
			Jumlah Kasus Stunting	Persen	14		4	14		4		4		4		1,5		10.71%		5,5		39.29%		20.05%			
			Jumlah Rumah Tangga Sehat	Angka	6729		538	6729		1815		1549		996		811		811		12.05%		1349		200%			
			Jumlah Indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	Indikator	5		5	5		5		5		5		5		5		100%		10		200%			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Angka	408	340.912.410	378	0	390	18.200.000	0	0	0	195	9.100.000	195	9.100.000	195	18.200.000	50%	100%	573	18.200.000	140.44%	5.34%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Angka	2685	81.845.380	2456	0	2530	33.250.000	0	0	632	8.400.000	1671	19.675.000	227	3.375.000	8.97%	94.59%	2683	31.450.000	99.93%	38.43%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Angka	23	22.001.445	20	0	21	11.175.000	0	0	7	2.700.000	8	4.725.000	6	1.875.000	28.57%	83.22%	26	9.300.000	113.04%	42.27%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Angka	43	48.843.209	37	0	39	3.500.000	0	0	20	1.750.000	19	1.750.000	0	0	3.500.000	0%	100%	37	3.500.000	86.05%	7.17%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka	12	1.144.653.356	12	0	12	122.230.400	0	0	2	5.500.000	6	78.661.100	4	14.190.250	12	98.351.350	100%	80.46%	24	98.351.350	200%	8.59%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka	5	24.751.624	2	0	3	5.100.000	0	0	1	50	1	2.100.000	1	2.000.000	3	4.150.000	100%	81.37%	5	4.150.000	100%	16.77%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka	5	17.601.156	2	0	3	29.375.000	0	0	1	6.075.000	1	11.475.000	1	8.850.000	3	26.400.000	100%	89.87%	5	26.400.000	100%	149.99%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	419.347.563	12	0	12	103.469.500	0	0	7	32.500.000	3	29.775.000	2	20.869.500	12	83.144.500	100%	80.36%	24	83.144.500	200%	19.83%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka	12	811.153.718	12	0	12	120.200.000	0	0	1	2.150.000	2	3.900.000	9	87.459.299	12	93.509.299	100%	77.79%	24	93.509.299	200%	11.53%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka	1	660,042	1	0	1	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	0	100%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Angka	312	22.001.445	285	0	294	5.625.000	0	0	139	1.950.000	80	1.575.000	75	750	75	4.275.000	25.51%	76%	360	4.275.000	115.38%	19.43%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	terselenggaranya kesehatan ibu dan anak secara optimal	bulan	0		0	0	12	63.600.000	0	0	4	20.100.000	6	24.000.000	2	19.500.000	12	63.600.000	100%	100%	12	63.600.000	0%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	terselenggaranya kesehatan ibu bersalin secara optimal	bulan	0		0	0	12	34.125.000	0	0	1	2.625.000	8	10.500.000	3	5.250.000	12	18.375.000	100%	53.85%	12	18.375.000	0%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) secara optimal	bulan	0		0	0	12	1.600.000	0	0	2	300	9	1.100.000	1	200	12	1.600.000	100%	100%	12	1.600.000	0%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara optimal	bulan	0		0	0	12	18.995.100	3	0	3	0	3	5.000.000	3	3.000.000	12	8.000.000	100%	42.12%	12	8.000.000	0%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		1.02.02.2.03 .0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara optimal	bulan	0	0	0	0	12	18.995.100	0	0	0	0	5	5.000.000	3	3.000.000	8	8.000.000	66.67%	42.12%	8	8.000.000	0%	0%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	3.297.241.592	87	0	93	877.459.800	20,5		0	27,26	203.955.425	20,96	354.481.174	24,28	272.857.880	93	831.294.479	100%	94.74%	180	831.294.479	180%	25.21%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Angka	1	3.271.546.078	1	0	1	865.459.800	0	0	0	0	201.955.425	1	351.481.174	0	268.857.880	0	822.294.479	0%	95.01%	1	822.294.479	100%	25.13%	PUSKESMAS KOWEL
					Angka	1		2		2		1		1		2		1		6		-100%		7		700%			
					Angka	20		114		50	46	40		59		46		59		59		82%		173		865%			
					Angka	2200		1578		0	1800	5	1564	0	0	0	1564	0	0	1564		86.89%		3142		142.82%			
					Angka	15		5		5		5		5		5		5		5		100%		10		66.67%			
		1.02.02.2.02 .0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	790	328.069.148	783	0	785	81.000.000	147	0	161	17.550.000	141	52.650.000	277	10.600.000	726	80.800.000	92.48%	99.75%	1509	80.800.000	191.01%	24.63%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	orang	3911	80.335.018	3904	0	3907	37.886.100	654	0	946	20.586.000	0	12.200.000	0	5.100.000	1600	37.886.000	40.95%	100%	5504	37.886.000	140.73%	47.16%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	"Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	orang	600	14.307.351	350	0	775	10.750.000	102	0	264	2.975.000	224	2.750.000	0	2.600.000	590	8.325.000	76.13%	77.44%	940	8.325.000	156.67%	58.19%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	orang	103	3.461.454	96	0	886	1.000.000	156	0	178	0	164	0	178	250	676	250	76.3%	25%	772	250	749.51%	7.22%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat"	Angka	9	1.367.604.514	3	0	3	142.849.900	3	0	3	2.450.000	3	98.300.800	3	41.571.000	3	142.321.800	100%	99.63%	6	142.321.800	66.67%	10.41%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	Angka	21	24.460.957	7	0	7	6.075.000	7	0	7	2.900.000	7	1.650.000	7	1.525.000	7	6.075.000	100%	100%	14	6.075.000	66.67%	24.84%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	Angka	9	17.476.507	3	0	3	23.250.000	3	0	3	5.025.000	3	8.925.000	3	9.150.000	3	23.100.000	100%	99.35%	6	23.100.000	66.67%	132.18%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	"Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	Angka	18	309.146.518	6	0	6	191.265.000	6	0	6	53.325.000	6	66.225.000	6	45.700.000	6	165.250.000	100%	86.4%	12	165.250.000	66.67%	53.45%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	Angka	9	661.661.242	3	0	3	210.183.800	3	0	3	52.944.425	3	51.305.374	3	95.711.880	3	199.961.679	100%	95.14%	6	199.961.679	66.67%	30.22%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"	Angka	12	4.615.273	1	0	15	1.250.000	3	0	3	200	7	350	0	300	13	850	86.67%	68%	14	850	116.67%	18.42%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	5	0	8	0	5	250	5	0	2	0	1	50	6	0	14	50	-80%	20%	22	50	440%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	1	0	1	0	1	10.600.000	1	0	1	5.300.000	1	3.975.000	1	1.325.000	1	10.600.000	100%	100%	2	10.600.000	200%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	1	0	1	0	1	127.000.000	1	0	1	37.500.000	1	52.600.000	1	36.900.000	1	127.000.000	100%	100%	2	127.000.000	200%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	704	0	635	0	704	17.600.000	147	0	166	0	172	0	166	15.350.000	651	15.350.000	92.47%	87.22%	1286	15.350.000	182.67%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.02 .0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	143	0	47	0	143	4.500.000	15	0	13	1.200.000	15	500	0	2.775.000	43	4.475.000	30.07%	99.44%	90	4.475.000	62.94%	0%	PUSKESMAS KOWEL	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
						I	II		III	IV	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	item	10234	25.695.514	10153	0	10183	0	2545	0	2545	0	2545	0	2548	0	10183	0	100%	0%	20336	0	198.71%	0%	PUSKESMAS KOWEL
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	orang	21		21		21		21		21		21		21		21		100%		42		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	item	2328		2238		2268		567		567		567		567		2268		100%		4506		193.56%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	31		31		31		31		31		31		31		31		100%		62		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	item	4668		4578		4608		1152		1152		1152		1152		4608		100%		9186		196.79%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	orang	31		31		31		31		31		31		31		31		100%		62		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	item	29826		29736		29766		7441		7441		7441		7441		29764		99.99%		59500		199.49%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	320		320		320		320		320		320		320		320		100%		640		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	item	7467		7377		7407		1851		1851		1851		1851		7404		99.96%		14781		197.95%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang	154		154		154		154		154		154		154		154		100%		308		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	item	39		24		29		7		7		7		8		29		100%		53		135.9%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	24		24		24		24		24		24		24		24		100%		48		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	item	18906		18816		18846		4711		4711		4711		4713		18846		100%		37662		199.21%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	orang	42		42		42		42		42		42		42		42		100%		84		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	item	39		24		29		7		7		7		8		29		100%		53		135.9%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	orang	15		15		15		15		15		15		15		15		100%		30		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	item	42		24	Rp	30	Rp	7	Rp	7	Rp	7	Rp	9	Rp	30	Rp	100%	Rp	54	Rp			128.57%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	orang	16		16		16		16		16		16		16		16		100%		32			200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	item	21		6		11		3		3		3		2		11		100%		17			80.95%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	orang	2		2		2		2		2		2		2		2		100%		4			200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	item	8874		8784		8814		2203		2203		2203		2205		8814		100%		17598			198.31%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	orang	7		7		7		7		7		7		7		7		100%		14			200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	item	988		898		928		232		232		232		232		928		100%		1826			184.82%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	orang	9		9		9		9		9		9		9		9		100%		18			200%		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	1	0	1	0	1	12.000.000	1	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	1	0	0	0	1	12.000.000	1	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	9.000.000	100%	75%	1	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS KOWEL	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100	86.809.033.320	100	0	100	3.484.029.000	0	0	60	218.310.000	1,9	1.632.834.140	38,1	1.564.428.700	100	3.415.572.840	100%	98.04%	200	3.415.572.840	200%	3.93%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Unit	23	86.809.033.320	14	0	10	3.484.029.000	0	0	6	218.310.000	2,24	1.632.834.140	1,76	1.564.428.700	10	3.415.572.840	100%	98.04%	24	3.415.572.840	104.35%	3.93%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	8	8.370.288.820	14	2.753.235.905	8	1.500.000.000	0	0	6	218.310.000	2	1.254.539.140	0	0	8	1.472.849.140	100%	98.19%	22	4.226.085.045	275%	50.49%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO	
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standart	Bangunan	2	1.984.029.000	0	0	2	1.984.029.000	0	0	0	0,2379	378.295.000	1,7621	1.564.428.700	2	1.942.723.700	100%	97.92%	2	1.942.723.700	100%	97.92%	RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	3.367.890.223	68	0	100	659.487.300	25	2.250.000	39,95	190.162.298	73,77	160.455.502	92,98	275.348.415	92,98	628.216.215	92.98%	95.26%	160,98	628.216.215	160.98%	18.65%	PUSKESMAS PEGANTENAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	14	28.103.528	14	0	14	0	0,25	0	0,25	0	13,5	0	14	0	14	0	100%	0%	28	0	200%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		0,49		0,25		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		0,25		0,25		0,25		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		0,23		0,25		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	unit kerja	1		1		1		1		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	unit kerja	1		1		1		0,25		0,5		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		0,5		0,75		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25		1		1		1		1		100%		2		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	unit kerja	1		1	Rp	1		0,25		Rp	1		1	Rp	1		1		100%		Rp	2		200%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			0,75		0,75		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	unit kerja	1		1		1		0,25			1		1		1		1		100%			2		200%	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	unit kerja	1		1		1		0,25			0,5		0,5		1		1		100%			2		200%	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Orang	1	3.339.786.695	1	0	1	647.487.300	0	2.250.000	0	190.162.298	0	157.455.502	0	269.348.415	0	619.216.215	0%	95.63%	1	619.216.215	100%	18.54%	PUSKESMAS PEGANTENAN	
					Orang	1		1		1		0		5		3		2		10		1000%		11		1100%			
					Orang	503		80	0,25	60		0		60		59		59		59		11.73%		139		27.63%			
					Rumah Tangga	1686		170		1686		0		0		0		63		63		3.74%		233		13.82%			
					Indikator	5		3		5		1		1		3		3		3		60%		6		120%			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	orang	863	276.224.222	680	0	863	20.800.000	100	0	501	10.400.000	640	10.400.000	833	0	833	20.800.000	96.52%	100%	1513	20.800.000	175.32%	7.53%	PUSKESMAS PEGANTENAN	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	Angka	6519	66.152.277	5339	0	6519	37.482.500	0	0	2617	16.325.000	2016	10.000.000	2617	11.125.000	2617	37.450.000	40.14%	99.91%	7956	37.450.000	122.04%	56.61%	PUSKESMAS PEGANTENAN	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	804	14.461.194	400	0	804	4.700.000	0	0	392	2.000.000	0	900	803	100	803	3.000.000	99.88%	63.83%	1203	3.000.000	149.63%	20.75%	PUSKESMAS PEGANTENAN	
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	931	6.769.068	793	0	931	250	0	0	451	0	672	0	790	0	790	0	84.85%	0%	1583	0	170.03%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	82	1.562.793.735	82	0	82	211.114.600	1	0	20	67.440.800	40	250	21	132.798.600	82	200.489.400	100%	94.97%	164	200.489.400	200%	12.83%	PUSKESMAS PEGANTENAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	40	23.076.375	40	0	40	10.000.000	10	0	10	4.650.000	15	3.750.000	3	1.600.000	38	10.000.000	95%	100%	78	10.000.000	195%	43.33%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	48	39.691.367	48	0	48	22.353.500	2	0	10	7.125.000	25	9.925.000	11	4.000.000	48	21.050.000	100%	94.17%	96	21.050.000	200%	53.03%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	261	273.916.584	261	0	261	114.152.750	0	1.000.000	100	42.650.000	150	41.085.000	11	20.165.000	261	104.900.000	100%	91.89%	522	104.900.000	200%	38.3%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	28	710.629.314	28	0	28	112.633.950	0	0	14	17.446.498	8	15.470.502	6	74.709.815	28	107.626.815	100%	95.55%	56	107.626.815	200%	15.15%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	Dokumen	100	0	100	0	100	100.150.000	0	1.000.000	25	17.500.000	50	56.800.000	25	24.850.000	100	100.150.000	100%	100%	200	100.150.000	200%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	pelayanan ibu bersalin	Orang	863	0	731	0	862	4.250.000	0,25	250	366	1.775.000	161	2.125.000	0	0	527,25	4.150.000	61.17%	97.65%	1258,3	4.150.000	145.8%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan	1	0	1	0	1	1.200.000	0	0	1	750	1	450	1	0	1	1.200.000	100%	100%	2	1.200.000	200%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Hasil Pengelolaan Informasi Kesehatan	Dokumen	12	0	2	0	12	12.000.000	2,5	0	4	0	2,5	3.000.000	3	6.000.000	12	9.000.000	100%	75%	14	9.000.000	116.67%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Informasi Kesehatan	Dokumen	10	0	2	0	100	12.000.000	0	0	40	0	35	3.000.000	25	6.000.000	100	9.000.000	100%	75%	102	9.000.000	1020%	0%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	3.297.403.570	88	0	90	648.867.000	22,5	0	22,5	102.488.633	22,5	251.454.151	22,5	222.833.853	90	576.776.637	100%	88.89%	178	576.776.637	187.37%	17.49%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kasus Stunting Jumlah Rumah Tangga Sehat Jumlah indikator SPM komponen penyakit menular dan tidak menular Jumlah cakupan tenaga kesehatan	Ibu Hamil Bayi stunting rumah sehat unit kerja	1 1 42 2800 95	3.272.329.419 1 92 2646 88	1 1 75 2721 90	0 0 18 680 22	0 0 18 680 22	99.488.633 200 18 680 22	0 0 0 21 681 22	248.454.151 0 0 18 680 22	0 0 0 21 681 24	216.833.853 0 0 75 2721 90	0 0 0 21 681 90	564.776.637 200% 100% 100% 100%	88.68% 1 1 5367 178	1 1 167 5367 178	564.776.637 100% 100% 387.62% 191.68% 187.37%	17.26%							
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ibu Hamil	75	243.170.401	60	0	65	23.000.000	15	0	17	1.250.000	33	21.750.000	0	0	65	23.000.000	100%	100%	125	23.000.000	166.67%	9.46%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5390	25.711.706	5372	0	5375	70.950.000	1345	0	2345	22.275.000	3345	30.125.000	5375	13.175.000	5375	65.575.000	100%	92.42%	10747	65.575.000	199.39%	255.04%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	18	18.699.422	13	0	15	2.000.000	15	0	15	0	15	500	15	0	15	500	100%	25%	28	500	155.56%	2.67%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	69	4.674.855	66	0	67	750	16	0	16	0	16	0	19	0	67	0	100%	0%	133	0	192.75%	0%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	195	1.457.398.672	195	0	195	134.090.000	48	0	48	5.575.000	48	115.201.266	51	12.997.075	195	133.773.341	100%	99.76%	390	133.773.341	200%	9.18%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	135	20.257.708	120	0	125	3.500.000	31	0	31	1.900.000	31	1.600.000	32	0	125	3.500.000	100%	100%	245	3.500.000	181.48%	17.28%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	10	16.361.995	10	0	10	16.250.000	10	0	10	7.250.000	10	3.900.000	10	3.000.000	10	14.150.000	100%	87.08%	20	14.150.000	200%	86.48%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	10	204.135.357	10	0	10	85.427.000	10	0	10	29.775.000	10	22.850.000	10	24.775.000	10	77.400.000	100%	90.6%	20	77.400.000	200%	37.92%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	28	625.034.415	28	0	28	168.200.000	7	0	7	27.038.633	7	34.427.885	7	54.561.778	28	116.028.296	100%	68.98%	56	116.028.296	200%	18.56%	PUSKESMAS TEJA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	laporan	10	3.116.571	10		0	1.000.000	10		0	10		500	10		500	10		1.000.000	100%	100%	20		1.000.000	200%	32.09%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang dapat pelayanan kesehatan	Dokumen	660		0	660		21.000.000	165		0	165		250	165		20.750.000	660		21.000.000	100%	100%	1320		21.000.000	200%	0%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terpenuhiinya Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)	Dokumen	3		0	3		6.750.000	0		0	1		1.950.000	1		0	1		4.800.000	3		6.750.000	200%	0%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	Dokumen	55	7.500.000	51		0	55	7.500.000	0		0	20	2.475.000	35	2.100.000	0	2.175.000	55	6.750.000	100%	90%	106	6.750.000	192.73%	90%	PUSKESMAS TEJA	
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Terpenuhiinya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Orang	100		0	100		15.250.000	0		0	0		0	100	15.250.000	0		0	100	15.250.000	100%	100%	200	15.250.000	200%	0%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen	12		0	12		12.000.000	3		0	3	3.000.000	3	3.000.000	3	6.000.000	12	12.000.000	100%	100%	24	12.000.000	200%	0%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Terpenuhiinya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12		0	12		12.000.000	0		0	3	3.000.000	6	3.000.000	3	6.000.000	12	12.000.000	100%	100%	24	12.000.000	200%	0%	PUSKESMAS TEJA		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	93	5.618.084.162	84		0	87	507.569.700	16,3	28.900.000	22,72	113.575.000	23,38	212.177.625	26	127.405.203	26	482.057.828	29.89%	94.97%	110	482.057.828	118.28%	8.58%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	18	42.767.129	14		0	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	14	0	77.78%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kasus Stunting Jumlah Kematian Bayi Jumlah Rumah Tangga Sehat Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	kasus kasus kasus kk %	0 375 0 1133 100	5.575.317.033 570 3 983 78	4 515 2 1033 100	0 2 162 1 472 14,91	0 2 162 1 472 14,91	495.569.700 0 0 0 0 0	28.900.000 0 151 1 731 24,5	0 0 151 1 731 24,5	110.575.000 0 173 1 731 71,72	0 0 139 1 731 100	210.177.625 0 139 2 846 100	123.405.203 0 139 2 846 100	473.057.828 0 139 2 846 100	0 0 139 2 846 100	26.99% 100% 81.9% 100%	95.46% 0% 26.99% 100% 100%	4 709 5 1829 178	473.057.828 0 189.07% 0% 161.43% 178%	0% 189.07% 0% 161.43% 178%	8.48%	PUSKESMAS TLANAKAN					
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1758	378.204.859	1544		0	1648	40.600.000	210	9.100.000	420	19.250.000	609	2.100.000	409	10.150.000	1648	40.600.000	100%	100%	3192	40.600.000	181.57%	10.73%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5131	281.288.489	4897		0	4973	65.575.000	720	7.200.000	1560	23.650.000	1449	9.675.000	1200	24.875.000	4929	65.400.000	99.12%	99.73%	9826	65.400.000	191.5%	23.25%	PUSKESMAS TLANAKAN		
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	78	13.200.867	70		0	76	3.000.000	10		0	30	1.200.000	17	1.200.000	19	600	76	3.000.000	100%	100%	146	3.000.000	187.18%	22.73%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	13	2.266.499.264	13		0	13	144.403.400	0		0	1	2.350.000	9	108.677.625	2	24.947.775	12	135.975.400	92.31%	94.16%	25	135.975.400	192.31%	6%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	35.422.328	4		0	4	4.050.000	1		0	2	1.650.000	1	1.300.000	0	1.100.000	4	4.050.000	100%	100%	8	4.050.000	200%	11.43%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1.320.084	1		0	1	4.375.000	0		0	1	1.225.000	0	2.300.000	0	850	1	4.375.000	100%	100%	2	4.375.000	200%	331.42%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	14	372.484.483	14		0	14	88.336.000	5		0	5	29.850.000	2	21.600.000	2	36.450.000	14	87.900.000	100%	99.51%	28	87.900.000	200%	23.6%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	3	1.058.111.150	3		0	3	57.417.000	1		0	1	41.875.000	0	2.632.428	3	44.507.428	3	44.507.428	100%	77.52%	6	44.507.428	200%	4.21%	PUSKESMAS TLANAKAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
												I		II		III		IV															
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	18.481.214	1		0	1	3.750.000	1		0	0	1.500.000	0		1.500.000	0		750	1	3.750.000	100%	100%	2	3.750.000	200%	20.29%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah pertemuan	kali	100		0	1	0	2	19.500.000	0		0	1	9.750.000	1		9.750.000	0		0	2	19.500.000	100%	100%	3	19.500.000	3%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	penemuan kasus aktif	kasus	100		0	30	0	30	3.000.000	5		0	12	1.200.000	8		1.200.000	5		600	30	3.000.000	100%	100%	60	3.000.000	60%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	PUS yang mendapat penyuluhan KB	Pos	100		0	47	0	94	4.700.000	26		0	35	1.750.000	14		1.750.000	19		1.200.000	94	4.700.000	100%	100%	141	4.700.000	141%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	pelayanan kesehatan ibu dan anak	kegiatan	100		0	5	0	7	56.863.300	2		12.600.000	2	17.200.000	2		7.250.000	1		19.250.000	7	56.300.000	100%	99.01%	12	56.300.000	12%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	simpus	bulan	100		0	0	0	12	12.000.000	0		0	3	3.000.000	5		2.000.000	1		4.000.000	1	9.000.000	8.33%	75%	1	9.000.000	1%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	simpus	bulan	100		0	0	0	12	12.000.000	0		0	3	3.000.000	2		2.000.000	4		4.000.000	9	9.000.000	75%	75%	9	9.000.000	9%	0%	PUSKESMAS TLANAKAN	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	98	3.184.540.822	88		0	94	649.793.100	75		0	75	131.556.945	75		178.230.350	19		2.000.000	19	311.787.295	20.21%	47.98%	107	311.787.295	109.18%	9.79%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Sehat	angka	2022	3.153.773.302	1950		0	2000	637.793.100	0		0	0	126.556.945	0		176.230.350	254		0	254	302.787.295	12.7%	47.47%	2204	302.787.295	109%	9.6%	PUSKESMAS PAKONG	
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	indikator	4		4			4		2		2		0			0		0	4		100%		8		200%			PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	602	205.638.400	572		0	582	29.600.000	155		0	48	14.800.000	48		14.800.000	232		0	483	29.600.000	82.99%	100%	1055	29.600.000	175.25%	14.39%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2250	7.076.550	2215		0	2217	49.670.000	0		0	0	11.650.000	0		8.280.000	2217		0	2217	19.930.000	100%	40.12%	4432	19.930.000	196.98%	281.63%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	18	2.307.570	278		0	16	2.250.000	16		0	0	2.250.000	0		0	0	0	0	16	2.250.000	100%	100%	294	2.250.000	1633.33%	97.51%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	3	1.299.374.633	3		0	3	232.209.800	1		0	1	21.225.000	0		68.544.800	1		0	3	89.769.800	100%	38.66%	6	89.769.800	200%	6.91%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	3	69.611.717	0		0	3	19.350.000	3		0	0	5.300.000	0		11.250.000	0		0	3	16.550.000	100%	85.53%	3	16.550.000	100%	23.77%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	3	11.384.014	3		0	3	20.600.000	0		0	3	8.600.000	0		2.725.000	0		0	3	11.325.000	100%	54.98%	6	11.325.000	200%	99.48%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	3	664.118.865	0		0	3	114.439.600	0		0	3	40.650.000	0		36.550.000	0		0	3	77.200.000	100%	67.46%	3	77.200.000	100%	11.62%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	7	621.610.325	0		0	7	111.473.700	2		0	5	13.775.000	0		13.450.000	0		0	7	27.225.000	100%	24.42%	7	27.225.000	100%	4.38%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	30.459.935	1		0	1	3.600.000	0		0	0	0	2.400.000	1		2.400.000	1		0	1	2.400.000	100%	66.67%	2	2.400.000	200%	7.88%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah penderit yang mendapat pengobatan	pelayanan	77		0	39	0	77	2.250.000	0		0	77	2.250.000	0		0	0		0	77	2.250.000	100%	100%	116	2.250.000	150.65%	0%	PUSKESMAS PAKONG	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah pelayanan ibu bersalin	pelayanan	573		0	590	0	573	2.400.000	0		0	290	2.400.000	0		0	193		0	483	2.400.000	84.29%	100%	1073	2.400.000	187.26%	0%	PUSKESMAS PAKONG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
											I		II		III		IV											
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	unit	5	30.767.520	4	Rp 0	5	Rp 0	0	Rp 0	5	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	5	Rp 0	100%	0%	9	Rp 0	180%	0%	PUSKESMAS PAKONG
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	orang	35		31		35		31		35		35		35		35		100%		66		188.57%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar	unit	2		2		2		1		1		0		0		2		100%		4		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	orang	35		31		35		31		35		35		35		35		100%		66		188.57%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir	unit	1		1		1		0		1		0		0		1		100%		2		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	orang	35		35		35		31		35		35		35		35		100%		70		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	posyandu	12		12		12		3		12		12		12		12		100%		24		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	34		30		34		18		34		34		34		34		100%		64		188.24%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokumen	3		3		3		3		3		3		3		3		100%		6		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	orang	33		30		31		31		31		31		31		31		100%		61		184.85%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	unit	2		2		2		0		2		0		0		2		100%		4		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang usia produktif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	15		10		15		5		5		5		0		15		100%		25		166.67%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Dokumen	10		10		10		3		3		3		1		10		100%		20		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai standar	orang	5		5		5		5		5		5		5		5		100%		10		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar	orang	2		2		2		2		2		2		2		2		100%		4		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	unit	1		1		1		1		1		1		1		1		100%		2		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
							1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	orang	5		5		5		5		5		5		5		5		100%		10		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	Dokumen	3		3		3		3		0		0		0		3		100%		6		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk untuk pelayanan ODGI berat sesuai standar	orang	1		1		1		1		0		0		0		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	unit	3		3		3		3		0		0		0		3		100%		6		200%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita TBC sesuai standar	orang	1		1		1		1		0		0		0		1		100%		2		200%		
				Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	box reagen	35		12		35		10		10		10		5		35		100%		47		134.29%		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	2		1		2		2		0		0		0		2		100%		3		150%		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	pelaporan sistem informasi kesehatan	dokumen	100	0	0	0	100	12.000.000	0	0	50	5.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	100	9.000.000	100%	75%	100	9.000.000	100%	0%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	pelaporan kegiatan	Dokumen	100	0	100	0	100	12.000.000	0	0	0	5.000.000	0	2.000.000	100	2.000.000	100	9.000.000	100%	75%	200	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	573.182.859	85	0	93	630.643.600	0	36.250.000	37	287.988.500	56	120.208.500	0	164.205.000	93	608.652.000	100%	96.51%	178	608.652.000	187.37%	106.19%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu	Orang	1	545.705.735	1	0	1	617.914.200	0	36.250.000	0	287.988.500	0	120.208.500	1	155.205.000	1	599.652.000	100%	97.04%	2	599.652.000	200%	109.89%	PUSKESMAS SOPAAH
				Jumlah Kematian Bayi	Orang	3		19	0	8	0	0	0	0	12	0	12	0	50%	31	1033.33%							
				Jumlah Kasus Stunting	%	10		14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	200%	14	140%								
				Jumlah Rumah Tangga Sehat	KK	6000		3026	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	100%	7026	117.1%								
				Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Dokumen	3		8	6	2	2	2	2	2	0	6	100%	14	466.67%									
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	563	44.800.000	563	0	563	44.800.000	0	22.400.000	281	22.400.000	282	0	0	0	563	44.800.000	100%	100%	1126	44.800.000	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	538	2.500.000	538	0	538	2.500.000	0	0	538	2.500.000	0	0	0	0	538	2.500.000	100%	100%	1076	2.500.000	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia perencanaan dasar	Orang	3277	27.250.000	3277	0	3277	27.250.000	0	13.625.000	1638	13.625.000	1639	0	0	0	3277	27.250.000	100%	100%	6554	27.250.000	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	bulan	12	225	12	0	12	225	0	225	4	0	0	0	0	4	225	33.33%	100%	16	225	133.33%	100%	PUSKESMAS SOPAAH	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2	72.698.400	2	0	2	72.698.400	0	0	1	36.250.000	0	0	1	36.250.000	2	72.500.000	100%	99.73%	4	72.500.000	200%	99.73%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	82.507.000	2	0	2	82.507.000	0	0	1	35.525.000	0	0	1	35.525.000	2	71.050.000	100%	86.11%	4	71.050.000	200%	86.11%	PUSKESMAS SOPAAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	225.828.800	7		0	7	225.828.800	0		0	3	112.658.500	4		0	7	225.317.000	100%	99.77%	14	225.317.000	200%	99.77%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	3.550.000	4		0	4	3.550.000	0		0	2	3.550.000	0		0	2	3.550.000	50%	100%	6	3.550.000	150%	100%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12	150	12		0	6	150	0		0	3	150	0		0	3	150	50%	100%	15	150	125%	100%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	682	250	682		0	682	250	0		0	150	50	232		100	300	100	682	250	100%	100%	1364	250	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	18	2.500.000	18		0	18	2.500.000	0		0	9	1.250.000	0		0	9	1.250.000	100%	100%	36	2.500.000	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	18	3.750.000	18		0	18	3.750.000	0		0	9	1.250.000	0		0	9	1.250.000	100%	66.67%	36	2.500.000	200%	66.67%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	12	14.600.000	12		0	12	14.600.000	0		0	0	0	0	12		14.600.000	12	14.600.000	100%	100%	24	14.600.000	200%	100%	PUSKESMAS SOPAAH	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	16.025.000	2		0	2	16.025.000	0		0	0	1	7.450.000	1		7.450.000	2	14.900.000	100%	92.98%	4	14.900.000	200%	92.98%	PUSKESMAS SOPAAH	
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	121.280.000	12		0	12	121.280.000	0		0	6	58.780.000	0		0	6	58.780.000	100%	96.93%	24	117.560.000	200%	96.93%	PUSKESMAS SOPAAH		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi sistem informasi kesehatan puskesmas yang berhasil dimanfaatkan	aplikasi	1	0	1		0	1	12.729.400	0		0	0	1	0	0		9.000.000	1	9.000.000	100%	70.7%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS SOPAAH	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	0	1		0	1	12.729.400	0		0	0	0	0	1		9.000.000	1	9.000.000	100%	70.7%	2	9.000.000	200%	0%	PUSKESMAS SOPAAH	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase keberadaan Tenaga Kesehatan dan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	9.795.000.000	65		0	100	3.290.000.000	8	524.100.000	30	882.200.000	85	669.650.000	90	664.750.000	90	2.740.700.000	90%	83.3%	155	2.740.700.000	155%	27.98%	RSUD WARU		
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrak untuk pemenuhan SPM Rumah Sakit	orang	31	9.000.000.000	29		0	31	3.090.000.000	29	471.100.000	29	882.200.000	28	616.650.000	28	646.650.000	28	2.616.600.000	90.32%	84.68%	57	2.616.600.000	183.87%	29.07%	RSUD WARU		
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	31	9.000.000.000	29		0	32	3.090.000.000	29	471.100.000	29	882.200.000	28	616.650.000	28	646.650.000	28	2.616.600.000	87.5%	84.68%	57	2.616.600.000	183.87%	29.07%	RSUD WARU		
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan dokter umum yang bersekolah Spesialisasi	Orang	5	795.000.000	0		0	5	200.000.000	2	53.000.000	2	0	2	53.000.000	5	18.100.000	5	124.100.000	100%	62.05%	5	124.100.000	100%	15.61%	RSUD WARU		
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensi	Orang	5	795.000.000	0		0	5	200.000.000	2	53.000.000	0	0	2	53.000.000	5	18.100.000	5	124.100.000	100%	62.05%	5	124.100.000	100%	15.61%	RSUD WARU		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Dokter per 100.000 penduduk	Rasio	30	5.105.412.064	29		0	29	2.998.611.000	0	0	0	0	764.981.940	0	742.886.540	29	993.130.651	29	2.500.999.131	100%	83.41%	58	2.500.999.131	193.33%	48.99%	DINAS KESEHATAN	
				Rasio Tenaga Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	9		8		0		8	0	0	0	0		0	8		8		100%		16		177.78%				
				Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Rasio	105		98		0	102		0	0	0	0		66		66		66		64.71%		164		156.19%			
				Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Rasio	164		158		0	160		0	0	0	0		57		57		57		35.63%		215		131.1%			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
											I		II		III		IV													
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional yang dinilai Angka kredit dan Tenaga Mengikuti Uji Kompetensi	Orang	30	3.317.687.064	30	0	30	1.814.046.000	0	0	0	599.981.940	0	417.694.760	30	472.055.651	30	1.489.732.351	100%	82.12%	60	1.489.732.351	200%	44.9%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas Kesehatan)	Orang	75	1.317.010.128	8	0	69	1.599.868.000	0	0	56	586.956.940	4	396.344.760	4	295.908.820	64	1.279.210.520	92.75%	79.96%	72	1.279.210.520	96%	97.13%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	518.220.000	1	0	2	214.178.000	0	0	1	13.025.000	0	21.350.000	1	176.146.831	2	210.521.831	100%	98.29%	3	210.521.831	300%	40.62%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi SDM Kesehatan	Kegiatan	32	1.787.725.000	20	0	25	1.184.565.000	0	0	2	165.000.000	10	325.191.780	2	521.075.000	14	1.011.266.780	56%	85.37%	34	1.011.266.780	106.25%	56.57%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensi	Orang	14	1.765.000.000	80	0	14	1.184.565.000	0	0	2	165.000.000	10	325.191.780	2	521.075.000	14	1.011.266.780	100%	85.37%	94	1.011.266.780	671.43%	57.3%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN SARANAN MINUMAN	Persentase perizinan urusan kesehatan yang diterbitkan	Persen	97	2.033.668.750	94	0	96	1.080.948.900	0	15.680.000	0	115.167.100	0	432.782.250	96	319.659.304	96	883.288.654	100%	81.71%	190	883.288.654	195.88%	43.43%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta UMOT yang berijin	Apotek	52	345.839.210	36	0	44	171.773.500	0	0	0	25.565.600	26	53.286.450	25	76.491.250	51	155.343.300	115.91%	90.43%	87	155.343.300	167.31%	44.92%	DINAS KESEHATAN		
				Jumlah Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta UMOT yang berijin	Toko Obat	13		5	9		0	0	0	7		7		77.78%	12		92.31%									
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	2	342.325.500	41	0	100	171.773.500	25	0	22	25.565.600	0	53.286.450	3	76.491.250	50	155.343.300	50%	90.43%	91	155.343.300	4550%	45.38%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Yang Memiliki Setifikat Produksi Pangan dan P-IRT	PIRT	1147	456.140.680	459	0	777	342.524.400	0	0	0	71.943.500	777	180.772.000	0	17.701.000	777	270.416.500	100%	78.95%	1236	270.416.500	107.76%	59.28%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	451.505.900	1	0	1	342.524.400	1	0	1	71.943.500	1	180.772.000	1	17.701.000	1	270.416.500	100%	78.95%	2	270.416.500	200%	59.89%	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Yang Memiliki Setifikat Produksi Pangan dan P-IRT	TPP	406	456.134.750	191	0	291	142.500.000	0	15.680.000	0	8.925.000	245	37.744.000	0	56.699.254	245	119.048.254	84.19%	83.54%	436	119.048.254	107.39%	26.1%	DINAS KESEHATAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	451.500.000	1		1	142.500.000	1	15.680.000	1	8.925.000	1	37.744.000	1	56.699.254	1	119.048.254	100%	83.54%	2	119.048.254	200%	26.37%	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah produk makanan jajanan yang memiliki stiker memenuhi syarat kesehatan	PKL	400	304.089.500	100		0	200	95.000.000	0	0	0	200	29.619.500	0	64.350.500	200	93.970.000	100%	98.92%	300	93.970.000	75%	30.9%	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan	Dokumen	1	301.000.000	1		0	1	95.000.000	1	0	1	0	1	29.619.500	1	64.350.500	1	93.970.000	100%	98.92%	2	93.970.000	200%	31.22%	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan produk makanan minuman Industri rumah tangga	unit	95	471.464.610	95		0	95	329.151.000	0	0	21	8.733.000	44	131.360.300	30	104.417.300	95	244.510.600	100%	74.29%	190	244.510.600	200%	51.86%	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	IRTP	115	466.675.000	75		0	95	329.151.000	0	0	21	8.733.000	44	131.360.300	30	104.417.300	95	244.510.600	100%	74.29%	170	244.510.600	147.83%	52.39%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	85	129.911.068	75		0	80	52.975.000	20	0	20	20.150.000	20	20.000.000	10	12.825.000	70	52.975.000	87.5%	100%	145	52.975.000	170.59%	40.78%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Dokumen	156	129.911.068	156		0	156	52.975.000	39	0	80	20.150.000	20	20.000.000	10	12.825.000	149	52.975.000	95.51%	100%	305	52.975.000	195.51%	40.78%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	156	128.612.335	156		0	156	52.975.000	0	0	80	20.150.000	120	20.000.000	156	12.825.000	156	52.975.000	100%	100%	312	52.975.000	200%	41.19%	PUSKESMAS PEGANTENAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	81.691.680	95		0	97	50.250.000	24	0	24	6.375.000	24	12.750.000	25	31.125.000	97	50.250.000	100%	100%	192	50.250.000	192%	61.51%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	UKBM	94	81.691.680	94		0	94	50.250.000	94	0	94	6.375.000	94	12.750.000	94	31.125.000	94	50.250.000	100%	100%	188	50.250.000	200%	61.51%	PUSKESMAS TEJA
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	ukbm	94	80.875.001	94		0	94	50.250.000	0	0	94	6.375.000	94	12.750.000	94	31.125.000	94	50.250.000	100%	100%	188	50.250.000	200%	62.13%	PUSKESMAS TEJA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif	Persen	100	2.495.146.000	100	0	100	885.028.500	25	25.327.500	25	66.455.100	25	64.706.850	25	489.010.400	100	645.499.850	100%	72.94%	200	645.499.850	200%	25.87%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor	kegiatan	189	703.536.000	189	0	189	227.421.000	0	0	0	15.510.900	0	23.076.500	173	169.654.000	173	208.241.400	91.53%	91.57%	362	208.241.400	191.53%	29.6%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01 .0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	696.388.000	1	0	1	227.421.000	1	0	1	15.510.900	1	23.076.500	1	169.654.000	1	208.241.400	100%	91.57%	2	208.241.400	200%	29.9%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Sehat	rumah tangga	160279	1.236.448.000	120019	0	159722	393.105.000	5355	25.327.500	5356	35.194.200	5355	26.550.000	5356	116.818.900	21422	203.890.600	13.41%	51.87%	141441	203.890.600	88.25%	16.49%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02 .0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	1.245.611.000	1	0	1	393.105.000	1	25.327.500	1	35.194.200	1	26.550.000	1	116.818.900	1	203.890.600	100%	51.87%	2	203.890.600	200%	16.37%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UKBM	1380	555.162.000	1359	0	1370	264.502.500	0	0	0	15.750.000	0	15.080.350	1370	202.537.500	1370	233.367.850	100%	88.23%	2729	233.367.850	197.75%	42.04%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	549.684.000	1	0	1	264.502.500	1	0	1	15.750.000	1	15.080.350	1	202.537.500	1	233.367.850	100%	88.23%	2	233.367.850	200%	42.45%	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	39.236.357	85	0	93	39.825.000	93	0	93	10.225.000	93	1.575.000	93	0	93	11.800.000	100%	29.63%	178	11.800.000	178%	30.07%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	3	39.236.357	1	0	3	39.825.000	3	0	3	10.225.000	3	1.575.000	0	0	0	11.800.000	0%	29.63%	1	11.800.000	33.33%	30.07%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	3	38.844.107	3	0	3	39.825.000	0	0	3	10.225.000	0	1.575.000	0	0	3	11.800.000	100%	29.63%	6	11.800.000	200%	30.38%	PUSKESMAS PAKONG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	117.323.992	100	0	100	16.369.800	0	0	50	0	50	0	0	15.925.000	100	15.925.000	100%	97.28%	200	15.925.000	200%	13.57%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	Dokumen	4	117.323.992	4	0	4	16.369.800	0	0	2	0	2	0	0	15.925.000	4	15.925.000	100%	97.28%	8	15.925.000	200%	13.57%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	4	12.729.400	4	0	4	16.369.800	0	0	0	0	0	0	4	15.925.000	4	15.925.000	100%	97.28%	8	15.925.000	200%	125.1%	PUSKESMAS SOPAAH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	208.075.265	100	0	100	50.375.000	0	0	0	0	0	27.800.000	100	22.575.000	100	50.375.000	100%	100%	200	50.375.000	200%	24.21%	PUSKESMAS BANDARAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi				PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18								
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	angka	62	208.075.265	61		0	62	50.375.000	0		0	0		0	34	27.800.000	28		22.575.000	62	50.375.000	100%	100%	123	50.375.000	198.39%	24.21%	PUSKESMAS BANDARAN				
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	6	205.995.118	6		0	6	50.375.000	0		0	0		0	3	27.800.000	3		22.575.000	6	50.375.000	100%	100%	12	50.375.000	200%	24.45%	PUSKESMAS BANDARAN				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	85	178.705.416	60		0	70	31.275.000	15		0	0		0	30	17.400.000	25		13.875.000	70	31.275.000	100%	100%	130	31.275.000	152.94%	17.5%	PUSKESMAS PANAGUAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	7	178.705.416	7		0	7	31.275.000	1		0	0		0	4	17.400.000	2		13.875.000	7	31.275.000	100%	100%	14	31.275.000	200%	17.5%	PUSKESMAS PANAGUAN				
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	7	176.918.882	7		0	7	31.275.000	0		0	0		0	3	17.400.000	4		13.875.000	7	31.275.000	100%	100%	14	31.275.000	200%	17.68%	PUSKESMAS PANAGUAN				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90	284.530.104	89		0	89	48.550.000	20		0	55		3.150.000	55	17.950.000	89		26.375.000	89	47.475.000	100%	97.79%	178	47.475.000	197.78%	16.69%	PUSKESMAS KADUR				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	UKBM	69	284.530.104	89		0	69	48.550.000	13		0	55		3.150.000	60	17.950.000	69		26.375.000	69	47.475.000	100%	97.79%	158	47.475.000	228.99%	16.69%	PUSKESMAS KADUR				
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	15	281.685.632	13		0	15	48.550.000	0		0	7		3.150.000	13	17.950.000	15		26.375.000	15	47.475.000	100%	97.79%	28	47.475.000	186.67%	16.85%	PUSKESMAS KADUR				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	220.791.641	80		0	100	38.000.000	0		0	0		5.225.000	10	7.500.000	100		25.275.000	100	38.000.000	100%	100%	180	38.000.000	180%	17.21%	PUSKESMAS PADEMAWU				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Angka	14	220.791.641	14		0	14	38.000.000	0		0	2		5.225.000	2	7.500.000	9		25.275.000	13	38.000.000	92.86%	100%	27	38.000.000	192.86%	17.21%	PUSKESMAS PADEMAWU				
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	"Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)"	Dokumen	14	218.584.368	14		0	14	38.000.000	0		0	2		5.225.000	3	7.500.000	9		25.275.000	14	38.000.000	100%	100%	28	38.000.000	200%	17.38%	PUSKESMAS PADEMAWU				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	295.576.113	100		0	100	72.650.000	25		0	25		26.900.000	25	21.100.000	25		24.650.000	25	72.650.000	25%	100%	125	72.650.000	125%	24.58%	PUSKESMAS PALENGAAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	angka	52	295.576.113	52		0	52	72.650.000	7		0	12		26.900.000	12	21.100.000	21		24.650.000	52	72.650.000	100%	100%	104	72.650.000	200%	24.58%	PUSKESMAS PALENGAAN				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	15	292.621.213	5	0	5	72.650.000	1	0	1	26.900.000	1	21.100.000	2	24.650.000	5	72.650.000	100%	100%	10	72.650.000	66.67%	24.83%	PUSKESMAS PALENGAAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	318.908.912	100	0	100	27.700.000	10	0	50	3.000.000	70	5.600.000	100	19.100.000	100	27.700.000	100%	100%	200	27.700.000	200%	8.69%	PUSKESMAS TLANAKAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	dokumen	6	318.908.912	6	0	6	27.700.000	1	0	2	3.000.000	2	5.600.000	1	19.100.000	6	27.700.000	100%	100%	12	27.700.000	200%	8.69%	PUSKESMAS TLANAKAN
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	6	315.720.752	6	0	6	27.700.000	1	0	2	3.000.000	2	5.600.000	1	19.100.000	6	27.700.000	100%	100%	12	27.700.000	200%	8.77%	PUSKESMAS TLANAKAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	26.446.103	100	0	100	11.000.000	25	0	50	2.750.000	100	8.250.000	100	11.000.000	100%	100%	200	11.000.000	200%	41.59%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	jml ukbm yang dibina	dokumen	28	26.446.103	7	0	7	11.000.000	0	0	2	2.750.000	3	8.250.000	7	11.000.000	100%	100%	14	11.000.000	50%	41.59%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah ukbm yang dibina	dokumen	28	26.181.719	7	0	7	11.000.000	1	0	2	2.750.000	2	8.250.000	7	11.000.000	100%	100%	14	11.000.000	50%	42.01%	PUSKESMAS PROPPPO		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	86	66.043.306	80	0	84	18.000.000	20	4.500.000	20	4.500.000	25	4.500.000	19	4.500.000	84	18.000.000	100%	100%	164	18.000.000	190.7%	27.25%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	12	66.043.306	12	0	12	18.000.000	3	4.500.000	6	4.500.000	9	4.500.000	12	4.500.000	12	18.000.000	100%	100%	24	18.000.000	200%	27.25%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	12	25.000.000	12	0	12	18.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	12	18.000.000	100%	100%	24	18.000.000	200%	72%	PUSKESMAS GALIS
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	191.525.590	90	0	94	73.105.000	25	0	25	14.905.000	25	19.015.000	19	39.185.000	94	73.105.000	100%	100%	184	73.105.000	193.68%	38.17%	PUSKESMAS WARU
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Dokumen	4	191.525.590	4	0	4	73.105.000	1	0	1	14.905.000	1	19.015.000	1	39.185.000	4	73.105.000	100%	100%	8	73.105.000	200%	38.17%	PUSKESMAS WARU
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Dokumen	8	189.610.892	8	0	8	73.105.000	2	0	2	14.905.000	2	19.015.000	2	39.185.000	2	73.105.000	25%	100%	10	73.105.000	125%	38.56%	PUSKESMAS WARU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	107.924.955	70	0	85	12.450.000	0	0	0	0	25	2.075.000	60	10.375.000	85	12.450.000	100%	100%	155	12.450.000	163.16%	11.54%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Desa	9	107.924.955	9	0	9	12.450.000	0	0	9	0	0	2.075.000	0	10.375.000	9	12.450.000	100%	100%	18	12.450.000	200%	11.54%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	106.846.020	3	0	3	12.450.000	0	0	0	0	1	2.075.000	2	10.375.000	3	12.450.000	100%	100%	6	12.450.000	50%	11.65%	PUSKESMAS PASEAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	92	58.495.282	86	0	88	104.200.000	22	0	22	0	18	64.875.000	26	39.325.000	88	104.200.000	100%	100%	174	104.200.000	189.13%	178.13%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	dokumen	76	58.495.282	76	0	76	104.200.000	15	0	20	0	12	64.875.000	29	39.325.000	76	104.200.000	100%	100%	152	104.200.000	200%	178.13%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	"Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)"	dokumen	76	57.910.500	76	0	76	104.200.000	0	0	0	0	47	64.875.000	29	39.325.000	76	104.200.000	100%	100%	152	104.200.000	200%	179.93%	PUSKESMAS TALANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	141.591.810	85	0	90	20.325.000	90	0	90	0	90	0	90	20.325.000	90	20.325.000	100%	100%	175	20.325.000	184.21%	14.35%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	pos	51	141.591.810	51	0	51	20.325.000	51	0	51	0	51	0	51	20.325.000	51	20.325.000	100%	100%	102	20.325.000	200%	14.35%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	8	140.176.304	8	0	8	20.325.000	8	0	8	0	8	0	8	20.325.000	8	20.325.000	100%	100%	16	20.325.000	200%	14.5%	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95	178.316.926	86	0	90	39.025.000	90	2.225.000	90	3.750.000	90	30.250.000	90	2.800.000	90	39.025.000	100%	100%	176	39.025.000	185.26%	21.89%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	angka	105	178.316.926	102	0	103	39.025.000	29	2.225.000	50	3.750.000	30	30.250.000	103	2.800.000	103	39.025.000	100%	100%	205	39.025.000	195.24%	21.89%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	13	176.534.276	13	0	13	39.025.000	13	2.225.000	13	3.750.000	13	30.250.000	13	2.800.000	13	39.025.000	100%	100%	26	39.025.000	200%	22.11%	PUSKESMAS BATUMARMAR
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	6.021.595.619	93	0	100	61.425.000	30	0	30	26.550.000	30	9.375.000	10	17.000.000	10	52.925.000	10%	86.16%	103	52.925.000	103%	0.88%	PUSKESMAS LARANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Dokumen	1	6.021.595.619	1		0	1	61.425.000	1	0	0	0	26.550.000	0	9.375.000	0	17.000.000	1	52.925.000	100%	86.16%	2	52.925.000	200%	0.88%	PUSKESMAS LARANGAN
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	"Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)"	Dokumen	8	5.961.397.196	8		0	8	61.425.000	0	0	6	0	26.550.000	2	9.375.000	0	17.000.000	8	52.925.000	100%	86.16%	16	52.925.000	200%	0.89%	PUSKESMAS LARANGAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90	179.566.829	84		0	86	37.500.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0%	40%	84	15.000.000	93.33%	8.35%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Dokumen	12	179.566.829	12		0	12	37.500.000	0	0	4	0	15.000.000	4	0	4	0	12	15.000.000	100%	40%	24	15.000.000	200%	8.35%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	177.771.683	12		0	12	37.500.000	0	0	4	0	15.000.000	5	0	0	0	9	15.000.000	75%	40%	21	15.000.000	175%	8.44%	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	139.894.206	100		0	100	102.000.000	0	0	30	0	6.000.000	50	45.000.000	100	51.000.000	100	102.000.000	100%	100%	200	102.000.000	200%	72.91%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Persen	100	139.894.206	100		0	100	102.000.000	0	0	30	0	6.000.000	50	45.000.000	100	51.000.000	100	102.000.000	100%	100%	200	102.000.000	200%	72.91%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	3	138.506.608	3		0	3	102.000.000	0	0	3	0	6.000.000	3	45.000.000	3	51.000.000	3	102.000.000	100%	100%	6	102.000.000	200%	73.64%	PUSKESMAS TAMPOIUNG PREGI
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100	66.509.494	100		0	100	50.334.600	100	0	100	0	10.225.000	100	7.659.000	100	32.250.000	100	50.134.000	100%	99.6%	200	50.134.000	200%	75.38%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Jumlah UKBM yang dibina	Angka	117	66.509.494	117		0	117	50.334.600	117	0	117	0	10.225.000	117	7.659.000	117	32.250.000	117	50.134.000	100%	99.6%	234	50.134.000	200%	75.38%	PUSKESMAS KOWEL
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	"Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)"	Angka	3	65.844.593	1		0	1	50.334.600	1	0	1	0	10.225.000	1	7.659.000	0	32.250.000	0	50.134.000	0%	99.6%	1	50.134.000	33.33%	76.14%	PUSKESMAS KOWEL
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	%	1	4.800.000.000	0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	Unit	5	4.800.000.000	0		0	5		0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100%	0%	5	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai PPH	poin	73	5.850.000.000	71		0	72,1	250.000.000	0		0	0	31.905.000	0	189.716.500	72,1	28.378.500	72,1	250.000.000	100%	100%	143,1	250.000.000	196.03%	4.27%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya sumber pangan pokok dan pangan lainnya	Laporan	5	2.890.000.000	1		0	5	135.000.000	0		0	0	30.905.000	0	93.479.800	5	10.615.200	5	135.000.000	100%	100%	6	135.000.000	120%	4.67%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	3	640.000.000	3		0	3	135.000.000	0		0	1	30.905.000	1	93.479.800	1	10.615.200	1	135.000.000	33.33%	100%	4	135.000.000	133.33%	21.09%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan	Laporan	1	1.175.000.000	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun	Laporan	382	1.785.000.000	276		0	333	115.000.000	0		0	0	1.000.000	0	96.236.700	333	17.763.300	333	115.000.000	100%	100%	609	115.000.000	159.42%	6.44%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	1.550.000.000	2		0	3	100.000.000	0		0	0	1	96.236.700	2	3.763.300	2	100.000.000	66.67%	100%	4	100.000.000	100%	6.45%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	60.000.000	1		0	1	15.000.000	0		0	0	1.000.000	0	0	1	14.000.000	1	15.000.000	100%	100%	2	15.000.000	200%	25%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	Desa/kelurahan	2	1.705.000.000	2		0	2	196.450.500	0		0	0	0	0	12.050.000	2	181.520.500	2	193.570.500	100%	98.53%	4	193.570.500	200%	11.35%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen Peta Pangan yang dihasilkan	Dokumen	1	300.000.000	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	0%	1	0	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapat penanganan kerawanan pangan	rumah tangga	150	1.405.000.000	120		0	150	196.450.500	0		0	0	0	0	12.050.000	150	181.520.500	150	193.570.500	100%	98.53%	270	193.570.500	180%	13.78%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kg)	Dokumen	2350	1.240.000.000	2000		0	2250	124.750.500	0		0	0	0	0	8.700.000	2250	116.050.500	2250	124.750.500	100%	100%	4250	124.750.500	180.85%	10.06%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	LAPORAN	1		0	1		0	1	71.700.000	0		0	0	0	3.350.000	1	65.470.000	1	68.820.000	100%	95.98%	2	68.820.000	200%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	LAPORAN	1		1			1		0		0		0		1		1		100%		2		200%			
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	4	750.000.000	1		0	4	40.000.000	0		0	0	0	2	19.125.000	2	20.875.000	2	40.000.000	50%	100%	3	40.000.000	75%	5.33%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah: pangan segar yang aman	Dokumen	5	750.000.000	3		0	5	40.000.000	0		0	0	0	0	19.125.000	5	20.875.000	5	40.000.000	100%	100%	8	40.000.000	160%	5.33%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.000.000	0		0	1	15.000.000	0		0	0	0	0	6.625.000	1	8.375.000	1	15.000.000	100%	100%	1	15.000.000	100%	10%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12+ 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Kota	Dokumen	1	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	12.500.000	1	12.500.000	1	25.000.000	100%	100%	1	25.000.000	100%	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	rata-rata anak	2	1.075.600.000	2	0	1,83	365.603.000	0	4.240.000	0	117.704.531	0	170.271.423	2	57.044.876	2	349.260.830	90.71%	95.53%	4	349.260.830	200%	32.47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan? yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	stakeholde rs	78	1.015.600.000	78	0	78	365.603.000	78	4.240.000	78	117.704.531	78	170.271.423	78	57.044.876	78	349.260.830	100%	95.53%	156	349.260.830	200%	34.39%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	459.000.000	1	0	1	154.200.000	0	0	0	20.400.000	0	123.600.000	1	10.200.000	1	154.200.000	100%	100%	2	154.200.000	200%	33.59%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	2	234.000.000	2	0	2	156.000.000	0	0	0	70.741.531	1	34.971.423	1	35.144.876	2	140.857.830	100%	90.29%	4	140.857.830	200%	60.2%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	60.723.075	0	0	1	55.403.000	0	4.240.000	0	26.563.000	0	11.700.000	1	11.700.000	1	54.203.000	100%	97.83%	1	54.203.000	100%	89.26%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80	11.818.353.000	77	0	80	6.385.704.000	0	0	0	995.467.500	0	3.219.989.039	77,15	1.727.994.353	77,15	5.943.450.892	96.44%	93.07%	154,15	5.943.450.892	192.69%	50.29%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	kelompok kerja	2	3.434.850.000	2	0	2	1.379.800.000	0	0	0	223.823.500	0	543.818.500	2	544.875.199	2	1.312.517.199	100%	95.12%	4	1.312.517.199	200%	38.21%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	organisasi	30	360.000.000	0	0	30	250.000.000	0	0	15	64.584.000	15	80.582.000	0	94.550.000	30	239.716.000	100%	95.89%	30	239.716.000	100%	66.59%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangsa kencana (pembangunan kependudukan dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media lainnya	dokumen	4	450.000.000	0	0	4	150.000.000	1	0	1	31.665.000	1	35.545.000	1	31.750.000	4	98.960.000	100%	65.97%	4	98.960.000	100%	21.99%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana(pembangunan kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Laporan	5	507.000.000	0	0	5	195.000.000	1	0	1	32.500.000	1	65.000.000	2	97.500.000	5	195.000.000	100%	100%	5	195.000.000	100%	38.46%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah laporan hasilpengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (Pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana)	Laporan	4	1.877.850.000	0		0	4	644.800.000	1		0	1	76.472.500	1	294.939.500	1	269.186.199	4	640.598.199	100%	99.35%	4	640.598.199	100%	34.11%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan Hasil pengendalian program KKBPK	Laporan	6	240.000.000	0		0	6	140.000.000	1		0	1	18.602.000	2	67.752.000	2	51.889.000	6	138.243.000	100%	98.75%	6	138.243.000	100%	57.6%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pelayanan KB pasca Persalinan	%	95	1.338.000.000	90		0	92	1.307.935.000	0		0	92	226.800.000	92	747.325.539	92	282.780.154	92	1.256.905.693	100%	96.1%	182	1.256.905.693	191.58%	93.94%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	orang	189	1.134.000.000	189		0	189	567.000.000	0		0	0	226.800.000	0	226.800.000	189	113.400.000	189	567.000.000	100%	100%	378	567.000.000	200%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	5.298.003.000	100		0	100	2.664.719.000	0		0	0	259.714.000	0	1.441.345.000	95	639.839.000	95	2.340.898.000	95%	87.85%	195	2.340.898.000	195%	44.18%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	4	89.100.000	4	17.308.000	4	230.600.000	0		0	1	13.150.000	1	127.345.000	0	57.435.000	2	197.930.000	50%	85.83%	6	215.238.000	150%	241.57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	1300	981.669.000	1300	315.593.500	1300	2.150.819.000	0		0	600	234.660.000	0	1.314.000.000	700	377.154.000	1300	1.925.814.000	100%	89.54%	2600	2.241.407.500	200%	228.33%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	4	54.900.000	4	18.300.000	4	24.300.000	1		0	1	11.904.000	1		0	1	10.685.000	4	22.589.000	100%	92.96%	8	40.889.000	200%	74.48%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB	unit	15	4.172.334.000	4	1.330.628.805	10	259.000.000	0		0	0	0	7		0	3	194.565.000	10	194.565.000	100%	75.12%	14	1.525.193.805	93.33%	36.55%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20	1.747.500.000	15		0	15	1.033.250.000	0		0	0	285.130.000	15	487.500.000	0	260.500.000	0	1.033.130.000	0%	99.99%	15	1.033.130.000	75%	59.12%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	2	27.000.000	2	8.076.000	2	3.750.000	0		0	0	0	0		0	2	3.750.000	2	3.750.000	100%	100%	4	11.826.000	200%	43.8%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	87	1.720.500.000	87	568.900.000	87	1.029.500.000	87		0	87	285.130.000	87	487.500.000	87	256.750.000	87	1.029.380.000	100%	99.99%	174	1.598.280.000	200%	92.9%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEIAHTERA (KS)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6	13.569.500.000	7	0	7	4.451.500.000	0		0	0	1.651.273.500	0	1.469.710.000	4,7	1.322.770.000	4,7	4.443.753.500	67.14%	99.83%	11,7	4.443.753.500	195%	32.75%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	90	13.459.500.000	88	0	88	300.000.000	0		0	88	0	88	232.750.000	88	65.170.000	88	297.920.000	100%	99.31%	176	297.920.000	195.56%	2.21%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	20	1.080.000.000	16	352.440.000	32	300.000.000	0		0	0	0	25	232.750.000	7	65.170.000	32	297.920.000	100%	99.31%	48	650.360.000	240%	60.22%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dan kota dengan kesertaan rendah	%	8	110.000.000	8	0	8	4.151.500.000	0		0	0	1.651.273.500	8	1.236.960.000	0	1.257.600.000	0	4.145.833.500	0%	99.86%	8	4.145.833.500	100%	3768.94%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	1	110.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	0		0	1	24.943.500	0		0	0	1	24.943.500	100%	99.77%	2	34.943.500	200%	31.77%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	"Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)"	Laporan	10	2.500.000.000	0	0	10	1.965.000.000	0		0	0	982.500.000	5	589.500.000	5	393.000.000	10	1.965.000.000	100%	100%	10	1.965.000.000	100%	78.6%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	"Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan"	Laporan	10	2.399.265.000	0	0	10	2.161.500.000	0		0	0	643.830.000	5	647.460.000	5	864.600.000	10	2.155.890.000	100%	99.74%	10	2.155.890.000	100%	89.86%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KECILAHIRAGAAN	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	60	10.850.000.000	209	0	50	5.600.329.951	0	39.938.313	0	1.975.177.609	0	1.171.321.666	60	1.549.811.469	60	4.736.249.057	120%	84.57%	269	4.736.249.057	448.33%	43.65%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang dikembangkan dan dibina olahraga pendidiknya	cabor	2	6.700.000.000	2	0	2	2.000.329.951	0	39.938.313	0	113.004.509	0	114.504.466	2	1.141.097.369	2	1.408.544.657	100%	70.42%	4	1.408.544.657	200%	21.02%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	8	400.000.000	191	0	2	1.400.000.000	0	0	0	1.048.776.200	0	35.200.000	2	248.377.000	2	1.332.353.200	100%	95.17%	193	1.332.353.200	2412.5%	333.09%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Persen	100	3.150.000.000	100	0	100	1.575.000.000	0	0	0	762.500.000	0	762.500.000	100	50.000.000	100	1.575.000.000	100%	100%	200	1.575.000.000	200%	50%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan Persentase olahraga tradisional yang	Persen	100	600.000.000	100	0	100	625.000.000	0	0	25	50.896.900	40	259.117.200	35	110.337.100	100	420.351.200	100%	67.26%	200	420.351.200	200%	70.06%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan	Persen	100	750.000.000	100	0	100	250.000.000	0	0	0	150.000.000	0	80	100.000.000	80	250.000.000	80%	100%	180	250.000.000	180%	33.33%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan	Persen	100	750.000.000	100	0	100	250.000.000	0	0	0	150.000.000	0	100	100.000.000	100	250.000.000	100%	100%	200	250.000.000	200%	33.33%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.04.2.01 .0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	4	750.000.000	4	0	4	250.000.000	0	0	2	150.000.000	0	2	100.000.000	4	250.000.000	100%	100%	8	250.000.000	200%	33.33%	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dilestarikan	%	75	2.271.811.500	75	0	75	735.000.000	0	0	8,63	86.418.107	17,51	128.714.884	48,86	378.433.000	75	593.565.991	100%	80.76%	150	593.565.991	200%	26.13%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Mueum yang dikelola	100%	100	2.271.811.500	100	0	100	735.000.000	0	0	11,51	86.418.107	17,51	128.714.884	70,51	378.433.000	99,53	593.565.991	99.53%	80.76%	199,53	593.565.991	199.53%	26.13%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22.06.2.01 .0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	"Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu"	Unit	410	642.600.000	410	0	410	210.000.000	0	0	4	1.820.000	0	160	81.795.500	164	83.615.500	40%	39.82%	574	83.615.500	140%	13.01%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2.22.06.2.01 .0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	"Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum"	Unit	5000	1.297.440.000	4	0	5000	525.000.000	0	0	806	84.598.107	1226	128.714.884	2900	296.637.500	4932	509.950.491	98.64%	97.13%	4936	509.950.491	98.72%	39.3%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	93	4.135.000.000	92	0	92,4	5.298.987.500	20	8.017.250	45	101.827.500	20	207.447.913	92	3.856.283.126	92	4.173.575.789	99.57%	78.76%	184	4.173.575.789	197.85%	100.93%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	%	13	2.295.000.000	9	0	12,63	358.987.500	0,02	5.943.500	1	69.515.500	2	83.776.713	12,63	135.149.647	12,63	294.385.360	100%	82%	21,63	294.385.360	166.38%	12.83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatkan Gemar Membaca di Masyarakat	%	100	1.840.000.000	95	0	95	4.940.000.000	20	2.073.750	45	32.312.000	20	123.671.200	10	3.721.133.479	95	3.879.190.429	100%	78.53%	190	3.879.190.429	190%	210.83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media/digitalisasi	%	6	75.000.000	4	0	4	30.000.000	0	640	0,5	5.199.400	0,5	993,5	3	18.655.000	3	25.487.900	75%	84.96%	7	25.487.900	116.67%	33.98%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	7	75.000.000	1	0	1	30.000.000	0	640	0	5.199.400	0	993,5	1	18.655.000	1	25.487.900	100%	84.96%	2	25.487.900	28.57%	33.98%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Subkegiatan														90.64%	88.88%													
Predikat Kinerja dan Anggaran Subkegiatan														Sangat Tinggi	Tinggi													
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program														91.77%	89.18%													
Predikat Kinerja dan Anggaran Program														Sangat Tinggi	Tinggi													
7	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan secara terpadu.			Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	86,7	83,77	84,7																				
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE Sakip	Skala	83	15.153.384.000	0	0	82,76	4.986.784.855	82,76	900.247.682	82,76	1.536.620.524	82,76	1.029.142.438	82,76	1.382.542.327	82,76	4.848.552.971	100%	97.23%	82,76	4.848.552.971	99.71%	32%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	8	291.000.000	8	0	8	83.499.500	2	0	2	11.916.600	2	6.627.750	2	60.337.250	8	78.881.600	100%	94.47%	16	78.881.600	200%	27.11%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	70.000.000	2	62.981.000	2	53.499.750	2	0	2	622,5	2	1.502.250	2	47.139.250	8	49.264.000	400%	92.08%	10	112.245.000	500%	160.35%	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	8	39.879.900	8	23.614.500	8	29.999.750	0		0	2	11.294.100	2	5.125.500	2	13.198.000	6	29.617.600	75%	98.73%	14	53.232.100	175%	133.48%	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Poin	33	12.930.000.000	33	0	33	4.599.902.255	8	881.399.050	8	1.475.639.778	8	942.267.766	9	1.227.316.615	33	4.526.623.209	100%	98.41%	66	4.526.623.209	200%	35.01%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	728	12.900.000.000	700	0	700	4.565.702.255	700	881.399.050	700	1.460.039.778	700	942.267.766	700	1.211.716.615	700	4.495.423.209	100%	98.46%	1400	4.495.423.209	192.31%	34.85%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN "	Dokumen	4	72.400.000	4	402.350.000	4	34.200.000	0	0	2	15.600.000	0	0	2	15.600.000	4	31.200.000	100%	91.23%	8	433.550.000	200%	598.83%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	52	254.178.000	50	0	50	29.954.000	12	0	12	6.008.050	12	13.531.250	14	10.058.400	50	29.597.700	100%	98.81%	100	29.597.700	192.31%	11.64%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	64.726.000	10	29.954.000	10	29.954.000	2	0	2	6.008.050	3	13.531.250	3	10.058.400	10	29.597.700	100%	98.81%	20	59.551.700	200%	92.01%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana yang layak tugas	Unit	81	328.206.000	81	0	81	103.446.400	20	0	20	13.457.899	20	16.077.700	20	26.711.000	80	56.246.599	98.77%	54.37%	161	56.246.599	198.77%	17.14%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	60.000.000	20	0	20	9.999.200	5	0	5	0	5	9.999.200	5	0	20	9.999.200	100%	100%	40	9.999.200	200%	16.67%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	15.000.000	20	0	20	3.800.000	5	0	5	0	5	0	5	3.680.000	20	3.680.000	100%	96.84%	40	3.680.000	200%	24.53%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	15.000.000	20	0	20	49.362.200	0	0	0	0	0	0	20	3.680.000	20	3.680.000	100%	7.46%	40	3.680.000	200%	24.53%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	208.206.000	20	0	20	29.994.000	5	0	5	13.457.899	5	4.180.000	5	11.070.000	20	28.707.899	100%	95.71%	40	28.707.899	200%	13.79%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	5.000.000	11	0	11	4.995.200	2	0	2	0	2	0	5	4.941.000	11	4.941.000	100%	98.91%	22	4.941.000	200%	98.82%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	70	5.000.000	0	0	10	5.295.800	1	0	1	0	4	1.898.500	4	3.340.000	10	5.238.500	100%	98.92%	10	5.238.500	14.29%	104.77%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	Lapran	26	0	26	0	26	69.998.400	6	5.898.632	6	16.569.847	6	13.006.172	8	24.972.962	26	60.447.613	100%	86.36%	52	60.447.613	200%	0%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	0	0	0	2	4.999.000	0	0	0	0	0	0	2	4.686.000	2	4.686.000	100%	93.74%	2	4.686.000	100%	0%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	6	65.000.000	7	112.334.699	12	64.999.400	3	5.898.632	3	16.569.847	3	13.006.172	3	20.286.962	12	55.761.613	100%	85.79%	19	168.096.312	316.67%	258.61%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	25	0	25	0	25	99.984.300	6	12.950.000	6	13.028.350	6	37.631.800	7	33.146.100	25	96.756.250	100%	96.77%	50	96.756.250	200%	0%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	11	97.000.000	11	164.235.732	11	99.984.300	2	12.950.000	3	13.028.350	3	37.631.800	3	33.146.100	11	96.756.250	100%	96.77%	22	260.991.982	200%	269.06%	DINAS PERHUBUNGAN		
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	27.365.500.000	85	0	85,25	11.539.636.809	0	1.214.108.802	0	2.179.022.423	0	1.743.056.950	80,9	2.303.605.665	80,9	7.439.793.840	94.9%	64.47%	165,9	7.439.793.840	192.91%	27.19%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	240.000.000	100	0	100	96.321.534	0	0	40	0	70	2.030.700	100	4.250.000	100	6.280.700	100%	6.52%	200	6.280.700	200%	2.62%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	15	150.000.000	5		0	5	66.367.877	0		0	2	1.141.700	1		0	5	1.141.700	100%	1.72%	10	1.141.700	66.67%	0.76%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	75.000.000	1		0	1	29.953.657	0		0	0	889	1	4.250.000	1	5.139.000	100%	17.16%	2	5.139.000	66.67%	6.85%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik	100	20.160.000.000	100		0	100	5.619.106.786	0	1.137.403.464	30	1.737.151.430	60	1.149.787.954	100	1.433.105.670	100	5.457.448.518	100%	97.12%	200	5.457.448.518	200%	27.07%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	174	20.155.000.000	58		0	58	5.619.106.786	58	1.137.403.464	58	1.737.151.430	58	1.149.787.954	58	1.433.105.670	58	5.457.448.518	100%	97.12%	116	5.457.448.518	66.67%	27.08%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Kompetensinya Meningkat	Persen	100	180.000.000	100		0	100	70.980.000	0		0	30	17.800.000	100	19.603.000	100	37.403.000	100%	52.7%	200	37.403.000	200%	20.78%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	180.000.000	30		0	30	60.000.000	0		0	0	10	17.800.000	30	19.603.000	30	37.403.000	100%	62.34%	60	37.403.000	200%	20.78%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	10.000.000	0		0	1	10.980.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	Persen	100	730.000.000	100		0	100	346.500.000	0		0	30	87.603.847	70	71.050.041	100	127.971.371	100	286.625.259	100%	82.72%	200	286.625.259	200%	39.26%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	240.000.000	1		0	1	80.000.000	0		0	0	10.853.805	1	27.549.555	0	20.142.259	1	58.545.619	100%	73.18%	2	58.545.619	66.67%	24.39%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	70.000.000	1		0	1	50.000.000	0		0	0	4.501.460	0	845	1	19.879.000	1	25.225.460	100%	50.45%	2	25.225.460	66.67%	36.04%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	45.000.000	1		0	1	16.500.000	0		0	0	1.004.494	0	4.042.563	1	4.000.000	1	9.047.057	100%	54.83%	2	9.047.057	66.67%	20.1%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	375.000.000	50		0	50	200.000.000	0		0	20	71.244.088	30	38.612.923	0	83.950.112	50	193.807.123	100%	96.9%	100	193.807.123	66.67%	51.68%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Persen	100	520.000.000	100		0	100	3.577.582.541	0		0	30	0	70	0	100	159.597.750	100	159.597.750	100%	4.46%	200	159.597.750	200%	30.69%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	24	295.000.000	8		0	8	253.415.541	0		0	0	0	0	8	98.520.000	8	98.520.000	100%	38.88%	16	98.520.000	66.67%	33.4%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	65.000.000	106		0	9	61.161.000	0		0	0	0	0	9	61.077.750	9	61.077.750	100%	99.86%	115	61.077.750	766.67%	93.97%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	19	2.400.000.000	16		0	17	1.675.706.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	16	0	84.21%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	19	1.750.000.000	16		0	17	1.587.300.000	0		0	0	0	0	17	0	17	0	100%	0%	33	0	173.68%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	100	3.340.000.000	100		0	100	1.051.000.000	10	76.705.338	30	233.575.193	70	320.875.855	100	305.795.600	100	936.951.986	100%	89.15%	200	936.951.986	200%	28.05%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	18	825.000.000	6		0	6	275.000.000	0	19.705.338	0	49.075.193	0	61.675.855	6	44.495.600	6	174.951.986	100%	63.62%	12	174.951.986	66.67%	21.21%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2.475.000.000	5		0	5	776.000.000	0	57.000.000	0	184.500.000	0	259.200.000	5	261.300.000	5	762.000.000	100%	98.2%	10	762.000.000	66.67%	30.79%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Persen	100	2.195.500.000	100		0	100	778.145.948	0		0	30	120.691.953	70	181.512.400	100	253.282.274	100	555.486.627	100%	71.39%	200	555.486.627	200%	25.3%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	113.500.000	7		0	7	50.000.000	0		0	2	8.100.000	2	8.827.000	3	11.350.000	7	28.277.000	100%	56.55%	14	28.277.000	66.67%	24.91%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	45	900.000.000	15		0	15	229.618.146	0		0	1	12.480.500	7	73.035.400	7	31.982.274	15	117.498.174	100%	51.17%	30	117.498.174	66.67%	13.06%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	18	255.000.000	3		0	6	70.527.800	0		0	1	761,453	2		300	3	11.150.000	6	12.211.453	100%	17.31%	9	12.211.453	50%	4.79%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	1		0	1	428.000.002	0		0	0	99.350.000	0	99.350.000	1	198.800.000	1	397.500.000	100%	92.87%	2	397.500.000	66.67%	113.57%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	16.542.493.009	100		0	100	5.618.906.766	98,31	1.097.624.476	98,31	993.575.438	98,31	1.293.683.472	100	1.232.618.204	100	4.617.501.590	100%	82.18%	200	4.617.501.590	200%	27.91%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100		100			100		100		100		100		100		100		100%		200		200%				
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	80		80			80		4		16		32		44		44		55%		124		155%				
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	100		100			100		22,56		34,46		50,91		76,93		76,93		76.93%		176,93		176.93%				
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Perencanaan	4	588.900.000	4		0	4	269.800.000	4		0	4	13.177.750	4	71.362.000	4	68.045.500	4	152.585.250	100%	56.55%	8	152.585.250	200%	25.91%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	450.000.000	3		0	3	164.000.000	1		0	2	5.657.750	2	63.367.500	3	34.929.000	3	103.954.250	100%	63.39%	6	103.954.250	66.67%	23.1%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	56	16.500.000	59		0	55	5.000.000	56		0	56	1.235.000	56	1.952.500	55	728	55	3.915.500	100%	78.31%	114	3.915.500	203.57%	23.73%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	56	14.400.000	22		0	55	4.800.000	56		0	56	1.233.000	56	1.915.000	55	640	55	3.788.000	100%	78.92%	77	3.788.000	137.5%	26.31%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	108.000.000	3		0	3	96.000.000	2		0	2	5.052.000	2	4.127.000	3	31.748.500	3	40.927.500	100%	42.63%	6	40.927.500	66.67%	37.9%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	1	9.772.743.009	1		0	1	3.503.094.826	1	942.222.171	1	792.005.008	1	953.545.964	1	725.242.086	1	3.413.015.229	100%	97.43%	2	3.413.015.229	200%	34.92%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/BULAN	33	9.772.743.009	33		0	33	3.503.094.826	33	942.222.171	33	792.005.008	33	953.545.964	33	725.242.086	33	3.413.015.229	100%	97.43%	66	3.413.015.229	200%	34.92%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	60	892.150.000	36		0	60	79.000.000	3		0	12	23.481.483	24	8.180.000	33	18.563.000	33	50.224.483	55%	63.58%	69	50.224.483	115%	5.63%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	825.000.000	40		0	60	79.000.000	3		0	9	23.481.483	12	8.180.000	9	18.563.000	33	50.224.483	55%	63.58%	73	50.224.483	121.67%	6.09%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	5	963.000.000	5		0	5	304.677.086	1		0	3	33.506.485	4	61.623.776	5	113.558.356	5	208.688.617	100%	68.5%	10	208.688.617	200%	21.67%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.000.000	10		0	12	5.000.000	0		0	0	0	0	0	12	3.792.500	12	3.792.500	100%	75.85%	22	3.792.500	183.33%	21.07%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	126.000.000	64	0	72	43.000.000	0	0	0	0	13	7.320.500	29	17.260.100	42	24.580.600	58.33%	57.16%	106	24.580.600	147.22%	19.51%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	89	99.000.000	12	0	89	31.111.940	10	0	15	3.456.000	13	2.958.000	0	0	38	6.414.000	42.7%	20.62%	50	6.414.000	56.18%	6.48%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	120.000.000	7	0	7	40.000.000	0	0	3	8.049.250	3	8.250.000	1	9.100.000	7	25.399.250	100%	63.5%	14	25.399.250	200%	21.17%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	600.000.000	80	0	80	185.565.146	16	0	15	22.001.235	28	43.095.276	18	83.405.756	77	148.502.267	96.25%	80.03%	157	148.502.267	196.25%	24.75%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Prasarana	3	1.203.000.000	3	0	1	286.484.854	0	0	0	0	1	19.100.000	1	35.700.000	1	54.800.000	100%	19.13%	4	54.800.000	133.33%	4.56%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	55	660.000.000	15	0	78	286.484.854	0	0	0	0	6	19.100.000	10	35.700.000	16	54.800.000	20.51%	19.13%	31	54.800.000	56.36%	8.3%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	3	2.132.700.000	3	0	3	747.900.000	3	141.222.305	3	110.694.712	3	158.793.432	3	176.780.762	3	587.491.211	100%	78.55%	6	587.491.211	200%	27.55%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	27.000.000	2	0	2	12.000.000	2	0	2	708,75	2	675	2	0	2	1.383.750	100%	11.53%	4	1.383.750	200%	5.13%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	217	234.000.000	6	0	217	112.000.000	54	21.880.768	54	14.873.780	54	29.378.394	55	6.980.762	217	73.113.704	100%	65.28%	223	73.113.704	102.76%	31.25%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	1.871.700.000	11	0	30	623.900.000	30	119.341.537	30	95.112.182	30	128.740.038	30	169.800.000	30	512.993.757	100%	82.22%	41	512.993.757	136.67%	27.41%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan	3	990.000.000	3	0	3	427.950.000	1	14.180.000	2	20.710.000	1	21.078.300	3	94.728.500	3	150.696.800	100%	35.21%	6	150.696.800	200%	15.22%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	450.000.000	5	0	5	150.000.000	5	14.180.000	5	0	5	21.078.300	5	68.293.500	5	103.551.800	100%	69.03%	10	103.551.800	200%	23.01%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	90.000.000	25	0	162	50.000.000	0	0	41	20.710.000	0	0	51	26.435.000	92	47.145.000	56.79%	94.29%	117	47.145.000	117%	52.38%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	19	450.000.000	16	0	19	227.950.000	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	42.11%	0%	24	0	126.32%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	40	37.800.000.000	24	0	30	3.654.928.230	0	5.000.000	0	181.993.270	4,67	1.486.434.337	23,28	1.039.259.377	23,28	2.712.686.984	77,6%	74.22%	47,28	2.712.686.984	118.2%	7.18%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	34		19		22		0		0		0		18,56		18,56		84,36%		37,56		110.47%		
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88		86		86,15		21,74		21,34		40		3,07		86,15		100%		172,15		195.63%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab											
									I		II		III		IV																	
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp																
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan Pengaman Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	Persen	100	22.800.000.000	100		0	100	2.208.327.230	0		5.000.000	0		10.000.000	29,63	644.434.600	70,37	829.927.975	100	1.489.362.575	100%	67.44%	200	1.489.362.575	200%	6.53%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	150	550.000.000	50		0	27	49.995.000	5		5.000.000	8		10.000.000	5	4.273.100	9	30.191.900	27	49.465.000	100%	98.94%	77	49.465.000	51.33%	8.99%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	5	600.000.000	1		0	4	388.494.977	0		0	0		0	2	212.846.500	2	2.723.000	4	215.569.500	100%	55.49%	5	215.569.500	100%	35.93%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	KM	2	6.000.000.000	0		0	0,5	1.145.637.253	0		0	0		0	0,11	279.945.000	0,18	441.719.625	0,29	721.664.625	58%	62.99%	0,29	721.664.625	14.5%	12.03%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0	3.000.000.000	0		0	0,08	124.200.000	0		0	0		0	0		0	0,03	3.204.700	0,03	3.204.700	37.5%	2.58%	0,03	3.204.700	0%	0.11%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dibelah	KM	1	3.000.000.000	0		0	0,2	500.000.000	0,07		0	0,07		0	0		0	0,06	352.088.750	0,2	499.458.750	100%	99.89%	0,2	499.458.750	20%	16.65%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	Persen	100	15.000.000.000	100		0	100	1.446.601.000	21,74		0	28,26		171.993.270	49	841.999.737	1	209.331.402	100	1.223.324.409	100%	84.57%	200	1.223.324.409	200%	8.16%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	KM	5	4.450.000.000	1		0	0,3	350.000.000	0		0	0,075		19.976.670	0,225	320.941.004	0	5.365.835	0,3	346.283.509	100%	98.94%	1,3	346.283.509	26%	7.78%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	KM	6	5.100.000.000	2		0	0,35	549.994.900	0		0	0,03		29.381.700	0,32	343.759.769	0	176.853.431	0,35	549.994.900	100%	100%	2,35	549.994.900	39.17%	10.78%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dibelah	KM	3	1.750.000.000	3	1.786.937.500	0,5	546.606.100	0,025		0	0,25		122.634.900	0,225	177.298.964	0	27.112.136	0,5	327.046.000	100%	59.83%	3,5	2.113.983.500	116.67%	120.8%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	68	114.930.548.588	98		0	67,09	34.590.884.900	0		0	0,09		165.731.410	45,89	1.044.604.560	63,68	22.292.446.550	63,68	23.502.782.520	94.92%	67.95%	161,68	23.502.782.520	237.76%	20.45%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	SPAM	7	114.930.548.588	10		0	7	34.590.884.900	0		0	1		165.731.410	4	1.044.604.560	7	22.292.446.550	7	23.502.782.520	100%	67.95%	17	23.502.782.520	242.86%	20.45%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	3	600.000.000	3	192.995.000	4	650.000.000	0		0	1		82.361.100	1	4.046.000	0	7.075.000	2	93.482.100	50%	14.38%	5	286.477.100	166.67%	47.75%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	50	2.047.140.000	186	21.426.265.078	89	11.838.500.000	0		0	0		65.138.460	0	68.758.200	63	6.483.598.500	63	6.617.495.160	70.79%	55.9%	249	28.043.760.238	498%	1369.9%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/detik	76	1.530.000.000	19	2.678.766.813	71	15.165.667.000	0		0	0		5.340.600	2	258.299.660	64	10.704.317.400	66	10.967.957.660	92.96%	72.32%	85	13.646.724.473	111.84%	891.94%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	SR	495	500.000.000	895	237.464.000	495	2.877.083.000	0		0	0		0	462	659.868.050	33	2.160.856.750	495	2.820.724.800	100%	98.04%	1390	3.058.188.800	280.81%	611.64%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV			k	Rp		k	Rp							
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k			Rp		k	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	9	504.724.000	7	227.799.200	32	3.099.224.000	0		0	0	38.061.900	28	2.117.465.000	28	2.155.526.900	87.5%	69.55%	35	2.383.326.100	388.89%	472.2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	6	860.410.900	2	845.259.000	18	860.410.900	0		0	0	1.155.000	18	5.177.000	0	810.948.900	18	817.280.900	100%	94.99%	20	1.662.539.900	333.33%	193.23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.03.2.01.0030	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	100.000.000	1	87.123.197	1	100.000.000	0		0	0	11.736.250	1	10.393.750	0	8.185.000	1	30.315.000	100%	30.32%	2	117.438.197	200%	117.44%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas daya tampung TPA, TPS3R, dan TPS	Ton	300726	6.746.518.550	150470	0	150542	592.832.000	0		0	0	317.632.200	155678	104.188.000	155678	421.820.200	103.41%	71.15%	306148	421.820.200	101.8%	6.25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA, TPS3R, dan TPS yang beroperasi	unit	58	6.746.518.550	40	0	40	592.832.000	27		0	27	317.632.200	39	104.188.000	39	421.820.200	97.5%	71.15%	79	421.820.200	136.21%	6.25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	unit	68	4.335.972.550	193	4.417.500.150	61	592.832.000	0		0	1	0	317.632.200	39	104.188.000	58	421.820.200	95.08%	71.15%	251	4.839.320.350	369.12%	111.61%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96	38.747.100.700	95	0	95,22	13.761.135.700	0		0	11,22	30.210.000	66,69	8.588.424.300	94,58	3.719.956.700	94,58	12.338.591.000	99.33%	89.66%	189,58	12.338.591.000	197.48%	31.84%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	SPALD	13	38.747.100.700	13	0	10	13.761.135.700	0		0	3	30.210.000	5	8.588.424.300	6	3.719.956.700	6	12.338.591.000	60%	89.66%	19	12.338.591.000	146.15%	31.84%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	750.000.000	1	0	2	650.000.000	0		0	0	0	1	53.979.300	0	136.351.700	1	190.331.000	50%	29.28%	2	190.331.000	100%	25.38%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	17	300.000.000	17	90.881.250	5	100.000.000	0		0	0	17.000.000	5	58.900.000	0	6.075.000	5	81.975.000	100%	81.98%	22	172.856.250	129.41%	57.62%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	35	300.000.000	35	5.831.000	35	100.000.000	0		0	35	3.815.000	0	0	0	35	3.815.000	100%	3.82%	70	9.646.000	200%	3.22%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kelembagaan	Penyelenggara	1	120.000.000	1	67.598.000	1	100.000.000	0		0	0	47.550.000	0	7.600.000	1	55.150.000	100%	55.15%	2	122.748.000	200%	102.29%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	300.000.000	0	0	2	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	unit	1	900.000.000	0	0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	40	300.000.000	0	0	40	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M ³ /Hari	30	1.200.000.000	24	707.279.400	30	1.590.033.700	0		0	0	9.395.000	23	1.127.145.000	7	263.175.000	30	1.399.715.000	100%	88.03%	54	2.106.994.400	180%	175.58%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang	M ² /Hari	221	11.000.000.000	213	9.343.040.650	221	10.621.102.000	0		0	0	0	143	7.300.850.000	78	3.256.755.000	221	10.557.605.000	100%	99.4%	434	19.900.645.650	196.38%	180.91%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang	Dokumen	1	200.000.000	0		1	200.000.000	0		0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	100%	25%	1	50.000.000	100%	25%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	1005	160.950.000.000	990		1000	3.513.290.500	0		0	0	105.110.000	0	1.246.492.800	1000	1.083.134.190	1000	2.434.736.990	100%	69.3%	1990	2.434.736.990	198.01%	1.51%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Prosentase Panjang Sistem Drainase yang Dikerjakan	Persen	18	160.950.000.000	4		6	3.513.290.500	0		0	1	105.110.000	2	1.246.492.800	3	1.083.134.190	6	2.434.736.990	100%	69.3%	10	2.434.736.990	55.56%	1.51%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang	Dokumen	6	300.000.000	1		1	290.102.240	0		0	0,35	5.810.000	0,61		0	0,04	201.905.440	1	207.715.440	100%	71.6%	2	207.715.440	33.33%	69.24%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang di	Sistem drainase perkotaan	1	9.000.000.000	1		1	400.000.000	0		0	0,14		0	0,08	195.888.900	1	199.378.800	1	395.267.700	100%	98.82%	2	395.267.700	200%	4.39%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Sistem drainase perkotaan	1	4.125.000.000	1		1	600.000.000	0		0	0,26	99.300.000	0,53	199.098.500	1	103.501.000	1	401.899.500	100%	66.98%	2	401.899.500	200%	9.74%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	9	750.000.000	3		3	2.000.000	0		0	0		0	475	0	1.520.000	0	1.995.000	0%	99.75%	3	1.995.000	33.33%	0.27%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	66000	73.500.000.000	22000		189	2.221.188.260	0		0	27,59		0	36,99	851.030.400	124,42	576.828.950	189	1.427.859.350	100%	64.28%	22189	1.427.859.350	33.62%	1.94%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	%	100	16.354.500.000	100		33,33	4.407.000.000	5,42		0	16,09	37.187.750	23,31	357.809.240	29,06	2.330.881.089	29,06	2.725.878.079	87.19%	61.85%	129,06	2.725.878.079	129.06%	16.67%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan	2	16.354.500.000	2		2	4.407.000.000	1		0	1	37.187.750	2	357.809.240	2	2.330.881.089	2	2.725.878.079	100%	61.85%	4	2.725.878.079	200%	16.67%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	600	800.000.000	244	132.758.500	200	250.000.000	33		0	65	37.187.750	43	49.670.000	35	86.477.100	176	173.334.850	88%	69.33%	420	306.093.350	70%	38.26%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Dokumen	6	15.300.000.000	0	5.276.067.455	3	4.157.000.000	0		0	0		0	1	308.139.240	1	2.244.403.989	2	2.552.543.229	66.67%	61.4%	2	7.828.610.684	33.33%	51.17%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	%	100	6.181.800.000	0		0	33,33	121.225.396.050	0	0	0	588.254.160	31,71	69.914.895.000	32,89	12.391.641.810	32,89	82.894.790.970	98.68%	68.38%	32,89	82.894.790.970	32,89%	1340.95%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	Penataan Bangunan	1	6.181.800.000	0	1	121.225.396.050	0	0	0	588.254.160	1	69.914.895.000	1	12.391.641.810	1	82.894.790.970	100%	68.38%	2	82.894.790.970	200%	1340.95%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	266	55.639.961.400	577	91.172.564.420	535	121.225.396.050	0	0	0	588.254.160	509	69.914.895.000	19	12.391.641.810	528	82.894.790.970	98.69%	68.38%	1105	174.067.355.390	415.41%	312.85%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85	105.931.989.345	79		0	83,14	18.774.792.624	0	0	0	84.795.822	58,35	6.637.437.518	58,35	7.124.205.174	58,35	13.846.438.514	70.18%	73.75%	137,35	13.846.438.514	161.59%	13.07%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio Proyek yang menjadi kewenangannya tanpa keterkaitan konstruksi	%	85		0			83,14		0	0		58,35		58,35		58,35		58,35		70.18%		58,35		68.65%	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara	Persen	9	105.931.989.345	3		0	3	18.774.792.624	0	0	0	84.795.822	0,19	6.637.437.518	0,49	7.124.205.174	0,68	13.846.438.514	22.67%	73.75%	3,68	13.846.438.514	40.89%	13.07%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	KM	1000	6.500.000.000	1000		0	1000	765.000.000	0	0	0	827	0	173	748.076.100	1000	748.076.100	100%	97.79%	2000	748.076.100	200%	11.51%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	4	20.000.000.000	7		0	1,4	3.408.983.574	0	0	0,54	64.449.542	0,1	841.394.758	0	1.973.080.068	0,64	2.878.924.368	45.71%	84.45%	7,64	2.878.924.368	191%	14.39%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	3	13.800.000.000	6		0	1,85	5.124.233.079	0	0	0,248	0	0,766	1.295.278.220	0	892.461.548	1,014	2.187.739.768	54.81%	42.69%	7,014	2.187.739.768	233.8%	15.85%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2	17.000.000.000	1		0	0,85	202.670.000	0	0	0	0,2	91.462.200	0,016	100.167.760	0,216	191.629.960	25.41%	94.55%	1,216	191.629.960	60.8%	1.13%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	1	18.451.989.345	4		0	0,4	7.062.929.864	0	0	0	0,4	3.662.252.000	0	2.659.249.398	0,4	6.321.501.398	100%	89.5%	4,4	6.321.501.398	440%	34.26%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	4	10.000.000.000	4		0	1,8	1.026.659.700	0	0	0,53	18.894.400	0,66	399.170.340	0,073	424.950.500	1,263	843.015.240	70.17%	82.11%	5,263	843.015.240	131.58%	8.43%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Buah	3	14.000.000.000	15		0	1	734.316.407	0	0	0	1.451.880	0	149.095.000	1	204.918.600	1	355.465.480	100%	48.41%	16	355.465.480	533.33%	2.54%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Buah	9	2.800.000.000	8		0	3	450.000.000	0	0	0	0	198.785.000	2	121.301.200	2	320.086.200	66.67%	71.13%	10	320.086.200	111.11%	11.43%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96	1.575.000.000	72		0	92,16	500.000.000	0	0	0	31.145.000	57,14	162.384.479	81,1	115.086.016	81,1	308.615.495	88%	61.72%	153,1	308.615.495	159.48%	19.59%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rasio Proyek yang menjadi kewenangannya tanpa keterkaitan konstruksi	%	100		100			100		0	11,94		29,85		60,7		60,7		60,7%		160,7		160,7%			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Penyelengaraan	6	975.000.000	2		0	2	300.000.000	0	0	0	2	157.710.647	2	80.772.939	2	238.483.586	100%	79.49%	4	238.483.586	66.67%	24.46%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	300	600.000.000	59	57.283.549	100		150.000.000	0	0	0	75	55.804.647	25	40.395.439	100	96.200.086	100%	64.13%	159	153.483.635	53%	25.58%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	300	350.000.000	51	75.718.200	100		150.000.000	0	0	0	62	101.906.000	26	40.377.500	88	142.283.500	88%	94.86%	139	218.001.700	46.33%	62.29%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	Prosen	100	600.000.000	17		0	71,14	200.000.000	0		0	8,49	31.145.000	21,24	4.673.832	43,18	34.313.077	43,18	70.131.909	60,7%	35,07%	60,18	70.131.909	60,18%	11,69%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Diawasi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Diawasi	Dokumen	3	75.000.000	0		0	1	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0		0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Diawasi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Diawasi	Lembaga	100	300.000.000	70	53.297.500	100	100.000.000	0		0	24	31.145.000	0	3.498.532	50	27.239.277	74	61.882.809	74%	61,88%	144	115.180.309	144%	38,39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi	Paket Pekerjaan	100	225.000.000	0		0	100	75.000.000	0		0	0	0	36	1.175.300	12	7.073.800	48	8.249.100	48%	11%	48	8.249.100	48%	3,67%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	6.865.000.000	85		0	92,3	1.451.500.000	10		0	11	27.588.100	15	19.597.900	20	331.770.000	20	378.956.000	21,67%	26,11%	105	378.956.000	105%	5,52%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW dan RTRR	Persen	45	2.750.000.000	5		0	5	160.000.000	0		0	0	14.153.200	0,5	6.597.900	2,2	119.080.150	2,7	139.831.250	54%	87,39%	7,7	139.831.250	17,11%	5,08%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.350.000.000	1		0	1	160.000.000	0		0	0,3	14.153.200	0,2	6.597.900	0,5	119.080.150	1	139.831.250	100%	87,39%	2	139.831.250	40%	10,36%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Dokumen	55	340.000.000	0		0	1	0	0,33		0	0,17	0	0,33	0	0,17	0	1	0	100%	0%	1	0	1,82%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemanfaatan Ruang Daerah yang di Kendalikan	Persen	60	675.000.000	20		0	20	279.000.000	0		0	5	12.968.000	5	13.000.000	10	197.972.000	20	223.940.000	100%	80,27%	40	223.940.000	66,67%	33,18%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	3	410.000.000	1		0	1	189.000.000	0,33		0	0,17	10.000.000	0,17	13.000.000	0,33	123.728.000	1	146.728.000	100%	77,63%	2	146.728.000	66,67%	35,79%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan pendapat/pelaku RTRW	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	120.000.000	0	150.000.000	1	90.000.000	0,1		0	0,3	2.968.000	0,15	0	0,45	74.244.000	1	77.212.000	100%	85,79%	1	227.212.000	100%	189,34%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perencanaan Tata Ruang Daerah yang di kendalikan	Persen	38	3.100.000.000	7		0	18	1.012.500.000	0		0	0,35	466,9	0,9	0	1,2	14.717.850	1,2	15.184.750	6,67%	1,5%	8,2	15.184.750	21,58%	0,49%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	44	1.200.000.000	0		22,22	767.500.000	3,17	35.000.000	6,35	52.500.000	11,64	70.000.000	11,64	35.000.000	11,64	192.500.000	52,39%	25,08%	11,64	192.500.000	26,45%	16,04%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	44		0		22,22		0		0		0			0		0		0%		0		0%			
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	%	100	5.250.000.000	77	612.500.000	22,22	717.500.000	3,17	35.000.000	6,35	52.500.000	11,64	70.000.000	11,64	35.000.000	11,64	192.500.000	52,39%	26,83%	88,64	805.000.000	88,64%	15,33%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	100	1.750.000.000	32	560.000.000	20	700.000.000	2	17.500.000	3	52.500.000	5	70.000.000	0	35.000.000	10	175.000.000	50%	25%	42	735.000.000	42%	42%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	40	1.750.000.000	15	262.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1	17.500.000	100%	100%	16	280.000.000	40%	16%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
							I				II			III			IV					14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%	
							k	Rp			k	Rp		k	Rp		k	Rp					k		Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	100	50.000.000	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi	Dokumen	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	100	23.174.473.978	26	0	100	1.029.000.000	0	0	50	116.851.950	50	188.069.250	83,33	425.370.000	83,33	730.291.200	83.33%	70.97%	109,33	730.291.200	109.33%	3.15%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang	prosentase	100	1.650.000.000	50	0	33	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	50	0	50%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	300.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan	Penataan	3	1.350.000.000	3	0	1	385.000.000	0	0	0	0	0	1	228.125.950	1	228.125.950	100%	59.25%	4	228.125.950	133.33%	16.9%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terealisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terealisasi	Dokumen	1	0	4	0	2	385.000.000	0	0	0	0	0	2	228.125.950	2	228.125.950	100%	59.25%	6	228.125.950	600%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Kualitas	3	20.174.473.978	2	0	1	594.000.000	0	0	1	116.851.950	1	188.069.250	1	197.244.050	1	502.165.250	100%	84.54%	3	502.165.250	100%	2.49%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3	2.572.500.000	3	0	3	594.000.000	0	0	3	116.851.950	3	188.069.250	3	197.244.050	3	502.165.250	100%	84.54%	6	502.165.250	200%	19.52%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1	13.500.000.000	3	0	2,42	4.987.500.000	0	0	0	1,35	3.342.500.000	2,42	1.645.000.000	2,42	4.987.500.000	100%	100%	5,42	4.987.500.000	542%	36.94%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Perbaikan RTLH	1	13.500.000.000	1	0	1	4.987.500.000	0	0	0	1	3.342.500.000	1	1.645.000.000	1	4.987.500.000	100%	100%	2	4.987.500.000	200%	36.94%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit rumah	730	13.000.000.000	347	6.072.500.000	285	4.987.500.000	0	0	0	159	3.342.500.000	126	1.645.000.000	285	4.987.500.000	100%	100%	632	11.060.000.000	86.58%	85.08%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	28	200.000.000	6	0	16,67	50.000.000	0	0	0	7.204.750	0	8,34	0	8,34	7.204.750	50.03%	14.41%	14,34	7.204.750	51.21%	3.6%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Prosen	100	200.000.000	22	0	33	50.000.000	0	0	0	7.204.750	0	16,67	0	16,67	7.204.750	50.52%	14.41%	38,67	7.204.750	38.67%	3.6%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab															
									I		II		III		IV																					
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp																				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18								
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	6	175.000.000	1	33.500.000	2	50.000.000	0		0		0	7.204.750	0		0		1		0		1		7.204.750	50%	14.41%	2		40.704.750	33.33%	23.26%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	100	6.300.000.000	0		33,33	250.000.000	0		0		0	0	0		0		0		0		0		0	0%	0%	0		0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Koordinasi	1	6.300.000.000	0		0	1		250.000.000	0		0	0	0		0		0		0		0		0	0%	0%	0		0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	6.300.000.000	0		0	1		250.000.000	0		0	0	0		0		0		0		0		0	0%	0%	0		0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	Persentase	4	25.058.230.569	4		4	4		7.181.359.909	4		1.333.113.531	4		1.752.340.290	4		1.831.038.814	4		2.038.864.022	4		6.955.356.657	100%	96.85%	8		6.955.356.657	200%	27.76%	DINAS PERHUBUNGAN
				Tingkat capaian rencana induk jaringan	Persentase	42		40			40		10		10		10		10		10		10		40		100%		80		190.48%					
				Realisasi retribusi parkir	Rupiah	2E+09		0		5E+09		1E+09		1E+09		1E+09		1E+09		2E+09		5E+09		111.79%		5E+09		244.67%								
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.535.000.000	3		0	3		890.320.702	0		8.987.000	1		150.556.350	1		412.707.633	1		187.173.422	1		759.424.405	33.33%	85.3%	4		759.424.405	133.33%	29.96%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun	Unit	40	1.800.000.000	40		0	40		584.999.763	10		0	10		0	10		394.148.633	10		84.504.786	40		478.653.419	100%	81.82%	80		478.653.419	200%	26.59%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan dipelihara	Unit	733	15.000.000	730		0	730		305.320.939	182		8.987.000	182		150.556.350	182		18.559.000	184		102.668.636	730		280.770.986	100%	91.96%	1460		280.770.986	199.18%	1871.81%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Unit	1	960.000.000	1		0	1		9.599.800	0		1.144.203	0		1.149.982	0		1.149.982	1		3.609.352	1		7.053.519	100%	73.48%	2		7.053.519	200%	0.73%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	150.000.000	1		0	1		9.599.800	0		1.144.203	0		1.149.982	0		1.149.982	1		3.609.352	1		7.053.519	100%	73.48%	2		7.053.519	200%	4.7%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	Dokumen	13	17.348.872.200	13		0	13		5.900.679.810	3		1.307.518.700	3		1.581.004.940	3		1.381.439.300	4		1.551.372.260	13		5.821.335.200	100%	98.66%	26		5.821.335.200	200%	33.55%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	17.318.872.200	12		0	12		5.900.679.810	3		1.307.518.700	3		1.581.004.940	3		1.381.439.300	3		1.551.372.260	12		5.821.335.200	100%	98.66%	24		5.821.335.200	200%	33.61%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaporkan	Laporan	12	2.215.758.369	12		0	12		353.759.747	3		15.463.628	3		19.629.018	3		35.741.899	3		269.805.238	12		340.639.783	100%	96.29%	24		340.639.783	200%	15.37%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	30	105.000.000	30		0	30		1.530.000	7		0	7		1.530.000	7		0	9		0	30		1.530.000	100%	100%	60		1.530.000	200%	1.46%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	12	642.000.000	12		0	12		152.229.750	3		0	3		0	3		0	3		149.618.000	12		149.618.000	100%	98.28%	24		149.618.000	200%	23.3%	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV																	
									1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Unit	11	568.758.369	11		0	11	199.999.997	1	15.463.628	3	18.099.018	3	35.741.899	4	120.187.238	11	189.491.783	100%	94.75%	22	189.491.783	200%	33.32%	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Manajemen ddan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Dokumen	3	378.600.000	3		0	3	26.999.850	0		0	0	1		0	2	26.903.750	3	26.903.750	100%	99.64%	6	26.903.750	200%	7.11%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	2	15.000.000	2		0	2	5.000.000	0		0	0	0		0	2	4.965.500	2	4.965.500	100%	99.31%	4	4.965.500	200%	33.1%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	18.600.000	2		0	2	18.999.850	0		0	0	0		0	2	18.942.250	2	18.942.250	100%	99.7%	4	18.942.250	200%	101.84%	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	30.000.000	12		0	12	3.000.000	3		0	3		0	3		0	3	2.996.000	12	2.996.000	100%	99.87%	24	2.996.000	200%	9.99%	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							85.12%	64.76%								
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							Tinggi	Rendah								
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																							78.64%	63.96%								
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																							Tinggi	Rendah								
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana.			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70	64,04	66	64,78																							
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100	120,85	115	97,9																							
		2.11.01	Nilai Sakip	Skala	82	30.583.849.706	81		0	81,5	9.522.443.310	0	1.399.449.267	0	3.302.557.179	0	2.008.199.468	82,6	2.554.677.384	82,6	9.264.883.298	101.35%	97.3%	163,6	9.264.883.298	199.51%	30.29%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Dokumen	101	348.339.500	126		0	108	85.028.000	52	8.574.000	60	8.890.000	52	8.900.000	43	47.622.500	207	73.986.500	191.67%	87.01%	333	73.986.500	329.7%	21.24%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	168.300.000	11	132.021.450	2	47.618.000	0	1.213.000	1	0	0	2.640.000	1	36.783.500	2	40.636.500	100%	85.34%	13	172.657.950	650%	102.59%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	14	132.344.000	33	57.791.950	60	37.410.000	21	7.361.000	15	8.890.000	15	6.260.000	13	10.839.000	64	33.350.000	106.67%	89.15%	97	91.141.950	692.86%	68.87%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	14	25.998.260.184	14		0	25	8.369.597.974	3	1.250.190.711	9	3.126.890.597	7	1.770.634.076	9	2.068.661.340	28	8.216.376.724	112%	98.17%	42	8.216.376.724	300%	31.6%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	102	25.738.353.283	91	22.017.656.669	90	8.369.597.974	90	1.250.190.711	91	3.126.890.597	90	1.770.634.076	89	2.068.661.340	89	8.216.376.724	98.89%	98.17%	180	30.234.033.393	176.47%	117.47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	92	378.780.000	91		0	93	24.182.000	1	3.182.000	2	0	3	11.800.000	0	8.800.000	6	23.782.000	6.45%	98.35%	97	23.782.000	105.43%	6.28%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19	153.000.000	25	75.540.000	15	24.182.000	1	3.182.000	2	0	3	11.800.000	0	8.800.000	6	23.782.000	40%	98.35%	31	99.322.000	163.16%	64.92%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Unit	18	896.153.022	0		0	14	300.946.336	1	20.555.600	8	31.919.464	3	76.054.557	5	133.636.350	17	262.165.971	121.43%	87.11%	17	262.165.971	94.44%	29.25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	15.300.000	50	17.744.000	4	4.507.100	0		0	0	2	1.192.500	2	3.047.500	4	4.240.000	100%	94.07%	54	21.984.000	900%	143.69%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	386.397.056	95	273.241.500	30	144.167.000	1	10.724.500	8	1.630.000	14	30.579.500	9	76.954.000	32	119.888.000	106.67%	83.16%	127	393.129.500	705.56%	101.74%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	550	24.480.000	2769	426.026.180	240	8.000.000	45	1.499.500	30	360	170	6.054.000	0	0	245	7.913.500	102.08%	98.92%	3014	433.939.680	548%	1772.63%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1750	44.982.000	49599	34.586.900	15000	20.120.550	2087	0	4010	5.097.727	3578	1.858.500	2531	7.825.750	12206	14.781.977	81.37%	73.47%	61805	49.368.877	3531.71%	109.75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2.11.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	7	15.300.000	17	8.918.000	2	7.250.000	0	0	0	0	3	298	0	6.798.500	3	7.096.500	150%	97.88%	20	16.014.500	285.71%	104.67%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	382.500.000	137	290.576.750	40	116.901.686	5	8.331.600	6	24.831.737	17	36.072.057	18	39.010.600	46	108.245.994	115%	92.6%	183	398.822.744	305%	104.27%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	20	901.306.000	0	0	14	465.841.000	2	105.996.556	2	118.111.318	2	110.912.800	7	113.373.794	13	448.394.468	92.86%	96.25%	13	448.394.468	65%	49.75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	4.896.000	10	3.363.700	2	1.581.000	0	0	1	885	0	0	1	692,5	2	1.577.500	100%	99.78%	12	4.941.200	600%	100.92%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	153.000.000	36	109.538.999	12	51.160.000	3	10.446.556	3	8.776.318	3	12.412.800	3	14.981.294	12	46.616.968	100%	91.12%	48	156.155.967	400%	102.06%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	734.400.000	36	628.250.000	12	413.100.000	3	95.550.000	3	108.450.000	3	98.500.000	3	97.700.000	12	400.200.000	100%	96.88%	48	1.028.450.000	400%	140.04%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jasa	7	946.742.000	0	0	7	276.848.000	2	10.950.400	2	16.745.800	3	29.898.035	6	182.583.400	13	240.177.635	185.71%	86.75%	13	240.177.635	185.71%	25.37%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	401.778.000	12	205.108.630	4	121.130.000	4	10.950.400	4	11.940.300	4	21.163.435	4	44.292.400	4	88.346.535	100%	72.94%	16	293.455.165	320%	73.04%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	76.500.000	58	35.972.420	40	24.286.000	2	0	7	3.500.000	10	7.380.000	5	10.725.000	24	21.605.000	60%	88.96%	82	57.577.420	164%	75.26%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	459.000.000	2	74.203.200	2	131.432.000	0	0	0	1.305.500	1	1.354.600	1	127.566.000	2	130.226.100	100%	99.08%	4	204.429.300	400%	44.54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	6.503.645.676	81	0	81,75	1.845.574.163	20,44	379.002.506	20,44	478.423.747	20,44	537.827.482	20,44	417.444.347	81,76	1.812.698.082	100.01%	98.22%	162,76	1.812.698.082	196.1%	27.87%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	persentase	100	260.000.000	100	0	100	28.185.000	25	3.674.192	25	6.711.605	25	6.712.741	25	8.710.312	100	25.808.850	100%	91.57%	200	25.808.850	200%	9.93%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	150.000.000	3	0	3	12.700.000	0	402,135	1	3.389.288	1	3.389.288	1	3.389.289	3	10.570.000	100%	83.23%	6	10.570.000	200%	7.05%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	110.000.000	5	0	5	15.485.000	1	3.272.057	1	3.322.317	1	3.323.453	2	5.321.023	5	15.238.850	100%	98.41%	10	15.238.850	200%	13.85%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	persentase	100	3.182.190.768	100	0	100	991.305.371	25	223.317.619	25	304.025.447	25	223.317.621	25	223.317.621	100	973.978.308	100%	98.25%	200	973.978.308	200%	30.61%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN yang disusun	orang/bulan	25	3.182.190.768	14	0	20	991.305.371	5	223.317.619	5	304.025.447	5	223.317.621	5	223.317.621	20	973.978.308	100%	98.25%	34	973.978.308	136%	30.61%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompetensinya meningkat	persentase	100	159.000.000	100	0	100	15.500.000	25	0	25	0	25	9.000.000	25	6.000.000	100	15.000.000	100%	96.77%	200	15.000.000	200%	9.43%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Tahun	1	107.000.000	0	0	1	15.500.000	0	0	0	0	1	9.000.000	0	6.000.000	1	15.000.000	100%	96.77%	1	15.000.000	100%	14.02%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang memuaskan	persentase	100	516.380.904	100	0	100	174.420.000	25	43.771.267	25	43.771.267	25	44.402.192	25	41.985.318	100	173.930.044	100%	99.72%	200	173.930.044	200%	33.68%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terdistribusi	paket	4	18.683.608	4	0	4	4.500.000	1	1.124.020	1	1.124.020	1	1.124.020	1	1.124.020	4	4.496.080	100%	99.91%	8	4.496.080	200%	24.06%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10				11		12			13		14 = 10 + 11 + 12 + 13	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	paket	12	84.583.800	12	0	12	26.000.000	3	6.672.980	3	6.672.980	3	6.672.980	3	5.837.030	12	25.855.970	100%	99.45%	24	25.855.970	200%	30.57%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	49.428.000	12	0	12	15.000.000	3	3.742.700	3	3.742.700	3	3.742.700	3	3.742.700	12	14.970.800	100%	99.81%	24	14.970.800	200%	30.29%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	paket	12	19.000.000	12	0	12	3.500.000	3	950	3	950	6	1.580.925	0	0	12	3.480.925	100%	99.46%	24	3.480.925	200%	18.32%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	laporan	12	340.000.000	12	0	12	125.420.000	3	31.281.567	3	31.281.567	3	31.281.567	3	31.281.568	12	125.126.269	100%	99.77%	24	125.126.269	200%	36.8%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	465.460.145	100	0	100	49.011.592	25	0	25	0	25	29.080.500	25	18.912.314	100	47.992.814	100%	97.92%	200	47.992.814	200%	10.31%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan	unit	10	251.706.499	0	0	10	49.011.592	0	0	0	0	6	29.080.500	4	18.912.314	10	47.992.814	100%	97.92%	10	47.992.814	100%	19.07%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	persentase	100	474.394.059	100	0	100	250.532.600	25	61.838.906	25	61.838.906	25	61.838.906	25	61.838.909	100	247.355.627	100%	98.73%	200	247.355.627	200%	52.14%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar	laporan	12	279.112.059	12	0	12	58.830.600	3	13.976.406	3	13.976.406	3	13.976.406	3	13.976.409	12	55.905.627	100%	95.03%	24	55.905.627	200%	20.03%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	laporan	12	195.282.000	12	0	12	191.702.000	3	47.862.500	3	47.862.500	3	47.862.500	3	47.862.500	12	191.450.000	100%	99.87%	24	191.450.000	200%	98.04%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	persentase	100	1.446.219.800	100	0	100	336.619.600	25	46.400.522	25	62.076.522	25	163.475.522	25	56.679.873	100	328.632.439	100%	97.63%	200	328.632.439	200%	22.72%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	150.000.000	2	0	2	70.000.000	0	8.800.000	1	24.476.000	1	25.875.000	0	9.918.000	2	69.069.000	100%	98.67%	4	69.069.000	200%	46.05%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	11	579.651.600	11	0	11	138.472.100	3	33.261.422	3	33.261.422	3	33.261.422	2	33.261.423	11	133.045.689	100%	96.08%	22	133.045.689	200%	22.95%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	540.000.000	1	0	1	110.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	0	9.161.350	1	109.161.350	100%	99.24%	2	109.161.350	200%	20.22%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Bulan	12	126.568.200	0	0	12	18.147.500	3	4.339.100	3	4.339.100	3	4.339.100	3	4.339.100	12	17.356.400	100%	95.64%	12	17.356.400	100%	13.71%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLANAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	232	2.800.000.000	268	15.294.443.590	249,87	2.687.944.300	249,87	0	249,87	9.790.000	249,74	224.706.600	249,64	1.630.034.730	249,64	1.864.531.330	99.91%	69.37%	517,64	17.158.974.920	223.12%	612.82%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Sistem Drainase	2	2.800.000.000	2	15.294.443.590	2	2.687.944.300	0	0	0	9.790.000	2	224.706.600	2	1.630.034.730	2	1.864.531.330	100%	69.37%	4	17.158.974.920	200%	612.82%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	1600	2.000.000.000	8	7.575.326.090	1174	1.912.944.300	0	0	0	7.390.000	1049	184.679.400	86	1.028.948.930	1135	1.221.018.330	96.68%	63.83%	1143	8.796.344.420	71.44%	439.82%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	83.016.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	83.016.000	100%	83.02%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Sistem Drainase Lingkungan	3	700.000.000	3	465.109.000	3	675.000.000	0	0	0	2.400.000	1	40.027.200	2	601.085.800	3	643.513.000	100%	95.34%	6	1.108.622.000	200%	158.37%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95	4.093.339.506	92	0	93	887.098.940	22	231.941.828	23	186.396.131	24	185.794.429	24	257.264.905	93	861.397.293	100%	97.1%	185	861.397.293	194.74%	21.04%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	10		6		7		1		2		2		2		7		100%		13		130%		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	22		20		20,3		5		5,1		5,1		5,1		20,3		100%		40,3		183.18%		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah /legal	persentase	100	170.000.000	100	0	100	19.999.850	25	0	25	5.649.000	25	5.792.200	25	5.792.200	100	17.233.400	100%	86.17%	200	17.233.400	200%	10.14%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai kebutuhan bencana	persentase	100		100		100		25		25		25		25		100		100%		200		200%		
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah /legal	persentase	100	975.000.000	100	0	100	50.328.350	25	0	25	3.050.000	25	17.321.680	25	19.080.075	100	39.451.755	100%	78.39%	200	39.451.755	200%	4.05%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase penyelesaian dokumen Rekon sampai dinyatakan sah/legal	persentase	100		100		100		25		25		25		25		100		100%		200		200%		
				Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	persentase	100		100		100		25		25		25		25		100		100%		200		200%		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	persentase	100	2.551.375.700	100	0	100	806.770.740	25	231.941.828	25	175.390.331	25	155.580.549	25	231.941.830	100	794.854.538	100%	98.52%	200	794.854.538	200%	31.15%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	persentase	100		100		100		25		25		25		25		100		100%		200		200%		
		1.05.03.2.03 .0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	12	2.134.575.000	12	0	12	600.849.040	3	149.941.837	3	149.941.837	3	149.941.837	3	149.941.839	12	599.767.350	100%	99.82%	24	599.767.350	200%	28.1%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.2.03 .0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	60.000.000	100	0	100	20.000.000	0	0	79	19.809.782	0	0	0	79	19.809.782	79%	99.05%	179	19.809.782	35.8%	33.02%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	persentase	100	396.963.806	100	0	100	10.000.000	25	0	25	2.306.800	25	7.100.000	25	450,8	100	9.857.600	100%	98.58%	200	9.857.600	200%	2.48%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.2.04 .0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi,Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	3	40.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	2.306.800	1	7.100.000	0	450,8	1	9.857.600	100%	98.58%	1	9.857.600	33.33%	24.64%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase	100	1.702.015.000	100	0	100	1.067.000.000	0	1.285.500	0	23.717.500	50	716.244.820	37,5	117.834.880	87,5	859.082.700	87.5%	80.51%	187,5	859.082.700	187.5%	50.47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan untuk kajian lingkungan	Dokumen	2	1.701.815.000	2	0	8	1.067.000.000	0	1.285.500	0	23.717.500	4	716.244.820	3	117.834.880	7	859.082.700	87.5%	80.51%	9	859.082.700	450%	50.48%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	765.000.000	3	221.750.600	8	1.067.000.000	0	1.285.500	0	23.717.500	4	716.244.820	3	117.834.880	7	859.082.700	87.5%	80.51%	10	1.080.833.300	1000%	141.29%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN	Persentase	100	3.353.626.000	100	0	100	728.235.000	28,57	8.613.000	14,29	33.360.000	28,57	346.504.500	42,86	225.786.100	114,29	614.263.600	114.29%	84.35%	214,29	614.263.600	214.29%	18.32%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	2.843.628.000	6	0	3	628.235.000	0	4.724.000	1	29.240.000	1	333.298.800	3	154.904.100	5	522.166.900	166.67%	83.12%	11	522.166.900	366.67%	18.36%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	183.600.000	3	109.466.550	1	90.000.000	0	2.366.700	1	27.140.000	0	15.500.000	2	40.142.350	3	85.149.050	300%	94.61%	6	194.615.600	600%	106%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	3	275.834.000	80	361.849.616	3	538.235.000	0	2.357.300	0	2.100.000	3	317.798.800	1	114.761.750	4	437.017.850	133.33%	81.19%	84	798.867.466	2800%	289.62%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Usaha / Kegiatan	3	293.635.000	2	0	3	20.000.000	1	2.867.500	0	1.550.000	1	11.585.700	0	3.000.000	2	19.003.200	66.67%	95.02%	4	19.003.200	133.33%	6.47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2	61.200.000	4	35.547.700	2	20.000.000	1	2.867.500	0	1.550.000	1	11.585.700	0	3.000.000	2	19.003.200	100%	95.02%	6	54.550.900	300%	89.14%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	1	216.363.000	2	0	1	80.000.000	1	1.021.500	0	2.570.000	0	1.620.000	1	67.882.000	2	73.093.500	200%	91.37%	4	73.093.500	400%	33.78%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	2	24.650.500	3	99.478.300	2	80.000.000	1	1.021.500	0	2.570.000	0	1.620.000	1	67.882.000	2	73.093.500	100%	91.37%	5	172.571.800	250%	700.07%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO Tutupan Lahan	point	0	5.700.600.000	0	4.455.433.018	0,0561	2.190.000.000	0	222.650.000	0	440.915.800	0	854.128.400	0,18	623.702.250	0,18	2.141.396.450	320.86%	97.78%	0,18	6.596.829.468	0%	115.72%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan	Ha	5	5.700.600.000	1024	0	4,545	2.190.000.000	0	222.650.000	0	440.915.800	0	854.128.400	14234	623.702.250	14234	2.141.396.450	313176.24 %	97.78%	15258	2.141.396.450	305157.2%	37.56%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	26	5.640.000.000	41	3.080.256.668	24,24	2.190.000.000	0	222.650.000	0	440.915.800	0	854.128.400	69,02	623.702.250	69,02	2.141.396.450	284.74%	97.78%	110,02	5.221.653.118	423.15%	92.58%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha penyimpanan sementara limbah B3 berizin	Persentase	27	183.342.200	20	0	30	123.317.200	10,93	0	11,26	100.000.000	12,25	2.946.550	0	12.655.050	0	115.601.600	0%	93.74%	20	115.601.600	74.07%	63.05%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha / kegiatan berizin yang melakukan limbah B3	Usaha / Kegiatan	27	183.342.200	13	0	20	123.317.200	0	0	0	100.000.000	14	2.946.550	6	12.655.050	20	115.601.600	100%	93.74%	33	115.601.600	122.22%	63.05%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	4	135.609.200	4	122.089.710	4	123.317.200	1	0	1	100.000.000	1	2.946.550	1	12.655.050	4	115.601.600	100%	93.74%	8	237.691.310	200%	175.28%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	100	260.578.100	0		0	90	106.132.100	5,68	7.707.000	30,88	48.500.000	31,8	24.879.646	11,78	18.813.250	80,14	99.899.896	89.04%	94.13%	80,14	99.899.896	80.14%	38.34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha / kegiatan yang memenuhi persyaratan lingkungan dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Usaha / Kegiatan	180	260.578.100	0		0	190	106.132.100	72	7.707.000	54	48.500.000	77	24.879.646	99	18.813.250	302	99.899.896	158.95%	94.13%	302	99.899.896	167.78%	38.34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	Dokumen	140	137.505.000	1959	116.348.800	200	86.132.100	67	6.568.000	44	46.000.000	67	20.949.396	92	9.913.250	270	83.430.646	135%	96.86%	2229	199.779.446	1592.14%	145.29%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga kemasyarakat aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lembaga	10	77.272.000	114		0	10	20.000.000	2	0	3	0	1	7.578.704	5	11.082.500	11	18.661.204	110%	93.31%	125	18.661.204	1250%	24.15%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kali	10	77.272.000	0		0	10	20.000.000	2	0	3	0	1	7.578.704	5	11.082.500	11	18.661.204	110%	93.31%	11	18.661.204	110%	24.15%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang diadili	Orang	250	76.500.000	517	23.623.800	500	20.000.000	150	0	215	0	35	7.578.704	345	11.082.500	745	18.661.204	149%	93.31%	1262	42.285.004	504.8%	55.27%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok/lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah	kelompok/ lembaga	15	426.853.000	21		0	10	262.008.000	1	5.856.000	0	106.004.500	15	50.534.900	20	54.110.500	36	216.505.900	360%	82.63%	57	216.505.900	380%	50.72%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lomba	3	426.853.000	3		0	3	262.008.000	1	5.856.000	0	106.004.500	5	50.534.900	5	54.110.500	5	216.505.900	166.67%	82.63%	8	216.505.900	266.67%	50.72%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroghi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	50	422.586.000	163	320.900.925	40	262.008.000	33	5.856.000	37	106.004.500	49	50.534.900	45	54.110.500	45	216.505.900	112.5%	82.63%	208	537.406.825	416%	127.17%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	Persentase	100	77.272.000	100		0	100	12.250.000	100	0	100	1.754.000	100	810	100	4.625.000	100	7.189.000	100%	58.69%	200	7.189.000	200%	9.3%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	15	77.272.000	4		0	10	12.250.000	2	0	1	1.754.000	3	810	2	4.625.000	8	7.189.000	80%	58.69%	12	7.189.000	80%	9.3%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV															
									1	2	3	4	5	6	7		8			9		10			11		12		13	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	15	26.522.000	30	41.545.855	10	12.250.000	2	0	1	1.754.000	3	810	2	4.625.000	8	7.189.000	80%	58.69%	38	48.734.855	253.33%	183.75%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	Persentase	100	12.362.993.000	103	0	100	3.929.204.000	29,99	771.652.753	29,25	969.602.553	26,37	894.463.553	28,58	1.093.738.166	114,19	3.729.457.025	114.19%	94.92%	217,19	3.729.457.025	217.19%	30.17%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani di TPA	ton	12254	12.362.993.000	11547	0	11778	3.929.204.000	3532,2	771.652.753	3445	969.602.553	3106,5	894.463.553	3366	1.093.738.166	13450	3.729.457.025	114.19%	94.92%	24997	3.729.457.025	203.99%	30.17%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	12254	4.169.129.000	12295	10.993.086.385	11778	3.594.204.000	3532,2	731.222.753	3445	892.882.553	3106,5	856.973.553	3366	984.613.666	13450	3.465.692.525	114.19%	96.42%	25745	14.458.778.910	210.09%	346.81%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	24	37.131.000	29	65.074.000	35	335.000.000	9	40.430.000	11	76.720.000	9	37.490.000	18	109.124.500	47	263.764.500	134.29%	78.74%	76	328.838.500	316.67%	885.62%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							107.19%	90.49%						
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																							126.48%	87.85%						
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
9	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.			Persentase Konflik Sosial yang Terseseaikan	Persen	100		100		100		100																		
				Persentase Penurunan Gangguan Transilum	Persen	30		16		20																				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	100	5.431.381.882	100	0	97	2.011.239.185	24	335.300.520	24	493.871.880	24	367.989.700	25	782.161.105	97	1.979.323.205	100%	98.41%	197	1.979.323.205	197%	36.44%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100	111.500.000	100	0	100	60.064.000	25	0	25	1.800.000	25	1.600.000	25	53.740.000	100	57.140.000	100%	95.13%	200	57.140.000	200%	51.25%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen	6	60.000.000	6	0	6	57.664.000	2	0	2	800	2	1.200.000	6	52.740.000	6	54.740.000	100%	94.93%	12	54.740.000	200%	91.23%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	kali	4	5.000.000	4	0	4	2.400.000	1	0	1	1.000.000	1	400	1	1.000.000	4	2.400.000	100%	100%	8	2.400.000	200%	48%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Jumlah unit	1	4.431.561.270	1	0	1	1.400.823.068	1	281.264.130	1	431.793.520	1	303.173.250	1	370.766.794	1	1.386.997.694	100%	99.01%	2	1.386.997.694	200%	31.3%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN	19	4.304.361.270	19	0	19	1.368.423.068	19	273.164.130	19	431.793.520	19	286.973.250	19	362.666.794	19	1.354.597.694	100%	98.99%	38	1.354.597.694	200%	31.47%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	kali	4	97.200.000	4	0	4	32.400.000	4	8.100.000	4	0	4	16.200.000	4	8.100.000	4	32.400.000	100%	100%	8	32.400.000	200%	33.33%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	Persen	100	55.000.000	100	0	100	49.980.000	25	0	25	0	25	0	25	41.820.000	100	41.820.000	100%	83.67%	200	41.820.000	200%	76.04%			KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat	10	40.000.000	0	0	6	49.980.000	6	0	6	0	6	0	6	41.820.000	6	41.820.000	100%	83.67%	6	41.820.000	60%	104.55%			KECAMATAN LARANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang Jarak fungsi	Persen	100	73.500.000	100		0	100	26.653.700	25		0	25	4.624.700	25	7.509.000	25	11.340.000	100	23.473.700	100%	88.07%	200	23.473.700	200%	31.94%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Basis/area Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Basis/area Kantor	jumlah paket	3	4.500.000	3		0	3	1.500.000	3		0	3	1.500.000	3		0	3	1.500.000	100%	100%	6	1.500.000	200%	33.33%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	5	15.000.000	5		0	5	5.000.000	5		0	5	634	5	4.366.000	5		0	5	5.000.000	100%	100%	10	5.000.000	200%	33.33%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	3	8.000.000	2		0	2	1.053.700	2		0	2	530,7	2	523	2		0	2	1.053.700	100%	100%	4	1.053.700	133.33%	13.17%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan SKPD	kali	3	25.000.000	3		0	3	19.100.000	1		0	1	1.960.000	3	2.620.000	3	11.340.000	3	15.920.000	100%	83.35%	6	15.920.000	200%	63.68%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	11	125.000.000	11		0	11	99.324.679	11		0	11		0	11	98.070.000	11	98.070.000	100%	98.74%	22	98.070.000	200%	78.46%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	80.000.000	0		0	3	29.551.752	3		0	3		0	3	29.260.000	3	29.260.000	100%	99.01%	3	29.260.000	150%	36.58%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	4		0	4		0	4	19.861.000	2		0	2		0	4	19.800.000	4	19.800.000	100%	99.69%	8	19.800.000	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2		0	2		0	2	49.911.927	2		0	2		0	2	49.010.000	2	49.010.000	100%	98.19%	4	49.010.000	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa	7	540.600.000	7		0	7	204.200.000	7	50.919.240	7	51.133.260	7	51.030.000	7	51.070.000	7	204.152.500	100%	99.98%	14	204.152.500	200%	37.76%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	jumlah jasa	3	60.000.000	3		0	3	20.000.000	3	4.869.240	3	5.083.260	3	4.980.000	3	5.020.000	3	19.952.500	100%	99.76%	6	19.952.500	200%	33.25%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	jasa	4	480.600.000	4		0	4	184.200.000	4	46.050.000	4	46.050.000	4	46.050.000	4	46.050.000	4	184.200.000	100%	100%	8	184.200.000	200%	38.33%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	unit	10	94.220.612	10		0	10	170.193.738	2	3.117.150	3	4.520.400	3	4.677.450	2	155.354.311	10	167.669.311	100%	98.52%	20	167.669.311	200%	177.95%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	2	75.000.000	2		0	2	20.193.738	2	3.117.150	2	4.520.400	2	4.677.450	2	7.318.200	2	19.633.200	100%	97.22%	4	19.633.200	200%	26.18%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2		0	2		0	2	150.000.000	2		0	2		0	2	148.036.111	2	148.036.111	100%	98.69%	4	148.036.111	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100	6.130.262.972	91		0	100	1.828.908.958	25	200.280.292	25	549.813.480	25	381.553.821	23	658.596.904	98	1.790.244.497	98%	97.89%	189	1.790.244.497	189%	29.2%	KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disevaluasi tepat waktu	Dokumen	8	102.000.000	8		0	8	88.600.000	0		0	4	12.728.900	2	14.947.000	2	57.171.100	8	84.847.000	100%	95.76%	16	84.847.000	200%	83.18%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	90.000.000	8		0	8	78.600.000	0		0	2	10.228.400	4	14.947.000	8	49.671.600	8	74.847.000	100%	95.23%	16	74.847.000	133.33%	83.16%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	13	12.000.000	12		0	12	10.000.000	0		0	3	2.500.500	0		0	9	7.499.500	12	10.000.000	100%	100%	24	10.000.000	184.62%	83.33%	KECAMATAN KADUR
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	4.813.293.513	1		0	1	1.267.670.804	0,25	169.530.292	0,25	484.299.455	0,25	263.150.083	0,25	344.460.426	1	1.261.440.256	100%	99.51%	2	1.261.440.256	200%	26.21%	KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	4.716.093.513	14		0	14	1.235.270.804	14	161.430.292	14	476.199.455	14	255.050.083	14	336.360.426	14	1.229.040.256	100%	99.5%	28	1.229.040.256	200%	26.06%	KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	97.200.000	4		0	4	32.400.000	1	8.100.000	1	8.100.000	1	8.100.000	1	8.100.000	4	32.400.000	100%	100%	8	32.400.000	66.67%	33.33%	KECAMATAN KADUR		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
												I		II		III		IV															
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Jumlah	20	90.000.000	20		0	20	50.000.000	0		0	0	26.790.000	5	6.000.000	20	32.790.000	100%	65.58%	40	32.790.000	200%	36.43%			KECAMATAN KADUR			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	75	90.000.000	20		0	20	50.000.000	0		0	0	26.790.000	6	6.000.000	16	32.790.000	80%	65.58%	36	32.790.000	48%	36.43%			KECAMATAN KADUR			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	12	408.700.000	15		0	4	139.023.154	1	30.750.000	1	34.267.925	1	34.939.538	1	36.940.404	4	136.897.867	100%	98.47%	19	136.897.867	158.33%	33.5%			KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	12		0	12	3.723.154	0		0	3	1.523.000	0		0	12	2.200.000	12	3.723.000	100%	100%	24	3.723.000	200%	41.37%			KECAMATAN KADUR
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	36.900.000	12		0	12	12.300.000	0		0	3	1.994.925	3	4.189.538	12	3.990.404	12	10.174.867	100%	82.72%	24	10.174.867	200%	27.57%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	352.800.000	4		0	12	123.000.000	3	30.750.000	3	30.750.000	3	30.750.000	3	30.750.000	12	123.000.000	100%	100%	16	123.000.000	133.33%	34.86%			KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	144	147.269.459	18		0	58	60.615.000	0		0	28	6.017.200	10	30.636.000	20	23.618.500	58	60.271.700	100%	99.43%	76	60.271.700	52.78%	40.93%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen	15	12.000.000	15		0	15	4.000.000	0		0	15	3.950.800	0		0	15	3.950.800	100%	98.77%	30	3.950.800	200%	32.92%			KECAMATAN KADUR		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Peralatan	3	58.269.459	3		0	3	56.615.000	0		0	1	2.066.400	1	30.636.000	3	23.618.500	3	56.320.900	100%	99.48%	6	56.320.900	200%	96.66%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Unit	1	105.000.000	1		0	1	25.000.000	0		0	0	0	0	0	1	24.911.700	1	24.911.700	100%	99.65%	2	24.911.700	200%	23.73%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	6	60.000.000	0		0	2	25.000.000	0		0	0	0	0	0	2	24.911.700	2	24.911.700	100%	99.65%	2	24.911.700	33.33%	41.52%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	47	464.000.000	7		0	17	198.000.000	0		0	8	12.500.000	5	11.091.200	4	165.494.774	17	189.085.974	100%	95.5%	24	189.085.974	51.06%	40.75%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	51.000.000	1		0	1	22.702.400	0		0	0,25	6.250.000	0,25	5.467.200	1	6.265.800	1	17.983.000	100%	79.21%	2	17.983.000	200%	35.26%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	48.000.000	1		0	1	20.202.400	0		0	0,25	6.250.000	0,25	5.624.000	1	5.629.800	1	17.503.800	100%	86.64%	2	17.503.800	200%	36.47%			KECAMATAN KADUR	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor	15	270.000.000	5		0	5	155.095.200	0		0	0	0	0	5	153.599.174	5	153.599.174	100%	99.04%	10	153.599.174	66.67%	56.89%			KECAMATAN KADUR		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/VOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81	7.729.902.474	78		0	80	2.906.059.447	0	382.484.395	0	1.020.365.083	0	606.590.111	80	784.834.558	80	2.794.274.147	100%	96.15%	158	2.794.274.147	195.06%	36.15%			KECAMATAN PROPPPO		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	115.000.000	4		0	4	60.872.500	3	6.522.500	1	20.003.000	0	1.702.000	0	25.709.500	4	53.937.000	100%	88.61%	8	53.937.000	200%	46.9%			KECAMATAN PROPPPO		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	90.000.000	4		0	4	55.872.500	3	6.222.500	1	19.250.000	0	400	0	24.170.500	4	50.043.000	100%	89.57%	8	50.043.000	200%	55.6%			KECAMATAN PROPPPO		
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Koordinasi	2	25.000.000	0		0	1	5.000.000	1	300	0	753	0	1.302.000	0	1.539.000	1	3.894.000	100%	77.88%	1	3.894.000	50%	15.58%			KECAMATAN PROPPPO		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	1	6.437.902.474	1		0	1	2.302.561.847	1	325.035.145	0	841.630.778	0	495.193.861	0	567.861.608	1	2.229.721.392	100%	96.84%	2	2.229.721.392	200%	34.63%			KECAMATAN PROPPPO		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%				
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k		Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26	6.419.007.302	26	0	26	2.270.161.847	26	318.135.145	0	832.330.778	0	490.693.861	0	560.961.608	26	2.202.121.392	100%	97%	52	2.202.121.392	200%	34.31%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	18.000.000	6	0	6	32.400.000	6	6.900.000	0	9.300.000	0	4.500.000	0	6.900.000	6	27.600.000	100%	85.19%	12	27.600.000	200%	153.33%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	pegawai	5	50.000.000	5	0	5	55.000.000	0	0	5	16.215.000	5	9.182.000	5	28.163.000	5	53.560.000	100%	97.38%	10	53.560.000	200%	107.12%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	8	50.000.000	5	0	6	55.000.000	0	0	3	16.215.000	2	9.182.000	1	28.163.000	6	53.560.000	100%	97.38%	11	53.560.000	137.5%	107.12%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	sarana	5	110.000.000	5	0	5	50.054.474	2	3.921.500	2	6.067.000	0	25.530.000	5	10.601.000	5	46.119.500	100%	92.14%	10	46.119.500	200%	41.93%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	27.000.000	6	0	6	9.994.474	0	0	0	6	9.433.000	0	0	6	9.433.000	100%	94.38%	12	9.433.000	120%	34.94%	KECAMATAN PROPPPO	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	27.000.000	17	0	18	10.000.000	18	3.921.500	0	1.787.000	0	1.447.000	0	2.756.000	18	9.911.500	100%	99.12%	35	9.911.500	140%	36.71%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	1	2.700.000	1	2.170.000	0	3.235.000	2	8.105.000	100%	81.05%	2	8.105.000	100%	54.03%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	25.000.000	3	0	5	20.060.000	0	0	3	1.580.000	2	12.480.000	0	4.610.000	5	18.670.000	100%	93.07%	8	18.670.000	114.29%	74.68%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	unit	9	158.000.000	8	0	8	116.213.354	0	0	4	53.303.555	2	16.950.000	8	36.290.000	8	106.543.555	100%	91.68%	16	106.543.555	177.78%	67.43%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	Paket	2	30.000.000	2	0	2	26.360.300	0	0	1	19.203.555	0	0	1	6.300.000	2	25.503.555	100%	96.75%	4	25.503.555	200%	85.01%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	63.000.000	3	0	3	65.100.000	0	0	2	34.100.000	0	0	1	29.990.000	3	64.090.000	100%	98.45%	6	64.090.000	200%	101.73%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	30.000.000	1	0	1	24.753.054	0	0	0	0	1	16.950.000	0	0	1	16.950.000	100%	68.48%	2	16.950.000	100%	56.5%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	12	730.000.000	12	0	12	191.500.000	12	35.705.250	12	50.312.750	12	45.520.250	12	55.920.250	12	187.458.500	100%	97.89%	24	187.458.500	200%	25.68%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	200.000.000	2	0	2	31.600.000	2	2.255.250	0	4.262.750	0	5.770.250	0	15.270.250	2	27.558.500	100%	87.21%	4	27.558.500	100%	13.78%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	500.000.000	10	0	12	159.900.000	12	33.450.000	0	46.050.000	0	39.750.000	0	40.650.000	12	159.900.000	100%	100%	22	159.900.000	183.33%	31.98%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Barang	8	129.000.000	8	0	8	129.857.272	3	11.300.000	5	32.833.000	0	12.512.000	0	60.289.200	8	116.934.200	100%	90.05%	16	116.934.200	200%	90.65%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	36.000.000	2	0	2	50.000.000	2	6.300.000	0	11.650.000	0	11.562.000	0	17.897.000	2	47.409.000	100%	94.82%	4	47.409.000	200%	131.69%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	15.000.000	0	0	2	1.000.000	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0%	100%	0	1.000.000	0%	6.67%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	18.000.000	5	0	5	11.972.162	3	5.000.000	1	3.297.000	1	950	0	619	5	9.866.000	100%	82.41%	10	9.866.000	200%	54.81%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1	60.000.000	1	0	1	66.885.110	0	0	1	16.886.000	0	0	0	41.773.200	1	58.659.200	100%	87.7%	2	58.659.200	200%	97.77%	KECAMATAN PROPPPO

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Nilai	82	5.251.501.406	79	0	80	1.911.459.741	10	241.119.714	30	542.691.588	30	481.444.346	10	531.917.687	80	1.797.173.335	100%	94.02%	159	1.797.173.335	193.9%	34.22%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	82	117.161.174	79	0	80	84.101.174	10	0	20	10.643.000	20	4.920.000	30	59.365.000	30	74.928.000	37.5%	89.09%	109	74.928.000	132.93%	63.95%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	102.161.174	6	0	6	79.101.174	0	0	2	10.643.000	2	2.720.000	2	57.165.000	6	70.528.000	100%	89.16%	12	70.528.000	200%	69.04%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	15.000.000	0	0	4	5.000.000	1	0	1	0	1	2.200.000	1	2.200.000	4	4.400.000	100%	88%	4	4.400.000	100%	29.33%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit Kerja	1	4.453.662.232	1	0	1	1.501.822.632	1	217.180.498	1	485.728.468	1	394.429.732	1	380.835.798	1	1.478.174.496	100%	98.43%	2	1.478.174.496	200%	33.19%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	15	4.353.695.321	15	0	15	1.471.822.632	1	210.280.498	6	478.828.468	1	387.529.732	15	373.935.798	15	1.450.574.496	100%	98.56%	30	1.450.574.496	200%	33.32%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	90.000.000	12	0	12	30.000.000	3	6.900.000	3	6.900.000	3	6.900.000	3	6.900.000	12	27.600.000	100%	92%	24	27.600.000	200%	30.67%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	15	40.000.000	10	0	15	50.000.000	3	0	3	5.667.000	5	16.661.530	3	0	3	22.328.530	20%	44.66%	13	22.328.530	86.67%	55.82%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	6	30.000.000	5	0	5	50.000.000	0	0	4	5.667.000	1	16.661.530	0	0	5	22.328.530	100%	44.66%	10	22.328.530	166.67%	74.43%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	90	90.000.000	60	0	80	37.752.000	20	0	20	2.531.000	30	5.799.000	10	15.709.000	80	24.039.000	100%	63.68%	140	24.039.000	155.56%	26.71%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	30.000.000	15	0	20	10.000.000	5	0	2	2.081.000	6	1.754.000	7	2.653.000	20	6.488.000	100%	64.88%	35	6.488.000	175%	21.63%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang	1200	40.000.000	1000	0	1000	9.544.000	200	0	200	0	300	1.595.000	300	0	1000	1.595.000	100%	16.71%	2000	1.595.000	166.67%	3.99%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15.000.000	8	0	12	18.208.000	3	0	3	450	3	2.450.000	3	13.056.000	12	15.956.000	100%	87.63%	20	15.956.000	166.67%	106.37%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	85.678.000	5	0	2	65.946.816	0	0	0	0	1	24.000.000	1	33.664.737	2	57.664.737	100%	87.44%	7	57.664.737	70%	67.3%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Buah	5	5.000.000	0	0	5	8.249.187	0	0	0	0	0	0	1	8.160.000	1	8.160.000	20%	98.92%	1	8.160.000	20%	163.2%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Unit	3	5.000.000	4	38.900.497	5	57.697.629	0	0	1	0	1	24.000.000	1	25.504.737	3	49.504.737	60%	85.8%	7	88.405.234	233.33%	1768.1%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	18	290.000.000	13	0	18	105.200.000	6	23.382.216	3	23.182.120	5	24.037.084	4	24.186.152	4	94.787.572	22.22%	90.1%	17	94.787.572	94.44%	32.69%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	30.000.000	12	0	12	20.000.000	3	2.082.216	3	1.882.120	3	2.737.084	3	2.886.152	12	9.587.572	100%	47.94%	24	9.587.572	200%	31.96%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa	7	255.000.000	6	0	7	85.200.000	1	21.300.000	2	21.300.000	2	21.300.000	2	21.300.000	2	85.200.000	28.57%	100%	8	85.200.000	114.29%	33.41%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Barang	14	175.000.000	9	0	11	66.637.119	0	557	0	14.940.000	2	11.597.000	9	18.157.000	11	45.251.000	100%	67.91%	20	45.251.000	142.86%	25.86%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	70.000.000	2	0	2	41.100.000	1	557	1	5.000.000	1	10.557.000	1	18.157.000	1	34.271.000	50%	83.38%	3	34.271.000	150%	48.96%	KECAMATAN PAKONG

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	5	15.000.000	5		5	5.000.000	0		0	0	0	1	1.040.000	0		0	1	1.040.000	20%	20.8%	6	1.040.000	120%	6.93%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	1		0	1	10.537.119	0		0	0	0	0	1		0	1	0	100%	0%	2	0	200%	0%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	1		0	1	10.000.000	1		0	1	9.940.000	0	0	0	0	0	9.940.000	0%	99.4%	1	9.940.000	100%	33.13%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/VOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81	2.374.801.500	78		0	80	2.226.462.652	0	331.544.280	0	818.547.722	0	400.426.992	80	594.943.319	80	2.145.462.313	100%	96.36%	158	2.145.462.313	195.06%	90.34%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	30.000.000	10		0	12	70.000.000	4		0	4	10.920.000	4	0	0	48.680.000	12	59.600.000	100%	85.14%	22	59.600.000	183.33%	198.67%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	30.000.000	10		0	12	70.000.000	0		0	4	10.920.000	5	0	3	48.680.000	12	59.600.000	100%	85.14%	22	59.600.000	183.33%	198.67%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	1.739.801.500	1		0	1	1.604.323.391	1	265.511.930	1	628.409.212	1	303.630.242	1	367.390.019	1	1.564.941.403	100%	97.55%	2	1.564.941.403	200%	89.95%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	17	1.707.401.500	17		0	17	1.571.923.391	17	258.211.930	17	620.309.212	17	295.530.242	17	359.290.019	17	1.533.341.403	100%	97.55%	34	1.533.341.403	200%	89.81%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	97.200.000	10		0	12	32.400.000	12	7.300.000	12	8.100.000	12	8.100.000	12	8.100.000	12	31.600.000	100%	97.53%	22	31.600.000	183.33%	32.51%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	5	30.000.000	5		0	5	55.000.000	0		0	0	3	14.619.500	2	28.170.000	5	42.789.500	100%	77.8%	10	42.789.500	200%	142.63%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	5	75.000.000	4		0	5	55.000.000	0		0	0	4	14.619.500	1	28.170.000	5	42.789.500	100%	77.8%	9	42.789.500	180%	57.05%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	80	70.000.000	74		0	80	75.000.000	20	12.271.900	20	18.108.300	20	22.951.100	20	20.876.700	80	74.208.000	100%	98.94%	154	74.208.000	192.5%	106.01%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	10.000.000	6		0	6	10.000.000	2	1.950.000	2	1.450.000	1	4.950.000	1	1.650.000	6	10.000.000	100%	100%	12	10.000.000	200%	100%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	30.000.000	0		0	25	40.000.000	7	10.321.900	10	7.733.800	5	4.757.600	3	16.412.700	25	39.226.000	100%	98.07%	25	39.226.000	100%	130.75%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	30.000.000	7		0	7	25.000.000	0		0	3	8.924.500	3	13.243.500	1	2.814.000	7	24.982.000	100%	99.93%	14	24.982.000	200%	83.27%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpas	20	180.000.000	10		0	20	170.034.563	0		0	10	103.403.000	5	3.140.000	5	59.163.000	20	165.706.000	100%	97.45%	30	165.706.000	150%	92.06%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	25.000.000	1		0	3	20.562.905	0		0	2	11.433.000	0	0	1	8.436.000	3	19.869.000	100%	96.63%	4	19.869.000	133.33%	79.48%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	1		0	3	74.616.420	0		0	2	21.090.000	0	0	1	50.727.000	3	71.817.000	100%	96.25%	4	71.817.000	133.33%	239.39%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	25.000.000	1		0	3	74.855.238	0		0	2	70.880.000	1	3.140.000	0	0	3	74.020.000	100%	98.88%	4	74.020.000	133.33%	296.08%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Penunjang	4	205.000.000	0		0	4	199.200.000	4	45.545.950	4	48.436.210	4	46.714.400	4	54.583.800	4	195.280.360	100%	98.03%	4	195.280.360	100%	95.26%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	3		0	12	15.000.000	3	1.295.950	3	4.186.210	3	2.264.400	3	5.833.800	12	13.580.360	100%	90.54%	15	13.580.360	125%	90.54%	KECAMATAN GALIS	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	190.000.000	19	0	12	184.200.000	12	44.250.000	12	44.250.000	12	44.450.000	12	48.750.000	12	181.700.000	100%	98.64%	31	181.700.000	258.33%	95.63%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	75	120.000.000	71	0	75	52.904.698	20	8.214.500	20	9.271.000	20	9.371.750	15	16.079.800	75	42.937.050	100%	81.16%	146	42.937.050	194.67%	35.78%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	1	0	2	30.000.000	2	4.014.500	2	5.271.000	2	4.846.750	2	7.709.800	2	21.842.050	100%	72.81%	3	21.842.050	150%	54.61%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000	5	0	5	18.000.000	2	4.200.000	1	4.000.000	1	4.525.000	1	3.775.000	5	16.500.000	100%	91.67%	10	16.500.000	200%	55%	KECAMATAN GALIS
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	0	1	4.904.698	0	0	0	0	0	1	4.595.000	1	4.595.000	100%	93.69%	2	4.595.000	200%	9.19%	KECAMATAN GALIS	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Nilai	98	5.818.435.000	100	0	80,5	1.892.138.464	0	327.039.668	0	476.697.865	0	532.491.853	81,3	511.769.410	81,3	1.847.998.796	100.99%	97.67%	181,3	1.847.998.796	185%	31.76%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	98	155.250.000	100	0	96	77.324.600	0	0	32	13.963.500	32	5.529.600	32	57.831.500	96	77.324.600	100%	100%	196	77.324.600	200%	49.81%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	118.250.000	4	0	2	75.875.000	0	0	1	13.963.500	0	4.080.000	1	57.831.500	2	75.875.000	100%	100%	6	75.875.000	42.86%	64.16%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	63	36.500.000	10	0	1	1.449.600	0	0	0	0	1	1.449.600	0	0	1	1.449.600	100%	100%	11	1.449.600	17.46%	3.97%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Persen	96	3.520.800.000	98	0	94	1.261.734.235	23	252.999.968	26	379.043.165	30	266.909.003	15	322.394.610	94	1.221.346.746	100%	96.8%	192	1.221.346.746	200%	34.69%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	3.415.000.000	14	0	14	1.236.534.235	4	246.699.968	4	372.743.165	3	260.609.003	3	316.094.610	14	1.196.146.746	100%	96.73%	28	1.196.146.746	66.67%	35.03%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	490	100.800.000	150	0	125	25.200.000	30	6.300.000	35	6.300.000	42	6.300.000	18	6.300.000	125	25.200.000	100%	100%	275	25.200.000	56.12%	25%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	Persen	97	124.580.000	80	0	95	20.000.000	0	0	0	0	38	11.616.000	57	8.380.000	95	19.996.000	100%	99.98%	175	19.996.000	180.41%	16.05%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	50.000.000	5	0	5	20.000.000	0	0	0	0	2	11.616.000	3	8.380.000	5	19.996.000	100%	99.98%	10	19.996.000	45.45%	39.99%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Persen	98	126.250.000	100	0	96	34.177.000	5	163,75	32	13.529.100	32	9.721.450	27	10.505.000	96	33.919.300	100%	99.25%	196	33.919.300	200%	26.87%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	10.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	295	0	0	1	1.705.000	1	2.000.000	100%	100%	1	2.000.000	33.33%	20%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	29	0	4	15.000.000	0	0	2	9.487.600	1	2.086.000	1	3.176.400	4	14.750.000	100%	98.33%	33	14.750.000	275%	40.97%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.000.000	0	0	1	2.837.000	0	0	0	1.608.000	0	588,2	1	633,1	1	2.829.300	100%	99.73%	1	2.829.300	33.33%	17.68%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	28.000.000	24	0	12	6.000.000	1	163,75	5	2.138.500	5	3.522.250	1	175,5	12	6.000.000	100%	100%	36	6.000.000	100%	21.43%	KECAMATAN PASEAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	34.250.000	12	0	3	8.340.000	0	0	0	0	1	3.525.000	2	4.815.000	3	8.340.000	100%	100%	15	8.340.000	125%	24.35%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	Persen	99	657.000.000	100	0	97	83.837.061	12	28.948.800	0	0	0	0	85	54.675.000	97	83.623.800	100%	99.75%	197	83.623.800	198.99%	12.73%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	76.000.000	0	0	8	14.080.350	0	0	0	0	0	8	14.000.000	8	14.000.000	100%	99.43%	8	14.000.000	53.33%	18.42%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	176.500.000	0	0	25	69.756.711	4	28.948.800	0	0	0	21	40.675.000	25	69.623.800	100%	99.81%	25	69.623.800	125%	39.45%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	99	661.500.000	97	0	97	186.384.000	24	44.927.150	25	47.178.600	24	47.132.550	24	46.863.500	97	186.101.800	100%	99.85%	194	186.101.800	195.96%	28.13%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108	40.000.000	36	0	36	12.384.000	9	1.427.150	9	3.678.600	9	3.632.550	9	3.363.500	36	12.101.800	100%	97.72%	72	12.101.800	66.67%	30.25%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	621.000.000	12	0	12	174.000.000	3	43.500.000	3	43.500.000	3	43.500.000	3	43.500.000	12	174.000.000	100%	100%	24	174.000.000	66.67%	28.02%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang di se	Persen	98	573.055.000	100	0	96	228.681.568	0	0	20	22.983.500	38	191.583.250	38	11.119.800	96	225.686.550	100%	98.69%	196	225.686.550	200%	39.38%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	118.000.000	2	0	1	20.570.000	0	0	0	5.800.000	0	4.220.000	1	10.299.800	1	20.319.800	100%	98.78%	3	20.319.800	50%	17.22%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	37.000.000	0	0	2	7.412.000	0	0	1	6.583.000	0	0	1	820	2	7.403.000	100%	99.88%	2	7.403.000	33.33%	20.01%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	196.055.000	1	0	1	168.563.268	0	0	0	10.600.500	1	155.233.250	0	0	1	165.833.750	100%	98.38%	2	165.833.750	66.67%	84.59%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	160.000.000	0	0	1	32.136.300	0	0	0	0	1	32.130.000	0	0	1	32.130.000	100%	99.98%	1	32.130.000	33.33%	20.08%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81	6.221.856.831	81	0	81	2.184.851.533	0	289.742.523	0	702.030.527	0	493.792.836	81,4	624.397.997	81,4	2.109.963.883	100.49%	96.57%	162,4	2.109.963.883	200.49%	33.91%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	10	85.000.000	10	0	10	99.600.000	0	0	6	31.372.118	2	5.272.000	2	48.200.000	10	84.844.118	100%	85.18%	20	84.844.118	200%	99.82%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	82.000.000	6	0	6	89.600.000	0	0	2	21.377.118	2	5.272.000	2	48.200.000	6	74.849.118	100%	83.54%	12	74.849.118	200%	91.28%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi	4	3.000.000	4	0	4	10.000.000	0	0	4	9.995.000	0	0	0	4	9.995.000	100%	99.95%	8	9.995.000	200%	333.17%	KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	4.981.139.031	1	0	1	1.503.614.425	1	210.632.023	1	575.224.159	1	309.812.686	1	378.880.047	1	1.474.548.915	100%	98.07%	2	1.474.548.915	200%	29.6%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	240	4.882.739.031	12	0	240	1.470.614.425	60	204.932.023	60	569.524.159	60	304.112.686	60	372.599.647	240	1.451.168.515	100%	98.68%	252	1.451.168.515	105%	29.72%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12	98.400.000	12	0	12	33.000.000	3	5.700.000	3	5.700.000	3	5.700.000	3	6.280.400	12	23.380.400	100%	70.85%	24	23.380.400	200%	23.76%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	15	35.000.000	5	0	5	30.508.756	0	0	0	0	4	12.674.000	1	6.000.000	5	18.674.000	100%	61.21%	10	18.674.000	66.67%	53.35%	KECAMATAN TLANAKAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
												I		II		III		IV														
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	15	34.000.000	5		0	5	30.508.756	0		0	0	12.674.000	1	6.000.000	5	18.674.000	100%	61.21%	10	18.674.000	66.67%	54.92%			KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.01.2.06 .0002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	3	52.025.000	3		0	3	75.575.000	0		0	1	11.727.500	1	16.219.600	3	67.547.100	100%	89.38%	6	67.547.100	200%	129.84%			KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	1		0	4	35.000.000	0		0	1	6.516.600	2	18.560.000	1	8.965.100	4	34.041.700	100%	97.26%	5	34.041.700	41.67%	226.94%			KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2.025.000	8000		0	1	675	0		0	1	666,4	0	0	1	666,4	100%	98.73%	8001	666,4	266700%	32.91%			KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	34.000.000	6		0	5	39.900.000	0		0	1	4.544.500	3	21.040.000	1	7.254.500	5	32.839.000	100%	82.3%	11	32.839.000	73.33%	96.59%			KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Prasarana	3	28.000.000	3		0	1	121.943.752	0		0	0	0	1	37.400.000	0	81.650.000	1	119.050.000	100%	97.63%	4	119.050.000	133.33%	425.18%			KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	22	47.400.000	2	12.000.000	1	40.000.000	0		0	0	0	1	37.400.000	0	0	1	37.400.000	100%	93.5%	3	49.400.000	13.64%	104.22%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5E+06	5.000.000	0		0	4	81.943.752	0		0	0	0	0	4	81.650.000	4	81.650.000	100%	99.64%	4	81.650.000	0%	1633%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	22	923.700.000	17		0	22	307.900.000	22	73.930.500	22	74.136.750	22	77.638.000	22	78.014.750	22	303.720.000	100%	98.64%	39	303.720.000	177.27%	32.88%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	68.700.000	3		0	12	22.900.000	3	2.680.500	3	2.886.750	3	6.388.000	3	6.764.750	12	18.720.000	100%	81.75%	15	18.720.000	41.67%	27.25%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	855.000.000	14		0	12	285.000.000	3	71.250.000	3	71.250.000	3	71.250.000	3	71.250.000	12	285.000.000	100%	100%	26	285.000.000	72.22%	33.33%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	9	116.992.800	8		0	3	45.709.600	2	5.180.000	3	9.570.000	3	11.396.150	3	15.433.600	3	41.579.750	100%	90.97%	11	41.579.750	122.22%	35.54%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	94.492.800	2		0	2	42.186.200	2	5.180.000	2	9.570.000	2	7.872.750	2	15.433.600	2	38.056.350	100%	90.21%	4	38.056.350	200%	40.27%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor	3	22.500.000	1		0	1	3.523.400	0		0	0	1	3.523.400	0	0	1	3.523.400	100%	100%	2	3.523.400	66.67%	15.66%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	5.853.080.948	80		0	81	2.115.907.984	25	449.831.339	25	493.547.735	20	510.284.513	11	597.793.363	81	2.051.456.950	100%	96.95%	161	2.051.456.950	196.34%	35.05%			KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	10	194.504.100	10		0	10	92.615.950	2		0	3	9.520.600	3	21.119.800	2	49.668.150	10	80.308.550	100%	86.71%	20	80.308.550	200%	41.29%			KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	134.504.100	6		0	6	71.022.950	1		0	2	3.047.000	2	20.879.800	1	37.780.950	6	61.707.750	100%	86.88%	12	61.707.750	200%	45.88%			KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	30.000.000	10		0	10	9.020.000	2		0	3	0	2	0	3	9.020.000	10	9.020.000	100%	100%	20	9.020.000	200%	30.07%			KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	30.000.000	10		0	10	12.573.000	2		0	3	6.473.600	2	240	3	2.867.200	10	9.580.800	100%	76.2%	20	9.580.800	200%	31.94%			KECAMATAN PEGANTENAN
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	4.982.744.092	1		0	1	1.619.359.098	0	401.499.530	0	404.079.735	1	428.718.623	0	354.777.292	1	1.589.075.180	100%	98.13%	2	1.589.075.180	200%	31.89%			KECAMATAN PEGANTENAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab													
									I		II		III		IV																			
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp																		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18						
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	15	4.840.429.718	15		0	15	1.588.159.098	3	393.699.530	2		404.079.735	5	414.318.623	5	347.577.292	15	1.559.675.180	100%	98.21%	30	1.559.675.180	200%	32.22%	KECAMATAN PEGANTENAN				
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	93.600.000	12		0	12	31.200.000	3	7.800.000	3		0	3	14.400.000	3	7.200.000	12	29.400.000	100%	94.23%	24	29.400.000	200%	31.41%	KECAMATAN PEGANTENAN				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	15	45.600.000	5		0	10	71.615.750	2		0	3		0	3	7.530.000	2	54.938.000	10	62.468.000	100%	87.23%	15	62.468.000	100%	136.99%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	45.600.000	5		0	5	71.615.750	1		0	2		0	1	7.530.000	1	54.938.000	5	62.468.000	100%	87.23%	10	62.468.000	200%	136.99%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	74	115.338.411	74		0	74	43.112.300	14		0	20		10.889.800	20	8.557.700	20	16.725.550	74	36.173.050	100%	83.9%	148	36.173.050	200%	31.36%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	90.000.000	30		0	30	19.789.300	5		0	10		10.889.800	5	1.250.700	10	7.635.550	30	19.776.050	100%	99.93%	60	19.776.050	200%	21.97%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	25.088.364	4		0	4	23.323.000	1		0	1		0	1	7.307.000	1	9.090.000	4	16.397.000	100%	70.3%	8	16.397.000	200%	65.36%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarana	10	43.495.950	10		0	10	29.373.561	2		14.731.809	3		14.400.000	3		0	2		0	10	29.131.809	100%	99.18%	20	29.131.809	200%	66.98%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	43.495.950	10		0	10	14.731.809	10		14.731.809	0		0	0		0	0	0	10	14.731.809	100%	100%	20	14.731.809	200%	33.87%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/fasilitas gedung kantor yang diadakan	Persen	100	40.000.000	100	107.903.310	100		14.641.752	25		0	25		14.400.000	25		0	0	0	75	14.400.000	75%	98.35%	175	122.303.310	175%	305.76%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	100	428.730.497	100		0	100	143.800.000	25		33.600.000	25		34.774.600	25		36.162.290	25		36.302.700	100	140.839.590	100%	97.94%	200	140.839.590	200%	32.85%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	19.800.000	24		0	24	8.056.000	6		0	6		1.174.600	6		2.562.290	6		1.358.700	24	5.095.590	100%	63.25%	48	5.095.590	200%	25.74%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	34	407.571.360	34		0	34	135.744.000	7		33.600.000	9		33.600.000	9		33.600.000	9		34.944.000	34	135.744.000	100%	100%	68	135.744.000	200%	33.31%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	71	42.667.898	71		0	71	116.031.325	21		0	10		19.883.000	20		8.196.100	20		85.381.671	71	113.460.771	100%	97.78%	142	113.460.771	200%	265.92%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	42.246.616	12		0	12	25.000.000	3		0	3		6.650.000	3		8.196.100	3		8.779.800	12	23.625.900	100%	94.5%	24	23.625.900	200%	55.92%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persen	100		0	100		0	100	91.031.325	25		0	25		13.233.000	25		0	25		76.601.871	100	89.834.871	100%	98.69%	200	89.834.871	200%	0%	KECAMATAN PEGANTENAN
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Skala	81	26.473.750.688	80		0	80,3	8.120.411.782	0		1.398.208.625	0		2.550.200.248	0		1.895.742.872	81		2.068.710.903	81	7.912.862.648	100.87%	97.44%	161	7.912.862.648	198.77%	29.89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	246.000.000	16		0	16	76.300.000	4		8.225.000	4		7.895.000	4		36.025.500	4		20.423.794	16	72.569.294	100%	95.11%	32	72.569.294	133.33%	29.5%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000	4		0	4	46.300.000	1		4.840.000	1		2.170.000	1		27.084.000	1		10.224.400	4	44.318.400	100%	95.72%	8	44.318.400	200%	29.55%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	90.000.000	12		0	12	30.000.000	3		3.385.000	3		5.725.000	3		8.941.500	3		10.199.394	12	28.250.894	100%	94.17%	24	28.250.894	200%	31.39%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	15.004.467.577	12	0	12	4.893.657.562	3	644.716.700	3	1.810.833.698	3	1.060.361.072	3	1.244.469.484	12	4.760.380.954	100%	97.28%	24	4.760.380.954	200%	31.73%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	50	14.504.467.577	50	0	50	4.893.657.562	46	644.716.700	54	1.810.833.698	54	1.060.361.072	54	1.244.469.484	54	4.760.380.954	108%	97.28%	104	4.760.380.954	208%	32.82%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	561.813.500	12	0	12	121.804.500	3	49.991.625	3	0	3	13.103.500	3	54.273.000	12	117.368.125	100%	96.36%	24	117.368.125	200%	20.89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Paket	280	210.000.000	0	0	50	71.200.000	50	49.991.625	0	0	0	50	21.190.000	50	71.181.625	100%	99.97%	50	71.181.625	17.86%	33.9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	151.813.500	2	0	2	50.604.500	0	0	0	1	13.103.500	1	33.083.000	2	46.186.500	100%	91.27%	4	46.186.500	200%	30.42%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	259.233.891	12	0	12	69.260.170	3	1.480.000	3	18.983.340	3	34.388.263	3	13.664.000	12	68.515.603	100%	98.92%	24	68.515.603	200%	26.43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	10.201.810	9	0	9	2.948.500	0	0	0	9	2.494.500	9	437	9	2.931.500	100%	99.42%	18	2.931.500	200%	28.74%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	106.227.778	32	0	32	30.701.670	32	0	32	5.276.500	32	12.221.500	32	13.117.000	32	30.615.000	100%	99.72%	64	30.615.000	193.94%	28.82%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.380.000	1	0	1	3.000.000	1	1.480.000	0	0	1	1.520.000	0	0	0	3.000.000	0%	100%	1	3.000.000	100%	28.9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.380.000	2	0	2	3.000.000	2	0	2	1.500.000	2	1.500.000	0	0	0	3.000.000	0%	100%	2	3.000.000	100%	28.9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	102.450.600	12	0	12	29.610.000	3	0	3	12.206.840	3	16.652.263	3	110	12	28.969.103	100%	97.84%	24	28.969.103	200%	28.28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	9.567.930.000	12	0	12	2.762.123.250	3	692.072.000	3	678.893.450	3	682.200.100	3	685.809.950	12	2.738.975.500	100%	99.16%	24	2.738.975.500	200%	28.63%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	150.330.000	12	0	12	50.123.250	3	7.272.000	3	11.893.450	3	15.600.100	3	6.909.950	12	41.675.500	100%	83.15%	24	41.675.500	200%	27.72%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9.417.600.000	12	0	12	2.712.000.000	3	684.800.000	3	667.000.000	3	666.600.000	3	678.900.000	12	2.697.300.000	100%	99.46%	24	2.697.300.000	200%	28.64%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	740.485.763	12	0	12	197.266.300	3	1.723.300	3	33.594.760	3	69.664.437	3	50.070.675	12	155.053.172	100%	78.6%	24	155.053.172	200%	20.94%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	121.289.040	2	0	2	33.691.400	2	0	2	7.018.500	2	14.300.000	2	9.597.572	2	30.916.072	100%	91.76%	4	30.916.072	200%	25.49%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	549.269.640	17	0	17	146.574.900	17	0	17	21.876.160	17	48.173.237	17	37.288.103	17	107.337.500	100%	73.23%	34	107.337.500	200%	19.54%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	24.056.400	3	0	3	7.000.000	3	0	3	2.100.000	3	2.250.000	3	2.485.000	3	6.835.000	100%	97.64%	6	6.835.000	200%	28.41%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	0	0	1	10.000.000	1	1.723.300	1	2.600.100	1	4.941.200	1	700	1	9.964.600	100%	99.65%	1	9.964.600	50%	33.22%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100	7.626.006.906	0	0	100	2.310.465.115	20	316.345.449	25	754.368.378	30	458.780.627	20	719.017.433	95	2.248.511.887	95%	97.32%	95	2.248.511.887	95%	29.48%	KECAMATAN BATUMARMAR	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase	100		0		100		20		25		30		20		95		95%		95		95%			
				Persentase peningkatan kompetansi aparatur	Persentase	100		0		100		20		30		25		25		100		100%		100		100%			
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100		0		100		20		45		30		5		100		100%		100		100%			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	98	145.000.000	100	0	96	92.588.046	15		0	35	10.730.000	30	15.571.500	16	64.140.000	96	90.441.500	100%	97.68%	196	90.441.500	200%	62.37%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	79.000.000	2	0	4	77.588.046	1		0	1	2.850.000	1	11.050.000	1	61.920.000	4	75.820.000	100%	97.72%	6	75.820.000	50%	95.97%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21	62.000.000	4	0	7	15.000.000	0		0	3	7.880.000	2	4.521.500	2	2.220.000	7	14.621.500	100%	97.48%	11	14.621.500	52.38%	23.58%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Persen	97	5.780.506.906	98	0	95	1.857.765.079	20	276.519.857	30	687.028.562	25	393.028.943	20	447.524.433	95	1.804.101.795	100%	97.11%	193	1.804.101.795	198.97%	31.21%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	5.626.947.263	15	0	15	1.819.965.079	15	267.819.857	15	678.328.562	15	386.128.943	15	440.624.433	15	1.772.901.795	100%	97.41%	30	1.772.901.795	66.67%	31.51%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	480	113.800.000	156	0	150	37.800.000	40	8.700.000	40	8.700.000	35	6.900.000	35	6.900.000	150	31.200.000	100%	82.54%	306	31.200.000	63.75%	27.42%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	Persen	97	123.000.000	90	0	95	65.890.000	15		0	35	10.182.000	25	12.840.500	20	42.233.000	95	65.255.500	100%	99.04%	185	65.255.500	190.72%	53.05%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	79.000.000	5	0	5	65.890.000	0		0	2	10.182.000	2	12.840.500	1	42.233.000	5	65.255.500	100%	99.04%	10	65.255.500	55.56%	82.6%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Persen	98	121.000.000	98	0	96	22.450.000	0	2.381.500	35	10.518.200	40	3.571.184	21	5.464.750	96	21.935.634	100%	97.71%	194	21.935.634	197.96%	18.13%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	1	0	4	17.000.000	1	2.381.500	1	8.518.200	1	3.571.184	1	2.364.750	4	16.835.634	100%	99.03%	5	16.835.634	41.67%	46.77%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	34.000.000	6	0	4	5.450.000	0		0	2	2.000.000	1	0	1	3.100.000	4	5.100.000	100%	93.58%	10	5.100.000	83.33%	15%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang di sediakan	Persen	99	456.000.000	99	0	97	53.962.028	20	7.288.500	25	5.690.000	30	4.000.000	22	34.780.550	97	51.759.050	100%	95.92%	196	51.759.050	197.98%	11.35%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	116.000.000	2	0	2	35.271.700	2	6.300.000	2	3.790.000	2	4.000.000	2	20.058.750	2	34.148.750	100%	96.82%	4	34.148.750	66.67%	29.44%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	37.000.000	7	0	5	6.000.000	1	988,5	1	1.900.000	2	0	1	2.791.800	5	5.680.300	100%	94.67%	12	5.680.300	80%	15.35%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	130.000.000	1	0	1	12.690.328	0		0	0	0	0	1	11.930.000	1	11.930.000	100%	94.01%	2	11.930.000	66.67%	9.18%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	99	382.500.000	97	0	97	124.587.500	20	30.155.592	25	30.219.616	30	29.768.500	22	32.024.700	97	122.168.408	100%	98.06%	194	122.168.408	195.96%	31.94%	KECAMATAN BATUMARMAR	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9	37.000.000	2	0	3	11.387.500	3	2.255.592	3	2.319.616	3	1.868.500	3	4.124.700	3	10.568.408	100%	92.81%	5	10.568.408	55.56%	28.56%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	340.000.000	12	0	12	113.200.000	12	27.900.000	12	27.900.000	12	27.900.000	12	27.900.000	12	111.600.000	100%	98.59%	24	111.600.000	66.67%	32.82%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	Persen	99	618.000.000	99	0	97	93.222.462	0	0	10	0	10	0	77	92.850.000	97	92.850.000	100%	99.6%	196	92.850.000	197.98%	15.02%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	176.500.000	0	0	4	36.054.354	0	0	0	0	0	0	4	35.850.000	4	35.850.000	100%	99.43%	4	35.850.000	20%	20.31%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	145.000.000	1	0	1	57.168.108	0	0	0	0	0	0	1	57.000.000	1	57.000.000	100%	99.71%	2	57.000.000	66.67%	39.31%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	18.955.134.263	81	0	82	5.146.648.975	22	457.581.143	22	1.980.161.252	22	1.068.807.757	16	783.954.602	82	4.290.504.754	100%	83.37%	163	4.290.504.754	198.78%	22.64%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen, Evaluasi	12	270.000.000	12	0	12	108.813.000	0	0	5	11.530.000	5	16.080.000	1	58.420.000	1	86.030.000	8.33%	79.06%	13	86.030.000	108.33%	31.86%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	210.000.000	12	0	12	88.813.000	0	0	5	3.650.000	5	8.710.000	2	56.570.000	12	68.930.000	100%	77.61%	24	68.930.000	200%	32.82%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	30.000.000	10	0	12	10.000.000	0	0	6	5.000.000	6	5.000.000	0	0	0	10.000.000	0%	100%	10	10.000.000	83.33%	33.33%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi	4	30.000.000	4	0	4	10.000.000	0	0	1	2.880.000	1	2.370.000	2	1.850.000	2	7.100.000	50%	71%	6	7.100.000	150%	23.67%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	14.546.656.800	1	0	1	4.306.352.026	1	385.368.343	0	1.718.392.252	0	901.285.057	0	566.550.495	0	3.571.596.147	0%	82.94%	1	3.571.596.147	33.33%	24.55%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	128	14.442.256.800	12	0	128	4.267.952.026	12	385.368.343	52	1.700.092.252	32	892.135.057	68	555.600.495	68	3.533.196.147	53.13%	82.78%	80	3.533.196.147	62.5%	24.46%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	104.400.000	6	0	4	38.400.000	0	0	2	18.300.000	1	9.150.000	1	10.950.000	4	38.400.000	100%	100%	10	38.400.000	83.33%	36.78%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	30	120.000.000	20	0	10	57.381.000	0	0	0	0	4	5.920.000	4	1.110.000	8	7.030.000	80%	12.25%	28	7.030.000	93.33%	5.86%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	57	120.000.000	20	0	19	57.381.000	0	0	0	0	4	5.920.000	2	1.110.000	6	7.030.000	31.58%	12.25%	26	7.030.000	45.61%	5.86%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	57	358.950.000	19	0	19	124.600.200	0	0	7	56.521.800	5	21.598.000	7	32.920.600	19	111.040.400	100%	89.12%	38	111.040.400	66.67%	30.93%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	30.000.000	20	0	20	15.000.000	0	0	6	4.979.000	1	830	11	9.141.000	18	14.950.000	90%	99.67%	38	14.950.000	63.33%	49.83%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	103.950.000	4	0	4	34.650.000	0	0	2	18.900.000	1	3.150.000	1	9.450.000	4	31.500.000	100%	90.91%	8	31.500.000	66.67%	30.3%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	45.000.000	8	0	8	15.000.000	0	0	3	5.071.800	2	1.250.000	3	6.890.000	8	13.211.800	100%	88.08%	16	13.211.800	66.67%	29.36%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	4	0	4	59.950.200	0	0	2	27.571.000	1	16.368.000	1	7.439.600	4	51.378.600	100%	85.7%	8	51.378.600	66.67%	28.54%	KECAMATAN PAMEKASAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpas	24	413.752.611	4	0	8	99.841.392	0	0	3	71.325.000	2	24.800.000	3	854,4	8	96.979.400	100%	97.13%	12	96.979.400	50%	23.44%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	12	75.000.000	0	0	3	23.354.400	0	0	1	10.900.000	1	11.600.000	1	854,4	3	23.354.400	100%	100%	3	23.354.400	25%	31.14%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpas	159	248.752.611	44	0	53	76.486.992	0	0	19	60.425.000	6	13.200.000	0	0	25	73.625.000	47.17%	96.26%	69	73.625.000	43.4%	29.6%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	12	1.076.400.000	4	0	4	353.799.600	1	72.212.800	1	98.362.200	1	77.114.400	1	88.003.350	4	335.692.750	100%	94.88%	8	335.692.750	66.67%	31.19%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	18.000.000	12	0	12	6.000.000	0	0	4	2.940.000	0	0	8	3.050.000	12	5.990.000	100%	99.83%	24	5.990.000	66.67%	33.28%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	158.400.000	12	0	12	47.799.800	3	6.662.800	3	16.110.600	3	12.845.450	2	10.656.750	11	46.275.600	91.67%	96.81%	23	46.275.600	63.89%	29.21%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	90.000.000	12	0	12	29.999.800	0	0	6	14.511.600	2	2.468.950	3	10.246.600	11	27.227.150	91.67%	90.76%	23	27.227.150	63.89%	30.25%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	810.000.000	12	0	12	270.000.000	3	65.550.000	3	64.800.000	3	61.800.000	3	64.050.000	12	256.200.000	100%	94.89%	24	256.200.000	66.67%	31.63%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	45	2.169.374.852	13	0	15	95.861.757	0	0	6	24.030.000	4	22.010.300	5	36.095.757	15	82.136.057	100%	85.68%	28	82.136.057	62.22%	3.79%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	198.682.800	12	0	3	65.863.800	0	0	1	17.965.000	1	10.777.800	1	23.426.300	3	52.169.100	100%	79.21%	15	52.169.100	125%	26.26%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	mebel	12	22.500.000	0	0	3	7.497.957	0	0	0	0	0	0	3	7.497.957	3	7.497.957	100%	100%	3	7.497.957	25%	33.32%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	24	67.500.000	8	0	8	22.500.000	0	0	2	6.065.000	4	11.232.500	2	5.171.500	8	22.469.000	100%	99.86%	16	22.469.000	66.67%	33.29%			KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100	6.119.899.620	100	0	100	1.434.081.116	25	198.794.942	25	365.228.236	25	266.734.810	25	518.682.558	25	1.349.440.546	25%	94.1%	125	1.349.440.546	125%	22.05%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen/ Evaluasi	10	96.000.000	10	0	10	72.430.467	2,5	0	2,5	7.940.000	2,5	7.447.250	2,5	41.770.000	10	57.157.250	100%	78.91%	20	57.157.250	200%	59.54%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	60.000.000	3	0	8	70.930.467	0	0	2	7.940.000	1,2	7.447.250	2	40.660.000	5,2	56.047.250	65%	79.02%	8,2	56.047.250	102.5%	93.41%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	4	9.000.000	4	0	4	1.500.000	0	0	0	0	0	2	1.110.000	2	1.110.000	50%	74%	6	1.110.000	150%	12.33%			KECAMATAN PALENGGAAN	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	4.793.899.620	1	0	1	887.196.118	1	146.292.942	0	294.232.576	0	182.904.780	0	241.938.208	1	865.368.506	100%	97.54%	2	865.368.506	200%	18.05%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	4.673.899.620	14	0	14	855.996.118	3,5	138.492.942	3,5	286.832.576	3,5	175.704.780	3	234.738.208	13,5	835.768.506	96.43%	97.64%	27,5	835.768.506	196.43%	17.88%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	umlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	4	120.000.000	4	0	4	31.200.000	1	7.800.000	1	7.400.000	1	7.200.000	1	7.200.000	4	29.600.000	100%	94.87%	8	29.600.000	200%	24.67%			KECAMATAN PALENGGAAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	15	150.000.000	15	0	15	86.348.407	3,75	0	3,75	5.382.750	3,75	21.022.750	3,75	48.673.000	15	75.078.500	100%	86.95%	30	75.078.500	200%	50.05%			KECAMATAN PALENGGAAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	10	120.000.000	10		0	10	86.348.407	2,5		0	2,5	5.382.750	2,5	21.022.750	2,5	48.673.000	10	75.078.500	100%	86.95%	20	75.078.500	200%	62.57%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	80	30.000.000	75		0	80	10.000.000	20		0	20	2.262.250	20	720	20	1.855.000	80	4.837.250	100%	48.37%	155	4.837.250	193.75%	16.12%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Logistik	4150	15.000.000	4150		0	4150	5.000.000	1037		0	1037	1.053.100	1000	700	1000	140	4074	1.893.100	98.17%	37.86%	8224	1.893.100	198.17%	12.62%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cetakan/Penggadaan	5550	15.000.000	5550		0	5550	5.000.000	1387		0	1387	1.209.150	900	20	1000	1.715.000	4674	2.944.150	84.22%	58.88%	10224	2.944.150	184.22%	19.63%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang	186	300.000.000	179		0	186	137.394.024	46		0	46	0	46	0	48	125.679.410	186	125.679.410	100%	91.47%	365	125.679.410	196.24%	41.89%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel	10	60.000.000	10		0	10	5.537.457	0		0	0	0	0	7	4.062.600	7	4.062.600	70%	73.37%	17	4.062.600	170%	6.77%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	90.000.000	10		0	10	70.489.551	0		0	0	0	0	8	69.126.810	8	69.126.810	80%	98.07%	18	69.126.810	180%	76.81%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan	2	50.000.000	2		0	2	61.367.016	0		0	0	0	0	2	52.490.000	2	52.490.000	100%	85.53%	4	52.490.000	200%	104.98%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	212	645.000.000	212		0	212	215.858.200	53	49.704.800	53	51.214.860	53	50.363.230	53	53.494.940	212	204.777.830	100%	94.87%	424	204.777.830	200%	31.75%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa	40	45.000.000	36		0	40	15.858.200	5	1.454.800	5	2.764.860	5	1.363.230	5	2.894.940	20	8.477.830	50%	53.46%	56	8.477.830	140%	18.84%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa	160	600.000.000	160		0	160	200.000.000	20	48.250.000	30	48.450.000	20	49.000.000	30	50.600.000	100	196.300.000	62.5%	98.15%	260	196.300.000	162.5%	32.72%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarana	149	105.000.000	139		0	149	24.853.900	37	2.797.200	37	4.195.800	37	4.276.800	38	5.272.000	149	16.541.800	100%	66.56%	288	16.541.800	193.29%	15.75%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jasa/Perizinan	42	75.000.000	42		0	42	24.853.900	5	2.797.200	5	4.195.800	5	4.276.800	7	5.272.000	22	16.541.800	52.38%	66.56%	64	16.541.800	152.38%	22.06%	KECAMATAN PALENGAAN	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai	100	17.603.507.928	100	2.183.342.896	80	2.216.332.826	0	416.073.902	0	656.258.472	0	498.950.035	76,4	607.036.744	76,4	2.178.319.153	95.5%	98.28%	176,4	4.361.662.049	176.4%	24.78%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	153	790.000.000	44	19.372.900	51	26.825.000	18	0	5	1.569.000	18	16.365.000	10	8.889.000	51	26.823.000	100%	99.99%	95	46.195.900	62.09%	5.85%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9	300.000.000	7	19.372.900	3	26.825.000	0	0	1	1.569.000	1	16.365.000	1	8.889.000	3	26.823.000	100%	99.99%	10	46.195.900	111.11%	15.4%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit kerja	12	8.540.507.928	4	1.717.851.232	4	1.716.619.292	1	354.199.390	1	541.578.502	1	364.202.531	1	440.005.884	4	1.699.986.307	100%	99.03%	8	3.417.837.539	66.67%	40.02%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	288	8.540.507.928	96	1.717.851.232	96	1.716.619.292	24	354.199.390	24	541.578.502	24	364.202.531	24	440.005.884	96	1.699.986.307	100%	99.03%	192	3.417.837.539	66.67%	40.02%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	30	820.000.000	0		0	6	23.320.000	0	0	0	0	2	8.640.000	4	13.000.000	6	21.640.000	100%	92.8%	6	21.640.000	20%	2.64%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	30	150.000.000	0		0	6	23.320.000	0	0	0	0	2	8.640.000	4	13.000.000	6	21.640.000	100%	92.8%	6	21.640.000	20%	14.43%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	paket	12	720.000.000	3	87.428.944	4	109.334.850	0	0	3	37.333.600	0	35.258.000	1	36.099.750	4	108.691.350	100%	99.41%	7	196.120.294	58.33%	27.24%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	45.000.000	1	4.972.400	1	2.991.900	0	0	1	1.124.400	0	0	0	1.828.000	1	2.952.400	100%	98.68%	2	7.924.800	66.67%	17.61%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	3	170.000.000	1	39.096.300	1	51.352.950	0	0	1	11.092.500	0	9.135.500	0	30.932.450	1	51.160.450	100%	99.63%	2	90.256.750	66.67%	53.09%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	30.000.000	1	4.595.200	1	5.000.000	0	0	1	2.791.700	0	1.669.000	0	539,3	1	5.000.000	100%	100%	2	9.595.200	66.67%	31.98%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	90	220.000.000	37	38.765.044	19	49.990.000	0	0	8	22.325.000	11	24.453.500	0	2.800.000	19	49.578.500	100%	99.18%	56	88.343.544	62.22%	40.16%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	laporan	75	1.320.000.000	24	256.571.520	24	264.147.484	6	61.874.512	12	61.374.370	18	60.770.504	24	62.788.610	24	246.807.996	100%	93.44%	48	503.379.516	64%	38.13%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	laporan	36	190.000.000	12	32.108.020	12	42.447.484	3	8.174.512	3	7.374.370	3	7.970.504	3	9.988.610	12	33.507.996	100%	78.94%	24	65.616.016	66.67%	34.53%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	36	1.000.000.000	12	219.600.000	12	221.700.000	3	53.700.000	3	54.000.000	3	52.800.000	3	52.800.000	12	213.300.000	100%	96.21%	24	432.900.000	66.67%	43.29%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit	75	1.363.000.000	67	102.118.300	25	76.086.200	0	0	14	14.403.000	1	13.714.000	10	46.253.500	25	74.370.500	100%	97.75%	92	176.488.800	122.67%	12.95%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	9	265.000.000	2	54.313.000	2	59.982.400	0	0	1	12.198.000	1	13.714.000	0	33.475.000	2	59.387.000	100%	99.01%	4	113.700.000	44.44%	42.91%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	9	17.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	0	0	0	0	0	2	1.955.800	2	1.955.800	100%	65.19%	4	4.955.800	44.44%	29.15%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	unit	23	170.000.000	26	14.810.100	21	13.103.800	0	0	13	2.205.000	0	0	8	10.822.700	21	13.027.700	100%	99.42%	47	27.837.800	204.35%	16.38%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	9.275.465.668	82	0	81,5	2.977.336.579	0	564.356.031	0	856.395.122	0	716.077.806	80,55	767.219.809	80,55	2.904.048.768	98.83%	97.54%	162,55	2.904.048.768	198.23%	31.31%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	6	122.500.000	6	0	6	46.051.750	1	3.030.500	2	15.261.750	2	469,5	1	24.890.000	6	43.651.750	100%	94.79%	12	43.651.750	200%	35.63%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	91.000.000	6	0	6	39.290.000	0	0	3	12.000.000	0	0	3	24.890.000	6	36.890.000	100%	93.89%	12	36.890.000	200%	40.54%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	70	6.000.000	44	0	70	2.000.000	50	1.530.500	0	0	20	469,5	0	0	70	2.000.000	100%	100%	114	2.000.000	162.86%	33.33%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	20	6.000.000	10	0	20	1.262.000	0	0	20	1.262.000	0	0	0	0	20	1.262.000	100%	100%	30	1.262.000	150%	21.03%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	30	6.000.000	10	0	30	1.999.750	0	0	30	1.999.750	0	0	0	0	30	1.999.750	100%	100%	40	1.999.750	133.33%	33.33%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi	4	9.000.000	0	0	2	1.500.000	2	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2	1.500.000	100%	100%	2	1.500.000	50%	16.67%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	7.463.164.476	1	0	3	2.397.912.957	1	479.080.994	1	738.675.562	0	498.675.027	1	615.857.034	3	2.332.288.617	100%	97.26%	4	2.332.288.617	133.33%	31.25%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	7.362.364.476	28	0	28	2.364.312.957	28	470.680.994	0	730.275.562	0	490.275.027	0	607.457.034	28	2.298.688.617	100%	97.22%	56	2.298.688.617	200%	31.22%	KECAMATAN PADEMAWU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%				
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kawatasa SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kawatasa SKPD	Dokumen	4	100.800.000	12	0	4	33.600.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	4	33.600.000	100%	100%	16	33.600.000	400%	33.33%	KECAMATAN PADEMAWU		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	7	90.000.000	5	0	7	36.655.997	0	0	5	14.140.000	1	4.860.000	1	17.630.000	7	36.630.000	100%	99.93%	12	36.630.000	171.43%	40.7%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	85.000.000	5	0	5	36.655.997	0	0	3	14.140.000	1	4.860.000	1	17.630.000	5	36.630.000	100%	99.93%	10	36.630.000	200%	43.09%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	75	193.000.000	74	0	75	43.780.850	15	7.213.500	20	13.420.400	35	19.957.550	5	3.189.150	75	43.780.600	100%	100%	149	43.780.600	198.67%	22.68%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	19.000.000	15	0	10	4.999.950	2	1.915.600	0	0	8	3.084.350	0	0	10	4.999.950	100%	100%	25	4.999.950	250%	26.32%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	64.000.000	3	0	20	14.259.000	5	3.246.900	10	4.800.400	3	3.022.300	2	3.189.150	20	14.258.750	100%	100%	23	14.258.750	115%	22.28%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	9.000.000	20	0	5	2.941.000	0	0	0	0	5	2.941.000	0	0	5	2.941.000	100%	100%	25	2.941.000	500%	32.68%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	20.000.000	18730	0	6	3.820.900	2	2.051.000	0	0	4	1.769.900	0	0	6	3.820.900	100%	100%	18736	312266.67 %	19.1%	KECAMATAN PADEMAWU	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	60.000.000	4	0	4	17.760.000	0	0	2	8.620.000	2	9.140.000	0	0	4	17.760.000	100%	100%	8	17.760.000	200%	29.6%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Prasarana	20	170.000.000	10	0	20	44.288.414	0	0	0	0	15	27.173.000	5	14.250.000	20	41.423.000	100%	93.53%	30	41.423.000	150%	24.37%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	45.000.000	10	0	4	14.396.500	0	0	0	0	0	4	14.250.000	4	14.250.000	100%	98.98%	14	14.250.000	350%	31.67%	KECAMATAN PADEMAWU	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	90.000.000	8	0	4	29.891.914	0	0	0	0	4	27.173.000	0	0	4	27.173.000	100%	90.9%	12	27.173.000	300%	30.19%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	3	862.801.192	3	0	3	284.433.111	1	67.230.037	1	69.897.410	0	70.338.893	1	75.423.025	3	282.889.365	100%	99.46%	6	282.889.365	200%	32.79%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	107.407.155	54	0	12	35.152.111	3	8.280.037	3	8.393.410	3	6.230.893	3	10.704.025	12	33.608.365	100%	95.61%	66	33.608.365	550%	31.29%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	30.000.000	12	0	6	9.981.000	0	0	4	2.054.000	1	3.658.000	1	4.269.000	6	9.981.000	100%	100%	18	9.981.000	300%	33.27%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	725.400.000	36	0	12	239.300.000	3	58.950.000	3	59.450.000	3	60.450.000	3	60.450.000	12	239.300.000	100%	100%	48	239.300.000	400%	32.99%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	70	374.000.000	71	0	70	124.213.500	5	7.801.000	10	5.000.000	35	94.603.836	20	15.980.600	70	123.385.436	100%	99.33%	141	123.385.436	201.43%	32.99%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	75.000.000	4	0	3	32.000.000	1	2.500.000	1	5.000.000	1	11.750.000	0	12.736.600	3	31.986.600	100%	99.96%	7	31.986.600	233.33%	42.65%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	30.000.000	3	0	2	13.213.500	1	5.301.000	0	0	1	4.668.500	0	3.244.000	2	13.213.500	100%	100%	5	13.213.500	250%	44.05%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	245.000.000	1	0	1	79.000.000	0	0	0	0	1	78.185.336	0	0	1	78.185.336	100%	98.97%	2	78.185.336	200%	31.91%	KECAMATAN PADEMAWU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
									I		II		III		IV			k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	100	4.748.005.143	100	0	97	1.629.431.713	10	190.161.238	35	522.054.793	45	368.641.185	7	516.023.141	97	1.596.880.357	100%	98%	197	1.596.880.357	197%	33.63%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	150.000.000	4	0	4	85.600.000	1	0	1	9.939.600	1	12.115.000	1	60.911.400	4	82.966.000	100%	96.92%	8	82.966.000	66.67%	55.31%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	150.000.000	12	0	12	80.600.000	3	0	3	9.939.600	0	9.865.000	12	58.161.400	12	77.966.000	100%	96.73%	24	77.966.000	200%	51.98%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21	0	21	0	100	5.000.000	25	0	25	0	25	2.250.000	100	2.750.000	100	5.000.000	100%	100%	121	5.000.000	576.19%	0%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	1	3.988.342.143	1	0	1	1.307.815.919	1	165.507.438	1	477.690.193	1	303.494.285	1	344.274.347	1	1.290.966.263	100%	98.71%	2	1.290.966.263	200%	32.37%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	3.883.342.143	20	0	20	1.274.215.919	0	165.507.438	0	460.890.193	0	295.094.285	14	335.874.347	14	1.257.366.263	70%	98.68%	34	1.257.366.263	170%	32.38%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	105.000.000	20	0	20	33.600.000	5	0	5	16.800.000	5	8.400.000	20	8.400.000	20	33.600.000	100%	100%	40	33.600.000	200%	32%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	ASN	20	75.000.000	20	0	20	52.500.000	5	0	5	4.071.000	5	12.640.000	5	27.593.500	5	44.304.500	25%	84.39%	25	44.304.500	125%	59.07%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	75.000.000	14	0	14	45.000.000	0	0	3	4.071.000	3	10.640.000	8	22.093.500	8	36.804.500	57.14%	81.79%	22	36.804.500	157.14%	49.07%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	12	0	100	7.500.000	25	0	25	0	25	2.000.000	100	5.500.000	100	7.500.000	100%	100%	112	7.500.000	933.33%	0%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	12	370.500.000	20	0	4	105.492.200	1	22.803.800	1	25.141.800	1	29.454.100	1	24.357.000	1	101.756.700	25%	96.46%	21	101.756.700	175%	27.46%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa	3	48.000.000	3	0	3	13.492.200	0	690	0	3.199.900	0	3.179.300	3	4.107.000	3	11.176.200	100%	82.83%	6	11.176.200	200%	23.28%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	25	49.500.000	12	0	25	11.000.000	5	1.863.800	10	1.691.900	0	6.024.800	10	0	10	9.580.500	40%	87.1%	22	9.580.500	88%	19.35%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	7	243.000.000	7	0	7	81.000.000	0	20.250.000	0	20.250.000	0	20.250.000	7	20.250.000	7	81.000.000	100%	100%	14	81.000.000	200%	33.33%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	70	23.250.000	80	0	70	8.000.000	15	600	25	2.712.200	15	4.687.800	15	0	15	8.000.000	21.43%	100%	95	8.000.000	135.71%	34.41%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen	10	7.500.000	5	0	10	3.000.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	10	0	10	3.000.000	100%	100%	15	3.000.000	150%	40%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	15.750.000	5	0	5	5.000.000	0	600	0	1.212.200	0	3.187.800	5	0	5	5.000.000	100%	100%	10	5.000.000	200%	31.75%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Prasarana	45	20.913.000	51	0	45	21.184.794	15	0	5	0	10	0	15	21.184.794	15	21.184.794	33.33%	100%	66	21.184.794	146.67%	101.3%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	2	0	2	21.184.794	0	0	0	0	0	0	2	21.184.794	2	21.184.794	100%	100%	4	21.184.794	200%	0%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	12	120.000.000	20	0	12	48.838.800	5	1.250.000	2	2.500.000	3	6.250.000	7	37.702.100	7	47.702.100	58.33%	97.67%	27	47.702.100	225%	39.75%	KECAMATAN WARU	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jasa	2	75.000.000	2	0	2	28.750.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	6.250.000	2	17.613.300	2	27.613.300	100%	96.05%	4	27.613.300	200%	36.82%	KECAMATAN WARU	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	15.000.000	3	0	3	15.894.000	0	0	0	0	0	3	15.894.000	3	15.894.000	100%	100%	6	15.894.000	200%	105.96%	KECAMATAN WARU		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	2	0	2	4.194.800	0	0	0	0	0	2	4.194.800	2	4.194.800	100%	100%	4	4.194.800	200%	0%	KECAMATAN WARU		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	Persentase	65	10.274.241.903	43	0	48	3.628.238.792	22,5	174.197.600	15,6	812.904.794	39	879.210.572	45	677.123.874	45	2.543.436.840	93.75%	70.1%	88	2.543.436.840	135.38%	24.76%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
				Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Persentase	89		72		78		78		78		78		78		78		100%		150		168.54%			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Kasus	600	2.891.069.399	1089	0	868	690.359.792	145	107.750.000	78	141.244.200	174	50.963.500	49	300.775.746	446	600.733.446	51.38%	87.02%	1535	600.733.446	255.83%	20.78%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	350	180.000.000	757	14.994.000	568	60.000.000	145	0	78	9.450.000	174	26.075.000	49	21.350.000	446	56.875.000	78.52%	94.79%	1203	71.869.000	343.71%	39.93%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	Kasus	100	242.986.915	201	47.188.750	200	90.000.000	44	0	27	11.115.000	47	14.675.000	39	16.525.000	157	42.315.000	78.5%	47.02%	358	89.503.750	358%	36.83%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	627.504.750	4	0	4	380.359.792	1	107.750.000	1	44.950.000	1	1.500.000	1	215.985.746	4	370.185.746	100%	97.33%	8	370.185.746	200%	58.99%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	72.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	2.200.000	0	0	1	36.178.000	1	38.378.000	100%	95.95%	1	38.378.000	100%	53.3%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	360.000.000	30	24.554.000	50	65.000.000	0	0	50	56.514.200	0	660	0	6.000.000	50	63.174.200	100%	97.19%	80	87.728.200	160%	24.37%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	250.200.000	0	0	4	55.000.000	1	0	1	17.015.000	1	8.053.500	1	4.737.000	4	29.805.500	100%	54.19%	4	29.805.500	100%	11.91%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peraturan	16	7.281.172.504	13	0	14	2.937.879.000	14	66.447.600	14	671.660.594	14	828.247.072	14	376.348.128	14	1.942.703.394	100%	66.13%	27	1.942.703.394	168.75%	26.68%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	12	3.527.116.275	11	1.017.194.800	12	1.350.000.000	3	0	3	454.018.394	3	412.056.850	3	238.042.500	12	1.104.117.744	100%	81.79%	23	2.121.312.544	191.67%	60.14%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	126.000.000	12	9.020.000	12	35.000.000	3	0	3	5.805.000	3	8.416.500	3	20.369.200	12	34.590.700	100%	98.83%	24	43.610.700	200%	34.61%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai	Laporan	12	3.424.831.992	12	0	12	1.552.879.000	3	66.447.600	3	211.837.200	3	407.773.722	3	117.936.428	12	803.994.950	100%	51.77%	24	803.994.950	200%	23.48%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak	laporan	1	79.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persentase	100	2.907.737.795	100	0	100	155.000.000	100	11.959.000	100	24.316.800	100	45.637.300	100	67.099.481	100	149.012.581	100%	96.14%	200	149.012.581	200%	5.12%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Kali	35	2.823.737.795	51	0	45	140.000.000	10	11.959.000	12	21.816.800	5	44.337.300	157	61.039.481	184	139.152.581	408.89%	99.39%	235	139.152.581	671.43%	4.93%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	18.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	1	2.238.000	0	0	1	2.240.000	1	4.478.000	100%	89.56%	2	4.478.000	200%	24.88%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	Laporan	12	326.862.000	12	0	12	75.000.000	3	11.959.000	3	17.910.000	3	15.290.000	3	29.645.781	12	74.804.781	100%	99.74%	24	74.804.781	200%	22.89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	Dokumen	4	72.000.000	4	0	4	20.000.000	1	0	1	1.668.800	1	9.047.500	1	9.283.700	4	20.000.000	100%	100%	8	20.000.000	200%	27.78%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	Unit	2	1.531.965.745	5	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	19.999.800	0	0	1	19.999.800	100%	100%	6	19.999.800	300%	1.31%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2	72.000.000	2	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	19.870.000	2	19.870.000	100%	99.35%	4	19.870.000	200%	27.6%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kali	12	20.000.000	0	0	12	5.000.000	3	0	3	2.500.000	3	0	3	2.500.000	12	5.000.000	100%	100%	12	5.000.000	100%	25%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
							I			II		III		IV		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%			
							k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	5.000.000	0	0	4	5.000.000	1	0	1	2.500.000	0	0	2	2.500.000	4	5.000.000	100%	100%	4	5.000.000	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	10	46.000.000	0	0	10	10.000.000	0	0	0	0	1.300.000	10	3.560.000	10	4.860.000	100%	48.6%	10	4.860.000	100%	10.57%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap	Desa/Kelur ahan	1	36.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	3.560.000	1	3.560.000	100%	71.2%	1	3.560.000	100%	9.89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	50	10.000.000	0	0	25	5.000.000	0	0	0	25	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0%	26%	0	1.300.000	0%	13%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100	265.000.000	100	0	100	197.364.900	12,5	17.454.000	62,5	95.257.900	12,5	42.087.400	12,5	41.136.900	100	195.936.200	100%	99.28%	200	195.936.200	200%	73.94%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dikecamatan yang tertangani	Persentase	100	265.000.000	100	0	100	197.364.900	12,5	17.454.000	62,5	95.257.900	12,5	42.087.400	12,5	41.136.900	100	195.936.200	100%	99.28%	200	195.936.200	200%	73.94%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	8	235.000.000	10	0	8	197.364.900	1	17.454.000	5	95.257.900	1	42.087.400	1	41.136.900	8	195.936.200	100%	99.28%	18	195.936.200	225%	83.38%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang tertangani	Persentase	99	510.000.000	97	0	97	302.414.900	22	86.083.600	22	69.885.300	25	41.490.800	28	97.129.000	97	294.588.700	100%	97.41%	194	294.588.700	195.96%	57.76%	KECAMATAN WARU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang tertangani	persen	100	510.000.000	90	0	100	302.414.900	25	86.083.600	25	69.885.300	25	41.490.800	25	97.129.000	25	294.588.700	25%	97.41%	115	294.588.700	115%	57.76%	KECAMATAN WARU
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	100	225.000.000	100	0	100	14.100.000	25	0	25	1.982.800	25	8.464.000	100	3.477.000	100	13.923.800	100%	98.75%	200	13.923.800	200%	6.19%	KECAMATAN WARU
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persen	100	285.000.000	100	0	100	288.314.900	25	86.083.600	25	67.902.500	0	33.026.800	100	93.652.000	100	280.664.900	100%	97.35%	200	280.664.900	200%	98.48%	KECAMATAN WARU
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100	60.000.000	90	0	95	8.000.000	0	0	0	0	0	95	8.000.000	95	8.000.000	100%	100%	185	8.000.000	185%	13.33%	KELURAHAN PARTEKER	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	%	100	60.000.000	90		0	95	8.000.000	0		0	0		0	95	8.000.000	95	8.000.000	100%	100%	185	8.000.000	185%	13.33%	KELURAHAN PARTEKER
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	%	100		95		100		0		0		0		100		100		100%		195		195%			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	36	30.000.000	0		0	12	4.000.000	0		0	0		0	12	4.000.000	12	4.000.000	100%	100%	12	4.000.000	33.33%	13.33%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Laporan	24	30.000.000	0		0	8	4.000.000	0		0	0		0	8	4.000.000	8	4.000.000	100%	100%	8	4.000.000	33.33%	13.33%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang diselesaikan	%	100	60.000.000	90		0	95	6.150.000	0		0	0		0	90	5.850.000	90	5.850.000	94.74%	95.12%	180	5.850.000	180%	9.75%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang diselesaikan	%	100	60.000.000	90		0	95	6.150.000	0		0	0		0	95	5.850.000	95	5.850.000	100%	95.12%	185	5.850.000	185%	9.75%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	36	30.000.000	0		0	12	6.150.000	0		0	0		0	11	5.850.000	11	5.850.000	91.67%	95.12%	11	5.850.000	30.56%	19.5%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	60.000.000	100		0	100	186.550.160	100	55.257.000	100	29.997.800	100	44.283.100	100	41.340.000	100	170.877.900	100%	91.6%	200	170.877.900	200%	284.8%	KECAMATAN GALIS
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang diselesaikan	Persen	100	60.000.000	100		0	100	186.550.160	100	55.257.000	100	29.997.800	100	44.283.100	100	41.340.000	100	170.877.900	100%	91.6%	200	170.877.900	200%	284.8%	KECAMATAN GALIS
		7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	4	20.000.000	120		0	4	25.000.000	1	2.090.200	1	3.543.200	2	19.366.600	0	0	4	25.000.000	100%	100%	124	25.000.000	3100%	125%	KECAMATAN GALIS
		7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Laporan	5	40.000.000	120		0	5	161.550.160	2	53.166.800	1	26.454.600	1	24.916.500	1	41.340.000	5	145.877.900	100%	90.3%	125	145.877.900	2500%	364.69%	KECAMATAN GALIS
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	99	175.000.000	100		0	97	223.888.725	19	47.769.900	20	73.518.600	39	40.906.650	19	59.350.800	97	221.545.950	100%	98.95%	197	221.545.950	198.99%	126.6%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang diselesaikan	Persen	99	175.000.000	100		0	97	223.888.725	19	47.769.900	20	73.518.600	39	40.906.650	19	59.350.800	97	221.545.950	100%	98.95%	197	221.545.950	198.99%	126.6%	KECAMATAN PASEAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	31.000.000	0		0	4.767.600	0		0	700	1	4.065.600	0		0	1	4.765.600	100%	99.96%	1	4.765.600	8.33%	15.37%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	15	142.000.000	22		0	4	219.121.125	1	47.769.900	1	72.818.600	1	36.841.050	1	59.350.800	4	216.780.350	100%	98.93%	26	216.780.350	173.33%	152.66%	KECAMATAN PASEAN	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang difasilitasi	%	100	45.000.000	100		0	100	3.658.800	0		0	100	3.658.800	0	0	0	100	3.658.800	100%	100%	200	3.658.800	200%	8.13%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan yang difasilitasi	Persen	100	45.000.000	100		0	100	3.658.800	0		0	100	3.658.800	0	0	0	100	3.658.800	100%	100%	200	3.658.800	200%	8.13%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	30.000.000	1		0	2	3.658.800	0		0	2	3.658.800	0	0	0	2	3.658.800	100%	100%	3	3.658.800	150%	12.2%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang difasilitasi	Persentase	92	210.000.000	89		0	90	238.776.500	13	67.016.750	30	84.157.250	37	41.776.500	5	40.904.500	85	233.855.000	94.44%	97.94%	174	233.855.000	189.13%	111.36%	KECAMATAN PROPPPO	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan yang difasilitasi	Persentase	92	210.000.000	89		0	90	238.776.500	13	67.016.750	30	84.157.250	0	41.776.500	46	40.904.500	89	233.855.000	98.89%	97.94%	178	233.855.000	193.48%	111.36%	KECAMATAN PROPPPO	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	60.000.000	6		0	6	25.579.750	2	7.694.750	2	5.885.000	0		0	2	11.064.000	6	24.643.750	100%	96.34%	12	24.643.750	200%	41.07%	KECAMATAN PROPPPO
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	95	150.000.000	95		0	95	213.196.750	10	59.322.000	30	78.272.250	25	41.776.500	10	29.840.500	75	209.211.250	78.95%	98.13%	170	209.211.250	178.95%	139.47%	KECAMATAN PROPPPO	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang difasilitasi	%	100	60.000.000	90		0	95	6.000.000	0		0	0	0	0	95	5.850.000	95	5.850.000	100%	97.5%	185	5.850.000	185%	9.75%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang difasilitasi	persen	100	60.000.000	90		0	95	6.000.000	0		0	0	0	0	95	5.850.000	95	5.850.000	100%	97.5%	185	5.850.000	185%	9.75%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	36	30.000.000	0		0	12	6.000.000	0		0	0	0	12	5.850.000	12	5.850.000	100%	97.5%	12	5.850.000	33.33%	19.5%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang difasilitasi	Persentase	90	30.702.322	80		0	80	326.890.900	25	55.784.100	25	118.017.840	15	42.600.000	15	16.870.000	80	233.271.940	100%	71.36%	160	233.271.940	177.78%	759.79%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	90	30.702.322	80		0	85	326.890.900	25	55.784.100	25	118.017.840	20	42.600.000	15	16.870.000	85	233.271.940	100%	71.36%	165	233.271.940	183.33%	759.79%	KECAMATAN PEGANTENAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
												I		II		III		IV															
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	4	9.925.770	4		0	4	25.000.000	1		0	1		0	2	24.800.000	0		0	4	24.800.000	100%	99.2%	8	24.800.000	200%	249.85%	KECAMATAN PEGANTENAN	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	8	20.470.641	8		0	8	301.890.900	2	55.784.100	2	118.017.840	2	17.800.000	2	16.870.000	8	208.471.940	100%	69.06%	16	208.471.940	200%	1018.39%	KECAMATAN PEGANTENAN				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang terdampak	%	100	45.000.000	100		0	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100		0	100%	0%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang terdampak	Persentase	100	384.000.000	90		0	95	328.742.000	15	43.330.000	25	140.648.200	25	50.175.000	15	28.950.000	80	263.103.200	84.21%	80.03%	170	263.103.200	170%	68.52%	KECAMATAN PAMEKASAN				
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terdampak	Persentase	100	384.000.000	90		0	95	328.742.000	15	43.330.000	25	140.648.200	25	50.175.000	15	28.950.000	15	263.103.200	15.79%	80.03%	105	263.103.200	105%	68.52%	KECAMATAN PAMEKASAN				
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	36	180.000.000	4		0	12	105.522.000	0		0	6	24.965.000	3	13.637.500	1	11.100.000	10	49.702.500	83.33%	47.1%	14	49.702.500	38.89%	27.61%	KECAMATAN PAMEKASAN			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	24	204.000.000	8		0	8	223.220.000	2	43.330.000	2	115.683.200	2	36.537.500	2	17.850.000	8	213.400.700	100%	95.6%	16	213.400.700	66.67%	104.61%	KECAMATAN PAMEKASAN				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	165.000.000	90		0	100	225.020.280	25	32.017.600	25	86.546.000	25	41.894.000	21,28	56.192.300	96,28	216.649.900	96.28%	96.28%	186,28	216.649.900	186.28%	131.3%	KECAMATAN KADUR				
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terdampak	%	100	165.000.000	90		0	95	225.020.280	20	32.017.600	30	86.546.000	20	41.894.000	25	56.192.300	95	216.649.900	100%	96.28%	185	216.649.900	185%	131.3%	KECAMATAN KADUR				
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	18	30.000.000	4		0	4	10.000.000	0		0	0	0	1	2.672.100	3	6.962.500	4	9.634.600	100%	96.35%	8	9.634.600	44.44%	32.12%	KECAMATAN KADUR			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	24	135.000.000	8		0	8	215.020.280	2	32.017.600	2	86.546.000	2	39.221.900	2	49.229.800	8	207.015.300	100%	96.28%	16	207.015.300	66.67%	153.34%	KECAMATAN KADUR				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang terdampak	%	100	60.000.000	90		0	95	10.000.000	0		0	0	0	0	95	8.650.000	95	8.650.000	100%	86.5%	185	8.650.000	185%	14.42%	KELURAHAN PATEMON				
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terdampak	%	100	60.000.000	90		0	95	10.000.000	0		0	0	0	0	95	8.650.000	95	8.650.000	100%	86.5%	185	8.650.000	185%	14.42%	KELURAHAN PATEMON				
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	24	30.000.000	0		0	8	10.000.000	0		0	0	0	0	8	8.650.000	8	8.650.000	100%	86.5%	8	8.650.000	33.33%	28.83%	KELURAHAN PATEMON				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persentase	89	47.500.000	80		83	137.420.340	20	38.700.000	20	82.703.100	23	15.950.000	20		83	137.353.100	100%	99.95%	163	137.353.100	183.15%	289.16%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persen	100	47.500.000	100		100	134.920.340	25	38.700.000	25	82.286.100	25	13.900.000	25		100	134.886.100	100%	99.97%	200	134.886.100	200%	283.97%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.04.7.03 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang dilaksanakan	kali	2	45.000.000	2		2	134.920.340	2	38.700.000	2	82.286.100	2	13.900.000	2		2	134.886.100	100%	99.97%	4	134.886.100	200%	299.75%	KECAMATAN LARANGAN		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persen	100	50.000.000	100	489.050.000	100	2.500.000	25		0	25	417	25	2.050.000	25		100	2.467.000	100%	98.68%	200	491.517.000	200%	983.03%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas/Koordinasi yang dilakukan	Koordinasi	2		0	2		2.500.000	2		0	2	417	2	2.050.000	2		0	2	2.467.000	100%	98.68%	4	2.467.000	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	206.000.000	0		0	212.262.644	15	60.620.500	35	57.843.600	35	28.287.400	15	24.773.000	100	171.524.500	100%	80.81%	100	171.524.500	100%	83.26%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	Persen	99	206.000.000	100		0	212.262.644	15	60.620.500	35	57.843.600	35	28.287.400	12	24.773.000	97	171.524.500	100%	80.81%	197	171.524.500	198.99%	83.26%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	45.000.000	0		0	4	15.000.000	1		0	1	7.346.000	1	7.455.000	4	14.801.000	100%	98.67%	4	14.801.000	33.33%	32.89%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	15	160.000.000	6		0	5	197.262.644	1	60.620.500	2	50.497.600	1	20.832.400	1	24.773.000	5	156.723.500	100%	79.45%	11	156.723.500	73.33%	97.95%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang terfasilitasi	Persentase	100	60.000.000	90		0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	%	100	60.000.000	90		0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang terfasilitasi	%	100	60.000.000	90		0	95	6.756.269	0	0	0	95	3.000.000	95	0	95	3.000.000	100%	44.4%	185	3.000.000	185%	5%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	%	100	60.000.000	90		0	95	6.756.269	0	0	0	95	3.000.000	95	0	95	3.000.000	100%	44.4%	185	3.000.000	185%	5%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	24	30.000.000	0		0	8	6.756.269	0	0	0	8	3.000.000	0	0	8	3.000.000	100%	44.4%	8	3.000.000	33.33%	10%	KELURAHAN KANGENAN		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	53.000.000	100	0	100	253.199.408	30	62.053.300	20	66.542.400	30	28.770.900	20	31.370.000	100	188.736.600	100%	74.54%	200	188.736.600	200%	356.11%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang dijadwalkan	%	100	53.000.000	100	0	100	253.199.408	30	62.053.300	20	66.542.400	35	28.770.900	15	31.370.000	100	188.736.600	100%	74.54%	200	188.736.600	200%	356.11%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.04.2.01. .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	18	41.000.000	6	0	6	243.199.408	2	62.053.300	2	56.868.800	1	28.770.900	1	31.370.000	6	179.063.000	100%	73.63%	12	179.063.000	66.67%	436.74%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.04.2.01. .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Kegiatan Sinergitas /koordinasi yang diselenggarakan	Kegiatan	4	20.000.000	2	9.975.000	2	10.000.000	0	0	2	9.673.600	0	0	0	0	2	9.673.600	100%	96.74%	4	19.648.600	100%	98.24%			KECAMATAN TLANAKAN	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang dijadwalkan	Persentase	100	60.000.000	90	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%			KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang dijadwalkan	Persen	100	60.000.000	90	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%			KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan atau gangguan diwilayah kecamatan yang dijadwalkan	Persentase	100	180.000.000	100	0	100	218.384.498	25	50.758.550	25	115.741.700	25	28.700.000	25	22.525.000	25	217.725.250	25%	99.7%	125	217.725.250	125%	120.96%			KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang dijadwalkan	Persentase	100	180.000.000	100	0	100	218.384.498	25	50.758.550	25	115.741.700	25	28.700.000	25	22.525.000	100	217.725.250	100%	99.7%	200	217.725.250	200%	120.96%			KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.04.7.03. .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	4	150.000.000	4	0	4	218.384.498	0,5	50.758.550	1	115.741.700	1	28.700.000	1	22.525.000	3,5	217.725.250	87.5%	99.7%	7,5	217.725.250	187.5%	145.15%			KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang dijadwalkan	%	100	60.000.000	90	0	95	18.550.000	0	0	20	3.500.000	75	15.050.000	5	0	5	18.550.000	5.26%	100%	95	18.550.000	95%	30.92%			KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang dijadwalkan	%	100	60.000.000	90	0	95	18.550.000	0	0	40	3.500.000	30	15.050.000	25	0	25	18.550.000	26.32%	100%	115	18.550.000	115%	30.92%			KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.04.2.01. .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	laporan	36	30.000.000	0	0	12	10.000.000	0	0	6	3.500.000	6	6.500.000	0	0	12	10.000.000	100%	100%	12	10.000.000	33.33%	33.33%			KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.04.2.01. .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	24	30.000.000	0	0	8	8.550.000	0,01	0	0	0	6	8.550.000	0	0	6,01	8.550.000	75.13%	100%	6,01	8.550.000	25.04%	28.5%			KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang dijadwalkan	Persentase	100	95.000.000	92	0	95	223.192.960	15	44.067.300	25	70.241.200	25	31.604.400	30	46.517.200	95	192.430.100	100%	86.22%	187	192.430.100	187%	202.56%			KECAMATAN PAKONG	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	95.000.000	6	0	6	223.192.960	1	44.067.300	2	70.241.200	1	31.604.400	2	46.517.200	2	192.430.100	33.33%	86.22%	8	192.430.100	133.33%	202.56%			KECAMATAN PAKONG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	Kegiatan	12	85.000.000	6	0	12	223.192.960	2	44.067.300	4	70.241.200	3	31.604.400	3	46.517.200	12	192.430.100	100%	86.22%	18	192.430.100	150%	226.39%	KECAMATAN PAKONG	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang terdampak	Persentase	100	60.000.000	90	0	95	0	0	0	0	60	0	35	0	95	0	100%	0%	185	0	185%	0%	KELURAHAN KOWEL		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terdampak	Persen	100	60.000.000	90	0	95	0	0	0	0	70	0	25	0	25	0	26.32%	0%	115	0	115%	0%	KELURAHAN KOWEL		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	75.000.000	100	0	100	19.868.200	25	0	25	0	25	17.968.200	25	1.900.000	25	19.868.200	25%	100%	125	19.868.200	125%	26.49%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Persentase	100	75.000.000	100	0	100	19.868.200	25	0	25	0	25	17.968.200	25	1.900.000	100	19.868.200	100%	100%	200	19.868.200	200%	26.49%	KECAMATAN PALENGAAN	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi	4	75.000.000	4	0	4	19.868.200	0	0	0	2	17.968.200	2	1.900.000	4	19.868.200	100%	100%	8	19.868.200	200%	26.49%	KECAMATAN PALENGAAN		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang terdampak	Persentase	95	20.000.000	0	0	85	0	10	0	20	0	10	0	45	0	85	0	100%	0%	85	0	89.47%	0%	KECAMATAN PAKONG	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang terdampak	Persentase	100	85.000.000	100	0	100	20.135.400	0	0	57,27	0	10.204.500	42,73	9.930.900	0	0	100	20.135.400	100%	100%	200	20.135.400	200%	23.69%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat atau kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Persentase	100	85.000.000	100	0	100	20.135.400	0	0	57,27	0	10.204.500	42,73	9.930.900	0	0	100	20.135.400	100%	100%	200	20.135.400	200%	23.69%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	30.000.000	3	0	100	5.135.400	0	0	60	0	5.135.400	40	0	0	0	100	5.135.400	100%	100%	103	5.135.400	103%	17.12%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6	25.000.000	6	0	6	5.000.000	0	0	0	6	5.000.000	0	0	6	5.000.000	100%	100%	12	5.000.000	200%	20%	KECAMATAN PADEMAWU		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	30.000.000	12	0	4	10.000.000	0	0	3	0	5.069.100	1	4.930.900	0	0	4	10.000.000	100%	100%	16	10.000.000	400%	33.33%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99	45.750.000	97	0	97	19.150.000	20	2.699.300	20	1.769.100	25	11.305.400	32	1.350.000	97	17.123.800	100%	89.42%	194	17.123.800	195.96%	37.43%	KECAMATAN WARU	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	persen	100	45.750.000	90	0	100	19.150.000	25	2.699.300	25	1.769.100	25	11.305.400	25	1.350.000	25	17.123.800	25%	89.42%	115	17.123.800	115%	37.43%	KECAMATAN WARU	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	45.750.000	4	0	4	12.650.000	1	754,6	1	1.769.100	1	8.550.100	1	450	4	11.523.800	100%	91.1%	8	11.523.800	66.67%	25.19%	KECAMATAN WARU	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	56	0	56	0	100	6.500.000	25	1.944.700	25	0	25	2.755.300	100	900	100	5.600.000	100%	86.15%	156	5.600.000	278.57%	0%	KECAMATAN WARU	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab								
														I		II		III		IV																
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	18			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100	20.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	KECAMATAN GALIS
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenal wawasan kebangsaan	Persen	100	20.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	KECAMATAN GALIS
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99	88.500.000	97	0	97	18.583.550	2	6.028.000	1	4.003.750	94	8.536.800	0	0	97	18.568.550	100%	99.92%	194	18.568.550	195.96%	20.98%	KECAMATAN PASEAN								
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenal wawasan kebangsaan	Persen	99	88.500.000	100	0	97	18.583.550	2	6.028.000	1	4.003.750	94	8.536.800	0	0	97	18.568.550	100%	99.92%	197	18.568.550	198.99%	20.98%	KECAMATAN PASEAN								
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	390	32.000.000	65	0	60	7.236.650	0	0	0	1.400.000	60	5.833.650	0	0	60	7.233.650	100%	99.96%	125	7.233.650	32.05%	22.61%	KECAMATAN PASEAN								
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	28.000.000	0	0	1	6.028.000	1	6.028.000	0	0	0	0	0	0	1	6.028.000	100%	100%	1	6.028.000	8.33%	21.53%	KECAMATAN PASEAN								
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	26.500.000	4	0	2	5.318.900	0	0	1	2.603.750	1	2.703.150	0	0	2	5.306.900	100%	99.77%	6	5.306.900	50%	20.03%	KECAMATAN PASEAN								
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100	30.000.000	100	0	100	10.521.700	0	0	100	10.467.500	0	0	100	0	100	10.467.500	100%	99.48%	200	10.467.500	200%	34.89%	KECAMATAN PROPPPO								
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenal wawasan kebangsaan	Persentase	100	30.000.000	100	0	100	10.521.700	0	0	100	10.467.500	0	0	100	0	100	10.467.500	100%	99.48%	200	10.467.500	200%	34.89%	KECAMATAN PROPPPO								
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	3	15.000.000	0	0	3	5.397.700	0	0	3	5.353.500	0	0	0	0	3	5.353.500	100%	99.18%	3	5.353.500	100%	35.69%	KECAMATAN PROPPPO								
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	15.000.000	1	0	1	5.124.000	0	0	1	5.114.000	0	0	0	0	1	5.114.000	100%	99.8%	2	5.114.000	200%	34.09%	KECAMATAN PROPPPO								
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100	36.023.430	100	0	100	37.642.150	25	4.793.800	25	9.493.600	25	23.006.350	25	0	100	37.293.750	100%	99.07%	200	37.293.750	200%	103.53%	KECAMATAN PEGANTENAN								
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenal wawasan kebangsaan	Persen	100	36.023.430	100	0	100	37.642.150	25	4.793.800	25	9.493.600	25	23.006.350	25	0	100	37.293.750	100%	99.07%	200	37.293.750	200%	103.53%	KECAMATAN PEGANTENAN								
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	36.023.430	12	0	12	37.642.150	3	4.793.800	3	9.493.600	3	23.006.350	0	0	9	37.293.750	75%	99.07%	21	37.293.750	175%	103.53%	KECAMATAN PEGANTENAN								
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100	167.547.900	90	0	95	39.094.074	0	0	35	12.365.900	15	4.152.250	45	15.510.000	95	32.028.150	100%	81.93%	185	32.028.150	185%	19.12%	KECAMATAN PAMEKASAN								
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenal wawasan kebangsaan	Persentase	100	167.547.900	90	0	95	39.094.074	0	0	35	12.365.900	15	4.152.250	45	15.510.000	45	32.028.150	47.37%	81.93%	135	32.028.150	135%	19.12%	KECAMATAN PAMEKASAN								
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	950	69.000.000	4	0	300	9.760.024	0	0	0	0	0	300	9.760.000	300	9.760.000	100%	100%	304	9.760.000	32%	14.14%	KECAMATAN PAMEKASAN									

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Laporan	12	42.675.000	4		0	4	9.957.500	0		0	2	5.141.600	0		0	2	2.450.000	4	7.591.600	100%	76.24%	8	7.591.600	66.67%	17.79%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	55.872.900	4		0	4	19.376.550	0		0	2	7.224.300	1	4.152.250	1	3.300.000	4	14.676.550	100%	75.74%	8	14.676.550	66.67%	26.27%	KECAMATAN PAMEKASAN	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100	90.000.000	90		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	90	0	90%	0%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Persen	100	90.000.000	100		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	94	50.000.000	85		0	88	6.450.000	22		0	22	1.000.000	22	3.100.000	22	2.350.000	88	6.450.000	100%	100%	173	6.450.000	184.04%	12.9%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	94	50.000.000	85		0	88	6.450.000	22		0	22	1.000.000	22	3.100.000	22	2.350.000	88	6.450.000	100%	100%	173	6.450.000	184.04%	12.9%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kali	2	15.000.000	2		0	2	2.150.000	2		0	2	0	2	1.000.000	2	1.150.000	2	2.150.000	100%	100%	4	2.150.000	200%	14.33%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	kali	6	21.000.000	4		0	4	4.300.000	1		0	1	1.000.000	1	2.100.000	1	1.200.000	1	4.300.000	25%	100%	5	4.300.000	83.33%	20.48%	KECAMATAN LARANGAN	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	96.000.000	0		0	100	23.885.000	20	3.436.000	30	5.775.000	25	3.000.000	25	10.736.000	100	22.947.000	100%	96.07%	100	22.947.000	100%	23.9%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Persen	99	96.000.000	100		0	97	23.885.000	20	3.436.000	30	5.775.000	25	3.000.000	22	10.736.000	97	22.947.000	100%	96.07%	197	22.947.000	198.99%	23.9%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Laporan	14	39.000.000	5		0	5	10.000.000	1	3.436.000	2	2.000.000	1	0	1	4.100.000	5	9.536.000	100%	95.36%	10	9.536.000	71.43%	24.45%	KECAMATAN BATUMARMAR		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	26.500.000	4		0	4	13.885.000	0		0	1	3.775.000	1	3.000.000	2	6.636.000	4	13.411.000	100%	96.59%	8	13.411.000	66.67%	50.61%	KECAMATAN BATUMARMAR	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100	28.000.000	100		0	100	25.000.000	35	5.327.100	20	14.823.600	45	4.672.900	0	0	100	24.823.600	100%	99.29%	200	24.823.600	200%	88.66%	KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	%	100	28.000.000	100		0	100	25.000.000	35	5.327.100	20	14.823.600	45	4.672.900	0	0	100	24.823.600	100%	99.29%	200	24.823.600	200%	88.66%	KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undaanan	Laporan	12	21.000.000	4		0	4	10.000.000	2	5.327.100	0	0	2	4.672.900	0	0	4	10.000.000	100%	100%	8	10.000.000	66.67%	47.62%	KECAMATAN TLANAKAN		
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0		0	100	15.000.000	0		0	100	14.823.600	0	0	0	0	100	14.823.600	100%	98.82%	100	14.823.600	0%	0%	KECAMATAN TLANAKAN	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	75	3.005.000.000	75	199.197.000	75	578.334.500	25	19.760.000	50	107.406.000	0	243.933.570	0	203.974.900	75	575.074.470	100%	99.44%	150	774.271.470	200%	25.77%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	dokumen	3	3.005.000.000	4	199.197.000	1	578.334.500	1	19.760.000	0	107.406.000	0	243.933.570	0	203.974.900	1	575.074.470	100%	99.44%	5	774.271.470	166.67%	25.77%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Orang	750	400.000.000	575	129.562.000	200	85.170.000	200	19.760.000	0	59.660.000	0	5.150.000	0	0	200	84.570.000	100%	99.3%	775	214.132.000	103.33%	53.53%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Orang	3000	1.300.000.000	805	69.635.000	1876	493.164.500	76	0	600	47.746.000	1000	238.783.570	200	203.974.900	1876	490.504.470	100%	99.46%	2681	560.139.470	89.37%	43.09%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase organisasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	90	12.947.000.000	90	23.271.809.471	90	51.468.777.168	20	6.354.000	25	35.553.745.088	22	13.651.793.200	23	2.194.239.532	90	51.406.131.820	100%	99.88%	180	74.677.941.291	200%	576.8%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	dokumen	3	12.947.000.000	10	23.271.809.471	1	51.468.777.168	1	6.354.000	0	35.553.745.088	0	13.651.793.200	0	2.194.239.532	1	51.406.131.820	100%	99.88%	11	74.677.941.291	366.67%	576.8%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Orang	450	1.300.000.000	190	85.816.771	700	138.300.000	0	0	350	17.660.200	175	67.555.000	175	53.077.800	700	138.293.000	100%	99.99%	890	224.109.771	197.78%	17.24%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	orang	30	9.792.000.000	30	23.185.992.700	675	51.330.477.168	168	6.354.000	171	35.536.084.888	168	13.584.238.200	168	2.141.161.732	675	51.267.838.820	100%	99.88%	705	74.453.831.520	2350%	760.35%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase potensi konflik antar organisasi kemasyarakatan yang tertangani	%	80	3.900.000.000	80	0	80	24.010.000	20	0	20	0	20	13.676.000	20	10.334.000	80	24.010.000	100%	100%	160	24.010.000	200%	0.62%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
							I			II		III		IV																		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	dokumen	3	3.900.000.000	0		0	1	24.010.000	1		0	0		0	13.676.000	0		10.334.000	1	24.010.000	100%	100%	1	24.010.000	33.33%	0.62%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	150	550.000.000	0		0	4	24.010.000	1		0	1	0	1	13.676.000	1		10.334.000	4	24.010.000	100%	100%	4	24.010.000	2.67%	4.37%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	90	1.950.000.000	90	248.319.000	90	1.155.250.000	22		0	22	501.083.600	22		70.560.800	24		582.878.400	90	1.154.522.800	100%	99.94%	180	1.402.841.800	200%	71.94%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	dokumen	3	1.950.000.000	4	248.319.000	1	1.155.250.000	1		0	0	501.083.600	0		70.560.800	0		582.878.400	1	1.154.522.800	100%	99.94%	5	1.402.841.800	166.67%	71.94%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1650	450.000.000	521	248.319.000	135	1.155.250.000	0		0	100	501.083.600	35		70.560.800	0		582.878.400	135	1.154.522.800	100%	99.94%	656	1.402.841.800	39.76%	311.74%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi ATHG yang tertangani	%	85	3.633.000.000	0		0	85	20.660.000	20		760	20		0	20	5.425.000	25		13.556.500	85	19.741.500	100%	95.55%	85	19.741.500	100%	0.54%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	kali	36	3.633.000.000	0		0	12	20.660.000	3		760	3		0	3	5.425.000	3		13.556.500	12	19.741.500	100%	95.55%	12	19.741.500	33.33%	0.54%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	Orang	75	1.383.000.000	0		0	200	20.660.000	50		760	50		0	50	5.425.000	50		13.556.500	200	19.741.500	100%	95.55%	200	19.741.500	266.67%	1.43%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							94.06%	91.51%								
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																							Sangat Tinggi									
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																							87.5%	82.44%								
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																							Tinggi	Tinggi								

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
														I		II		III		IV										
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
10	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,55		54,44		58,5																				
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	25	300.000.000	10	0	15	30.000.000	0		0	0	0	0	15.700.000	10		9.787.000	10	25.487.000	66.67%	84.96%	20	25.487.000	80%	8.5%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga	52	275.000.000	52	0	52	30.000.000	0		0	0	0	0	15.700.000	52		9.787.000	52	25.487.000	100%	84.96%	104	25.487.000	200%	9.27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	125.000.000	1	18.169.000	1	15.000.000	0		0	0	0	0	13.600.000	1		0	1	13.600.000	100%	90.67%	2	31.769.000	200%	25.42%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase	100	629.717.300	100	0	100	216.352.000	0		0	0	28.195.000	0	71.195.000	100		40.250.000	100	139.640.000	100%	64.54%	200	139.640.000	200%	22.18%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	lembaga	1	148.245.000	1	0	1	49.500.000	0		0	0	7.215.000	0	40.690.000	1		0	1	47.905.000	100%	96.78%	2	47.905.000	200%	32.31%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	148.245.000	1	47.508.000	1	49.500.000	0		0	0	7.215.000	0	40.690.000	1		0	1	47.905.000	100%	96.78%	2	95.413.000	200%	64.36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Jumlah korban kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Orang	20	405.506.900	35	0	30	135.500.000	0		0	0	13.075.000	0	12.100.000	22		40.250.000	22	65.425.000	73.33%	48.28%	57	65.425.000	285%	16.13%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	1	355.506.900	1	40.987.412	1	135.500.000	0		0	0	13.075.000	0	12.100.000	1		40.250.000	1	65.425.000	100%	48.28%	2	106.412.412	200%	29.93%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	lembaga	1	75.965.400	1	0	1	31.352.000	0		0	0	7.905.000	0	18.405.000	1		0	1	26.310.000	100%	83.92%	2	26.310.000	200%	34.63%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan	orang	5	75.965.400	5	21.235.700	5	31.352.000	0		0	2	7.905.000	1	18.405.000	2		0	5	26.310.000	100%	83.92%	10	47.545.700	200%	62.59%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	701	150.000.000	601	0	620	13.750.000	0		0	0	5.725.000	0	6.750.000	620		0	620	12.475.000	100%	90.73%	1221	12.475.000	174.18%	8.32%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapat pelatihan pemenuhan hak anak	lembaga	1	150.000.000	1	0	1	13.750.000	0	0	0	5.725.000	0	6.750.000	1	0	1	12.475.000	100%	90.73%	2	12.475.000	200%	8.32%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	125.000.000	4	18.877.000	4	13.750.000	0	0	2	5.725.000	0	6.750.000	2	0	4	12.475.000	100%	90.73%	8	31.352.000	200%	25.08%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persentase	100	937.223.700	100	0	100	256.495.000	0	0	0	46.825.200	0	128.662.000	100	48.040.000	100	223.527.200	100%	87.15%	200	223.527.200	200%	23.85%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	180.855.000	100	0	100	52.000.000	100	0	100	0	50.027.000	100	0	100	50.027.000	100%	96.21%	200	50.027.000	200%	27.66%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang	257	0	0	0	200	52.000.000	50	0	50	0	50.027.000	50	0	50	50.027.000	25%	96.21%	50	50.027.000	19.46%	0%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	1	608.546.100	1	0	1	166.827.000	0	0	0	46.825.200	1	71.750.000	0	17.500.000	1	136.075.200	100%	81.57%	2	136.075.200	200%	22.36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	200.541.000	14	60.543.000	10	66.847.000	0	0	5	29.030.000	2	21.000.000	3	10.500.000	10	60.530.000	100%	90.55%	24	121.073.000	480%	60.37%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	1	147.822.600	1	0	1	37.668.000	0	0	0	0	6.885.000	0	30.540.000	1	37.425.000	100%	99.35%	2	37.425.000	200%	25.32%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	200	41.434.800	5	21.235.700	200	37.668.000	0	0	0	100	6.885.000	100	30.540.000	200	37.425.000	100%	99.35%	205	58.660.700	102.5%	141.57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																		90.63%	87.06%									
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																		Sangat Tinggi	Tinggi									
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																		91.67%	81.85%									
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																		Sangat Tinggi	Tinggi									
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	81		72,62		76,5		72,11																
					Indeks	90		82,26		85																		
					Indeks Inovasi Daerah	95		86,46		89		76,35																
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,85		3,61		4		3,94																
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	86	21.397.725.838	85	0	85	7.480.707.838	0	1.922.569.275	0	1.511.187.402	0	2.164.535.331	82	1.795.682.472	82	7.393.974.480	96.47%	98.84%	167	7.393.974.480	194.19%	34.55%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	18	235.000.000	10	0	6	110.000.000	2	8.857.600	0	15.373.150	2	55.765.380	2	23.322.517	6	103.318.647	100%	93.93%	16	103.318.647	88.89%	43.97%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	120.000.000	2	0	2	50.000.000	1	0	0	2.554.650	0	35.362.880	1	7.868.517	2	45.786.047	100%	91.57%	4	45.786.047	66.67%	38.16%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	100.000.000	4	0	4	60.000.000	1	8.857.600	0	12.818.500	2	20.402.500	1	15.454.000	4	57.532.600	100%	95.89%	8	57.532.600	66.67%	57.53%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	42	17.292.225.838	14	0	14	5.838.343.238	3	1.702.185.571	4	1.362.760.204	4	1.580.753.127	3	1.150.136.759	14	5.795.835.661	100%	99.27%	28	5.795.835.661	66.67%	33.52%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	17.181.945.409	59	0	59	5.838.343.238	59	1.702.185.571	59	1.362.760.204	59	1.580.753.127	59	1.150.136.759	59	5.795.835.661	100%	99.27%	118	5.795.835.661	200%	33.73%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang yang disediakan	Laporan	7	957.500.000	4	0	2	270.000.000	0	0	0	0	0	2	269.017.336	2	269.017.336	100%	99.64%	6	269.017.336	85.71%	28.1%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	400.000.000	5	0	2	270.000.000	0	0	0	0	0	2	269.017.336	2	269.017.336	100%	99.64%	7	269.017.336	70%	67.25%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	42	145.000.000	40	0	42	97.000.000	0	0	0	0	42	12.000.000	0	80.750.000	0	92.750.000	0%	95.62%	40	92.750.000	95.24%	63.97%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	130.000.000	4	0	4	97.000.000	0	0	2	0	2	12.000.000	0	80.750.000	4	92.750.000	100%	95.62%	8	92.750.000	66.67%	71.35%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi	Laporan	12	500.000.000	4	0	4	240.000.000	1	45.008.300	1	32.891.703	1	97.463.898	1	59.844.595	4	235.208.496	100%	98%	8	235.208.496	66.67%	47.04%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	4	0	4	20.000.000	1	9.555.800	1	0	1	10.414.250	1	0	4	19.970.050	100%	99.85%	8	19.970.050	66.67%	99.85%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70.000.000	4	0	4	50.000.000	1	1.828.000	1	0	1	25.391.700	1	18.638.515	4	45.858.215	100%	91.72%	8	45.858.215	66.67%	65.51%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	55.000.000	4	0	4	25.000.000	1	5.700.000	1	6.790.000	1	11.024.000	1	1.470.000	4	24.984.000	100%	99.94%	8	24.984.000	66.67%	45.43%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	55.000.000	4	0	4	25.000.000	1	2.327.500	1	173	1	9.814.000	1	12.229.080	4	24.543.580	100%	98.17%	8	24.543.580	66.67%	44.62%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	260.000.000	30	0	15	120.000.000	4	25.597.000	5	25.928.703	4	40.819.948	2	27.507.000	15	119.852.651	100%	99.88%	45	119.852.651	90%	46.1%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Laporan	12	1.128.000.000	4	0	4	475.364.600	1	101.552.202	1	54.809.826	1	145.404.804	1	165.577.565	4	467.344.397	100%	98.31%	8	467.344.397	66.67%	41.43%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	17.000.000	4	0	1	10.364.600	1	2.960.000	0	2.087.000	0	1.977.000	0	3.260.000	1	10.284.000	100%	99.22%	5	10.284.000	166.67%	60.49%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	460.000.000	12	0	4	220.000.000	1	41.342.202	1	24.872.826	1	66.227.804	1	83.387.565	4	215.830.397	100%	98.1%	16	215.830.397	133.33%	46.92%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	640.000.000	12	0	4	245.000.000	1	57.250.000	1	27.850.000	1	77.200.000	1	78.930.000	4	241.230.000	100%	98.46%	16	241.230.000	133.33%	37.69%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Laporan	12	1.140.000.000	4	0	4	450.000.000	1	64.965.602	1	45.352.519	1	273.148.122	1	47.033.700	4	430.499.943	100%	95.67%	8	430.499.943	66.67%	37.76%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	244.000.000	3	0	3	100.000.000	1	17.202.600	1	17.452.162	1	31.348.962	0	22.821.500	0	88.825.224	0%	88.83%	3	88.825.224	100%	36.4%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
												I		II		III		IV													
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp									k	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	111.000.000	40		0	20	85.000.000	5	14.763.002	5	26.220.357	5	29.888.260	5	14.042.200	20	84.913.819	100%	99.9%	60	84.913.819	100%	76.5%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	700.000.000	3		0	3	265.000.000	1	33.000.000	0	1.680.000	1	211.910.900	1	10.170.000	1	256.760.900	33.33%	96.89%	4	256.760.900	133.33%	36.68%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	124.800.000	82		0	82,1	207.168.218	82,1	30.450.000	0	73.729.598	0	51.744.814	0	42.185.238	0	198.109.650	0%	95.63%	82	198.109.650	100%	158.74%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	3	43.200.000	1		0	1	14.400.000	0		0	7.200.000	0	3.600.000	1	3.600.000	1	14.400.000	100%	100%	2	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	43.200.000	4		0	4	14.400.000	0		0	7.200.000	1	3.600.000	1	3.600.000	4	14.400.000	100%	100%	8	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	1	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	1	3.810.000	1	3.810.000	100%	75.15%	1	3.810.000	100%	57.73%	KELURAHAN KOLPAJUNG			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	1	3.810.000	1	3.810.000	100%	75.15%	1	3.810.000	33.33%	57.73%	KELURAHAN KOLPAJUNG			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	unit	19	9.000.000	19		0	19	5.145.200	0		0	4.032.800	15	1.112.400	0	0	15	5.145.200	78.95%	100%	34	5.145.200	178.95%	57.17%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	24	9.000.000	7		0	8	1.195.200	0		0	3	882,8	5	312,4	0	0	8	1.195.200	100%	100%	15	1.195.200	62.5%	13.28%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		0	4		0	4	2.250.000	0		0	4		0	0	0	4	2.250.000	100%	100%	8	2.250.000	66.67%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8		0	8		0	8	1.700.000	0		0	3	900	5	800	0	0	8	1.700.000	100%	100%	16	1.700.000	200%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	sarpas	21	15.000.000	4		0	7	21.743.018	0		0	2	16.525.000	0	4.350.000	0	0	2	20.875.000	28.57%	96.01%	6	20.875.000	28.57%	139.17%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	6	15.000.000	0		0	2	5.000.000	0		0	0	0	2	4.350.000	0	0	2	4.350.000	100%	87%	2	4.350.000	33.33%	29%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5		0	5		0	5	16.743.018	0		0	4	16.525.000	0	0	0	4	16.525.000	80%	98.7%	9	16.525.000	180%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	jasa penunjang	12	45.000.000	4		0	4	155.570.000	1	30.450.000	1	44.231.798	1	39.182.414	1	34.775.238	4	148.639.450	100%	95.55%	8	148.639.450	66.67%	330.31%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	45.000.000	12		0	12	24.270.000	0		0	6	8.384.798	3	4.529.414	3	4.425.238	12	17.339.450	100%	71.44%	24	17.339.450	66.67%	38.53%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12		0	12		0	12	2.000.000	0		0	9	1.500.000	3	500	0	0	12	2.000.000	100%	100%	24	2.000.000	200%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12		0	12		0	12	10.000.000	0		0	9	6.297.000	3	3.703.000	0	0	12	10.000.000	100%	100%	24	10.000.000	200%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		0	12		0	12	119.300.000	3	30.450.000	3	28.050.000	3	30.450.000	3	30.350.000	12	119.300.000	100%	100%	24	119.300.000	200%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	30	6.000.000	8		0	10	5.240.000	0		0	5	1.740.000	3	3.500.000	0	0	8	5.240.000	80%	100%	16	5.240.000	53.33%	87.33%	KELURAHAN KOLPAJUNG	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8			17 = 16 / 7 x 100%						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6.000.000	2	0	2	725	0		0	2	725	0		0	2	725	100%	100%	4	725	66.67%	12.08%	KELURAHAN KOLPAJUNG		
		7.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit	6	0	2	0	2	500	0		0	0	0	2	500	0		0	2	500	100%	100%	4	500	66.67%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG
		7.01.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	0	8	0	8	4.015.000	0		0	3	1.015.000	5	3.000.000	0		0	8	4.015.000	100%	100%	16	4.015.000	200%	0%	KELURAHAN KOLPAJUNG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	724.150.000	82	0	82	147.504.650	0		38.019.970	0	38.726.120	0	35.295.370	0		33.814.070	0	145.855.530	0%	98.88%	82	145.855.530	100%	20.14%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	3	46.800.000	1	0	3	10.200.000	1		2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	0		2.550.000	3	10.200.000	100%	100%	4	10.200.000	133.33%	21.79%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	46.800.000	3	0	4	10.200.000	1		2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1		2.550.000	4	10.200.000	100%	100%	7	10.200.000	175%	21.79%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	sarana	75	65.500.000	74	0	75	7.275.650	35		3.132.450	40	4.143.200	0	0	0		0	75	7.275.650	100%	100%	149	7.275.650	198.67%	11.11%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	9.500.000	3	0	5	991	0		0	5	991	0	0	0		0	5	991	100%	100%	8	991	160%	10.43%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	30.000.000	1	0	10	4.999.400	5		2.447.200	5	2.552.200	0	0	0		0	10	4.999.400	100%	100%	11	4.999.400	110%	16.66%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	9.500.000	10	0	4	600	0		0	4	600	0	0	0		0	4	600	100%	100%	14	600	350%	6.32%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	8.500.000	800	0	6	685,25	6		685,25	0	0	0	0	0		0	6	685,25	100%	100%	806	685,25	13433.33%	8.06%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	jasa penunjang	3	389.650.000	100	0	3	128.450.000	1		31.573.520	1	32.032.920	1	31.930.370	0		31.264.070	3	126.800.880	100%	98.72%	103	126.800.880	3433.33%	32.54%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	8.750.000	400	0	12	1.650.000	7		1.000.000	0	5	650	0		0	12	1.650.000	100%	100%	412	1.650.000	3433.33%	18.86%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA	
		7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	42.000.000	16	0	12	14.000.000	3		2.373.520	3	3.832.920	3	3.080.370	3		3.064.070	12	12.350.880	100%	88.22%	28	12.350.880	233.33%	29.41%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	338.400.000	8	0	12	112.800.000	3		28.200.000	3	28.200.000	3	28.200.000	3		28.200.000	12	112.800.000	100%	100%	20	112.800.000	166.67%	33.33%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	70	127.200.000	71	0	70	1.579.000	20		764	0	50	815	0		0	70	1.579.000	100%	100%	141	1.579.000	201.43%	1.24%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA	
		7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	peralatan	2	13.000.000	2	0	2	1.579.000	1		764	0	1	815	0		0	2	1.579.000	100%	100%	4	1.579.000	200%	12.15%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA	
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80	13.522.816.528	80	0	80,45	4.644.696.348	0		546.547.382	0	1.975.515.084	0	848.330.934	80,25		1.069.001.664	80,25	4.439.395.064	99.75%	95.58%	160,25	4.439.395.064	200.31%	32.83%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun dan waktu	Jumlah	8	190.000.000	6	0	8	55.000.000	3		0	5	9.650.000	5	35.310.000	8		7.729.400	8	52.689.400	100%	95.8%	14	52.689.400	175%	27.73%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah	4	175.000.000	3	0	4	50.000.000	3		0	3	9.000.000	3	35.310.000	4		3.503.800	4	47.813.800	100%	95.63%	7	47.813.800	175%	27.32%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah	5	15.000.000	3		0	5	5.000.000	2		0	3	650	4		0	5	4.225.600	5	4.875.600	100%	97.51%	8	4.875.600	160%	32.5%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana secara tepat waktu	Persentase	100	8.111.055.145	100		0	100	2.724.694.948	25	372.337.589	50	1.012.774.179	75	577.612.803	100	711.583.933	100	2.674.308.504	100%	98.15%	200	2.674.308.504	200%	32.97%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah	24	8.027.055.145	24		0	24	2.693.494.948	24	365.137.589	24	1.005.574.179	24	570.412.803	26	702.583.933	26	2.643.708.504	108.33%	98.15%	50	2.643.708.504	208.33%	32.93%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah	4	81.000.000	4		0	4	31.200.000	1	7.200.000	2	7.200.000	3	7.200.000	4	9.000.000	4	30.600.000	100%	98.08%	8	30.600.000	200%	37.78%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	40.000.000	100		0	100	60.188.000	25		0	50	4.445.531	75	13.204.631	100	42.493.331	100	60.143.493	100%	99.93%	200	60.143.493	200%	150.36%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah	8	40.000.000	6		0	8	60.188.000	0		0	4	4.445.531	6	13.204.631	8	42.493.331	8	60.143.493	100%	99.93%	14	60.143.493	175%	150.36%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	3.500.477.000	100		0	100	1.137.979.400	25	50.204.008	50	829.492.790	75	48.845.700	100	80.940.200	100	1.009.482.698	100%	88.71%	200	1.009.482.698	200%	28.84%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	4	3.375.477.000	3		0	4	959.670.900	1	8.522.900	3	798.891.700	3	13.251.000	4	18.484.000	4	839.149.600	100%	87.44%	7	839.149.600	175%	24.86%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah	5	6.000.000	5		0	5	32.500.000	2	18.479.500	3		0	4	4.634.700	5	8.166.200	5	31.280.400	100%	96.25%	10	31.280.400	200%	521.34%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah	4	9.000.000	4		0	4	30.300.000	4	5.000.000	4	4.000.000	4	11.390.000	4	9.595.000	4	29.985.000	100%	98.96%	8	29.985.000	200%	333.17%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah	25	110.000.000	25		0	25	115.508.500	3	18.201.608	14	26.601.090	16	19.570.000	25	44.695.000	25	109.067.698	100%	94.42%	50	109.067.698	200%	99.15%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana secara tepat waktu dan sesuai	Persentase	98	300.284.383	97		0	97,5	126.581.400	15		0	15	0	65	55.400.000	97	57.330.000	97	112.730.000	99.49%	89.06%	194	112.730.000	197.96%	37.54%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah	5	165.492.352	5		0	5	126.581.400	0		0	0	0	5	55.400.000	5	57.330.000	5	112.730.000	100%	89.06%	10	112.730.000	200%	68.12%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah	3	1.341.000.000	2		0	3	433.562.000	2	111.888.385	3	106.282.184	3	106.000.000	3	108.105.700	3	432.276.269	100%	99.7%	5	432.276.269	166.67%	32.24%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah	2	6.500.000	2		0	2	6.000.000	2	1.638.385	2	1.282.184	2	1.000.000	2	2.005.700	2	5.926.269	100%	98.77%	4	5.926.269	200%	91.17%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah	1	11.500.000	1		0	1	2.312.000	0		0	0	0	0	1	1.100.000	1	1.100.000	100%	47.58%	2	1.100.000	200%	9.57%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah	12	1.323.000.000	12		0	12	425.250.000	3	110.250.000	6	105.000.000	9	105.000.000	12	105.000.000	12	425.250.000	100%	100%	24	425.250.000	200%	32.14%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah	2	40.000.000	2		0	2	106.690.600	1	12.117.400	1	12.870.400	2	11.957.800	2	60.819.100	2	97.764.700	100%	91.63%	4	97.764.700	200%	244.41%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah	4	20.000.000	4	0	4	56.000.000	4	9.017.400	4	7.980.000	4	10.037.800	4	21.141.000	4	48.176.200	100%	86.03%	8	48.176.200	200%	240.88%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah	1	7.500.000	1	0	1	7.750.000	1	0	1	842,4	1	0	1	6.559.100	1	7.401.500	100%	95.5%	2	7.401.500	200%	98.69%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah	3	12.500.000	3	0	3	42.940.600	3	3.100.000	3	4.048.000	3	1.920.000	3	33.119.000	3	42.187.000	100%	98.25%	6	42.187.000	200%	337.5%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	90	114.194.305.512	0	85,45	35.976.408.404	0	4.812.015.225	0	11.303.961.838	0	8.250.712.269	80,5	9.476.522.667	80,5	33.843.211.999	94.21%	94.07%	80,5	33.843.211.999	89.44%	29.64%	SEKRETARIAT DAERAH	
			KABUPATEN/KOTA	Prosentase OPD yang memiliki nilai SAKIP A		100		0	100		0		0		0		87,5		87,5		87.5%		87,5		87.5%			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen	125	317.232.976	0	0	125	154.196.200	59	18.736.652	40	36.452.181	3	36.555.750	20	36.940.250	122	128.684.833	97.6%	83.46%	122	128.684.833	97.6%	40.56%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	127.447.080	0	0	2	78.763.600	0	2.331.000	0	22.355.453	0	23.896.500	2	19.215.000	2	67.797.953	100%	86.08%	2	67.797.953	100%	53.2%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	38	46.363.500	0	0	38	22.015.600	19	6.650.000	19	2.178.250	0	12.659.250	0	0	38	21.487.500	100%	97.6%	38	21.487.500	100%	46.35%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	19	30.909.000	0	0	19	16.187.150	0	0	0	0	0	0	19	9.929.250	19	9.929.250	100%	61.34%	19	9.929.250	100%	32.12%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	30.909.000	0	0	5	18.026.100	1	2.505.000	1	7.466.728	1	0	2	1.803.000	5	11.774.728	100%	65.32%	5	11.774.728	100%	38.09%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	Laporan	4	50.695.396	0	0	4	19.203.750	1	7.250.652	1	4.451.750	1	0	1	5.993.000	4	17.695.402	100%	92.15%	4	17.695.402	100%	34.91%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	65	60.742.383.824	0	0	212	19.583.269.098	54	3.169.332.310	54	7.197.050.584	54	4.177.643.291	50	4.742.105.197	212	19.286.131.382	100%	98.48%	212	19.286.131.382	326.15%	31.75%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	214	59.647.995.043	0	0	214	19.228.832.848	214	3.113.129.178	214	7.117.625.618	214	4.091.010.645	214	4.651.271.845	214	18.973.037.286	100%	98.67%	214	18.973.037.286	100%	31.81%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	925.934.731	0	0	4	296.153.000	1	53.989.000	1	65.456.000	1	56.011.000	1	80.319.370	4	255.775.370	100%	86.37%	4	255.775.370	100%	27.62%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	64.908.900	0	0	12	23.249.750	3	2.214.132	3	3.446.966	3	12.306.046	3	4.656.732	12	22.623.876	100%	97.31%	12	22.623.876	100%	34.85%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	18.545.400	10	0	5	8.283.500	5	0	0	5.974.000	0	2.052.750	0	0	5	8.026.750	100%	96.9%	15	8.026.750	300%	43.28%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	176	69.545.250	0	0	176	22.500.000	44	0	44	4.548.000	44	12.019.850	44	5.857.250	176	22.425.100	100%	99.67%	176	22.425.100	100%	32.25%	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	15.454.500	0		1	4.250.000	0	0	0	0	1	4.243.000	0	0	1	4.243.000	100%	99.84%	1	4.243.000	100%	27.45%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terfasilitasi dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	75	579.562.295	0		75	146.980.000	4	0	13	36.662.600	25	98.785.489	33	2.800.000	75	138.248.089	100%	94.06%	75	138.248.089	100%	23.85%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	579.562.295	0		100	89.980.000	0	0	13	36.662.600	13	41.957.489	0	2.800.000	26	81.420.089	26%	90.49%	26	81.420.089	34.67%	14.05%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	125	10.000.000	0		125	57.000.000	0	0	0	0	125	56.828.000	0	0	125	56.828.000	100%	99.7%	125	56.828.000	100%	568.28%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang terdaksana	laporan	1521	9.213.939.583	0		1518	4.319.319.241	382	262.046.850	528	1.343.774.009	285	1.030.917.277	323	1.366.702.851	1518	4.003.440.987	100%	92.69%	1518	4.003.440.987	99.8%	43.45%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	278.181.000	0		6	22.561.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	494.544.000	0		12	160.000.000	0	0	6	79.633.600	0	0	6	80.053.900	12	159.687.500	100%	99.8%	12	159.687.500	100%	32.29%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11	383.394.645	0		11	228.424.400	0	0	0	0	0	0	10	203.218.190	10	203.218.190	90.91%	88.97%	10	203.218.190	90.91%	53%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	359.599.015	0		9	116.341.200	1	3.303.250	2	51.950.550	3	31.262.600	3	28.855.950	9	115.372.350	100%	99.17%	9	115.372.350	100%	32.08%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1100	2.960.690.923	0		1100	1.391.992.441	358	159.025.000	458	324.400.000	152	289.950.000	132	352.850.000	1100	1.126.225.000	100%	80.91%	1100	1.126.225.000	100%	38.04%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	380	4.734.530.000	0		380	2.400.000.000	26	99.718.600	56	887.789.859	88	709.704.677	210	701.724.811	380	2.398.937.947	100%	99.96%	380	2.398.937.947	100%	50.67%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	unit	30	6.678.905.800	0		25	379.695.195	3	44.775.000	5	0	6	176.246.350	11	152.525.000	25	373.546.350	100%	98.38%	25	373.546.350	83.33%	5.59%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	772.725.000	0		10	20.000.000	0	0	0	0	6	14.000.000	4	5.900.000	10	19.900.000	100%	99.5%	10	19.900.000	66.67%	2.58%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	216.363.000	0		7	244.027.695	0	0	0	0	0	122.406.350	7	116.775.000	7	239.181.350	100%	98.01%	7	239.181.350	100%	110.55%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	129.817.800	0		8	115.667.500	3	44.775.000	0	0	0	39.840.000	5	29.850.000	8	114.465.000	100%	98.96%	8	114.465.000	100%	88.17%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdaksana	laporan	2204	13.760.440.301	0		2204	4.190.972.500	550	858.758.942	550	927.776.535	550	924.374.394	550	938.939.980	2200	3.649.849.851	99.82%	87.09%	2200	3.649.849.851	99.82%	26.52%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	5.325.497.064	0		36	1.522.585.457	9	362.458.942	9	364.561.535	9	377.789.394	9	376.619.980	36	1.481.429.851	100%	97.3%	36	1.481.429.851	100%	27.82%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	906.747.197	0		36	275.487.043	0	0	18	78.615.000	9	65.835.000	0	77.520.000	27	221.970.000	75%	80.57%	27	221.970.000	75%	24.48%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	7.528.196.040	0		12	2.392.900.000	3	496.300.000	3	484.600.000	3	480.750.000	3	484.800.000	12	1.946.450.000	100%	81.34%	12	1.946.450.000	100%	25.86%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit	442	7.805.878.870	0		442	2.441.759.382	71	229.230.500	78	432.917.100	81	583.113.817	212	969.853.411	442	2.215.114.828	100%	90.72%	442	2.215.114.828	100%	28.38%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
										I		II		III		IV														
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	144	2.809.663.126	0		0	144	838.764.500	34	108.948.000	36	167.168.000	35	210.863.700	39	309.693.883	144	796.673.583	100%	94.98%	144	796.673.583	100%	28.35%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	186	1.708.063.416	0		0	186	675.544.882	37	120.282.500	40	139.974.100	44	193.993.117	65	205.105.128	186	659.354.845	100%	97.6%	186	659.354.845	100%	38.6%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	5	371.835.270	0		0	5	811.350.000	0		0	2	125.775.000	2	147.525.000	1	375.658.400	5	648.958.400	100%	79.99%	5	648.958.400	100%	174.53%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	361.500.000	0		0	100	116.100.000	0		0	0	0	10	30.732.000	90	79.396.000	100	110.128.000	100%	94.86%	100	110.128.000	100%	30.46%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	layan	48	4.247.022.256	0		0	48	1.331.479.910	6	60.000.000	28	251.656.749	6	222.273.240	8	412.491.095	48	946.421.084	100%	71.08%	48	946.421.084	100%	22.28%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"	orang/Bulan	2	1.991.393.056	0		0	2	626.879.910	2	0	2	32.056.749	2	102.273.240	2	252.491.095	2	386.821.084	100%	61.71%	2	386.821.084	100%	19.42%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan"	Paket	20	618.180.000	0		0	20	99.600.000	0		0	20	99.600.000	0	0	0	20	99.600.000	100%	100%	20	99.600.000	100%	16.11%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"	Orang	2	148.363.200	0		0	2	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	"Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"	orang / Bulan	2	1.489.086.000	0		0	2	600.000.000	2	60.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	160.000.000	2	460.000.000	100%	76.67%	2	460.000.000	100%	30.89%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	paket	180	4.498.668.079	0		0	180	1.186.748.384	45	68.552.400	45	313.222.800	45	249.825.550	45	299.913.500	180	931.514.250	100%	78.49%	180	931.514.250	100%	20.71%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	"Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan"	Paket	60	1.972.549.678	0		0	60	640.677.914	15	41.029.400	15	170.930.800	15	133.470.300	15	159.542.250	60	504.972.750	100%	78.82%	60	504.972.750	100%	25.6%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	"Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan"	Paket	60	1.468.478.968	0		0	60	156.522.200	15	6.567.900	15	51.955.950	15	33.795.350	15	34.155.000	60	126.474.200	100%	80.8%	60	126.474.200	100%	8.61%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	60	1.057.639.433	0		0	60	389.548.270	15	20.955.100	15	90.336.050	15	82.559.900	15	106.216.250	60	300.067.300	100%	77.03%	60	300.067.300	100%	28.37%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kebijakan lingkup organisasi yang ditetapkan	dokumen	169	2.500.709.149	0		0	169	944.955.575	0	35.259.800	0	433.402.816	0	400.649.625	167	60.707.000	167	930.019.241	98.82%	98.42%	167	930.019.241	98.82%	37.19%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	42	438.329.415	0		0	42	140.562.875	3	2.849.800	3	30.083.020	36	92.630.241	0	9.777.500	42	135.340.561	100%	96.28%	42	135.340.561	100%	30.88%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana"	Laporan	42	407.872.737	0		0	42	95.500.000	12	3.651.000	12	49.073.796	18	29.508.884	0	11.090.000	42	93.323.680	100%	97.72%	42	93.323.680	100%	22.88%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7	1.189.503.501	0	0	7	523.290.500	0	28.759.000	3	182.836.000	2	276.887.500	2	28.737.000	7	517.219.500	100%	98.84%	7	517.219.500	100%	43.48%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	78	465.003.496	0	0	78	185.602.200	3,71	0	45	171.410.000	29,29	1.623.000	0	11.102.500	78	184.135.500	100%	99.21%	78	184.135.500	100%	39.6%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terlaksana	laporan	36	3.849.562.379	0	0	36	1.297.032.919	9	65.322.771	9	331.046.464	9	350.327.486	9	493.544.383	36	1.240.241.104	100%	95.62%	36	1.240.241.104	100%	32.22%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1.484.263.116	0	0	12	962.895.115	3	65.322.771	3	206.014.776	3	343.149.204	3	315.440.697	12	929.927.448	100%	96.58%	12	929.927.448	100%	62.65%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	710.134.275	0	0	12	273.275.800	3	0	3	111.901.450	3	0	3	150.244.500	12	262.145.950	100%	95.93%	12	262.145.950	100%	36.91%	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	1.655.164.988	0	0	12	60.862.004	3	0	3	13.130.238	3	7.178.282	3	27.859.186	12	48.167.706	100%	79.14%	12	48.167.706	100%	2.91%	SEKRETARIAT DAERAH	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	868.200.000	82	0	82,1	243.854.525	20	38.400.000	20	67.745.500	20	53.430.700	22,1	45.902.700	82,1	205.478.900	100%	84.26%	164,1	205.478.900	200.12%	23.67%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Jumlah	1	43.200.000	1	0	1	9.600.000	0	0	0	4.800.000	0	2.400.000	1	2.400.000	1	9.600.000	100%	100%	2	9.600.000	200%	22.22%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah	12	43.200.000	3	0	4	9.600.000	0	0	2	4.800.000	1	2.400.000	1	2.400.000	4	9.600.000	100%	100%	7	9.600.000	58.33%	22.22%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Jumlah	57	38.100.000	7	0	19	6.601.000	0	0	10	3.559.500	9	3.041.500	0	0	19	6.601.000	100%	100%	26	6.601.000	45.61%	17.33%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah	24	9.000.000	7	0	8	1.791.500	0	0	0	7,6	1.791.500	0,4	0	8	1.791.500	100%	100%	15	1.791.500	62.5%	19.91%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah	12	15.000.000	4	0	4	3.750.000	0	0	3	2.500.000	1	1.250.000	0	0	4	3.750.000	100%	100%	8	3.750.000	66.67%	25%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	24	7.500.000	8	0	8	1.059.500	0	0	8	1.059.500	0	0	0	8	1.059.500	100%	100%	16	1.059.500	66.67%	14.13%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah	12	544.800.000	4	0	4	179.950.000	1	38.400.000	1	56.832.500	1	41.989.200	1	39.792.700	4	177.014.400	100%	98.37%	8	177.014.400	66.67%	32.49%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah	36	9.000.000	12	0	12	1.350.000	0	0	12	1.350.000	0	0	0	12	1.350.000	100%	100%	24	1.350.000	66.67%	15%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah	36	45.000.000	12	0	12	15.000.000	0	0	5	7.325.500	4	3.589.200	3	3.642.700	12	14.557.400	100%	97.05%	24	14.557.400	66.67%	32.35%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah	36	30.000.000	12	0	12	10.000.000	0	0	12	9.757.000	0	0	0	12	9.757.000	100%	97.57%	24	9.757.000	66.67%	32.52%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah	36	460.800.000	12	0	12	153.600.000	3	38.400.000	3	38.400.000	3	38.400.000	2	36.150.000	11	151.350.000	91.67%	98.54%	23	151.350.000	63.89%	32.85%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah	30	130.500.000	8	0	10	36.553.500	0	0	2	2.553.500	2	0	6	0	10	2.553.500	100%	6.99%	18	2.553.500	60%	1.96%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah	6	6.000.000	2	0	2	638,5	0	0	2	638,5	0	0	0	2	638,5	100%	100%	4	638,5	66.67%	10.64%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	3	105.000.000	1		0	1	34.395.000	0	0	0,1	395	0	0	0	0	0,1	395	10%	1.15%	1,1	395	36.67%	0.38%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	15	15.000.000	4		0	5	1.520.000	0	0	2	1.520.000	0	0	0	0	2	1.520.000	40%	100%	6	1.520.000	40%	10.13%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Jumlah	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0	0	0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	1	5.070.000	1		0	1	5.070.000	0	0	0	0	0	0,6	3.710.000	0,6	3.710.000	60%	73.18%	1,6	3.710.000	160%	73.18%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Jumlah	21	105.000.000	4		0	7	6.080.025	0	0	0	0	6	6.000.000	1	0	7	6.000.000	100%	98.68%	11	6.000.000	52.38%	5.71%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	15	90.000.000	4		0	5	6.080.025	0	0	0	0	5	6.000.000	0	0	5	6.000.000	100%	98.68%	9	6.000.000	60%	6.67%	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	761.050.000	82		0	82	168.645.000	0	45.654.218	0	39.645.444	0	42.814.968	0	40.104.896	0	168.219.526	0%	99.75%	82	168.219.526	100%	22.1%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	46.800.000	1		0	1	10.800.000	1	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	1	10.800.000	100%	100%	2	10.800.000	66.67%	23.08%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	46.800.000	4		0	4	10.800.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	4	10.800.000	100%	100%	8	10.800.000	200%	23.08%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	75	62.500.000	75		0	75	6.395.000	30	3.870.000	0	0	45	2.525.000	0	0	75	6.395.000	100%	100%	150	6.395.000	200%	10.23%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	30.000.000	1		0	10	5.412.500	4	2.887.500	0	0	6	2.525.000	0	0	10	5.412.500	100%	100%	11	5.412.500	110%	18.04%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	8.500.000	6		0	6	982,5	6	982,5	0	0	0	0	0	0	6	982,5	100%	100%	12	982,5	200%	11.56%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	3	483.250.000	3		0	3	149.800.000	1	37.434.218	1	36.945.444	1	37.589.968	0	37.404.896	3	149.374.526	100%	99.72%	6	149.374.526	200%	30.91%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.750.000	12		0	6	800	6	800	0	0	0	0	0	6	800	100%	100%	18	800	150%	9.14%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	33.000.000	16		0	12	11.000.000	3	2.134.218	3	2.445.444	3	3.089.968	3	2.904.896	12	10.574.526	100%	96.13%	28	10.574.526	233.33%	32.04%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	441.000.000	12		0	12	138.000.000	3	34.500.000	3	34.500.000	3	34.500.000	3	34.500.000	12	138.000.000	100%	100%	24	138.000.000	200%	31.29%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan	4	78.500.000	4		0	4	1.650.000	4	1.650.000	0	0	0	0	0	0	4	1.650.000	100%	100%	8	1.650.000	200%	2.1%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	9.000.000	2		0	2	1.650.000	2	1.650.000	0	0	0	0	0	0	2	1.650.000	100%	100%	4	1.650.000	200%	18.33%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83	249.560.625.160	83		0	83	37.954.927.410	0	5.269.764.527	0	6.958.650.875	0	15.115.203.764	81,2	7.880.891.164	81,2	35.224.510.330	97.83%	92.81%	164,2	35.224.510.330	197.83%	14.11%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	136	270.000.000	136		0	136	90.000.000	111	1.000.000	22	25.953.399	1	22.570.000	2	3.958.800	136	53.482.199	100%	59.42%	272	53.482.199	200%	19.81%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	150.000.000	2		0	2	50.000.000	0	0	1	15.268.800	0	22.570.000	1	0	2	37.838.800	100%	75.68%	4	37.838.800	200%	25.23%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
													I		II		III		IV														
													k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp										k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	55	15.000.000	55		0	55	5.000.000	55		0	0	0	0	0	0	55		0	100%	0%	110		0	200%	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	7.500.000	10		0	10	2.500.000	0		0	10	0	0	0	0	10		0	100%	0%	20		0	200%	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	55	15.000.000	55		0	55	5.000.000	55		500	0	0	0	0	0	55		500	100%	10%	110		500	200%	3.33%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	7.500.000	10		0	10	2.500.000	0		0	10	0	0	0	0	10		0	100%	0%	20		0	200%	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	75.000.000	4		0	4	25.000.000	1		500	1	10.684.599	1	0	1	3.958.800	4		15.143.399	100%	60.57%	8		15.143.399	200%	20.19%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu berkualitas baik	Dokumen	14	189.213.496.837	14		0	14	17.182.774.410	3		979.060.264	4	2.505.420.041	4	10.408.113.672	3		2.821.395.305	14		16.713.989.282	100%	97.27%	28		16.713.989.282	200%	8.83%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	187.321.912.816	14		0	14	17.182.774.410	3		979.060.264	4	2.505.420.041	4	10.408.113.672	3		2.821.395.305	14		16.713.989.282	100%	97.27%	28		16.713.989.282	200%	8.92%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu berkualitas baik	Dokumen	2	15.000.000	2		0	2	10.000.000	0		0	1	1.200.000	0	0	0	0	1		1.200.000	50%	12%	3		1.200.000	150%	8%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	9.000.000	0		0	1	5.000.000	0		0	1	1.200.000	0	0	0	0	1		1.200.000	100%	24%	1		1.200.000	100%	13.33%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0%	0%	0		0	0%	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	10		0	1	77.734.000	0		0	1	17.547.718	0	7.857.768	0		36.327.667	1		61.733.153	100%	79.42%	11		61.733.153	1100%	20.58%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	300.000.000	10		0	10	77.734.000	0		0	9	17.547.718	0	7.857.768	1		36.327.667	10		61.733.153	100%	79.42%	20		61.733.153	200%	20.58%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	5	1.797.022.500	5		0	5	519.680.381	5		67.836.367	5	116.695.522	5	87.560.157	5		216.548.994	5		488.641.040	100%	94.03%	10		488.641.040	200%	27.19%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	16.623.000	7		0	7	5.539.100	7		0	7	2.765.000	7	1.391.000	7		1.359.500	7		5.515.500	100%	99.57%	14		5.515.500	200%	33.18%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	300.000.000	7		0	1	149.999.961	1		0	1	61.181.855	1	48.169.700	1		40.548.445	1		149.900.000	100%	99.93%	8		149.900.000	800%	49.97%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	553.029.000	25		0	25	141.316.800	8		30.815.800	24	31.507.300	30	16.877.472	0		34.024.100	62		113.224.672	248%	80.12%	87		113.224.672	348%	20.47%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	477.370.500	4		0	4	100.154.520	0		0	1	1.530.000	2	0	1		98.622.000	4		100.152.000	100%	100%	8		100.152.000	200%	20.98%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	450.000.000	86		0	72	122.670.000	15		37.020.567	7	19.711.367	25	21.121.985	25		41.994.949	72		119.848.868	100%	97.7%	158		119.848.868	219.44%	26.63%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	0	131.780.000	15		0	16	323.657.862	0		0	6	0	10	160.620.000	1		121.385.000	17		282.005.000	106.25%	87.13%	32		282.005.000	0%	214%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
							I				II			III			IV														
							k	Rp			k	Rp		k	Rp		k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	131.780.000	15		0	16	323.657.862	0		0	6	160.620.000	1	121.385.000	17	282.005.000	106.25%	87.13%	32	282.005.000	0%	214%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa	3	56.267.268.283	3		0	3	19.079.061.577	3	4.154.926.899	3	4.149.129.198	3	4.323.839.870	3	4.583.960.901	3	17.211.856.868	100%	90.21%	6	17.211.856.868	200%	30.59%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	39.000.000	1250		0	12	13.000.000	3	1.450.000	3	5.280.000	3	2.880.000	3	2.950.000	12	12.560.000	100%	96.62%	1262	12.560.000	10516.67%	32.21%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	51.535.171.208	12		0	12	17.680.146.902	3	3.972.024.899	3	3.918.019.198	3	3.962.936.780	3	4.030.615.155	12	15.883.596.032	100%	89.84%	24	15.883.596.032	200%	30.82%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.172.692.896	12		0	12	1.385.914.675	3	181.452.000	3	225.830.000	3	358.023.090	3	550.395.746	12	1.315.700.836	100%	94.93%	24	1.315.700.836	200%	31.53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	4	1.566.057.540	4		0	4	672.019.180	4	66.940.997	4	142.704.997	4	104.642.297	4	97.314.497	4	411.602.788	100%	61.25%	8	411.602.788	200%	26.28%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	224.100.000	2		0	2	74.700.000	2	14.602.000	2	15.916.900	2	17.695.900	2	22.416.800	2	70.631.600	100%	94.55%	4	70.631.600	200%	31.52%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	531.000.000	6		0	6	177.000.000	6	22.205.100	6	51.018.500	6	46.243.500	6	56.101.100	6	175.568.200	100%	99.19%	12	175.568.200	200%	33.06%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	3	612.513.540	3		0	3	354.171.180	1	22.993.897	2	53.491.597	0	22.993.897	0	3.501.597	3	102.980.988	100%	29.08%	6	102.980.988	200%	16.81%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Item	4	198.444.000	4		0	4	66.148.000	4	7.140.000	4	22.278.000	4	17.709.000	4	15.295.000	4	62.422.000	100%	94.37%	8	62.422.000	200%	31.46%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	867.600.000	82		0	82,1	226.954.674	5	39.600.000	41	68.904.908	24	60.866.904	12,1	54.492.776	82,1	223.864.588	100%	98.64%	164,1	223.864.588	200.12%	25.8%	KELURAHAN PARTEKER		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	3	43.200.000	1		0	1	9.600.000	0		0	0,25	4.800.000	0,25	2.400.000	0,5	2.400.000	1	9.600.000	100%	100%	2	9.600.000	66.67%	22.22%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	43.200.000	4		0	4	9.600.000	0		0	2	4.800.000	1	2.400.000	1	2.400.000	4	9.600.000	100%	100%	8	9.600.000	200%	22.22%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	unit	19	38.100.000	19		0	19	9.500.000	0		0	10	6.570.000	9	2.930.000	0		0	19	9.500.000	100%	100%	38	9.500.000	200%	24.93%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7		0	8	3.000.000	0		0	8	3.000.000	0		0	8	3.000.000	100%	100%	15	3.000.000	62.5%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4		0	4	4.000.000	0		0	2	2.500.000	2	1.500.000	0		0	4	4.000.000	100%	100%	8	4.000.000	66.67%	26.67%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8		0	8	2.500.000	0		0	4	1.070.000	4	1.430.000	0		0	8	2.500.000	100%	100%	16	2.500.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	sarpas	21	105.000.000	4		0	7	13.290.000	0		0	0	0	0		0	0	0	13.290.000	0%	100%	4	13.290.000	19.05%	12.66%	KELURAHAN PARTEKER	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	sarpas	15	90.000.000	4		0	5	13.290.000	0		0	0	5	13.290.000	0		5	13.290.000	100%	100%	9	13.290.000	60%	14.77%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	12	559.200.000	4		0	4	184.494.674	1	39.600.000	1	52.534.908	1	42.246.904	1	48.382.776	4	182.764.588	100%	99.06%	8	182.764.588	66.67%	32.68%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	9.000.000	12		0	12	4.230.000	0		0	6	3.000.000	0	6	1.230.000	12	4.230.000	100%	100%	24	4.230.000	66.67%	47%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.000.000	12		0	12	12.000.000	0		0	6	5.009.908	3	2.646.904	3	2.616.776	12	10.273.588	100%	85.61%	24	10.273.588	66.67%	22.83%	KELURAHAN PARTEKER
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	30.000.000	12		0	12	9.864.674	0		0	6	4.925.000	0	6	4.936.000	12	9.861.000	100%	99.96%	24	9.861.000	66.67%	32.87%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	475.200.000	12		0	12	158.400.000	3	39.600.000	3	39.600.000	3	39.600.000	3	39.600.000	12	158.400.000	100%	100%	24	158.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	30	115.500.000	8		0	10	5.000.000	0		0	5	5.000.000	5	0	0	0	5.000.000	0%	100%	8	5.000.000	26.67%	4.33%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpas	15	15.000.000	4		0	5	5.000.000	0		0	5	5.000.000	0	0	0	5	5.000.000	100%	100%	9	5.000.000	60%	33.33%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	1	2.200.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	100%	168.64%	KELURAHAN PARTEKER	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	699.600.000	82		0	82,1	190.417.200	82,1	31.050.000	82,1	56.416.367	82,1	49.463.214	82,1	49.368.082	82,1	186.297.663	100%	97.84%	164,1	186.297.663	200.12%	26.63%	KELURAHAN KANGENAN	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	UNIT	10	43.200.000	1		0	10	14.400.000	0		0	5	7.200.000	8	3.600.000	10	3.600.000	10	14.400.000	100%	100%	11	14.400.000	110%	33.33%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DOKUMEN	12	43.200.000	4		0	4	14.400.000	0		0	2	7.200.000	1	3.600.000	1	3.600.000	4	14.400.000	100%	100%	8	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	57	6.600.000	20		0	19	5.070.000	0		0	0	0	0	19	3.810.000	19	3.810.000	100%	75.15%	39	3.810.000	68.42%	57.73%	KELURAHAN KANGENAN	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.810.000	1	3.810.000	100%	75.15%	1	3.810.000	33.33%	57.73%	KELURAHAN KANGENAN	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Sarana	240	38.100.000	70		0	80	7.102.200	0		0	30	1.603.200	50	1.498.000	0	3.995.000	80	7.096.200	100%	99.92%	150	7.096.200	62.5%	18.63%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7		0	8	603,2	0		0	4	603,2	2	0	2	0	8	603,2	100%	100%	15	603,2	62.5%	6.7%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4		0	4	4.000.000	0		0	1	1.000.000	2	0	1	3.000.000	4	4.000.000	100%	100%	8	4.000.000	66.67%	26.67%	KELURAHAN KANGENAN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8		0	8	2.499.000	0		0	0	6	1.498.000	2	995	8	2.493.000	100%	99.76%	16	2.493.000	66.67%	33.24%	KELURAHAN KANGENAN	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	sarpras	191	24.000.000	45		0	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	45	0	23.56%	0%	KELURAHAN KANGENAN	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
							I				II		III		IV															
							k	Rp			k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8			9			10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	jasa penunjang	12	457.200.000	4	0	4	149.620.000	1	31.050.000	1	42.188.167	1	39.365.214	1	34.717.082	4	147.320.463	100%	98.46%	8	147.320.463	66.67%	32.22%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	36	9.000.000	12	0	12	3.300.000	0	0	5	1.980.000	5	1.320.000	2	0	12	3.300.000	100%	100%	24	3.300.000	66.67%	36.67%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	45.000.000	12	0	12	12.120.000	0	0	8	5.036.167	3	3.185.014	1	1.627.382	12	9.848.563	100%	81.26%	24	9.848.563	66.67%	21.89%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	36	30.000.000	12	0	12	10.000.000	0	0	8	4.122.000	3	3.810.200	1	2.039.700	12	9.971.900	100%	99.72%	24	9.971.900	66.67%	33.24%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	373.200.000	12	0	12	124.200.000	3	31.050.000	6	31.050.000	2	31.050.000	1	31.050.000	12	124.200.000	100%	100%	24	124.200.000	66.67%	33.28%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	30	130.500.000	8	0	10	14.225.000	0	0	3	5.425.000	5	5.000.000	2	3.246.000	10	13.671.000	100%	96.11%	18	13.671.000	60%	10.48%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6.000.000	2	0	2	10.000.000	0	0	1	2.700.000	1	3.500.000	0	3.246.000	2	9.446.000	100%	94.46%	4	9.446.000	66.67%	157.43%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	105.000.000	1	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0,5	1.500.000	0,5	0	1	1.500.000	100%	100%	2	1.500.000	66.67%	1.43%	KELURAHAN KANGENAN		
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	sarpras	15	15.000.000	4	0	5	2.725.000	0	0	4	2.725.000	1	0	0	5	2.725.000	100%	100%	9	2.725.000	60%	18.17%	KELURAHAN KANGENAN			
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	89	16.283.185.038	86	0	83	5.478.752.508	0	480.905.343	0	1.374.257.176	0	1.025.717.025	83,3	1.582.348.577	83,3	4.463.228.121	100.36%	81.46%	169,3	4.463.228.121	190.22%	27.41%	INSPEKTORAT		
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	152	216.363.000	150	0	152	65.115.900	37	0	38	0	38	48.737.500	151	48.737.500	99.34%	74.85%	301	48.737.500	198.03%	22.53%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	122.400.000	5	0	4	41.727.400	1	0	1	0	1	38.245.000	4	38.245.000	100%	91.65%	9	38.245.000	225%	31.25%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	34	12.240.000	31	0	34	3.945.800	0	0	0	0	34	2.035.000	34	2.035.000	100%	51.57%	65	2.035.000	191.18%	16.63%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	34	6.120.000	34	0	34	3.094.200	0	0	34	0	0	2.010.000	34	2.010.000	100%	64.96%	68	2.010.000	200%	32.84%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	34	12.240.000	34	0	34	3.945.800	33	0	0	0	0	2.225.000	33	2.225.000	97.06%	56.39%	67	2.225.000	197.06%	18.18%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	34	6.120.000	34	0	34	3.094.200	0	0	0	0	34	1.765.000	34	1.765.000	100%	57.04%	68	1.765.000	200%	28.84%	INSPEKTORAT				
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	55.080.000	12	0	12	9.308.500	3	0	3	0	3	2.457.500	12	2.457.500	100%	26.4%	24	2.457.500	200%	4.46%	INSPEKTORAT				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%	
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18										
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Orang	1 10.585.446.420	1 0	1 3.940.862.308	1 402.467.480	0 1.229.527.520	0 717.913.268	0 950.422.563	0 3.300.330.831	0%	83.75%	1 3.300.330.831	100%	31.18%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40 10.479.622.778	27 0	40 3.940.862.308	29 402.467.480	29 1.229.527.520	29 717.913.268	37 950.422.563	37 3.300.330.831	92.5%	83.75%	64 3.300.330.831	160%	31.49%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	40 2.240.778.864	34 0	34 523.272.000	6 3.509.000	15 41.229.800	17 179.254.625	4 103.102.000	42 327.095.425	123.53%	62.51%	76 327.095.425	190%	14.6%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	40 2.218.377.600	34 0	34 523.272.000	6 3.509.000	15 41.229.800	17 179.254.625	4 103.102.000	42 327.095.425	123.53%	62.51%	76 327.095.425	190%	14.74%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	5 982.133.475	158 0	5 254.174.500	4 22.495.500	5 27.985.750	5 43.381.850	5 105.984.550	5 199.847.650	100%	78.63%	163 199.847.650	3260%	20.35%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8 12.240.000	7 0	8 11.994.000	2 816,5	2 916,5	2 0	2 3.972.300	8 5.705.300	100%	47.57%	15 5.705.300	187.5%	46.61%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 91.800.000	12 0	12 27.492.500	3 4.841.700	3 2.101.150	3 3.808.800	3 13.774.500	12 24.526.150	100%	89.21%	24 24.526.150	200%	26.72%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 229.500.000	12 0	12 52.529.000	3 4.890.400	3 6.855.400	3 0	3 16.053.500	12 27.799.300	100%	52.92%	24 27.799.300	200%	12.11%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 61.200.000	3 0	4 12.229.000	0 0	2 3.890.000	1 0	2 4.274.250	5 8.164.250	125%	66.76%	8 8.164.250	200%	13.34%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90 577.575.000	90 0	75 149.930.000	9 11.946.900	26 14.222.700	18 39.573.050	22 67.910.000	75 133.652.650	100%	89.14%	165 133.652.650	183.33%	23.14%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	Unit	231 594.943.063	200 0	15 63.070.000	0 0	0 0	0 0	49 61.105.500	49 61.105.500	326.67%	96.89%	249 61.105.500	107.79%	10.27%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 192.994.200	26 0	15 63.070.000	0 0	0 0	0 0	49 61.105.500	49 61.105.500	326.67%	96.89%	75 61.105.500	750%	31.66%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	36 399.952.569	0 0	36 131.698.800	9 32.060.167	9 31.905.084	9 28.556.882	9 28.938.300	36 121.460.433	100%	92.23%	36 121.460.433	100%	30.37%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 12.240.000	0 0	12 3.300.000	3 0	3 1.056.600	3 0	3 370	12 1.426.600	100%	43.23%	12 1.426.600	100%	11.66%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 191.852.208	8 0	12 65.698.800	3 19.160.167	3 13.448.484	3 13.406.882	3 12.368.300	12 58.383.833	100%	88.87%	20 58.383.833	166.67%	30.43%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 191.862.000	3 0	12 62.700.000	3 12.900.000	3 17.400.000	3 15.150.000	3 16.200.000	12 61.650.000	100%	98.33%	15 61.650.000	125%	32.13%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara	Unit	206 1.263.567.647	206 0	216 500.559.000	6 20.373.196	66 43.609.022	106 56.610.400	76 284.058.164	254 404.650.782	117.59%	80.84%	460 404.650.782	223.3%	32.02%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 76.500.000	1 0	1 25.000.000	1 4.421.000	1 3.800.417	1 0	1 0	1 8.221.417	100%	32.89%	2 8.221.417	200%	10.75%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 300.003.930	4 0	4 115.750.000	4 12.993.816	4 28.724.205	4 14.400.000	4 26.649.737	4 82.767.758	100%	71.51%	8 82.767.758	160%	27.59%	INSPEKTORAT								
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	230 109.431.720	200 0	210 59.809.000	0 0	60 7.737.000	100 0	70 11.462.570	230 19.199.570	109.52%	32.1%	430 19.199.570	186.96%	17.54%	INSPEKTORAT								

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	765.000.000	1	0	1	300.000.000	1	2.958.380	1	3.347.400	1	42.210.400	1	245.945.857	1	294.462.037	100%	98.15%	2	294.462.037	200%	38.49%	INSPEKTORAT
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	965.400.000	82	0	82,1	245.968.139	0	46.500.000	20	68.621.350	20	62.625.100	82,1	60.996.750	82,1	238.743.200	100%	97.06%	164,1	238.743.200	200.12%	24.73%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Jumlah	1	43.200.000	1	0	1	14.400.000	0	0	1	7.200.000	0	3.600.000	1	3.600.000	1	14.400.000	100%	100%	2	14.400.000	200%	33.33%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	43.200.000	4	0	4	14.400.000	0	0	2	7.200.000	1	3.600.000	1	3.600.000	4	14.400.000	100%	100%	8	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Paket	57	38.100.000	7	0	19	2.037.139	0	0	10	1.536.700	5	500	4	0	19	2.036.700	100%	99.98%	26	2.036.700	45.61%	5.35%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7	0	8	468,7	0	0	8	468,7	0	0	0	8	468,7	100%	100%	15	468,7	62.5%	5.21%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4	0	4	500	0	0	0	0	4	500	0	4	500	100%	100%	8	500	66.67%	3.33%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8	0	8	1.068.439	0	0	8	1.068.000	0	0	0	8	1.068.000	100%	99.96%	16	1.068.000	66.67%	14.24%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	1	5.090.000	1	5.090.000	100%	50.9%	1	5.090.000	33.33%	77.12%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Asn	1	0	1	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	1	5.090.000	1	5.090.000	100%	50.9%	2	5.090.000	200%	0%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	12	642.000.000	4	0	4	212.635.000	0	46.500.000	2	58.884.650	1	52.907.600	1	52.306.750	4	210.599.000	100%	99.04%	8	210.599.000	66.67%	32.8%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	9.000.000	12	0	12	3.300.000	0	0	6	2.200.000	6	1.100.000	0	12	3.300.000	100%	100%	24	3.300.000	66.67%	36.67%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.000.000	12	0	12	16.000.000	0	0	6	7.023.250	3	3.512.400	3	4.178.350	12	14.714.000	100%	91.96%	24	14.714.000	66.67%	32.7%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	30.000.000	12	0	12	7.335.000	0	0	6	3.911.400	3	1.795.200	3	1.628.400	12	7.335.000	100%	100%	24	7.335.000	66.67%	24.45%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	558.000.000	12	0	12	186.000.000	3	46.500.000	3	45.750.000	3	46.500.000	3	46.500.000	12	185.250.000	100%	99.6%	24	185.250.000	66.67%	33.2%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	30	130.500.000	8	0	10	6.896.000	0	0	5	1.000.000	2	5.617.500	3	0	10	6.617.500	100%	95.96%	18	6.617.500	60%	5.07%	KELURAHAN PATEMON
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	105.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	0	1	4.721.500	0	0	1	4.721.500	100%	94.43%	2	4.721.500	66.67%	4.5%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpras	15	15.000.000	4	0	5	1.896.000	0	0	3	1.000.000	2	896	0	5	1.896.000	100%	100%	9	1.896.000	60%	12.64%	KELURAHAN PATEMON	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	825.300.000	82	0	82,1	241.465.105	5	34.200.000	30	48.321.508	30	53.848.287	15	91.386.431	80	227.756.226	97.44%	94.32%	162	227.756.226	197.56%	27.6%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	43.200.000	1	0	1	9.600.000	0	0	0,3	3.600.000	0,25	3.600.000	0,45	2.400.000	1	9.600.000	100%	100%	2	9.600.000	66.67%	22.22%	KELURAHAN GLADAK ANYAR

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kawatana SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kawatana SKPD	Dokumen	12	43.200.000	4		4	9.600.000	0		1,3	3.600.000	1,3	3.600.000	1,4	2.400.000	4	9.600.000	100%	100%	8	9.600.000	66.67%	22.22%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Unit	57	38.100.000	19		19	5.063.000	0		5	977,6	9	3.085.400	5	1.000.000	19	5.063.000	100%	100%	38	5.063.000	66.67%	13.29%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7		8	1.967.400	0		4	977,6	4	989,8	0		8	1.967.400	100%	100%	15	1.967.400	62.5%	21.86%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4		4	1.000.000	0		0	0	0	4	1.000.000	4	1.000.000	100%	100%	8	1.000.000	66.67%	6.67%	KELURAHAN GLADAK ANYAR		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8		8	2.095.600	0		0	0	0	8	2.095.600	0	0	8	2.095.600	100%	100%	16	2.095.600	66.67%	27.94%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpas	21	90.000.000	4		7	30.249.387	0		0	0	0	3	7.625.367	4	19.400.000	7	27.025.367	100%	89.34%	11	27.025.367	52.38%	30.03%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpas	15	90.000.000	4		5	30.249.387	0		0	0	0	2,5	7.625.367	2,5	19.400.000	5	27.025.367	100%	89.34%	9	27.025.367	60%	30.03%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	12	521.400.000	4		4	159.796.432	1	34.200.000	1	39.743.908	1	39.537.520	1	37.876.431	4	151.357.859	100%	94.72%	8	151.357.859	66.67%	29.03%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	9.000.000	12		12	3.620.300	0		4	2.152.400	4	489,3	0	0	8	2.641.700	66.67%	72.97%	20	2.641.700	55.56%	29.35%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.000.000	12		12	9.646.132	0		4	2.514.508	4	905,72	2	376,431	10	3.796.659	83.33%	39.36%	22	3.796.659	61.11%	8.44%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	30.000.000	12		12	9.730.000	0		3	2.477.000	6	3.942.500	3	3.300.000	12	9.719.500	100%	99.89%	24	9.719.500	66.67%	32.4%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	437.400.000	12		12	136.800.000	3	34.200.000	3	32.600.000	3	34.200.000	3	34.200.000	12	135.200.000	100%	98.83%	24	135.200.000	66.67%	30.91%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	30	126.000.000	8		10	31.686.286	0		3	4.000.000	0	0	7	27.000.000	10	31.000.000	100%	97.83%	18	31.000.000	60%	24.6%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6.000.000	2		2	1.000.000	0		0,2	1.000.000	0	0	0	0,2	1.000.000	10%	100%	2,2	1.000.000	36.67%	16.67%	KELURAHAN GLADAK ANYAR		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	105.000.000	1		1	27.686.286	0		0	0	0	0	1	27.000.000	1	27.000.000	100%	97.52%	2	27.000.000	66.67%	25.71%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpas	15	15.000.000	4		5	3.000.000	0		1,6	3.000.000	0	0	0	0	1,6	3.000.000	32%	100%	5,6	3.000.000	37.33%	20%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0		1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	3	6.600.000	0		1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN GLADAK ANYAR	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab										
									I		II		III		IV																
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp															
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	816.000.000	82		0	82,1	190.810.645	20	34.050.000	20	57.920.044	22,1	42.755.290	20	42.736.640	82,1	177.461.974	100%	93%	164,1	177.461.974	200.12%	21.75%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit	3	43.200.000	1		0	1	14.400.000	0		0	0,5	4.800.000	0,25	2.400.000	0,25	2.400.000	1	9.600.000	100%	66.67%	2	9.600.000	66.67%	22.22%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	43.200.000	4		0	4	14.400.000	0		0	2	4.800.000	1	2.400.000	1	2.400.000	4	9.600.000	100%	66.67%	8	9.600.000	66.67%	22.22%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	paket	57	38.100.000	7		0	19	6.950.000	0		0	10	5.000.000	9	1.950.000	0		0	19	6.950.000	100%	100%	26	6.950.000	45.61%	18.24%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	24	9.000.000	7		0	8	1.000.000	0		0	4	1.000.000	0	0	0	0	4	1.000.000	50%	100%	11	1.000.000	45.83%	11.11%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	15.000.000	4		0	4	3.500.000	0		0	2	2.500.000	2	1.000.000	0		0	4	3.500.000	100%	100%	8	3.500.000	66.67%	23.33%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	24	7.500.000	8		0	8	2.450.000	0		0	6	1.500.000	2	950	0		0	8	2.450.000	100%	100%	16	2.450.000	66.67%	32.67%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpras	21	105.000.000	4		0	7	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4	0	19.05%	0%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	jasa penunjang	12	492.600.000	4		0	4	163.390.645	1	34.050.000	1	47.120.044	1	38.405.290	1	36.626.640	4	156.201.974	100%	95.6%	8	156.201.974	66.67%	31.71%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	36	9.000.000	12		0	12	2.246.717	0		0	10	1.500.000	1	490	1	250	12	2.240.000	100%	99.7%	24	2.240.000	66.67%	24.89%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	45.000.000	12		0	12	14.993.928	0		0	6	3.570.044	4	1.915.290	2	2.326.640	12	7.811.974	100%	52.1%	24	7.811.974	66.67%	17.36%	KELURAHAN BUGIH	
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	36	30.000.000	12		0	12	9.950.000	0		0	10	8.000.000	2	1.950.000	0		0	12	9.950.000	100%	100%	24	9.950.000	66.67%	33.17%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	408.600.000	12		0	12	136.200.000	3	34.050.000	3	34.050.000	3	34.050.000	3	34.050.000	12	136.200.000	100%	100%	24	136.200.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan	30	130.500.000	8		0	10	1.000.000	0		0	10	1.000.000	0	0	0	10	1.000.000	100%	100%	18	1.000.000	60%	0.77%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	105.000.000	1		0	1	500	0		0	1	500	0	0	0	1	500	100%	100%	2	500	66.67%	0.48%	KELURAHAN BUGIH		
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpras	15	15.000.000	4		0	5	500	0		0	5	500	0	0	0	5	500	100%	100%	9	500	60%	3.33%	KELURAHAN BUGIH		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas	Nilai %	90 90 90 90	95.065.679.319 80 41 57	0 80 80 80	33.636.953.945 18 0 0	6.066.644.656 20 0 0	7.416.607.521 8 0 167	6.703.025.084 26 52 200	8.008.126.848 26 52 200	28.194.404.109 65% 0% 250%	83.82% 173 41 257	106 28.194.404.109 117.78% 192.22% 45.56% 285.56%	29.66%	SEKRETARIAT DPRD										
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Persentase	90	472.907.700	77	0	80	173.457.000	0	0	74	21.822.864	167	19.040.000	200	35.880.000	200	76.742.864	250%	44.24%	277	76.742.864	307.78%	16.23%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	156.060.000	22	0	4	71.457.000	0	0	1	10.491.364	1	960	2	27.900.000	4	39.351.364	100%	55.07%	26	39.351.364	216.67%	25.22%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	156.060.000	78	0	4	51.000.000	0	0	0	11.331.500	1	0	2	3.170.000	3	14.501.500	75%	28.43%	81	14.501.500	675%	9.29%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	156.060.000	40	0	5	51.000.000	0	0	1	0	3	18.080.000	2	4.810.000	6	22.890.000	120%	44.88%	46	22.890.000	306.67%	14.67%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik	Persentase	90	9.124.902.506	127	0	80	2.901.807.911	2	536.332.487	0	886.002.212	13	405.095.825	34	948.192.414	34	2.775.622.938	42.5%	95.65%	161	2.775.622.938	178.89%	30.42%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	84	7.776.590.741	94	0	28	2.628.807.911	3	525.877.487	3	821.764.712	4	371.775.325	3	885.336.714	13	2.604.754.238	46.43%	99.08%	107	2.604.754.238	127.38%	33.49%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1728	302.940.000	60	0	576	83.000.000	10	10.455.000	40	7.595.000	70	18.200.000	200	24.450.000	320	60.700.000	55.56%	73.13%	380	60.700.000	21.99%	20.04%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	48	245.206.980	67	0	16	70.000.000	0	0	4	26.732.500	4	7.331.500	4	18.084.000	12	52.148.000	75%	74.5%	79	52.148.000	164.58%	21.27%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	66	236.362.050	40	0	22	60.000.000	0	0	8	16.950.000	0	0	8	17.251.700	16	34.201.700	72.73%	57%	56	34.201.700	84.85%	14.47%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	36	472.580.280	15	0	12	60.000.000	3	0	3	12.960.000	3	7.789.000	3	3.070.000	12	23.819.000	100%	39.7%	27	23.819.000	75%	5.04%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	Persentase	90	61.818.000	90	0	80	5.453.000	24	0	33	0	24	0	19	0	19	0	23.75%	0%	109	0	121.11%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	69	61.200.000	96	0	23	5.453.000	5	0	7	0	5	0	4	0	21	0	91.3%	0%	117	0	169.57%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terfasilitasi	Persentase	90	618.180.000	62	0	80	99.995.710	0	0	0	31.807.289	0	0	0	35.987.750	0	67.795.039	0%	67.8%	62	67.795.039	68.89%	10.97%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	108	612.000.000	50	0	36	99.995.710	0	0	0	31.807.289	0	0	0	35.987.750	0	67.795.039	0%	67.8%	50	67.795.039	46.3%	11.08%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Persentase	90	1.454.988.630	102	0	80	509.342.000	0	27.460.000	33	50.091.120	35	109.816.000	42	77.368.850	42	264.735.970	52.5%	51.98%	144	264.735.970	160%	18.2%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	180	94.855.104	92	0	60	30.998.400	15	0	15	14.809.500	15	8.199.000	15	7.378.500	60	30.387.000	100%	98.03%	152	30.387.000	84.44%	32.04%	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	51	94.860.000	94	0	17	31.000.000	0	0	4	0	4	12.839.000	7	4.360.850	15	17.199.850	88.24%	55.48%	109	17.199.850	213.73%	18.13%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	585.307.008	74	0	12	199.843.600	2	27.460.000	5	18.480.000	5	69.540.000	5	47.774.500	17	163.254.500	141.67%	81.69%	91	163.254.500	252.78%	27.89%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	18	321.170.868	92	0	6	124.000.000	0	0	1	0	1	0	3	0	5	0	83.33%	0%	97	0	538.89%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	183.600.000	12	0	12	30.000.000	0	0	1	0	1	0	1	3.285.000	3	3.285.000	25%	10.95%	15	3.285.000	41.67%	1.79%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	160.650.000	99	0	10	93.500.000	0	0	2	16.801.620	4	19.238.000	4	14.570.000	10	50.609.620	100%	54.13%	109	50.609.620	363.33%	31.5%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	Persentase	90	2.942.406.982	97	0	80	21.710.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	97	0	107.78%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	9.180.000	97	0	7	21.710.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	97	0	461.9%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Persentase	90	1.936.631.213	17	0	80	809.808.600	18	147.625.385	25	136.953.427	25	164.942.553	25	162.675.170	25	612.196.535	31.25%	75.6%	42	612.196.535	46.67%	31.61%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	195.948.324	82	0	12	64.035.000	3	0	3	0	3	27.304.000	3	0	12	27.304.000	100%	42.64%	94	27.304.000	261.11%	13.93%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	36	730.647.216	73	0	12	223.773.600	9	36.025.385	9	34.353.427	9	35.038.553	9	55.675.170	36	161.092.535	300%	71.99%	109	161.092.535	302.78%	22.05%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	990.675.000	94	0	12	522.000.000	3	111.600.000	3	102.600.000	3	102.600.000	3	107.000.000	12	423.800.000	100%	81.19%	106	423.800.000	294.44%	42.78%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Persentase	90	1.854.540.000	95	0	80	1.000.000.000	0	0	22	279.478.246	31	92.840.700	36	317.982.085	36	690.301.031	45%	69.03%	131	690.301.031	145.56%	37.22%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	60	1.224.000.000	97	0	20	800.000.000	0	0	5	258.259.246	5	42.842.700	10	249.812.585	20	550.914.531	100%	68.86%	117	550.914.531	195%	45.01%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	42	306.000.000	73	0	14	100.000.000	0	0	2	0	4	25.114.000	4	48.314.500	10	73.428.500	71.43%	73.43%	83	73.428.500	197.62%	24%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	33	306.000.000	95	0	11	100.000.000	0	0	3	21.219.000	5	24.884.000	2	19.855.000	10	65.958.000	90.91%	65.96%	105	65.958.000	318.18%	21.55%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	Persentase	90	74.694.537.163	112	0	80	26.699.128.824	20	5.355.226.784	5	5.862.252.163	5	5.634.623.406	76	6.034.995.579	76	22.887.097.932	95%	85.72%	188	22.887.097.932	208.89%	30.64%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	135	73.026.443.285	94	0	45	26.245.985.824	3	5.355.226.784	3	5.854.436.163	3	5.634.623.406	3	5.665.595.579	12	22.509.881.932	26.67%	85.77%	106	22.509.881.932	78.52%	30.82%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaiat Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiat Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	765.000.000	92	0	2	402.043.000	0	0	0	7.816.000	0	0	2	369.400.000	2	377.216.000	100%	93.82%	94	377.216.000	1566.67%	49.31%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	135	156.366.000	34	0	45	51.100.000	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	88.89%	0%	74	0	54.81%	0%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	Persentase	90	1.904.767.125	99	0	80	1.416.250.000	0	0	5	148.200.200	6	276.666.600	46	395.045.000	46	819.911.800	57.5%	57.89%	145	819.911.800	161.11%	43.05%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	36	107.100.000	97	0	12	35.000.000	0	0	12	13.200.200	24	18.166.600	100	0	136	31.366.800	1133.33%	89.62%	233	31.366.800	647.22%	29.29%	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
							k	Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18				
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	36	1.778.625.000	91		0	12	1.381.250.000	0		0	35	135.000.000	30	258.500.000	300	395.045.000	365	788.545.000	3041.67%	57.09%	456	788.545.000	1266.67%	44.33%	SEKRETARIAT DPRD		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	92	15.781.013.070	85		0	87	6.720.084.697	0	2.026.986.532	0	1.858.870.789	0	1.097.782.653	81,9	1.593.178.987	81,9	6.576.818.961	94.14%	97.87%	166,9	6.576.818.961	181.41%	41.68%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase subkegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	249.000.000	90		0	100	161.852.000	25	8.384.800	50	18.249.600	75	33.915.200	100	100.753.500	100	161.303.100	100%	99.66%	190	161.303.100	190%	64.78%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	135.000.000	3		0	2	120.727.750	0		0	0	1.773.300	2	33.915.200	2	84.539.250	2	120.227.750	100%	99.59%	5	120.227.750	71.43%	89.06%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	12	114.000.000	4		0	4	41.124.250	1	8.384.800	2	16.476.300	3		0	4	16.214.250	4	41.075.350	100%	99.88%	8	41.075.350	66.67%	36.03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase subkegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	10.857.119.034	90		0	100	3.976.131.807	25	1.180.400.085	50	1.403.053.643	75	491.442.440	100	875.562.542	100	3.950.458.710	100%	99.35%	190	3.950.458.710	190%	36.39%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	201.000.000	1		0	1	82.321.000	0	17.803.000	0	21.591.100	0	17.679.700	1	23.827.700	1	80.901.500	100%	98.28%	2	80.901.500	66.67%	40.25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	36	45.000.000	12		0	12	21.350.000	3	11.358.400	3	1.800.000	3	2.828.900	3	5.361.700	12	21.349.000	100%	100%	24	21.349.000	66.67%	47.44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	45.000.000	2		0	4	30.000.000	1	11.161.100	1	3.369.000	1	3.780.000	1	11.527.000	4	29.837.100	100%	99.46%	6	29.837.100	50%	66.3%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	10.566.119.034	35		0	35	3.842.460.807	35	1.140.077.585	35	1.376.293.543	29	467.153.840	29	834.846.142	29	3.818.371.110	82.86%	99.37%	64	3.818.371.110	182.86%	36.14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	135.000.000	90		0	100	63.946.750	10	10.154.000	40	11.310.000	70	9.966.000	100	30.141.454	100	61.571.454	100%	96.29%	190	61.571.454	190%	45.61%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	0		0	1	2.500.000	0		0	0	2.130.000	0		0	1	2.130.000	100%	85.2%	1	2.130.000	33.33%	7.1%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	0		0	1	11.000.000	0		0	0	7.140.000	0	2.130.000	1	1.680.000	1	10.950.000	100%	99.55%	1	10.950.000	33.33%	36.5%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	3	30.000.000	0		0	1	2.500.000	0		0	0	2.040.000	0		0	1	2.040.000	100%	81.6%	1	2.040.000	33.33%	6.8%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	30	45.000.000	10		0	10	47.946.750	2	10.154.000	0		0	6	7.836.000	2	28.461.454	10	46.451.454	100%	96.88%	20	46.451.454	66.67%	103.23%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	1.074.600.036	90		0	100	479.328.750	25	109.793.682	50	67.176.935	75	140.589.945	100	139.463.763	100	457.024.325	100%	95.35%	190	457.024.325	190%	42.53%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
											I		II		III		IV													
											k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp					
1	2	3	4	5	6	7		8			9			10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	45.000.000	3		0	3	15.000.000	0	4.960.300	0		0	3	6.171.700	3	3.843.500	3	14.975.500	100%	99.84%	6	14.975.500	50%	33.28%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	21000	105.000.000	685		0	700	149.328.750	150	30.672.000	160	31.622.000	154	30.976.500	236	46.722.000	700	139.992.500	100%	93.75%	1385	139.992.500	6.6%	133.33%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	165.000.000	3		0	3	41.000.000	3	12.000.400	3	1.460.400	3	20.114.375	3	531,15	3	34.106.325	100%	83.19%	6	34.106.325	50%	20.67%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	320	714.600.036	60		0	100	250.000.000	8	56.160.982	20	28.094.535	54	77.327.370	18	88.367.113	100	249.950.000	100%	99.98%	160	249.950.000	50%	34.98%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	3	30.000.000	0		0	1	24.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	1	0	1	18.000.000	100%	75%	1	18.000.000	33.33%	60%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	785.000.000	90		0	100	1.053.943.260	10	485.270.000	50	204.984.000	75	192.666.924	100	154.641.810	100	1.037.562.734	100%	98.45%	190	1.037.562.734	190%	132.17%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	33	65.000.000	0		0	17	89.999.930	15	8.070.000	0		0	2	65.588.645	0	15.082.530	17	88.741.175	100%	98.6%	17	88.741.175	51.52%	136.52%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	1	500.000.000	0		0	1	477.200.000	1	477.200.000	0		0	0	0	0	1	477.200.000	100%	100%	1	477.200.000	100%	95.44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	40	100.000.000	10		0	20	34.713.250	0	0	0	0	20	28.295.000	20	5.908.250	20	34.203.250	100%	98.53%	30	34.203.250	75%	34.2%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	30	120.000.000	0		0	20	232.030.200	0	0	20	204.984.000	20	0	20	14.950.000	20	219.934.000	100%	94.79%	20	219.934.000	66.67%	183.28%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	0	0		0	1	219.999.880	0	0	0	0	1	98.783.279	1	118.701.030	1	217.484.309	100%	98.86%	1	217.484.309	100%	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	1.971.594.000	90		0	100	746.499.700	25	217.728.565	50	98.426.611	75	179.045.076	100	190.842.777	100	686.043.029	100%	91.9%	190	686.043.029	190%	34.8%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	36.000.000	4		0	4	30.000.000	1	9.444.300	1	1.650.000	1	8.831.200	1	10.006.000	4	29.931.500	100%	99.77%	8	29.931.500	66.67%	83.14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	399.594.000	3		0	12	197.499.700	3	43.726.964	3	18.242.545	3	47.278.389	3	46.201.892	12	155.449.790	100%	78.71%	15	155.449.790	41.67%	38.9%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1.536.000.000	12		0	12	519.000.000	3	164.557.301	3	78.534.066	3	122.935.487	3	134.634.885	12	500.661.739	100%	96.47%	24	500.661.739	200%	32.6%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	708.700.000	90		0	100	238.382.430	25	15.255.400	50	55.670.000	75	50.157.068	100	101.773.141	100	222.855.609	100%	93.49%	190	222.855.609	190%	31.45%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak	unit	1	135.000.000	1		0	1	33.772.700	1	5.700.000	1	3.450.000	1	5.400.000	1	9.963.817	1	24.513.817	100%	72.58%	2	24.513.817	200%	18.16%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	unit	2	194.700.000	2		2	52.109.750	2	9.555.400	2	20.270.000	2	7.430.000	2	9.748.150	2	47.003.550	100%	90.2%	4	47.003.550	200%	24.14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak terwujud yang dipelihara	aset	1	24.000.000	0		1	5.000.000	0	0	0	1	4.927.068	1	0	1	4.927.068	100%	98.54%	1	4.927.068	100%	20.53%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	75.000.000	0		2	72.500.000	0	0	1	31.950.000	1	32.400.000	2	7.350.000	2	71.700.000	100%	98.9%	2	71.700.000	25%	95.6%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	280.000.000	1		1	74.999.980	0	0	0	1	0	1	74.711.174	1	74.711.174	100%	99.61%	2	74.711.174	200%	26.68%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Skala	82	13.106.185.073	82		82	4.509.399.867	0	642.835.967	0	1.354.788.993	0	962.685.689	80,5	1.277.234.991	80,5	4.237.545.640	98.17%	93.97%	162,5	4.237.545.640	198.17%	32.33%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	6	366.649.500	6		6	134.500.000	2	10.809.769	1	9.390.000	2	33.304.000	1	65.270.300	6	118.774.069	100%	88.31%	12	118.774.069	200%	32.39%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	236.600.000	3		3	90.000.000	1	2.584.000	1	6.660.000	1	33.304.000	0	42.082.550	3	84.630.550	100%	94.03%	6	84.630.550	200%	35.77%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	11.500.000	3		1	3.000.000	0	0	0	0	0	1	2.989.950	1	2.989.950	100%	99.67%	4	2.989.950	400%	26%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	11.500.000	3		1	3.000.000	0	0	1	0	0	0	2.994.900	1	2.994.900	100%	99.83%	4	2.994.900	400%	26.04%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11.500.000	1		1	3.000.000	0	0	0	1	0	0	2.989.900	1	2.989.900	100%	99.66%	2	2.989.900	200%	26%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.500.000	1		1	3.000.000	0	0	0	1	0	0	2.990.000	1	2.990.000	100%	99.67%	2	2.990.000	200%	26%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	60.000.000	1		2	22.500.000	0	8.225.769	1	2.730.000	0	11.223.000	2	22.178.769	100%	98.57%	3	22.178.769	150%	36.96%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	30.000.000	2		4	10.000.000	0	0	0	2	0	2	0	4	0	100%	0%	6	0	150%	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	OPD	1	7.384.856.167	1		1	2.581.733.466	1	307.492.888	0	993.850.883	0	548.659.563	0	693.645.647	1	2.543.648.981	100%	98.52%	2	2.543.648.981	200%	34.44%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	7.311.029.109	21		22	2.581.733.466	20	307.492.888	20	993.850.883	21	548.659.563	21	693.645.647	21	2.543.648.981	95.45%	98.52%	42	2.543.648.981	190.91%	34.79%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	10	142.131.500	10		10	50.000.000	0	10	0	1	9.020.000	3	20.800.000	3	5.320.000	7	35.140.000	70%	70.28%	17	35.140.000	170%	24.72%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	130.000.000	10		10	50.000.000	0	10	0	1	9.020.000	3	20.800.000	3	5.320.000	7	35.140.000	70%	70.28%	17	35.140.000	170%	27.03%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kantor	1	199.225.000	1		1	104.597.242	1	0	0	0	22.376.134	0	14.511.608	0	46.298.449	1	83.186.191	100%	79.53%	2	83.186.191	200%	41.75%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7 kRp		8 kRp		9 kRp		10 kRp		11 kRp		12 kRp		13 kRp		14 = 10 + 11 + 12 + 13 kRp		
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.000.000	0	0	3	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3	2.445.000	3	2.445.000	100%	97.8%	3	2.445.000	100%	18.81%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	15.000.000	21	0	25	13.700.600	0	0	0	0	300	25	11.431.500	25	11.731.500	100%	85.63%	46	11.731.500	184%	78.21%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	18.000.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	3	4.267.000	3	4.267.000	100%	42.67%	3	4.267.000	100%	23.71%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	0	0	4	5.896.642	0	0	675	2	1.000.000	2	4.109.500	4	5.784.500	100%	98.1%	4	5.784.500	100%	48.2%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	135.000.000	0	0	48	70.000.000	0	0	1	21.701.134	8	13.211.608	4	23.410.449	13	58.323.191	27.08%	83.32%	13	58.323.191	27.08%	43.2%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	8.650.000	4	0	4	2.500.000	0	0	0	0	0	4	635	4	635	100%	25.4%	8	635	200%	7.34%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Unit	2	641.666.490	5	0	2	204.710.258	0	0	0	0	46.300.000	2	1.950.000	2	48.250.000	100%	23.57%	7	48.250.000	350%	7.52%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	46.400.150	11	0	4	204.710.258	0	0	0	2	46.300.000	22	1.950.000	24	48.250.000	600%	23.57%	35	48.250.000	875%	103.99%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	5	4.067.293.216	10	0	5	1.228.858.901	5	318.283.310	0	294.280.176	0	286.436.218	0	312.760.351	5	1.211.760.055	100%	98.61%	15	1.211.760.055	300%	29.79%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	367.226.013	0	0	12	138.008.901	3	28.633.310	3	27.880.176	3	31.036.218	3	40.510.351	12	128.060.055	100%	92.79%	12	128.060.055	100%	34.87%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	3.661.596.000	12	0	12	1.090.850.000	3	289.650.000	3	266.400.000	3	255.400.000	3	272.250.000	12	1.083.700.000	100%	99.34%	24	1.083.700.000	200%	29.6%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit	11	304.363.200	0	0	11	205.000.000	1	6.250.000	2	25.871.800	5	12.674.300	10	151.990.244	18	196.786.344	163.64%	95.99%	18	196.786.344	163.64%	64.66%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	152.400.000	2	0	3	50.000.000	1	6.250.000	1	15.691.800	1	7.978.000	0	15.662.000	3	45.581.800	100%	91.16%	5	45.581.800	166.67%	29.91%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	15.300.000	3	0	3	20.000.000	0	0	0	4.480.000	1	2.696.300	2	9.573.000	3	16.749.300	100%	83.75%	6	16.749.300	200%	109.47%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	10.180.000	0	0	4	10.000.000	0	0	0	5.700.000	3	2.000.000	6	1.923.729	9	9.623.729	225%	96.24%	9	9.623.729	225%	94.54%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	125.000.000	1	0	2	125.000.000	0	0	0	0	0	2	124.831.515	2	124.831.515	100%	99.87%	3	124.831.515	0%	99.87%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	962.700.000	82	0	82,1	261.334.119	20	46.500.000	20	69.027.021	30	87.219.660	12,1	55.601.760	82,1	258.348.441	100%	98.86%	164,1	258.348.441	200.12%	26.84%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	43.200.000	1	0	1	14.400.000	0	0	1	7.200.000	0	3.600.000	0	3.600.000	1	14.400.000	100%	100%	2	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	43.200.000	4	0	4	14.400.000	0	0	2	7.200.000	0	3.600.000	2	3.600.000	4	14.400.000	100%	100%	8	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Unit	57	35.400.000	19	0	19	7.638.200	0	0	8	1.747.500	7	5.883.500	4	0	19	7.631.000	100%	99.91%	38	7.631.000	66.67%	21.56%	KELURAHAN KOWEL

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7	0	8	3.000.000	0	0	4	1.747.500	4	1.252.500	0	0	8	3.000.000	100%	100%	15	3.000.000	62.5%	33.33%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4	0	4	3.300.000	0	0	0	0	4	3.300.000	0	0	4	3.300.000	100%	100%	8	3.300.000	66.67%	22%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8	0	8	1.338.200	0	0	0	0	4	1.331.000	0	0	4	1.331.000	50%	99.46%	12	1.331.000	50%	17.75%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpras	21	105.000.000	4	0	7	26.054.919	0	0	0	0	7	25.500.000	0	0	7	25.500.000	100%	97.87%	11	25.500.000	52.38%	24.29%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpras	15	90.000.000	4	0	5	26.054.919	0	0	0	0	5	25.500.000	0	0	5	25.500.000	100%	97.87%	9	25.500.000	60%	28.33%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	12	642.000.000	4	0	4	206.671.000	1	46.500.000	1	60.079.521	2	51.236.160	0	47.791.760	4	205.607.441	100%	99.49%	8	205.607.441	66.67%	32.03%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	9.000.000	12	0	12	1.400.000	0	0	12	1.400.000	0	0	0	12	1.400.000	100%	100%	24	1.400.000	66.67%	15.56%	KELURAHAN KOWEL	
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	30.000.000	12	0	12	8.355.800	0	0	6	4.952.200	6	3.403.600	0	0	12	8.355.800	100%	100%	24	8.355.800	66.67%	27.85%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.000.000	12	0	12	15.415.200	0	0	5	7.227.321	2	3.582.560	5	3.541.760	12	14.351.641	100%	93.1%	24	14.351.641	66.67%	31.89%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	558.000.000	12	0	12	181.500.000	3	46.500.000	3	46.500.000	3	44.250.000	3	44.250.000	12	181.500.000	100%	100%	24	181.500.000	66.67%	32.53%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	30	130.500.000	8	0	10	1.500.000	0	0	0	0	6	1.000.000	4	500	10	1.500.000	100%	100%	18	1.500.000	60%	1.15%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6.000.000	2	0	2	1.500.000	0	0	0	0	1	1.000.000	1	500	2	1.500.000	100%	100%	4	1.500.000	66.67%	25%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0	0	1	5.070.000	0	0	0	0	1	0	0	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	3	6.600.000	0	0	1	5.070.000	0	0	0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN KOWEL
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82	760.200.000	82	0	82,1	228.999.879	0	29.400.000	50	56.265.810	15	53.819.132	17,1	84.758.689	17,1	224.243.631	20.83%	97.92%	99,1	224.243.631	120.85%	29.5%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit	3	43.200.000	1	0	1	14.400.000	0	0	1	7.200.000	0	3.600.000	0	3.600.000	1	14.400.000	100%	100%	2	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	43.200.000	4	0	4	14.400.000	0	0	2	7.200.000	1	3.600.000	1	3.600.000	4	14.400.000	100%	100%	8	14.400.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Unit	57	38.100.000	19	0	19	16.044.018	0	0	10	8.400.000	4	7.644.018	5	0	19	16.044.018	100%	100%	38	16.044.018	66.67%	42.11%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	9.000.000	7	0	8	3.000.000	0	0	4	1.500.000	4	1.500.000	0	0	8	3.000.000	100%	100%	15	3.000.000	62.5%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	4	0	4	10.544.018	0	0	2	6.000.000	2	4.544.018	0	0	4	10.544.018	100%	100%	8	10.544.018	66.67%	70.29%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab						
											I		II		III		IV														
						1	2	3	4		5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	7.500.000	8		0	8	2.500.000	0		0	3	900	5	1.600.000	0		0	8	2.500.000	100%	100%	16	2.500.000	66.67%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Sarpras	21	105.000.000	4		0	7	6.720.813	0		0	0	0	0	7	6.720.813	7	6.720.813	100%	100%	11	6.720.813	52.38%	6.4%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarpras	15	90.000.000	4		0	5	6.720.813	0		0	0	0	0	5	6.720.813	5	6.720.813	100%	100%	9	6.720.813	60%	7.47%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa Penunjang	12	436.800.000	4		0	4	150.642.548	1	29.400.000	1	40.665.810	1	41.452.614	1	37.627.224	4	149.145.648	100%	99.01%	8	149.145.648	66.67%	34.15%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	36	9.000.000	12		0	12	3.000.000	0		0	0	0	3.000.000	0		0	0	3.000.000	0%	100%	12	3.000.000	33.33%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	45.000.000	12		0	12	17.903.220	3		0	3	7.012.110	3	4.106.314	3	6.087.896	12	17.206.320	100%	96.11%	24	17.206.320	66.67%	38.24%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	36	30.000.000	12		0	12	12.139.328	3		0	3	5.053.700	3	4.946.300	3	2.139.328	12	12.139.328	100%	100%	24	12.139.328	66.67%	40.46%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	352.800.000	12		0	12	117.600.000	3	29.400.000	3	28.600.000	3	29.400.000	3	29.400.000	12	116.800.000	100%	99.32%	24	116.800.000	66.67%	33.11%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan	30	130.500.000	8		0	10	36.122.500	0		0	0	4	1.122.500	6	33.100.652	10	34.223.152	100%	94.74%	18	34.223.152	60%	26.22%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6.000.000	2		0	2	1.122.500	0		0	0	2	1.122.500	0		0	2	1.122.500	100%	100%	4	1.122.500	66.67%	18.71%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	105.000.000	1		0	1	35.000.000	0		0	0	0	0	1	33.100.652	1	33.100.652	100%	94.57%	2	33.100.652	33.33%	31.52%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	ASN	3	6.600.000	0		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	1	3.710.000	33.33%	56.21%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA		
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1		0	1		0	1	5.070.000	0		0	0	0	0	1	3.710.000	1	3.710.000	100%	73.18%	2	3.710.000	200%	0%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	99	35.500.000	99		0	99,15	25.000.000	20	4.050.000	90,25	0	100	16.544.800	100	4.175.000	100	24.769.800	100.86%	99.08%	199	24.769.800	201.01%	69.77%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	26		15		0	17,35		5	17,86		0	17,86		17,86		102.94%		32,86		126.38%						
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase	99	18.000.000	97		0	98	25.000.000	98	4.050.000	98	0	98	16.544.800	98	4.175.000	98	24.769.800	100%	99.08%	195	24.769.800	196.97%	137.61%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah	2425	18.000.000	2325		0	2400	25.000.000	750	4.050.000	1450	0	1750	16.544.800	3997	4.175.000	3997	24.769.800	166.54%	99.08%	6322	24.769.800	260.7%	137.61%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	100	83.500.000	100		0	100	20.000.000	100		0	100		9.899.500	100	5.440.000	100	4.460.000	100	19.799.500	100%	99%	200	19.799.500	200%	23.71%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase penerbitan akta kelahiran	%	98		98			98		20		51,61		51,61		51,61		51,61		52.66%		149,61		152.66%				
				Persentase Penerbitan akta perceraian	%	100		100			100		100		100		100		100		100		100%		200		200%				
				Persentase Penerbitan akta kematian	%	100		100			100		20		50		75		100		100		100%		200		200%				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
												I		II		III		IV												
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terjadi Dengan Baik	Persentase	100	17.500.000	100		0	100	20.000.000	25		0	50	9.899.500	75	5.440.000	100	4.460.000	100	19.799.500	100%	99%	200	19.799.500	200%	113.14%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	Nilai	10350	17.500.000	0		0	10150	20.000.000	2850		0	6150	9.899.500	8650	5.440.000	11672	4.460.000	29322	19.799.500	288.89%	99%	29322	19.799.500	283.3%	113.14%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah PD/Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	5	130.900.000	1		0	3	45.533.800	1		0	1	14.986.500	1	13.933.000	1	10.790.000	1	39.709.500	33.33%	87.21%	2	39.709.500	40%	30.34%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang Sudah Tersaji Secara Baik dan Tepat Waktu	Persentase	96	35.500.000	95		0	96	22.712.800	15		0	45	1.786.500	70	4.613.000	90	10.790.000	90	17.189.500	93.75%	75.68%	185	17.189.500	192.71%	48.42%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah	5	12.000.000	1		0	3	22.712.800	1		0	1	1.786.500	1	4.613.000	1	10.790.000	1	17.189.500	33.33%	75.68%	2	17.189.500	40%	143.25%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Terlaksana Secara Tepat	Persentase	97	48.900.000	95		0	95,75	22.821.000	25		0	50	13.200.000	74,98	9.320.000	95,75	0	95,75	22.520.000	100%	98.68%	190,75	22.520.000	196.65%	46.05%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah	4	11.000.000	0		0	4	22.821.000	1		0	2	13.200.000	3	9.320.000	4	0	4	22.520.000	100%	98.68%	4	22.520.000	100%	204.73%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen profil kependudukan yang diinput ke sistem	%	100	25.500.000	100		0	100	359,5	0		0	0	320	0	0	0	0	320	0%	89.01%	100	320	100%	1.25%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah	2	25.500.000	2		0	2	359,5	0		0	0	320	0	0	0	0	320	0%	89.01%	2	320	100%	1.25%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah	10	11.500.000	0		0	10	359,5	10		0	10	320	10	0	10	0	10	320	100%	89.01%	10	320	100%	2.78%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	1.800.000.000	80		0	100	2.040.870.000	25		0	25	486.280.000	25	514.680.794	25	971.533.947	100	1.972.494.741	100%	96.65%	180	1.972.494.741	180%	109.58%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot a sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	80	1.800.000.000	42		0	70	2.040.870.000	33		0	18,5	486.280.000	17	514.680.794	6,5	971.533.947	75	1.972.494.741	107.14%	96.65%	117	1.972.494.741	146.25%	109.58%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	8.983.939.500	60		0	60	3.805.000.000	0	14.569.196	0		849.765.700	0	815.922.500	100	1.634.436.188	100	3.314.693.584	166.67%	87.11%	160	3.314.693.584	266.67%	36.9%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3		2			3		0		0		0		5		5		166.67%		7		233.33%			
				Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3		2			3		0		0		0		4,4		4,4		146.67%		6,4		213.33%			
				Domain Manajemen SPBE	Nilai	3		1			3		0		0		0		3		3		100%		4		133.33%			
				Domain Layanan SPBE	Nilai	3		3			3		0		0		0		3,68		3,68		122.67%		6,68		222.67%			
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	8.361.503.500	100		0	100	3.215.000.000	100	0	0		804.664.500	0	799.340.000	0	1.591.387.500	100	3.195.392.000	100%	99.39%	200	3.195.392.000	200%	38.22%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%			
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	622.436.000	0	0	100	590.000.000	100	14.569.196	0	45.101.200	0	16.582.500	0	43.048.688	100	119.301.584	100%	20.22%	100	119.301.584	100%	19.17%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	Dokumen	5	120.000.000	5	0	5	10.000.000	5	1.441.500	5	0	5	600	5	5.489.500	5	7.531.000	100%	75.31%	10	7.531.000	200%	6.28%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi	Aplikasi	5	120.000.000	5	0	5	10.000.000	5	1.441.500	5	0	5	600	5	5.489.500	5	7.531.000	100%	75.31%	10	7.531.000	200%	6.28%	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	836.660.694	100	0	100	174.820.000	0	0	0	22.321.600	0	19.781.500	100	128.271.575	100	170.374.675	100%	97.46%	200	170.374.675	200%	20.36%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi Produk Administrasi	60	836.660.694	4	0	20	174.820.000	0	0	0	22.321.600	0	19.781.500	14	128.271.575	14	170.374.675	70%	97.46%	18	170.374.675	30%	20.36%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	3	307.149.500	0	0	1	138.500.000	0	0	0	3.259.500	0	13.644.450	0	32.423.650	0	49.327.600	0%	35.62%	0	49.327.600	0%	16.06%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	10	231.249.500	2	0	3	78.500.000	5,26		0	0	3.259.500	0	7.093.550	0	22.014.650	5,26	32.367.700	175.33%	41.23%	7,26	32.367.700	72.6%	14%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	Dokumen	3	70.000.000	0	0	3	10.000.000	1		0	0	1.510.500	1	2.669.100	0	5.628.700	2	9.808.300	66.67%	98.08%	2	9.808.300	66.67%	14.01%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Laporan	12	43.600.000	0	0	1	50.000.000	0		0	0	1.480.500	1	12.570.900	1	14.051.400	100%	28.1%	1	14.051.400	8.33%	32.23%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	42	115.000.000	1	0	42	18.500.000	0		0	8	1.749.000	14	2.943.950	11	3.815.050	33	8.508.000	78.57%	45.99%	34	8.508.000	80.95%	7.4%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang	%	20	75.900.000	2	0	10	60.000.000	100		0	0	6.550.900	0	10.409.000	100	16.959.900	1000%	28.27%	102	16.959.900	510%	22.35%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	8	70.600.000	0	0	4	60.000.000	42		0	0	6.550.900	0	10.409.000	42	16.959.900	1050%	28.27%	42	16.959.900	525%	24.02%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola	%	75	335.000.000	85	0	85	125.800.000	20	3.215.200	40	5.128.000	65	28.000.028	80	86.852.700	80	123.195.928	94.12%	97.93%	165	123.195.928	220%	36.77%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	%	100	100.000.000	100	0	100	42.550.000	25		0	50	3.879.600	10	6.770.500	10	31.600.900	10	42.251.000	10%	99.3%	110	42.251.000	110%	42.25%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	100.000.000	1	0	5	19.250.000	0		0	0	3.879.600	3	6.770.500	2	8.599.400	5	19.249.500	100%	100%	6	19.249.500	600%	19.25%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab	
												I		II		III		IV											
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	1500	23.300.000	0	Rp	0	1500	23.300.000	0		0	0	0	0	1500	23.001.500	1500	23.001.500	100%	98.72%	1500	23.001.500	100%	98.72%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	bulan	100	190.000.000	0		12	83.250.000	3	3.215.200	6	1.248.400	2	21.229.528	1	55.251.800	12	80.944.928	100%	97.23%	12	80.944.928	12%	42.6%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna	9	110.000.000	0		2	15.800.000	0		0	1.248.400	1	8.331.114	1	6.115.000	2	15.694.514	100%	99.33%	2	15.694.514	22.22%	14.27%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	70.000.000	1		0	1	67.450.000	0,01	3.215.200	0	0	0,41	12.898.414	0,58	49.136.800	1	65.250.414	100%	96.74%	2	65.250.414	200%	93.21%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71	75.000.000	70		0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	70	0	98.59%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persentase	100	49.018.794.905	0		0	100	21.846.707.695	0	137.944.701	0	3.221.267.983	0	4.088.150.664	100	12.366.874.025	100	19.814.237.373	100%	90.7%	100	19.814.237.373	100%	40.42%	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persentase	100		0		100		0		0		0		90		90		90%		90		90%			
				Persentase nota kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kerjasama	Persentase	100		0		100		0		0		0		100		100		100%		100		100%			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan yang terfasilitasi dan dilaksanakan	dokumen	6	499.152.532	0		0	6	444.459.250	3	39.888.792	1	251.163.293	1	68.092.012	1	69.668.593	6	428.812.690	100%	96.48%	6	428.812.690	100%	85.91%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	4	324.544.500	0		0	4	148.649.000	1	24.678.292	1	107.912.252	1	11.485.000	1	4.275.789	4	148.351.333	100%	99.8%	4	148.351.333	100%	45.71%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	2	18.650.491	0		0	2	70.202.700	0	2.404.500	0	15.501.921	1	6.602.702	0	39.565.708	1	64.074.831	50%	91.27%	1	64.074.831	50%	343.56%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	3	155.957.541	0		0	3	225.607.550	2	12.806.000	0	127.749.120	0	50.004.310	1	25.827.096	3	216.386.526	100%	95.91%	3	216.386.526	100%	138.75%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Dokumen	18	47.786.848.710	0		0	18	20.853.249.245	1	63.111.680	7	2.809.970.920	8	3.850.503.140	2	12.200.276.540	18	18.923.862.280	100%	90.75%	18	18.923.862.280	100%	39.6%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual"	dokumen	10	32.207.288.114	0		0	10	15.435.615.700	1	62.811.680	4	948.222.420	3	1.738.952.690	2	11.353.532.340	10	14.103.519.130	100%	91.37%	10	14.103.519.130	100%	43.79%	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k			Rp		k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	dokumen	4	11.513.265.283	0	0	4	4.199.133.545	0	300	1	1.677.033.000	3	1.702.665.950	0	338.668.200	4	3.718.667.150	100%	88.56%	4	3.718.667.150	100%	32.3%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	dokumen	4	4.066.295.313	0	0	4	1.218.500.000	0	0	2	184.715.500	2	408.884.500	0	508.076.000	4	1.101.676.000	100%	90.41%	4	1.101.676.000	100%	27.09%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum	kegiatan	722	612.248.563	0	0	722	510.524.600	140	26.098.229	215	146.246.870	288	153.918.862	160	96.928.892	803	423.192.853	111.22%	82.89%	803	423.192.853	111.22%	69.12%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	dokumen	660	523.531.697	0	0	660	302.370.400	127	12.207.380	218	64.381.620	280	131.380.424	117	70.474.522	742	278.443.946	112.42%	92.09%	742	278.443.946	112.42%	53.19%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	"Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum"	kasus	1	52.098.974	0	0	2	166.101.200	0	4.859.999	1	80.645.250	0	6.150.000	0	20.410.000	1	112.065.249	50%	67.47%	1	112.065.249	100%	215.1%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan"	dokumen	60	36.617.892	0	0	60	42.053.000	13	9.030.850	9	1.220.000	8	16.388.438	30	6.044.370	60	32.683.658	100%	77.72%	60	32.683.658	100%	89.26%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama dalam kabupaten yang difasilitasi	dokumen	1	120.545.100	0	0	1	38.474.600	0	8.846.000	0	13.886.900	0	15.636.650	1	0	1	38.369.550	100%	99.73%	1	38.369.550	100%	31.83%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	dokumen	1	120.545.100	0	0	1	38.474.600	0	8.846.000	0	13.886.900	0	15.636.650	1	0	1	38.369.550	100%	99.73%	1	38.369.550	100%	31.83%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang dilaksanakan Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik	Persentase	100	3.326.365.428	0	0	100	2.165.442.400	0	158.042.967	0	686.558.086	0	425.389.720	100	574.666.885	100	1.844.657.658	100%	85.19%	100	1.844.657.658	100%	55.46%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	dokumen	14	1.394.596.200	0	0	14	561.954.700	3	39.916.921	3	301.339.354	5	172.016.551	3	39.646.604	14	552.919.430	100%	98.39%	14	552.919.430	100%	39.65%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	3	65.234.836	0	0	3	8.827.200	1	0	1	2.545.450	1	4.090.000	0	2.002.372	3	8.637.822	100%	97.85%	3	8.637.822	100%	13.24%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	4	956.531.442	0	0	4	149.381.450	1	31.562.859	1	88.087.904	1	2.427.750	1	22.371.875	4	144.450.388	100%	96.7%	4	144.450.388	100%	15.1%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	dokumen	4	94.372.132	0	0	4	25.376.950	0	3.255.062	1	2.305.950	1	5.479.367	1	12.205.500	3	23.245.879	75%	91.6%	3	23.245.879	75%	24.63%	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
												k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	dokumen	1	69.127.515	0	0	1	20.362.600	0	0	0	5.495.800	1	13.431.150	0	366.857	1	19.293.807	100%	94.75%	1	19.293.807	100%	27.91%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	dokumen	2	209.330.275	0	0	2	358.006.500	1	5.099.000	0	202.904.250	1	146.588.284	0	2.700.000	2	357.291.534	100%	99.8%	2	357.291.534	100%	170.68%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	Dokumen	6	806.051.857	0	0	6	401.960.150	1	96.199.400	0	90.759.684	2	128.492.141	3	12.927.618	6	328.378.843	100%	81.69%	6	328.378.843	100%	40.74%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	380.453.472	0	0	3	278.990.200	0	23.405.300	0	76.545.520	0	104.611.900	3	2.437.000	3	206.999.720	100%	74.2%	3	206.999.720	100%	54.41%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	146.814.659	0	0	1	47.330.250	1	40.132.700	0	0	0	914,75	0	6.268.000	1	47.315.450	100%	99.97%	1	47.315.450	100%	32.23%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	278.783.726	0	0	2	75.639.700	0	32.661.400	0	14.214.164	2	22.965.491	0	4.222.618	2	74.063.673	100%	97.92%	2	74.063.673	100%	26.57%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	kegiatan	484	887.088.300	0	0	484	602.000.000	255	8.676.646	109	185.630.778	67	57.738.307	53	156.820.183	484	408.865.914	100%	67.92%	484	408.865.914	100%	46.09%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	106.481.505	0	0	5	126.792.000	5	0	5	53.670.500	5	0	5	66.128.907	5	119.799.407	100%	94.48%	5	119.799.407	100%	112.51%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	275	670.787.118	0	0	275	222.545.500	100	3.472.472	55	95.780.278	67	51.115.538	53	49.119.884	275	199.488.172	100%	89.64%	275	199.488.172	100%	29.74%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	204	109.819.677	0	0	204	252.662.500	150	5.204.174	54	36.180.000	0	6.622.769	0	41.571.392	204	89.578.335	100%	35.45%	204	89.578.335	100%	81.57%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan sumberdaya alam yang dilaksanakan	dokumen	12	238.629.071	0	0	12	599.527.550	2	13.250.000	3	108.828.270	3	67.142.721	4	365.272.480	12	554.493.471	100%	92.49%	12	554.493.471	100%	232.37%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	112.417.578	0	0	4	564.241.000	1	13.250.000	1	96.207.370	1	56.681.121	1	355.522.480	4	521.660.971	100%	92.45%	4	521.660.971	100%	464.04%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	4	77.140.365	0	0	4	18.152.000	0	0	1	0	1	8.698.600	2	8.000.000	4	16.698.600	100%	91.99%	4	16.698.600	100%	21.65%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	4	49.071.128	0	0	4	17.134.550	1	0	1	12.620.900	1	1.763.000	1	1.750.000	4	16.133.900	100%	94.16%	4	16.133.900	100%	32.88%	SEKRETARIAT DAERAH
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase promperda yang terselesaikan	%	90	39.261.084.974	0	0	80	30.247.809.200	5	61.000.000	24	8.084.556.525	23	8.996.872.765	24	2.907.787.954	24	20.050.217.244	30%	66.29%	24	20.050.217.244	26.67%	51.07%	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90		96		80		5		15		23		37		37		46.25%		133		147.78%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab									
									I		II		III		IV															
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Persentase	90	9.272.700.000	76	80	7.953.333.000	0		0	24	286.576.750	24	2.218.563.974	24	717.634.074	24	3.222.774.798	30%	40.52%	100	3.222.774.798	111.11%	34.76%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	15	3.060.000.000	46	0	5	1.900.000.000	1		0	1	0	1	899.764.998	1	0	4	899.764.998	80%	47.36%	50	899.764.998	333.33%	29.4%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	66	3.060.000.000	65	0	22	4.200.000.000	4		0	4	145.934.750	4	1.277.887.400	4	153.224.674	16	1.577.046.824	72.73%	37.55%	81	1.577.046.824	122.73%	51.54%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah kajian perundang-undangan	Kali	21	1.530.000.000	40	0	7	600.000.000	0		0	1	140.642.000	1	40.911.576	1	132.924.600	3	314.478.176	42.86%	52.41%	43	314.478.176	204.76%	20.55%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	Tatib	3	1.530.000.000	47	0	1	1.253.333.000	0		0	0	0	0	0	431.484.800	0	0	431.484.800	0%	34.43%	47	431.484.800	1566.67%	28.2%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	Persentase	90	231.877.500	100	0	80	1.525.000.000	0		0	0	0	30	402.369.000	60	121.005.000	60	523.374.000	75%	34.32%	160	523.374.000	177.78%	225.71%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	3	76.500.000	84	0	1	600.000.000	0		0	0	0	0	10.000.000	1	64.370.000	1	74.370.000	100%	12.4%	85	74.370.000	2833.33%	97.22%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	3	76.500.000	77	0	1	600.000.000	0		0	0	0	0	256.972.000	1	25.850.000	1	282.822.000	100%	47.14%	78	282.822.000	2600%	369.7%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	3	76.500.000	76	0	1	325.000.000	0		0	0	0	1	135.397.000	0		30.785.000	1	166.182.000	100%	51.13%	77	166.182.000	2566.67%	217.23%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	Persentase	90	123.636.000	100	0	80	340.000.000	0		0	45	111.708.000	0	34.295.000	0	0	9.424.000	0	155.427.000	0%	45.71%	100	155.427.000	111.11%	125.71%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Keputusan DPRD	3	61.200.000	84	0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	9.424.000	0	0	9.424.000	0%	47.12%	84	9.424.000	2800%	15.4%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rekomendasi DPRD	3	61.200.000	96	0	1	320.000.000	0		0	1	111.708.000	1	34.295.000	0	0	0	2	146.003.000	200%	45.63%	98	146.003.000	3266.67%	238.57%	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	90	7.130.706.300	142	0	80	3.488.312.000	10	61.000.000	36	249.613.000	11	203.874.600	23	552.062.398	23	1.066.549.998	28.75%	30.57%	165	1.066.549.998	183.33%	14.96%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Anggota	135	5.416.200.000	72	0	45	2.951.312.000	1		0	20	158.113.000	2	132.374.600	8	446.062.398	31	736.549.998	68.89%	24.96%	103	736.549.998	76.3%	13.6%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jenis	30	91.800.000	73	0	10	30.000.000	0		0	0	0	0	7	0	7	0	70%	0%	80	0	266.67%	0%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	Tenaga Ahli	30	963.900.000	77	0	10	315.000.000	3	40.000.000	3	60.000.000	3	40.000.000	2	70.000.000	11	210.000.000	110%	66.67%	88	210.000.000	293.33%	21.79%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli	21	587.520.000	66	0	7	192.000.000	3	21.000.000	3	31.500.000	3	31.500.000	1	36.000.000	10	120.000.000	142.86%	62.5%	76	120.000.000	361.9%	20.42%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	Persentase	90	4.787.983.636	76	0	80	1.586.999.300	0		0	15	478.477.300	10	15.788.500	42	225.000.000	42	719.265.800	52.5%	45.32%	118	719.265.800	131.11%	15.02%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kali	2016	612.000.000	0	0	672	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Usulan	135	76.497.858	7	0	45	24.999.300	0		0	0	10.927.300	0	14.060.000	44	0	44	24.987.300	97.78%	99.95%	51	24.987.300	37.78%	32.66%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Anggota	135	4.011.220.000	50	0	45	1.512.000.000	0		0	20	467.550.000	20	1.728.500	40	225.000.000	80	694.278.500	177.78%	45.92%	130	694.278.500	96.3%	17.31%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	Persentase	90	618.800.000	98	0	80	663.534.900	0		0	15	171.905.784	16	219.705.784	61	76.400.716	61	468.012.284	76.25%	70.53%	159	468.012.284	176.67%	75.63%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumentasi Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Kali	960	612.000.000	99	0	320	663.534.900	0		0	44	171.905.784	45	219.705.784	175	76.400.716	264	468.012.284	82.5%	70.53%	363	468.012.284	37.81%	76.47%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Persentase	90	17.095.381.538	96	0	80	14.690.630.000	6		0	18	6.786.275.691	24	5.902.275.907	49	1.206.261.766	49	13.894.813.364	61.25%	94.58%	145	13.894.813.364	161.11%	81.28%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kali	516	16.924.477.500	96	0	172	14.690.630.000	10		0	30	6.786.275.691	40	5.902.275.907	80	1.206.261.766	160	13.894.813.364	93.02%	94.58%	256	13.894.813.364	49.61%	82.1%	SEKRETARIAT DPRD	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100	3.970.000.000	100	0	100	2.854.402.900	25	425.605.897	50	649.721.450	75	975.664.187	100	678.649.601	100	2.729.641.135	100%	95.63%	200	2.729.641.135	200%	68.76%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100		100		100		25		50		75		100		100		100%		200		200%		
				Persentase pemenuhan data sesuai daftar data	Persentase	80		80		80		20		40		60		80		80		100%		160		200%		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	Dokumen	8	1.710.000.000	2	0	4	1.165.680.000	0	130.990.519	1	91.895.800	3	694.261.281	0	245.100.101	4	1.162.247.701	100%	99.71%	6	1.162.247.701	75%	67.97%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita acara	7	150.000.000	1	0	2	50.480.000	2	35.727.600	0	14.590.000	0	0	0	0	2	50.317.600	100%	99.68%	3	50.317.600	42.86%	33.55%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara	5	300.000.000	1	0	2	73.692.000	2	46.863.700	0	26.414.800	0	0	0	0	2	73.278.500	100%	99.44%	3	73.278.500	60%	24.43%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	10	1.200.000.000	3	0	4	1.041.508.000	0	48.399.219	1	50.891.000	3	694.261.281	0	245.100.101	4	1.038.651.601	100%	99.73%	7	1.038.651.601	70%	86.55%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Disusun	Dokumen	3	880.000.000	1	0	3	323.989.000	3	0	0	322.915.650	0	0	0	0	3	322.915.650	100%	99.67%	4	322.915.650	133.33%	36.69%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan)	dokumen	3	750.000.000	1	0	3	323.989.000	2	0	1	322.915.650	0	0	0	0	3	322.915.650	100%	99.67%	4	322.915.650	133.33%	43.06%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun	Dokumen	15	1.200.000.000	4	0	5	1.364.733.900	0	294.615.378	1	234.910.000	3	281.402.906	1	433.549.500	5	1.244.477.784	100%	91.19%	9	1.244.477.784	60%	103.71%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	246	300.000.000	1	0	82	49.379.000	0	8.009.415	0	825	42	22.222.576	40	16.707.730	82	47.764.721	100%	96.73%	83	47.764.721	33.74%	15.92%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	13	900.000.000	5	0	5	1.315.354.900	2	286.605.963	0	234.085.000	1	259.180.330	2	416.841.770	5	1.196.713.063	100%	90.98%	10	1.196.713.063	76.92%	132.97%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan	Persentase	100	3.130.600.125	100	0	100	1.612.625.350	25	136.485.742	50	171.487.445	75	747.210.421	100	544.255.685	100	1.599.439.293	100%	99.18%	200	1.599.439.293	200%	51.09%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	Persentase	100		100		100		25		50		75		100		100		100%		200		200%		
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaannya sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100		100		100		25		50		75		100		100		100%		200		200%		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.157.807.250	100	0	100	639.599.750	25	60.146.620	50	60.683.375	75	280.927.771	100	226.084.877	100	627.842.643	100%	98.16%	200	627.842.643	200%	54.23%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
										I		II		III		IV												
										7		8		9		10											11	
1	2	3	4	5	6	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan	%	100		100		100		25		50		75		100		100		100%		200		200%		
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	7	93.016.500	2	0	2	78.743.000	0	18.595.050	0	7.089.000	2	1.045.900	0	50.995.250	2	77.725.200	100%	98.71%	4	77.725.200	57.14%	83.56%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	66	60.269.250	22	0	22	51.456.250	0	4.426.700	22	0	22	30.034.735	22	16.786.550	22	51.247.985	100%	99.6%	44	51.247.985	66.67%	85.03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	66	63.348.750	22	0	22	27.227.000	22	7.244.000	22	2.620.000	22	3.710.800	22	11.344.400	22	24.919.200	100%	91.52%	44	24.919.200	66.67%	39.34%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	66	72.740.250	22	0	22	29.368.000	0	4.812.000	0	3.057.300	22	5.970.000	0	15.399.300	22	29.238.600	100%	99.56%	44	29.238.600	66.67%	40.2%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	7	93.141.750	3	0	2	70.585.250	0	5.911.174	0	14.268.755	2	22.021.074	0	28.384.220	2	70.585.223	100%	100%	5	70.585.223	71.43%	75.78%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24	237.813.750	8	0	8	206.153.250	0	3.874.120	8	20.192.600	8	158.399.705	8	19.828.622	8	202.295.047	100%	98.13%	16	202.295.047	66.67%	85.06%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24	460.382.250	8	0	8	149.317.000	8	11.504.000	8	3.425.900	8	59.745.557	8	73.758.050	8	148.433.507	100%	99.41%	16	148.433.507	66.67%	32.24%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24	77.094.750	8	0	8	26.750.000	0	3.779.576	0	10.029.820	8	0	0	9.588.485	8	23.397.881	100%	87.47%	16	23.397.881	66.67%	30.35%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	814.838.250	100	0	100	431.777.000	25	53.567.009	50	63.540.900	75	118.445.300	100	195.458.341	100	431.011.550	100%	99.82%	200	431.011.550	200%	52.9%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Perangkat Daerah Bidang SDA yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan	%	100		100		100		25		50		75		100		100		100%		200		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab				
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	dokumen	7	63.828.000	3		0	2	45.000.000	0	13.194.209	0	4.660.500	2	8.069.500	0	19.075.791	2	45.000.000	100%	100%	5	45.000.000	71.43%	70.5%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Laporan	12	209.992.500	4		0	4	100.000.000	4	10.765.500	4	16.545.100	4	8.643.400	4	64.046.000	4	100.000.000	100%	100%	8	100.000.000	66.67%	47.62%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	12	94.683.000	4		0	4	30.000.000	0		4	6.969.350	4	12.909.350	4	10.121.300	4	30.000.000	100%	100%	8	30.000.000	66.67%	31.68%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	12	72.570.000	4		0	4	121.128.500	0	8.430.000	0	1.465.050	4	65.857.050	0	44.610.950	4	120.363.050	100%	99.37%	8	120.363.050	66.67%	165.86%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	dokumen	7	57.687.750	3		0	2	45.000.000	0	7.260.200	0	11.321.800	2	4.630.000	0	21.788.000	2	45.000.000	100%	100%	5	45.000.000	71.43%	78.01%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	12	177.487.500	4		0	4	49.400.000	0	4.485.800	4	14.514.000	4	11.720.000	4	18.680.200	4	49.400.000	100%	100%	8	49.400.000	66.67%	27.83%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	78.589.500	4		0	4	25.000.000	4	8.011.300	4	1.409.500	4	6.616.000	4	8.963.200	4	25.000.000	100%	100%	8	25.000.000	200%	31.81%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	12	60.000.000	0		0	4	16.248.500	0	1.420.000	0	6.655.600	4		0	8.172.900	4	16.248.500	100%	100%	4	16.248.500	33.33%	27.08%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	1.157.954.625	100		0	100	541.248.600	25	22.772.113	50	47.263.170	75	347.837.350	100	122.712.467	100	540.585.100	100%	99.88%	200	540.585.100	200%	46.68%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan	%	100		100			100		25		50		75		100		100		100%		200		200%			
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	dokumen	7	209.595.000	3		0	2	50.000.000	0	6.047.700	0	4.260.000	2	17.493.850	0	22.198.450	2	50.000.000	100%	100%	5	50.000.000	71.43%	23.86%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	100.882.500	5		0	5	90.000.000	5		0	5	2.840.000	5	79.022.000	5	7.952.000	5	89.814.000	100%	99.79%	10	89.814.000	200%	89.03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
									I		II		III		IV													
									1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			12		13
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	439.980.000	5	0	5	40.000.000	5	11.124.413	5	19.680.000	5	5.307.000	5	3.888.587	5	40.000.000	100%	100%	10	40.000.000	200%	9.09%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	15	71.369.250	5	0	5	40.000.000	0	5.600.000	0	7.374.750	5	11.423.000	0	15.602.250	5	40.000.000	100%	100%	10	40.000.000	66.67%	56.05%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	7	69.628.500	3	0	2	30.000.000	0	0	0	2.840.000	2	11.920.000	0	15.240.000	2	30.000.000	100%	100%	5	30.000.000	71.43%	43.09%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	5	136.298.625	2	0	5	25.000.000	0	0	5	2.540.000	5	12.444.000	5	10.016.000	5	25.000.000	100%	100%	7	25.000.000	140%	18.34%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	5	71.446.500	2	0	5	41.248.600	5	0	5	7.728.420	5	1.350.000	5	32.170.180	5	41.248.600	100%	100%	7	41.248.600	140%	57.73%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	15	58.754.250	2	0	5	225.000.000	0	0	0	0	208.877.500	5	15.645.000	5	224.522.500	100%	99.79%	7	224.522.500	46.67%	382.14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase dokumen keuangan daerah (KUA PPAS, KUA PPAS-P, APBD, P-APBD, dan LKPD) yang ditetapkan dan disampaikan tepat waktu	%	100	877.872.603.798	100	0	100	332.205.745.622	20	89.944.838.881	20	119.720.132.594	20	60.010.359.246	100	59.418.513.560	100	329.093.844.281	100%	99.06%	200	329.093.844.281	200%	37.49%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
				Rasio SILPA terhadap APBD	%	4		3		3,53	2,74		2,74		2,74		2,74		2,74		77.62%		5,74		143.5%			
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan terhadap APBD	%	9		8		8,58	9,35		9,35		9,35		9,35		9,35		108.97%		17,35		192.78%			
				Persentase Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil yang tersalurkan sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100		100		100	0		0		0		100		100		100%		200		200%			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	9	3.885.181.080	9	0	9	1.553.866.450	1	129.927.900	2	241.175.000	3	374.688.188	3	588.474.634	9	1.334.265.722	100%	85.87%	18	1.334.265.722	200%	34.34%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	261.228.360	2	0	2	83.971.200	0	0	0	0	78.395.188	0	1.620.000	2	80.015.188	100%	95.29%	4	80.015.188	200%	30.63%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	253.374.360	2	0	2	83.458.120	0	0	1	0	78.440.000	0	0	2	78.440.000	100%	93.99%	4	78.440.000	200%	30.96%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	1.166.867.820	2	0	2	511.184.145	1	0	0	87.070.000	0	92.006.000	1	262.756.400	2	441.832.400	100%	86.43%	4	441.832.400	200%	37.86%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp						k	Rp	k	Rp	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	1.462.518.900	2	0	2	580.463.701	0	70.550.000	1	150.055.000	0	115.857.000	1	113.188.000	2	449.650.000	100%	77.46%	4	449.650.000	200%	30.74%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	42	218.704.200	42	0	42	293.789.284	0	59.377.900	0	4.050.000	0	9.990.000	42	210.910.234	42	284.328.134	100%	96.78%	84	284.328.134	200%	130.01%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42	450.000.000	42	0	42	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	42	0	100%	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan perundangan	Dokumen	1	5.831.209.344	1	0	1	1.693.736.448	1	397.951.321	1	346.795.616	1	438.113.301	1	506.797.836	1	1.689.658.074	100%	99.76%	2	1.689.658.074	200%	28.98%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	120.000.000	12	0	12	40.000.000	0	0	0	13.437.100	6	12.514.900	12	13.965.100	18	39.917.100	150%	99.79%	30	39.917.100	250%	33.26%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	42	45.000.000	42	0	42	15.000.000	0	0	0	0	2.720.000	42	12.277.800	42	14.997.800	100%	99.99%	84	14.997.800	200%	33.33%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan	12	210.000.000	12	0	12	30.500.000	0	0	0	0	0	12	26.997.000	12	26.997.000	100%	88.51%	24	26.997.000	200%	12.86%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) danLaporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	3.991.009.344	12	0	12	1.330.336.448	3	393.511.321	3	254.012.328	3	374.195.301	3	308.160.936	12	1.329.879.886	100%	99.97%	24	1.329.879.886	200%	33.32%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	715.200.000	1	0	1	233.600.000	0	4.440.000	0	79.346.188	0	48.683.100	1	101.117.000	1	233.586.288	100%	99.99%	2	233.586.288	200%	32.66%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42	750.000.000	42	0	42	44.300.000	0	0	0	0	0	42	44.280.000	42	44.280.000	100%	99.95%	84	44.280.000	200%	5.9%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu	Laporan	1	1.937.130.000	1	0	1	585.710.000	0	4.622.500	1	115.851.400	0	117.465.300	0	242.330.328	1	480.269.528	100%	82%	2	480.269.528	200%	24.79%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	684	93.000.000	42	0	684	15.000.000	42	2.962.500	87	0	90	1.697.500	150	5.168.800	369	9.828.800	53.95%	65.53%	411	9.828.800	60.09%	10.57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	30	150.000.000	4	0	30	50.000.000	0	0	0	5.003.400	0	5.733.200	30	14.735.700	30	25.472.300	100%	50.94%	34	25.472.300	113.33%	16.98%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	450.000.000	42	0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	2	149.000.000	2	149.000.000	100%	99.33%	44	149.000.000	2200%	33.11%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	638.400.000	2	0	2	212.800.000	0	0	1	104.178.000	1	55.140.000	0	30.883.000	2	190.201.000	100%	89.38%	4	190.201.000	200%	29.79%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	250.500.000	2	0	2	87.500.000	0	0	2	0	2	36.120.000	2	34.920.000	6	71.040.000	300%	81.19%	8	71.040.000	400%	28.36%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42	163.230.000	42	0	42	70.410.000	0	1.660.000	42	6.670.000	42	18.774.600	42	7.622.828	42	34.727.428	100%	49.32%	84	34.727.428	200%	21.28%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tercapai	%	100	866.219.083.374	100	0	100	328.372.432.724	0	89.412.337.160	0	119.016.310.578	0	59.080.092.457	100	58.080.910.762	100	325.589.650.957	100%	99.15%	200	325.589.650.957	200%	37.59%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	896.486.550	1	0	1	42.619.761	0	0	0	0	0	1	42.619.761	1	42.619.761	100%	100%	2	42.619.761	200%	4.75%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	832.167.149.400	178	0	5	308.920.001.500	1	88.240.618.410	2	115.633.370.928	1	52.360.495.881	1	52.685.512.130	5	308.919.997.349	100%	100%	183	308.919.997.349	3660%	37.12%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	18.000.000.000	0	0	1	13.300.000.000	0	1.171.718.750	0	3.382.939.650	0	6.605.906.437	1	934.375.838	1	12.094.940.675	100%	90.94%	1	12.094.940.675	100%	67.19%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	15.155.447.424	0	0	1	6.109.811.463	0	0	0	0	0	113.690.139	1	4.418.403.033	1	4.532.093.172	100%	74.18%	1	4.532.093.172	100%	29.9%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan asetnya	%	100	4.072.500.000	0	0	100	3.761.379.250	100	4.064.000	100	275.910.250	100	403.820.250	100	1.253.308.370	100	1.937.102.870	100%	51.5%	100	1.937.102.870	100%	47.57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang mengelola barang milik daerah	OPD	42	4.072.500.000	42	0	42	3.761.379.250	42	4.064.000	42	275.910.250	42	403.820.250	42	1.253.308.370	42	1.937.102.870	100%	51.5%	84	1.937.102.870	200%	47.57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	540.000.000	42	0	1	180.000.000	0	0	1	99.500.000	0	40.381.000	0	37.273.000	1	177.154.000	100%	98.42%	43	177.154.000	4300%	32.81%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	690.000.000	42	0	1	230.000.000	0	4.064.000	0	42.200.000	1	27.411.500	0	81.618.000	1	155.293.500	100%	67.52%	43	155.293.500	4300%	22.51%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	300	2.032.500.000	314	0	300	687.250.000	0	0	84	53.740.000	77	194.087.750	57	142.352.697	218	390.180.447	72.67%	56.77%	532	390.180.447	177.33%	19.2%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	150.000.000	42	0	1	77.500.000	0	0	0	1	36.559.250	0	16.549.000	0	12.875.000	1	65.983.250	100%	85.14%	43	65.983.250	4300%	43.99%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	450.000.000	15	0	6	2.516.629.250	4	0	4	38.460.000	6	113.630.000	10	968.835.673	24	1.120.925.673	400%	44.54%	39	1.120.925.673	650%	249.09%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	210.000.000	42	0	2	70.000.000	1	0	0	5.451.000	3	11.761.000	0	10.354.000	4	27.566.000	200%	39.38%	46	27.566.000	2300%	13.13%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	97	3.205.683.975	90	0	92	1.383.427.030	16,88	61.212.500	48,36	298.359.700	18,13	100.156.500	106	776.620.500	106	1.236.349.200	115.22%	89.37%	196	1.236.349.200	202.06%	38.57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang Terkelola	Jenis Pendapatan	11	3.205.683.975	11	0	11	1.383.427.030	11	61.212.500	11	298.359.700	11	100.156.500	11	776.620.500	11	1.236.349.200	100%	89.37%	22	1.236.349.200	200%	38.57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	750.093.000	9	0	4	365.894.600	0	0	1	59.500.000	1	64.002.500	2	230.720.000	4	354.222.500	100%	96.81%	13	354.222.500	325%	47.22%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	189	734.906.010	531928	0	189	294.104.770	0	0	189	46.440.000	0	6.885.000	0	198.831.600	189	252.156.600	100%	85.74%	532117	252.156.600	281543.39 %	34.31%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	9	615.000.000	2690	0	9	554.866.000	3	61.212.500	2	160.898.000	0	0	4	270.294.400	9	492.404.900	100%	88.74%	2699	492.404.900	29988.89%	80.07%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	9	224.694.105	9	0	9	74.898.040	0	0	3	12.724.200	2	10.620.000	4	34.047.400	9	57.391.600	100%	76.63%	18	57.391.600	200%	25.54%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	9	280.990.860	3184	0	9	93.663.620	2	0	2	18.797.500	3	18.649.000	4	42.727.100	11	80.173.600	122.22%	85.6%	3195	80.173.600	35500%	28.53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks dimensi kualifikasi pada perhitungan IP ASN	Indeks	13	3.608.000.000	13	0	13	1.471.000.000	0	101.225.363	0	371.798.935	0	199.180.467	21,76	629.181.471	21,76	1.301.386.236	167.38%	88.47%	34,76	1.301.386.236	267.38%	36.07%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
				Indeks dimensi kinerja pada perhitungan IP ASN	Indeks	17		16			17	0	0	0		0	24,66		24,66		145.06%		40,66		239.18%				
				Indeks dimensi disiplin pada perhitungan IP ASN	Indeks	5		5		5		0	0	0		0	5		5		100%		10		200%				
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	Persen	300	858.000.000	100	0	100	460.000.000	25	7.620.000	25	223.517.389	25	62.221.618	25	140.626.789	100	433.985.796	100%	94.34%	200	433.985.796	66.67%	50.58%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
				Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	Persen	300		100			100	25		25		25		25		100	100%		200		66.67%				
				Persentase ASN dengan informasi kepegawaian yang valid	Persen	300		100			100	25		25		25		25		100	100%		200		66.67%				
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	3	43.000.000	1	0	1	20.000.000	1	3.651.000	0	10.148.090	0	3.185.900	0	1.800.000	1	18.784.990	100%	93.92%	2	18.784.990	66.67%	43.69%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	3	45.000.000	1	0	1	20.000.000	0	0	0	4.612.500	0	10.899.590	1	1.620.000	1	17.132.090	100%	85.66%	2	17.132.090	66.67%	38.07%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	3	520.000.000	1	0	1	200.000.000	0	3.969.000	0	9.832.199	0	37.410.528	1	133.966.789	1	185.178.516	100%	92.59%	2	185.178.516	66.67%	35.61%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	150.000.000	1	0	1	200.000.000	0	0	1	198.000.000	0	0	0	0	1	198.000.000	100%	99%	2	198.000.000	66.67%	132%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	1	0	1	20.000.000	0	0	0	924,6	0	10.725.600	1	3.240.000	1	14.890.200	100%	74.45%	2	14.890.200	66.67%	49.63%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	9	1.400.000.000	3	0	3	610.000.000	0	86.251.863	0	112.558.452	0	92.300.549	3	265.279.717	3	556.390.581	100%	91.21%	6	556.390.581	66.67%	39.74%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab								
									I		II		III		IV														
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	3	190.000.000	1		0	1	80.000.000	0	32.782.100	0	6.610.200	0	8.710.000	1	21.877.162	1	69.979.462	100%	87.47%	2	69.979.462	66.67%	36.83%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3	220.000.000	1		0	1	80.000.000	0	3.607.000	0	39.260.500	0	22.287.000	1	13.504.500	1	78.659.000	100%	98.32%	2	78.659.000	66.67%	35.75%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	3	960.000.000	1		0	1	450.000.000	0	49.862.763	0	66.687.752	0	61.303.549	1	229.898.055	1	407.752.119	100%	90.61%	2	407.752.119	66.67%	42.47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan	Laporan	3	600.000.000	1		0	1	211.000.000	0	4.840.000	0	11.487.700	0	36.668.050	1	136.533.000	1	189.528.750	100%	89.82%	2	189.528.750	66.67%	31.59%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	300.000.000	20		0	40	100.000.000	0	0	0	6.660.000	0	17.911.650	40	60.995.000	40	85.566.650	100%	85.57%	60	85.566.650	50%	28.52%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	6	300.000.000	10		0	2	111.000.000	0	4.840.000	0	4.827.700	0	18.756.400	2	75.538.000	2	103.962.100	100%	93.66%	12	103.962.100	200%	34.65%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan penilaian dan evaluasi kinerja kriteria baik	Persen	300	750.000.000	100		0	100	190.000.000	25	2.513.500	25	24.235.394	25	7.990.250	25	86.741.965	100	121.481.109	100%	63.94%	200	121.481.109	66.67%	16.2%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3	435.000.000	1		0	1	50.000.000	0	1.153.500	0	16.423.802	0	910	1	6.195.000	1	24.682.302	100%	49.36%	2	24.682.302	66.67%	5.67%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	300	60.000.000	300		0	100	20.000.000	0	0	0	5.551.592	100	2.269.500	0	2.000.000	100	9.821.092	100%	49.11%	400	9.821.092	133.33%	16.37%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	165	240.000.000	55		0	55	120.000.000	0	1.360.000	0	2.260.000	0	4.810.750	55	78.546.965	55	86.977.715	100%	72.48%	110	86.977.715	66.67%	36.24%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks dimensi kompetensi pada perhitungan IP ASN	Indeks	11	1.380.000.000	9		0	10	424.000.000	0	38.213.000	0	59.080.000	0	111.127.900	25,94	174.370.500	25,94	382.791.400	259.4%	90.28%	34,94	382.791.400	317.64%	27.74%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	Persen	300	300.000.000	100		0	100	124.000.000	0	0	25	2.730.000	25	0	50	91.600.500	100	94.330.500	100%	76.07%	200	94.330.500	66.67%	31.44%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	120	300.000.000	40		0	40	124.000.000	0	0	0	2.730.000	40	0	0	91.600.500	40	94.330.500	100%	76.07%	80	94.330.500	66.67%	31.44%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan prajabatan	Persen	300	1.080.000.000	100		0	100	300.000.000	0	38.213.000	0	56.350.000	0	111.127.900	100	82.770.000	100	288.460.900	100%	96.15%	200	288.460.900	66.67%	26.71%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	10	1.050.000.000	4		0	3	300.000.000	0	38.213.000	1	56.350.000	1	111.127.900	0	82.770.000	2	288.460.900	66.67%	96.15%	6	288.460.900	60%	27.47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Inovasi Daerah	Persentase	100	1.714.323.250	80		0	100	1.124.323.250	20		50	35.664.519	75	138.533.948	100	545.346.065	100	719.544.532	100%	64%	180	719.544.532	180%	41.97%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100		100		0	100		20		50		75		100		100		100%		200		200%		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	PD Penanggungjawab							
									I		II		III		IV													
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12+ 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Inovasi Daerah	%	100	714.323.250	80	0	100	564.323.250	10	0	40	14.982.450	75	78.484.200	100	95.164.300	100	188.630.950	100%	33.43%	180	188.630.950	180%	26.41%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100		100		10		30	70		100		100		100		200		200%			
		5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	3	450.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	1	14.659.200	1	14.659.200	1	95.164.300	1	124.482.700	100%	24.9%	1	124.482.700	33.33%	27.66%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	15	204.323.250	3	0	5	64.323.250	0	0	1	323,25	1	63.825.000	3	0	5	64.148.250	100%	99.73%	8	64.148.250	53.33%	31.4%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Inovasi Daerah	%	100	325.000.000	80	0	100	130.000.000	10	0	30	5.707.000	70	4.609.000	100	119.120.000	100	129.436.000	100%	99.57%	180	129.436.000	180%	39.83%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100		100		10		30	70		100		100		100		200		200%			
		5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	2	100.000.000	0	0	2	130.000.000	0	0	0	5.707.000	0	4.609.000	2	119.120.000	2	129.436.000	100%	99.57%	2	129.436.000	100%	129.44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Inovasi Daerah	%	100	275.000.000	80	0	100	130.000.000	10	0	30	3.831.500	70	1.830.000	100	123.663.100	100	129.324.600	100%	99.48%	180	129.324.600	180%	47.03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100		100		10		30	70		100		100		100		200		200%			
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	2	100.000.000	0	0	2	130.000.000	0	0	0	3.831.500	0	1.830.000	2	123.663.100	2	129.324.600	100%	99.48%	2	129.324.600	100%	129.32%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan diadopsikan	%	100	400.000.000	100	0	100	300.000.000	20	0	20	11.143.569	30	53.610.748	30	207.398.665	100	272.152.982	100%	90.72%	200	272.152.982	200%	68.04%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	300	300.000.000	150	0	200	300.000.000	0	0	0	11.143.569	100	53.610.748	100	207.398.665	200	272.152.982	100%	90.72%	350	272.152.982	116.67%	90.72%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (RKPD)	Persentase	85	5.151.201.213	70	0	75	1.386.187.000	20	0	45	374.385.000	70	185.252.000	85	615.397.500	85	1.175.034.500	113.33%	84.77%	155	1.175.034.500	182.35%	22.81%	INSPEKTORAT
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan, reviu, dan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	95		90		91		66,44		83,78	88		92,33		92,33		101.46%		182,33		191.93%			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu	persen	90	4.337.985.423	87	0	88	1.185.057.000	95	0	92	341.193.000	90	170.025.500	91	501.756.000	91	1.012.974.500	103.41%	85.48%	178	1.012.974.500	197.78%	23.35%	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	150	1.915.131.600	97	0	130	589.815.000	47	0	19	174.563.500	41	143.873.000	51	248.935.000	158	567.371.500	121.54%	96.19%	255	567.371.500	170%	29.63%	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	70	1.549.308.600	41	0	110	439.645.000	9	0	5	128.378.500	78	10.541.500	77	186.173.500	169	325.093.500	153.64%	73.94%	210	325.093.500	300%	20.98%	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026	Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
									I		II		III		IV			14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%			16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15 = 14 / 9 x 100%	16 = 14 + 8	17 = 16 / 7 x 100%	18											
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	91.800.000	1	0	1	19.525.000	1	0	0	19.032.000	0	0	0	0	19.032.000	0%	97.48%	1	19.032.000	100%	20.73%	INSPEKTORAT	
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	91.800.000	1	0	1	19.525.000	1	0	0	19.219.000	0	0	0	0	19.219.000	0%	98.43%	1	19.219.000	100%	20.94%	INSPEKTORAT	
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	199	371.178.000	183	0	191	50.255.000	0	0	0	0	0	181	35.702.500	181	35.702.500	94.76%	71.04%	364	35.702.500	182.91%	9.62%	INSPEKTORAT	
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	275.400.000	2	0	4	66.292.000	1	0	1	0	1	15.611.000	2	30.945.000	5	46.556.000	125%	70.23%	7	46.556.000	175%	16.9%	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu	persen	70	813.215.790	54	0	60	201.130.000	75	0	80	33.192.000	83	15.226.500	89	113.641.500	89	162.060.000	148.33%	80.57%	143	162.060.000	204.29%	19.93%	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	153.000.000	2	0	2	31.368.000	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	100%	0%	4	0	200%	0%	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	24	652.086.000	13	0	18	169.762.000	3	0	1	33.192.000	1	15.226.500	8	113.641.500	13	162.060.000	72.22%	95.46%	26	162.060.000	108.33%	24.85%	INSPEKTORAT
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada/SK Bupati) terkait pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas yang ditetapkan	Kebijakan	1	9.968.647.044	0	0	1	1.183.723.599	0	0	1	201.325.000	0	343.192.500	1	367.911.625	2	912.429.125	200%	77.08%	2	912.429.125	200%	9.15%	INSPEKTORAT
				Tingkat capaian rencana aksi pencegahan korupsi	Persen	95		91		91	0		2		64		90		90		98.9%		181		190.53%			
				Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WRK/WBRM	Perangkat Daerah	8		3		4	0		0		3		3		3		75%		6		75%			
				Persentase perangkat daerah daerah yang mendapat predikat SAKIP minimal A	Persen	80		74		76	0		0		0		88		88		115.79%		162		202.5%			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan RB General dan RB Tematik	persen	50	9.875.920.044	24	0	30	1.183.723.599	0	0	48	201.325.000	48	343.192.500	48	367.911.625	48	912.429.125	160%	77.08%	72	912.429.125	144%	9.24%	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	42	5.097.960.000	42	0	42	873.183.800	42	0	42	191.941.500	42	343.192.500	42	195.722.500	42	730.856.500	100%	83.7%	84	730.856.500	200%	14.34%	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	42	1.384.313.400	10	0	42	24.468.400	42	0	42	0	42	4.583.800	42	4.583.800	100%	18.73%	52	4.583.800	123.81%	0.33%	INSPEKTORAT		
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	1.343.278.800	4	0	12	253.601.600	3	0	3	9.383.500	3	0	5	167.605.325	14	176.988.825	116.67%	69.79%	18	176.988.825	150%	13.18%	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	42	1.951.637.400	42	0	42	32.469.799	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	100%	0%	84	0	200%	0%	INSPEKTORAT
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Persentase	88	60.000.000	0	0	86	8.940.000	0	0	0	50	5.848.000	36	2.550.000	86	8.398.000	100%	93.94%	86	8.398.000	97.73%	14%	KECAMATAN PROPP0	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks	3		3		3	0		0		0		3		3		100%		6		200%			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persentase	94	60.000.000	91	0	92	8.940.000	0	0	0	75	5.848.000	92	2.550.000	92	8.398.000	100%	93.94%	183	8.398.000	194.68%	14%	KECAMATAN PROPP0	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	30.000.000	1	0	1	2.940.000	0	0	0	0	1	2.940.000	0	0	1	2.940.000	100%	100%	2	2.940.000	200%	9.8%	KECAMATAN PROPO
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	30.000.000	20	0	20	6.000.000	0	0	0	10	2.908.000	10	2.550.000	20	5.458.000	100%	90.97%	40	5.458.000	200%	18.19%	KECAMATAN PROPO	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100	60.000.000	100	0	100	30.000.000	0	0	0	19,6	5.747.000	80	24.252.650	99,6	29.999.650	99.6%	100%	199,6	29.999.650	199.6%	50%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	%	100	30.000.000	90	0	95	15.000.000	0	0	0	10	747,2	85	14.252.650	95	14.999.850	100%	100%	185	14.999.850	185%	50%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	30.000.000	4	0	4	15.000.000	0	0	0	1	747,2	4	14.252.650	4	14.999.850	100%	100%	8	14.999.850	200%	50%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	30.000.000	90	0	100	15.000.000	0	0	0	40	4.999.800	60	10.000.000	100	14.999.800	100%	100%	190	14.999.800	190%	50%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	30.000.000	1	0	1	15.000.000	0	0	0	0,5	4.999.800	1	10.000.000	1	14.999.800	100%	100%	2	14.999.800	200%	50%	KECAMATAN KADUR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persen	98	63.500.000	90	0	94	6.750.000	20	0	20	2.334.000	24	1.620.500	30	2.795.500	94	6.750.000	100%	100%	184	6.750.000	187.76%	10.63%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persen	100	10.000.000	100	0	100	1.250.000	25	0	25	1.250.000	25	0	25	0	100	1.250.000	100%	100%	200	1.250.000	200%	12.5%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	kali	1	15.000.000	1	0	1	1.250.000	0	0	1	1.250.000	1	0	1	0	1	1.250.000	100%	100%	2	1.250.000	200%	8.33%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	46.000.000	100	0	100	5.500.000	25	0	25	1.084.000	25	1.620.500	25	2.795.500	100	5.500.000	100%	100%	200	5.500.000	200%	11.96%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	kali	5	23.000.000	2	0	2	3.000.000	0	0	2	84	2	1.620.500	2	1.295.500	2	3.000.000	100%	100%	4	3.000.000	80%	13.04%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	Pelayanan	3	23.000.000	3	0	3	2.500.000	3	0	3	1.000.000	3	0	3	1.500.000	3	2.500.000	100%	100%	6	2.500.000	200%	10.87%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Persen	100	7.500.000	100	0	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	KECAMATAN LARANGAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100	15.000.000	100	0	100	5.000.000	0	0	50	5.000.000	30	0	20	0	20	5.000.000	20%	100%	120	5.000.000	120%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100		100		100		0		50		30		20		20		20%		120		120%		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	15.000.000	90	0	100	5.000.000	0	0	50	5.000.000	20	0	30	0	30	5.000.000	30%	100%	120	5.000.000	120%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Layanan	21	15.000.000	21	0	21	5.000.000	0	0	21	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0%	100%	21	5.000.000	100%	33.33%	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan.	Persentase	100	48.000.000	100	0	100	1.575.000	25	0	25	525	25	1.050.000	25	0	25	1.575.000	25%	100%	125	1.575.000	125%	3.28%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persentase	100	48.000.000	100	0	100	1.575.000	25	0	25	525	25	1.050.000	25	0	100	1.575.000	100%	100%	200	1.575.000	200%	3.28%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Layanan	21	48.000.000	21	0	21	1.575.000	0	0	10	525	11	1.050.000	0	0	21	1.575.000	100%	100%	42	1.575.000	200%	3.28%	KECAMATAN PALENGAAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	100	63.675.000	100	0	100	32.731.000	25	2.580.800	25	3.646.300	25	12.224.500	25	11.168.300	25	29.619.900	25%	90.49%	125	29.619.900	125%	46.52%	KECAMATAN WARU
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	persen	100	63.675.000	90	0	100	32.731.000	25	2.580.800	25	3.646.300	25	12.224.500	25	11.168.300	25	29.619.900	25%	90.49%	115	29.619.900	115%	46.52%	KECAMATAN WARU
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	30.000.000	4	0	1	22.731.000	0	832,6	0	3.646.300	0	7.612.100	1	8.181.000	1	20.272.000	100%	89.18%	5	20.272.000	500%	67.57%	KECAMATAN WARU
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	21	33.675.000	18	0	21	10.000.000	5	1.748.200	5	0	5	4.612.400	6	2.987.300	6	9.347.900	28.57%	93.48%	24	9.347.900	114.29%	27.76%	KECAMATAN WARU
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100	99.000.000	0	0	100	20.416.900	20	1.410.000	30	4.220.000	25	5.220.000	25	9.287.900	100	20.137.900	100%	98.63%	100	20.137.900	100%	20.34%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	69.000.000	100	0	98	20.416.900	20	1.410.000	30	4.220.000	25	5.220.000	23	9.287.900	98	20.137.900	100%	98.63%	198	20.137.900	198%	29.19%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	30.000.000	2	0	2	10.500.000	1	1.410.000	0	2.000.000	1	2.000.000	0	4.811.000	2	10.221.000	100%	97.34%	4	10.221.000	66.67%	34.07%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	36	38.000.000	21	0	21	9.916.900	5	0	6	2.220.000	5	3.220.000	5	4.476.900	21	9.916.900	100%	100%	42	9.916.900	116.67%	26.1%	KECAMATAN BATUMARMAR
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Persentase	100	30.000.000	100	0	100	36.000.000	100	2.836.000	100	9.217.750	100	5.179.000	100	9.856.000	100	27.088.750	100%	75.25%	200	27.088.750	200%	90.3%	KECAMATAN GALIS
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	30.000.000	100	0	100	36.000.000	100	2.836.000	100	9.217.750	100	5.179.000	100	9.856.000	100	27.088.750	100%	75.25%	200	27.088.750	200%	90.3%	KECAMATAN GALIS
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	10.000.000	2	0	5	5.000.000	2	2.836.000	3	2.164.000	0	0	0	5	5.000.000	100%	100%	7	5.000.000	140%	50%	KECAMATAN GALIS	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab			
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8	
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	20.000.000	5		14	31.000.000	0		2	7.053.750	2	5.179.000	10	9.856.000	14	22.088.750	100%	71.25%	19	22.088.750	135.71%	110.44%	KECAMATAN GALIS			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100	26.223.486	100		100	14.505.050	25		25	4.704.200	25	9.800.850	25		25	14.505.050	25%	100%	125	14.505.050	125%	55.31%	KECAMATAN PEGANTENAN			
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Persentase	100		100		100		25		25		25		25		25		25%		125		125%					
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persen	100	13.201.185	100		100	5.144.150	25		25	0	5.144.150	25		0	100	5.144.150	100%	100%	200	5.144.150	200%	38.97%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	15	13.069.651	15		15	5.144.150	3		2	0	5.144.150	0		0	10	5.144.150	66.67%	100%	25	5.144.150	166.67%	39.36%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persen	100	13.022.301	100		100	9.360.900	25		25	4.704.200	25	4.656.700	25		0	100	9.360.900	100%	100%	200	9.360.900	200%	71.88%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.892.549	4		4	9.360.900	1		1	4.704.200	1	4.656.700	0		0	3	9.360.900	75%	100%	7	9.360.900	175%	72.61%	KECAMATAN PEGANTENAN		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	Persen	100	0	100		100	0	25		25	0	25	0	25	0	100	0	100%	0%	200	0	200%	0%	KECAMATAN PEGANTENAN			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks	4	30.000.000	4		3,9	1.844.500	8	1.844.500	0	0	0	0	0	0	1.844.500	0%	100%	4	1.844.500	100%	6.15%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	30.000.000	100		100	1.844.500	100	1.844.500	0	0	0	0	0	0	100	1.844.500	100%	100%	200	1.844.500	200%	6.15%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	21	30.000.000	15		21	1.844.500	21	1.844.500	0	0	0	0	0	0	21	1.844.500	100%	100%	36	1.844.500	171.43%	6.15%	KELURAHAN LAWANGAN DAYA			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100	231.430.200	100		100	35.530.770	0		50	20.237.770	50	5.692.300	0		0	0	25.930.070	0%	72.98%	100	25.930.070	100%	11.2%	KECAMATAN PAMEKASAN		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	Persentase	100		100		100		0		55		25		45		45		45%		145		145%					
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase	100	116.965.200	88		100	6.822.700	0		45	3.394.400	55	3.362.300	0		0	0	6.756.700	0%	99.03%	88	6.756.700	88%	5.78%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	204.689.100	4		4	6.822.700	0		2	3.394.400	2	3.362.300	0		4	6.756.700	100%	99.03%	8	6.756.700	66.67%	3.3%	KECAMATAN PAMEKASAN			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persentase	100	99.030.000	90		100	24.106.620	0		25	15.021.920	45	1.066.000	35		0	35	16.087.920	35%	66.74%	125	16.087.920	125%	16.25%	KECAMATAN PAMEKASAN		
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	39.030.000	4		1	9.106.720	0		1	8.040.720	0	0	0	1	8.040.720	100%	88.29%	5	8.040.720	166.67%	20.6%	KECAMATAN PAMEKASAN				

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab
												I		II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Layanan	21	60.000.000	18	0	21	14.999.900	0	0	10	6.981.200	3	1.066.000	0	0	0	8.047.200	0%	53.65%	18	8.047.200	85.71%	13.41%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase	100	15.435.000	100	0	100	4.601.450	0	0	25	1.821.450	75	1.264.000	25	0	25	3.085.450	25%	67.05%	125	3.085.450	125%	19.99%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	15.435.000	1	0	1	4.601.450	0	0	1	1.821.450	0	1.264.000	0	0	1	3.085.450	100%	67.05%	2	3.085.450	66.67%	19.99%	KECAMATAN PAMEKASAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	99	94.500.000	97	0	97	35.916.500	16	8.189.600	29	13.456.150	30	9.935.100	22	4.295.650	97	35.876.500	100%	99.89%	194	35.876.500	195.96%	37.96%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	Persen	100	63.000.000	100	0	98	23.000.000	33	8.189.600	33	10.336.150	0	2.145.100	32	2.289.150	98	22.960.000	100%	99.83%	198	22.960.000	198%	36.44%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	31.000.000	24	0	2	12.000.000	1	5.030.100	1	4.809.800	0	2.145.100	0	0	2	11.985.000	100%	99.88%	26	11.985.000	36.11%	38.66%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	31.000.000	1	0	1	11.000.000	0	3.159.500	0	5.526.350	0	0	1	2.289.150	1	10.975.000	100%	99.77%	2	10.975.000	66.67%	35.4%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	Persen	100	31.500.000	100	0	98	12.916.500	0	0	25	3.120.000	61	7.790.000	12	2.006.500	98	12.916.500	100%	100%	198	12.916.500	198%	41%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	24	31.000.000	8	0	8	12.916.500	0	0	2	3.120.000	5	7.790.000	1	2.006.500	8	12.916.500	100%	100%	16	12.916.500	66.67%	41.67%	KECAMATAN PASEAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks	4	30.000.000	4	0	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4	0	100%	0%	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100	28.000.000	100	0	100	30.000.000	33	4.850.000	17	3.834.000	25	5.442.400	25	15.072.400	100	29.198.800	100%	97.33%	200	29.198.800	200%	104.28%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	23.000.000	100	0	100	26.000.000	33	4.850.000	17	0	25	5.442.400	25	15.072.400	100	25.364.800	100%	97.56%	200	25.364.800	200%	110.28%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	21	16.000.000	21	0	21	26.000.000	7	4.850.000	0	0	10	5.442.400	4	15.072.400	21	25.364.800	100%	97.56%	42	25.364.800	200%	158.53%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	5.000.000	100	0	100	4.000.000	0	0	100	3.834.000	0	0	0	0	100	3.834.000	100%	95.85%	200	3.834.000	200%	76.68%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	5.000.000	1	0	1	4.000.000	0	0	1	3.834.000	0	0	0	0	1	3.834.000	100%	95.85%	2	3.834.000	200%	76.68%	KECAMATAN TLANAKAN
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dilaksanakan	%	100	15.000.000	100	0	100	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%	KELURAHAN GLADAK ANYAR
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100		100		100		0	0		0		0		0		0%		100		100%			

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab					
												I		II		III		IV															
						1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%	100	15.000.000	90		0	100	3.500.000	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		KELURAHAN GLADAK ANYAR			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Layanan	21	15.000.000	21		0	21	3.500.000	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		KELURAHAN GLADAK ANYAR			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang diselenggarakan	%	100	15.000.000	100		0	100	3.142.000	0		0	50		2.926.000	50		216	0		0	0	3.142.000	0%	100%	100	3.142.000	100%	20.95%	KELURAHAN BUGIH
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100		100		100		0		50		50		0		0		0		100		100%							
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	persen	100	15.000.000	90		0	100	3.142.000	0		0	55		2.926.000	45		216	0		0	0	3.142.000	0%	100%	90	3.142.000	90%	20.95%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan	21	15.000.000	21		0	21	3.142.000	0		0	19		2.926.000	2		216	0		0	21	3.142.000	100%	100%	42	3.142.000	200%	20.95%	KELURAHAN BUGIH
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang diselenggarakan	%	100	65.000.000	0		0	90	15.000.000	10		0	30		9.999.600	40		0	10		4.999.800	90	14.999.400	100%	100%	90	14.999.400	90%	23.08%	KECAMATAN PAKONG
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks	4		4		3,75		1		1,5		0,7		1		1		1		26.67%		5		125%					
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase	100	35.000.000	0		0	90	5.000.000	10		0	20		4.999.800	30		0	30		0	30	4.999.800	33.33%	100%	30	4.999.800	30%	14.29%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12		0	0	0	12	5.000.000	0		0	12		4.999.800	0		0	0		0	0	4.999.800	0%	100%	0	4.999.800	0%	0%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persentase	95	30.000.000	0		0	80	10.000.000	10		0	10		4.999.800	50		0	10		4.999.800	10	9.999.600	12.5%	100%	10	9.999.600	10.53%	33.33%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah Kecamatan	Kegiatan	2	15.000.000	0		0	2	5.000.000	0		0	2		4.999.800	0		0	0		0	2	4.999.800	100%	100%	2	4.999.800	100%	33.33%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	Kegiatan	12	15.000.000	0		0	12	5.000.000	0		0	0		0	0		0	12		4.999.800	12	4.999.800	100%	100%	12	4.999.800	100%	33.33%	KECAMATAN PAKONG
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100	122.200.000	100		0	100	33.142.350	0		0	29		12.068.850	69,67		18.700.850	1,33		2.372.650	100	33.142.350	100%	100%	200	33.142.350	200%	27.12%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Persentase	100	30.000.000	100		0	100	8.575.000	0		0	75		4.951.500	25		3.623.500	0		0	100	8.575.000	100%	100%	200	8.575.000	200%	28.58%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	30.000.000	4		0	4	8.575.000	0		0	3		4.951.500	1		3.623.500	0		0	4	8.575.000	100%	100%	8	8.575.000	200%	28.58%	KECAMATAN PADEMAWU

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026		Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten yang dievaluasi		PD Penanggungjawab		
													I		II		III		IV												
													k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10		11		12		13		14 = 10 + 11 + 12 + 13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 14 + 8		17 = 16 / 7 x 100%		18		
						k	Rp	k	Rp			k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Persentase	100	62.200.000	100		0	100	19.490.000	0		0	12	7.117.350	84	10.000.000	4	2.372.650	100	19.490.000	100%	100%	200	19.490.000	200%	31.33%	KECAMATAN PADEMAWU	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	30.000.000	4		0	4	9.490.000	0		0	3	7.117.350	0		0	1	2.372.650	4	9.490.000	100%	100%	8	9.490.000	200%	31.63%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	21	31.400.000	15		0	21	10.000.000	0		0	0	0	21	10.000.000	0		0	21	10.000.000	100%	100%	36	10.000.000	171.43%	31.85%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kewenangan lain Urusan Pemerintah yang Terfasilitasi	Persentase	100	30.000.000	100		0	100	5.077.350	0		0	0	0	100	5.077.350	0		0	100	5.077.350	100%	100%	200	5.077.350	200%	16.92%	KECAMATAN PADEMAWU
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	30.000.000	3		0	12	5.077.350	0		0	0	0	12	5.077.350	0		0	12	5.077.350	100%	100%	15	5.077.350	125%	16.92%	KECAMATAN PADEMAWU
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																						107.68%	84.41%								
Predikat Kinerja dan Anggaran SubKegiatan																						Sangat Tinggi									
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program																						82.49%	86.38%								
Predikat Kinerja dan Anggaran Program																						Tinggi	Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN SUBKEGIATAN																						96.52%	87.22%								
PREDIKAT KINERJA dan ANGGARAN SUBKEGIATAN																						Sangat Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN PROGRAM																						85.51%	86.74%								
PREDIKAT KINERJA dan ANGGARAN PROGRAM																						Tinggi	Tinggi								

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis dengan mengelompokkan daftar pendek permasalahan yang mempunyai persamaan karakteristik serta berdasarkan pertimbangan dan masukan dari stakeholder, telah dirumuskan 4 permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan meliputi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan bencana dan lingkungan serta penguatan tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan uraian masing-masing permasalahan tersebut:

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan setiap manusia, namun tingkat kesejahteraan pada setiap manusia akan berbeda-beda. Sebagaimana konsep kesejahteraan antara di daerah satu dengan daerah lain. Kesejahteraan di Kabupaten Pamekasan merupakan kondisi dimana kemiskinan rendah, akses Pendidikan dan Kesehatan terjangkau dan daya beli Masyarakat tinggi. Sehingga ke 4 hal tersebutlah yang menjadi permasalahan kesejahteraan di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal kemiskinan, masih terdapat permasalahan perkaitan dengan peningkatan PPKS sehingga menambah angka kemiskinan. Selain itu kebutuhan pokok masih menjadi permasalahan di Kabupaten pamekasan, baik berkaitan dengan harga dan ketersediaan. Sehingga dalam hal ini penting untuk meningkatkan daya beli Masyarakat dimana daya beli masih menjadi permasalahan di Kabupaten Pamekasan. Masih lemahnya daya beli masyarakat juga dikonfirmasi dengan jumlah pendapatan perkapita yang masih tergolong rendah. Pendapatan perkapita yang masih rendah juga menjadi salah satu indikasi adanya anomaly terhadap capaian tingkat pengangguran daerah yang saat ini tergolong rendah. Dengan membandingkan kedua data tersebut, dapat diidentifikasi adanya potensi risiko terhadap peningkatan

pengangguran. Potensi peningkatan pengangguran terbuka masih cukup tinggi, mengingat lapangan pekerjaan masih didominasi oleh pekerjaan informasi. Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan ketimpangan gender dimana peran perempuan dalam pembangunan masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan partisipasi Perempuan dalam kegiatan ekonomi dan organisasi baik publik maupun swasta yang masih rendah.

Permasalahan berkaitan dengan Pendidikan adalah kurangnya sarana Pendidikan yang menyebabkan kualitas proses pengajaran kurang maksimal, selain itu tenaga Pendidikan masih memiliki kekurangan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari segi partisipasi pendidikan di Kabupaten Pamekasan juga masih belum optimal, khususnya pada partisipasi pendidikan non formal (Kejar Paket). Selain itu minat baca Masyarakat masih rendah, mengingat adanya peralihan media dari buku menjadi digital book. Angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak masih tinggi karena kurangnya penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Permasalahan selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan manusia adalah permasalahan dari perspektif kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan taraf kesehatan masyarakat. Beberapa permasalahan lainnya adalah fasilitas dan layanan kesehatan yang masih kurang maksimal sehingga penanganan stunting kurang optimal. Disamping fasilitas Kesehatan, tenaga Kesehatan masih belum merata, artinya cakupan tenaga Kesehatan masih kurang. Hal tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pamekasan. Taraf hidup masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat. Dengan kondisi kejadian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dengan bertumbuhnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan akan pemukiman semakin meningkat sehingga berpotensi menambah permasalahan berkaitan dengan kualitas permukiman. Hal lain yang menjadi masalah dengan bertumbuhnya penduduk dan kebutuhan pemukiman adalah kualitas dan kapasitas air bersih untuk mencukupi kebutuhan serta sanitasi yang aman dan layak.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi pembangunan suatu wilayah. Karena tingkat urgensitasnya tersebut seringkali pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten pamekasan masih menjadi isu pembangunan yang krusial untuk periode 5 tahun kedepan. Hal tersebut dilihat dari tingkat pertumbuhan yang masih lambat jika dibandingkan dengan standar negara berkembang maupun disandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, jika dilihat berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa ekonomi di Kabupaten Pamekasan sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perputaran ekonomi mayoritas masih berfokus untuk memenuhi konsumsi akhir, sedangkan ekspor daerah masih relatif kecil.

Hasil pemetaan isu pembangunan di kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa isu berkenaan dengan Pertumbuhan ekonomi masih menjadi simpul permasalahan dimana cukup banyak isu yang memiliki relasi dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi, baik yang berpengaruh maupun yang mempengaruhi.

Pada konstruksi permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor kritis yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pamekasan. Keempat faktor tersebut adalah Penanaman modal yang belum optimal, daya saing

sektor pertanian dan industri masih cukup rendah dan keberdayaan desa sebagai cerminan pemerataan ekonomi juga masih belum optimal.

Kondusivitas iklim usaha yang dalam hal ini berkenaan dengan penanaman modal di Kabupaten Pamekasan mengalami tantangan yang cukup serius. Beberapa faktor yang terindikasi menjadi penghambat minat investor untuk melaksanakan penanaman modal adalah kurangnya stabilitas wilayah dan dukungan infrastruktur yang dirasa kurang memadai. Stabilitas wilayah yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan potensi bencana dalam hal ini adalah bencana banjir dan stabilitas wilayah dari gejolak sosial yang ditunjukkan dengan cukup tingginya intensitas demonstrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan dukungan infrastruktur yang dimaksud mengarah pada dukungan infrastruktur penunjang aktivitas usaha seperti kawasan industri dan efisiensi distribusi logistik yaitu diantaranya adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Berkenaan dengan infrastruktur juga terdapat indikasi faktor yang menghambat lainnya, diantaranya adalah belum adanya informasi potensi investasi yang komprehensif yang dapat dimanfaatkan oleh investor dalam mengambil keputusan penanaman modal.

Berkenaan dengan sektor unggulan kabupaten yaitu sektor pertanian serta sektor industri pengolahan dirasa masih belum optimal yang dilihat dari belum optimalnya proses hilirisasi komoditas pertanian. Proses produksi masih bergantung pada bahan mentah. Beberapa faktor yang masih menghambat perkembangan kedua sektor tersebut adalah faktor cuaca yang semakin tidak dapat diprediksi. Di sisi lainnya, pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian masih cukup minim dan dukungan infrastruktur pertanian dalam hal ini adalah irigasi teknis masih belum optimal. Hal tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut terkonfirmasi dengan

semakin meningkatnya intensitas alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Pada sektor industri olahan, masih dipengaruhi beberapa faktor meliputi rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya kemandirian proses produksi, kurangnya akses terhadap lembaga pembiayaan dan kurang optimalnya kerjasama antar daerah. Produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kapasitas produksi, khususnya untuk industri padat karya, sedangkan rendahnya kemandirian produksi sangat mempengaruhi stabilitas produksi jangka panjang karena faktor penentu produksinya tidak berasal dari dalam daerah. Di sisi lain, akses untuk meningkatkan sala produksi atau belanja modal yang dalam hal ini ditunjukkan dengan akses permodalan masih tergolong sulit. Dengan kondisi demikian maka proses produksi sangat rawan terhadap isu keberlanjutan usaha yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan tutupnya IKM.

Keberdayaan desa sebagai pengaman ekonomi daerah merupakan hal yang krusial untuk terus ditingkatkan. Dengan kondisi keberdayaan desa yang baik diharapkan aktivitas ekonomi khususnya UMKM dapat berlangsung dengan baik, sehingga pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai. Beberapa potensi untuk dikembangkan berbasis desa di Kabupaten Pamekasan masih belum berjalan dengan optimal. Potensi yang dimaksud adalah potensi wisata lokal dan ekonomi kreatif serta peninggalan dan cagar budaya yang secara lokasi tersebar di berbagai desa. Beberapa pemanfaatan aset desa juga masih belum optimal, sebagai contoh adalah pemanfaatan aset ex-PNPM yang masih belum optimal digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kegiatan sosial.

3. Penguatan ketahanan bencana dan lingkungan

Lingkungan menjadi pilar penting dalam proses pembangunan setidaknya pada 5 tahun ke depan. Hal tersebut

mengingat, 5 tahun mendatang merupakan 5 tahun terakhir implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals yang ditargetkan akan tercapai di akhir 2030. Kondisi ini menciptakan tuntutan akan adanya percepatan untuk pencapaian pilar lingkungan hidup dalam tujuan ini di seluruh dunia, tak terkecuali Kabupaten Pamekasan. Berangkat dari situasi tersebut serta hasil identifikasi permasalahan pembangunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk fokus salah satunya pada intervensi isu strategis yang berkaitan dengan Lingkungan dan Kebencanaan yaitu Risiko bencana yang masih relatif tinggi dalam Pembangunan 5 tahun ke depan.

Masih relatif tingginya risiko bencana ini diindikasikan memiliki 2 faktor/ penyebab utama yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup serta permasalahan menyangkut mitigasi bencana di Kabupaten Pamekasan. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Pamekasan terjadi akibat dari keterbatasan pengelolaan persampahan, perubahan iklim ekstrem sehingga memiliki dampak secara langsung pada krisis ketersediaan pangan. Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pamekasan sedikit-banyak juga disebabkan oleh penataan kawasan yang kurang optimal yang tercermin oleh adanya tuntutan untuk merevitalisasi kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan, isu yang berkaitan dengan dorongan untuk memperkuat mitigasi bencana, lahir dari hasil identifikasi permasalahan kebencanaan di Kabupaten Pamekasan. Aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam sektor kebencanaan di Kabupaten Pamekasan adalah hal yang terkait dengan upaya mitigasi bencana, termasuk didalamnya upaya rekayasa teknis dari segi infrastruktur pengendalian banjir. Pengendalian banjir juga terkendala dengan

pola pengelolaan sampah oleh masyarakat yang masih belum mampu mengolah sampah dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya aktivitas pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya termasuk pada infrastruktur pengendalian banjir. Permasalahan selanjutnya adalah penyaluran bantuan pembangunan rumah layak bagi korban bencana dan ketersediaan pangan yang masih belum optimal. Sedangkan dari sisi potensi bencana non alam, potensi yang perlu diwaspadai besar adalah berkenaan dengan potensi konflik sosial antar masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan cukup tingginya intensitas demonstrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

4. Penguatan Tata kelola Pemerintahan

Dinamika pembangunan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari peran tata kelola pemerintahannya. Sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang kuat mampu menjadi katalis sekaligus pendorong pertumbuhan dan perubahan positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks pembangunan Kabupaten Pamekasan, tata kelola pemerintahan belum bisa memberikan daya dorong yang optimal pada berbagai sektor karena masih menghadapi tantangan besar bernama inefisiensi atau ketidak-efisienan penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, salah satu isu strategis yang menjadi perlu menjadi fokus utama dalam pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2029 adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Isu besar terkait Efisiensi tata kelola pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Pamekasan setidaknya dapat teridentifikasi dari munculnya permasalahan-permasalahan yang mengganggu berjalannya roda pemerintahan dengan optimal seperti lemahnya kemandirian fiskal dan keberdayaan masyarakat desa. Permasalahan ini sejatinya timbul karena 2 faktor utama yaitu belum optimalnya

Pendapatan Asli Daerah dan Kurangnya Kualitas Belanja Daerah. Sebagai daerah dengan karakteristik wilayah mayoritas perdesaan, pertumbuhan desa mandiri berpotensi menjadi pendorong optimalnya PAD Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, kurangnya kualitas belanja Kabupaten Pamekasan memiliki akar masalah yang berkaitan dengan, Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja yang terus meningkat, proporsi belanja modal terhadap dana transfer umu yang masih di bawah 25%, serta jumlah aset Kabupaten Pamekasan yang menunjukkan penurunan dalam 2 tahun terakhir yang berimbas juga pada turunnya kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta berdampak juga pada pengaruh hutang terhadap pembiayaan yang semakin meningkat.

Selain perlunya intervensi pada permasalahan lemahnya kemandirian fiskal dan keberdayaan masyarakat desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan juga menjadi aspek penting yang wajib dilakukan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dalam 5 tahun ke depan. Perlunya sinkronisasi pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan teridentifikasi dari adanya permasalahan kurangnya pengendalian mutu pemanfaatan ruang wilayah yang disebabkan oleh peningkatan alih fungsi lahan serta permasalahan belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dan kearsipan yang menghambat proses pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) dan berimbas pada kurang tercapainya good governance.

Faktor terakhir yang menyebabkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pamekasan berjalan kurang efisien adalah belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Terdapat beberapa penyebab utama dari belum optimalnya penerapan SPBE ini, di antaranya adalah keamanan informasi dalam aspek persandian yang masih rendah, permasalahan terkait

keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, permasalahan terkait penggunaan teknologi tepat guna dan teknologi informasi serta masih perlunya perluasan dan peningkatan kualitas jaringan internet di Kabupaten Pamekasan

2.6.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan dilaksanakan melalui telaah terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, telaah mandatori dan isu mengenai keuangan daerah. Beberapa permasalahan di Kabupaten Pamekasan yang menjadi pijakan dalam perencanaan program pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan urusan-urusan di bawah ini.

Tabel 2.81
Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan

SUMBER	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN	NO	REKAPITULASI PERMASALAHAN
HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN FOKUS & URUSAN	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1	Pembangunan Manusia masih belum optimal
		2	Kemiskinan relatif tinggi
		3	Lapangan pekerjaan masih didominasi oleh pekerjaan informal
		4	Pertumbuhan Ekonomi masih berada di bawah rata-rata nasional dan Jawa Timur
		5	Pendapatan perkapita masih tergolong rendah
		6	Ketimpangan gender cukup tinggi
	ASPEK DAYA SAING DAERAH	7	Aktivitas ekonomi masih berfokus untuk memenuhi konsumsi akhir
		8	Impor di Kabupaten masih lebih besar daripada ekspor
		9	Minimnya investasi/penanaman modal di daerah
		10	Belum optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi
	PENDIDIKAN	11	Partisipasi masyarakat pada pendidikan non formal masih rendah (kejar paket)
		12	Partisipasi Masyarakat pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi
		13	Mutu dan Akses Pendidikan perlu ditingkatkan
	KESEHATAN	14	Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan
		15	Prevalensi stunting ada

SUMBER	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN	NO	REKAPITULASI PERMASALAHAN
		16	Resiko Kematian Ibu dan Bayi
		17	Resiko Kematian akibat penyakit menular ✓ TB Paru (Tuberculosis) ✓ Pnemonia ✓ Kusta (Leprosy) ✓ Diare (Diarrhoea) ✓ DBD (Dengue Hemorrhagic Fever) dan tidak menular ✓ Hypertensi ✓ DM ✓ Heart Failure ✓ Stroke ✓ Gangguan Kejiwaan
		18	Belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan terkendala (Jalan dan Jembatan)
		20	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengairan dan Sumber Daya Air Terjaga (Rendahnya lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi teknis)
		21	Mitigasi Bencana ➢ Rendahnya perlindungan kawasan rawan banjir oleh infrastruktur pengendalian banjir ➢ Rendahnya perlindungan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi oleh Infrastruktur pengaman pantai ➢ Ketidaksesuaian Pengendalian Mutu Pemanfaatan Ruang Wilayah ➢ Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22	Tingginya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
		23	Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Air Bersih dan Sanitasi
		24	Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menurun
		26	Tingginya Resiko Bencana di Daerah
		27	Rendahnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana
	SOSIAL	28	Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

SUMBER	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN	NO	REKAPITULASI PERMASALAHAN
	TENAGA KERJA	29	Meningkatnya angka kemiskinan dan penerima bantuan jaminan kesehatan
		30	Ketidaksesuaian tatakelola perusahaan sesuai peraturan pemerintah
		31	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32	Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak
		33	Kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif
	PANGAN	34	Krisis Ketersediaan Cadangan Pangan
	LINGKUNGAN HIDUP	35	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
		36	Keterbatasan kapasitas pengelolaan persampahan
		37	Potensi kenaikan Efek Gas Rumah Kaca (GRK)
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	38	Minimnya perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan
		39	Rendahnya kepemilikan Kartu identitas Anak dan akta kelahiran
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40	Minimnya desa dengan status Desa Mandiri
		41	Lemahnya Kemandirian fiskal dan Keberdayaan Masyarakat Desa
		42	Belum optimalnya pengembangan BUMDes
		43	Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	44	Resiko pertumbuhan penduduk tidak terkendali
	PERHUBUNGAN	45	Masih tingginya resiko kecelakaan lalu lintas
		46	Resiko kepadatan lalu lintas pada tempat/waktu tertentu
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		48	Masih Rendahnya Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49	Belum optimalnya daya saing koperasi dan UMKM
	PENANAMAN MODAL	50	Pertumbuhan Investasi belum maksimal
		51	Penurunan Prestasi Olahraga Daerah

SUMBER	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN	NO	REKAPITULASI PERMASALAHAN
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52	Rendahnya Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan
		53	Rendahnya tingkat pemuda wirausaha
		54	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		55	Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
	KEBUDAYAAN	56	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah
		57	Belum optimalnya Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya
	STATISTIK	58	Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Kearsipan Rendah
	PERSANDIAN	59	Keamanan Informasi dalam Persandian Rendah
	PERPUSTAKAAN	60	Minat Baca Masyarakat Rendah
	KEARSIPAN	61	Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Kearsipan Rendah
	PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	62	Perubahan Iklim Ekstrem
		63	Peningkatan ahli fungsi lahan
		64	Penurunan minat pekerja sektor pertanian dan perkebunan
		65	Rendahnya lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi teknis
		66	Tingginya biaya produksi komoditas padi, tembakau dan ternak sapi
	PERINDUSTRIAN	67	Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih rendah, khususnya pada komoditas unggulan daerah (tembakau, sapi, dan perikanan)
		68	Belum optimalnya pemanfaatan SIINas
	PERDAGANGAN	69	Belum stabilnya harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
		70	Belum optimalnya pemasaran produk unggulan daerah
		71	Kapasitas dan daya tampung pasar tradisional belum memadai
	KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	72	Masih ada Potensi Konflik Sosial
		73	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum perlu ditingkatkan

SUMBER	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN	NO	REKAPITULASI PERMASALAHAN
HASIL EVALUASI GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	ASPEK KEUANGAN DAERAH	74	Peningkatan perolehan PAD dikarenakan rata-rata proporsi Pendapatan Transfer masih sangat tinggi.
		75	Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir.
		76	Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum pada tahun 2023 berada pada angka 22.93% (di bawah 25%).
		77	Proporsi Belanja Bagi Hasil terhadap total Pajak dan Retribusi masih di bawah 10%.
		78	SiLPA dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan penurunan nilai dan proporsinya terhadap Belanja Daerah
	ASPEK NERACA DAERAH	79	Jumlah Aset Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya penurunan pada dua tahun terakhir.
		80	Jumlah Kewajiban Kabupaten Pamekasan dapat menunjukkan trend yang menurun dalam 5 tahun terakhir.
		81	Kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendek menurun, baik dengan aktiva lancar maupun aktiva lancar yang lebih liquid
		82	Pengaruh hutang terhadap pembiayaan meningkat.
		83	Ekuitas menurun dan meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari pihak lain (di luar modal).
LAIN- LAIN (HASIL TELAAH DKUMEN TERKAIT)	ARAH KEBIJAKAN RPJPD TAHAP I (2025-2029)	1	Afirmasi Pendidikan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Berprestasi
		2	Peningkatan Daya Saing Usaha Pertanian, Perikanan dan Kelautan
		3	Perluasan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Internet
		4	Penguatan Daya Tarik dan Ekosistem Penunjang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		5	Percepatan Reforma Agraria
		6	Peningkatan Harmonisasi Sosial
		7	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan didasarkan pada kinerja makroekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Selain itu kerangka kebijakan ekonomi juga mengacu pada arah kebijakan makroekonomi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dan kesinambungan arah kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur hingga Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, setiap kinerja ekonomi yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Daerah akan memiliki kontribusi terhadap capaian makroekonomi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.1.1 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian global pada tahun 2025 diprediksi akan lebih menantang dan rumit dibandingkan dengan tahun 2024. Ketidakpastian yang ada pada tahun 2025 tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pada bulan Oktober 2024, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen. Sebaliknya, OECD meningkatkan proyeksi pertumbuhan

ekonomi global dari 3,2 persen menjadi 3,3 persen. Perbedaan proyeksi ini menunjukkan tingkat ketidakpastian ekonomi global yang tinggi pada tahun 2025. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian tersebut antara lain: 1) pelambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat; 2) ketidakpastian terkait konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel yang berpotensi memicu ketidakstabilan pasar energi dan investasi global; 3) kebijakan ekonomi Presiden AS (Donald Trump) yang berkontribusi pada inflasi di AS dan dunia; dan 4) potensi tekanan ekonomi dan inflasi global yang dapat mendorong peningkatan suku bunga acuan.

Sementara itu Indonesia berhasil melewati tahun 2024 dengan kinerja ekonomi yang kuat, didorong oleh pelaksanaan reformasi struktural yang berkelanjutan dan stabilitas sektor keuangan. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,1%, yang mencerminkan daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Sepanjang tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% (yoy), melebihi rata-rata pertumbuhan global. Stabilitas sektor keuangan tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mencapai rekor tertinggi 7.905,39 pada 19 September 2024. Sementara itu, inflasi meningkat menjadi 2,8% pada Mei 2024, dan defisit anggaran diperkirakan akan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski menghadapi tantangan ini, pemerintah tetap optimis dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun 2025.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,03% pada triwulan IV dan mencapai 4,61% sepanjang tahun 2024. Tren penguatan investasi ini berlanjut dalam empat tahun terakhir, didorong oleh stabilitas ekonomi-politik serta kebijakan fiskal dan moneter yang meningkatkan kepercayaan investor. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat pesat sebesar 20,82%, dengan total nilai mencapai Rp1.714 triliun, melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan impor barang modal dan bahan baku mencerminkan kinerja sektor manufaktur yang terus solid. Pemerintah juga memperkuat investasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan industri, bendungan, dan sektor pariwisata.

Di sisi ekspor, kinerja pada triwulan IV tumbuh 7,63%, sementara secara tahunan mencatatkan pertumbuhan 6,51%. Peningkatan ekspor tahun 2024 didorong oleh kenaikan ekspor barang dan jasa. Ekspor barang naik berkat kenaikan volume ekspor besi baja sebesar 17,8% dan bahan bakar mineral sebesar 7,8%. Sementara itu, ekspor jasa berkembang didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan asing, yang naik 19,05% sepanjang tahun. Di sisi lain, impor barang mengalami penurunan sebesar 10,36% pada triwulan IV dan turun 7,95% secara tahunan.

Sektor manufaktur tumbuh 4,89% pada triwulan IV dan mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 4,43%. Permintaan domestik dan global yang tetap kuat menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan, terutama di subsektor industri logam dasar, elektronik, serta makanan dan minuman. Sektor perdagangan juga mencatatkan pertumbuhan 5,19% pada triwulan IV dan 4,86% sepanjang tahun 2024, yang dipicu oleh peningkatan aktivitas produksi.

Sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat mencatatkan pertumbuhan pesat sepanjang tahun. Sektor transportasi tumbuh 7,92% pada triwulan IV dan 8,69% secara tahunan. Sementara itu, sektor akomodasi serta makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,61% dan 8,56% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh berbagai acara nasional dan internasional, serta perbaikan

infrastruktur pendukung pariwisata yang menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.

Sektor primer mengalami penurunan, baik di sektor pertanian maupun pertambangan. Sektor pertanian hanya tumbuh 0,71% pada triwulan IV dan 0,67% sepanjang tahun 2024, akibat penurunan produksi padi dan kelapa sawit. Namun, sektor pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sektor pertambangan tumbuh moderat sebesar 3,95% pada triwulan IV dan 4,90% sepanjang tahun, dipengaruhi oleh stabilisasi harga komoditas.

Secara regional, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024. Jawa dan Sumatera tetap menjadi pendorong utama perekonomian nasional, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 4,92% dan 4,45%, yang didukung oleh aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan. Sementara itu, hilirisasi industri menjadi pendorong utama pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, dengan Maluku-Papua tumbuh 7,81% dan Sulawesi mencatatkan pertumbuhan 6,18%. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan juga memberikan dampak positif pada sektor konstruksi, dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Sektor pariwisata yang terus berkembang turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara, yang mencapai 5,04% sepanjang tahun 2024.

Memasuki tahun 2025, World Bank memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1%. Prospek ekonomi Indonesia tetap cerah, didukung oleh kebijakan reformasi, percepatan digitalisasi, dan investasi di sektor-sektor strategis. Namun, ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlambatan pertumbuhan. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) dari IMF yang diterbitkan pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,2% pada 2025, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi 3,1% pada 2024. Beberapa risiko utama yang

dapat memengaruhi ekonomi global antara lain pelemahan ekonomi di China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, dan ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga global.

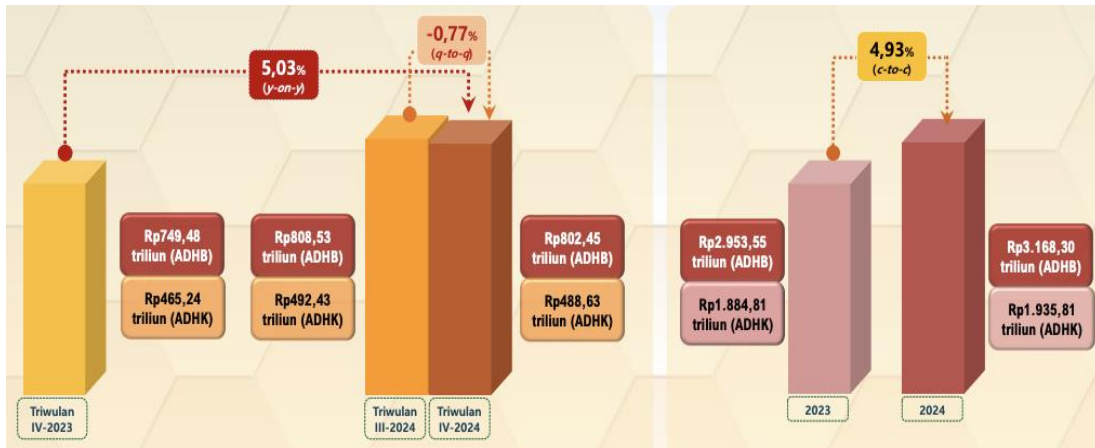
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang optimis pada periode 2025-2029, yaitu sebesar 8 persen. Pada tahun 2026, melalui kebijakan hilirisasi industri berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2%-7,6%.

3.1.2 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Pada tahun 2024, Perekonomian Jawa Timur yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.168,29 triliun, dengan PDRB per kapita mencapai Rp75,77 juta. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan sebesar 9,50 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dengan kenaikan sebesar 12,49 persen.

Pada Triwulan IV-2024 dibandingkan Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, sektor yang tumbuh paling pesat adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang meningkat sebesar 11,39 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen yang tumbuh tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), dengan kenaikan sebesar 9,53 persen.

Gambar 3.1
Capaian Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada Triwulan IV-2024 dibandingkan dengan Triwulan III-2024, ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah Jasa Lainnya, dengan kenaikan sebesar 6,63 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP), yang tumbuh sebesar 8,16 persen.

Secara struktural, sektor Industri Pengolahan mendominasi perekonomian Jawa Timur pada Triwulan IV-2024, dengan kontribusi sebesar 31,29 persen, sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) menjadi yang terbesar dengan kontribusi sebesar 60,96 persen.

Pada tahun 2025, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kisaran 5,27% hingga 5,63%. Tiga sektor utama yang diperkirakan tetap menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu, pada tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 5,15% hingga 5,30%. Beberapa langkah yang direncanakan untuk memperkuat ekonomi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

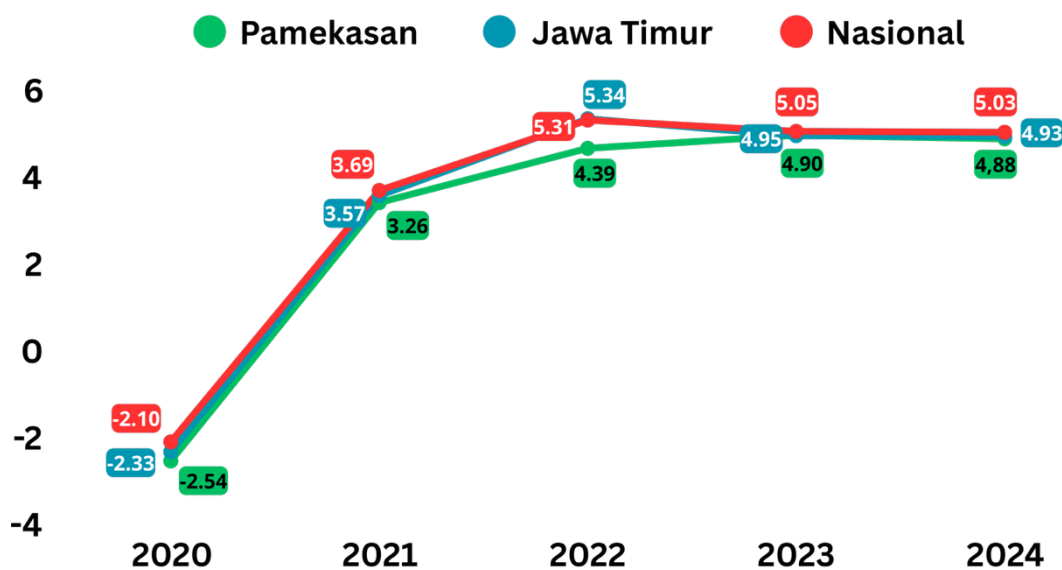
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2026

Gambaran mengenai kondisi perekonomian tahun 2026, tidak lepas dari kondisi perekonomian saat ini. Peluang dan tantangan Kabupaten Pamekasan yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting dalam perspektif perekonomian ke depan. Analisis mengenai berbagai perkembangan indikator makro berikut dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan ke depan.

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2024 mengalami sedikit koreksi. Secara kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Pamekasan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional dan di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2024 mencapai 4,88 persen, turun sedikit dari tahun sebelumnya yang 4,96 persen. Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa sektor seperti Pertanian (-1,76%), Pertambangan (-9,60%), Industri Pengolahan (-0,63%), Pengadaan Air (-1,84%), Akomodasi (1,52%), Informasi (-0,92%), Jasa Keuangan (-1,42%), dan Jasa Perusahaan (-5,67%). Sebaliknya, sektor Administrasi Pemerintahan tumbuh paling cepat dengan 5,87%, diikuti Jasa Lainnya dengan peningkatan 5,59%.

Struktur perekonomian di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun, hanya ada sedikit pergeseran pada persentasenya. Hingga tahun 2024, struktur ekonomi Pamekasan masih didominasi tiga sektor usaha utama: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,87 persen), Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,46 persen), serta Konstruksi (10,67 persen). Ketiga sektor tersebut menyumbang 63,01 persen terhadap perekonomian Kabupaten Pamekasan. Sementara itu, kontribusi dari sektor lainnya rata-rata berada di bawah 7,5 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2024, permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp. 15,95 triliun, atau 70,90 persen dari PDRB yang terbentuk. Dominasi komponen ini berkurang setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya aktivitas komponen pengeluaran lainnya. Komponen terbesar kedua adalah Impor yang mencapai 51,25 persen, menunjukkan bahwa kebutuhan domestik Kabupaten Pamekasan masih banyak bergantung pada barang-barang dari luar wilayah, terutama hasil industri pengolahan. Meskipun demikian, produk lokal seperti komoditas pertanian dan pertambangan juga diekspor keluar wilayah Pamekasan, terlihat dari kontribusi

komponen Ekspor yang mencapai 38,65 persen. Komponen ini memiliki peran lebih besar dibandingkan PMTB (30,30%), yang dari tahun ke tahun selalu menempati posisi tiga dan empat besar. Sementara itu, peran tiga komponen lainnya terhadap PDRB Pamekasan masih di bawah 10 persen.

Oleh karena itu optimalisasi sektor unggulan dan potensial menjadi instrumen utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menciptakan garis haluan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi daerah, Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang cukup besar sehingga perlu dikelola melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi produk serta integrasi terhadap rantai perputaran ekonomi yang lebih luas. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta sektor perdagangan memiliki keterikatan terhadap kebutuhan dasar baik melalui produk pertanian maupun pengendalian harga bahan pokok sehingga hal ini dapat dioptimalkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan mengendalikan pergerakan penjualan produk untuk memastikan permintaan dan ketersediaan daerah pada rasio yang tepat agar nilai produk dapat memberikan keuntungan terhadap pelaku ekonomi utamanya para petani dan nelayan akan tetapi tidak memberatkan masyarakat sebagai konsumen, selain itu potensi di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dapat mendukung swasembada pangan dan program ketahanan pangan melalui penyediaan bibit unggul dan varietas unggul untuk tanaman pangan (padi dan jagung) dan penyediaan cadangan pangan pemerintah serta beberapa program diantaranya adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta peningkatan potensi kawasan tanaman pangan berbasis komoditas. Disisi lain upaya peningkatan daya beli dilakukan dengan menciptakan ekosistem yang dapat memberikan stimulus terhadap tumbuhnya UMKM serta sentuhan terhadap sektor

pariwisata yang memiliki multiplier effect terhadap sektor ekonomi kreatif, perdagangan serta sektor jasa. Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM diperlukan dalam mendukung dan memfasilitasi akses modal, pengelolaan modal terhadap penekanan biaya produksi dan akses pemasaran.

Adapun strategi Meningkatkan investasi daerah yang berorientasi terhadap percepatan pertumbuhan sektor unggul dan potensial serta dorongan terhadap peningkatan daya beli Masyarakat menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diimplementasikan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor unggulan dan potensial.
3. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
4. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Pamekasan memiliki banyak potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Optimalisasi pendapatan bisa dilakukan dengan cara penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi dan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Transfer Pusat juga harus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan mampu memberikan gambaran pendapatan daerah secara akurat. Secara umum struktur pendapatan daerah adalah sebagai:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga menjadi pedoman pemerintah daerah guna mengelola pendapatan daerah. Dengan adanya opsen pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2.038.195.955.793,85. Jika dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun 2025 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 34.072.291.840,15. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 s.d 2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	PENDAPATAN	1.914.278.953.187,52	2.044.485.555.177,51	2.061.320.587.538,23	2.072.268.247.634,00	2.038.195.955.793,85	2.070.164.935.684,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.934.835.122,52	306.038.747.494,51	306.592.620.990,23	357.494.722.368,00	357.784.513.448,83	365.886.588.844,23
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46.526.738.707,00	54.127.279.430,00	59.331.041.323,00	100.907.365.908,00	98.405.018.708,00	101.137.812.686,88
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.295.037.084,08	9.582.325.312,00	237.400.152.216,00	252.061.863.509,00	12.743.185.787,90	13.028.047.802,98
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.225.955.478,08	2.280.431.547,52	2.325.576.353,92	2.250.000.000,00	2.338.644.474,07	2.397.110.585,93
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	170.887.103.853,36	240.048.711.204,99	7.535.851.097,31	2.275.492.951,00	244.297.664.478,86	249.323.617.768,44
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	231.934.835.122,52	306.038.747.494,51	306.592.620.990,23	357.494.722.368,00	357.784.513.448,83	365.886.588.844,23
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.344.118.065,00	1.737.714.807.683,00	1.754.727.966.548,00	1.714.773.525.266,00	1.680.411.442.345,02	1.704.278.346.839,83
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.538.728.212.441,00	1.561.657.069.062,00	1.590.366.013.548,00	1.596.667.823.000,00	1.587.168.940.269,60	1.609.170.994.722,90
1.2.3	Transfer Antar Daerah	143.615.905.624,00	176.057.738.621,00	164.361.953.000,00	118.105.702.266,00	93.242.502.075,42	95.107.352.116,93
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.682.344.118.065,00	1.737.714.807.683,00	1.754.727.966.548,00	1.714.773.525.266,00	1.680.411.442.345,02	1.704.278.346.839,83
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	732.000.000,00	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	732.000.000,00	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	732.000.000,00	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Pamekasan



Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun 2025, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah (termasuk PAD) harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil serta POLRI;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;

7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Saat ini pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,

efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Perhitungan proyeksi belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp. 2.081.812.238.620,36. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 maka terdapat penurunan sebesar Rp 6.951.270.390.



Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	BELANJA	2.036.902.099.506,49	2.039.644.827.886,62	2.067.506.194.117,49	2.088.763.509.010,24	2.081.812.238.620,36	2.114.290.628.231,10
2.1	BELANJA OPERASI	1.454.471.248.247,49	1.509.271.140.305,08	1.605.146.405.248,06	1.610.459.475.824,53	1.525.593.549.317,54	1.552.988.135.026,96
2.1.1	Belanja Pegawai	721.741.478.663,50	731.242.801.020,00	807.410.006.432,06	880.049.146.205,00	894.481.973.472,00	903.426.793.206,72
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.147.855.700,99	622.856.062.579,08	623.104.453.914,00	625.103.060.426,42	501.724.661.096,43	523.223.265.202,56
2.1.3	Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Hibah	112.212.303.883,00	128.131.516.706,00	153.449.289.902,00	98.941.936.987,17	98.936.132.302,18	99.429.424.261,60
2.1.6	Bantuan Sosial	30.369.610.000,00	27.040.760.000,00	21.182.655.000,00	6.365.332.205,95	30.450.782.446,93	26.908.652.356,08
	Jumlah Belanja Operasi	1.454.471.248.247,49	1.509.271.140.305,08	1.605.146.405.248,06	1.610.459.475.824,53	1.525.593.549.317,54	1.552.988.135.026,96
2.2	BELANJA MODAL	258.591.168.249,00	230.872.531.370,54	136.812.757.672,95	162.730.901.214,71	229.792.829.668,99	228.520.647.187,22
2.2.1	Belanja Tanah	-	2.778.846.500,00	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	98.882.524.822,00	70.357.465.578,00	55.178.464.786,00	67.789.255.936,15	80.675.967.218,92	87.013.838.210,91
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	53.732.345.228,00	79.873.312.112,86	51.036.333.217,95	55.509.371.704,24	45.911.445.068,45	47.608.523.551,85
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.480.656.125,00	68.889.944.386,68	21.118.703.642,00	30.360.857.052,33	96.994.320.363,03	87.256.914.185,18
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.495.642.074,00	8.923.462.793,00	8.809.131.027,00	8.818.716.640,01	6.211.097.018,59	6.641.371.239,28
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	49.500.000,00	670.125.000,00	252.699.881,97	-	-
	Jumlah Belanja Modal	258.591.168.249,00	230.872.531.370,54	136.142.632.672,95	162.730.901.214,71	229.792.829.668,99	228.520.647.187,22
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	19.705.015.407,00	5.165.941.858,00	12.094.940.675,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	19.705.015.407,00	5.165.941.858,00	12.094.940.675,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jumlah Belanja Tak Terduga	19.705.015.407,00	5.165.941.858,00	12.094.940.675,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00	13.300.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	304.134.667.603,00	294.335.214.353,00	313.452.090.521,48	302.273.131.971,00	313.125.859.633,83	319.481.846.016,92
2.4.1	Belanja Bagi hasil	3.153.350.423,00	3.378.813.753,00	4.532.093.172,00	12.924.534.371,00	10.414.820.449,59	10.716.586.048,99
2.4.2	Belanja bantuan Keuangan	300.981.317.180,00	290.956.400.600,00	308.919.997.349,48	289.348.597.600,00	302.711.039.184,24	308.765.259.967,93
	Jumlah Belanja Transfer	304.134.667.603,00	294.335.214.353,00	313.452.090.521,48	302.273.131.971,00	313.125.859.633,83	319.481.846.016,92
	JUMLAH BELANJA	2.036.902.099.506,49	2.039.644.827.886,62	2.066.836.069.117,49	2.088.763.509.010,24	2.081.812.238.620,36	2.114.290.628.231,10

Sumber: BPKAD Kabupaten Pamekasan



Amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan focus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending* agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan public dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Amanat UU No. 1 Tahun 2022 adalah besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD;
4. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan public minimal 40% dari total belanja;

Dalam hal Pemerintah Daerah melebihi batas ketentuan alokasi belanja, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak UU. No 1 Tahun 2022 berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan mulai melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan kepada :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah. Berikut adalah realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022-2027:



Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	PEMBIAYAAN	192.564.675.560,94	58.564.418.063,61	42.180.362.921,50	16.495.261.376,24	43.616.282.826,51	44.125.692.547,04
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.108.202.917,73	119.941.529.241,61	63.409.645.349,50	35.994.756.342,24	53.616.282.826,51	54.125.692.547,04
3.1.1	Penggunaan SILPA	214.108.202.917,73	69.941.529.241,61	63.405.145.349,50	35.994.756.342,24	53.616.282.826,51	54.125.692.547,04
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	50.000.000.000,00	-	-	-	-
3.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	4.500.000,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	214.108.202.917,73	119.941.529.241,61	63.409.645.349,50	35.994.756.342,24	53.616.282.826,51	54.125.692.547,04
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.543.527.356,79	61.377.111.178,00	21.229.282.428,00	19.499.494.966,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	314.244.928,79	40.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	21.229.282.428,00	21.377.111.178,00	21.229.282.428,00	19.499.494.966,00	-	-
3.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.543.527.356,79	61.377.111.178,00	21.229.282.428,00	19.499.494.966,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pamekasan



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD Pamekasan 2025-2029. Prioritas Pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2024, peluang dan tantangan pembangunan daerah yang fokus pada percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menekankan bahwa tujuan dan sasaran dalam RKPD mengacu sepenuhnya pada dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Selain mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 juga mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, RKPD Jawa Timur tahun 2026, Rencana Pembangunan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045. Pendekatan ini merupakan implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengatur pola hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan.

Visi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan teknokratik RPJMD serta Platform politik Kepala Daerah terpilih yaitu **Dr. KH. Kholilurrahman** dan **H. Sukriyanto** yang dilantik pada tanggal 19 Maret 2025. Selain itu, visi dan misi yang dirumuskan harus memperhatikan visi dan misi Presiden yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Gubernur yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.



Dengan demikian, keselarasan visi dan misi pembangunan antara Pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat dapat terjaga.

Visi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2029 ditetapkan sama dengan visi pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu:

“Bangkit Bersama Untuk Pamekasan Maju”

Visi pembangunan tersebut memuat beberapa makna yang merupakan harapan kondisi yang ingin diwujudkan kedepan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

BANGKIT

Kata “Bangkit” dalam rumusan visi Pembangunan Pamekasan bermakna keberdayaan segenap masyarakat Pamekasan untuk bersama memperkuat daya saing yang tinggi di kancah regional, nasional dan global. Melalui transformasi sosial, politik dan ekonomi yang kuat, sinergi umara (Pemerintah), alim ulama, tokoh sosial dan tokoh budaya, serta para pelopor pembangunan mengatasi berbagai gejala dan perubahan lingkungan sekitar. Transformasi sosial yang mampu membentuk citra diri (pride), kemajuan Pamekasan sebagai daerah yang mampu dibanggakan warganya. Bangkitnya kebanggaan warga Pamekasan terhadap identitas daerahnya diyakini akan mengakselerasi partisipasi warganya dalam mewujudkan pelayanan publik inklusif yang berkualitas dan merata. Sekaligus terwujudnya berbagai layanan utilitas / ruang publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

BERSAMA

Kata “Bersama” dalam rumusan visi pembangunan Pamekasan bermakna kondisi masyarakat Pamekasan yang memiliki solidaritas

dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berbasis pada keluarga tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, sehat, dan bahagia. Kesejahteraan masyarakat Pamekasan juga berarti kemampuan atau ketahanan sosial dan ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah

MAJU

Kata “Maju” dalam rumusan visi pembangunan Pamekasan memiliki 3 dimensi makna sebagai berikut:

Interaksi Sosial yang Maju

Dinamika masyarakat Pamekasan dijiwai oleh internalisasi nilai-nilai agama, budaya lokal, maupun nasional. Tatanan interaksi sosial yang maju juga ditandai dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta tidak terkecuali penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Hasil Pembangunan yang Maju

Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif yang diikuti dengan penurunan kemiskinan, bertumpu pada optimalisasi sektor potensial seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, serta didukung oleh sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro, dan pariwisata. Kemajuan pembangunan juga diwujudkan melalui prinsip keberlanjutan, yang memberikan perhatian pada kelestarian lingkungan hayati dan nonhayati. Ini termasuk perhatian khusus terhadap pemuda, terutama Generasi Z dan generasi milenial, agar mereka dapat mengembangkan diri dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Maju

Menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat, dengan pembangunan karakter aparatur yang lincah (agile) dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sebagai implementasi Transformasi Digital secara masif.

Gambar 4.1.
Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan 2025-2029



Sumber: Bapperida, diolah

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berkarakter

Misi 1 pembangunan Kabupaten Pamekasan untuk periode 2025-2029 adalah mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, transformasi sosial ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, budaya, dan sikap masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai agama, budaya lokal, keharmonisan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sumber Daya Manusia Unggul dalam perencanaan ini bermaksud bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumber

daya manusia yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Namun, kualitas SDM yang unggul belum sepenuhnya tercapai, dengan tantangan masih adanya tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah dan keterbatasan keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri modern. Misi ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan teknis, serta kapasitas individu untuk berinovasi. Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda akan menjadi prioritas untuk menciptakan SDM yang kompetitif di tingkat lokal dan nasional.

Masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki karakter agamis yang kuat karena kekuatan tradisi keagamaan yang mendalam, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat menghargai nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam misi pembangunan ini, pembangunan karakter yang agamis menjadi bagian integral dari transformasi sosial. Pendidikan agama yang inklusif dan memperkuat akhlak mulia, disiplin, serta kepedulian sosial diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dan beretika dalam bertindak.

Sebagai wilayah dengan kekayaan budaya Madura yang khas, Kabupaten Pamekasan memiliki tradisi yang kuat dalam seni, budaya, dan kehidupan sosial yang mendalam. Misi ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang telah menjadi identitas masyarakat, sambil memfasilitasi harmonisasi hubungan antar individu dan kelompok di masyarakat. Dalam proses transformasi sosial, penting untuk mendorong sikap saling menghargai antar berbagai kelompok, baik dalam konteks agama, suku, maupun antargenerasi. Ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan berbagi nilai-nilai kebaikan bersama.

Kabupaten Pamekasan menghadapi tantangan lingkungan yang semakin besar, seperti degradasi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Misi ini mengutamakan pentingnya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup. Pendidikan dan kampanye tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta praktik ramah lingkungan, akan menjadi bagian penting dari pembangunan karakter masyarakat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, mengurangi sampah plastik, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter agamis, berbudaya, harmonis, dan cinta lingkungan, Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur lokal. Transformasi sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah suatu proses yang akan memberdayakan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk lebih mandiri, berdaya saing, dan hidup harmonis dalam keberagaman, sambil melestarikan lingkungan sebagai warisan berharga bagi masa depan.

Misi 1 diturunkan dalam tiga tujuan pembangunan yaitu menurunnya kemiskinan dan ketimpangan; meningkatnya kualitas pembangunan manusia; dan meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:

Sumber: Bapperida, diolah

Tujuan pertama dalam misi pertama RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029 adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat. Kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Tujuan ini difokuskan pada pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

IV-7

kemiskinan, diharapkan masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Sedangkan indikator yang kedua adalah gini rasio yang akan digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pengurangan Gini Rasio menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, di mana pendapatan masyarakat akan lebih merata dan kesenjangan sosial semakin berkurang.

Untuk mencapai tujuan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan tiga sasaran strategis yang perlu dicapai, yaitu:

1. Peningkatan Kemandirian PPKS (Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

Sasaran strategis pertama adalah meningkatkan kemandirian PPKS yang mencakup keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pemberdayaan mereka akan difokuskan pada penyediaan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Persentase PPKS yang mandiri menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan pemberdayaan ini. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial diharapkan dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pamekasan. Pemerintah daerah akan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. Tingkat Pengangguran Terbuka akan menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana sasaran ini tercapai. Dengan mengurangi pengangguran, diharapkan lebih banyak

masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Sasaran ketiga adalah memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Pamekasan. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja akan membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Adapun indikator sasaran ini adalah indeks ketimpangan gender. Semakin kecil ketimpangan gender, semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan sosial, yang akan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan.

TUJUAN 2 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia

Tujuan kedua dalam misi pertama RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing. Tujuan ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas, Kabupaten Pamekasan berupaya membangun masyarakat yang cerdas, sehat, dan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. IPM akan digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pencapaian tujuan ini. IPM adalah gabungan dari tiga dimensi utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup yang mencakup pendapatan. Peningkatan IPM

akan menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan merata.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat pendidikan masyarakat.

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penyuluhan mengenai pentingnya gaya hidup sehat. Derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi akan tercermin dalam peningkatan usia harapan hidup (UHH), yang menunjukkan rata-rata umur yang dapat diharapkan dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Usia Harapan Hidup digunakan untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, mengurangi angka kematian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, diharapkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan akan meningkat.

2. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, yang mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang. Peningkatan pendidikan yang berkualitas akan memberikan masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pendidikan yang lebih baik juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Terdapat 2 indikator untuk melihat keberhasilan dari sasaran ini yaitu rapor pendidikan dan indeks pendidikan. Rapor Pendidikan digunakan untuk menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan, mulai dari tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. Sedangkan indeks pendidikan untuk mengukur rata-rata lama sekolah serta tingkat

melek huruf di Kabupaten Pamekasan, yang mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.

TUJUAN 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Tujuan ketiga adalah meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban yang tinggi merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis. Tujuan ini berfokus pada penguatan sistem keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan terjamin perlindungannya, masyarakat Pamekasan dapat hidup dengan lebih damai dan produktif.

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Pamekasan. Penurunan angka kekerasan, penyelesaian konflik sosial, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan mencerminkan pencapaian tujuan ini. Untuk mencapai tujuan meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial dan menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial

Sasaran pertama adalah meningkatkan kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial. Kerukunan ini mencakup terciptanya hubungan harmonis antar individu, kelompok, dan komunitas dalam masyarakat. Penyelesaian konflik sosial dan penurunan pelanggaran ketertiban umum akan menjadi indikator utama dalam mencapai sasaran ini. Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan

digunakan untuk mengukur seberapa banyak pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan baik, melalui tindakan preventif maupun penegakan hukum yang tegas. Selain itu, sasaran ini juga menggunakan indikator jumlah konflik sosial yang digunakan untuk menilai jumlah konflik sosial yang terjadi dan berusaha untuk menurunkannya dengan meningkatkan komunikasi antar kelompok masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

2. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran kedua adalah menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu serius yang harus segera ditangani dengan pendekatan preventif dan kuratif yang lebih komprehensif. Meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak akan menjadi prioritas dalam mencapai tujuan ini. Adapun indikator sasaran adalah rasio kekerasan terhadap perempuan untuk mengukur tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Penurunan rasio ini akan menjadi indikator kesuksesan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal

Perekonomian suatu wilayah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan daerah, sehingga pembangunan ekonomi menjadi harapan masyarakat bagi masyarakat agar dapat lebih maju dan dirasakan dampaknya bagi seluruh lapisan. Pembangunan ekonomi pada suatu daerah memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah serta dukungan kemampuan masyarakat dan pengampu kepentingan dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang cukup luas baik pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, sektor jasa



baik pada bidang pendidikan, kesehatan, konstruksi dan lain sebagainya hingga sektor pertambangan. Akan tetapi dalam rangka menyusun kebijakan yang berorientasi terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka berbagai sektor tersebut perlu dianalisa serta di berikan skala prioritas sebagai langkah untuk menentukan arah perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta berdampak luas terhadap masyarakat secara luas.

Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi sangat kuat di Kabupaten Pamekasan adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran, sehingga kedua sektor ini merupakan sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan menjadi lokomotif dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Pamekasan yang maju dan berdaya saing. Selain kedua sektor tersebut terdapat sektor jasa konstruksi dan sektor perindustrian yang berada dibawahnya. Kontribusi yang besar pada kedua sektor ini menggambarkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pamekasan tengah mengalami pergeseran dimana kebutuhan bangunan baik perumahan atau bangunan gedung dan perkantoran meningkat, perindustrian juga tumbuh cukup besar sehingga mendorong stimulus agar hilirisasi industri bergerak. Pertanian, perkebunan dan perikanan tidak lagi hanya dijual sebagai produk akan tetapi dapat diolah melalui sektor industri sehingga nilai jual produk dapat meningkat. Disisi lain permintaan terhadap produk pertanian juga akan meningkat sehingga berpotensi terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Peluang peningkatan perekonomian daerah telah terbentuk dengan cukup baik. Namun, kebijakan ke depan akan menjadi penentu apakah potensi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan atau justru berkembang secara tidak terkendali sehingga berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam misi ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk

merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Hal ini dimaksudkan agar percepatan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara optimal sekaligus menjamin distribusi manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada pengurangan beban pengeluaran serta peningkatan daya beli masyarakat.

Gambar 4.3.

Tujuan dan Sasaran Misi 2 Kabupaten Pamekasan 2025-2029

Misi 2	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Terwujudnya Perekonomian inklusif yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat			
Indikator	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi		2. Pendapatan per kapita.	
Sasaran	 Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	 Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kewenangan Kabupaten	 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Indikator Sasaran	- Kontribusi PDRB Sub Sektor pertanian, perikanan dan peternakan - PDRB Sub Sektor Perdagangan - Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	Realisasi Investasi	V/C ratio	Indeks PPP
Program Politik	- Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perikanan - Akselerasi Petani - Ketahanan Pangan - Pengembangan pembiayaan untuk Proyek Strategis Komoditas Daerah - Mendukung Jalan Kawasan Strategis - Revitalisasi Pasar Tradisional - Pendampingan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif - Pembangunan Kawasan Kesenian, Budaya, dan Wisata Religi - Event Kreatif Muda - SukSES (SukSES dengan Dana Masalah) - Pengoptimalan UMKM - Pengoptimalan UMKM - Peningkatan Jalan Kabupaten, Kecamatan dan Desa - Stabilisasi Harga Komoditas Pangan dan Unggulan - Pembangunan Kawasan Kesenian I Budaya Pamekasan	Penguatan Investasi	Peningkatan Jalan Kabupaten, Kecamatan dan Desa	- Stabilisasi Harga Komoditas Pangan dan Unggulan - Pembangunan Kawasan Kesenian Budaya Pamekasan
Perangkat Daerah	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Perikanan - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Penanaman Modal	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UMKM

Sumber: Bapperida, diolah

Tujuan: Terwujudnya Perekonomian Inklusif yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Misi kedua yakni Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif sehingga mampu diwujudkan secara merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada misi kedua ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Perekonomian Inklusif yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, dengan sasaran strategis meliputi:

1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah;



2. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah;
3. Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kewenangan Kabupaten;
4. Peningkatan Daya Beli.

Misi 3: Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan

Isu lingkungan dan kebencanaan merupakan salah satu isu penting yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Degradasi lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat, sedangkan bencana alam yang terjadi dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam misi ketiga ini. Bencana berdasarkan penyebab terjadinya dapat dibedakan menjadi dua kategori, pertama adalah bencana yang memang disebabkan oleh aktivitas alam (gempa bumi, tsunami, kekeringan, angin kencang). Bencana dengan karakteristik ini disebabkan oleh aktivitas alam (kejadian alamiah) yang memang tidak dapat dihindari. Kedua adalah bencana yang disebabkan oleh dampak dari aktivitas manusia (banjir, tanah longsor, kebakaran).

Upaya penanggulangan terhadap bencana harus tetap terus dilakukan, khususnya bagi bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia (degradasi manusia). Bagi bencana yang berasal dari aktivitas alam, upaya yang dilakukan adalah dengan meminimalisir kerugian dan korban akibat dari bencana tersebut. Oleh karena itu pada misi ketiga ini upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana daerah dengan pendekatan rekayasa infrastruktur dan lingkungan dilakukan. Rekayasa infrastruktur mencakup perancangan dan pembangunan struktur yang lebih tahan terhadap bencana, seperti gedung tahan gempa, jembatan yang mampu menahan beban ekstrem, dan sistem drainase yang dapat mengurangi risiko banjir. Pendekatan selanjutnya adalah

perekayasa lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Perekayasa lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.

Gambar 4.4.
Tujuan dan Sasaran Misi 3 Kabupaten Pamekasan 2025-2029



Sumber: Bapperida, diolah

Tujuan: Menurunnya Risiko Bencana Daerah

Untuk dapat mewujudkan misi ketiga yaitu Mengurangi Risiko Bencana Daerah Melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai salah satu upaya penjenjangan kinerja pemerintah daerah melalui cascading kinerja. Melalui tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam cascading kinerja, diharapkan pencapaian misi ketiga ini dapat dicapai dengan upaya yang sistematis dan terukur. Tujuan pembangunan pada misi ketiga ini adalah Menurunnya Risiko Bencana Daerah dengan indikator kinerja adalah Indeks Risiko Bencana.

Tujuan pembangunan ini memiliki empat sasaran, yaitu meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana dengan indikator sasaran adalah Indeks Ketahanan Daerah, program prioritas yang mendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah

program penanggulangan bencana. Pada sasaran kedua adalah Peningkatan efektivitas mitigasi struktural bencana tematik dengan indikator kinerja luasan daerah rawan banjir, luasan daerah rawan kekeringan, luasan abrasi dan erosi dan luasan daerah rawan longsor. Sasaran ketiga adalah Peningkatan kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator kinerja Persentase kejadian kebakaran yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah kabupaten, program prioritas yang mendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Sasaran keempat adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, program prioritas yang mendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Lincah untuk Pelayanan Publik yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat.

Pada misi keempat ini, terdapat beberapa substansi penting terkait dengan tata kelola pemerintahan. Substansi pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan lincah. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel mengacu pada prinsip di mana setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Akuntabilitas ini tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga mencakup pengelolaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntabilitas menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan berbagai solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan di masyarakat dan

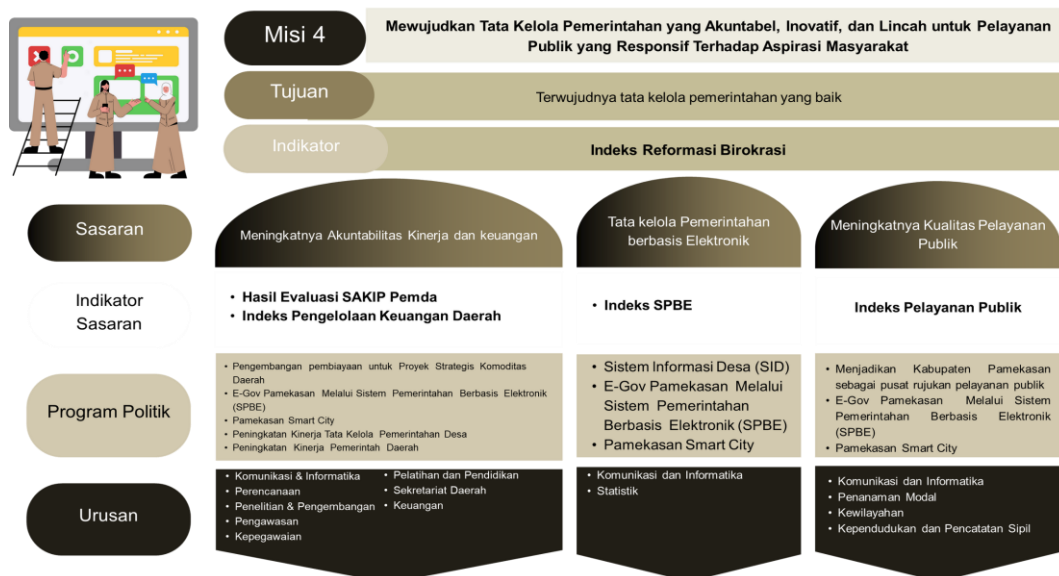
pembangunan daerah. Pemerintah daerah yang inovatif tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang ada, tetapi juga berani mengembangkan kebijakan atau program yang kreatif dan berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Inovasi ini dapat berupa penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, pemanfaatan data untuk perencanaan yang efektif dan efisien, serta pengembangan berbagai program yang mampu meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih maksimal.

Sementara itu, tata kelola pemerintahan daerah yang responsif berarti pemerintah daerah mampu merespons dan menanggapi kebutuhan serta masalah yang dihadapi masyarakat dengan cepat dan tepat. Responsivitas ini terwujud dalam kebijakan yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Pemerintah daerah yang responsif tidak hanya mengandalkan input dari masyarakat, tetapi proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai. Responsivitas ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat terimplementasi ke dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencakup bagaimana pelayanan publik tersebut diberikan dan sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan, namun juga mengenai sensitivitas pemerintah daerah terhadap bentuk pelayanan publik yang diinginkan/dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya perwujudan pelayanan publik yang responsif tersebut dapat berupa pengaplikasian teknologi informasi,

peningkatan kecepatan dan keterjangkauan pelayanan, dan lain sebagainya.

Gambar 4.5.
Tujuan dan Sasaran Misi 4 Kabupaten Pamekasan 2025-2029



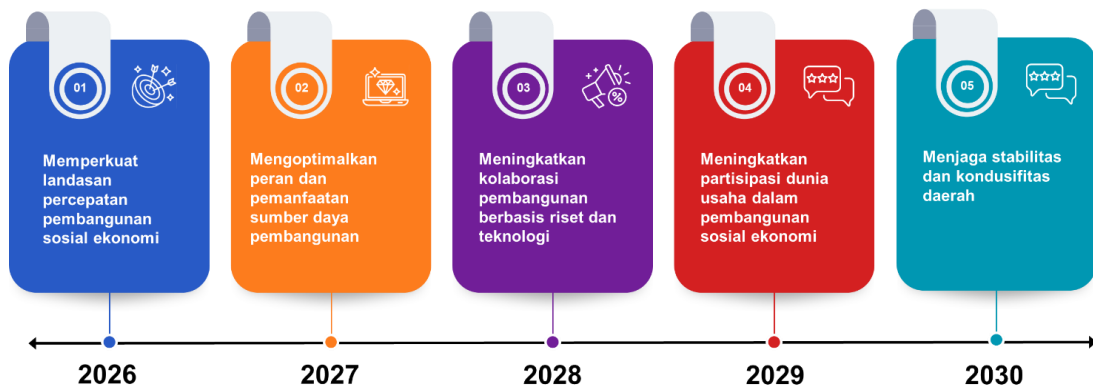
Sumber: Bapperida, diolah

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk dapat mewujudkan misi keempat Bupati Pamekasan terpilih yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Lincah untuk Pelayanan Publik yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan berikut dengan indikator kinerja yang melekat. Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut merupakan upaya penjenjangan kinerja agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. Tujuan pada misi keempat ini adalah “Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasarnya adalah 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai upaya menjaga ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan tematik tahunan. Tema Pembangunan tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6.
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Pamekasan 2025-2029



Sumber: Bapperida, diolah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter (agamis, berbudaya, harmonis dan cinta lingkungan)	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka Kemiskinan	11,77	11,77	-
			Gini Rasio	0,34	0,34	-
		Peningkatan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS Yang Mandiri (24 Jenis PPKS)	0,57	0,57	-
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,62	1,62	-
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan	Indeks Ketimpangan Gender	0,57	0,57	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,97	71,97	-
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,06	74,06	-
		Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,64	0,64	-
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	74,9	74,9	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial	Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan	56,23	56,23	-
			Jumlah Konflik Sosial	1	1	-
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	8,8	8,8	-
2	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya Perekonomian Inklusif yang Berdampak pada Peningkatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,18	5,18	-
			Pendapatan Perkapita	29.661	29.661	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	berbasis potensi lokal	Pendapatan Masyarakat				
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian Perikanan dan Peternakan	30,08	30,08	-
			PDRB Sub Sektor Perdagangan	22,22	22,22	-
			Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	8,04	8,04	-
		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	Realisasi Investasi	0,70	0,70	-
		Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan	V/C Ratio	0,30	0,30	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kewenangan Kabupaten				
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP	0,71	0,71	-
3	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Menurunnya Risiko Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	95,50	95,50	-
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,80	0,80	-
		Peningkatan Efektivitas Mitigasi Struktural Bencana Tematik	Luasan Daerah Rawan Banjir	10,559,392	10,559,392	-
			Luasan Daerah Rawan Kekeringan	15,674,068	15,674,068	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Luasan Daerah Rawan longsor	4095	4095	-
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani Kurang dari 15 Menit di Wilayah Kabupaten	89,17	89,17	-
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,85	67,85	-
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	74,25	74,25	-
			Hasil Evaluasi SAKIP Pemda	74,48	74,48	-

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026 pada RPJMD	Target Tahun 2026	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76,36	76,36	-
		Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektornik	Indeks SPBE	-	-	Pada Tahun 2026 Indeks SPBE akan digantikan oleh Indeks PEMDI
			Indeks PEMDI	2,70	-	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,01(A-)	4,01(A-)	-

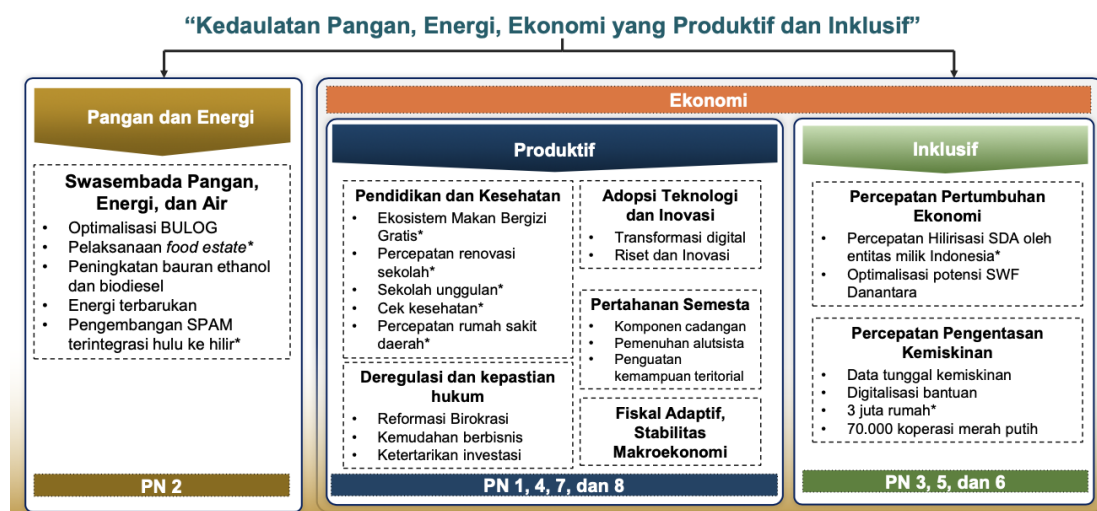
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Sebelum perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2026, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap prioritas dan sasaran RKP tahun 2026, prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026, Sasaran Pokok Pembangunan Lima Tahun ke-I RPJPD Kabupaten Pamekasan dan Arah Kebijakan Tahun 2026 dalam RPD Kabupaten Pamekasan.

4.2.1. Telaah Terhadap Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2026

Tahapan ini diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perumusan tema RKPD kabupaten/kota harus selaras dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun berkenaan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditelaah beberapa kebijakan penting RKP 2026.

Gambar 4.7.
Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026



Sumber: Bappenas, 2025

Tema Pembangunan nasional pada tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema ini merupakan langkah lebih lanjut dalam mewujudkan pondasi transformasi Indonesia Emas dengan target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2030.

Strategi jangka pendek dalam tema pembangunan RKP 2026 di atas berfokus pada tiga pilar utama: kedaulatan pangan dan energi, ekonomi produktif, dan ekonomi inklusif. Dalam sektor pangan dan energi, langkah-langkah seperti optimalisasi BULOG, pelaksanaan *food estate*, serta peningkatan bauran etanol dan biodiesel bertujuan untuk mencapai swasembada dalam waktu dekat. Pengembangan SPAM terintegrasi dan energi terbarukan juga menjadi prioritas untuk memastikan ketahanan sumber daya air dan energi yang berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat stok pangan nasional dalam jangka pendek.

Pada pilar ekonomi produktif, strategi jangka pendek mencakup percepatan transformasi digital, riset, dan inovasi, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. Program seperti ekosistem makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan rumah sakit daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara cepat. Sementara itu, reformasi birokrasi dan kemudahan berbisnis diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendorong pertumbuhan sektor produktif dalam waktu singkat. Langkah-langkah ini diperkuat dengan fokus pada pertahanan dan stabilitas makroekonomi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan.

Di sisi ekonomi inklusif, strategi jangka pendek meliputi percepatan hilirisasi SDA oleh entitas lokal dan optimalisasi dana SWF Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Program pengentasan kemiskinan melalui data tunggal dan digitalisasi bantuan sosial, seperti pembangunan 3 juta rumah dan dukungan untuk koperasi, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan cepat. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam waktu yang relatif singkat.



Sementara itu, sasaran Pembangunan nasional pada tahun 2026 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 4.8.
Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan		2024	2025	2026
	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,03	5,3	5,8 - 6,3
	GNI per Capita	5.000	5.410	5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	35,53	37,14
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	76,67
Penurunan Kemiskinan				
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5
	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83	0	0
	Rasio Gini	0,373	0,379-0,382	0,377- 0,380
Sumber Daya Manusia Berkualitas				
	Indeks Modal Manusia	0,54	0,56	0,57

Sumber: Bappenas, 2025

Pada aspek pertumbuhan tinggi berkelanjutan, pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,3% pada tahun 2026, didukung oleh kenaikan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari 5.410 pada tahun 2025 menjadi 5.870 pada tahun 2026. Selain itu, upaya pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan target penurunan emisi GRK sebesar 37,14% dan indeks lingkungan hidup mencapai 76,67 pada tahun 2026.

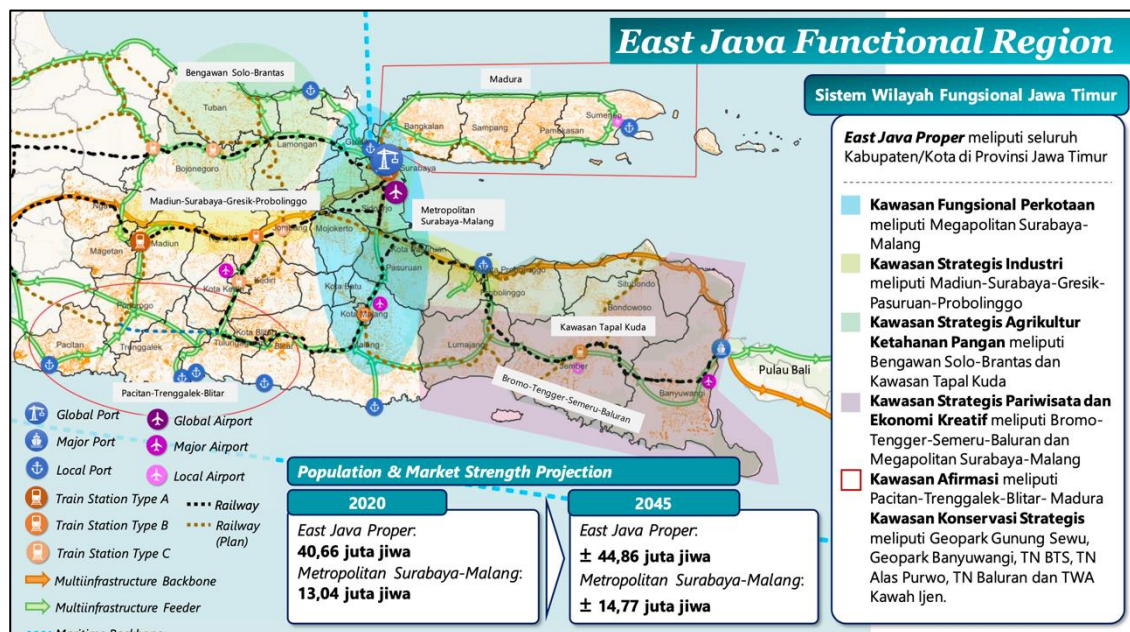
Di bidang penurunan kemiskinan, sasaran utamanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan hingga angka 6,5-7,5% pada tahun 2026 serta menghapus kemiskinan ekstrem pada 2025. Meskipun rasio Gini diproyeksikan tetap stabil di kisaran 0,377-0,380, hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sementara itu, peningkatan kualitas SDM tercermin dari target indeks modal manusia yang naik dari 0,54 (2024) menjadi 0,57 (2026), menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan

keterampilan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, sasaran RKP 2026 ini menggambarkan pendekatan holistik yang memadukan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Tema pembangunan wilayah Jawa adalah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” dengan kebijakan kewilayahan untuk Jawa Timur sebagai “Mata-rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustry, dan ekonomi biru nasional. Untuk mendukung pencapaian tema kewilayahan maka disusun kebijakan kewilayahan seperti tergambar di bawah ini:

Gambar 4.9
Sistem Wilayah Fungsional Jawa Timur



Sumber: Bappenas RI

Secara kewilayahan Provinsi Jawa Timur diklasterkan menjadi 6 (enam) wilayah/Kawasan yaitu:

1. Kawasan Fungsional Perkotaan meliputi megalopolitan Surabaya-Malang;
2. Kawasan Strategis Industri meliputi Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan-Probolinggo;

3. Kawasan Strategis Agrikultur Ketahanan Pangan meliputi Bengawan Solo-Brantas-Tapal Kuda;
4. Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi Bromo-Tengger-Semeru-Baluran dan Megalopolitan Surabaya-Malang;
5. Kawasan Afirmasi meliputi Pacitan-Trenggalek-Blitar-Madura;
6. Kawasan Konservasi Strategis meliputi Geopark Gunung Sewu-Geopark Banyuwangi-TN BTS-TN Alas Purwo-TN Baluran-TWA Kawah Ijen.

Selain kebijakan kewilayahan, Pemerintah Pusat juga mempersiapkan kebijakan intervensi melalui pendanaan APBN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga pencapaian arah kebijakan RPJPN lima tahun pertama yaitu penguatan pondasi transformasi.

4.2.2 Telaah terhadap Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 akan difokuskan pada **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas untuk Kemandirian Pangan dan Energi”**. Dengan potensi besar di sektor pertanian, Jawa Timur berkomitmen mendukung program swasembada pangan nasional.

Dukungan terhadap terwujudnya swasembada pangan nasional akan direalisasikan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kedelai, dan kopi dengan teknologi modern, penguatan SDM, serta inovasi budidaya dan pengelolaan hasil pertanian. Jawa Timur juga akan memperkuat hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan agroindustri terintegrasi, membuka peluang kerja baru, dan meningkatkan pendapatan petani. Infrastruktur pendukung seperti irigasi, gudang, dan sistem distribusi akan ditingkatkan untuk menjamin kelancaran produksi dan pasokan pangan.

Jawa Timur akan mengambil peran dalam program lumbung pangan nasional dan pengembangan sistem penyediaan pangan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan daerah, mendukung swasembada pangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis pembangunan yang telah disusun untuk mencapai prioritas pembangunan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Langkah Strategis Arah Kebijakan Jawa Timur Tahun 2026

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
1	Jatim Sejahtera	1. Perluasan program pengentasan kemiskinan berbasis evaluasi 2025	Melanjutkan fokus di Pulau
		2. Penguatan perlindungan sosial untuk masyarakat hampir miskin	Madura dan memperluas ke
		3. Pengembangan kewirausahaan perempuan melalui inkubasi bisnis	kawasan pesisir selatan serta
		4. Penyempurnaan penargetan bantuan sosial berbasis data	wilayah lain dengan
		5. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat berorientasi kemandirian	kemiskinan persisten
		6. Peningkatan kualitas lembaga ekonomi di wilayah perdesaan	
		7. Pembangunan pusat layanan terpadu untuk kelompok rentan	
		8. Perluasan program ekonomi produktif bagi masyarakat miskin	
		9. Implementasi program perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		10. Penguatan inklusi sosial untuk kelompok marjinal	
		11. Pengembangan sistem pengukuran dampak program kemiskinan	
2	Jatim Kerja	1. Perluasan ekosistem inovasi ke kota-kota sekunder	Kota-kota sekunder
		2. Pengembangan program peningkatan keterampilan untuk industri berkembang	(Malang, Kediri, Madiun, Jember), koridor ekonomi
		3. Penguatan promosi investasi untuk sektor dengan potensi penciptaan lapangan kerja tinggi	berkembang (sumbu
		4. Pengembangan klaster UMKM dan integrasi rantai nilai	Probolinggo-Banyuwangi), dan daerah dengan

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		5. Penguatan infrastruktur ekonomi digital dan pengembangan keterampilan digital 6. Implementasi program pengembangan ekonomi lokal berbasis spesialisasi regional 7. Penguatan kemitraan industri-akademisi untuk inovasi dan riset 8. Pengembangan program promosi ekspor untuk UMKM 9. Penguatan layanan dukungan bisnis dan reformasi regulasi 10. Implementasi penciptaan lapangan kerja hijau	pengangguran tinggi
3	Jatim Akses	1. Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui proyek infrastruktur strategis 2. Pembangunan jaringan transportasi sekunder menghubungkan pusat ekonomi 3. Perluasan infrastruktur digital ke daerah terlayani rendah 4. Implementasi sistem mobilitas perkotaan terintegrasi di kota-kota besar 5. Penguatan infrastruktur pedesaan mendukung pengembangan pertanian 6. Pengembangan infrastruktur dan layanan logistik untuk menurunkan biaya perdagangan 7. Implementasi program pengembangan perumahan dengan infrastruktur memadai 8. Penguatan sistem pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur 9. Pengembangan infrastruktur pariwisata di lokasi strategis 10. Implementasi inisiatif kota cerdas di pusat perkotaan	Koridor antar wilayah, kota-kota sekunder, dan daerah pedesaan dengan potensi ekonomi namun terkendala infrastruktur
4	Jatim Cerdas	1. Perluasan akses pendidikan berkualitas melalui metode penyampaian inovatif 2. Implementasi sistem kurikulum dan penilaian berbasis kompetensi 3. Penguatan program pendidikan STEM 4. Pengembangan program keterkaitan pendidikan dan industri 5. Penguatan kapasitas riset dan inovasi pendidikan tinggi	Perluasan dari wilayah prioritas 2025 untuk mencakup daerah berkembang dengan tantangan kualitas pendidikan

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		- Implementasi program literasi dan numerasi komprehensif - Penguatan program pendidikan inklusif untuk kelompok marjinal - Pengembangan fasilitas pendidikan sebagai pusat belajar masyarakat - Implementasi program teknologi pendidikan skala luas - Penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan	
5	Jatim Sehat	- Pengembangan layanan kesehatan spesialisasi di rumah sakit regional - Penguatan sistem surveilans dan respons penyakit - Perluasan program kesehatan ibu dan anak ke daerah terpencil - Implementasi solusi teknologi kesehatan untuk layanan jarak jauh - Penguatan program gizi untuk anak dan kelompok rentan - Penguatan implementasi dan pemantauan jaminan kesehatan - Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani - Penguatan program kesehatan preventif dan promosi kesehatan - Implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi - Penguatan inisiatif kesehatan berbasis masyarakat	Melanjutkan fokus pada daerah dengan stunting tinggi sambil memperluas ke wilayah dengan tantangan kesehatan berkembang
6	Jatim Berkah Amanah	- Perluasan sistem e-government dan layanan publik digital - Penguatan kualitas regulasi dan inisiatif penyederhanaan - Peningkatan pengelolaan keuangan publik dan transparansi - Implementasi manajemen berbasis kinerja di institusi publik - Pengembangan mekanisme umpan balik warga dan partisipasi publik - Penguatan kapasitas pemerintahan lokal dan desentralisasi - Peningkatan mekanisme koordinasi antar pemerintah - Implementasi inisiatif data terbuka dan tata kelola data	Seluruh kabupaten/kota dengan penekanan khusus pada daerah dengan tantangan tata kelola

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		- Penguatan program kerukunan beragama dan toleransi - Pengembangan ketahanan masyarakat melalui modal sosial	
7	Jatim Agro	- Perluasan program modernisasi pertanian dan adopsi teknologi - Penguatan rantai nilai pertanian dan akses pasar - Peningkatan kapasitas organisasi petani dan pemasaran kolektif - Implementasi pertanian cerdas iklim skala luas - Pengembangan pengolahan hasil pertanian dan nilai tambah - Penguatan program pengembangan perikanan dan budidaya - Implementasi praktik pengelolaan lahan berkelanjutan - Penguatan sistem asuransi pertanian dan manajemen risiko - Pengembangan program penelitian dan penyuluhan pertanian - Penguatan pengembangan agribisnis dan kewirausahaan	Melanjutkan fokus pada daerah pertanian utama sambil memperluas ke wilayah dengan potensi pertanian namun produktivitas rendah
8	Jatim Harmoni	- Pengembangan pusat budaya regional dan hub kreatif - Penguatan program kesetaraan gender lintas sektor - Penguatan mekanisme resolusi konflik berbasis masyarakat - Implementasi program pengembangan olahraga komprehensif - Pengembangan destinasi wisata budaya dan rute - Penguatan pengembangan ruang publik inklusif - Penguatan organisasi masyarakat sipil dan pembangunan komunitas - Implementasi program pengembangan dan kepemimpinan pemuda - Penguatan program dukungan untuk penyandang disabilitas - Pengembangan pendidikan seni dan apresiasi budaya	Situs warisan budaya, pusat kota untuk pengembangan industri kreatif, dan daerah dengan latar belakang budaya beragam
9	Jatim Lestari	Perluasan program pengelolaan dan konservasi daerah aliran sungai	Kawasan sensitif lingkungan, zona

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		2. Implementasi inisiatif ekonomi sirkular di perkotaan dan kawasan industri	industri, pusat perkotaan dengan tantangan lingkungan, dan daerah rawan bencana
		3. Penguatan pengembangan dan adopsi energi terbarukan	
		4. Penguatan sistem pemantauan dan penegakan lingkungan	
		5. Implementasi program adaptasi perubahan iklim komprehensif	
		6. Penguatan sistem kesiapsiagaan dan respons bencana	
		7. Pengembangan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan	
		8. Implementasi program peningkatan kualitas udara dan air	
		9. Penguatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung	
		10. Pengembangan industri hijau dan eco-industrial park	

Sebagai upaya menjaga tercapainya sasaran Pembangunan Jawa Timur pada tahun 2026, maka telah ditetapkan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil telaah atas evaluasi Pembangunan Jawa Timur, isu strategis, dan penyelarasan terhadap kebijakan Pembangunan nasional.

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Utama Jawa Timur Tahun 2026

No	Uraian	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80 – 5,40
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,81 – 9,10
3	Rasio Gini	0,370 – 0,380
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,84 – 4,48
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,80 – 76,40
6	Indeks Kesalihan Sosial	76,40 – 77,90
7	Indeks Pembangunan Gender	93,20 – 93,48
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,08 – 74,25

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026, maka diterbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 000.7.24/5717/201.2/2025 tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026. Arah kebijakan Pembangunan kewilayahan khusus Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial) berdaya saing tinggi;
2. Mendorong investasi pada sektor potensial (pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan);
3. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan akses ke simpul transportasi lainnya;
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
5. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh;

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
7. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya adalah pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerja sama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, dan lekuifaksi.

Selain arah kebijakan kewilayahan di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan target indikator makro ekonomi Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Jawa Timur pada tahun 2026 seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4 Target Indikator Makro Kabupaten Pamekasan
Tahun 2026**

No	Indikator Makro	Target RKPD Provinsi	Target Kabupaten/Kot a Sesuai RKPD Provinsi Tahun 2026	Target RKPD Kabupaten/Kot a Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80 – 5,40	4,51 - 5,35	5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,81 – 9,10	1,75 - 1,50	11,77
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,84 – 4,48	12,18 - 11,79	1,618
4	Rasio Gini	0,370 – 0,380	0,27 - 0,31	0,289
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Provinsi)/ Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Kabupaten/Kot a)	1	87338,17	0,05

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian misi, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
1	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter (agamis, berbudaya, harmonis dan cinta lingkungan)	Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk Semua (Healthy for All) yang berkualitas, merata mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Healthy Coverage (UHC)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendataan lintas sektoral spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum Perempuan dalam	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
			program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Sosial
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (Healthy for All) yang berkualitas, merata mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Healthy Coverage (UHC)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Penyandang disabilitas			
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (Healthy for All) yang berkualitas, merata mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Healthy Coverage (UHC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan		RSUD Waru

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas			
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
					Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Memantapkan sistem pertahanan keamanan		PROGRAM PENGELOLAAN	Dinas Perumahan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PERUMAHAN	Dinas Perumahan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		(Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas			
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan		

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang disabilitas	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan		
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				KETERTIBAN UMUM	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
					Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN	Dinas Perikanan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				PERIKANAN BUDIDAYA	
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				BARANG PENTING	
		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan		

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
			abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya saing		
		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	Menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya saing		
				PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		melalui peran aktif koperasi	abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya saing		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan Pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sasaran produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan, pemuda (Generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
3	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dengan tata niaga berkeadilan akses optimal kepada sasaran produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penataan Ruang
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran Perempuan pemuda (Generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (healthy for all) yang berkualitas, merata mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal healthy coverage (UHC)		
		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Memperkuat tatakelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa pancasila	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (Start Up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skill) yang berdaya asing	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		Memperkuat pembangunan sumber	Memperkuat kualitas sumber daya manusia		Dinas Komunikasi

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas	melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	dan Informatika
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan		

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Generasi Z), dan penyandang disabilitas			
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		olah raga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas	berkualitas, merata, dan berkeadilan		
		Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan

No	Misi	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta menguatkan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas	- Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (healthy for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Healthy Coverage (UHC)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal

Tabel 4.6 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media
					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Diseminasi Informasi
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
					Penyusunan Konten
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
					Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
					Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
			PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PERIKANAN BUDIDAYA		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
					Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
4.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
5.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
6.	Prioritas Nasional 2	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
7.	Prioritas Nasional 2	Konservasi sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
					Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota
					Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
					Normalisasi/Restorasi Sungai
					Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
					Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
					Operasi dan Pemeliharaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Jaringan Irigasi Permukaan
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
8.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					(SPAM) Jaringan Perpipaan
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					(SPAM) Jaringan Perpipaan
9.	Prioritas Nasional 2	Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
					Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
					Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Limbah Domestik (SPALD)
10.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa			
11.	Prioritas Nasional 2	Pengelolaan susut dan sisa pangan			
12.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		sumber daya genetik			
13.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota
					Normalisasi/Restorasi Sungai
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
14.	Prioritas Nasional 2	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
15.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Pengumpulan	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Penyediaan Sarana Pendukung

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
16.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
17.	Prioritas Nasional 2	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya			
18.	Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
19.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Pengadaan Perlengkapan PAUD
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Satuan Pendidikan PAUD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					Pengelolaan Dana BOP PAUD
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
20.	Prioritas Nasional 4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
21.	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					kekerasan, dan intoleransi
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
22.	Prioritas Nasional 4	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
23.	Prioritas Nasional 4	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		IPTEK dan inovasi			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
24.	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Obat Massal)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			MANUSIA KESEHATAN	di Wilayah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Minuman Industri Rumah Tangga	Tindak Lanjut Pengawasan
25.	Prioritas Nasional 4	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
26.	Prioritas Nasional 4	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
27.	Prioritas Nasional 4	Investasi pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pembangunan Puskesmas

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		kesehatan primer	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
28.	Prioritas Nasional 4	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Pengembangan Rumah Sakit
29.	Prioritas Nasional 4	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Daya Manusia Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30.	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi			
31.	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga			

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
32.	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Kelapa			
33.		Hilirisasi Rumput Laut			
34.	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
35.	Prioritas Nasional 7	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Penyusunan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2026 merupakan proses strategis yang bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Proses ini didasarkan pada evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Arah kebijakan RKPD 2026 disusun berdasarkan tema pembangunan tahunan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Landasan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi”**. Dengan demikian maka arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan landasan percepatan pembangunan sosial ekonomi.

Landasan percepatan yang dimaksud adalah segala aspek yang mendasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti kualitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana produksi dan lain sebagainya.

Gambar 4.10

Mindmap Penyusunan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026



Sumber: Hasil FGD Tim Penyusun



Pendekatan perumusan Tema RKPD Tahun 2026 sebagaimana dilakukan di atas untuk memastikan bahwa Arah dan Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Arah Kebijakan RPJMD tahun 2026 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah tahun 2026 serta mendukung sasaran pokok dan Arah Kebijakan lima tahun-I (2025-2029) RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045. Berdasarkan *mapping* arah kebijakan RKP 2026, RKPD Jawa Timur 2026, arah kebijakan RPJPD Pamekasan 2025-2029 (Tahap 1), dan Tema Pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 adalah **“Penguatan Landasan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi melalui Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan”**.

Selain itu, RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 juga dipastikan mendukung pencapaian arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Hal ini digambarkan melalui adanya keselarasan tema RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan Tema RKP tahun 2026 seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.11
Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan



Sumber: Hasil FGD Tim Penyusun

Mengacu pada perbandingan antara Tema RKP 2026, tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dengan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 di atas, diketahui bahwa unsur keselarasan tema meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemandirian pangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026, maka disusun arah kebijakan Pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mempererat Kerukunan Antar Masyarakat

Mempererat kerukunan antar masyarakat merupakan langkah fundamental dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui dialog antarkelompok, kegiatan gotong royong, serta penguatan peran tokoh masyarakat, agama, dan pemuda sebagai agen perdamaian. Dengan meningkatkan toleransi dan kolaborasi lintas komunitas, konflik sosial dapat diminimalisasi, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan mendukung program-program pembangunan.

2. Inventarisasi Seluruh Sumber Daya Pembangunan

Inventarisasi sumber daya pembangunan meliputi pemetaan sumber daya alam, manusia, infrastruktur, dan kelembagaan untuk merancang perencanaan yang tepat sasaran. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (GIS), pemerintah kabupaten dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan daerah secara akurat. Hasil inventarisasi ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berbasis data, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan merata.

3. Meningkatkan Kualitas SDM (Kapasitas dan Daya Tahan Kesehatan)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Program pelatihan vokasi, akses pendidikan yang inklusif, serta kampanye hidup sehat dan pencegahan stunting merupakan langkah strategis untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan masyarakat yang produktif. Selain itu, penguatan fasilitas kesehatan dan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat akan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap berbagai permasalahan kesehatan.

4. Membangun Infrastruktur Kawasan Strategis Sosial-Ekonomi Kabupaten

Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis, seperti jalan, jembatan, pasar, dan jaringan utilitas, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan industri kecil, pariwisata, dan pusat perdagangan perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan mobilitas,

menarik investasi, dan memperluas kesempatan kerja, sehingga mendorong kemajuan sosial-ekonomi kabupaten.

5. Identifikasi Potensi Investasi Daerah

Identifikasi potensi investasi dilakukan dengan menganalisis sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Penyusunan profil investasi, kemudahan perizinan, dan promosi melalui berbagai platform diperlukan untuk menarik minat investor. Dengan meningkatnya realisasi investasi, kabupaten dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

6. Identifikasi dan Penetapan Kawasan Strategis Penanganan Lingkungan dan Kebencanaan

Penetapan kawasan strategis lingkungan dan kebencanaan bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga kelestarian alam. Langkah-langkah seperti pemetaan daerah rawan bencana, pelatihan tanggap darurat, dan rehabilitasi ekosistem (reboisasi, penanaman mangrove) harus dilakukan secara terencana. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dan penyadaran lingkungan akan menciptakan ketahanan yang lebih baik terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

7. Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Efisiensi tata kelola pemerintahan dicapai melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan transparansi kebijakan. Dengan menerapkan sistem e-government dan pelayanan satu pintu, birokrasi dapat lebih cepat, akuntabel, dan minim korupsi. Penguatan sistem pengawasan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 4.7

**Penyelarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026
dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur.**

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Pamekasan
P1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P5-Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	PP-1: Mempererat Kerukunan Antar Masyarakat
P3-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	P2-Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	PP-2: Inventarisasi Seluruh Sumber Daya Pembangunan
	P4-Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	PP4: Membangun Infrastruktur Kawasan Strategis Sosial-Ekonomi Kabupaten
P4-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	P3-Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	PP-3: Meningkatkan Kualitas SDM (Kapasitas dan Daya Tahan Kesehatan)
P5-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P6-Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	PP-5: Identifikasi Potensi Investasi Daerah
P2-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Pamekasan
P6-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P7-Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	PP-5: Identifikasi Potensi Investasi Daerah
	P1- Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	
P7-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P8-Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	PP-7: Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan
P8-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P9-Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PP-1: Mempererat Kerukunan Antar Masyarakat
		PP-6: Identifikasi dan Penetapan Kawasan Strategis Penanganan Lingkungan dan Kebencanaan

Berdasarkan tabel penyelarasan di atas, diketahui bahwa telah memenuhi azas keselarasan antara Tema RKPD Kabupaten Pamekasan tersebut dengan Tema RKP tahun 2026 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Tmur tahun 2026

Tahap selanjutnya adalah identifikasi program nomenklatur Perangkat Daerah (PD) yang mendukung Tema RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam table di bawah ini.

Tabel 4.8
Pemetaan Program Prioritas RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Mempererat Kerukunan Antar Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan dan Kelurahan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Inventarisasi Seluruh Sumber Daya Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Meningkatkan Kualitas SDM (Kapasitas dan Daya Tahan Kesehatan)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD SMART dan RSUD Waru
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan RSUD Waru
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas, RSUD SMART dan RSUD Waru
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Membangun Infrastruktur Kawasan Strategis Sosial-Ekonomi Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
5	Identifikasi Potensi Investasi Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
6	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Strategis Penanganan Lingkungan dan Kebencanaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2026	NOMENKLATUR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pemetaan program prioritas sebagaimana teridentifikasi dalam tabel di atas, dijadikan acuan dalam perumusan program dalam Renja perangkat daerah tahun 2026.

4.3 Intervensi SPM

4.3.1 Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pendidikan Dasar
- c) Pendidikan Kesetaraan

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana PAUD yang memadai
2. Pemenuhan perlengkapan sekolah dan alat praktik peraga PAUD
3. Pemenuhan Tenaga Pendidik yang kompeten.
4. Pemenuhan lembaga PAUD yang memiliki akreditasi minimal B.
5. Implementasi kurikulum PAUD sesuai dengan kebutuhan

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang memadai
2. Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi
3. Implementasi kurikulum sesuai kebutuhan secara optimal

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan:

1. Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi
2. Implementasi kurikulum sesuai kebutuhan secara optimal
3. Optimalisasi lembaga kesetaraan dalam menjaring warga belajar yang putus sekolah/belum pernah bersekolah
4. Optimalisasi Bantuan Operasional bagi warga belajar yang tidak terjangkau BOP kesetaraan

4.3.2 Kesehatan

Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan terdapat 12 layanan diantaranya:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency* virus;

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak;
2. Peningkatan layanan kesehatan ibu;
3. Pemetaan persalinan beresiko;
4. Peningkatan home care;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan;
6. Percepatan penanganan kesehatan ibu dan anak dengan Tim PENAKIP;
7. Peningkatan jaminan kesehatan dengan adanya program UHC;
8. Pemanfaatan sistem rujukan program Pamekasan Call Care (PCC);
9. Standarisasi daya tampung rumah sakit terhadap jumlah pendudukan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan pelayanan kesehatan balita;

1. Meningkatkan upaya pencegahan dengan imunisasi;
2. Peningkatan capaian imunisasi;
3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam jumlah Imunisasi.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

1. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
2. Meningkatkan upaya kesehatan Berbasis Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
3. Peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular;
4. Peningkatan edukasi PHBS terhadap masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus* ;

1. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
2. Meningkatkan upaya kesehatan Berbasis Masyarakat dan promosi kesehatan;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan terpadu (Pandu PTM) dan posbindu;
4. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular;
5. Pemetaan lokus persebaran penyakit;
6. Peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular;
7. Peningkatan edukasi PHBS terhadap masyarakat;
8. Peningkatan kualitas posyandu dan UKBM.

4.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih perumahan dan permukiman.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- 1) Meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah sistem off-site di kawasan permukiman.
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah terpusat/komunal.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

4.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

1. Penanganan **Kebencanaan** dengan cara melakukan koordinasi dengan BPBD terkait Wilayah dan kondisi rumah korban Bencana.
2. Koordinasi dengan Kepala Desa setempat, masyarakat yang terkena Bencana.
3. Percepatan penanganan Pembangunan / rehab rumah bagi korban bencana sesuai kondisi di lapangan dan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah
4. penanganan Kebencanaan mengingat kebencanaan tergolong status kecil dari factor alam dari angin Putting beliung, melalui penyediaan unit perbaikan pembangunan /rehab rumah bagi korban bencana per tahunnya ± 50 Unit. Dengan anggaran per unit sebesar 17.500.000
5. Pendampingan Oleh Tenaga Fasilitator lapangan dan kepala desa.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

1. Penanganan Masyarakat yang **terkena relokasi** , sampai saat ini belum ada mengingat status bencana yang ada di Pamekasan tergolong kecil (Banjir dan Angin Putting Beliung).
2. Relokasi bagi ruma terkena Bencana, belum ada mengingat status kebencanaan kecil.

4.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota;

1. Mengintegrasikan SPM ke dalam Dokrenda.
2. Mengutamakan anggaran SPM jika terjadi refocusing anggaran.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sumber daya aparatur.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana:

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana).

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana.

3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana).
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam).
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

1. Layanan pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan dan evakuasi.
2. Pemeriksaan rutin peralatan pemadam kebakaran di bangunan, seperti apar sprinkler dan detektor asap.
3. Latihan evakuasi dan simulasi kebakaran untuk memastikan warga dan petugas tahu cara merespon situasi darurat.
4. Mempertimbangan kondisi bidang Pemadam Kebakaran dalam penyelamatan keselamatan masyarakat.

4.3.6 Sosial

Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;

1. Penyediaan Permakanan;
2. Penyediaan Sandang;
3. Penyediaan Alat Bantu;
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
7. Pemberian Layanan Kedaruratan;
8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
9. Pemberian Layanan Rujukan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

1. Penyediaan Permakanan;
2. Penyediaan Sandang;
3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
7. Pemberian Layanan Rujukan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

1. Penyediaan Permakanan;
2. Penyediaan Sandang;
3. Penyediaan Alat Bantu;
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
7. Pemberian Layanan Kedaruratan;
8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
9. Pemberian Layanan Rujukan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;

1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan,
4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dan Pemberian Layanan Rujukan;

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

1. Penyediaan Makanan,
2. Penyediaan Sandang,
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi,
4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dan
5. Pelayanan Dukungan Psikososial.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bagian ini disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh Perangkat Daerah beserta rencana aggarannya pada tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi dan kontribusi setiap Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang diampu dalam mendukung pencapaian target di tahun berkenaan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Program sebagaimana dimaksud telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2026 adalah **“Penguatan Landasan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi melalui Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan”** dengan arah kebijakan atau prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Mempererat Kerukunan Antar Masyarakat;
2. Inventarisasi Seluruh Sumber Daya Pembangunan;
3. Meningkatkan Kualitas SDM (Kapasitas dan Daya Tahan Kesehatan);
4. Membangun Infrastruktur Kawasan Strategis Sosial-Ekonomi Kabupaten;
5. Identifikasi Potensi Investasi Daerah;
6. Identifikasi dan Penetapan Kawasan Strategis Penanganan Lingkungan dan Kebencanaan;
7. Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan;

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2026, kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pamekasan diproyeksikan mengalami peningkatan. Meskipun meningkat namun proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026 dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor



global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Pada tabel 5.1, akan disajikan seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang disertai pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2026 menjadi pijakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026. Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rensra Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dengan memperhatikan arahan kebijakan bidang urusan serta amanat peraturan perundang-undangan. Rencana program dalam RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 disajikan pada beberapa tabel di bawah, sedangkan informasi lebih rinci dimuat pada Lampiran (sesuai input pada SIPD).

Tabel 5.1

Program Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. PAMEKASAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						614,171,521,899.00							10,000,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						612,488,721,899.00							0.00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						612,488,721,899.00							0.00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						487,101,935,899.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.1	81.5	81.6	81.7	487,101,935,899.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			100	35,000,000.00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman	-			100	484,710,189,711.00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5576 Orang/bulan	484,710,189,711.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	240,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,043,746,188.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	-			100	198,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	98,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				182 Satuan Pendidikan	25,585,610,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1953 Orang	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1575 Orang	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		[Meningkatkan mutu dan akses pendidikan sekolah menengah pertama]	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	98.96	100	100	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				182 Satuan Pendidikan	65,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	400,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	546,240,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan usia dini]	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	98.14	98.08	98.09	98.1	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	-			100	24,325,126,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				17 Unit	2,800,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				907 Satuan Pendidikan	16,055,580,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				39 Orang	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30 Orang	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		[Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan usia dini]	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	98.14	98.08	98.09	98.1	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		[Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan usia dini]	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	98.14	98.08	98.09	98.1	125,346,786,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				105 Paket	5,249,546,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				5 Unit	240,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				5 Unit	520,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0016 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																
			Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya				1 Unit	185,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		10,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						217,132,405,058.00						0.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150,109,325,451.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						150,109,325,451.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,124,084,701.00						-	0.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya perencanaan, pengukuran, pelaporan & evaluasi kinerja Perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.40	81.50	81.65	81.80	5,124,084,701.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	135,914,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	67,957,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	67,957,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	128,847,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	128,847,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	23,785,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	14,407,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	9,378,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	27,183,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	27,183,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	432,819,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	18,128,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	49,757,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4200 Paket	192,736,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	70,329,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	101,869,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	270,550,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	128,951,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	122,287,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	76,661,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	34,998,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	34,998,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						140,516,440,700.00						-	0.00	
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan merata]	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Usia Harapan Hidup (UHH)	75,05 9	49 73,66	1262 13 73,88	12 74,18	140,516,440,700.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32,897,614,599.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas																
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun				8 Unit	21,221,794,530.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas																
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	657,659,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0 Unit	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				40 Unit	1,009,670,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12665 Orang	170,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50953 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				134383 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				649352 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	190,430,361.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30980 Orang	211,658,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10327 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1681 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	154,057,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	1,333,922,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	78,334,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,836,037,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	1,836,037,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						747,915,050.00						-	0.00	
		[Meningkatnya kualitas sarana kefarmasian dan alat kesehatan]	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan memenuhi standar	100	-	100	100	747,915,050.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	114,885,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0 Dokumen	114,885,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	165,300,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0 Dokumen	165,300,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	103,897,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0 Dokumen	103,897,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	81,104,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				0 Dokumen	81,104,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	282,729,050.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				0 Unit	282,729,050.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						472,592,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	50	-	30	35	472,592,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	154,800,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	154,800,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	154,800,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	154,800,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	162,992,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	162,992,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						67,023,079,607.00							0.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						67,023,079,607.00							0.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						67,023,079,607.00						-	0.00	
	-	-	-	-	-	-	-	67,023,079,607.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	67,023,079,607.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	67,023,079,607.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PROPPPO						4,747,882,604.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,747,882,604.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,747,882,604.00							0.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,927,865,604.00						-	0.00	
		[Terlaksananya Perencanaan Pengukuran Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah]	-	-	-	-	-	3,927,865,604.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3,927,865,604.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	3,927,865,604.00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						812,763,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	812,763,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	812,763,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					653 Orang	83,233,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					5186 Orang	24,850,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					43 Orang	6,450,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					631 Orang	9,600,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2 Dokumen	258,776,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PROPPPO

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				898 Orang	103,281,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6838 Orang	22,575,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	1,750,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				843 Orang	5,625,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	196,065,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	1,175,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	8,600,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	16,625,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	7,650,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	79,051,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	121,691,640.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2,725,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	375,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				2 Dokumen	21,250,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				8 Dokumen	52,200,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						14,961,000.00						-	0.00	
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas]	-	-	-	-	-	14,961,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14,961,000.00			-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	14,961,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PANAGUAN
		PUSKESMAS TLANAKAN							4,143,379,000.00						0.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						643,379,000.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						643,379,000.00							0.00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						635,065,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	635,065,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	635,065,000.00			-	-	-	-	0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560 Orang	95,200,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5218 Orang	10,425,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	24,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	9,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	194,461,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	1,325,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	10,250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	37,250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				80 Orang	2,300,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	69,153,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				7 Dokumen	139,802,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	4,700,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				5 Dokumen	449,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	7,700,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				3 Dokumen	29,050,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						8,314,000.00						-	0.00			
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas]	Usia Harapan Hidup (UHH)	1	1	1	1	8,314,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8,314,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	8,314,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	X	NON URUSAN						3,500,000,000.00							0.00			
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3,500,000,000.00							0.00			
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,500,000,000.00						-	0.00			
	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3,500,000,000.00			-	-	-	-	0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0.00	PUSKESMAS TLANAKAN		
		PUSKESMAS BANDARAN							3,007,866,968.00								0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,007,866,968.00							0.00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,007,866,968.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,380,461,968.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat]	-	-	-	-	-	2,380,461,968.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,380,461,968.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,380,461,968.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						617,527,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	617,527,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	617,527,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				388 Orang	84,400,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3986 Orang	14,700,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				480 Orang	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				61 Orang	8,550,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	185,137,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Bandaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0.00	PUSKESMAS BANDARAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	3,750,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PADEMAWU		
1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	2,900,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajet kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PADEMAWU		
1.02.02.2.02.0048Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				99 Dokumen	33,650,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PADEMAWU		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						11,639,000.00						-	0.00			
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas]	-	-	-	-	-	11,639,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11,639,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PADEMAWU		
1.02.05.2.03.0001Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7 Dokumen	11,639,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PADEMAWU		
		PUSKESMAS SOPAAH						3,731,881,000.00								0.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,731,881,000.00							0.00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,731,881,000.00							0.00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,076,000,000.00						-	0.00			
		[Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan kewenangan kabupaten]	-	-	-	-	-	3,076,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3,076,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS SOPAAH		
1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,076,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						652,868,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	652,868,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				612 Orang	106,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6238 Orang	14,075,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan merata]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				79 Orang	9,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				587 Orang	13,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	196,665,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	3,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	3,550,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	12,175,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				790 Orang	1,750,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui tersedianya akses terhadap teknologi kesehatan]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	78,734,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	147,982,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan merata]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	13,737,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	750,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH	
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan merata]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH	
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit]	-	-	-	-	-	652,868,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	50,050,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						3,013,000.00						-	0.00		
		[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	-	-	-	-	-	3,013,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,013,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS SOPAAH	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	3,013,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Sopa'ah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS SOPAAH	
		PUSKESMAS TEJA						2,828,290,000.00								0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,828,290,000.00							0.00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,828,290,000.00							0.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,185,500,000.00						-	0.00	
		[Terlaksananya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	-	-	-	-	-	2,185,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,185,500,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,185,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	-	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						639,540,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	639,540,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	639,540,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75 Orang	58,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5400 Orang	28,571,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	3,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	193,202,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	30,100,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TEJA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3911 Orang	28,375,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				79 Orang	4,800,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	11,925,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	228,079,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1,700,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	11,100,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	21,732,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				97 Orang	3,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	95,575,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	177,063,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	43,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen Dokumen	3,944,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	7,150,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				2 Dokumen	75,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						14,000,000.00						-	0.00	
		[Terlaksananya perencanaan Pengukuran Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah]	-	-	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS KOWEL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	14,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KOWEL
		PUSKESMAS LARANGAN						5,629,621,172.00							2,395,244,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,629,621,172.00							2,395,244,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,629,621,172.00							2,395,244,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,234,377,172.00						-	0.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	43,800,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		43,800,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	16,875,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		16,875,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	30,984,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		30,984,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				73 Orang	22,500,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		22,500,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	491,650,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		491,650,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	565,048,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		565,048,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	225,450,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		225,450,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	1,287,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		1,287,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	95,700,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		95,700,000.00	PUSKESMAS LARANGAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	121,800,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2719 Orang	6,600,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	900,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				331 Orang	3,150,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	152,144,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	3,400,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	7,875,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	1,475,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	74,501,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	124,124,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	2,600,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	99,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				4 Dokumen	1,400,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	42,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1,228,000.00						-	0.00	
		[Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota]	-	-	-	-	-	1,228,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,228,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS TALANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	1,228,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TALANG
		PUSKESMAS GALIS						3,422,346,000.00							0.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	7,200,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	121,631,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahragra														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahragra				0 Dokumen	21,600,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	6,525,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	25,500,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	2,500,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	41,250,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	120,215,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	1,850,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	9,950,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				0 Dokumen	40,925,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						39,100,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	-	-	-	-	-	39,100,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	39,100,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS GALIS
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	39,100,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS GALIS
		PUSKESMAS KADUR						4,775,138,665.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,775,138,665.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,775,138,665.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,236,481,665.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat]	-	-	-	-	-	4,236,481,665.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4,236,481,665.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4,236,481,665.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						534,859,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	534,859,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				29 Dokumen	66,934,500.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	120,210,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	6,700,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	400,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	6,600,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				6 Dokumen	41,325,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						3,798,000.00						-	0.00	
		[Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten / Kota]	-	-	-	-	-	3,798,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,798,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS KADUR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3,798,000.00	Kab. Pamekasan, Kadir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS KADUR
		PUSKESMAS PAKONG						4,424,849,000.00							0.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	269,666,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	2,750,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	25,800,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	15,044,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				708 Orang	3,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	80,443,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	179,101,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3,900,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	14,870,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				10 Dokumen	64,925,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7,800,000.00						-	0.00	
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas]	-	-	-	-	-	7,800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7,800,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PAKONG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	7,800,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PAKONG
		PUSKESMAS PEGANTENAN						4,796,983,000.00							4,764,446,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,796,983,000.00							4,764,446,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,796,983,000.00							4,764,446,000.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,072,510,000.00						-	4,040,000,000.00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan kewenangan kabupaten]	Rata-rata Hasil survey kepuasan pasien Puskesmas (1 tahun 2 kali)	95	83	84	85	4,072,510,000.00	-	-	-	-	-	-	4,040,000,000.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4,072,510,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	4,040,000,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4,072,510,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		4,040,000,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						700,598,000.00						-	700,571,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	700,598,000.00	-	-	-	-	-	-	700,571,000.00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700,598,000.00			-		-	-	700,571,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				863 Orang	107,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		107,200,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6519 Orang	33,750,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		33,750,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3,000,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				808 Orang	4,700,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4,700,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	500,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				500,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	204,052,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		204,025,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3,250,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-		3,250,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	11,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11,500,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	16,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		16,000,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				324 Orang	7,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7,600,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	49,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		49,400,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				7 Dokumen	173,846,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		173,846,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	3,050,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3,050,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1,500,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	8,250,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8,250,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				5 Dokumen	73,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		73,000,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						23,875,000.00						-	23,875,000.00	
		[Jumlah Kegiatan Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas]	-	-	-	-	-	23,875,000.00	-	-	-	-	-	-	23,875,000.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23,875,000.00			-	-	-	-	23,875,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	23,875,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		23,875,000.00	PUSKESMAS PEGANTENAN
		PUSKESMAS BULANGAN HAJI														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,662,670,000.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,662,670,000.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,900,000,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	1,900,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1,900,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS BULANGAN HAJI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				847 Orang	3,950,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	161,226,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	2,900,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5,250,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5,085,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	89,666,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	106,493,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				5 Dokumen	2,300,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				5 Dokumen	6,050,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PALENGGAAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				652 Orang	87,150,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7052 Orang	23,850,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				96 Orang	17,700,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				484 Orang	10,850,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	183,507,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2,296,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	8,400,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	15,875,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				96 Orang	1,800,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	104,668,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	135,585,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	4,200,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	2,475,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1,050,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	7,400,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5,342,000.00						-	0.00	
		[persentase kader pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas]	-	-	-	-	-	5,342,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,342,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,342,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
		PUSKESMAS WARU						4,481,587,612.00							0.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	194,287,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	21,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	7,350,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	28,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24 Orang	2,400,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	89,236,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	154,247,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	60,345,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	1,033,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	11,700,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	33,850,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,975,000.00						-	0.00	
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas]	-	-	-	-	-	2,975,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,975,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS WARU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	2,975,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS WARU
		PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI						3,706,896,000.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,706,896,000.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,706,896,000.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,679,200,000.00						-	0.00	
		[1. terlaksananya perencanaan pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah]	-	-	-	-	-	2,679,200,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2,679,200,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,679,200,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Tampojung Pregih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,019,325,000.00						-	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	63,750,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	700,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	10,500,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	78,550,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	13,440,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 bulan Dokumen	13,440,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						8,371,000.00						-	0.00			
		[Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	-	-	-	-	-	8,371,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8,371,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	8,371,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI		
		PUSKESMAS BATUMARMAR							7,373,427,120.00								0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,373,427,120.00							0.00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7,373,427,120.00							0.00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,413,349,120.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat]	-	-	-	-	-	6,413,349,120.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	6,413,349,120.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6,413,349,120.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						958,194,000.00						-	0.00	
		-	-	-	-	-	-	958,194,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	958,194,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	146,250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,825,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	6,175,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	7,375,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	265,891,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS BATUMARMAR

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	105,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7759 Orang	21,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				113 Orang	10,800,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				944 Orang	12,976,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	181,994,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3,900,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	9,800,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	13,930,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				113 Orang	2,700,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	65,225,000.00	-	-	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				7 Dokumen	142,975,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	16,440,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	53,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5,935,000.00						-	0.00	
		[Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas]	-	-	-	-	-	5,935,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,935,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	0.00	PUSKESMAS PASEAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,935,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		0.00	PUSKESMAS PASEAN
		RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						194,016,354,682.00							221,226,035,308.00	
								194,016,354,682.00							221,226,035,308.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						194,016,354,682.00							221,226,035,308.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						191,016,354,682.00						-	216,226,035,308.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan kewenangan kabupaten]	Akreditasi Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo RS Pendidikan	Paripurna Satelit pendidikan	Paripurna Satelit pendidikan	Paripurna Satelit pendidikan	Paripurna Satelit pendidikan	191,016,354,682.00	-	-	-	-	-	-	216,226,035,308.00	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	42,000,000.00			-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	70,000,000.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	42,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		70,000,000.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30,974,354,682.00			-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	31,156,035,308.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				430 Orang/bulan	30,974,354,682.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		31,156,035,308.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,000,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me- ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka- n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	5,000,000,000.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO		
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0.00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM SEHAT Me- ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka- n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO		
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan merata]	Akreditasi Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00	-		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	3,000,000,000.00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM SEHAT Me- ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka- n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000,000.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	0.00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM SEHAT Me- ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mewujudka- n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO		
		RSUD WARU						26,552,877,692.00								0.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Waru Barat	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat yang menerima pelayanan Kesehatan di RSUD Waru		0.00	RSUD WARU
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				60 Paket	1,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Waru Barat	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat yang menerima pelayanan Kesehatan di RSUD Waru		0.00	RSUD WARU
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2,286,600,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan jenis pelayanan kesehatan tingkat rujukan kewenangan kabupaten]	Jumlah jenis layanan yang dikembangkan	8	8	8	8	2,286,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-			25 Orang	2,286,600,000.00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Masyarakat yang menerima pelayanan Kesehatan di RSUD Waru	-	0.00	RSUD WARU
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	2,286,600,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Waru Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Masyarakat yang menerima pelayanan Kesehatan di RSUD Waru		0.00	RSUD WARU
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						46,091,943,248.00							20,718,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						46,091,943,248.00							20,718,000,000.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						46,091,943,248.00							20,718,000,000.00	
	1.1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,436,943,248.00						-	6,000,000,000.00	
		[Meningkatkan Nilai SAKIP]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83.5	80.9	81	81.5	8,436,943,248.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000,000.00	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100	83,917,100.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	50,061,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	157,479,317.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	-			100	1,165,100,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	273,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	891,600,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			100	777,462,952.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	49,984,100.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	410,035,852.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	49,943,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	267,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						4,800,000,000.00						-	3,075,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air]	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota Persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	16.13 52.97 53.75 61.88	16.13 44.515 49.03 52.97	16.13 47.555 50.11 52.97	16.13 50.485 50.97 52.97	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Pantai dan Pengaman Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	-			50%	1,200,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				5 Unit	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air]	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota Persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	16.13 52.97 53.75 61.88	16.13 44.515 49.03 52.97	16.13 47.555 50.11 52.97	16.13 50.485 50.97 52.97	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,6 KM	400,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	-			50.97%	3,600,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	3,075,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.4 KM	1,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah														
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan				0.45 KM	1,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		550,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.4 KM	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah														
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi				0.35 KM	1,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		450,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.3 KM	600,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah														
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.4 KM	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air]	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota Persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	16.13 52.97 53.75 61.88	16.13 44.515 49.03 52.97	16.13 47.555 50.11 52.97	16.13 50.485 50.97 52.97	4,800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,075,000,000.00	-
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				6 Lembaga	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		75,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1,025,000,000.00						-	2,760,000,000.00	
		[Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase yang mendukung Jalan dalam Kondisi Mantap]	Prosentase Penambahan Saluran drainase dalam Kondisi Baik	5.87	0.23	2.27	4.87	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,760,000,000.00	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang ditangani	-			3596	1,025,000,000.00			-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-	-	2,760,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				110 M	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Meter	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,760,000,000.00	-
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Lingkungan	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase yang mendukung Jalan dalam Kondisi Mantap]	Prosentase Penambahan Saluran drainase dalam Kondisi Baik	5.87	0.23	2.27	4.87	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,760,000,000.00	-
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				10 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,760,000,000.00	-
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase yang mendukung Jalan dalam Kondisi Mantap]	Prosentase Penambahan Saluran drainase dalam Kondisi Baik	5.87	0.23	2.27	4.87	1,025,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,760,000,000.00	-
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				10 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	665,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Reayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						31,380,000,000.00						-	8,008,000,000.00	
		[Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap]	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	62.15	50.15	52.15	54.15	31,380,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,008,000,000.00	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	-			54.15	31,380,000,000.00			-	-	-	-	8,008,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1048,215 KM	800,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	8,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2.8 KM	3,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	31,380,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,008,000,000.00	-
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				1.8 KM	6,920,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatkan jalan dalam kondisi mantap]	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	62.15	50.15	52.15	54.15	31,380,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,008,000,000.00	-
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.5 KM	500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3.9 KM	15,460,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan pengantian				0 Meter	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	31,380,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,008,000,000.00	-
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				0 Meter	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatkan jalan dalam kondisi mantap]	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	62.15	50.15	52.15	54.15	31,380,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,008,000,000.00	-
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.6 KM	3,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				24 Meter	1,200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				3 Jembatan	500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						450,000,000.00						-	875,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	-			4	13,824,896,667.00			-	-	-	-	1,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				32 Liter/Detik	4,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				51 Liter/Detik	9,649,896,667.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1 SR	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						10,761,871,000.00						-	18,489,871,000.00	
	-	-	-	-	-	-	-	10,761,871,000.00	-	-	-	-	-	-	18,489,871,000.00	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	-			2 SPALD	10,761,871,000.00			-	-	-	-	18,489,871,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				1 M ³ /Hari	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD S dan SPALD T)]	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96.9	94.58	95.5	95.78	10,761,871,000.00	-	-	-	-	-	-	18,489,871,000.00	-
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				96 M ³ /Hari	7,811,871,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUGASAN	-	-	-		7,811,871,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				46 M ³ /Hari	2,700,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		9,978,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				20 Desa	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				1 M ³ /Hari	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				35 Orang	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						225,000,000.00						-	500,000,000.00	
		[Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan]	Luasan genangan air wilayah perkotaan	0	249.64	241.71	0	225,000,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	-			2 Sistem	225,000,000.00			-	-	-	-	500,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				120 M	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						100,000,000.00						-	400,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	-			2 Penyelenggara	225,000,000.00			-	-	-	-	257,500,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	125,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,500,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	95,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	-			1 Sistem	20,000,000.00			-	-	-	-	50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	-			88,11 Persen	150,000,000.00			-	-	-	-	472,500,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				70 Paket Pekerjaan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				30 Bangunan Konstruksi	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,500,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				70 Badan Usaha	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7,128,847,566.00							26,820,815,046.00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,708,847,566.00						-	6,420,815,046.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan nilai sakin perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85	81.8	85	85	5,708,847,566.00	-	-	-	-	-	-	6,420,815,046.00	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	-			4 Perencanaan	149,000,000.00			-	-	-	-	160,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				52 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				52 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	69,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			1 Unit Kerja	3,613,315,046.00			-	-	-	-	3,802,915,046.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3,613,315,046.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3,802,915,046.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			38 Orang	70,000,000.00			-	-	-	-	150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				63 Orang	70,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			5 Sarana	170,000,000.00			-	-	-	-	277,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	22,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	28,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	-			2 Prasarana	730,000,000.00			-	-	-	-	850,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	640,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	90,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	-			3 Jasa	696,532,520.00			-	-	-	-	755,900,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6,332,520.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				217 Laporan	120,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	570,200,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		623,900,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			3 Pemeliharaan	280,000,000.00			-	-	-	-	425,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1,000,000,000.00						-	1,000,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17,500,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						50,000,000.00						-	100,000,000.00		
		[Meningkatnya PSU permukiman]	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	-	26.92 Persen	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-			73.34 Persen	50,000,000.00			-	-	-	-	100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30,000,000.00							2,000,000,000.00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						30,000,000.00							2,000,000,000.00		
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						30,000,000.00						-	2,000,000,000.00		
		[Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	0	66.67	73.34	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00	-	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	-			1 Koordinasi	30,000,000.00			-	-	-	-	2,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							11,485,045,904.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11,485,045,904.00							0.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11,485,045,904.00							0.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,388,128,592.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah]	Nilai Sakip OPD	82.35	80.90	81.55	81.75	8,388,128,592.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			20 Dokumen	71,050,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				7 Dokumen	45,050,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	26,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Laporan	5,060,375,892.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	5,060,375,892.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	80,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				61 Paket	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			7 Laporan	20,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	2,822,470,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,670,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,773,800,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	241,732,700.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20,858,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	206,874,700.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	7,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	-			2 Person	30,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						215,000,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	100	100	100	100	215,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				2 Orang	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	215,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	-	-	-	12 Kali	5,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				12 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	850	500	600	650	215,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang di susun tepat waktu	-			100 Persen	45,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-	-	100,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas baik	-			100 Persen	2,409,127,963.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-	-	2,500,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,409,127,963.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		2,500,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat dengan baik	-			100 Persen	6,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-	-	50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	98,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-	-	205,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		5,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		25,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan	-		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		10,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	65,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dengan kualitas baik	-			100 Persen	10,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-	-	50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	389,622,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-	-	410,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54,622,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		60,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	335,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		350,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	225,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-	-	280,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		80,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		170,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		30,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						769,999,995.00						-	1,500,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatkan kualitas layanan penanganan kedaruratan bencana dan kesiapsiagaan bencana]	Persentase Jumlah Warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	769,999,995.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	-			100 Persen	635,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-	-	750,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	505,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		550,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				2 Laporan	120,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketl mpangan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	-		150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur an Ketimangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			1 Laporan	3,410,987,549.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	3,410,987,549.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3,410,987,549.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,410,987,549.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			12	76,500,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	95,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				320 Paket	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		80,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		55,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	18,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						1,120,000,000.00						-	770,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	1,120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	770,000,000.00	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan PSKS Daerah	-			12 Laporan	1,120,000,000.00			-	-	-	-	770,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	360,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0.00	DINAS SOSIAL
		[Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan]	Persentase PSKS yang diberdayakan	100	100	100	100	1,120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	770,000,000.00	-
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				13 Orang	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		160,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				100 Orang	610,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		610,000,000.00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						6,877,239,800.00						-	7,183,500,000.00	
		[Terwujudnya PPKS yang tertangani]	Persentase PPKS yang Tertangani	100	100	100	100	6,877,239,800.00	-	-	-	-	-	-	7,183,500,000.00	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	-			555 Orang	6,877,239,800.00			-	-	-	-	7,183,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terwujudnya Taman Makam Pahlawan yang Dikelola]	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100	100	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000,000.00	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-			113 Makam	45,000,000.00			-	-	-	-	70,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	20,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				113 Makam	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	10,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	37,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	40,000,000.00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA						12,312,615,472.00							12,645,531,829.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12,312,615,472.00							12,645,531,829.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4,047,440,972.00							4,345,857,329.00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,771,713,972.00						-	4,054,157,329.00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	90	-	85	90	3,771,713,972.00	-	-	-	-	-	-	4,054,157,329.00	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	-			100 Persen	40,525,700.00			-	-	-	-	45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	40,525,700.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja keuangan yang disusun tepat waktu	-			100 Persen	3,094,316,122.00			-	-	-	-	3,302,657,329.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,165,300.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	-			80 Persen	30,321,500.00			-	-	-	-	35,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30,321,500.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terbayarkan	-			100 Persen	378,463,450.00			-	-	-	-	396,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	69,728,750.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	139,620,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		146,120,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-	-	-	-	-	411,651,500.00	-	-	-	-	-	-	431,151,500.00	-
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				4 Laporan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		70,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2	2.13	2.09	2	411,651,500.00	-	-	-	-	-	-	431,151,500.00	-
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				1 Dokumen	57,831,500.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60,831,500.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						3,375,523,000.00						-	3,375,523,000.00	
		[Meningkatnya kesertaan KB Aktif]	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)mCPR	4.5 78.8	4.6 60.8	4.5 63.8	4.5 66.8	3,375,523,000.00	-	-	-	-	-	-	3,375,523,000.00	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kehamilan tidak direncanakan (KTD)	-			7.3 Persen	1,007,848,000.00			-	-	-	-	1,007,848,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Laporan	502,848,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		502,848,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	130,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				73 Dokumen	125,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		125,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				32 Organisasi	250,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	-			92.5 Persen	1,226,000,000.00			-	-	-	-	1,226,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				189 Orang	1,226,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		1,226,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	-			77.95 Persen	867,635,000.00			-	-	-	-	867,635,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	30,570,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		30,570,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	130,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya	-			51.12 Persen	4,348,000,000.00			-	-	-	-	4,353,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
			Cakupan Pemantauan Data dan informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1,965,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		1,965,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	2,358,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		2,358,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga																	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	-	-		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						37,370,906,951.00								35,715,000,000.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						510,000,000.00							350,000,000.00		
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						510,000,000.00							350,000,000.00		
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						140,000,000.00							200,000,000.00		
		{ Terjadanya pola pangan masyarakat }		Nilai PPH	72.70	71	72.50	72.70	140,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya sumber pangan pokok dan pangan	-			1 Laporan	50,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	-			1 laporan	90,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	125,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						360,000,000.00						-	125,000,000.00	
		[Berkurangnya desa/kelurahan rawan pangan]	Penyediaan cadangan pangan pemerintah	10	9	10	10	360,000,000.00	-	-	-	-	-	-	125,000,000.00	-
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapatkan penanganan rawan pangan	-			4 Desa	360,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	125,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						10,000,000.00						-	25,000,000.00	
		[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	20	20	20	20	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang aman	-			1 Dokumen	10,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	25,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						36,860,906,951.00							35,365,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						36,860,906,951.00							35,365,000,000.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						19,870,045,895.00						-	20,215,000,000.00	
		[Meningkatkan Nilai SAKIP]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87	81	82	83	19,870,045,895.00	-	-	-	-	-	-	20,215,000,000.00	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			2 Dokumen	35,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			173 Unit	17,984,045,895.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	18,100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				177 Orang/bulan	17,984,045,895.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		18,100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			15 Laporan	21,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	21,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi	-			2 Dokumen	61,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	125,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			2 Laporan	1,705,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	1,765,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	155,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		165,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,550,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-		1,600,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			2 Laporan	64,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	1,500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		1,750,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		150,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						150,000,000.00						-	375,000,000.00	
		[Meningkatkan cakupan layanan kesehatan hewan]	Menurunnya Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	26	20	21	22	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	375,000,000.00	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-			2 Laporan	50,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		100,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pengeluaran dan pemasukan HPM ke Wilayah Kabupaten Pamekasan	-			1 Laporan	25,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		75,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pelayanan kesehatan hewan	-			1 Laporan	50,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	150,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		150,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Data Pengawasan Peredaran Bahan Pangan Asal Hewan di Pasar Tradisional dan Data Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	-			5 Laporan	25,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				2 Unit Usaha	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		50,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						15,000,000.00						-	30,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						2,260,000,000.00						-	1,967,300,000.00	
		[Terwujudnya Sistem Pengolahan Sampah Regional yang terorganisir]	Kapasitas daya tampung TPA, TPS3R, dan TPS	1088625	300,635	300,665	452,885	2,260,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,967,300,000.00	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA, TPS3R, dan TPS yang beroperasi	-			47 unit	2,260,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Kecamatan, Desa/ keluaran, area pelayanan kebersihan	-	1,967,300,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				10 Unit	365,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Kecamatan, Desa/ keluaran, area pelayanan kebersihan		15,450,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				6 Ton/hari	1,895,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Kecamatan, Desa/ keluaran, area pelayanan kebersihan		1,951,850,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17,854,435,350.00							15,762,567,500.00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						17,854,435,350.00							15,762,567,500.00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,473,935,350.00						-	9,758,152,500.00	
		[Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	A (82,40)	A (82, 60)	A (81,75)	A (82,00)	9,473,935,350.00	-	-	-	-	-	-	9,758,152,500.00	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			101 Dokumen	64,159,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja dinas	-	66,083,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	40,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja dinas		41,715,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				99 Laporan	23,659,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja dinas		24,368,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan	-			26 Dokumen	8,551,026,302.00			Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	ASN	-	8,807,557,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	8,551,026,302.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	ASN		8,807,557,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			19 ASN	12,000,000.00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	ASN, non ASN	-	12,360,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	12,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	ASN, non ASN		12,360,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			14 unit	185,500,000.00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa i nfrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran	-	191,065,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		3,605,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	90,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		92,700,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	4,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		4,635,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1500 Paket	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		7,725,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		5,150,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Sarana perkantoran		77,250,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				4 Dokumen	180,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	DAS (daerah aliran sungai), lahan kritis, sumber mata air		185,400,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	-			1 usaha/ kegiatan	75,000,000.00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	usaha/kegiatan	-	77,250,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa I nfrastruktur dan Lingkungan	usaha/kegiatan		77,250,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan	-			27185.58 Ha	3,800,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Ruang terbuka hijau	-	1,339,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				69,05 Ha	3,800,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Ruang terbuka hijau		1,339,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						25,000,000.00						-	25,750,000.00	
		[Meningkatnya Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)]	Persentase bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya beracun yang terkelola	100	-	0	100	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,750,000.00	-
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha / kegiatan berizin yang melaporkan Limbah B3	-			27 usaha/ kegiatan	25,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	usaha/kegiatan	-	25,750,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Masyarakat/kelompok masyarakat, lembaga pendidikan		15,450,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						120,000,000.00						-	123,600,000.00	
		[Terwujudnya Pemberian Apresiasi Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Jumlah kelompok/lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah	15	10	12	15	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	123,600,000.00	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Lomba	120,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Desa/kelurahan, lembaga pendidikan, pondok pesantren	-	123,600,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				45 Entitas	120,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Desa/kelurahan, lembaga pendidikan, pondok pesantren		123,600,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						12,000,000.00						-	12,360,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya Penindaklanjutan Laporan Aduan Lingkungan Hidup]	Persentase Tingkat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	12,000,000.00		-	-			-	12,360,000.00	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	-			12 pengaduan	12,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	masyarakat	-	12,360,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				12 Pengaduan	12,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	masyarakat		12,360,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3,850,000,000.00						-	3,914,000,000.00	
		[Meningkatkan kapasitas penanganan persampahan]	Persentase volume sampah yang tertangani	61.8	61.50	61.55	61.60	3,850,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,914,000,000.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani di TPA	-			48216.99 ton	3,850,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	TPS3R, TPS, area pelayanan, sampah insedentil		3,914,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				30 Kelompok	350,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	TPS3R, TPS, area pelayanan, sampah insedentil		309,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				48216 Ton	3,500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	TPS3R, TPS, area pelayanan, sampah insedentil		3,605,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7,353,258,147.00							7,772,289,472.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,353,258,147.00							7,772,289,472.00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7,353,258,147.00							7,772,289,472.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,647,472,147.00						-	7,046,628,472.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80.50	80.40	80.50	80.50	6,647,472,147.00	-	-	-	-	-	-	7,046,628,472.00	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	-			6 Dokumen	77,500,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	81,375,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		73,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,875,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana secara tepat waktu	-			100 Persen	3,391,355,897.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	3,559,303,067.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3,358,955,897.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,526,903,067.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,400,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		32,400,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-			100 Persen	25,000,000.00			-	-	-	-	25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			-				-	25,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	-			-	995,146,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	1,039,896,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	895,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		939,750,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	20,141,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,141,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5,005,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,005,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,000,000.00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		75,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan	-			97.7 Persen	1,551,683,100.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	1,734,267,255.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1,551,683,100.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		1,734,267,255.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	38,536,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		38,536,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan secara tepat waktu	-			95 Persen	149,250,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	149,250,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	149,250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		149,250,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						20,000,000.00						-	20,000,000.00	
		[Tersedianya profil kependudukan]	Persentase profil kependudukan yang diterbitkan secara tepat waktu	100	100	100	100	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Disusun Tepat Waktu	-			2 Dokumen	20,000,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,138,371,939.00							8,537,925,289.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,138,371,939.00							8,537,925,289.00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,138,371,939.00							8,537,925,289.00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,463,371,939.00						-	3,847,925,289.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87	81	82	83	3,463,371,939.00	-	-	-	-	-	-	3,847,925,289.00	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			40 Dokumen	120,000,000.00			-	JATIM SEJAJHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketimpangan	-	-	140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	85,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			90,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			7,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			7,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			7,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			7,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			27 Orang	35,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			84 Unit	113,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			151,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			4,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan			25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		-	-	-	-	-	-	3,463,371,939.00	-	-	-	-	-	-	3,847,925,289.00	-
	2.13.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	2,671,425,289.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-	-	2,871,425,289.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	2,671,425,289.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		2,871,425,289.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						275,000,000.00						-	425,000,000.00	
		[Meningkatkan Efektifitas Kerja Sama Desa]	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100	100	100	275,000,000.00	-	-	-	-	-	-	425,000,000.00	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	-			100 Persen	275,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-	-	425,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	175,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						2,900,000,000.00						-	3,515,000,000.00	
		[Meningkatkan Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100	100	100	2,900,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,515,000,000.00	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase Desa yang dibina - Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan -Persentase Desa yang melakukan evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan sesuai dengan regulasi	-			100 Persen	2,900,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-	-	3,515,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	-			100 Persen	500,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-	-	750,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	350,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan	-		350,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						29,708,335,657.00							29,083,897,495.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29,708,335,657.00							29,083,897,495.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						29,708,335,657.00							29,083,897,495.00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,925,298,757.00						-	6,216,172,145.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,996,800.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	88,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	-	-	-	-		90,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	269,958,411.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	-	-	-	-		280,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	188,712,000.00			-	-	-	-	195,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	115,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	23,730,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	49,982,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						23,783,036,900.00						-	22,867,725,350.00	
		[Meningkatkan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas]	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten Realisasi retribusi parkir Tingkat capaian rencana induk jaringan	42 4,20 4630068000 80	0 4 4630068000	42 4,20 4630068000 75	42 4,20 4630068000 76	23,783,036,900.00	-	-	-	-	-	-	22,867,725,350.00	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang diadakan	-			3 Paket	17,690,021,277.00			-	-	-	-	16,724,190,277.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit	1,165,831,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	OPSEN PKB	-	-	-		200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				650 Unit	261,999,745.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-	-		261,999,745.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	16,262,190,532.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-	-		16,262,190,532.00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	23,783,036,900.00	-	-	-	-	-	-	22,867,725,350.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola dalam kondisi baik	-			-	14,586,700.00			-	-	-	-	14,586,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	14,586,700.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	OPSEN PKB	-	-	-		14,586,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-			-	5,742,149,450.00			-	-	-	-	5,885,418,400.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	5,742,149,450.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,885,418,400.00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas]	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten Realisasi retribusi parkir Tingkat capaian rencana induk jaringan	42 4,20 4630068000 80	0 4 4630068000	42 4,20 4630068000 75	42 4,20 4630068000 76	23,783,036,900.00	-	-	-	-	-	-	22,867,725,350.00	-
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaporkan	-			1 Laporan	228,000,000.00			-	-	-	-	135,250,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	178,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	OPSEN PKB	-	-	-		85,250,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah yang sesuai ketentuan	-			1 Dokumen	93,279,973.00			-	-	-	-	93,279,973.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			0				2 0	83,279,973.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		83,279,973.00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	23,783,036,900.00	-	-	-	-	-	-	22,867,725,350.00	-
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas]	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten Realisasi retribusi parkir Tingkat capaian rencana induk jaringan	42 4,20 4630068000 80	0 4 40 4630068000	42 4,20 4630068000 76	42 4,20 4630068000 76	23,783,036,900.00	-	-	-	-	-	-	22,867,725,350.00	-
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui	-			Laporan	14,999,500.00			-	-	-	-	15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	14,999,500.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10,009,761,756.00							9,955,354,824.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10,009,761,756.00							9,955,354,824.00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9,690,761,756.00							9,636,354,824.00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,999,511,756.00						-	5,129,504,824.00	
		[meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82	82.5	82	82	4,999,511,756.00	-	-	-	-	-	-	5,129,504,824.00	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			6 Dokumen	104,000,000.00			-	-	-	-	112,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	72,500,000.00	Kab. Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	17,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			1 OPD	3,378,006,932.00			-	-	-	-	3,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,378,006,932.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			10 Orang	59,000,000.00			-	-	-	-	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	59,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			1 Kantor	91,483,044.00			-	-	-	-	95,483,044.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perengangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	19,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	9,148,044.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9,148,044.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8,335,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8,335,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	-			8 Unit	67,021,780.00			-	-	-	-	67,021,780.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	67,021,780.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		67,021,780.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			5 Jasa	1,141,200,000.00			-	-	-	-	1,141,200,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	151,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		151,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	990,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		990,200,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-			26 Unit	158,800,000.00			-	-	-	-	163,800,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Persentase	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomend asi	189,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				50 Media	862,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		862,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				11 Konten	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				1 Orang	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						3,464,850,000.00						-	3,464,850,000.00	
		[Meningkatkan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi]	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.50	0	11	11.84	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-			100 Persen	8,000,000.00			-	-	-	-	8,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Layanan TIK diseluruh Perangkat Daerah yang berfungsi]	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase perangkat Daerah yang memanfaatkan sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Layanan TIK dalam kondisi Baik	100 4	0 100	100 4	100 4	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-			100 Persen	3,456,850,000.00			-	-	-	-	3,456,850,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	18,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi]	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.50	0	11	11.84	3,464,850,000.00	-		-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				42 Perangkat Daerah	3,120,850,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	3,120,850,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Layanan TIK diseluruh Perangkat Daerah yang berfungsi]	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase perangkat Daerah yang memanfaatkan sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Layanan TIK dalam kondisi Baik	100 4	0 100	100 4	100 4	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
		[Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi]	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.50	0	11	11.84	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2 Laporan	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Layanan TIK diseluruh Perangkat Daerah yang berfungsi]	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase perangkat Daerah yang memanfaatkan sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Layanan TIK dalam kondisi Baik	100 4	0 100	100 4	100 4	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
		[Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi]	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.50	0	11	11.84	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Layanan TIK diseluruh Perangkat Daerah yang berfungsi]	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase perangkat Daerah yang memanfaatkan sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Layanan TIK dalam kondisi Baik	100 4	0 100	100 4	100 4	3,464,850,000.00	-	-	-	-	-	-	3,464,850,000.00	-
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						231,000,000.00							231,000,000.00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						231,000,000.00						-	231,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
								15,434,935,636.00								10,126,123,336.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15,324,935,636.00							9,976,123,336.00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1,645,573,075.00							1,375,000,000.00		
1	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1,250,000,000.00						-	900,000,000.00		
		[Pendidikan dan pelatihan kerja]	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	25,358,234.23	24658234,228 24,658,234.23	24,858,234,23 24858234,23	24,958,234.23	1,250,000,000.00	-	-	-	-	-	-	900,000,000.00	-	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	-			112 Orang	1,250,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi	-	900,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
			0				340 0	1,250,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi		900,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						175,373,075.00						-	200,000,000.00		
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	1	70	70	1	175,373,075.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dipublikasikan	-			200 informasi	100,000,000.00			-	-	Pencari kerja kabupaten pamekasan	-	110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja																	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				722 Orang	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pencari kerja kabupaten pamekasan		110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja migran yang dilindungi	-			70 Orang	75,373,075.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	pekerja migran yang dilindungi	-	90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				30 Laporan	10,000,000.00		-	-	-	-		12,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		65,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	-			100 %	936,670,000.00			-	-	-	-	950,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	169,469,400.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		175,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	767,200,600.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		775,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 Unit	242,500,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	275,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	130,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		140,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	12,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	50,373,075.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	KSP/USP Yang Dinilai Status Kesehatannya		70,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						185,373,075.00						-	200,000,000.00	
		[Koperasi jasa, produsen, dan serbausaha dibina pengembangan usahanya]	Persentase koperasi jasa, produsen, dan serbausaha yang dibina pengembangan usahanya	50	50	50	50	185,373,075.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat kapasitasnya	-			100 Unit Usaha	185,373,075.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	koperasi yang meningkat kapasitasnya	-	200,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	185,373,075.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	koperasi yang meningkat kapasitasnya		200,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						850,000,000.00						-	900,000,000.00	
		[Meningkatnya Jumlah Anggota Koperasi]	Jumlah Anggota koperasi simpan pinjam	99	98	98	98	850,000,000.00	-	-	-	-	-	-	900,000,000.00	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	-			10 Unit Usaha	850,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Anggota Koperasi	-	900,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				40 Unit Usaha	850,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Anggota Koperasi		900,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						6,700,000,000.00						-	1,230,000,000.00	
		[Meningkatnya cakupan pembinaan UMKM pada pusat jajanan dan kuliner]	Jumlah UMKM yang diberdayakan pada pusat jajanan dan kuliner	460	353	360	380	6,700,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,230,000,000.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang Diberdayakan	-			100 Unit Usaha	6,700,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	usaha mikro yang Diberdayakan	-	1,230,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	usaha mikro yang Diberdayakan		230,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				125 Unit Usaha	6,500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	usaha mikro yang Diberdayakan		1,000,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		[Bertambahnya Cakupan pemberdayaan usaha mikro]	Jumlah pusat jajanan dan kuliner yang dikelola	0	4	1	1	6,700,000,000.00		-	-		-	-	1,230,000,000.00	-
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						85,373,075.00						-	90,000,000.00	
		[Terlaksananya pengembangan UMKM]	Jumlah usaha mikro baru	3	4	4	4	85,373,075.00		-	-		-	-	90,000,000.00	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	-			50 Unit Usaha	85,373,075.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	usaha mikro yang dikembangkan	-	90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				80 Unit Usaha	85,373,075.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	usaha mikro yang dikembangkan		90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						110,000,000.00							150,000,000.00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						110,000,000.00							150,000,000.00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						110,000,000.00						-	150,000,000.00	
		[Terlaksananya penempatan calon transmigran]	Persentase calon transmigran yang ditempatkan	100	100	100	100	110,000,000.00		-	-		-	-	150,000,000.00	-
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	110,000,000.00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	transmigran yang ditempatkan	-	150,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25,253,600.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		25,253,600.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			1 OPD	3,394,992,881.00			-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	3,394,992,881.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26/12 Orang/bulan	3,295,792,881.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,295,792,881.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	99,200,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		99,200,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		20,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		100,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			7 Jasa	1,600,624,500.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	1,564,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14 Laporan	146,624,500.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	1,454,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		1,414,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			1 Unit	220,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	330,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	90,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		100,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		30,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	110,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		200,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						380,000,000.00						-	360,000,000.00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						325,000,000.00						-	300,000,000.00	
		[Meningkatkan daya tarik destinasi wisata]	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	5 5.29 99	2 2.68 66,67	3 3.26 73.33	3 3.79 80.00	325,000,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000,000.00	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	-			3 Destinasi	325,000,000.00			-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-	-	300,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				80 Unit	275,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Me ingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	-		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						290,000,000.00						-	370,000,000.00	
		[Meningkatkan pemasaran pariwisata]	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana Persentase pemasaran pariwisata Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	100 11 24.07	-49 67 7	75 8 -90	3.91 8 80	290,000,000.00	-	-	-	-	-	-	370,000,000.00	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana	-			8 Kali	290,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketu mpangan	-	-	370,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1000 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketu mpangan	-		20,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	280,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketu mpangan	-		350,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						43,000,000.00						-	60,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Prosentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	41	24	26	30	43,000,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000,000.00	-
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM peserta pembekalan sektor pariwisata atau ekonomi kreatif	-			30 Persen	43,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-	-	60,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				70 Orang	43,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan	-		60,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4,413,390,100.00							5,040,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,413,390,100.00							5,040,000,000.00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4,303,390,100.00							4,850,000,000.00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NKOTA						3,948,390,100.00						-	4,250,000,000.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.25	81	81.25	81.5	3,948,390,100.00	-	-	-	-	-	-	4,250,000,000.00	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang disusun	-			100 Persen	30,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	35,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		35,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-			100 Persen	3,294,790,100.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	3,400,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3,294,790,100.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,400,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-			10 Persen	19,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	35,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	19,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		35,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang disediakan	-			96 Persen	72,600,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	27,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	370,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	410,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		140,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	245,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		270,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	-			90 persen	135,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	220,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpustakaan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		60,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				3 Layanan	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		120,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				250 Eksemplar	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		150,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pembudayaan gemar membaca yang terlaksana	-			96 Persen	100,000,000.00			-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	170,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				15 Perpustakaan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		55,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-			100 Persen	90,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	150,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		75,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		75,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam sistn melalui JIKN	-			1.10 Persen	20,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						5,872,097,631.00							0.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5,872,097,631.00							0.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,872,097,631.00							0.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,194,097,631.00						-	0.00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.5	81	81.25	81.5	4,194,097,631.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			8 dokumen	37,500,000.00			-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-			4 Laporan	3,592,429,531.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,592,429,531.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal			0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			6 ASN	7,500,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal		-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-			5 Pelayanan	67,666,600.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,225,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8,441,500.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,000,100.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esjahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan	-			36 Izin Usaha	7,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03.0003 Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota																
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Rekomendasi	7,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kampung budidaya ikan yang dikembangkan	-			1 Kampung	873,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	-		0.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	803,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						18,000,000.00						-	0.00	
		[Terawasinya sumber daya kelautan dan perikanan]	Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	100 13	10 77	11 85	12 92	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	-			12 Wilayah	18,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				20 Petaku Usaha	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				40 Pelaku Usaha	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						65,000,000.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Produksi Ikan Olahan]	Jumlah produksi ikan olahan	779,000	724,700	733,750	742,800	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang naik kelas	-			1 Kelompok	10,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan	-			14 Kelompok	15,000,000.00			-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				20 Unit Usaha	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan K esejahterraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi ikan	7063	6763	6813	6863	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan pengolahan yang tersedia/disalurkan	-			2 Bahan	40,000,000.00			-	JATIM AGRO Men ingatkan K esejahterra n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	0.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				118 Ton	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingatkan K esejahterra n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
		[Meningkatkan Produksi Ikan Olahan]	Jumlah produksi ikan olahan	779,000	724,700	733,750	742,800	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingatkan K esejahterra n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		0.00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						18,393,042,436.00							18,568,042,436.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						18,393,042,436.00							18,568,042,436.00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						9,688,042,436.00							9,763,042,436.00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,828,042,436.00						-	8,828,042,436.00	
		[Meningkatkan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	100	98.53	100	100	8,828,042,436.00	-	-	-	-	-	-	8,828,042,436.00	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	98,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketim pangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	98,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketim pangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	6,188,586,800.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		6,188,586,800.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang diberikan tepat waktu sesuai standar pelayanan	-			100 Persen	145,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	145,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		15,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		30,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		20,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		30,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	-			20 Persen 1 Pasar	100,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	110,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	110,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		10,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						204,000,000.00						-	229,000,000.00	
		[Terjaganya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya]	Presentase Koefisiensi harga antar waktu	100	100	100	100	204,000,000.00		-	-	-	-	-	229,000,000.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-			100 Persen	185,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	210,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				48 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		20,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	125,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		150,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		[Tersedianya pupuk secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran]	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	100	100	204,000,000.00		-	-		-	-	229,000,000.00	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan pupuk subsidi dibandingkan dengan penebusan distributor	-			100 Persen	19,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	19,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				48 Laporan	19,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		19,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						40,000,000.00						-	40,000,000.00	
		[Terselenggaranya promosi dagang internasional yang di ikuti]	Net ekspor	100	100	100	100	40,000,000.00		-	-		-	-	40,000,000.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor yang difasilitasi ekspor	-			1 Pelaku Usaha	40,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						390,000,000.00						-	440,000,000.00	
		[Meningkatkan persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku]	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100	100	390,000,000.00	-	-	-	-	-	-	440,000,000.00	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	-			1400 UTTP	390,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	440,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					1600 Unit	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	350,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		400,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						10,000,000.00						-	10,000,000.00	
		[Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah]	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	100	99	100	100	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	-			100 Persen	10,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	10,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				25 UMKM	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		10,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						8,705,000,000.00							8,805,000,000.00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						8,680,000,000.00						-	8,780,000,000.00	
		[Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten pamekasan]	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	5	5	5	5	8,680,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,780,000,000.00	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri yang disusun/dievaluasi	-			1 Dokumen	8,680,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	8,780,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		400,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		300,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	8,080,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		8,080,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						25,000,000.00						-	25,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Jumlah izin usaha sektor perindustrian yang diterbitkan	-			100 Persen 100 Persen	25,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal			25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						16,089,039,924.00								0.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						16,089,039,924.00							0.00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						16,089,039,924.00							0.00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang terlaksana				91 Persen 88 Persen	16,089,039,924.00						-	0.00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	-			95 persen	16,089,039,924.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Lembaga penerima hibah dan masyarakat	-	0.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				9 Dokumen	10,649,804,524.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Lembaga penerima hibah dan masyarakat		0.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4,265,605,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Lembaga penerima hibah dan masyarakat		0.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transkripsi Linmas				4 Dokumen	1,173,629,900.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Lembaga penerima hibah dan masyarakat		0.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		BAGIAN HUKUM							542,102,100.00								422,540,400.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						542,102,100.00							422,540,400.00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						542,102,100.00							422,540,400.00			
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						542,102,100.00						-	422,540,400.00			
		[Meningkatnya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah]	Persentase produk hukum yang diundangkan, didokumentasikan, dan dipublikasikan	-	-	-	95 persen	542,102,100.00	-	-	-	-	-	-	422,540,400.00	-		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana	-			95 persen	542,102,100.00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah	-	422,540,400.00	BAGIAN HUKUM		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				670 Dokumen	299,090,400.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan -	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		299,090,400.00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	223,501,700.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan -	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		103,940,000.00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan															
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				70 Dokumen	19,510,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan -	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		19,510,000.00	BAGIAN HUKUM	
		BAGIAN PEREKONOMIAN						933,721,200.00								933,721,200.00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						933,721,200.00							933,721,200.00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						933,721,200.00							933,721,200.00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						919,721,200.00						-	919,721,200.00		
		[Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi]	Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang terlaksana	-	-	-	90 Persen 90 Persen	919,721,200.00	-	-	-	-	-	-	919,721,200.00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	"Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan "	-			90 persen	283,271,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN, AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	283,271,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.0001Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	21,105,400.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN, AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		21,105,400.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.0002Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	66,568,800.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN, AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		66,568,800.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.0003Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	10,401,300.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN, AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10,401,300.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.0005Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	579,741,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		579,741,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	24,957,200.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		24,957,200.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian				4 Dokumen	31,752,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		31,752,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						393,378,843.00							552,135,800.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						393,378,843.00							552,135,800.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						393,378,843.00							552,135,800.00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						393,378,843.00						-	552,135,800.00	
		[Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pembangunan]	Persentase kebijakan daerah bidang pembangunan yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	-	-	-	90 Persen	393,378,843.00	-	-	-	-	-	-	552,135,800.00	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				204 Orang	229,578,335.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKUALITAS-AMAN, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		482,820,000.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI						602,245,700.00							602,245,700.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						602,245,700.00							602,245,700.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						602,245,700.00							602,245,700.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						602,245,700.00					-		602,245,700.00	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Reformasi Birokrasi]	Persentase kebijakan daerah bidang Reformasi Birokrasi yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu Persentase kebijakan daerah bidang Reformasi Birokrasi yang terlaksana	-	-	-	78.25 Persen	602,245,700.00		-	-	-	-	-	602,245,700.00	-
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase laporan penataan organisasi yang tersedia.	-			78 persen	602,245,700.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah	-	602,245,700.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				42 Dokumen	72,743,600.00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah		72,743,600.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				42 Laporan	45,984,700.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		45,984,700.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7 Dokumen	369,453,500.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		369,453,500.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				78 Dokumen	114,063,900.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		114,063,900.00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						623,855,600.00							636,711,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						623,855,600.00							636,711,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						623,855,600.00					-		636,711,000.00	
		[Terwujudnya dukungan kelancaran kegiatan pimpinan daerah]	Persentase pemenuhan pendukung keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	100 Persen	623,855,600.00	-	-	-	-	-	-	636,711,000.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah		300,000,000.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,946,450,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah		2,764,800,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-			100 persen	2,606,842,033.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	-	3,350,168,450.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				144 Unit	796,673,583.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah		1,100,000,000.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	173,172,650.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah		173,172,650.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	300,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah		300,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah		20,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/Bulan	600,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah		600,000,000.00	BAGIAN UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13,266,488,969.00						-	13,327,018,500.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah]	Nilai Sakip Setda	-	-	-	81.25 Nilai	13,266,488,969.00			-	-	-	-	13,327,018,500.00	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			98 persen	121.564,800.00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda	-	130,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	68,964,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda		70,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				38 Dokumen	15,482,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Menujuadilan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda		17,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				19 Dokumen	13,062,100.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda		15,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10,610,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda		13,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	13,446,200.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit bagian di lingkungan Setda		15,000,000.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan	-			100 persen	13,144,924,169.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	13,197,018,500.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				176 Laporan	18,940,900.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		18,940,900.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,375,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,375,500.00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							316,780,000.00						623,500,000.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						316,780,000.00							623,500,000.00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						316,780,000.00							623,500,000.00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						316,780,000.00						-	623,500,000.00		
		[Meningkatkan kualitas kebijakan bidang Tata Pemerintahan]	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang terlaksana	-	-	-	91 Persen 88 Persen	316,780,000.00		-	-	-	-	-	623,500,000.00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan administrasi tata pemerintahan	-			100 persen	296,736,800.00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah	-	565,000,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	88,793,200.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		155,000,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	14,293,400.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		105,000,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	193,650,200.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		305,000,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang dilaksanakan	-			100 persen	20,043,200.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah	-	58,500,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	20,043,200.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Perangkat Daerah		58,500,000.00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		SEKRETARIAT DPRD						44,537,433,969.00							0.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44,537,433,969.00							0.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						44,537,433,969.00							0.00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						35,337,602,319.00						-	0.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Dengan Kualitas Baik Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	90	80	85	90	35,337,602,319.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-			90 Persen	150,000,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			23 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terfasilitasi	-			90 Persen	200,000,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana yang Layak Fungsi	-			90 Persen	615,998,400.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	30,998,400.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	225,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Prasarana yang Layak Fungsi	-			90 Persen	3,000,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Dengan Kualitas Baik Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	90	80	85	90	35,337,602,319.00		-	-		-	-	0.00	-
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan yang Tersedia	-			90 Persen	27,993,447,024.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	27,548,447,024.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	400,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	-			90 Persen	771,250,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	751,250,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						9,199,831,650.00						-	0.00	
		[Penyediaan Fasilitas Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan]	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan yang Terealisasi Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	90	-	85	90	9,199,831,650.00		-	-		-	-	0.00	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	-			90 Persen	1,750,000,000.00			-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				22 Dokumen	500,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				7 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				672 Laporan	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				45 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	995,580,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	-			90 Persen	400,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				320 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	-			90 Persen	4,266,251,650.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	0.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				90 Dokumen	4,266,251,650.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						8,164,080,412.00							8,459,063,635.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8,164,080,412.00							8,459,063,635.00	
	5.01	PERENCANAAN						7,314,080,412.00							7,665,063,635.00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,251,080,412.00						-	5,550,563,635.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	-			4 Dokumen	678,000,000.00			-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	687,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		72,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		105,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	508,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		510,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Disusun	-			1 Dokumen	60,000,000.00			-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	65,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		150,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						330,000,000.00						-	363,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	330,000,000.00	-	-	-	-	-	-	363,000,000.00	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase Hasil Inovensi dan Inovasi untuk mendukung Inovasi Daerah Persentase Hasil Inovensi dan Inovasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 persen	330,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	363,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0021Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi																
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				1 Laporan	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		330,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Pemantauan tindakan lanjut hasil evaluasi inovasi daerah]	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Persentase rekomendasi hasil evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	100 80	0	100 55	100 60	330,000,000.00		-	-	-	-	-	363,000,000.00	-
5.05.03.2.02.0023Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi																
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi				1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		33,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						358,646,953,125.00							354,486,953,125.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						358,646,953,125.00							354,486,953,125.00	
	5.02	KEUANGAN						358,646,953,125.00							354,486,953,125.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						45,315,626,368.00						-	45,315,626,368.00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.40	81.20	81.40	81.60	45,315,626,368.00	-	-	-	-	-	-	45,315,626,368.00	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	-			136 Dokumen	61,786,400.00			-	-	-	-	61,786,400.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	43,687,600.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43,687,600.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				55 Dokumen	2,084,700.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2,084,700.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	1,706,800.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,706,800.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				55 Dokumen	2,084,700.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2,084,700.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	1,046,300.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,046,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	11,176,300.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11,176,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu berkualitas baik	-			14 Dokumen	42,413,300,065.00			-	-	-	-	42,413,300,065.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	42,413,300,065.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42,413,300,065.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	1,660,000.00			-	-	-	-	1,660,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,660,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,660,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	30,000,000.00			-	-	-	-	30,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Jenis	357,315,920.00			-	-	-	-	357,315,920.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5,539,100.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,539,100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	100,712,300.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,712,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	100,154,520.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,154,520.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	50,910,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50,910,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			16 Unit	75,141,006.00			-	-	-	-	75,141,006.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	75,141,006.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75,141,006.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Jenis Jasa	1,904,823,577.00			-	-	-	-	1,904,823,577.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	600,665,782.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600,665,782.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,291,157,795.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,291,157,795.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			4 Jenis BMD	471,599,400.00			-	-	-	-	471,599,400.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	74,700,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74,700,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	177,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		177,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	153,751,400.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		153,751,400.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	66,148,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66,148,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						310,226,036,622.00						-	306,426,036,622.00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				684 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	31,248,200.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31,248,200.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				42 Laporan	100,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	109,885,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109,885,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	43,660,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43,660,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	30,356,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30,356,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya Realisasi Penyerapan Anggaran]	Indeks D.4.pada IPKD (Penyerapan anggaran)	100	100	100	100	310,226,036,622.00	-	-	-	-	-	-	306,426,036,622.00	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang terlaksana	-			100 %	306,793,361,971.00			-	-	-	-	302,993,361,971.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				5 Laporan	280,868,827,600.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	-	-		277,068,827,600.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	13,000,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13,000,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	12,924,534,371.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12,924,534,371.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1,067,646,300.00						-	1,067,646,300.00	
		[Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah]	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan asetnya	100	100	100	100	1,067,646,300.00	-	-	-	-	-	-	1,067,646,300.00	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang mengelola barang milik daerah	-			42 OPD	1,067,646,300.00			-	-	-	-	1,067,646,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	107,735,900.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107,735,900.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	197,109,900.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		197,109,900.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				300 Laporan	486,661,400.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		486,661,400.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	30,699,100.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30,699,100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	194,173,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		194,173,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	51,267,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51,267,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2,037,643,835.00						-	1,677,643,835.00	
		[Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah]	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	98.20	100	100	2,037,643,835.00	-	-	-	-	-	-	1,677,643,835.00	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pendapatan daerah yang dikelola	-			11 Jenis	2,037,643,835.00			-	-	-	-	1,677,643,835.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				52 Dokumen	49,036,171.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49,036,171.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				52 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				52 Laporan	190,038,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	360,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7,830,278,983.00							8,072,529,891.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7,830,278,983.00							8,072,529,891.00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						7,380,278,983.00							7,597,529,891.00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,135,278,983.00						-	6,397,529,891.00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	82	82	82.1	6,135,278,983.00	-	-	-	-	-	-	6,397,529,891.00	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			8 Dokumen	100,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	90,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		55,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		35,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN	-			14 Dokumen	4,519,924,983.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	4,777,529,891.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	75,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		70,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang yang disediakan	-			1 Laporan	250,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	200,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	250,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		200,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			3 Laporan	585,354,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	610,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,354,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		15,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	245,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		245,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	325,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		350,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	-			3 Laporan	470,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	490,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	110,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		120,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	110,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		120,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	250,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		250,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,245,000,000.00						-	1,200,000,000.00	
		[Meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur]	Indeks kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS (25%) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.5 72.5	21,76 (2023) 70.6	20 70	20.5 70.5	1,245,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	-			100 persen	265,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	245,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		15,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	150,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		75,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		30,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	Persentase ASN yang menyusun dokumen penilaian kinerja ASN sesuai pedoman dan tepat waktu	100	100	100	100	1,245,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		30,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		75,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		20,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan mutasi dan promosi ASN	-			3 Laporan	390,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	400,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		50,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		50,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		300,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	-	-	-	-	-	1,245,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				12 0	10,862,200.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi Kinerja dan pelayanan Inspektorat Daerah		13,577,750.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			1 Unit Kerja	4,836,194,632.00			Memperkua t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah	-	5,319,814,094.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	4,836,194,632.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah		5,319,814,094.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			40 Orang	335,982,000.00			Memperkua t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Daerah	-	419,977,500.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	335,982,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Daerah		419,977,500.00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Umum Inspektorat Daerah		21,250,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	212,854,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Umum Inspektorat Daerah		266,067,500.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	-			10 Unit	74,461,056.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	93,076,320.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	74,461,056.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		93,076,320.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			36 Unit	281,290,300.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	532,054,001.00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	514,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		515,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83,022,228.00			-	-	-	-	90,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	54,877,600.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		60,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			-				-	7,655,628.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25,000,000.00						-	27,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000,000.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	5,331,700.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	6,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	5,331,700.00	-	-	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	13,340,600.00			-	-	-	-	14,500,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga K emasyarakat an	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	17,500,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga K emasyarakat an	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,500,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						75,000,000.00						-	82,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	75,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	82,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	44,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		47,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	31,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		35,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						25,000,000.00						-	28,500,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	25,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	28,500,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		13,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		9,000,000.00	KECAMATAN PAMEKASAN
		KELURAHAN KANGENAN							495,426,506.00						495,426,506.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						495,426,506.00							495,426,506.00	
	7.01	KECAMATAN						495,426,506.00							495,426,506.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						259,426,506.00						-	259,426,506.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]		-	-	-	-	259,426,506.00	-	-	-	-	-	-	259,426,506.00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	14,400,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	14,400,000.00	KELURAHAN KANGENAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kangeran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10,000,000.00	KELURAHAN KANGENAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kangeran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,000,000.00	KELURAHAN KANGENAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,000,000.00	-	-	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,000,000.00	KELURAHAN KANGENAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	3,550,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kangeran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,550,000.00	KELURAHAN KANGENAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,000,000.00						-	3,000,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	3,000,000.00			-	-	-	-	3,000,000.00	KELURAHAN KANGENAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kangeran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3,000,000.00	KELURAHAN KANGENAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						203,000,000.00						-	203,000,000.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5,508,654.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,508,654.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,200,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	13,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
		-	-	-	-	-	-	278,119,654.00	-	-	-	-	-	-	6,778,408,654.00	-
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						210,000,000.00						-	210,000,000.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	210,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	210,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		200,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20,000,000.00						-	20,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	20,000,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	20,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Patemon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN PATEMON
		KELURAHAN PARTEKER							512,132,786.00	513,132,786.00						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						512,132,786.00							513,132,786.00	
	7.01	KECAMATAN						512,132,786.00							513,132,786.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						289,732,786.00						-	290,732,786.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	289,732,786.00	-	-	-	-	-	-	290,732,786.00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14,400,000.00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	14,400,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6,211,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	6,211,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6,211,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,211,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	12,921,786.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	12,921,786.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2,721,786.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,721,786.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,200,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	55,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
		-	-	-	-	-	-	289,732,786.00	-	-	-	-	-	-	290,732,786.00	-
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			-				-	50,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	289,732,786.00	-	-	-	-	-	-	290,732,786.00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184,700,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	185,700,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		4,300,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		13,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	158,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		158,400,000.00	KELURAHAN PARTEKER
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16,500,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	16,500,000.00	KELURAHAN PARTEKER
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	8,100,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		8,100,000.00	KELURAHAN PARTEKER
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9,300,000.00					-		9,300,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	-	-			-	9,300,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	9,300,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,300,000.00	KELURAHAN PARTEKER
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Parteker	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,000,000.00	KELURAHAN PARTEKER
		KELURAHAN JUNGCAANGCANG														
7		UNSUR KEWILAYAHAN						541,583,674.00							541,583,674.00	
7.01		KECAMATAN						541,583,674.00							541,583,674.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						321,583,674.00						-	321,583,674.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	321,583,674.00	-	-	-	-	-	-	321,583,674.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		48,500,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	12,273,010.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		12,273,010.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5,000,000.00						-	5,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	5,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						205,000,000.00						-	205,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	205,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	205,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		200,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10,000,000.00						-	10,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10,000,000.00			-	-	-	-	10,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			-				-	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Jungcang Cang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		KELURAHAN BUGIH						489,980,878.00							490,295,000.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						489,980,878.00							490,295,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						489,980,878.00							490,295,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						249,980,878.00						-	250,295,000.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	249,980,878.00	-	-	-	-	-	-	250,295,000.00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14,400,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	14,400,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6,211,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	6,500,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	6,211,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,500,000.00	KELURAHAN BUGIH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,200,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36,500,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	36,500,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN BUGIH
		-	-	-	-	-	-	249,980,878.00			-		-	-	250,295,000.00	-
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	31,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		31,500,000.00	KELURAHAN BUGIH
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	249,980,878.00			-		-	-	250,295,000.00	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN BUGIH
		-	-	-	-	-	-	249,980,878.00	-	-	-	-	-	-	250,295,000.00	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,000,000.00	KELURAHAN BUGIH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10,000,000.00						-	10,000,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	10,000,000.00	KELURAHAN BUGIH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN BUGIH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						210,000,000.00						-	210,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB											
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS																
											NASIONAL	DAERAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN BUGIH											
		KELURAHAN GLADAK ANYAR						579,426,876.00								579,426,876.00											
7		UNSUR KEWILAYAHAN						579,426,876.00								579,426,876.00											
7.01		KECAMATAN						579,426,876.00								579,426,876.00											
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						337,626,876.00								337,626,876.00											
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]						337,626,876.00								337,626,876.00											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,400,000.00								14,400,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR										
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen						14,400,000.00						Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,211,000.00								6,211,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR										
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																									

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	2,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,200,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	60,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	337,626,876.00	-	-	-	-	-	-	337,626,876.00	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		45,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		-	-	-	-	-	-	337,626,876.00	-	-	-	-	-	-	337,626,876.00	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7,500,000.00						-	7,500,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	7,500,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	7,500,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,500,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						212,000,000.00						-	212,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		12,300,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Geladak Anyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN GLADAK ANYAR
		KELURAHAN KOLPAJUNG						508,663,031.00							508,663,031.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						508,663,031.00							508,663,031.00	
	7.01	KECAMATAN						508,663,031.00							508,663,031.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA						278,663,031.00						-	278,663,031.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]						278,663,031.00	-	-	-	-	-	-	278,663,031.00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14,400,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	14,400,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1,360,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		1,360,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
		-	-	-	-	-	-	278,663,031.00	-	-	-	-	-	-	278,663,031.00	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5,000,000.00						-	5,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEI AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20,000,000.00					-	-	20,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	20,000,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	20,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kolpajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN KOLPAJUNG
		KELURAHAN KOWEL						577,883,145.00								577,883,145.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						577,883,145.00							577,883,145.00	
	7.01	KECAMATAN						577,883,145.00							577,883,145.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						313,883,145.00						-	313,883,145.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	313,883,145.00	-	-	-	-	-	-	313,883,145.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14,400,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	14,400,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6,211,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	6,211,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	6,211,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,211,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	12,700,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	12,700,000.00	KELURAHAN KOWEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,000,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,000,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,500,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,200,000.00	KELURAHAN KOWEL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,300,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,912,145.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		16,912,145.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN KOWEL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		186,000,000.00	KELURAHAN KOWEL
		-	-	-	-	-	-	313,883,145.00	-	-	-	-	-	-	313,883,145.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS											
											NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Kowel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN KOWEL						
		KELURAHAN BARURAMBAT KOTA								488,013,379.00						488,013,379.00						
7		UNSUR KEWILAYAHAN								488,013,379.00						488,013,379.00						
7.01		KECAMATAN								488,013,379.00						488,013,379.00						
1. 7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								245,683,379.00				-		245,683,379.00						
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]						-		-		-		-		245,683,379.00	-					
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						-		14,400,000.00		-		-		14,400,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA					
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen		14,400,000.00		Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-		JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		14,400,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-		5,683,379.00		-		-		5,683,379.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA					
7.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		4,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		-	-	-	-	-	-	245,683,379.00	-	-	-	-	-	-	245,683,379.00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	15,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pamekasan]	-	-	-	-	-	245,683,379.00	-	-	-	-	-	-	245,683,379.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,763,687,889.00							4,018,725,107.00	
	7.01	KECAMATAN						2,763,687,889.00							4,018,725,107.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,463,687,889.00						-	3,743,725,107.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tlanakan]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.00	81.40	81.52	81.64	2,463,687,889.00	-	-	-	-	-	-	3,743,725,107.00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			10 Dokumen	90,000,000.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	110,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	80,000,000.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pegawai Kecamatan		20,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			3 Sarana	45,000,000.00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	50,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan		20,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan		30,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	-			3 Prasarana	52,162,782.00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	170,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	346,800,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Jasa Penunjang Kecamatan		346,800,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			5 Pengadaan	70,000,000.00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan	-	200,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan		50,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Sarana dan Prasarana Kecamatan		150,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40,000,000.00						-	50,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	-			100 %	40,000,000.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat desa Se Kecamatan	-	50,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat desa Se Kecamatan		50,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						90,000,000.00						-	45,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	90,000,000.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketu mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat desa Se Kecamatan	-	45,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarak atan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketu mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat desa Se Kecamatan		15,000,000.00	KECAMATAN TLANAKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAKHERA mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat desa Se Kecamatan		30,000,000.00	KECAMATAN TLAKANAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						90,000,000.00						-	100,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	-			100 %	90,000,000.00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Ketenteraman dan ketertiban Desa Se Kecamatan	-	100,000,000.00	KECAMATAN TLAKANAN
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Tlanakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Ketenteraman dan ketertiban Desa Se Kecamatan		10,000,000.00	KECAMATAN TLAKANAN
7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2,543,250,315.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		2,600,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	32,400,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		33,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	41,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		41,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	103,500,000.00	KECAMATAN PROPPPO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,500,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		31,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		26,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		31,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	88,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	91,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n pembang unan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		21,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	48,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		49,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		21,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,500,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		31,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	115,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		116,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						35,000,000.00						-	37,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	35,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Elektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	37,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		16,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		21,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						125,000,000.00						-	131,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	125,000,000.00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-	-	131,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				27 Lembaga Kemasyarakatan	65,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		70,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	-		61,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						84,097,708.00						-	86,000,000.00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				15 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Proppo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		21,000,000.00	KECAMATAN PROPPPO
		KECAMATAN PADEMAWU						4,150,352,968.00							4,833,500,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					4,150,352,968.00							4,833,500,000.00		
	7.01	KECAMATAN					4,150,352,968.00							4,833,500,000.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,860,352,968.00							-	4,478,500,000.00	
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pademawu]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.00	80.55	81.75	81.80	3,860,352,968.00	-	-	-	-	-	-	4,478,500,000.00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	48,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	56,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		45,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				70 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		2,500,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	33,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	40,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	55,400,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	73,500,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,500,000.00	KECAMATAN PADEMAWU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	95,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	105,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		55,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	376,978,777.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	405,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						110,000,000.00						-	120,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	110,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M mempercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	120,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketim pangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		75,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengurangan Ketim pangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		45,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						75,000,000.00						-	85,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketenitban Umum	-	-			-	75,000,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	85,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		75,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						30,000,000.00						-	45,000,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	30,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	45,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PADEMAWU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	10,800,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		12,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	7,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		7,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18,980,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	22,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	41,897,500.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		45,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162,300,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	165,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,300,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,500,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		12,000,000.00	KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		1,500,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		4,500,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1,080,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		1,500,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	137,310,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	139,100,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,510,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		4,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,200,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,500,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	123,600,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		124,600,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	200,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		210,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8,000,000.00						-	10,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	8,000,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	10,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	8,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pademawu, Lawangan Daya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Te rwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KELURAHAN LAWANGAN DAYA
		KECAMATAN GALIS						2,616,512,202.00							2,764,348,264.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2,616,512,202.00							2,764,348,264.00	
	7.01	KECAMATAN						2,616,512,202.00							2,764,348,264.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,399,012,202.00					-		2,494,348,264.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Galis]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81.25	80.35	80.50	80.65	2,399,012,202.00	-	-	-	-	-	-	2,494,348,264.00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			12 Dokumen	55,000,000.00			Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	sub bagian perencanaan unit kerja	-	60,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	sub bagian perencanaan unit kerja		60,000,000.00	KECAMATAN GALIS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emberkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit kerja		30,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emberkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit kerja		20,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM CERDAS M emberkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit kerja		100,000,000.00	KECAMATAN GALIS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25,000,000.00						-	30,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	-			100 Persen	25,000,000.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM CERDAS M emberkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat	-	30,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN GALIS
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM CERDAS Mperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		20,000,000.00	KECAMATAN GALIS
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						92,500,000.00						-	105,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-			100 Persen	92,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mpercepat Penguatan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat	-	105,000,000.00	KECAMATAN GALIS
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN GALIS
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						25,000,000.00						-	35,000,000.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	-			100 Persen	25,000,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pemerintahan Desa	-	35,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pemerintahan Desa		20,000,000.00	KECAMATAN GALIS
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Galis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pemerintahan Desa		15,000,000.00	KECAMATAN GALIS
		KECAMATAN LARANGAN							2,729,447,748.00						2,898,266,727.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,729,447,748.00							2,898,266,727.00	
	7.01	KECAMATAN						2,729,447,748.00							2,898,266,727.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,469,447,748.00						-	2,563,266,727.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Larangan]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.25	80.45	81.34	81.60	2,469,447,748.00	-	-	-	-	-	-	2,563,266,727.00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75,000,000.00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	85,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	65,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		70,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,859,866,727.00			-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	1,859,866,727.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,827,466,727.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Me mperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		1,827,466,727.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	32,400,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32,400,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	30,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	34,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		30,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	143,851,121.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	125,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	29,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		0.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	11,757,300.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	233,400,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		233,400,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	150,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
		-	-	-	-	-	-	2,469,447,748.00	-	-	-	-	-	-	2,563,266,727.00	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		100,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45,000,000.00						-	60,000,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	5,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	-	-	10,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						115,000,000.00						-	145,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	75,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	85,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga K emasyarakatat an	65,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		70,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Larangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	40,000,000.00			-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ket i mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	60,000,000.00	KECAMATAN LARANGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				160 Laporan	235,500,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		200,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
		-	-	-	-	-	-	1,981,515,761.00	-	-	-	-	-	-	2,022,966,540.00	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	30,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	70,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20,000,000.00						-	16,000,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	20,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	16,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		16,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						80,000,000.00						-	80,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	80,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	80,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarak atan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		65,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						83,000,000.00						-	60,000,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum	-	-			-	83,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	60,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	73,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		50,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20,000,000.00						-	25,000,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	20,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linc ah untuk pelayan an publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	25,000,000.00	KECAMATAN PALENGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		25,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						40,000,000.00						-	45,000,000.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	40,000,000.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	45,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		30,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	X	NON URUSAN						21,617,880.00							25,000,000.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						21,617,880.00							25,000,000.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21,617,880.00						-	25,000,000.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21,617,880.00			-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	25,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	21,617,880.00	Kab. Pamekasan, Palenggaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		25,000,000.00	KECAMATAN PALENGGAAN
		KECAMATAN PEGANTENAN						3,042,341,107.00							3,824,085,242.50	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,042,341,107.00							3,824,085,242.50	
	7.01	KECAMATAN						3,042,341,107.00							3,824,085,242.50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,852,341,107.00						-	3,549,085,242.50	
		[Meringkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pegantenan]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81.05	80.15	80.3	80.45	2,852,341,107.00	-	-	-	-	-	-	3,549,085,242.50	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	94,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	130,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	64,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		70,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincach untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		30,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		30,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	108,616,913.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	130,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	28,216,913.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	80,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincih untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		90,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		35,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	195,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		200,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20,000,000.00						-	40,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	20,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		35,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						30,000,000.00						-	40,000,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	30,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	40,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3 Orang	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pegantenan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincuh untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		20,000,000.00	KECAMATAN PEGANTENAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		11,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		66,831,324.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190,000,000.00			-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	182,300,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		19,100,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	170,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	-		163,200,000.00	KECAMATAN PAKONG
		-	-	-	-	-	-	2,684,055,979.00	-	-	-	-	-	-	2,781,193,156.00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20,000,000.00						-	53,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	53,000,000.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	20,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PAKONG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	57,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAJAHTERA M empercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,323,500.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	55,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAJAHTERA M empercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		88,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						60,000,000.00						-	710,457,660.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	60,000,000.00			-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	710,457,660.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		710,457,660.00	KECAMATAN PAKONG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						10,000,000.00						-	20,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	40,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		40,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pakong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Keti mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,000,000.00	KECAMATAN PAKONG
		KECAMATAN WARU						2,338,434,644.00							2,098,373,519.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,249,434,644.00							2,039,373,519.00	
	7.01	KECAMATAN						2,249,434,644.00							2,039,373,519.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NIKOTA						1,840,493,644.00						-	1,828,773,519.00	
		[Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Waru]		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81.85	78.50	80.01	80.55	1,840,493,644.00	-	-	-	-	-	1,828,773,519.00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,529,973,519.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	-	-	1,532,373,519.00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,496,373,519.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	-		1,496,373,519.00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	33,600,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		36,000,000.00	KECAMATAN WARU
		-	-	-	-	-	-	1,840,493,644.00	-	-	-	-	-	-	1,828,773,519.00	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	22,000,000.00	KECAMATAN WARU

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		4,000,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		20,000,000.00	KECAMATAN WARU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						50,000,000.00						-	30,000,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	50,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	30,000,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linch untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN WARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						106,441,000.00						-	30,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	106,441,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	30,000,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	71,441,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Waru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		15,000,000.00	KECAMATAN WARU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						110,000,000.00						-	60,600,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	110,000,000.00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	60,600,000.00	KECAMATAN WARU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,623,589,353.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		1,700,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				170 Dokumen	35,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		36,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	35,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		35,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	49,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	47,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		0.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		35,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		12,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	100,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		40,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
		-	-	-	-	-	-	2,236,089,353.00		-	-	-	-	-	2,360,000,000.00	-
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		60,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Batumarmar]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81.00	80.30	80.40	80.50	2,236,089,353.00	-	-	-	-	-	-	2,360,000,000.00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	182,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	188,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	17,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		18,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	165,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		170,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	156,500,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	187,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	51,500,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		55,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		13,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						28,448,316.00						-	36,000,000.00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	28,448,316.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-	-	36,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR	
7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	9,500,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		12,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR	
7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				13 Dokumen	9,900,000.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		12,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR	
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				13 Laporan	9,048,316.00	Kab. Pamekasan, Batumarmar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	-		12,000,000.00	KECAMATAN BATUMARMAR	
		KECAMATAN PASEAN						2,326,729,490.00							2,558,329,740.00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2,326,729,490.00							2,558,329,740.00		
7.01		KECAMATAN						2,326,729,490.00							2,558,329,740.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,074,229,490.00							-	2,188,663,040.00		
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Pasean]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.50	81.30	81.50	81.70	2,074,229,490.00	-	-	-	-	-	-	2,188,663,040.00	-	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	47,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	74,985,000.00	KECAMATAN PASEAN	
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	17,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		24,297,700.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		26,678,364.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		6,000,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	8,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan linciah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		10,305,000.00	KECAMATAN PASEAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,148,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elengggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		3,148,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	43,816,179.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elengggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		46,176,540.00	KECAMATAN PASEAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						34,000,000.00						-	72,500,000.00	
		-	-	-	-	-	-	34,000,000.00	-	-	-	-	-	-	72,500,000.00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	24,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elengggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	53,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	14,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elengggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		37,000,000.00	KECAMATAN PASEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat			16,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	10,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	18,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		18,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75,000,000.00						-	49,750,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	75,000,000.00			-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	49,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	60,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO Men ingkatkan K esejahteraa n Petani, Peternak dan Nelayan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		12,000,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketim pangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		37,750,000.00	KECAMATAN PASEAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						60,000,000.00						-	98,969,700.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	60,000,000.00			-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	98,969,700.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		17,000,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	14,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		23,000,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	3,500,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		5,250,000.00	KECAMATAN PASEAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				27 Laporan	10,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pasean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		18,500,000.00	KECAMATAN PASEAN
		KECAMATAN KADUR						2,646,179,270.00							2,678,183,969.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,615,976,870.00							2,647,981,569.00	
	7.01	KECAMATAN						2,615,976,870.00							2,647,981,569.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,432,976,870.00						-	2,452,981,569.00	
		[Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Kadur]	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80.68	80.05	80.17	80.29	2,432,976,870.00	-	-	-	-	-	-	2,452,981,569.00	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,908,363,954.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	sub bagian keuangan unit kerja		1,936,268,653.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	32,400,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	sub bagian keuangan unit kerja		35,000,000.00	KECAMATAN KADUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			20 ASN	50,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pegawai Perangkat Daerah	-	50,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50,000,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Pegawai Perangkat Daerah		50,000,000.00	KECAMATAN KADUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,300,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit Kerja		14,300,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	208,800,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit Kerja		208,800,000.00	KECAMATAN KADUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45,000,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Unit		30,000,000.00	KECAMATAN KADUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15,500,000.00						-	20,000,000.00	
		-	-	-	-	-	-	15,500,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-			100 Persen	7,500,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	10,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Kelompok Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN KADUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	7,500,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN KADUR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						10,000,000.00						-	20,000,000.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggraan pemerintahan desa	-			100 Persen	10,000,000.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat	-	20,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	JATIM SEJ AHTERA M empercepat Pengentas an Kemiskinan dan Pengur angan Ketl mpangan Mewujudka n tata kelola pem erintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	5,000,000.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAJAH M mempercepat Pengentasan kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN KADUR
	X	NON URUSAN						30,202,400.00							30,202,400.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30,202,400.00							30,202,400.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						30,202,400.00						-	30,202,400.00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			2 Unit	30,202,400.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-	-	30,202,400.00	KECAMATAN KADUR
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	30,202,400.00	Kab. Pamekasan, Kadur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS M memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	-		30,202,400.00	KECAMATAN KADUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6,278,040,622.00							8,025,128,572.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						6,278,040,622.00							8,025,128,572.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6,278,040,622.00							8,025,128,572.00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,460,413,622.00						-	3,575,128,572.00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	25,000,000.00			-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	-			4 Unit Kerja	1,954,050,162.00			-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	2,848,728,572.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	1,954,050,162.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		2,848,728,572.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	-			10 Orang	17,000,000.00			-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	17,000,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	-			3 Paket	60,030,000.00			-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	115,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,899,300.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		5,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,141,700.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			-				-	5,000,000.00	-	-	-	-	-		10,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	19,989,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			24 Laporan	330,347,260.00			-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	341,400,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,947,260.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		60,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	281,400,000.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		281,400,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			24 Unit	73,986,200.00			-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	170,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,374,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		60,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	23,625,500.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		50,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,986,200.00	Kab. Pamekasan, Pamekasan, Barurambat Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		60,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						456,887,400.00						-	700,000,000.00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	-			6 Dokumen	456,887,400.00			-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-	-	700,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	46,914,600.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		100,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				74 Orang	409,972,800.00	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n transform asi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	-		600,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran atau patokan yang menggambarkan mengenai hasil (*outcome*) pembangunan yang selanjutnya disebut sebagai indikator. Indikator juga sebagai acuan utama dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD) yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan, guna mengetahui apakah capaian sudah berada di arah yang benar seperti yang direncanakan atau tidak. Pencapaian IKU dan IKD juga menjadi jaminan aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang perlu guna memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pamekasan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Tingkat Kemiskinan	(%)	13,41	11,77
2	Rasio Gini	Indeks	0,301	0,34
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,85	71,97
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	-	74,9
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,88	5,18
6	Pendapatan Per Kapita	Rp	25.423,60	29.661.000

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131,19	88,35
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,41	81,50

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	0,7486
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,69	0,71
3	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten (Realisasi Penanaman Modal)	%	108,16	0,70
4	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	116100	116300
5	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	39	39
6	Indeks Pendidikan	Tahun	0,62	0,64
7	Menurunnya Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	%	20	22
8	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	%	99	100
9	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Inovasi Daerah	%	80	100
10	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	Unit	2	2
11	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata	%	66,67	80.00
12	Jumlah potensi penanaman modal yang dipromosikan	Laporan / Dokumen	33	34
13	Jumlah panjang prasarana pertanian yang dibangun	Meter	90	96
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Luasan daerah rawan kekeringan	Ha	-	15,674,068

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2	Luasan daerah rawan banjir	Ha	-	10,559,392
3	Luasan daerah rawan longsor	Ha	-	4095
4	Luasan Tutupan Lahan	Ha	1,790	345
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Persentase PPKS yang Mandiri	%	-	0,57
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,64	1,618
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	-	0,57
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,66	74,18
5	Indeks Pendidikan	Indeks	0,62	0,64
6	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	%	-	8,04
7	Kontribusi PDRB Sub Sektor pertanian, perikanan dan peternakan	%	30,87	30,88
8	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan	%	-	22,22
9	Realisasi Investasi	%	-	0,70
10	Indeks PPP	Indeks	-	0,71
11	Persentase pelanggaran trantibum yang terselesaikan	%	51	56,23
12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kejadian	8,14	8.8
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,55	0,57
14	Persentase PPKS yang mandiri (24 Jenis PPKS)	%	0,52	0,57
15	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)	Kejadian	0,86	0,78
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	1,64	1,62
17	Jumlah konflik sosial	Kejadian	3	1
18	Persentase pasar yang memenuhi standar	%	13,33	20
19	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	%	100	100
20	Jumlah petani penerima manfaat	Petani	-	50
21	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	Persentase	52	55
22	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Wilayah	10	12

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
23	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	Persentase	-	1
24	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Poin	98,18	98,25
25	Persentase calon transmigran yang ditempatkan	%	100	100
26	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	180077	180277
27	Jumlah produksi ikan olahan	Ton	724.700	742.800
28	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi penanganan hambatannya	Pelaku Usaha	450	160
29	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	6763	6863
30	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100	100
31	Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	%	77	92
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	51	56,23
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100	100
3	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	8,142:8,142	8,47:8,47
4	V/C ratio	Indeks	-	0,30
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	069	0,80
6	Luasan daerah rawan longsor	Ha	-	4095
7	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah kabupaten	%	82,5	89,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,78	67,85
9	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda	Skor	72,11	74,48
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	76.36
11	Indeks SPBE	Indeks	3.92	-
12	Indeks Pemdi	Indeks	-	2,70
13	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	4,01(A-)
14	Maturitas SPIP	Poin	3,562	3,4
15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,94	4,01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
16	RS Pendidikan	Kategori	Satelit pendidikan	Satelit pendidikan
17	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,5	82
18	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	83
19	Skor komponen evaluasi internal AKIP	%	13,88	15,5
20	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.5	81.7
21	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	bab80,9	81,5
22	Indeks D.5.pada IPKD (Kondisi keuangan daerah)	%	2,46	2,96
23	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Yang Dilaksanakan	Persentase	114,29	100
24	Persentase volume sampah yang tertangani	Persentase	61,50	61,60
25	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-
26	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,5	81,25
27	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	%	36	100
28	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,50	81,25
29	Presentase Koefisiensi harga antar waktu	%	43	42
30	Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase	29,06	73,34
31	Indeks dimensi kompetensi pada perhitungan IP ASN	Indeks	9	11
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	75	75
33	Skor Survei Penilaian Intergritas	Skor	76	-
34	Akreditasi Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo	Predikat	Paripurna	Paripurna
35	Persentase pemasaran pariwisata	%	67	80
36	Persentase kebijakan daerah bidang pembangunan yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	%	90	90,21

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
37	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	114,28	95,86
38	Net ekspor	Skor	100	100
39	Tingkat Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - SKM)	%	100	100
40	Tingkat Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - SKM)	%	95	100
41	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80.90	81.75
42	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	0
43	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	24	30
44	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	92
45	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.4	81
46	Persentase ASN yang menyusun dokumen penilaian kinerja ASN sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100
47	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	81
48	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50	80,55
49	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,30	80,50
50	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,35	80,65
51	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,45	81,60
52	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,30	81,70
53	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,55	81,80
54	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,15	82,36
55	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	23,22	23,69
56	Persentase pelanggaran terhadap ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
57	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	99,18	100
58	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,8	85
59	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
60	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	1	4
61	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	52	60
62	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (82, 60)	A (82,00)
63	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80.40	80.50
64	Persentase koperasi jasa, produsen, dan serbausaha yang dibina pengembangannya	%	50	50
65	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	100	100
66	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	98,53	100
67	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	5	5
68	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,40	81,64
69	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,15	80,45
70	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,90	81,00
71	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,05	80,29
72	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,40	78,40
73	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	51	56,23
74	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
75	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	80	80

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	di wilayah kecamatan yang tertangani			
76	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCSP)	%	90,13	91,5
77	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
78	Luasan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Km ²	146.47	146.47
79	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,3	84
80	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
81	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82	82.1
82	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
83	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100	100
84	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	90
85	Persentase ketersediaan data yang akurat	%	100	100
86	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	81.5
87	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,60	81,25
88	Jumlah Anggota koperasi simpan pinjam	Orang	98	98
89	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
90	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70.6	70.5
91	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	85	86
92	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	di wilayah kecamatan yang tertangani			
93	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
94	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	81.5
95	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,20	81,60
96	Indeks D.2.pada IPKD (Kualitas anggaran belanja dalam APBD)	%	75	100
97	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
98	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	90
99	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100	100
100	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	98	100
101	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	95	100
102	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100	100
103	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana dengan baik	%	100	100
104	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	95	100
105	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terlayani Dengan Baik	%	0	0
106	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
107	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100	100
108	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
109	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
110	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	-	100
111	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
112	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	95	100
113	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	95	100
114	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	75.05	79
115	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	80	80
116	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	99,85	100
117	Jumlah UMKM yang diberdayakan pada pusat jajanan dan kuliner	UMKM	353	380
118	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	98	100
119	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lembaga	10	10
120	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	%	100	100
121	Kapasitas daya tampung TPA, TPS3R, dan TPS	Ton	300.635	308
122	Jumlah guru ASN (SD)	Orang	3125	3250
123	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	-	2,7
124	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,447	3,449
125	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	90	92
126	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
127	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,86	3,91

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
128	Persentase Tingkat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	Persentase	100	100
129	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,86	3,89
130	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan asetnya	%	100	100
131	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
132	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
133	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,86	3,88
134	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,9	4,00
135	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
136	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	%	32,89	46,66
137	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3.86	3.88
138	Persentase profil kependudukan yang diterbitkan secara tepat waktu	%	100	100
139	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	11.84
140	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
141	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang terlaksana	%	85	88

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
142	Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	%	90,1	90,21
143	Jumlah pusat jajanan dan kuliner yang dikelola	Lokasi	4	1
144	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
145	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100
146	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
147	Persentase oraganisasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	90	100
148	Jumlah tutor pendidikan kesetaraan	Orang	109	111
149	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	-	0
150	Persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online	%	100	100
151	Indeks kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS (25%)	%	21,76 (2023)	20.5
152	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)	%	1	1.5
153	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	n/a	n/a
154	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
155	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100
156	Persentase desa yang memanfaatkan aplikasi SISKEUDes dalam administrasi, Persentase desa yang menetapkan JMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tepat waktu, Persentase Desa yang melaksanakan Pilkadesa sesuai pedoman	%	100	100
157	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100
158	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	3,90	3,97
159	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100
160	Jumlah guru ASN (SMP)	Orang	685	699
161	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	100	100
162	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	n/a	n/a
163	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	%	n/a	92
164	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang	%	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan			
165	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan yang Terselesaikan	%	-	90
166	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	63	100
167	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	%	100	100
168	Persentase bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya beracun yang terkelola	%	-	100
169	Akreditasi Rumah Sakit Waru	Predikat	Utama	Paripurna
170	Jumlah kelompok/lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah	Kelompok	10	12
171	Prosentase Penambahan Saluran drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	0,23	4.87
172	Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan	%	25	40
173	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	Persentase	90	91
174	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	%	4	4,20
175	Realisasi retribusi parkir	Rp	4630068000	4630068000
176	Tingkat capaian rencana induk jaringan	%	40	42
177	Persentase Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa	Unit	90	90
178	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	50	50
179	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang telah terlaksana	%	0	98,25
180	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Terbit	Dokumen	1	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
181	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	54,78	56
182	Tingkat Capaian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Persentase	85	86
183	Jumlah usaha mikro baru	Unit Usaha	4	4
184	Indeks D.4.pada IPKD (Penyerapan anggaran)	%	100	100
185	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan memenuhi standar	%	-	100
186	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	-	35
187	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Layanan TIK dalam kondisi Baik	%	0	100
188	Persentase permohonan perizinan yang diproses tepat waktu	%	100	100
189	Persentase kebijakan daerah bidang Reformasi Birokrasi yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	%	57,14	78,25
190	Persentase kebijakan daerah bidang Reformasi Birokrasi yang terlaksana	%	57,14	78,25
191	Nilai SKM terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	85,49	85,75
192	Persentase pemenuhan pendukung keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100
193	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Dokumen	8	6
194	Persentase objek budaya yang dikembangkan	%	100	100
195	Persentase pelaku seni yang dibina	%	100	100
196	Persentase peningkatan cakupan wawasan kebangsaan	%	75	100
197	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	3,90	3,97
198	Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	100
199	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	%	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
200	Skor Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Skor	620	660
201	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	75.25	75.50
202	Persentase potensi konflik antar organisasi kemasyarakatan yang tertangani	Persentase	80	100
203	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	-	100
204	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
205	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
206	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
207	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
208	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
209	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	95	100
210	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100	100
211	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100	100
212	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100	100
213	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	95	100
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
AA.	1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	81,47	82,29
2	Iklim Keamanan SMP	Nilai	64,38	67,38
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	98.08	98.10

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4	Iklim Inklusifitas	Nilai	53,62	58,42
5	Kemampuan literasi (SD)	Nilai	52.84	57.84
6	Kemampuan numerasi (SD)	Nilai	49.28	55.08
7	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	81,47	82,29
8	Iklim Keamanan	Nilai	69.53	71.33
9	Jumlah PTK bersertifikat pendidik (SD)	Orang	3186	3250
10	Iklim Kebinekaan	Nilai	67,24	69,24
11	Jumlah PTK bersertifikat pendidik (SMP)	Orang	1101	1123
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	100	100
AB	1.02 – URUSAN PEMERITAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	49	12
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	49	12
AC	1.03 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,58	95,78
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	40	50
3	Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan tata ruang	Persentase	6.7	30
4	Persentase Jalan Mantap	Persentase	50.15	54.15
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan peipaan dan bukan jaringan peipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	63,68	68,09
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	Persentase	49.03	50.97
AD	1.04 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	11,64	46,66
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	10.28	40.18
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	16,67	73,34
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	8,34	37,78
AE	1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai dengan waktu	%	89.13	9100
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	60	67.89
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	19,7	22,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	6.14	10.00
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	92.32	95.00
AF	1.06 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase PPKS yang Tertangani	%	100	100
AG	2.07 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	70	1
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	24658234,228	24958234,23
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	24,658,234.23	24,958,234.23
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	56	58

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
AH	2.08 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	9.33	10
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
3	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
AI	2.09 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Nilai PPH	Nilai	71	72,70
2	Penyediaan cadangan pangan pemerintah	%	2	2
AJ	2.11 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	80,14	85
AK	2.13 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	%	100	100
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100
3	Persentase Fasilitas, Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100
AL	2.14 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	8.3	10.7
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.13	2
AM	2.17 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	12,78	17
AN	2.21 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Pamekasan

Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	3	3
AO	2.22 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	15	15
2	Angka partisipasi kasar (SD)	%	103.56	103.58
AP	3.25 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.498.561	2.523.609
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	115.220	123.316
AQ	3.26 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Prosentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	%	24	30
AR	4.01 – SEKRETARIAT DAERAH			
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,13	92,17
2	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	18,35	19
3	Skor Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa	Skor	13,33	14
4	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor	35,56	38,15
AS	5.02 KEUANGAN			
1	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	98,20	100
AT	5.04 – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,16 (2023)	22.5
AU	5.05 – PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100
AV	6.01 – INSPEKTORAT DAERAH			
1	Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM	Perangkat at Daerah	0	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK tahun N-1	%	93,23	96
AW	7.01 KECAMATAN			
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
2	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	97	100
3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	97	100
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
6	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	100	100
8	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
9	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	100	100
10	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	99,83	100
11	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
12	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100
13	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	100	100



Data target pembangunan sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1 di atas merupakan acuan bagi perangkat Daerah untuk menyusun target Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.



BAB VII

PENUTUP

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan pijakan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pamekasan selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan

juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat terwujud secara optimal. Sebagai upaya menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah (PD) serta pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan peran serta dunia usaha.
2. RKPD Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
3. Bilamana dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2026, terdapat peningkatan pendapatan, maka peruntukan belanjanya tetap difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas program, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026.


BUPATI PAMEKASAN,
KHOLILURRAHMAN

CAPAIAN SDGS

Tujuan 1: TANPA KEMISKINAN							
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	0.18	0.18	0.18	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	13.85	13.41	13.41	
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	13.85	13.41	13.41	
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	DINSOS	KPM	47833	47833	48333	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persen	86.64	86.64	98.90%	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISKOP	persen	0.99	0.99	0.99	
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	DINSOS	orang (Bantuan Pangan)	111494	111494	111234	
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS	N/A	0	0	0	
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	4.25	4.5	3.06	
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	BPBD	Persen	0.12	0.15		
1.5.3	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030	BPBD	Persen	25	50	50	
1.5.4	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BPBD	Kabupaten	1	1	1	
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPERIDA	persen	18.36	21.56	21.56	
1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKPD	persen	48.81	48.81	39.80	
Target 1.5 Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor- sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.						
Tujuan 2: TANPA KELAPARAN							
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DKPP	kkal/kap/h r	1787.6	1787.6	1789	
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DKPP	desa	4	4	4	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	persen	6.44	6.44	3.18	
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES	Persen	22.51	22.51	3.1	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	DKPP	skor	71.7	71.7	71.2	
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINKES	persen	11.9	11.9	17.8	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.3.1	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	DKPP	N/A	0	0	0	tdk ada
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	DKPP	N/A	0	0	0	tdk ada
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	DKPP	N/A	0	0	0	tdk ada
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	DKPP	Ha	24000	24000	24000	
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKPP	Ha	24000	24000	24000	
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	DKPP	Ekor	195898	195898	180077	
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	DKPP	Ekor	195898	195898	180077	
2.5.2	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.	DKPP	Populasi/E kor	195898	195898	180077	
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.a.1	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DKPP	N/A	0	0	0	
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	DKPP	Kelompok Tani	422	422	422	
Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.b.1	Subsidi ekspor pertanian.	DKPP	N/A	0	0	0	

Target 2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	DKPP	N/A	0	0	0	
Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per Seratus Ribu	244.42	244.42	82.67	
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINKES	persen	13.59	13.59	88.4	
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.2.1	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4.32	4.32	4.7	
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4.32	4.32	4.4	
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.3.1	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	DINKES	orang	87	87	74.5	
3.3.2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Per 100.000 Penduduk	21.4	21.4	181.870177	
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES	orang	0	0	0	Capaian Nol
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINKES	kabupaten	1	1	1	
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	DINKES	orang	0	0	0.34	Yang terdata hanya ibu hamil dan balta
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	DINKES	orang	160	160	177	
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	DINKES	kabupaten	0	0	0	Capaian Nol
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	DINKES	kabupaten	1	1	1	
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	DINKES	orang	0	0	662	Data Profilkes
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	BPS	N/A	0	0	0	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	orang	119926	119926	234372	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES	N/A	0	0	592,144	Data PTM Sipptimewa
3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINKES	N/A	0	0	0	Tidak ada data
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	DINKES	orang	315	315	0	Tidak ada data, kegiatan hanya penyuluhan saja
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	DINKES	orang	315	315	0	Tidak ada data, kegiatan hanya penyuluhan saja
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	DINKES	orang	315	315	0	Tidak ada data, kegiatan hanya penyuluhan saja
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINKES	N/A	0	0	0	
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	BPS	orang	99	99	0	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	DP3AP2KB	orang	106801	106801	131192	
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	DP3AP2KB	peserta	106801	106801	131192	
3.7.2	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	DP3AP2KB	Rate	34.9	34.9	30.2	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DP3AP2KB	Rate	2.14	2.14	2.13	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES	Orang	13986	13986	14518	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	DINKES	persen	82	82	139.9	
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	DINKES	N/A	0	0	0	
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	DINKES	N/A	0	0	0	
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	N/A	0	0	0	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES	persen	86.64	86.64	98.90%	
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.						
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.						
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	DINKES	N/A	0	0	0	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES	N/A	0	0	0	
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	DINKES	Persen	87.2	87.2	83.7	

3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	DINKES	N/A	0	0	0	
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	DINKES	Persen	100	100	100	
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	Per 100.000 penduduk (Dokter umum dan Spesialis)	32.2	32.2	43.97	
Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
3.d.1	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	DINKES	kasus	1	1	1	
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba- resisten terpilih/tertentu.	DINKES	persen orang terduga TBC	1.49	1.49	1.79	
Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	DISDIKBUD	Siswa	16445	16444	15349	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	DISDIKBUD	Siswa	27705	27705	0	
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	DISKOP	%	-	80	80	
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISKOP	%	-	16	16	
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISKOP	%	-	16	16	

Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	DISDIKBUD	persen (APM SD)	97.27	97.27	98.11	
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/ mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DISDIKBUD	persen	87.5	87.5	87.5	
Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.						
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	DISDIKBUD	Sekolah SD/ SMP	656	656	656	
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.b.1	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	DISDIKBUD	N/A	0	0	0	
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	DISDIKBUD	persen	34.21	34.21	55.07	
Tujuan 5: KESETARAAN GENDER							
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.1.1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	DP3AP2KB	Produk hukum	1	1	1	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	orang	12	12	11	
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	N/A	0	0	0	
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	N/A	0	0	0	
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	DP3AP2KB	N/A	0	0	0	
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	persen	4.4	4.4	0	
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	BAKESBANGPOL	%	4.4	4.4	2.2	
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM	N/A	0	0	0	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.6.1	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	DP3AP2KB	Orang	106801	170049	131192	
5.6.2	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DP3AP2KB	Regulasi	1	1	1	
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.a.1	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.						
5.a.2	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.						
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	N/A	0	0	0	
Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

6.1.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	DPRKP	persen	66.09	100	84.92	
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	DPRKP	persen	94.94	100	95.67	
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman.	DLH	- limbah padat = kg - limbah cair = m3	134.285 (limbah padat & cair)	- Padat = 151.187,69 kg - Cair = 45.734,95 m3	- Padat = 151.187,69 kg - Cair = 45.734,95 m3	Data Limbah Fasyankes
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	DLH	%	100%	100%	100%	Data Limbah Fasyankes
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	DLH	Indeks	50	56.32	49.05	Data IKA
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.	DLH	Indeks	50	56.32	49.05	Data IKA
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.						
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.						
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	PUPR	Liter/hari	74	82	82	
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.						
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).						
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.						
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.						
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.						
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
Target 6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
6.a.1.	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.						
Target 6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.						
Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
7.1.1	Rasio elektrifikasi.						
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.						
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.						
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.						
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.						
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
7.2.1	Bauran energi terbarukan.						
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
7.3.1	Intensitas energi primer.						
Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.						
Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
7.b.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita).						
Tujuan 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.						
8.1.1.(a)	PDB per kapita.						
8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.						
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.						
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.						
Target 8.3 Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	persen	9.8	9.8	0	
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	DISKOP	persen	1.2	1.2	3.8	
Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengaruh.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.						
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.	DKPP	Skor	71.7	71.7	71.2	
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja.						
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	persen	3.2	3.2	0	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	persen	56.08	56.08	0	
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.6.1	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DISKOP	persen	100	100	80	
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	DISKOP	persen	0	0	0	
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	DISKOP	persen	0	0	0	
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DISKOP	persen	0	0	0	
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.						
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPORAPAR	persen	0.04	0.04	0.0477 %	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPORAPAR	orang	972	800	795	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPORAPAR	orang	151.875	198118	184.111	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPORAPAR	N/A	0	0	0	
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade- Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.						
Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	DISKOP	N/A	-	-	-	
Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	PEMDES	N/A	0	0	0	
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.						
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.						
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.						
9.1.2	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	DISHUB	orang	15569	16500	52205	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.						
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.						
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.						
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.						
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DPMPPTSP	N/A	0	0	0	
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DISPERINDAG	persen	6.5	6.5	0	
9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS	N/A	0	0	0	
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.4.1	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung g emisi GRK u/ sektor Industri
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung g penurunan GRK sektor industri
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung g intensitas emisi sektor industri
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.						
9.5.2	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk						
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)						
Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.							

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.						
Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.						
9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	BPS	N/A	0	0	0	
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	persen	100	100	100	
Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.1.1	Rasio Gini.						
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	PEMDES	Desa	0	0	0	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	PEMDES	desa	21	24	24	
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	PEMDES	Kabupaten	0	0	0	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.						
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.						
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.						
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.						
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.						
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	DINSOS	persen	89.64	89.64	89.64	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISKOP	persen	0.99	0.99	0.99	
10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.						
Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

10.5.1	Financial Soundness Indicator.						
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.						
Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.						
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.						
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.						
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	DISKOP	N/A	-	-	-	
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	DISKOP	N/A	-	-	-	
10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.						
10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.						
Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.						
Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).						
Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.						
Tujuan 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.						
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DPRKP	persen	96.79	100	98.41	
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.						
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.						
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.						
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.						
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.						
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP).	DISDIKBUD	Cagar Budaya	15	15	0	
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).						
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.						
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.						
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	DLH	N/A	0	0	0	Menghitung total data pengelolaan sampah kabupaten, u/ yg perkotaan saja tdk menghitung
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10.						Tidak menghitung
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	DLH	Indeks	85.53	84.44	93.41	Data IKU
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.						
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.	DLH	Ha	41.1	24.24	69.02	
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).						
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.						
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.						
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.b.1	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030.	BPBD	Dokumen	1	1	1	
11.b.2	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BPBD	kabupaten	1	1	1	
Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
11.c.1	-						
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	DPRKP	persen	100	100	100	Perda No 19 tahun 2019
Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Target 12.1 Melaksanakan the 10- Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.1.1	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	DKPP	Skor	71.7	71.7	71.2	
Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.2.1	Jejak material (material footprint).						
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.3.1	(a)?? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index).						
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.						
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.4.1	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.						
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.						
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.						
12.4.2	(a)?? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	DLH	- limbah padat = kg - limbah cair = m3	a. 134,285 (limbah padat & cair) b. 100%	a. - Padat = 151.187,69 kg - Cair = 45.734,95 b. 100%	a. - Padat = 151.187,69 kg - Cair = 45.734,95 b. 100%	Data Limbah Fasyankes
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.						

12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	DLH	Ton	15,186.63	14,610.82	14,610.82	Sampah yg didaur ulang
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.7.1	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi.						
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.						
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa.						
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	DLH	Sekolah	83	86	86	Jumlah Sekolah Adiwiyata
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.						
Target 12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.a.1	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita).						
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata berkelanjutan.						
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.	DISPORAPAR	Destinasi	3	3	3	
Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
12.c.1	(a)?? Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b)? Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.						
Tujuan 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
13.1.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.						
13.1.2	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster RiskReduction 2015?2030.						

13.1.3	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.						
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
13.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
13.2.2	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	DLH	N/A	0	0	0	Tidak menghitung
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Ton CO2EQ	16,296.76	85,617.32	85,617.32	
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).						
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	DLH	Sekolah	83	86	86	Jumlah Sekolah Adiwiyata
Target 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD hingga tahun 2025.						
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.						
Target 13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan nationally determined contributions, strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications.						
Tujuan 14: EKOSISTEM LAUTAN							
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.1.1	(a)?? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)?? kepadatan sampah plastik terapung.						
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.						
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.2.1	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.						
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.						
Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.						

Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	PERIKANAN	Ton	20702.38	20651.65	24985.61	
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	BPS	N/A	0	0	0	
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.6.1.	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing).						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DPMPTSP	N/A	0	0	0	
Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).						
Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.						
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.b.1	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	PERIKANAN	regulasi	0	0	0	
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	BPS	Kabupaten	1	1	0	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	PERIKANAN	Nelayan	300	300	372	
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari ?The future we want?							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
14.c.1	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	BPS	N/A	0	0	0	
Tujuan 15: EKOSISTEM DARATAN							
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.1.1	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.						
15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.						
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).						
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

15.2.1	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari.						
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.						
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.						
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.						
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.						
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.5.1	Indeks Daftar Merah (Red-list index).						
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.6.1	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.						
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal.						
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.						
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.8.1	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).						
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.9.1	(a)?? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b)?? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi.						
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.						
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.a.1	(a)?? Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b)?? pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.						
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.						
Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

15.b.1	(a)?? Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b)?? pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.						
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.						
Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.						
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.						
Tujuan 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.						
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.						
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						
16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan peniksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.						
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
16.10.2	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.						
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif						
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.						
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.						
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.						
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)

16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.						
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi						
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.						
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.						
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.						
16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.						
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)						
Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).						
16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.						
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT	persen	83.91	83.91	89.58	Final
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.						
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKPD	persen	61.81	61.81	93.18	
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	INSPEKTORAT	persen	100	100	100	Final
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B,Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	INSPEKTORAT	persen	100	100	100	Final
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B,Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.	SEKDA	Nilai	64.5	64.5	79.41	Final
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.						
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	SEKDA	Instansi	0	0	0	
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	persen	4.4	4.4	2.2	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Orang	2	2	0	
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi						
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan						

16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan						
Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.						
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.						
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	CAPIL	N/A	0	0	0	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	CAPIL	N/A	0	0	0	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	CAPIL	persen	92.14	92.14	95.92	
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
Target 16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.a.1	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.						
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD	persen	12.49	12.49	0	
17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						
Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.						
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB						
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.						
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	DPMPSTP	N/A	0	0	0	

Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan jangka panjang melalui kebijakan- kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.4.1	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.						
Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang.						
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	DISKOMINFO	persen	100	100	100	
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	DISKOMINFO	persen	100	100	100	
Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.7.1	Total jumlah dana untuk negara- negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.						
Target 17.8 Mengoperasionalsasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.8.1	Persentase pengguna internet						
Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.						
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	SEKDA	Kerjasama	26	26	0	
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular						
Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).						
17.10.1(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	BPS	N/A	0	0	0	
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.						
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	N/A	0	0	0	
Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.							

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.						
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.13.1	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.						
Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan						
Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.						
Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.						
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	SEKDA	N/A	0	0	0	
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	SEKDA	N/A	0	0	0	
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs						
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						
17.18.2	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.						
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.						
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	(Baseline) 2023 (7)	Target SDGs Tahun 2024 (8)	Capaian SDGs Tahun 2024 (9)	Status (10)
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.						
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai						

17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.						
17.19.2	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.						
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	CAPIL	Data Register	24	24	24	

FORM KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN RKPD TAHUN 2026

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	82,00	506.495.014.812,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Skala	82,00	487.101.935.899,00	19.393.078.913,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	108,00	252.666.249.376,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	108,00	114.498.086.000,00	138.168.163.376,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	98,00			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	98,00				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,00			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,00				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	168,00			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	168,00				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	162.581.386,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00		162.581.386,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang Pendidikan SMP	Guru/Murid	11,00	1.508.104.934,00	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang Pendidikan SMP	Guru/Murid	11,00	20.000.000,00	1.488.104.934,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang Pendidikan SD	Guru/Murid	12,00			Rasio Guru terhadap Murid pada jenjang Pendidikan SD	Guru/Murid	12,00				
		Persentase Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	429,00			Persentase Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	429,00				
		Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	1.904,00			Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	1.904,00				
		Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	880,00			Persentase Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	880,00				
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Sekolah/orang	72,00	292.646.494,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		72,00	20.000.000,00	272.646.494,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	90,00	81.290.693,00	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah		90,00		81.290.693,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah					761.205.887.695,00					601.640.021.899,00	159.565.865.796,00		
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	100,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	100,00	72.147.164.308,00	-72.147.164.308,00		DINAS KESEHATAN
			Nilai				Nilai SAKIP	Nilai	90,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	0,09	100.392.810.950,00	-100.392.810.950,00	Target tidak ada pada RJMD	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	90,00				
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00				
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00				
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00				

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Dokter per 100.000 penduduk	Rasio	30,00	1.415.473.599,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Dokter per 100.000 penduduk	Rasio	30,00	2.248.293.000,00	-832.819.401,00		DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	9,00			Rasio Tenaga Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	9,00				
		Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Rasio	105,00			Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Rasio	105,00				
		Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Rasio	164,00			Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Rasio	164,00				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase perizinan urusan kesehatan yang diterbitkan	Persen	97,00	724.866.740,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase perizinan urusan kesehatan yang diterbitkan	Persen	97,00	747.915.050,00	-23.048.310,00		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif	Persen	100,00	897.201.957,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif	Persen	100,00	472.592.000,00	424.609.957,00		DINAS KESEHATAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100,00	168.282.171.640,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	100,00	191.016.354.682,00	(22.734.183.042,00)		RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO
							Nilai Sakip	Nilai	95,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100,00	32.553.964.447,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100,00	3.000.000.000,00	29.553.964.447,00		RSUD DR.H.SLAMET MARTODIRDJO
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persen	90,00	13.035.395.694,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	90,00	22.266.277.692,00	(9.230.881.998,00)		RSUD WARU
							Nilai SAKIP	Nilai	85,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100,00	3.856.126.877,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	Persen	100,00	2.000.000.000,00	1.856.126.877,00		RSUD WARU
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase keberadaan Tenaga Kesehatan dan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100,00	3.435.781.387,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase keberadaan Tenaga Kesehatan dan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100,00	2.286.600.000,00	1.149.181.387,00		RSUD WARU
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90,00	3.927.865.604,00	-3.927.865.604,00		PUSKESMAS PROPO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	947.076.033,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	812.763.000,00	134.313.033,00		PUSKESMAS PROPO
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	9.273.770,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	7.254.000,00	2.019.770,00		PUSKESMAS PROPO
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	76,00	3.919.300.000,00	-3.919.300.000,00		PUSKESMAS PANAGUAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.055.060.887,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	640.638.640,00	414.422.247,00		PUSKESMAS PANAGUAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	85,00	62.666.050,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	85,00	14.961.000,00	47.705.050,00		PUSKESMAS PANAGUAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Persentas e			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Persentase	99,00	3.500.000.000,00	-3.500.000.000,00		PUSKESMAS TLANAKAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	93,00	1.970.083.030,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	93,00	635.065.000,00	1.335.018.030,00		PUSKESMAS TLANAKAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	111.830.757,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	8.314.000,00	103.516.757,00		PUSKESMAS TLANAKAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	95,00	2.380.461.968,00	-2.380.461.968,00		PUSKESMAS BANDARAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	94,00	1.007.467.108,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	94,00	617.527.000,00	389.940.108,00		PUSKESMAS BANDARAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	72.965.080,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	9.878.000,00	#REF!		PUSKESMAS BANDARAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100,00	3.300.500.000,00	-3.300.500.000,00		PUSKESMAS PADEMAWU
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.822.838.206,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	608.643.000,00	1.214.195.206,00		PUSKESMAS PADEMAWU
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	77.424.291,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	11.639.000,00	65.785.291,00		PUSKESMAS PADEMAWU
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	97,00	3.076.000.000,00	-3.076.000.000,00		PUSKESMAS SOPAAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	95,00	197.647.482,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95,00	652.868.000,00	-455.220.518,00		PUSKESMAS SOPAAH
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	41.141.625,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	3.013.000,00	38.128.625,00		PUSKESMAS SOPAAH
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	96,00	2.185.500.000,00	-2.185.500.000,00		PUSKESMAS TEJA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	95,00	1.156.289.844,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95,00	639.540.000,00	516.749.844,00		PUSKESMAS TEJA
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	99,00	28.646.557,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	99,00	3.250.000,00	25.396.557,00		PUSKESMAS TEJA
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100,00	2.324.800.000,00	-2.324.800.000,00		PUSKESMAS KOWEL
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.156.233.042,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	822.994.000,00	333.239.042,00		PUSKESMAS KOWEL

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	23.322.669,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	14.000.000,00	9.322.669,00		PUSKESMAS KOWEL
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	77,00	3.234.377.172,00	-3.234.377.172,00		PUSKESMAS LARANGAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.847.188.929,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	2.383.994.000,00	-536.805.071,00		PUSKESMAS LARANGAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	2.111.573.457,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	11.250.000,00	2.100.323.457,00		PUSKESMAS LARANGAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85,00	1.816.160.000,00	-1.816.160.000,00		PUSKESMAS TALANG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	92,00	834.668.097,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	92,00	543.268.000,00	291.400.097,00		PUSKESMAS TALANG
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	92,00	20.512.351,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	92,00	1.228.000,00	19.284.351,00		PUSKESMAS TALANG
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	98,00	2.855.500.000,00	-2.855.500.000,00		PUSKESMAS GALIS
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	91,00	1.047.397.601,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	91,00	527.746.000,00	519.651.601,00		PUSKESMAS GALIS
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	86,00	23.159.192,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	86,00	39.100.000,00	-15.940.808,00		PUSKESMAS GALIS
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90,00	4.236.481.665,00	-4.236.481.665,00		PUSKESMAS KADUR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	99,00	1.160.636.285,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	99,00	534.859.000,00	625.777.285,00		PUSKESMAS KADUR
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	90,00	99.775.251,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	3.798.000,00	95.977.251,00		PUSKESMAS KADUR
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	100,00	3.613.000.000,00	-3.613.000.000,00		PUSKESMAS PAKONG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	98,00	1.116.712.633,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	98,00	804.049.000,00	312.663.633,00		PUSKESMAS PAKONG
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	13.758.886,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	7.800.000,00	5.958.886,00		PUSKESMAS PAKONG

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85,00	4.072.510.000,00	-4.072.510.000,00		PUSKESMAS PEGANTENAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.180.930.110,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	700.598.000,00	480.332.110,00		PUSKESMAS PEGANTENAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	85,00	45.555.494,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	85,00	23.875.000,00	21.680.494,00		PUSKESMAS PEGANTENAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	98,00	1.900.000.000,00	-1.900.000.000,00		PUSKESMAS BULANGAN HAJI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	1.140.467.844,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	757.026.000,00	383.441.844,00		PUSKESMAS BULANGAN HAJI
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	90,00	62.968.119,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	5.644.000,00	57.324.119,00		PUSKESMAS BULANGAN HAJI
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90,00	4.630.800.000,00	-4.630.800.000,00		PUSKESMAS PALENGAAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	90,00	514.870.065,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	499.770.000,00	15.100.065,00		PUSKESMAS PALENGAAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	100,00	103.648.720,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	11.136.000,00	92.512.720,00		PUSKESMAS PALENGAAN
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	95,00	2.705.280.000,00	-2.705.280.000,00		PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	90,00	1.057.870.901,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	606.806.000,00	451.064.901,00		PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	95,00	49.651.542,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95,00	5.342.000,00	44.309.542,00		PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	93,00	3.801.264.612,00	-3.801.264.612,00		PUSKESMAS WARU
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	99,00	1.646.021.940,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	99,00	677.348.000,00	968.673.940,00		PUSKESMAS WARU
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentas e	98,00	67.161.659,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	98,00	2.975.000,00	64.186.659,00		PUSKESMAS WARU
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90,00	2.679.200.000,00	-2.679.200.000,00		PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	1.481.907.904,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	1.019.325.000,00	462.582.904,00		PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	48.672.662,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	100,00	8.371.000,00	40.301.662,00		PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	90,00	6.413.349.120,00	-6.413.349.120,00		PUSKESMAS BATUMARMAR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	1.496.206.273,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	90,00	958.194.000,00	538.012.273,00		PUSKESMAS BATUMARMAR
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	94,00	62.529.820,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	94,00	1.884.000,00	60.645.820,00		PUSKESMAS BATUMARMAR
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Pasien)	Skor	85,00	3.796.834.559,00	-3.796.834.559,00		PUSKESMAS PASEAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	97,00	1.108.492.454,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerja puskesmas	Persentase	97,00	640.890.000,00	467.602.454,00		PUSKESMAS PASEAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase		37.845.695,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan aktif di wilayah kerja puskesmas	Persentase	95,00	5.935.000,00	31.910.695,00		PUSKESMAS PASEAN
Jumlah					252.321.132.656,00					483.231.751.022,00	(230.910.618.366,00)		
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,75	9.584.409.454,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,00	8.436.943.248,00	1.147.466.206,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	40,00	13.259.064.463,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	40,00	1.100.000.000,00	12.159.064.463,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	34,00			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	34,00				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,34			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,00				

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	68,09	40.302.837.053,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	68,00	275.000.000,00	40.027.837.053,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas daya tampung TPA, TPS3R, dan TPS	Ton	300,73	2.481.581.237,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas daya tampung TPA, TPS3R, dan TPS	Ton	301,00	1.910.000.000,00	571.581.237,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,78	13.480.048.870,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96,00	8.161.871.000,00	5.318.177.870,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	1.005	53.720.257.208,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	1.005	1.150.000.000,00	52.570.257.208,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	%	100,00	2.098.440.771,00						2.098.440.771,00		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	%	33,34	5.735.071.533,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	%	33,00	100.000.000,00	5.635.071.533,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	%	33,34	2.167.751.809,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik	%	33,00	50.000.000,00	2.117.751.809,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85,14	36.830.734.619,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85,00	6.000.000.000,00	30.830.734.619,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%				Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	85,00				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	2.567.628.356,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	450.000.000,00	2.117.628.356,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96,33	552.461.019,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96,00	225.000.000,00	327.461.019,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00			Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00				
Jumlah					182.780.286.392,00					27.858.814.248,00	154.921.472.144,00		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%		5.588.570.450,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	5.708.847.566,00	-120.277.116,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00				
							Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00				
							Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	100,00				
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	44,45	420.922.681,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	44,00	1.000.000.000,00	-579.077.319,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	44,46			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	44,00				
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	40,00	8.092.020.301,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	40,00	70.000.000,00	8.022.020.301,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,06	4.735.380.165,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,00	250.000.000,00	4.485.380.165,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	27,78	78.923.003,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	28,00	50.000.000,00	28.923.003,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah					18.915.816.600,00					7.078.847.566,00	11.836.969.034,00		
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	81,00	9.198.068.019,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Skala	81,00	8.388.128.592,00	809.939.427,00	hanya 1 indikator pada RPJMD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	Persentase	65,00	3.292.485.712,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	Persentase	85,00	2.181.917.312,00	1.110.568.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Persentase				Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	Persentase	89,00				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100,00	1.023.403.521,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100,00	215.000.000,00	808.403.521,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00				
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,00	2.315.965.153,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,00	3.182.749.963,00	-866.784.810,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95,00	1.435.127.358,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95,00	769.999.995,00	665.127.363,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	10,00			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	10,00				
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	22,00			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	22,00				
Jumlah					17.265.049.763,00				14.737.795.862,00	2.527.253.901,00			
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	82,00	4.792.717.652,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE SAKIP OPD	Skala	82,00	4.427.487.549,00	365.230.103,00		DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS aktif dalam kegiatan sosial	%	100,00	172.578.299,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS aktif dalam kegiatan sosial	%	100,00	68.000.000,00	104.578.299,00		DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60,00	7.024.147.245,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60,00	6.642.239.800,00	381.907.445,00		DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	Persentas e	55,00	24.575.347.346,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	Persentase	55,00	16.101.288.000,00	8.474.059.346,00		DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentas e	100,00	252.553.609,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase	100,00	61.000.000,00	191.553.609,00		DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Persentas e	100,00	184.153.673,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Persentase	100,00	45.000.000,00	139.153.673,00		DINAS SOSIAL
Jumlah					37.001.497.824,00					27.345.015.349,00	9.656.482.475,00		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentas e	60,00	105.230.670,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	60,00		105.230.670,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentas e	40,00	2.171.727.363,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	40,00	400.000.000,00	1.771.727.363,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentas e	80,00	436.707.282,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase	80,00	175.373.075,00	261.334.207,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentas e	70,00	175.735.219,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	70,00	220.200.000,00	-44.464.781,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
Jumlah					2.889.400.534,00					795.573.075,00	2.093.827.459,00		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	90,00	3.814.904.541,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE Sakip	Skala	90,00	3.771.713.972,00	43.190.569,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	25,00	105.230.670,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	25,00	30.000.000,00	75.230.670,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase		203.346.800,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase	0,00	158.630.000,00	44.716.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	701,00	52.615.335,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	701,00	15.000.000,00	37.615.335,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persentase	4,00	328.748.927,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persentase	4,00	72.097.000,00	256.651.927,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah					4.504.846.273,00					4.047.440.972,00	457.405.301,00		
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	%	1,00	1.683.690.725,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	%	1,00		1.683.690.725,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai PPH	poin	72,70	2.120.398.007,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai PPH	poin	73,00	140.000.000,00	1.980.398.007,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	Desa/kelurahan	2,00	594.553.287,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	Desa/kelurahan	2,00	60.000.000,00	534.553.287,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	4,00	263.076.676,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	4,00	10.000.000,00	253.076.676,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jumlah					4.661.718.695,00					210.000.000,00	4.451.718.695,00		
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	100,00	2.209.844.077,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	100,00	50.000.000,00	2.159.844.077,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah					2.209.844.077,00					50.000.000,00	2.159.844.077,00		
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	82,78	5.315.335.854,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	0,00	9.473.935.350,00	-4.158.599.496,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase	100,00	379.356.567,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase	100,00	150.000.000,00	229.356.567,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN	Persentase	100,00	1.176.005.356,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN	Persentase	100,00	368.500.000,00	807.505.356,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO Tutupan Lahan	point	0,00	2.125.659.541,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO Tutupan Lahan	point	0,00	1.300.000.000,00	825.659.541,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha penyimpanan sementara limbah B3 berizin	Persentase		64.291.730,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha penyimpanan sementara limbah B3 berizin	Persentase	27,00	25.000.000,00	39.291.730,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	100,00	90.906.671,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	100,00	40.000.000,00	50.906.671,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lembaga	10,00	27.096.898,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lembaga	10,00	15.000.000,00	12.096.898,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok/lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah	kelompok/ lembaga	15,00	149.683.262,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok/lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah	kelompok/lembaga	15,00	120.000.000,00	29.683.262,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	Persentase	100,00	27.096.898,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani	Persentase	100,00	12.000.000,00	15.096.898,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	Persentase	100,00	4.335.291.052,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	Persentase	100,00	3.800.000.000,00	535.291.052,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah					13.690.723.829,00					15.304.435.350,00	-1.613.711.521,00		
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	81,00	5.202.472.147,00	-5.202.472.147,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	99,45	15.784.601,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	99,00	70.000.000,00	-54.215.399,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25,75			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	26,00				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	100,00	36.830.735,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	100,00	100.500.000,00	-63.669.265,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase penerbitan akta kelahiran	%	98,00			Persentase penerbitan akta kelahiran	%	98,00				
		Persentase Penerbitan akta perceraian	%	100,00			Persentase Penerbitan akta perceraian	%	100,00				
		Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00			Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah PD/Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	5,00	57.876.869,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah PD/Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	5,00	225.286.000,00	-167.409.131,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen profil kependudukan yang dipublikasikan	%	100,00	11.575.374,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen profil kependudukan yang dipublikasikan	%	100,00	20.000.000,00	-8.424.626,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah					122.067.579,00					5.618.258.147,00	(5.496.190.568,00)		
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	88,00	4.884.405.330,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	88,00	3.463.371.939,00	1.421.033.391,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Persentase	100,00	420.922.681,00	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Persentase	100,00		420.922.681,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA YANG TERJALIN	Persentase		631.384.022,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA YANG TERJALIN	Persentase	100,00	275.000.000,00	356.384.022,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA YANG AKUNTABEL	Persentase		800.805.401,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA YANG AKUNTABEL	Persentase	100,00	2.900.000.000,00	-2.099.194.599,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	Persentas e	100,00	1.367.998.714,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	Persentase	100,00	500.000.000,00	867.998.714,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase peningkatan usaha masyarakat desa	Persentas e	100,00			Persentase peningkatan usaha masyarakat desa	Persentase	100,00				
		Jumlah											
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	1,00	342.210.140,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	1,00	411.651.500,00	-69.441.360,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80,00	4.145.510.695,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80,00	3.375.523.000,00	769.987.695,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,00	4.773.789.360,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,00	4.478.000.000,00	295.789.360,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUANGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah					9.261.510.195,00					8.265.174.500,00	996.335.695,00		
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE Sakip	Skala			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE Sakip	Skala	83,00	5.925.298.757,00	-5.925.298.757,00		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	Persentas e	4,20	8.789.648.001,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	Persentase	4,00	22.783.036.900,00	-13.993.388.899,00		DINAS PERHUBUNGAN
		Tingkat capaian rencana induk jaringan	Persentas e	42,00			Tingkat capaian rencana induk jaringan	Persentase	42,00				
		Realisasi retribusi parkir	Rupiah	4,63			Realisasi retribusi parkir	Rupiah	4,63				
Jumlah					8.789.648.001,00					28.708.335.657,00	(19.918.687.656,00)		
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	82,00	4.487.256.806	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Skala	82,00	4.999.511.756,00	#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	100,00	631.384.022,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	100,00	1.042.000.000,00	-410.615.978,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,00	3.204.894.773,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,00	3.464.850.000,00	-259.955.227,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Domaian Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,00			Domaian Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,00				
		Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,00			Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,00				
		Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,00			Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,00				
		Domain Layanan SPBE	Nilai	3,00			Domain Layanan SPBE	Nilai	3,00				
Jumlah					3.836.278.795,00					9.506.361.756,00	(5.670.082.961,00)		
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	86,00	5.305.337.073,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	86,00	5.573.243.336,00	-267.906.263,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi simpan pinjam	Unit	25,00	105.230.670,00	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi simpan pinjam	Unit	25,00	100.000.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		Jumlah Anggota koperasi simpan pinjam	Orang	300,00			Jumlah Anggota koperasi simpan pinjam	Orang	300,00				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa	Persentase	90,00	263.076.676,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa	Persentase	90,00	135.000.000,00	128.076.676,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	50,00	126.276.804,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	50,00	50.373.075,00	75.903.729,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi jasa, produsen, dan serbausaha yang dibina pengembangan usahanya	Persentase	100,00	481.714.282,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi jasa, produsen, dan serbausaha yang dibina pengembangan usahanya	Persentase	100,00	185.373.075,00	296.341.207,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Anggota Koperasi	orang/usaha	80,00	1.052.306.703,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Anggota Koperasi	orang/usaha	80,00	100.000.000,00	952.306.703,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	Persentase	100,00	1.325.906.446,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	Persentase	100,00	200.000.000,00	1.125.906.446,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	unit usaha	50,00	5.261.533.517,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	unit usaha	50,00	85.373.075,00	5.176.160.442,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		Jumlah usaha mikro baru	unit usaha	5,00			Jumlah usaha mikro baru	unit usaha	5,00				
Jumlah					13.921.382.171,00					6.429.362.561,00	7.492.019.610,00		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	82,00	5.163.530.771,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	82,00	5.023.102.481,00	140.428.290,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH KEBIJAKAN DAERAH (PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN KDH) TERKAIT KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Kebijakan	1,00	231.507.475,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH KEBIJAKAN DAERAH (PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN KDH) TERKAIT KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Kebijakan	1,00	183.000.000,00	48.507.475,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersedianya perda yang mengatur strategi promosi penanaman modal	Dokumen	1,00	105.230.670,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersedianya perda yang mengatur strategi promosi penanaman modal	Dokumen	1,00	121.900.000,00	-16.669.330,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Prosentase potensi dan peluang usaha yang dipromosikan	%	50,00			Prosentase potensi dan peluang usaha yang dipromosikan	%	50,00				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang dilaksanakan melalui OSS	Persentase	100,00	157.846.006,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang dilaksanakan melalui OSS	Persentase	100,00	98.320.000,00	59.526.006,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	%	90,00			Presentase layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	%	90,00				
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaku usaha	Persentase	2,00	412.504.228,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaku usaha	Persentase	2,00	223.026.000,00	189.478.228,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	Dokumen	5,00	42.092.268,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	Dokumen	5,00	10.000.000,00	32.092.268,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah					6.112.711.418,00					5.659.348.481,00	453.362.937,00		
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	100,00	5.353.803.219	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100,00	5.643.162.727,00	#VALUE!		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	1,00	368.625.617,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	1,00	280.000.000,00	88.625.617,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	230,00	3.788.304.132,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	230,00	1.905.487.300,00	1.882.816.832,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan	%	100,00	263.076.676,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan	%	100,00		263.076.676,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Jumlah					4.420.006.425,00					7.828.650.027,00	(3.408.643.602,00)		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100,00	301.600.585,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100,00	231.000.000,00	70.600.585,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jumlah					301.600.585,00					231.000.000,00	70.600.585,00		
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	3,00	111.123.588,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	3,00	88.000.000,00	23.123.588,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jumlah					111.123.588,00					88.000.000,00	23.123.588,00		
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	15,00	482.534.507,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	15,00	100.000.000,00	382.534.507,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	195.097.663,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	75.000.000,00	120.097.663,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dilestarikan	%	75,00	796.648.790,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dilestarikan	%	75,00	880.000.000,00	-83.351.210,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah					1.474.280.960,00					1.055.000.000,00	419.280.960,00		
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	83,00	3.273.470.328,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skala	83,00	3.948.390.100,00	-674.919.772,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	93,00	1.446.921.717,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	93,00	335.000.000,00	1.111.921.717,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)	Persen	6,00	26.307.668,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)	Persen	6,00	20.000.000,00	6.307.668,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jumlah					4.746.699.713,00					4.303.390.100,00	443.309.613,00		
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	75,00	110.492.204,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	75,00	110.000.000,00	492.204,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	71,00	26.307.668,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	71,00		26.307.668,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jumlah					136.799.872,00					110.000.000,00	26.799.872,00		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	87,65	4.433.645.247,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Skala	88,00	4.194.097.631,00	239.547.616,00		DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	21.541,26	110.492.204,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	21.541	155.000.000,00	-44.507.796,00		DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.163,70	165.212.152,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.164	240.000.000,00	-74.787.848,00		DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Persentase	100,00	21.046.134,00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Persentase	100,00	18.000.000,00	3.046.134,00		DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	67,55	78.923.003,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	68,00	65.000.000,00	13.923.003,00		DINAS PERIKANAN
		Jumlah produksi ikan olahan	Ton	5.703,31			Jumlah produksi ikan olahan	Ton	5.703				
Jumlah					4.809.318.740,00					4.672.097.631,00	137.221.109,00		
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata	Persentase	86,67	347.261.212,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata	Persentase	87,00	125.000.000,00	222.261.212,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata	Persentase	80,00	568.245.620,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata	Persentase	80,00	290.000.000,00	278.245.620,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase	30,00	110.492.204,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase	30,00	43.000.000,00	67.492.204,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Jumlah					1.025.999.036,00					458.000.000,00	567.999.036,00		
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Skala	87,00	22.342.987.378,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skala	87,00	19.870.045.895,00	2.472.941.483,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas sektor pertanian (ton/ha)	Persen	6,2	17.363.060.606,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas sektor pertanian (ton/ha)	Persen	6,00	5.258.841.056,00	12.104.219.550,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah Populasi Ternak	Persen	100,00			Peningkatan populasi ternak, produksi ternak (%)	Persen	100,00				
3.27.03						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.185.000.000,00	-5.185.000.000,00		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Persen	31.500	1.683.690.725,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Persen	31.500	150.000.000,00	1.533.690.725,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase terkendalinya bencana pertanian	Persentase	3,00	2.209.844.077,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase terkendalinya bencana pertanian	Persentase	3,00	15.000.000,00	2.194.844.077,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang sesuai standar pelayanan	Persentase	100,00	315.692.011,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang sesuai standar pelayanan	Persentase	100,00	5.000.000,00	310.692.011,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas	Persentase	100,00	1.052.306.703,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas	Persentase	100,00	377.020.000,00	675.286.703,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jumlah					44.967.581.500,00					30.860.906.951,00	14.106.674.549,00		
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase		9.768.365.643,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100,00	8.828.042.436,00	940.323.207,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				6.000.000,00	-6.000.000,00		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persentase	100,00	2.960.241.536,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persentase	100,00	210.000.000,00	2.750.241.536,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisiensi harga antar waktu	Persentase	42,00	242.030.542,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisiensi harga antar waktu	Persentase	42,00	94.000.000,00	148.030.542,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase	100,00	473.538.017,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase	100,00	40.000.000,00	433.538.017,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	45,00	405.138.081,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	45,00	140.000.000,00	265.138.081,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	Persentase	100,00	105.230.670,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	Persentase	100,00	10.000.000,00	95.230.670,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah					13.954.544.489,00					9.328.042.436,00	4.626.502.053,00		
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	30,00	12.403.768.768,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	30,00	8.480.000.000,00	3.923.768.768,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persentase	100,00			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persentase	100,00				
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	100,00	131.538.338,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	100,00		131.538.338,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	100,00	184.153.673,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	100,00	25.000.000,00	159.153.673,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah					12.719.460.779,00					8.505.000.000,00	4.214.460.779,00		
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	80,00	157.846.006,00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	%	80,00	110.000.000,00	47.846.006,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
Jumlah					157.846.006,00					110.000.000,00	47.846.006,00		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH												
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	nilai		40.788.229.381,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	90,00	27.663.586.565,00	13.124.642.816,00		SEKRETARIAT DAERAH
			0				Prosentase OPD yang memiliki nilai SAKIP A	0	100,00				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persentase	100,00	17.189.262.242,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persentase	100,00	8.028.360.324,00	9.160.901.918,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Persentase	100,00			Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Persentase	100,00				
		Persentase nota kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Persentase	100,00			Persentase nota kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Persentase	100,00				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persentase	100,00	878.933.725,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persentase	100,00	1.775.965.957,00	-897.032.232,00		SEKRETARIAT DAERAH
		persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang terlaksana	Persentase	100,00			persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang terlaksana	Persentase	100,00				
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik	Persentase	100,00			Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik	Persentase	100,00				
Jumlah					58.856.425.348,00					37.467.912.846,00	21.388.512.502,00		
04.02	SEKRETARIAT DPRD												
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	90,00	33.336.374.246,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	90,00	35.337.602.319,00	-2.001.228.073,00		SEKRETARIAT DPRD
			%				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90,00				
			%				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90,00				
			%				Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90,00				

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase promperda yang terselesaikan	%	90,00	13.739.253.614,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase promperda yang terselesaikan	%	90,00	9.199.831.650,00	4.539.421.964,00		SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90,00			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90,00				
Jumlah					47.075.627.860,00				44.537.433.969,00	2.538.193.891,00			
05.01	PERENCANAAN												
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	92,00	5.290.090.677,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	92,00	5.251.080.412,00	39.010.265,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00	1.504.798.586,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00	1.063.000.000,00	441.798.586,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00			Persentase dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00				
		Persentase pemenuhan data sesuai daftar data	Persentase	80,00			Persentase pemenuhan data sesuai daftar data	Persentase	80,00				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100,00	1.098.117.166,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100,00	1.000.000.000,00	98.117.166,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00									
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaannya sesuai pedoman dan tepat waktu	Persentase	100,00									
Jumlah					7.893.006.429,00					7.314.080.412,00	578.926.017,00		
05.02	KEUANGAN												
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,00	87.467.239.681,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83,00	45.315.626.368,00	42.151.613.313,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase dokumen keuangan daerah (KUA PPAS, KUA PPAS-P, APBD, P-APBD, dan LKPD) yang ditetapkan dan disampaikan tepat waktu	%	100,00	307.930.408.565,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase dokumen keuangan daerah (KUA PPAS, KUA PPAS-P, APBD, P-APBD, dan LKPD) yang ditetapkan dan disampaikan tepat waktu	%	100,00	306.426.036.622,00	1.504.371.943,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Rasio SILPA terhadap APBD	%	3,00			Rasio SILPA terhadap APBD	%	3,00				
		Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan terhadap APBD	%	8,00			Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan terhadap APBD	%	8,00				
		Persentase Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil yang tersalurkan sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100,00			Persentase Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil yang tersalurkan sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100,00				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan asetnya	Persentase	100,00	1.428.506.350,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan asetnya	Persentase	100,00	1.067.646.300,00	360.860.050,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	97,00	1.124.454.245,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	97,00	1.677.643.835,00	-553.189.590,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jumlah					397.950.608.841,00					354.486.953.125,00	43.463.655.716,00		
05.03	KEPEGAWAIAN												
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,00	7.547.860.267,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	86,00	6.135.278.983,00	1.412.581.284,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks dimensi kualifikasi pada perhitungan IP ASN	Indeks	13,00	1.231.198.843,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks dimensi kualifikasi pada perhitungan IP ASN	Indeks	13,00	1.045.000.000,00	186.198.843,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		Indeks dimensi kinerja pada perhitungan IP ASN	Indeks	17,00			Indeks dimensi kinerja pada perhitungan IP ASN	Indeks	17,00				
		Indeks dimensi disiplin pada perhitungan IP ASN	Indeks	5,00			Indeks dimensi disiplin pada perhitungan IP ASN	Indeks	5,00				
Jumlah					8.779.059.110,00					7.180.278.983,00	1.598.780.127,00		
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks dimensi kompetensi pada perhitungan IP ASN	Indeks	11,00	473.538.017,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks dimensi kompetensi pada perhitungan IP ASN	Indeks	11,00	450.000.000,00	23.538.017,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Jumlah					473.538.017,00					450.000.000,00	23.538.017,00		
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Inovasi Daerah	Persentase	100,00	536.676.419,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Inovasi Daerah	Persentase	100,00	370.000.000,00	166.676.419,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100,00			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi penguat Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100,00				
5.05.03						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				330.000.000,00	-330.000.000,00		
Jumlah					536.676.419,00					700.000.000,00	(163.323.581,00)		

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06.01	INSPEKTORAT DAERAH												
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89,00	5.990.627.799,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	89,00	6.244.890.408,00	-254.262.609,00		INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Persentase	85,00	1.806.355.066,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Persentase	85,00	1.953.238.900,00	-146.883.834,00		INSPEKTORAT
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan, reviu, dan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00			Persentase rekomendasi hasil pengawasan, reviu, dan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00				
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada/SK Bupati) terkait pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas yang ditetapkan	Kebijakan	1,00	3.495.673.212,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada/SK Bupati) terkait pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas yang ditetapkan	Kebijakan	1,00	1.219.711.000,00	2.275.962.212,00		INSPEKTORAT
		Tingkat capaian rencana aksi pencegahan korupsi	Persen	95,00			Tingkat capaian rencana aksi pencegahan korupsi	Persen	95,00				
		Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM	Perangkat Daerah	8,00			Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM	Perangkat Daerah	8,00				
		Persentase perangkat daerah daerah yang mendapat predikat SAKIP minimal A	Persen	80,00			Persentase perangkat daerah daerah yang mendapat predikat SAKIP minimal A	Persen	80,00				
Jumlah					11.292.656.077,00				9.417.840.308,00	1.874.815.769,00			
07.01	KECAMATAN ADMINISTRASI												
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,00	6.652.136.555,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	8.790.530.608,00	-2.138.394.053,00		KECAMATAN PAMEKASAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	5.261.534,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	25.000.000,00	-19.738.466,00		KECAMATAN PAMEKASAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	Persentase	100,00			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	107.861.437,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	40.000.000,00	67.861.437,00		KECAMATAN PAMEKASAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	134.695.258,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan keteritban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	75.000.000,00	59.695.258,00		KECAMATAN PAMEKASAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	58.770.593,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	25.000.000,00	33.770.593,00		KECAMATAN PAMEKASAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	100,00	45.770.080,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	100,00	25.000.000,00	20.770.080,00		KECAMATAN PAMEKASAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	2.184.954.895,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81,00	2.463.687.889,00	-278.732.994,00		KECAMATAN TLANAKAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	40.000.000,00	-40.000.000,00		KECAMATAN TLANAKAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	Persentase				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	8.418.454,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	40.000.000,00	-31.581.546,00		KECAMATAN TLANAKAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	18.941.521,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	90.000.000,00	-71.058.479,00		KECAMATAN TLANAKAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	8.418.454,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	40.000.000,00	-31.581.546,00		KECAMATAN TLANAKAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	100,00	8.418.454,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	100,00	40.000.000,00	-31.581.546,00		KECAMATAN TLANAKAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	2.710.572.709,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81,00	3.271.310.315,00	-560.737.606,00		KECAMATAN PROPO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	88,00	35.000.000,00	-35.000.000,00		KECAMATAN PROPO
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks	3,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	35.778.428,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	75.000.000,00	-39.221.572,00		KECAMATAN PROPO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	92,00	73.661.469,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	92,00	84.097.708,00	-10.436.239,00		KECAMATAN PROPO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	10.523.067,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	25.000.000,00	-14.476.933,00		KECAMATAN PROPO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%		21.046.134,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	50.000.000,00	-28.953.866,00		KECAMATAN PROPO
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100,00				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,00	3.239.176.717,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	3.860.352.968,00	-621.176.251,00		KECAMATAN PADEMAWU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100,00	40.000.000,00	-40.000.000,00		KECAMATAN PADEMAWU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	78.923.003,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	60.000.000,00	18.923.003,00		KECAMATAN PADEMAWU

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	94.707.603,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	75.000.000,00	19.707.603,00		KECAMATAN PADEMAWU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	31.569.201,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	30.000.000,00	1.569.201,00		KECAMATAN PADEMAWU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	47.353.802,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	35.000.000,00	12.353.802,00		KECAMATAN PADEMAWU
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	2.441.142.501,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81,00	2.399.012.202,00	42.130.299,00		KECAMATAN GALIS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	25.000.000,00	-25.000.000,00		KECAMATAN GALIS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	46.301.495,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	42.500.000,00	3.801.495,00		KECAMATAN GALIS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	47.353.802,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	65.000.000,00	-17.646.198,00		KECAMATAN GALIS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	15.784.601,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	10.000.000,00	5.784.601,00		KECAMATAN GALIS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Dibina dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya	Persentase	100,00	52.615.335,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Dibina dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya	Persentase	100,00	25.000.000,00	27.615.335,00		KECAMATAN GALIS
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	99,00	1.901.399.397,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	99,00	2.469.447.748,00	-568.048.351,00		KECAMATAN LARANGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00		KECAMATAN LARANGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	94,00	26.307.668,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	94,00	65.000.000,00	-38.692.332,00		KECAMATAN LARANGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persentase	89,00	15.784.601,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Persentase	89,00	60.000.000,00	-44.215.399,00		KECAMATAN LARANGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	94,00	15.784.601,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	94,00	20.000.000,00	-4.215.399,00		KECAMATAN LARANGAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	94,00	21.046.134,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	94,00	20.000.000,00	1.046.134,00		KECAMATAN LARANGAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	100,00	2.167.716.599,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	2.003.133.641,00	164.582.958,00		KECAMATAN PALENGAAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan.	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan.	Persentase	100,00	20.000.000,00	-20.000.000,00		KECAMATAN PALENGAAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase	100,00	31.569.201,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase	100,00	30.000.000,00	1.569.201,00		KECAMATAN PALENGAAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	63.138.402,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	83.000.000,00	-19.861.598,00		KECAMATAN PALENGAAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100,00	26.307.668	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100,00	20.000.000,00	6.307.668,00		KECAMATAN PALENGAAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kinerjanya memiliki kualitas baik	Persentase	100,00	47.353.802,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kinerjanya memiliki kualitas baik	Persentase	100,00	40.000.000,00	7.353.802,00		KECAMATAN PALENGAAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,00	2.051.937.880,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	2.852.341.107,00	-800.403.227,00		KECAMATAN PEGANTENAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	20.000.000,00	-20.000.000,00		KECAMATAN PEGANTENAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Persentase				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	14.837.858,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	30.000.000,00	-15.162.142,00		KECAMATAN PEGANTENAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	90,00	10.766.305,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	90,00	40.000.000,00	-29.233.695,00		KECAMATAN PEGANTENAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	12.635.899,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	30.000.000,00	-17.364.101,00		KECAMATAN PEGANTENAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	95,00	18.712.334,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	Persentase	95,00	20.000.000,00	-1.287.666,00		KECAMATAN PEGANTENAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,00	1.829.923.141,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Nilai	82,00	2.684.055.979,00	-854.132.838,00		KECAMATAN PAKONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	%	100,00	20.000.000,00	-20.000.000,00		KECAMATAN PAKONG
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks	4,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	10.523.067,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	Persentase	100,00	62.000.000,00	-51.476.933,00		KECAMATAN PAKONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	31.569.201,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	100,00	60.000.000,00	-28.430.799,00		KECAMATAN PAKONG

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	95,00	5.261.534,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	Persentase	95,00	10.000.000,00	-4.738.466,00		KECAMATAN PAKONG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%		41.039.961,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	50.500.000,00	-9.460.039,00		KECAMATAN PAKONG
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100,00		0,00		
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	99,00	1.665.452.547,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	99,00	1.838.373.519,00	-172.920.972,00		KECAMATAN WARU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	100,00	20.000.000,00	-20.000.000,00		KECAMATAN WARU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	29.201.511,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	26.441.000,00	2.760.511,00		KECAMATAN WARU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	99,00	178.892.140,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	99,00	55.600.000,00	123.292.140,00		KECAMATAN WARU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99,00	16.047.677,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99,00	20.000.000,00	-3.952.323,00		KECAMATAN WARU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	53.378.258,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	34.500.000,00	18.878.258,00		KECAMATAN WARU
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa		100,00			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	%	100,00				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	100,00	2.652.320.287,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persentase	100,00	2.236.089.353,00	416.230.934,00		KECAMATAN BATUMARMAR
							Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase	100,00				
							Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persentase	100,00				
							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100,00	20.000.000,00	-20.000.000,00		KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	99,00	53.141.489,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	99,00	33.000.000,00	20.141.489,00		KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	73.661.469,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	62.000.000,00	11.661.469,00		KECAMATAN BATUMARMAR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100,00	33.673.815,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	100,00	20.000.000,00	13.673.815,00		KECAMATAN BATUMARMAR

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	98.390.677,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	%	100,00	28.448.316,00	69.942.361,00		KECAMATAN BATUMARMAR
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	98,00	2.043.684.849,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	98,00	2.074.229.490,00	-30.544.641,00		KECAMATAN PASEAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	99,00	34.000.000,00	-34.000.000,00		KECAMATAN PASEAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	99,00	22.098.441,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	99,00	25.000.000,00	-2.901.559,00		KECAMATAN PASEAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	62.086.095,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	60.000.000,00	2.086.095,00		KECAMATAN PASEAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99,00	31.043.048,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persentase	99,00	30.000.000,00	1.043.048,00		KECAMATAN PASEAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	60.507.635,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	53.500.000,00	7.007.635,00		KECAMATAN PASEAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	100,00	2.128.557.934,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	2.463.179.270,00	-334.621.336,00		KECAMATAN KADUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persentase	100,00	15.500.000,00	-15.500.000,00		KECAMATAN KADUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	100,00	24.203.054,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persentase	100,00	20.000.000,00	4.203.054,00		KECAMATAN KADUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	57.876.869,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	75.000.000,00	-17.123.131,00		KECAMATAN KADUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	31.569.201,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	Persentase	100,00	12.500.000,00	19.069.201,00		KECAMATAN KADUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	47.353.802,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persentase	100,00	10.000.000,00	37.353.802,00		KECAMATAN KADUR
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	259.426.506,00	-259.426.506,00		KELURAHAN KANGENAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	3.000.000,00	-3.000.000,00		KELURAHAN KANGENAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	205.410.269,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	203.000.000,00	2.410.269,00		KELURAHAN KANGENAN

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	30.000.000,00	-8.953.866,00		KELURAHAN KANGENAN
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	278.119.654,00	-278.119.654,00		KELURAHAN PATEMON
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN PATEMON
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	122.067.578,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	210.000.000,00	-87.932.422,00		KELURAHAN PATEMON
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	20.000.000,00	1.046.134,00		KELURAHAN PATEMON
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	249.980.878,00	-249.980.878,00		KELURAHAN BUGIH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	10.000.000,00	-10.000.000,00		KELURAHAN BUGIH
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	202.884.732,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	210.000.000,00	-7.115.268,00		KELURAHAN BUGIH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	20.000.000,00	1.046.134,00		KELURAHAN BUGIH
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	321.583.674,00	-321.583.674,00		KELURAHAN JUNGCAANGCANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN JUNGCAANGCANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	129.012.802,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	205.000.000,00	-75.987.198,00		KELURAHAN JUNGCAANGCANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	10.000.000,00	11.046.134,00		KELURAHAN JUNGCAANGCANG

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	289.732.786,00	-289.732.786,00		KELURAHAN PARTEKER
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN PARTEKER
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	130.275.570,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	208.100.000,00	-77.824.430,00		KELURAHAN PARTEKER
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	9.300.000,00	11.746.134,00		KELURAHAN PARTEKER
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	245.683.379,00	-245.683.379,00		KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	163.107.539,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	216.330.000,00	-53.222.461,00		KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.000.000,00	46.134,00		KELURAHAN BARURAMBAT KOTA
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	337.626.876,00	-337.626.876,00		KELURAHAN GLADAK ANYAR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	%	100,00	7.500.000,00	-7.500.000,00		KELURAHAN GLADAK ANYAR
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	%	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	183.943.212,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	%	100,00	212.000.000,00	-28.056.788,00		KELURAHAN GLADAK ANYAR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	%	100,00	22.300.000,00	-1.253.866,00		KELURAHAN GLADAK ANYAR
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	278.663.031,00	-278.663.031,00		KELURAHAN KOLPAJUNG

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN KOLPAJUNG
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	127.750.034,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	205.000.000,00	-77.249.966,00		KELURAHAN KOLPAJUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	20.000.000,00	1.046.134,00		KELURAHAN KOLPAJUNG
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	83,00	313.883.145,00	-313.883.145,00		KELURAHAN KOWEL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kelurahan yang dikoordinasikan	Persentase	100,00	5.000.000,00	-5.000.000,00		KELURAHAN KOWEL
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kelurahan	Persentase	100,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	135.958.026,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Persentase	100,00	239.000.000,00	-103.041.974,00		KELURAHAN KOWEL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	21.046.134,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang tertangani	Persentase	100,00	20.000.000,00	1.046.134,00		KELURAHAN KOWEL
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	240.977.500,00	-240.977.500,00		KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	indeks	4,00		0,00		KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100,00	78.396.849,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100,00	208.000.000,00	-129.603.151,00		KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100,00	15.784.601,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100,00	10.000.000,00	5.784.601,00		KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	230.050.000,00	-230.050.000,00		KELURAHAN LAWANGAN DAYA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan	Indeks	4,00		0,00		KELURAHAN LAWANGAN DAYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	95,45	100,00	91.761.145,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	95,45	100,00	208.000.000,00	-116.238.855,00		KELURAHAN LAWANGAN DAYA

NO	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMD	PAGU PROGRAM RPJMD	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD	PAGU PROGRAM	SELISIH (TAMBAH/KURANG)	KETERANGAN	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100,00	15.784.601,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	%	100,00	8.000.000,00	7.784.601,00		KELURAHAN LAWANGAN DAYA
Jumlah					37.678.465.317,00					47.534.588.542,00	(9.856.123.225,00)		
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100,00	6.185.286.199,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	100,00	2.460.413.622,00	3.724.872.577,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	75,00	1.036.522.103,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	75,00	456.887.400,00	579.634.703,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase oraganisasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	90,00	4.540.703.425,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase oraganisasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	90,00	3.120.000.000,00	1.420.703.425,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase potensi konflik antar organisasi kemasyarakatan yang tertangani	%	80,00	1.367.998.714,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase potensi konflik antar organisasi kemasyarakatan yang tertangani	%	80,00	150.000.000,00	1.217.998.714,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	90,00	683.999.357,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	90,00	50.000.000,00	633.999.357,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi ATHG yang tertangani	%	85,00	1.274.343.418,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi ATHG yang tertangani	%	85,00	40.739.600,00	1.233.603.818,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jumlah					15.088.853.216,00					6.278.040.622,00	8.810.812.594,00		
JUMLAH TOTAL					2.022.045.496.972,00						2.081.812.238.620,36	185.503.372.636,00	

FORM E.35
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Kabupaten Pamekasan

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut penyempurnaan apabila tidak
		ada	tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah	√			
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.	√			
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.	√			
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.	√			
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.	√			
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.	√			
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.	√			
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	√			
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.	√			
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.	√			
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.	√			
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.	√			
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif	√			
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.	√			
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.	√			
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut penyempurnaan apabila tidak
		ada	tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.	√			
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.	√			
24.b	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.	√			
24.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.	√			
24.d	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan	√			
25	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.	√			
26	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	√			
27	Dokumen RKPD yang telah disahkan.		√		

FORM E.36
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN PAMEKASAN

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPD kabupaten/kota.	Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Arah Kebijakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yang memiliki keterkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada BAB IV Rankhir RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 (telah sesuai pada Bab IV);
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara	hanya menggambarkan program dan kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan tidak mencakup 2 wilayah kabupaten/kota (telah sesuai pada Bab IV);
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP.	7 (Tujuh) prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 serta selaras dengan prioritas dan sasaran RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada BAB 4 Rankhir RKPD Tahun 2026 (telah sesuai pada Bab IV);
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten sudah dijabarkan dalam Rankhir RKPD Tahun 2026 (telah sesuai pada Bab IV);
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	Sudah sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Ket
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	Persen	11,77	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	Persen	11,77	
		Gini Ratio	Indeks	0,289		Gini Ratio	Indeks	0,289	
1	Peningkatan Kemandirian PPKS (Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang mandiri	Persen		Peningkatan Kemandirian PPKS (Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang mandiri	Persen		
2	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,618	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,618	
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,57	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,57	
II	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,07	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,07	
1	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	
2	Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Rapor Pendidikan dan Indeks Pendidikan	Indeks	0,64	Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Rapor Pendidikan dan Indeks Pendidikan	Indeks	0,64	
III	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks		
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial	Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan	Persen	56,23	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial	Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan	Persen	56,23	
		Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	0,00		Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	0,00	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Ket
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 1000 Perempuan)	Kejadian/ 100.000 Penduduk Perempuan	8,47	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 1000 Perempuan)	Kejadian/ 100.000 Penduduk Perempuan	8,47	
		Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)	Kejadian /10.000 anak			Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)	Kejadian /10.000 anak		
IV	Terwujudnya Perekonomian Inklusif yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,84	Terwujudnya Perekonomian Inklusif yang Berdampak pada Peningkatan Pendapatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,84	
		Pendapatan per Kapita	Rp			Pendapatan per Kapita	Rp		
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Persen	30,23	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Persen	30,23	
		PDRB Sub Sektor Perdagangan	Persen	22,22		PDRB Sub Sektor Perdagangan	Persen	22,22	
		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	Persen	8,21		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	Persen	8,21	
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Rp		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Rp		
3	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kewenangan Kabupaten	V/C Ratio	Indeks		Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kewenangan Kabupaten	V/C Ratio	Indeks		
4	Peningkatan Daya Beli	Indeks PPP	Indeks		Peningkatan Daya Beli	Indeks PPP	Indeks		
V	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	88,35	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	88,35	
1	Meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,82	Meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,82	
2	Peningkatan efektivitas mitigasi struktural bencana tematik	Luasan daerah rawan banjir	Ha		Peningkatan efektivitas mitigasi struktural bencana tematik	Luasan daerah rawan banjir	Ha		
		Luasan daerah rawan kekeringan	Ha			Luasan daerah rawan kekeringan	Ha		
		Luasan abrasi dan erosi	Ha			Luasan abrasi dan erosi	Ha		
		Luasan daerah rawan longsor	Ha			Luasan daerah rawan longsor	Ha		

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				Ket
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan kualitas pelayanan kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah kabupaten			Peningkatan kualitas pelayanan kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah kabupaten			
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
VI	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,25	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Pemda	Skor	73,96	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Pemda	Skor	73,96	
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks			Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks		
2	Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	4,16	Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	4,16	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	

KESELARASAN KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen			
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		0.00	
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang			
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit			
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit		0.00	
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		81.00	
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		0.00	
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		0.00	
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		25.00	
12	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		0.40	
13	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		0.40	
14	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0.40	
15	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0.40	
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		1.00	
17	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		1.00	
18	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		1.00	
20	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen			
21	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen			
22	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			
24	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhiya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		10.00	
25	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhiya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi			
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi			
28	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			
29	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			
30	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan			
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan			
32	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	laporan		350.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	laporan		350.00	
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		0	
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		0	
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen			
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen			
38	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		0.00	
39	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
40	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		13.00	
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		13.00	
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	Orang		0.00	
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0.00	
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		23875.00	
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		23875.00	
46	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		112.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		112.00	
48	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		0	
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		0	
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		612.00	
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		612.00	
52	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
53	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang			
54	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan			
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang			
56	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga			
57	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan			
58	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	
59	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
60	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen			
61	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara			
62	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi			
63	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi			
64	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket			
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton			
67	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton			
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase			
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase			
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		48216.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		48216.00	
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton			
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton			
74	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan			
75	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan		75000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
76	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Laporan			
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan			
78	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			
79	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			
80	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		1.00	
81	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
82	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		4.00	
83	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit			
84	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen			
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok			
86	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
87	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			
88	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.00	
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.00	
90	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			
91	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			
93	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
94	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan		1.00	
95	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan		1.00	
96	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		10.00	
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		10.00	
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas	Rekomendasi		1.00	
99	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi		1.00	
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	Media		50.00	
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media		50.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
102	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan			
103	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah	Layanan			
104	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi			
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi			
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah			
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah			
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen		1.00	
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
110	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat			
111	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			
112	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha			
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang			
114	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.		15.00	
115	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan	Kegiatan Usaha		40.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
116	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang		200.00	
117	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang			
118	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang			
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang			
120	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga			
121	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan	%		34.00	
122	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%		34.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
123	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah		42.00	
124	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah		42.00	
125	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara	Dokumen		3.00	
126	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara	Dokumen		3.00	
127	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		10.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
128	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		10.00	
129	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang			
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang			
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek			
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek			
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
134	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek			
135	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			
136	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			
137	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar			
138	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar			
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
140	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang			
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar		1.00	
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	Eksemplar		1.00	
143	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1.00	
144	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna			
145	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		175.00	
146	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok		14.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
147	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit		47.00	
148	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		20.00	
149	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha			
150	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		40.00	
151	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha			
152	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi			
153	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
154	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang			
155	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi			
156	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		80.00	
158	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit			
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen			
161	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga			
162	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen			
163	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Produk			
164	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		1.00	
165	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton			
166	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
167	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha			
168	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan			
169	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen			
170	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha			
171	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		3.00	
172	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen			
173	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		2.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
174	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan	Dokumen			
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan	Dokumen			
176	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang			
177	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi		1.00	
178	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
179	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang			
180	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang			
181	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang			
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang			
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang			

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET RKPD PROVINSI	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
SASARAN PEMBANGUNAN					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80 – 5,40	4'51 - 5,35	5.6	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,81 – 9,10	12,18 - 11,79	11,77	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,84 – 4,48	1,75 - 1,50	1,618	
4	Rasio Gini	0,370 – 0,380	0,27 - 0,31	0,289	
5	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)Kumulatif	1	87338,17	0,05	

DAFTAR KESELARASAN
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1		2	3	4		5	6	7
1		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	1		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,18	
2		Kesehatan Ibu dan Anak:		2		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109		-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	95	
	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5		-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	3,63	
3	-	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	252	3		Penanganan Tuberkulosis:		
	-	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)			-	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment covarage) (%)	62	
	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)			-	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment successrate) (%)	86	
4		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,7	4		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	2	
5		Hasil Pembelajaran:		5		Hasil Pembelajaran:		
	a)	Rata-rata Nilai PISA			a)	Rata-rata Nilai PISA		
	-	Membaca	396		-	Membaca		
	-	Matematika	404		-	Matematika		
	-	Sains	416		-	Sains		
	b)	Rata-rata nilai asesmen nasional			b)	Rata-rata nilai asesmen nasional		
	-	Literasi membaca	65,89		-	Literasi membaca	54	
	-	Numerasi	58,86		-	Numerasi	48	
	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45		c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6,8	
	d)	Harapan Lama Sekolah	13,36		d)	Harapan Lama Sekolah	13,75	
6		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	34,92	6		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
7		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5	7		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	34,00	
8		Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	8		Tingkat kemiskinan (%)	11,77	
9		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	9		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	2	
10		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,4	10		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,83	
11		Produktivitas Industri dan Pertanian		11		Produktivitas Industri dan Pertanian		
	a)	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,2		a)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,8	
	b)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			b)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1		2	3	4		5	6	7
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			
	a)	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70		a)	Rasio PDB Pariwisata (%)		
	b)	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00 - 24,70		b)	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		7,40-8,00	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15		a)	Proporsi Jumlah UMKM Kabupaten/kota (%)	99,2	
	b)	Rasio kewirausahaan (%)	3,18		b)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,36	
	c)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12		c)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,99	
	d)	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26		d)	Return on Aset (ROA) BUMD	0,83	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
	a)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 - 4,96		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		1.618	
	b)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95		b)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		56,40 - 59,31	16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		66,51	
17	Tingkat penguasaan IPTEK			17	Tingkat penguasaan IPTEK			
	a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
	b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52		b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
	a)	Indeks Ekonomi Hijau	71,01		a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	3,25	
	b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20		b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		41	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			
20	Biaya Logistik (% PDB)		13,3	20	Biaya Logistik (% PDB)			
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		29,44	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)			
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		22, 7	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)			
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58		a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		
	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66		b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91		c)	Persentase Desa Mandiri (%)	13	
24	Indeks Materi Hukum			24	Indeks Materi Hukum			
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,7	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		2,98	

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1		2	3	4		5	6	7
26	Indeks Pelayanan Publik			26	Indeks Pelayanan Publik		3,91	
27	Anti Korupsi			27	Anti Korupsi			
	-	Indeks Integritas Nasional	89,17		-	Indeks Integritas Nasional		
	-	Indeks Persepsi Korupsi	40		-	Indeks Persepsi Korupsi		
28	Indeks Pembangunan Hukum		0,7	28	Indeks Pembangunan Hukum			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		68	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		147	
30	Indeks Demokrasi Indonesia		82,12 – 85,66	30	Indeks Demokrasi Indonesia		92,35	
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)			31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)			
32	Tingkat Inflasi (%)		2,50 ± 1,00	32	Tingkat Inflasi (%)		3	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a)	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51		a)	Aset Perbankan/PDB (%)		
	b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63		b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
	c)	Aset Asuransi/PDB (%)	9,3		c)	Aset Asuransi/PDB (%)		
	d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,9		d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
	e)	Total Kredit/PDB (%)	38,46		e)	Total Kredit/PDB (%)		
34	Inklusi Keuangan (%)		91,5	34	Inklusi Keuangan (%)			
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,8	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		3,62	
36	Asia Power Index (Military Capability)		17	36	Asia Power Index (Military Capability)		75,65	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		58,99	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		10,77	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		77,14	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		82,10	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		73,83	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		59	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,421	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,57	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
42	Kualitas Lingkungan Hidup		76,67	42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		62	
	a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)			a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		Indeks Kualitas Air (IKA)				Indeks Kualitas Air (IKA)		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		
	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman			b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	95,9	
	c)	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)			c)	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	68,92	

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1		2	3	4		5	6	7
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan			43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan			
	a)	Ketahanan Energi			a)	Ketahanan Energi		
	-	Indeks Ketahanan Energi	6,82		-	Indeks Ketahanan Energi		
	b)	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	6,55		b)	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)		
	c)	Ketahanan Air	3,5		c)	Ketahanan Air		
	-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	60,16		-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		
	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24		-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB			44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB			
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	a)	Kumulatif	19,07		a)	Kumulatif (%)	13	
	b)	Tahunan	27,35		b)	Tahunan (%)	0,61	

DAFTAR KESELARASAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	
					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Pelayanan Informasi Publik	
					Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Diseminasi Informasi	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Penyusunan Konten	
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
					Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
4.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
5.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
6.	Prioritas Nasional 2	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
7.	Prioritas Nasional 2	Konservasi sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
					Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
					Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Peningkatan Jaringan Irigasi	
					Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
8.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9.	Prioritas Nasional 2	Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
10.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa				
11.	Prioritas Nasional 2	Pengelolaan susut dan sisa pangan				
12.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
13.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Normalisasi/Restorasi Sungai	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
14.	Prioritas Nasional 2	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
15.	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
16.	Prioritas Nasional 2	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
17.	Prioritas Nasional 2	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya				
18.	Prioritas Nasional 3	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
19.	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
20.	Prioritas Nasional 4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
21.	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
22.	Prioritas Nasional 4	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
23.	Prioritas Nasional 4	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
24.	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
25.	Prioritas Nasional 4	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
26.	Prioritas Nasional 4	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
27.	Prioritas Nasional 4	Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	
					Pengembangan Puskesmas	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
28.	Prioritas Nasional 4	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Pengembangan Rumah Sakit	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
29.	Prioritas Nasional 4	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
30.	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi				
31.	Prioritas Nasional 4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga				
32.	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Kelapa				
33.		Hilirisasi Rumput Laut				
34.	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
35.	Prioritas Nasional 7	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026			KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

DAFTAR KESELARASAN INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Jawa Timur	1. Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output:			
		- Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis;			
		- Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;			
		- Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);			
		- Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;			
		- Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.			
		2. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.		Program Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		3. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:			
		- Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
		- SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengadaan Alat Praktik dan PeragaPeserta Didik	
		- SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pengadaan Alat Praktik dan PeragaPeserta Didik	
		- SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran			

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		4. Direktif Presiden : Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output:			
		- Peningkatan kapasitas usaha koperasi;		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Keterangan:			
		Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.			
		5. Direktif Presiden : Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari			
		6. Direktif Presiden : Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif,			
		- Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;			
		- Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan;			
		- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;			
		- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);			
		- Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih;		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
		- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan;		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		- Kartu Prakerja;			
		- Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan			
		- Alat dan mesin pertanian pra panen;	Poktan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		- Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak			
		- Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan			
		- Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan;		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
		- Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat;		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	
				Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	
		- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
		- Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan;			
		- Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).			
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output:			
		- Bantuan PBI JKN;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Ti	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Kartu Indonesia Pintar;			
		- Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		- Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako;			
		- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;			
		- Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;			
		- Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro,			

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
2	Kawasan Afirmasi Madura (D1) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep (A5) • Kab. Bangkalan • Kab. Sampang • Kab. Pamekasan • Kab. Sumenep	- Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;			
		- Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung			
		- Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung			
		- Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas,			
		- Preservasi Jalan Lintas Selatan Madura;			
		- Kawasan Aneka Cabai di Kab. Sampang;			
		- Replacement fasilitas Pelabuhan Sapudi;			
		- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung,			
		- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan di Kab. Sumenep;			
		- Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Pamekasan;	Poktan Kab.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
		- Bantuan Operasional RS Kapal di Kab. Sumenep;			
		- Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Bangkalan;			
		- Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan			
		- Kawasan Bawang Merah di Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan;		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Poktan Pamekasan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		- Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul;			
		- Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;			
		- Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima			
3	Provinsi Jawa Timur	- BMHP untuk Skrining Kesehatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		- Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur			
		- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan di			
		- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;			
		- Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		- Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan;			
		- Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang mengalami kerusakan;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
		- Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD;			
		- Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		- Pembangunan unit sekolah baru SD;			
		- Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		- Pembangunan unit sekolah baru SMP;			
		- Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan;			
		- Pembangunan unit sekolah baru SMA;			
		- Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran;			

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		- Bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan			
		- Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;			
		- Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	
				Pembinaan terhadap penerapan persyaratan Perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala usaha dan risiko	
		- Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk			
		- Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;			
		- Akreditasi lembaga halal;			
		- MoU kemitaaan jaminan produk halal;			
		- Peningkatan kapasitas SDM Iptekin;			
		- Penguatan infrastruktur Iptekin strategis;			
		- Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan			
		- Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			
		- Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP);			
		- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah;			
		- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu			
		- Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN;			
		- Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam			
		- Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK;		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Penetapan Cagar Budaya	
		- Desa pemajuan kebudayaan;			
		- Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;			
		- Penyelenggaraan event film, musik, dan seni;			
		- Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya;			

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		- Giat warisan budaya;			
		- Peningkatan kebudayaan; kompetensi SDM		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
		- Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek			
		- Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya.			